

ISBN 978-623-6879-01-6

  
BETA OFFSET

*Kumpulan Tulisan*

**BUNGA RAMPAI**

# **DINAMIKA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**

**Bertahan di tengah Pandemi Covid-19**

---

**JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

# **DINAMIKA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN: Bertahan di tengah Pandemi Covid-19**

**Editor**

Shanty Oktavilia

Fafurida

Nurjanah Rahayu Kistanti

Sri Utami

Dwi Rahmayani

**BETA OFFSET**

**Yogyakarta**



# **DINAMIKA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN: Bertahan di tengah Pandemi Covid-19**

## **Editor**

Shanty Oktavilia

Fafurida

Nurjanah Rahayu Kistanti

Sri Utami

Dwi Rahmayani

Ed. 1. Cet. 1. Oktober, 2020

x + 418 hal; 17 x 24.5 cm.

ISBN 978-623-6879-01-6

Cetakan pertama, November 2020

Hak Cipta © 2020 ada pada Penulis

Hak penerbitan ada pada Beta Offset

Dicetak dan diterbitkan Oleh:

Beta Offset Kavling Madukismo 28,

Seturan Caturtunggal Depok Sleman - Yogyakarta, 55281

Telp. (0274) 485512

E-mail: [betaoffsetyk@gmail.com](mailto:betaoffsetyk@gmail.com)



## KATA PENGANTAR

Segala puji kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan karuni-Nya sehingga Buku Dinamika Pembangunan Berkelanjutan, Kumpulan Tulisan Bunga Rampai ini berhasil diselesaikan dan disajikan sebagai literatur yang memperkaya pemikiran di bidang ekonomi, sosial dan pendidikan.

Buku ini merupakan salah satu Buku Seri Kajian Ekonomi Pembangunan dan Sosial yang diinisiasi oleh Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Negeri Semarang. Artikel ilmiah pada Buku Bunga Rampai ini merupakan hasil kerja penulis akademisi dari berbagai Universitas di Indonesia, yang dihasilkan dari kegiatan Online Workhop Penulisan Ilmiah Populer Bidang Sosial, Ekonomi dan Pendidikan. Buku ini merupakan salah satu aktualisasi dari bergagai kegiatan Tri Dharma yang dilakukan oleh penulis di tengah pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia dan dunia. Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh Penulis yang melahirkan ide gagasan untuk dituangkan dalam buku ini.

Harapan kami, pembaca dapat menikmati dan memperoleh secuil manfaat setelah membaca buku ini. Kekurangan dan ketidaksempurnaan adalah sifat alamiah manusia, demikian pula kami menyadari bahwa dalam menyusun buku ini masih terdapat kekurangan, dan bahkan kesalahan. Saran, kritik dan masukan dari pembaca, sangat kami harapkan. Semoga buku ini dapat bermanfaat, Terima kasih

Semarang, November 2020  
Tim Editor:

Shanty Oktavilia  
Fafurida  
Nurjanah Rahayu Kistanti  
Sri Utami  
Dwi Rahmayani

# EPILOG

Ilmu Ekonomi dan Bisnis, serta Pendidikan Ekonomi merupakan bagian dari Ilmu Sosial yang berkembang sangat dinamis. Apalagi ditengah gejolak global akibat pandemi Covid-19 yang berdampak ke semua sektor di semua negara. Sejak awal Maret 2020, Indonesia sebagai negara terdampak pun turut mengalami perubahan dalam segala perilaku sosial, ekonomi dan pendidikan di masyarakat. Seluruh penduduk Indonesia pun turut dipaksa untuk dapat menyesuaikan diri dengan berbagai kebiasaan baru dalam menjalani seluruh aktifitas hidupnya.

Berbagai aktifitas sosial masyarakat, ekonomi dan pendidikan nyaris berhenti dan lumpuh. Kegiatan masyarakat, keagamaan, perkumpulan dan aktifitas lainnya berhenti dan kemudian dengan terpaksa dilaksanakan dengan banyak penyesuaian dan pembatasan. Di bidang sosial kemasyarakatan, kita mendapati aktifitas masyarakat di bidang keagamaan menjadi sangat terbatas. Aktifitas peribadatan di masjid, surau, gereja, pura dan wihara sempat dihentikan dan kembali dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang dalam pelaksanaannya menyaratkan ada jarak (*physical distancing*). Bahkan pelaksanaan Ramadhan 2020 dan Lebaran 2020 menjadi sangat berbeda. Perhelatan budaya, pertunjukan seni juga menjadi terhenti dan apabila kembali harus memperhatikan *physical distancing*. Beberapa kegiatan sosial masyarakat kemudian dilaksanakan dan menyesuaikan diri dengan memanfaatkan teknologi daring, misalnya rapat, musyawarah, pengajian dan bahkan aktifitas peribadatan.

Pandemi Covid-19 yang terus mengalami eskalasi di Indonesia saat ini tidak hanya menyebabkan kontraksi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dapat meningkatkan pengangguran secara besar-besaran. Dalam beberapa bulan terakhir, gelombang PHK telah menyebar ke berbagai sektor, mulai dari manufaktur hingga jasa, seperti pariwisata, transportasi, perdagangan, dan konstruksi. Beberapa perusahaan pun hanya dapat membayar setengah dari gaji karyawannya. Pembatasan sosial untuk meredam gejolak penyebaran virus Covid-19 sudah pasti berdampak pada perekonomian. Aktifitas ekonomi pun terguncang karena langkah pembatasan sosial yang diambil, dipastikan juga berdampak pada aktifitas perekonomian masyarakat. Masyarakat yang biasa memenuhi tempat perbelanjaan, lebih memilih untuk menahan diri dan tidak berbelanja di pusat perbelanjaan yang biasanya ramai.

Hal ini berdampak pada penurunan permintaan pada sektor produksi, disamping kegiatan produksi pun mengalami penurunan secara langsung. Hal

ini dikarenakan aktifitas produksi yang dilakukan dengan melibatkan banyak sumber daya manusia, terpaksa harus dibatasi guna mengurangi intensitas kontak fisik antar pekerja. Bahkan tidak jarang sejumlah perusahaan terpaksa harus berhenti beroperasi karena sumber daya manusia yang terbatas dan mahal biaya produksi di masa pandemi saat ini. Seluruh kegiatan fisik yang berkurang dalam aktifitas ekonomi, menyebabkan terganggunya sisi permintaan dan penawaran pada perekonomian. *Demand Shock* dan *Supply Shock* dalam perekonomian tidak dapat dihindari.

Selain sektor sosial dan ekonomi, sektor pendidikan pun tidak mampu menghindari hantaman serangan dari wabah pandemi Covid-19. Guru dan Siswa, Dosen dan Mahasiswa harus menjalankan aktifitas pembelajaran melalui daring. Sekolah dan kampus yang menjadi sentra aktifitas pendidikan menjadi sepi karena diberlakukannya pembelajaran dari rumah (*school from home*), guna mencegah penyebaran virus Covid-19. Pembelajaran dari rumah bukan hal yang mudah, karena masyarakat tidak seluruhnya siap. Kendala akses teknologi yang mendukung pembelajaran daring pun belum secara merata dapat diperoleh oleh semua pengguna di seluruh pelosok Indonesia. Selain itu penguasaan dan operasional teknologi yang mendukung pembelajaran banyak menimbulkan permasalahan. Tidak semua guru dan dosen dapat dengan mudah menjalankan pembelajaran jarak jauh, demikian pula tidak mudah bagi orang tua untuk mampu mendampingi putra-putrinya belajar di rumah.

Meski demikian ada beberapa hal yang perlu disyukuri dari berbagai keterbatasan di bidang sosial, ekonomi, dan pendidikan, akibat pandemi Covid-19 ini. Relasi positif antar anggota masyarakat, jiwa sosial dan kegotongroyongan terasa kembali melingkupi Bangsa ini. Kesadaran masyarakat untuk saling peduli dan mengingatkan agar terhindar dari penularan virus Covid-19. Akibat pandemi ini juga relasi positif antara orang tua dan anak dalam menjalani pembelajaran dari rumah menjadi sangat positif. Interaksi orang tua dan anak di bidang pendidikan yang tidak hanya mengandalkan guru dan sekolah, menjadi bagian penting dalam perjalanan sosial pendidikan bangsa ini dalam menghadapi pandemi. Semangat gotong royong dan kepedulian juga nampak dari munculnya banyak kegiatan yang bersifat dukungan ekonomi untuk bangkit dari keterpurukan krisis, yang dialami oleh sebagian masyarakat. Hal ini cukup melegakan, seiring dengan upaya pemerintah dalam mengupayakan strategi bertahan dalam berbagai program kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di masa pandemi.

Buku ini menyajikan berbagai pemikiran penulis di bidang sosial, ekonomi dan pendidikan, yang juga menjadi bagian dari upaya pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 secara positif. Buku ini dikelompokkan menjadi dua



bagian, pertama adalah manuskrip yang mengulas tentang perekonomian dan kedua adalah berfokus pada bidang sosial dan pendidikan. Bagian awal buku ini memberikan gambaran mengenai perkembangan perekonomian pada masa pandemi Covid-19. Beberapa artikel mengulas tentang penyesuaian-penyesuaian pada masa pandemi, misalnya digitalisasi perekonomian, transportasi, pariwisata dan analisis ekonomi produksi secara sektoral. Pada bagian dua, di bidang sosial dan pendidikan mengulas tentang berbagai aktifitas di bidang sosial dan pendidikan di tengah pandemi Covid-19.

Kami haturkan ucapan terima kasih kepada seluruh penulis yang telah berkontribusi pada penulisan buku ini. Karya ini adalah sebagai salah satu bukti upaya semua penulis untuk turut serta dalam menjaga optimisme pemulihan menghadapi pandemi Covid-19 di segala sektoral. Semoga Bangsa ini selalu kuat, berjuang, bergotong-royong bersama untuk kembali bangkit menuju kehidupan yang lebih baik. Selamat membaca.

Tim Editor

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>EPILOG</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
1. ANALISIS PANDEMI COVID-19 TERHADAP PERLAMBATAN DI BEBERAPA SEKTOR EKONOMI DI INDONESIA.....	1
2. DIGITALISASI EKONOMI DI ERA NEW NORMAL .....	14
3. TRANSPORTASI INDONESIA DI TENGAH COVID-19 .....	28
4. TRANSFORMASI MODA PRODUKSI USAHA PETERNAKAN SAPI PERAH .....	37
5. POTENSI USAHA PETERNAKAN SAPI PERAH RAKYAT DALAM MENGHADAPI PASAR GLOBAL .....	56
6. PENGALIHAN FUNGSI LAHAN PERTANIAN RAKYAT DI KABUPATEN PEMALANG PROVINSI JAWA TENGAH .....	67
7. PEMBANGUNAN EKONOMI PERIKANAN BERKELANJUTAN STUDI KASUS KABUPATEN BATANG, JAWA TENGAH .....	81
8. POTENSI KEUANGAN INKLUSIF DI PROVINSI MALUKU .....	102
9. KETIMPANGAN PENDAPATAN ANTAR KABUPATEN/KOTA DI PROPINSI JAWA TENGAH.....	121
10. PRO MEGA PINTAR KEMBANGKAN SIKAP DAN ANALISIS PBB SEBAGAI PAJAK PUSAT DAN DAERAH .....	139
11. DETERMINAN KINERJA PEREKONOMIAN PROVINSI JAWA TENGAH: PERSPEKTIF DEMOGRAFI.....	158
12. LOCAL IDENTIFICATION SPATIAL ASSOCIATION (LISA) TENAGA KERJA PROPINSI JAWA TENGAH .....	173
13. ANALISIS EFISIENSI PENGELOLAAN SAMPAH PERKOTAAN DI INDONESIA (STUDI KASUS BEBERAPA KOTA BESAR DI INDONESIA)..	187
14. DETERMINAN PERTUMBUHAN EKONOMI NEGARA-NEGARA DI KAWASAN ASEAN PASCA KRISIS EKONOMI TAHUN 2008 .....	202

15. PENGEMBANGAN DAYA TARIK WISATA DESA MELALUI BRANDING WISATA SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT .....	215
16. PENGADAAN DAN PENDAMPINGAN PENGELOLAAN WEBSITE WISATA ALAM MAHESA JAYA RIVER TUBING SEBAGAI USAHA PENINGKATAN EKONOMI WARGA KEBOSUNGU DLINGO BANTUL .....	225
17. PERBATASAN DAN KETERBATASAN : MENEROPONG PELAKSANAAN NAWACITA DI KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS.	237
18. ANALISIS KOMPETENSI BHAYANGKARA PEMBINA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT (BHABINKAMTIBMAS) KETERKAITANNYA DENGAN KINERJA .....	255
19. MENINGKATKAN EFEKTIVITAS KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DENGAN LINGKUNGAN KERJA YANG KONDUSIF DI MASA WORK FROM HOME .....	269
20. SOCIAL ENTREPRENEURSHIP SEBAGAI MITIGASI DAMPAK COVID-19.....	276
21. ECOBRICKS SEBAGAI ALTERNATIF PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS LINGKUNGAN .....	289
22. PENGARUH KESIAPAN MENGAJAR GURU TERHADAP EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN DARING DI MASA PANDEMI COVID-19 .....	300
23. BUKU CERITA BERJENJANG BAGI PEMBACA CILIK MENUJU SUKSESNYA GERAKAN LITERASI SEKOLAH.....	319
24. PENINGKATAN SDM TIM JURNALIS DESA MELALUI PELATIHAN MENULIS DALAM RANGKA POPULERKAN DESA WISATA BERGAS KIDUL, KABUPATEN SEMARANG .....	333
25. TANTANGAN GURU DAN PENDIDIKAN KEGURUAN DI ERA PERUBAHAN .....	346
26. MENJADI BANGSA YANG TERDIDIK.....	359
27. EDUKASI KONSERVASI PEDULI SUNGAI SEBAGAI SALAH SATU ALTERNATIF PENGELOLAAN DAS.....	363
28. URGENSI SUSTAINABILITY REPORTING DI UNIVERSITAS .....	382
29. REVITALISASI KELEMBAGAAN PETANI SEBAGAI WAHANA ALIH TEKNOLOGI DAN INCUBATOR BISNIS PENDUKUNG AGRO TECHNO-PARK .....	396
KONTRIBUTOR PENYUMBANG ARTIKEL BUKU BUNGA RAMPAI.....	415

## **ANALISIS PANDEMI COVID-19 TERHADAP PERLAMBATAN DI BEBERAPA SEKTOR EKONOMI DI INDONESIA**

**Nuramalia Hasanah, Ganang Anom, Alwan Ayyasi**

### **PENDAHULUAN**

Akhir akhir ini dunia tengah di hebohkan dengan mewabahnya penyakit yang berasal dari wuhan, China yang di kenal dengan nama Pneumonia Wuhan atau WHO menamakannya sebagai penyakit Covid-19. Sebagaimana kita ketahui, penyakit ini muncul pertama kali pada bulan November 2019 dan mulai terdeteksi di Indonesia pada bulan Maret 2020. Virus ini menyebabkan penyakit saluran pernapasan (seperti flu) dengan gejala seperti batuk, demam. Penyakit ini dapat dicegah dengan mencuci tangan secara rutin dan menghindari menyentuh wajah. Virus ini dikategorikan sebagai pandemi global. Menurut World Health Organization (WHO), pandemi dinyatakan ketika penyakit baru menyebar di seluruh dunia melampaui batas. Istilah pandemi menurut KBBI dimaknai sebagai wabah yang berjangkit serempak di mana-mana meliputi daerah geografi yang luas. Dalam pengertian yang paling klasik, ketika sebuah epidemi menyebar ke beberapa negara atau wilayah yang luas. Dampak Covid-19 dirasakan secara luas di berbagai bidang di Indonesia salah satunya dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, terdapat beberapa sektor yang terdampak pandemi Covid-19 yaitu sektor UMKM, Pariwisata, serta Manufaktur. Pandemi Covid-19 juga berdampak pada hutang luar negeri, realisasi APBN, serta nilai tukar rupiah terhadap dollar.

Meluasnya virus tersebut mengakibatkan seluruh sektor kegiatan di dunia baik industri, penerbangan, pariwisata, dan sektor lainya terganggu bahkan terpaksa dihentikan. Hingga berdampak pada perekonomian yang mengalami penurunan. Berawal dari dua orang yang terpapar virus tersebut sejak awal Maret 2020, kini per Rabu 1 April 2020 pasien yang positif Covid-19 mencapai 1.677 kasus. Dengan bertambahnya kasus Covid-19 yang meningkat dan penyebaran virus ini terjadi secara bersamaan awalnya ratusan, ribuan, puluhan ribu. Akhirnya sistem pelayanan tidak cukup untuk menangani jumlah tempat tidur terbatas, jumlah kamar terbatas, jumlah rumah sakit terbatas, jumlah dokter terbatas dan jumlah perawat terbatas. "Karena masalah ini adalah masalah virus yang terjadi secara bersamaan yang dapat menginfeksi ratusan bahkan ribuan orang maka dalam kasus ini yang terus bertambah

tidak dapat ditampung oleh rumah sakit (RS) atau pelayanan kesehatan. Hal ini membuktikan bahwa pelayanan kesehatan tidak di desain untuk melayani endemic apalagi pandemic. Kita harus menahan penyebaran, artinya jika ada kasus ungkap secara transparan dan melakukan self quarantine (Karantina diri),”kata Anies Baswedan.

Kebijakan untuk tetap berada di rumah yang diambil oleh Pemerintah untuk memutus rantai penyebaran Covid-19. Kemudian PemProv mengeluarkan beberapa kebijakan untuk menyeimbangkan kondisi masyarakat di situasi seperti ini. Kebijakan tersebut diantaranya pemangkasan rencana belanja tidak prioritas pada APBN dan APBD (anggaran perjalanan dinas, pertemuan, dan belanja lain yang tidak dirasakan langsung oleh masyarakat untuk dipangkas); Recofusing dan relaksasi anggaran untuk mempercepat penanganan Covid-19 untuk kesehatan dan bantuan sosial; kartu sembako naik Rp50.000,- menjadi Rp200.000,- selama 6 bulan mendatang; kartu pra-kerja; dan pelonggaran dan relaksasi kredit. Selain itu, Insentif gratis pungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, 22, dan 25 kepada pekerja industri manufaktur dan perusahaan. Hal tersebut, untuk menumbuhkan daya beli masyarakat di tengah tekanan pandemic virus corona.

Selain itu dampak virus corona bagi perekonomian UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) sangat nyata. Menurut Ketua Asosiasi UMKM Indonesia Ikhsan Ingatubun pandemi Covid-19 yang terjadi belakangan ini sangatlah berdampak bagi UMKM, hal tersebut lantaran kebijakan physical distancing yang diambil oleh pemerintah yang menyebabkan banyak masyarakat membatasi diri untuk melakukan kegiatan diluar rumah. Kebijakan tersebut membuat transaksi perdagangan di sektor UMKM mengalami penurunan secara signifikan. Penurunan penjualan yang dialami UMKM tersebut membuat para pelaku UMKM sedikit kesulitan dalam membayarkan biaya operasional seperti, Gaji, sewa, dan biaya operasional lainnya. Sektor ekonomi yang terdampak pandemi Covid-19 selanjutnya adalah sektor Pariwisata. Akibat diterapkannya kebijakan Physical Distancing yang dilakukan oleh pemerintah, banyak masyarakat yang tidak dapat melakukan perjalanan untuk berlibur atau pergi ke destinasi wisata. Selain itu dengan adanya pandemi Covid-19 pemerintah dengan terpaksa menutup akses masuk maupun keluar wilayahh Indonesia. Ditutupnya akses masuk dan keluar Indonesia tersebut menyebabkan tidak adanya wisatawan asing yang dapat menjadi sumber pemasukan bagi perekonomian Indonesia di sektor pariwisata.

Selain sektor yang telah disebutkan sebelumnya, masih terdapat banyak sektor perekonomian yang terdampak oleh Pandemi Covid-19 seperti Sektor Manufaktur, hutang luar negeri, realisasi APBN, serta nilai tukar rupiah terhadap dollar. Dalam mengatasi masalah tersebut pemerintah mengeluarkan

beberapa kebijakan dalam hal penggunaan APBN seperti penggelontoran dana Rp. 4,5 triliun untuk kartu sembako, Rp. 10 Triliun untuk kartu pra kerja, Rp. 1,5 Triliun untuk kredit rumah bersubsidi. Dalam kondisi Indonesia seperti ini menjadi sebuah kegelisahan bersama. Bahwasannya kebijakan yang keluar menyebabkan perekonomian kian menurun. Sumber keuangan negara juga berdampak sangat besar akibat kasus wabah Covid-19 ini. Sumber keuangan negara turun, pajak pun turun sangat luar biasa karena kegiatan ekonominya turun, misalnya pajak hiburan dari mulai restoran, hotel, café dengan tidak ada kegiatan otomatis tidak ada pajak dan tidak ada uang masuk dari pajak. Kemudian dampaknya semua anggaran APBN/APBD yang tidak begitu penting semua dialokasikan untuk penanganan kasus wabah Covid-19 ini.

Mewabahnya Covid-19 di seluruh dunia merupakan suatu hal yang harus diatasi bersama. Virus tersebut tidak terlihat oleh kasat mata tetapi sebisa mungkin virus tersebut harus bisa diperangi. Pemerintah sudah berusaha yang terbaik untuk melindungi rakyatnya. Pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan berkali-kali untuk mengatasi dampak- dampaknya. Berdasarkan hal tersebut, hal yang menarik untuk dikaji lebih mendalam lagi apakah Covid-19 ini berpengaruh terhadap perekonomian di Indonesia.

## **PEMBAHASAN**

### **Pengaruh *Sosial Distancing* terhadap masyarakat**

Covid-19 merupakan masalah yang harus dilawan bersama. Virus ini sangat cepat sekali penyebarannya. Seperti yang sudah dilakukan oleh Negara Tiongkok yaitu dengan me- lockdown. Menjadikan negara tersebut seperti negara dengan kota mati. Namun, Indonesia melihat situasi kondisi dari berbagai sektor. Akhirnya pemerintah memberikan solusi untuk tetap berada di dalam rumah. Bukan berarti me-lockdown secara total tapi ada tahapannya, diantaranya (1) Limiting Crowded, (2) Limited Mobility (Jakarta saat ini ada di tahap Limited Mobility),(3) Near Zero Mobility-perjalanan antar kota dibatasi, perjalanan antar negara dibatasi dan toko-toko yang buka hanya yang kebutuhan pokok dimana kegiatan antarkota, negara dibatasi dan Zero Mobility ini yang Lock Down. Karena masalah ini adalah masalah virus yang terjadi secara bersamaan yang dapat menginfeksi ratusan bahkan ribuan orang maka dalam kasus ini yang terus bertambah tidak dapat ditampung oleh rumah sakit atau pelayanan kesehatan. Sehingga sebagai masyarakat yang baik harus menahan penyebaran virus tersebut, artinya jika ada kasus ungkap secara transparan dan melakukan self quarantine (Karantina diri).

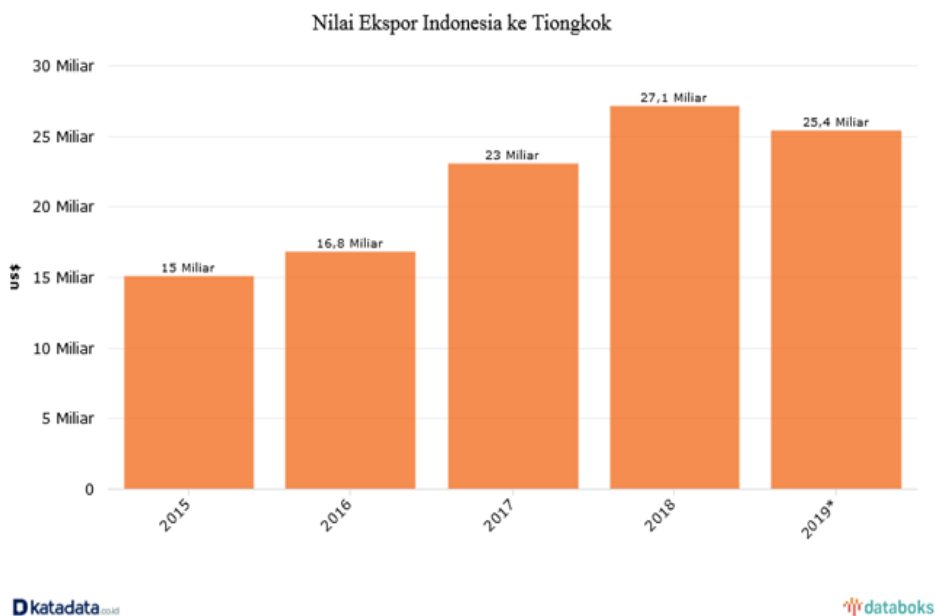
Dalam hal ini pemerintah sendiri sudah menutup banyak sekali tempat tempat hiburan yang memicu banyak orang berkumpul, dan pemerintah pun memberlakukan belajar dan bekerja jarak jauh. Sebuah keputusan pun diambil

dengan meniadakan Ujian Nasional ditahun ini . Pemerintah juga menggalakan kepada masyarakat untuk menjaga kebersihan dengan mencuci tangan, karena virus ini akan hilang bila disiram menggunakan sabun dan air mengalir.

Tetapi menjadi kedilemaan bersama, kenyataannya para pekerja di lapangan yang tidak bisa bekerja diam di rumah harus rela berperang melawan covid-19. Seperti pengemudi ojek online, pedagang kopi keliling, pedagang siomay dan sebagainya. penghasilan mereka didapat dari berkeliling tersebut. Alhasil, jika diam di rumah saja, otomatis mereka tidak mendapatkan penghasilan dan berdampak pada perekonomian yang kian menurun.

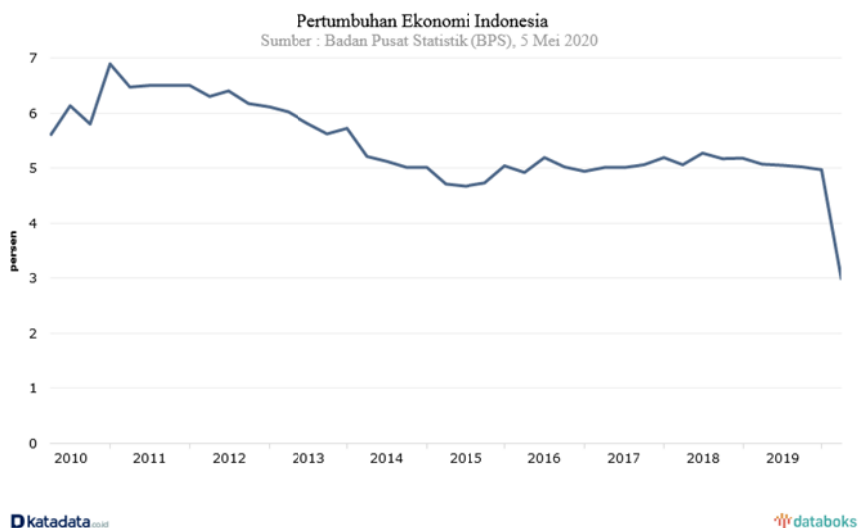
### **Pengaruh Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia**

Meluasnya virus tersebut mengakibatkan seluruh sektor kegiatan di dunia baik industri, penerbangan, pariwisata, dan sektor lainnya terganggu bahkan terpaksa dihentikan. Hingga berdampak pada perekonomian yang mengalami penurunan. Perekonomian Indonesia diperkirakan akan mengalami penurunan yang sangat signifikan akibat adanya virus tersebut, dan salah satu sektor yang terkena imbas dari penyebaran virus ini adalah sektor ekspor Indonesia. Ekspor Indonesia diperkirakan akan mengalami penurunan sehingga akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang saat ini sedang digalakkan oleh pemerintah



**Gambar 1.** Nilai Ekspor Indonesia ke Tiongkok per November 2019

Indonesia merupakan salah satu negara yang termasuk dalam rantainya Negara Tiongkok dalam *Global Supply Chain*. Apabila pertumbuhan Negara Tiongkok turun 1 persen maka berdampak pada perekonomian Indonesia sekitar 0,1 – 0,3 persen (Global Value Chain Development Report, 2019). Sebelumnya ekonomi Indonesia tercatat melambat sejak tahun lalu. Badan Pusat Statistik (BPS) melansir jika pertumbuhan ekonomi kuartal I 2019 sebesar 5,07 persen, kemudian melambat pada kuartal II 2019 sebesar 5,05 persen, dan terus melambat pada kuartal III 2019 yang hanya 5,02 persen. Bahkan pertumbuhan ekonomi domestik semakin anjlok pada kuartal IV 2019 mencapai 4,97 persen. Terlebih dengan munculnya wabah tersebut, Direktur Pelaksana Bank Dunia, Maria Elka Pangestu memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat terus melemah di bawah 5 persen pada kuartal I 2020 (Gambar 2).



**Gambar 2.** Dampak Covid-19 terhadap Indikator Makro Ekonom Nasional

Akibat wabah Corona ini juga menimbulkan masalah. Salah satunya dari *stay at home* dimana orang hanya berdiam diri dirumah. Orang-orang akan makan apa dan bagaimana nasib masyarakat yang rentan miskin seperti pedagang kopi keliling, pedagang somay dan sebagainya yang penghasilannya didapatkan dari mereka berkeliling karena perekonomian terhenti, mereka otomatis tidak mendapat penghasilan. Aktivitas terhenti karena kebijakan pemerintah menyarankan untuk *sosial distancing*. Sehingga sumber keuangan negara juga berdampak sangat besar akibat kasus wabah Corona ini. Sumber keuangan negara turun, pajak turun sangat luar biasa karena kegiatan perekonomiannya turun, misalnya pajak hiburan dari mulai restoran, hotel,



café dengan tidak ada kegiatan otomatis tidak ada pajak dan tidak ada uang masuk dari pajak.

“Karena masalah ini adalah masalah virus yang terjadi secara bersamaan yang dapat menginfeksi ratusan bahkan ribuan orang maka dalam kasus ini yang terus bertambah tidak dapat ditampung oleh Rumah Sakit (RS) atau pelayanan kesehatan. Hal ini membuktikan bahwa pelayanan kesehatan tidak di desain untuk melayani *endemic* apalagi *pandemic*. Kita harus menahan penyebaran, artinya jika ada kasus unguap secara transparan dan melakukan *self quarantine* (Karantina diri),” kata Anies Baswedan.

### **Pengaruh APBN/APBD akibat Wabah Covid-19**

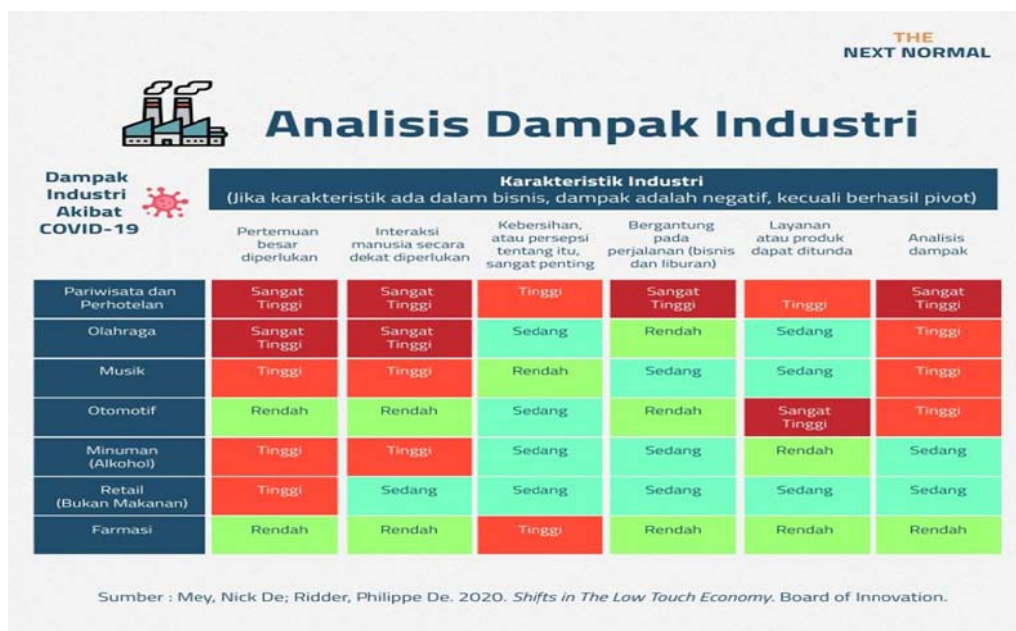
Dengan adanya covid-19 ini sangat berbanding bagi pajak yang menjadi sumber keuangan negara. Pajak adalah penyumbang pendapatan tertinggi negara. Berdasarkan UU KUP (Ketentuan Umum Perpajakan) Nomor 28 Tahun 2007, pasal 1, ayat 1, pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Uang pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk mendanai pembangunan di pusat dan daerah, seperti membangun fasilitas umum, membiayai anggaran kesehatan dan pendidikan, dan kegiatan produktif lain. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang.

Namun dalam hal ini karena wabah Corona pajak turun sangat luar biasa karena kegiatan perekonomiannya turun, misalnya pajak hiburan dari mulai restoran, hotel, café dengan tidak ada kegiatan otomatis tidak ada pajak dan tidak ada uang masuk dari pajak. Dan sumber keuangan yang menurut UU No. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang atau barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang misalnya pajak, retribusi dan sebagainya juga akan mengalami penurunan dan dampaknya semua anggaran APBN/APBD yang tidak begitu penting semua dialokasikan untuk penanganan kasus wabah Corona ini.

### Pengaruh Covid-19 terhadap perlambatan ekonomi sektor Pariwisata

Berdasarkan data CNTRaveler Indonesia dikategorikan sebagai Negara destinasi wisata pertama di dunia. Wisatawan yang memilih Indonesia sebagai destinasi wisata terpukau dengan keindahan tiga pantai di pulau Gili; Gili Trawangan, Gili Air, dan Gili Meno. Tiga anggota Kepulauan Gili itu menawarkan pantai bermandikan matahari, ditambah dengan spa maupun rumah bersantai. Kemudian disusul oleh Bali yang masih menjadi destinasi yang dicari wisatawan.



Dilansir melalui Board of Innovation, industry pariwisata merupakan industry yang berisiko tinggi terdampak oleh adanya pandemi Covid-19. Hal tersebut dikarenakan industri pariwisata merupakan industry yang memiliki kecenderungan mengumpulkan orang banyak dan menyebabkan interaksi yang cukup sering.

Akibat adanya pandemi Covid-19 pemerintah melakukan penutupan terhadap akses masuk maupun keluar dari Indonesia, hal tersebut menyebabkan banyak wisatawan asing yang tidak dapat melakukan kunjungan ke Indonesia, hal tersebut juga akan mempengaruhi kinerja ekonomi terutama di Sektor Pariwisata. Data Badan Pusat Statistik memperlihatkan, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara selama Januari hingga Februari 2020 hanya sebanyak 2,16 juta orang. Angka tersebut menyusut 11,8% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Di saat yang sama, tingkat keterisian kamar hotel dengan klasifikasi bintang rata-rata hanya 49,2%. Per 13 April 2020, PHRI mencatat sedikitnya 1.642 hotel dan 353 restoran/tempat hiburan di

seluruh Indonesia kini berhenti beroperasi. Daerah tujuan wisata yang paling merasakan penurunan jumlah wisatawan yaitu Manado, Bali dan Batam. Data Kementerian Pariwisata menunjukkan, hingga pekan kedua April, sebanyak 180 destinasi dan 232 desa wisata di Indonesia ditutup. Dampaknya, beberapa hotel telah memberhentikan pekerja harian (*daily worker*) dan melakukan cuti di luar tanggungan perusahaan (*unpaid leave*) bagi pekerja kontrak dan pekerja tetap serta menerapkan waktu kerja secara bergiliran bagi hotel dan restoran yang masih beroperasi. Perusahaan menempuh cara ini agar *cashflow* tetap terjaga.

### Pengaruh Pandemi Covid-19 terhadap Sektor UMKM

Lesunya sektor pariwisata memiliki efek domino terhadap sektor UMKM. Berdasarkan data yang diolah P2E LIPI, dampak penurunan pariwisata terhadap UMKM yang bergerak dalam usaha makanan dan minuman mikro mencapai 27%. Sedangkan dampak terhadap usaha kecil makanan dan minuman sebesar 1,77%, dan usaha menengah di angka 0,07%. Pengaruh virus Covid-19 terhadap unit kerajinan dari kayu dan rotan, usaha mikro akan berada di angka 17,03%. Untuk usaha kecil di sektor kerajinan kayu dan rotan 1,77% dan usaha menengah 0,01%. Sementara itu, konsumsi rumah tangga juga akan terkoreksi antara 0,5% hingga 0,8% (katadata.co.id, 2 Maret 2020).

Kelompok Usaha	Unit Usaha	PDB Harga Berlaku (Rp. Triliun)	Rata-rata Omset Per Unit Usaha (Rp. Juta)	Simulasi Kenaikan UMKM Naik Kelas Sebanyak 10%		
				Jumlah Unit Usaha Pindah Kelas	Jumlah Unit Usaha Akhir	PDB Harga Berlaku (Rp. Triliun)
1	2	3	4	5	6	7
A Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	62.922.617	7.705	122	6.292.262	62.916.754	8.987
- Usaha Mikro (Umi)	62.106.900	4.728	76	6.210.690	55.896.210	4.255
- Usaha Kecil (UK)	757.090	1.234	1.630	75.709	6.892.071	2.974
- Usaha Menengah (UM)	58.627	1.742	29.721	5.863	128.473	1.757
B Usaha Besar (UB)	5.460	5.136	940.700		11.323	5.429
Total	62.928.077	12.841	204	6.292.262	62.928.077	14.416
Pertumbuhan PDB Nominal		12,3%				
Pertumbuhan PDB Riil		7,3%				

Jika dilihat melalui data diatas, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat strategis dalam perekonomian Indonesia. Data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Indonesia tahun 2018 menunjukkan jumlah unit usaha UMKM 99,9% dari total unit usaha atau 62,9 juta unit. UMKM menyerap 97% dari total penyerapan tenaga kerja, 89% di antaranya ada di sektor mikro, dan menyumbang 60% terhadap produk domestik bruto (Kemenkop dan UMKM, 2018).

Selama ini UMKM telah membuktikan kemampuannya bertahan dalam situasi ekonomi yang sulit. Sebagian besar UMKM belum berhubungan langsung dengan sektor keuangan domestik, apalagi global. Situasi tersebut menyebabkan UMKM selama ini mampu bertahan terhadap krisis keuangan global seperti pada tahun 1998. Meskipun telah diketahui ketahanannya dalam menghadapi perlambatan ekonomi, terkait dengan kondisi terkini Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingrabatun memperkirakan omset UMKM di sektor nonkuliner turun 30- 35% sejak Covid-19 penyebabnya adalah penjualan produk ini mengandalkan tatap muka atau pertemuan antara penjual dan pembeli secara fisik. UMKM yang menjual produk non-kuliner menyasar wisatawan asing sebagai pasar (Kompas, 10 Maret 2020). Himbauan dari Pemerintah mengenai social distancing yang dicanangkan mulai tanggal 15 Maret 2020 juga diprediksi dapat berdampak serius terhadap penyerapan produk UMKM. Maka dari itu, diperlukan perhatian lebih dari pemerintah kepada sektor UMKM sebagai penggerak utama perekonomian bangsa.

### **Dampak Covid-19 terhadap perlambatan ekonomi sektor manufaktur**

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat wabah virus corona menekan utilitas industri manufaktur hampir 50 persen. Hal itu tercermin dari penurunan indeks manajer pembelian (*Purchasing Managers' Index/PMI*) manufaktur dari 51,9 pada Februari ke 45,3 pada Maret 2020. Tidak hanya di Indonesia, aktivitas manufaktur di Asia juga mengalami kontraksi pada Maret 2020 ini karena dampak penyebaran virus korona (Covid-19) terhadap rantai pasokan. Berdasarkan data IHS Markit yang dirilis Rabu (1/4), hampir seluruh PMI manufaktur regional turun di bawah 50.

Indeks PMI Jepang anjlok ke level 44,8, sedangkan PMI Korea Selatan turun ke 44,2, level terburuk sejak krisis keuangan global lebih dari satu dekade lalu. Di Asia Tenggara, angka PMI Filipina turun menjadi 39,7, terendah sepanjang sejarah, sedangkan Vietnam merosot ke 41,9.

Kebijakan APBN Pemerintah dalam Mengatasi Perlambatan Ekonomi Sektor Pariwisata

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) berupaya mempersiapkan industri pariwisata agar tetap optimistis dan bersiap menghadapi proyeksi lonjakan kinerja pada 2021. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Wishnutama Kusubandio mengatakan, pihaknya telah merealokasi anggaran dan menerapkan program khusus selama masa tanggap darurat COVID-19 agar sektor pariwisata dan ekonomi kreatif termitigasi selama pandemi. Dana yang dialokasikan untuk mendukung program perlindungan sosial bagi para pelaku wisata adalah sebesar Rp. 500 Milliar

### **Kebijakan APBN Pemerintah dalam Mengatasi Perlambatan Ekonomi Sektor UMKM**

Dalam hal penanganan Covid-19 pemerintah memiliki beberapa kebijakan APBN dalam hal menjaga ketahanan sector UMKM. Dalam hal ini Pemerintah akan memberi stimulus ekonomi hingga Rp2 triliun kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Tujuannya, untuk menjaga daya beli para pengusaha kecil di tengah tekanan ekonomi akibat pandemi virus corona atau Covid-19. stimulus tersebut akan diberikan dalam beberapa program yang tengah digodok oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Salah satunya memberi bantuan langsung tunai senilai Rp3 juta per usaha mikro. Lalu, memberikan bantuan sebesar Rp2 juta kepada individu yang memiliki usaha mikro. Kemudian, memberi skema bantuan Rp4 juta melalui kerja sama dengan BUMN pangan, seperti Perum Bulog. Kemudian, Bulog akan mendistribusikan produk pangan ke warung-warung tradisional. Tak ketinggalan, juga memberi subsidi biaya pengantaran bagi usaha mikro yang belum masuk platform digital. Selain itu, Pemerintah menggelontorkan sejumlah program untuk membantu UMKM menghadapi pandemi COVID-19. Salah satu kebijakannya menghapuskan pajak bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

### **Kebijakan Pemerintah dalam mengatasi perlambatan ekonomi sektor manufaktur**

Untuk mengamankan perekonomian Indonesia menyusul penyebaran wabah virus korona atau Covid-19 yang semakin meluas, pemerintah telah melakukan finalisasi kebijakan stimulus II, baik itu stimulus fiskal maupun non fiskal. Untuk stimulus fiskal, pemerintah akan menanggung pajak penghasilan 21 (PPH 21) atau pajak karyawan. Sedangkan PPh 25 untuk corporate dan juga PPh 22 atau bea masuk pajak impor akan ditanggihkan. Sementara itu untuk paket stimulus non fiskal, pemerintah akan menyederhanakan berbagai ketentuan larangan-pembatasan atau tata niaga ekspor, melakukan penguangan terhadap larangan-pembatasan impor dan percepatan proses impor, terutama yang diimpor oleh 500 importir terpercaya (*reputable importer*), guna memperlancar masuknya bahan baku dan bahan penolong untuk industri.

Sedangkan dari sisi logistik, pemerintah juga akan mendorong integrasi Indonesia National Single Window (INSW) dengan Inaportnet melalui pembentukan National Logistics Ecosystem untuk mengurangi biaya logistik di pelabuhan.

## **Kebijakan APBN Lainnya dalam Mengatasi Covid-19**

Untuk memenuhi sejumlah kebutuhan di tengah wabah Covid-19, Pemerintah Pusat gelontorkan anggaran sebanyak Rp 405,1 triliun melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2020. Kebijakan ini sudah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) tentang Stabilitas Perekonomian di masa Pandemi Covid-19. Total anggaran sejumlah Rp. 405,1 triliun tersebut dialokasikan kedalam beberapa bidang, yaitu Rp. 75 Triliun untuk kesehatan yang akan diprioritaskan untuk perlindungan tenaga kesehatan terutama pembelian APD, pembelian alat-alat kesehatan seperti test kit, reagen, ventilator dan lain-lain.

Selanjutnya pemerintah juga menggelontorkan dana sebesar Rp 110 triliun untuk perlindungan sosial, yang terdiri dari Rp 65 triliun digunakan untuk tambahan jaringan pengaman sosial. Rincian dari anggaran ini sebesar Rp 8,3 triliun untuk penyaluran 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program keluarga harapan (PKH), Rp 10,9 triliun sembako untuk 4,8 juta KPM, dan Rp 10 triliun tambahan kartu pra kerja.

Selanjutnya sebanyak Rp 3,5 triliun diskon tarif listrik pelanggan 450 dan 900 VA bersubsidi, Rp 1,5 triliun tambahan insentif perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dan Rp 30,8 triliun untuk program lainnya. Kedua, sebanyak Rp 25 triliun yang diarahkan untuk menjamin ketersediaan bahan pangan dan pokok dengan harga yang stabil. Ketiga, Rp 20 triliun untuk anggaran pendidikan yang terdampak dari Covid-19. Sisa dari anggaran tersebut akan dialokasikan kepada program pemulihan perekonomian yaitu sebesar Rp.150 Triliun.

## **Kesimpulan**

Covid-19 merupakan penyakit yang berasal dari Wuhan, China, diakibatkan oleh virus SARS-COV-2. Penyakit ini mulai masuk ke Indonesia sekitar awal bulan Maret 2020. Virus ini menyebabkan penyakit saluran pernapasan (seperti flu) dengan gejala seperti batuk, demam. Penyakit ini dapat dicegah dengan mencuci tangan secara rutin dan menghindari menyentuh wajah. Virus ini dikategorikan sebagai pandemi global. Menurut *World Health Organization* (WHO). Wabah dari Virus COVID-19 ini memiliki dampak seperti *Domino Effect*. Artinya apabila tidak ditangani secara serius dan matang maka wabah ini akan mengancam pada sektor-sektor lain. Bahkan Covid-19 pun sudah menginfeksi perekonomian negara yang mengakibatkan penurunan. Mewabahnya penyakit Covid-19 di Indonesia menyebabkan pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan *Physical Distancing* kebijakan tersebut berpengaruh terhadap berbagai sektor ekonomi di Indonesia, seperti

perlambatan laju UMKM, penurunann pendapatan di sektor Pariwisata, serta penurunan hasil produksi di sektor Manufaktur.

Dengan adanya covid-19 ini juga sangat berpengaruh bagi pajak yang menjadi sumber keuangan negara. Pajak adalah penyumbang pendapatan tertinggi. Berdasarkan UU KUP Nomor 28 Tahun 2007, pasal 1, ayat 1, pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam hal ini karena wabah Corona pajak turun sangat luar biasa karena kegiatan perekonomiannya turun, misalnya pajak hiburan dari mulai restoran, hotel, café dengan tidak ada kegiatan otomatis tidak ada pajak dan tidak ada uang masuk dari pajak.

Dan sumber keuangan yang menurut UU No. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang atau barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang misalnya pajak, retribusi dan sebagainya juga akan mengalami penurunan dan dampaknya semua anggaran APBN/APBD yang tidak begitu penting semua dialokasikan untuk penanganan kasus wabah Covid-19 ini. Jika masalah dari kasus Covid-19 ini tidak bisa dihentikan, maka bisa dipastikan perekonomian Indonesia akan turun karena terhentinya perekonomian, terhenti pula pemasukan negara melalui pajak. Sehingga berdampak pula pada masalah sosial, keuangan dan ekonomi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah mengambil beberapa kebijakan, seperti memberikan stimulus ekonomi terhadap pelaku UMKM, memberikan insentif pajak berupa PPh pasal 21, PPh pasal 22, dan PPh pasal 25 untuk industry manufaktur, serta kebijakan APBN lainnya untuk mengatasi wabah Covid-19.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Alin Agustina. 2020. Dampak Pandemi Covid-19 Pada Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di [www.sukabumiupdate.com](http://www.sukabumiupdate.com) (diakses Pada 24 April 2020)
- Bahtiar, Rais. 2020. Dampak Covid-19 Terhadap Perlambatan Ekonomi Sektor UMKM. Jakarta. Pusat Penelitian Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik Badan Keahlian DPR RI
- BIS, IMF, DOTS, Haver, Bloomberg, UBS, 2020 dalam Bappenas, 2020
- Ihsanuddin. 2020. 9 Kebijakan Ekonomi Jokowi di Tengah Pandemi Covid-19: Penangguhan Cicilan hingga Relaksasi Pajak di [nasional.kompas.com](http://nasional.kompas.com) (diakses pada 25 April 2020)

Karina Isna Irawan. 2020. Titik kritis dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian akan terjadi pada triwulan II-2020 di bebas.kompas.id (diakses pada 24 April 2020)

Widi Agustian. 2020. Dampak Covid-19 ke Sektor Industri, Pariwisata Sangat Tinggi Sementara Farmasi Rendah di economy.okezone.com (Diakses pada 27 April 2020)

<https://m.cnnindonesia.com/nasional/20200401112000-20-489026/update-corona-1-april-1677-kasus-157-meninggal-103-semuh>

<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200401112703-37-149014/peta-corona-jakarta-1-april-794-positif-87-meninggal>

<https://www.feb.ui.ac.id/blog/2020/02/28/muhammad-chatib-basri-perekonomian-dan-virus-corona/>

<https://www.google.com/amp/s/m.bisnis.com/amp/read/20200303/192/1208635/erick-thohir-terbitkan-instruksi-kepada-bumn-untuk-tangani-dampak-corona>

<https://www.google.com/amp/s/katadata.co.id/amp/telaah/2020/03/26/ekonomi-indonesia-dalam-skenario-terburuk-akibat-virus-corona>

<https://www.sehatq.com/artikel/sering-muncul-di-berita-apa-beda-odp-pdp-dan-suspect->

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/05/05/pertumbuhan-ekonomi-kuartal-i-2020-hanya-naik-297>

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/02/04/ekspor-indonesia-ke-tiongkok-dikhawatirkan-turun-terdampak-corona>



---

---

## DIGITALISASI EKONOMI DI ERA NEW NORMAL

Efriyani Sumastuti

### PENDAHULUAN

Saat ini, perkembangan teknologi yang serba digital tidak bisa dibendung lagi. Bahkan kecepatan perkembangannya semakin pesat dengan adanya kasus Covid-19. Secara umum manusia akan mempunyai *style* (gaya hidup) baru untuk menyesuaikan dengan perangkat yang serba digital. Dengan adanya teknologi, diharapkan dapat menjadi alat yang mampu membantu kebutuhan manusia yang demikian besar. Di samping itu juga dapat mempermudah untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan yang menjadi beban hidup manusia.

Peran penting teknologi inilah yang membawa peradaban manusia memasuki era digital. Era digital telah membawa berbagai perubahan, baik positif maupun negatif. Tantangan pada era digital telah pula masuk ke dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan, dan teknologi informasi itu sendiri. Era digital terlahir dengan kemunculan digital, jaringan internet khususnya teknologi informasi komputer. Karakteristik dari era digital adalah dapat dimanipulasi, bersifat jaringan atau internet. Hampir semua bagian kehidupan di dunia ini mengalami perubahan di era digital, terutama adanya perubahan/pergeseran budaya dalam penyampaian informasi. Dengan semakin canggihnya teknologi digital masa kini telah membuat perubahan besar terhadap dunia, termasuk lahirnya berbagai macam teknologi digital yang semakin maju. Saat ini semua orang telah merasakan kemudahan dalam mengakses suatu informasi dengan berbagai macam cara, serta dapat menikmati fasilitas dari teknologi digital dengan bebas dan terkendali. Tetapi era digital telah menghilangkan privasi individu. Sebab data pribadi yang terekam secara digital akan mudah terlacak oleh orang lain. Teknologi akan terus bergerak dan berkembang di tengah kehidupan manusia, jadi tidak bisa dihindari dan ditolak. Kita mau tidak mau, suka tidak suka perlu menguasai dan mengendalikan teknologi dengan baik dan benar agar memberi manfaat yang sebesar-besarnya.

Di era *new normal*, dengan pembatasan protokol kesehatan yang ketat, sangat cocok untuk menerapkan digitalisasi, khususnya di bidang ekonomi. Selama manusia masih hidup, tidak mungkin bisa meninggalkan aktivitas

ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Pada hakikatnya manusia itu tidak bisa terlepas dari interaksi, sementara di era *new normal* interaksi langsung perlu dibatasi untuk memutus rantai penularan Covid-19. Sebagai alternatif supaya manusia tetap dapat berinteraksi satu dengan yang lainnya, maka diperlukan teknologi. Teknologi tersebut berupa teknologi komunikasi yang merupakan teknologi digital. Dengan adanya teknologi digital hampir tidak ada lagi keterbatasan jarak dan waktu untuk berinteraksi, tetapi perlu diingat juga bahwa teknologi digital tidak dapat menggantikan interaksi secara psikologis yang didapatkan seperti pada interaksi langsung.

## PEMBAHASAN

### 1. Digitalisasi Ekonomi

Beberapa konsep mengenai digitalisasi ekonomi adalah :

- a. Informasi digital merupakan sumber utama dalam perencanaan strategis, sedangkan ketersediaan jaringan mempunyai peran yang sangat penting dalam tata kelola aktivitas sosial dan ekonomi. Disamping itu teknologi digital juga berfungsi dalam penyediaan metode dan data yang diperlukan dalam menaikkan nilai tambah (*value added*) dari produk, jasa ataupun pola interaksi berbagai pihak yang terkait.
- b. Pada era digitalisasi ekonomi, untuk mendapatkan profit dalam perekonomian, informasi merupakan sumber utama dan bukan hanya sekedar media untuk berkomunikasi dan bertransaksi.
- c. Digitalisasi ekonomi mampu mendorong perubahan pola pikir individu dan organisasi dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang dimaksud, khususnya berkaitan dengan adanya perkembangan teknologi dan internet yang demikian cepat.
- d. Digitalisasi ekonomi mampu memberikan informasi dan menyediakan akses dalam persediaan dan pengadaan barang maupun jasa untuk mendukung operasional usaha di berbagai sektor (industri, jasa, perdagangan dan lain-lain)

Istilah ekonomi digital (*digital economy*) dikenalkan oleh Don Tapscott di tahun 1995 lewat bukunya berjudul *The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence*. Ekonomi digital adalah kegiatan ekonomi yang didasarkan pada teknologi digital internet. Ekonomi digital disebut juga dengan sebutan *internet economy*, *web economy*, *digital-based economy*, *new economy knowledge*, atau *new economy*.

Era *digital economy* atau era *new economy* muncul sewaktu organisasi mulai mengawinkan produktivitas TI dari sumber daya aktiva dengan *knowledge* dari sumber daya manusia untuk menjangkau transaksi global

lintas batas dalam bentuk *connected economy*. Di *new economy*, organisasi memanfaatkan TI sebagai *enabler* dan *strategic weapon*. Di era ini pertanyaannya tidak lagi *what is your business* tetapi lebih ke *how is your digital business model*.

Menurut Don Tapscott, ekonomi digital mempunyai 12 atribut, yaitu:

- a. *Knowledge*  
Di ekonomi digital, *power of the knowledge* diterjemahkan menjadi inovasi-inovasi unggul lewat kesempatan-kesempatan terbaru untuk menciptakan keunggulan kompetitif.
- b. *Digitization*.  
Transaksi bisnis menggunakan *digital technology* dan digital information. Pelanggan-pelanggan sebagai *digital customers* menggunakan *digital devices* untuk melakukan transaksi dengan perusahaan-perusahaan penjual barang dan jasa sebagai *digital enterprises*.
- c. *Virtualization*.  
Di ekonomi digital dimungkinkan untuk merubah barang fisik menjadi barang virtual. Modal intelektual dikonversikan menjadi modal digital.
- d. *Molecularization*.  
Di ekonomi digital, *heavy organization* di organisasi tradisional berubah menjadi *light organization* yang fleksibel, *M-form organization* (organisasi multidivisional) bergeser menjadi *E-form organization* atau *ecosystem form organization* yang mudah beradaptasi dengan lingkungan.
- e. *Internetworking*.  
Menggunakan jaringan internet untuk membangun interkoneksi membentuk jaringan ekonomi.
- f. *Disintermediation*.  
Tidak diperlukan lagi perantara, transaksi dapat dilakukan langsung *peer-to-peer*.
- g. *Convergence*.  
Konvergensi komputasi, komunikasi, dan konten bersama-sama membentuk multimedia interaktif yang menjadi *platform* yang penting.
- h. *Innovation*.  
Imaginasi dan kreativitas manusia merupakan sumber-sumber nilai utama membentuk *innovation economy*.
- i. *Prosumption*.  
Di ekonomi lama aspek kunci adalah *mass production*, sedang di ekonomi digital adalah *mass customization*. Perbedaan antara produser dan kus-

tomor menjadi kabur, setiap kustomer di *information highway* dapat juga menjadi produser.

j. *Immediacy*.

Perbedaan waktu saat memesan barang dengan saat diproduksi dan dikirim menyusut secara drastis disebabkan kecepatan proses *digital technology*.

k. *Globalization*.

Menurut Peter Drucker "*knowledge knows no boundaries*." Tidak ada batas untuk transaksi global.

l. *Discordance*.

Akan muncul jurang pemisah antara yang memahami teknologi dengan yang tidak memahami teknologi. Supaya *survive*, semua pemain di ekonomi digital harus *technologically literate* yaitu mampu mengikuti *technological shifts* menuju interaksi dan integrasi dalam bentuk *internetworked economy*.

## 2. Era *New normal*

Pada masa *new normal*, meski Covid-19 belum tuntas, semua aktivitas tetap harus berjalan termasuk aktivitas ekonomi. Penerapan protokol kesehatan perlu dilakukan, agar interaksi tetap aman dan produktif. Aktivitas ekonomi, baik sebagai konsumen maupun produsen, tentu saja tidak dapat terlepas dari interaksi. Interaksi tersebut dapat berupa layanan, informasi dan distribusi barang maupun jasa dengan tetap menjaga jarak aman. Untuk keperluan tersebut diperlukan perubahan yang melibatkan teknologi informasi online/digitalisasi. Transformasi digital diperlukan dalam rangka menyesuaikan kebutuhan pada masa *new normal*. Selain itu juga diperlukan inovasi digital agar aktivitas ekonomi tetap dapat bergerak dalam situasi yang serba terbatas. Dampak yang dapat dilihat di era *new normal* antara lain dari adalah:

### 1. Lokasi kerja

Tempat kerja kita telah berubah, yang biasanya di tempat bekerja dengan lokasi tertentu, sekarang dapat bekerja di rumah atau dimanapun dengan syarat tersambung konektivitas internet. Transformasi ini membuat gerak ekonomi masyarakat, dan bisnis perusahaan lebih fleksibel. Kedepan diprediksi akan lahir generasi baru ekonomi digital, yang mampu digunakan di tempat dan zona yang berbeda

### 2. pengalaman konsumen

Pada masa ekonomi digital, interaksi yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu dan tempat di manapun pasti akan dicari dengan cara yang paling aman dan nyaman. Interaksi tersebut dapat berupa bisnis ke konsumen ataupun bisnis ke bisnis. Untuk itu diperlukan pengalaman konsumen/

informasi maupun testimoni dari orang lain tentang pengalaman mereka dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Pengalaman tersebut kemudian dijadikan dasar oleh konsumen yang lain untuk ikut melakukan pembelian/mengkonsumsi.

### 3. Jaringan

Jaringan untuk digitalisasi ekonomi akan selalu mengalami perkembangan sejalan dengan berkembangnya tuntutan kebutuhan masyarakat. Apabila perusahaan tidak dapat mengikuti perkembangan tersebut, maka siap-siap untuk ditinggalkan oleh konsumen. Saat ini, di era *new normal*, dimana kita harus melakukan pembatasan interaksi, jaringan internet yang kuat sangat diperlukan. Jaringan internet diperlukan untuk melakukan hampir semua kegiatan di berbagai bidang untuk tetap terhubung antara satu dengan yang lainnya.

### 3. Digitalisasi Ekonomi di Era New Normal

Pandemi Covid-19 telah menggeser perilaku masyarakat dalam aktivitas belanja yang dulunya dominan menggunakan *offline* beralih ke dalam sistem *online*. Perubahan pola tersebut, seyogyanya diikuti pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar dapat *survive*, serta bisa berkembang sehingga mampu menghadapi kondisi *new normal*. Pada tahun 2018, UMKM di Indonesia mempunyai peran signifikan dalam berkontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 60,34% (Akumindo, 2019). Selain itu, secara nasional mampu menyerap sekitar 59,26 juta tenaga kerja. Jumlah UMKM yang sudah *go online* sekitar 9,4 juta. Untuk menghadapi era *new normal*, sebaiknya UMKM didorong untuk melakukan digitalisasi agar tetap eksis.

UMKM dapat melakukan digitalisasi dengan melakukan kemitraan bersama perbankan. Sinergi dengan perbankan menjadi pilihan alternatif UMKM untuk menerapkan digitalisasi secara bertahap dan berkelanjutan. Perbankan dapat memberikan solusi secara komprehensif berkaitan dengan:

#### a. Layanan digital banking

Merupakan layanan atau kegiatan perbankan dengan menggunakan sarana elektronik atau digital milik bank, dan atau melalui media digital milik calon nasabah dan atau nasabah bank, yang dilakukan secara mandiri. Hal ini memungkinkan calon nasabah dan atau nasabah bank untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, registrasi, pembukaan rekening, transaksi perbankan, dan penutupan rekening, termasuk memperoleh informasi lain dan transaksi di luar produk perbankan. Antara lain nasihat keuangan (*financial advisory*), investasi, transaksi sistem perdagangan

berbasis elektronik (*e-commerce*), dan kebutuhan lainnya. Implementasi digital banking sendiri akan mengintegrasikan layanan perbankan elektronik seperti ATM, EDC, internet banking, *mobile banking*, *SMS banking*, *phone banking*, dan *video banking* untuk mempermudah layanan pada masyarakat luas. Selain itu, digital banking juga meliputi keberadaan agen-agen laku pandai perbankan (agen laku pandai, seperti; Agen46, BRI Link, AgenMU Mandiri) yang secara masif dalam memaksimalkan layanan dan memasarkan produk. Berdasar data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), per September 2019 laku pandai telah mempunyai 1.146.131 agen dengan jumlah rekening 25,78 juta nasabah, *outstanding* tabungan Rp 2,22 triliun yang menyebar di seluruh pelosok nusantara dengan menysasar 34 provinsi dari total 511 kota/kabupaten. Dengan begitu, digital banking akan dapat membantu transaksi UMKM secara online sehingga dapat menjangkau kemana dan dimanapun secara *realtime*.

b. Marketing *online* solusi

Untuk jualan produk UMKM. Perbankan dapat membantu penjualan produk dan jasa UMKM dengan membuat portal UMKM *online*. Perlu diketahui, imbauan pemerintah agar masyarakat melakukan jaga jarak dan tidak berkerumun mempengaruhi penjualan pelaku UMKM. Menyiasati hal tersebut, perbankan dapat membantu pelaku UMKM binaannya untuk terhubung dengan ekosistemnya sehingga mampu berjualan secara *online*. UMKM dapat terbantu penjualan produk dan jasanya secara *online*, baik melalui marketing area lokal, nasional maupun global. Tidak hanya berhenti disitu, perbankan dapat juga memberikan fasilitas platform digital UMKM. Pelaku UMKM yang berminat cukup masuk di website bank melalui proses tahapan sangat mudah dan *user friendly*. Nasabah diwajibkan melengkapi data dan mendaftarkan usahanya terlebih dahulu dengan mengakses *microsite* di website bank terkait. Secara teknis, pihak penjual akan diminta untuk menyiapkan dokumentasi produk, mengirimkan sampel barang, hingga proses pengiriman barang ke gudang-gudang inventori yang dikelola pihak portal UMKM. Barang tersebut selanjutnya akan dibantu penjualannya ke objek pemasaran yang lebih luas, karena terhubung dengan *e-commerce* terkemuka. Produk unggulan UMKM dapat langsung dibeli di *e-commerce* rekanan seperti Qoo10 Singapura, Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Blanja.com, Blibli.com, Lazada, Jakmall.com, Bhinneka.com dan sebagainya. Alhasil, UMKM dapat lebih memasarkan produk dan jasanya melalui *online*.

c. Program CSR

Program CSR berupa PKBL (Program kemitraan Bina Lingkungan) perbankan ini bertujuan membantu pelaku UMKM mendapat pelatihan

serta pendampingan terkait penggunaan teknologi secara optimal, sehingga mereka melek teknologi serta terbiasa dalam penggunaannya. Bisa juga, CSR dipergunakan untuk membuat sistem dan pembelian teknologi sederhana dalam membantu UMKM mengembangkan usahanya. Ketika UMKM sudah dapat eksis dan kuat di era *new normal*, diharapkan UMKM dapat tampil menjadi penyelamat serta penyangga ekonomi nasional di tengah krisis akibat Covid-19.

#### **4. Tantangan Digitalisasi Ekonomi**

Dunia digital tidak hanya menawarkan peluang dan manfaat besar bagi publik dan kepentingan bisnis. Namun juga memberikan tantangan terhadap segala bidang kehidupan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi dalam kehidupan. Penggunaan bermacam teknologi memang sangat memudahkan kehidupan, namun gaya hidup digital pun akan makin bergantung pada penggunaan ponsel dan komputer. Apapun itu, kita patut bersyukur semua teknologi ini makin memudahkan, hanya saja tentunya setiap penggunaan mengharuskannya untuk mengontrol serta mengendalikannya. Karena bila terlalu berlebihan dalam menggunakan teknologi ini kita sendiri yang akan dirugikan, dan mungkin juga kita tak dapat memaksimalkannya. Perkembangan teknologi yang begitu cepat hingga merasuk di seluruh lini kehidupan sosial masyarakat, ternyata bukan saja mengubah tatanan kehidupan sosial, budaya masyarakat tetapi juga kehidupan politik. Kecanggihan teknologi yang dikembangkan oleh manusia benar-benar dimanfaatkan oleh para politisi yang ingin meraih simpati, dan empati dari masyarakat luas. Untuk menaikkan elektabilitas dan popularitas dapat dilakukan dengan fasilitas digital seperti salah satunya smartphone sekarang dengan di sediakan fitur/aplikasi yang canggih yang berhubung langsung ke jejaring sosial yang mampu menghubungkan antara individu yang satu dengan yang lainnya, antara satu kelompok dengan kelompok lainnya bahkan negara yang memberikan dampak besar dalam politik moderen. Mekanisme elektronik juga telah mengubah aktivitas dalam pemilihan seperti kampanye berbasis internet, website-website, e-mail dan podcast. Hal ini menjadi fasilitas bagi para kandidat dan partai-partai politik sebagai sarana yang cepat dan murah untuk mengirim pesan kepada audiens, yang memungkinkan mereka untuk merekrut para sukarelawan kampanye dan menggalang dana-dana kampanye. Smartphone yang terhubung dengan jejaring sosial sangat efektif terutama dalam menjangkau masyarakat muda, yang sering kali merupakan segmen masyarakat yang paling sulit untuk dilibatkan melalui strategi-strategi konvensional. Sisi lain dari wajah baru dan kekuasaan politik di era digital juga untuk dimanfaatkan sebagai alat penyebaran ideologis secara sistematis untuk mencari dukungan dan sekaligus perkembangan nilai-nilai ideologis itu, dan sisi lain sebagai alat untuk mesin-

mesin propoganda, bagaimana para politisi berusaha untuk mempertahankan kekuasaan dengan menampilkan citra baik dan menyembunyikan citra negatif untuk mendapat dukungan dari publik. Dalam bidang sosialbudaya, era digital juga memiliki pengaruh positif dan dampak negatif yang menjadikan tantangan untuk memperbaikinya. Kemerossotan moral di kalangan masyarakat khususnya remaja dan pelajar menjadi salah satu tantangan sosial budaya yang serius. Pola interaksi antar orang berubah dengan kehadiran teknologi era digital seperti komputer terutama pada masyarakat golongan ekonomi menengah ke atas. Komputer yang disambungkan dengan telpon telah membuka peluang bagi siapa saja untuk berhubungan dengan dunia luar tanpa harus bersosial langsung. Dalam bidang pertahanan dan keamanan penggunaan teknologi di era digital berperan dalam membantu pertahan dan keamanan nasional. Lembaga militer diantaranya, telah menempatkan teknologi informasi sebagai salah satu senjata yang mendukung kekuatan dan persatuan organisasi. Sejalan dengan kekhasan organisasi militer yang selalu menuntut kecepatan dan ketepatan informasi sebelum mengambil sebuah keputusan (perumusan strategi), penerapan teknologi digital sangat mendukung programtersebut. Teknologi informasi telah berpengaruh pada perubahan strategi militer. Tantangan dalam bidang pertahanan seperti menghadapi ancaman dari luar yang bersifat maya seperti aktifitas hacker yang bisa merusak sistem situs pertahanan Indonesia menjadi perhatian serius. Teknologi digital dikombinasikan dengan teknologi perang lainnya memungkinkan untuk menciptakan jenis perang yang secara kualitatif seperti penggunaan robot perang. Dalam bidang teknologi informasi sendiri, tantangan nyata pada era digital semakin kompleks karena berbagai bidang kehidupan membawa pengaruh-pengaruh yang bisa membuat perubahan di setiap sisi. Teknologi informasimerupakan bidang pengelolaan teknologi dan mencakup berbagai bidang (tetapi tidak terbatas) seperti proses, perangkat lunak komputer, sistem informasi, perangkat keras komputer, bahasa program, dan data konstruksi. Setiap data, informasi atau pengetahuan yang dirasakan dalam format visual apapun, melalui setiap mekanisme distribusi multimedia, dianggap bagian dari teknologi informasi. Teknologi informasi memfasilitasi bisnis dalam empat set layanan inti untuk membantu menjalankan strategi bisnis: proses bisnis otomatisasi, memberikan informasi, menghubungkan dengan pelanggan, dan alat-alat produktivitas. Tantangan dalam bidang teknologi informasi sangat banyak seperti memecahkan suatu masalah, membuka kreativitas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan

Dalam perkembangan teknologi digital ini tentu banyak dampak yang dirasakan, baik dampak positif maupun dampak negatifnya. Dampak positif era digital antara lain:



- a). Informasi yang dibutuhkan dapat lebih cepat dan lebih mudah dalam mengaksesnya.
- b). Tumbuhnya inovasi dalam berbagai bidang yang berorientasi pada teknologi digital yang memudahkan proses dalam pekerjaan kita.
- c). Munculnya media massa berbasis digital, khususnya media elektronik sebagai sumber pengetahuan dan informasi masyarakat.
- d). Meningkatnya kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi
- e). Munculnya berbagai sumber belajar seperti perpustakaan online, media pembelajaran online, diskusi online yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan.
- f). Munculnya e-bisnis seperti toko online yang menyediakan berbagai barang kebutuhan dan memudahkan mendapatkannya.

Adapun dampak negatif era digital yang harus diantisipasi dan dicari solusinya untuk menghindari kerugian atau bahaya, antara lain adalah :

- a). Ancaman pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) karena akses data yang mudah dan menyebabkan orang plagiatis akan melakukan kecurangan.
- b). Ancaman terjadinya pikiran pintas dimana anak-anak seperti terlatih untuk berpikir pendek dan kurang konsentrasi.
- c). Ancaman penyalahgunaan pengetahuan untuk melakukan tindak pidana seperti menerobos sistem perbankan, dan lain-lain (menurunnya moralitas).
- d). Tidak mengefektifkan teknologi informasi sebagai media atau sarana belajar, misalnya seperti selain men-download e-book, tetapi juga mencetaknya, tidak hanya mengunjungi perpustakaan digital, tetapi juga masih mengunjungi gedung perpustakaan, dan lain-lain.

## **5. Prospek Digitalisasi Ekonomi**

Ekonomi digital terbukti mampu memberikan kontribusi yang signifikan pada PDB Indonesia pada 2017 yaitu sebesar 7,3 persen. Padahal pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya 5,1 persen. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi digital Indonesia memiliki prospek yang sangat menjanjikan bila dikelola dengan baik karena pertumbuhannya melebihi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Masa depan ekonomi digital Indonesia sepatutnya menjadi fokus kita bersama dalam membangun kolaborasi dan mengoptimalkan nilai tambah ekonomi. Apabila dicermati, potensi ekonomi digital di Indonesia bisa mencapai USD 65 miliar pada 2022 sebagaimana prediksi Lembaga riset *McKinsey &*

*Company*. Selain itu, menurut data *World Market Monitor*, ekonomi digital diproyeksi menyumbang USD 155 miliar atau 9,5 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia pada 2025. Sumbangan itu terdiri atas peningkatan lapangan kerja senilai 35 miliar dolar AS atau 2,1 persen PDB serta mendorong produktivitas 120 miliar dolar AS atau 7,4 persen PDB.

Kita patut bersyukur ekonomi digital Indonesia bila dicermati dari salah satu pilarnya, menempati peringkat tertinggi dalam pertumbuhan *E-commerce* di dunia. Menurut PPRO, pertumbuhan *E-commerce* Indonesia mencapai 78%, jauh melampaui rata-rata pertumbuhan dunia yang hanya berada pada angka 14% dan Asia pada angka 28%. Dalam perjalannya kini kita dapat menyaksikan terdapat 4 star up bisnis Indonesia yang berhasil menyandang status *unicorn*, atau mencatatkan valuasi di atas USD 1 milyar yakni Gojek, Bukalapak, Tokopedia dan Traveloka dan yang membanggakan, seluruhnya generasi milenial sebagai masa depan penggerak ekonomi Indonesia.

Berbagai capaian tersebut di atas, seyogyanya dapat menjadi penambah semangat bagi para pemangku kepentingan di Indonesia dalam terus berkolaborasi menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan ekonomi digital, komitmen pemerintahan Jokowi dalam pengembangan ekonomi digital telah dimulai dengan dibatalkannya Daftar Investasi Negatif untuk *e-commerce*, penyesuaian atas kewajiban server berada secara fisik di Indonesia, pendekatan progresif terhadap pajak penjualan *e-commerce* serta dukungan dan perlindungan bagi perusahaan-perusahaan rintisan (*start up*),

Kita tentunya berharap langkah-langkah terobosan tersebut perlu terus dikembangkan, utamanya dalam memastikan berkelanjutannya langkah-langkah kebijakan yang akomodatif dari pusat sampai dengan daerah yang bermuara kepada upaya memberikan proteksi terhadap pengembangan ekonomi digital di Indonesia.

Para pemegang otoritas diharapkan dapat menerapkan kebijakan secara *light touch* (tidak terlalu mengekang) dan *safe harbour* (tanggung jawab terpisah antara penyedia situs jual beli daring berkonsep *marketplace* dengan penjual yang memakai jasa mereka), sehingga inovasi akan memiliki ruang untuk berkembang dengan baik.

Pilihan strategi pengembangan ekonomi digital merupakan langkah tepat yang perlu terus didukung para pemangku kepentingan, mengingat potensi demografi yang kita miliki, dilihat dari komposisi penduduknya, jauh lebih menguntungkan dibandingkan lima negara Asia lainnya dengan PDB besar, seperti China, Jepang, India, dan Korea.

Indonesia memiliki usia produktif mendominasi yang akan menjadi kekuatan dashyat bila dapat ditransformasi sebagai agen perubahan melalui

ekonomi digital, data BPS menyebutkan sekitar 32% penduduk usia produktif pada 2016 adalah milenial. Generasi yang *curious, interest*, bahkan aktif berpartisipasi di pasar digital.

Disamping pemanfaatan bonus demografi, investasi di bidang *information and communication technologies* (ICT) seyogyanya perlu terus ditingkatkan, sehingga sejalan dengan struktur demografis, agar dapat menjadi modal Indonesia memanfaatkan teknologi dan era ekonomi digital untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pertumbuhan peran sektor dasar terhadap ekonomi yang terus berkurang dan sektor jasa terus meningkat menjadi indikasi kuat urgensi pengembangan ekonomi digital sebagai “wajah baru” ekonomi Indonesia.

Kita tentunya berharap dengan pembangunan SDM yang mulai dilakukan secara masif pada tahun 2019 ini, ini dapat diikuti dengan komitmen yang kuat dari para seluruh pemangku kepentingan untuk adaktif dalam mempersiapkan SDM yang andal, melalui perbaikan kurikulum, vokasi guna menghasilkan SDM yang andal dalam menjawab tantangan sekaligus menangkap peluang ekonomi digital

Berbagai upaya tersebut sangat diperlukan untuk terus ditumbuhkembangkan mengingat ekonomi digital di Indonesia sejauh ini sudah menumbuhkan dan menopang UMKM di Indonesia. Bermunculannya berbagai usaha rintisan yang didominasi kaum milenial baik yang berbasis kuliner, jasa dan perdagangan *online* adalah contoh nyatanya, fenomena tumbuhnya *technology financial* (fintech) dalam 3 tahun terakhir menandakan perkembangan yang menggembirakan dari ekonomi digital yang perlu terus diikuti dengan peningkatan infrastruktur bersamaan dengan literasi warga masyarakat mengenai keuangan digital.

Melihat potensi besar yang dimiliki Indonesia serta langkah-langkah awal yang telah dilakukan dan perkembangan yang menajubkan, kita optimis Ekonomi Digital Indonesia 2020 akan segera terwujud dan ekonomi digital akan menjadi “wajah baru” ekonomi Indonesia yang akan mampu mengungkit Indonesia menjadi 10 besar ekonomi dunia pada tahun 2030.

## **6. Peran Digitalisasi Ekonomi**

Awalnya teknologi digital akan mempermudah pekerjaan manusia di berbagai bidang termasuk bidang ekonomi. Seiring berjalannya waktu dan perkembangan, maka teknologi digital beralih fungsi menjadi pengendali bisnis/usaha. Saat ini beberapa perusahaan, baik yang berskala besar, sedang maupun kecil telah memanfaatkan teknologi digital. Tujuan pemanfaatan teknologi digital adalah untuk memperlancar usaha/bisnis dan meningkatkan pendapatan maupun omset perusahaan.

Peran teknologi digital pada dunia usaha kemudian lebih dikenal dengan beberapa istilah seperti *e-bussines*, *e-commerce*, *e-money*, *market place*, *e-banking* dan *fintech*. Dengan adanya digitalisasi banyak hal mengalami perubahan, antara lain adalah:

a. Proses transaksi

Sebelum era digital, transaksi dilakukan dengan bertemunya penjual dan pembeli, kemudian mereka berinteraksi dan bernegosiasi sehingga tercapai kesepakatan harga. Dengan munculnya digitalisasi ekonomi, maka penjual dan pembeli tidak harus hadir dan bertemu di satu tempat untuk melakukan transaksi. Penggunaan marketplace seperti bukalapak, tokopedia, shopee menjadi penghubung antara pembeli dan penjual tanpa harus bertemu secara langsung

b. Lokasi usaha

Untuk operasional bisnisnya, pedagang/perusahaan tidak memerlukan tempat/ruang. Bahkan tidak memerlukan juga ruangan untuk menyimpan barang. Dengan demikian biaya operasional menjadi lebih rendah.

c. Promosi dan pemasaran

Adanya digitalisasi ekonomi membuat proses promosi dan pemasaran menjadi lebih mudah, fleksibel dan murah. Promosi dan pemasaran bisa dilakukan melalui media sosial seperti fb, ig dan WA. Proses promosi dan pemasaran lewat media sosial terbukti sangat efisien dan efektif, sebab menasar pada target pasar yang tepat. Jangkauan konsumen tidak dibatasi ruang, waktu dan tempat, karena bisa berskala lokal, nasional bahkan internasional.

Di era digitalisasi, para pelaku usaha/bisnis dapat melakukan komunikasi, negosiasi dan transaksi dengan menggunakan aplikasi atau website. Aplikasi tersebut tersedia didalam smartphone dan semua proses transaksi dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat. Jadi peran digitalisasi dalam bisnis/usaha sangat besar, terutama dapat :

- a. Mempercepat komunikasi
- b. Mempermudah transaksi
- c. Menghemat biaya produksi
- e. Meningkatkan jangkauan pemasaran

## 7. Strategi Pengembangan Digitalisasi Ekonomi

Proses digitalisasi ekonomi perlu terus dikembangkan agar dapat memberikan manfaat pada para pelaku ekonomi. Untuk itu perlu disusun beberapa langkah strategi sebagai berikut :

- a. Memperbaiki kualitas layanan digital untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing sektor pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar dapat beradaptasi dengan kebutuhan lapangan kerja masa depan.
- c. Mengintegrasikan riset, desain, dan pengembangan dengan modernisasi industri dan sektor produktif lainnya.
- d. Mendorong pengembangan teknologi finansial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dengan memaksimalkan dukungan konektivitas internet dan penetrasi telepon genggam.
- e. Memperkuat ekosistem inovasi dengan kolaborasi antara pemerintah, pelaku bisnis, institusi pendidikan, dan komunitas.
- f. Mendorong kolaborasi perusahaan rintisan atau *start-up*, mencakup pengembangan ekosistem, akselerasi, inkubasi, hingga model bisnis dan aspek berkelanjutan dari bisnis *start-up*.

## PENUTUP

Kondisi *new normal* saat ini sangat diperlukan untuk menggerakkan ekonomi yang sempat berhenti akibat adanya pandemi Covid-19. Pergerakan ekonomi masyarakat harus tetap mematuhi aturan protokol kesehatan yang ketat demi menghambat peningkatan penularan virus Covid-19. Protokol kesehatan yang harus di jalankan seperti mencuci tangan dengan air mengalir dan menggunakan sabun, memakai masker dan *social distancing*. Dengan keterbatasan interaksi, maka diperlukan teknologi informasi/digital untuk menjembatani. Sebenarnya digitalisasi sudah mulai ada beberapa dekade yang lalu dan perkembangannya menjadi semakin cepat dengan adanya Covid-19.

Pada awalnya, digitalisasi ekonomi dimanfaatkan untuk memperlancar proses komunikasi, negosiasi dan transaksi. Tetapi saat ini justru menjadi primadona karena ternyata dapat mempunyai banyak fungsi, termasuk memperlancar serta membuat usaha/bisnis menjadi efisien dan efektif. Dari berbagai keunggulan yang dihasilkan oleh adanya digitalisasi ekonomi, tidak menutup kemungkinan ada efek negatifnya. Untuk meminimalisir adanya efek negatif dari digitalisasi ekonomi, maka kita perlu:

1. Berhati-hati dan bijak dalam menghadapi permasalahan yang terkait dengan digitalisasi.
2. Memanfaatkan untuk hal-hal yang positif
3. Menyaring dan melakukan kroscek tentang kebenaran informasi yang kita dapatkan

**DAFTAR PUSTAKA**

- Hartono Jogiyanto (2016). Menyambut Ekonomi Digital. Majalah Ebnews Edisi 23 Tahun 2016. Diakses 22 Agustus 2020.  
<https://feb.ugm.ac.id/id/penelitian/artikel-dosen/2211-menyambut-ekonomi-digital>
- Kementerian PPN/Bappenas (2019). Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Ekonomi Digital tahun 2020-2024.
- (2019). Pemerintah Susun 6 Strategi Pemanfaatan Teknologi Digital. diakses 21 Agustus 2020.  
<https://ekonomi.bisnis.com/read/20190729/9/1129859/pemerintah-susun-6-strategi-pemanfaatan-teknologi-digital>
- Sayekti, NW (2018). Tantangan Perkembangan Ekonomi Digital di Indonesia. Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis, Vol. X, No. 5/I/Puslit/Maret/2018
- Setiawan Wawan (2017). Era Digital dan Tantangannya. Seminar Nasional Pendidikan.
- Sugiarto, EC (2019). Ekonomi Digital: The New Face of Indonesia's Economy. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Diakses 19 Agustus 2020.  
[https://www.setneg.go.id/baca/index/ekonomi\\_digital\\_the\\_new\\_face\\_of\\_indonesias\\_economy](https://www.setneg.go.id/baca/index/ekonomi_digital_the_new_face_of_indonesias_economy)
- Wibowo, EW (2018). Analisis Ekonomi Digital dan Keterbukaan terhadap Pertumbuhan GDP negara Asean. Jurnal Lentera Bisnis. vol. 7 No. 2, November 2018.

---

## TRANSPORTASI INDONESIA DI TENGAH COVID-19

**Nadia Damayanti, Shanty Oktavilia, Amin Pujiati**

Pandemi COVID-19 telah mengubah perilaku masyarakat dunia, termasuk perikehidupan penduduk di Indonesia. Perilaku ekonomi dan masyarakat bergerak menuju ke arah kehidupan normal baru (*new normal*). Hal ini terlihat dari perilaku produksi pada sektor industri, perdagangan, aktifitas konsumsi/belanja, gaya hidup, mobilitas dan transportasi dan seluruh aktifitas hidup masyarakat. Perubahan itu sendiri telah membawa dampak melalui kehidupan sehari-hari. Banyak yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena mereka di-PHK sejak pandemi mulai pada pertengahan Februari 2020. Seluruh situasi tersebut tidak dapat dipungkiri menimbulkan banyak masalah di bidang ekonomi dan sosial. Bagi sebagian masyarakat, pandemi ini dinilai tidak terlalu berefek parah dalam mengganggu ekonomi dan politik (Bartik, et al., 2020; Walmsley, Rose, & Wei, 2020). Namun, Ini tentu saja menjadi ancaman bagi sistem perawatan kesehatan kita dan kesejahteraan orang lain.

Seiring dengan meningkatnya jumlah kasus setiap hari di Indonesia, pemerintah mengumumkan bahwa pertumbuhan ekonomi mengalami pelemahan pada Triwulan ke-2. Badan Pusat Statistik (2020) telah merilis pertumbuhan pada kuartal kedua sebesar -5,32 persen dan para ahli mengatakan bahwa Indonesia berada dalam bahaya resesi. Penurunan pertumbuhan ekonomi terutama disumbangkan oleh penurunan dua sektor utam yaitu sektor transportasi dan logistik, dan sektor perdagangan hotel, makanan dan minuman. Transportasi dan logistik melemah sebesar 31 persen pada kuartal kedua dibandingkan dengan grafik tahun 2019 (The Strait Times, 2020; Badan Pusat Statistik, 2020).

Lonjakan jumlah kasus dan langkah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mengubah cara masyarakat di Indonesia memilih moda transportasi, baik untuk perjalanan pulang pergi, belanja, rekreasi, dan transit. Selain itu, pengaruh perlambatan sektor transportasi dan logistik juga dikhawatirkan akan mempengaruhi arus barang dan jasa yang diperlukan masyarakat, yang pada akhirnya akan mempengaruhi harga. Selama masa pandemi, banyak terjadi pergeseran dan bahkan penghentian jadwal angkutan umum. Seluruh moda angkutan juga merubah seluruh aktifitas normalnya, menyesuaikan ketentuan normal baru yaitu angkutan umum harus memungkulkan

penumpang menjaga jarak secara fisik. Pada sisi risiko yang dihadapi masyarakat terhadap penyebaran wabah, social distancing, dan pembatasan aktifitas masyarakat akan terhindari dari potensi penyebaran Covid-19. Masyarakat juga telah memiliki alternatif cara dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagian pekerja diperbolehkan bekerja dari rumah, dan kebutuhan hidup dapat dipenuhi dengan membeli produk secara online. Kebiasaan baru masyarakat ini pada sisi transportasi logistik membawa perubahan. Namun demikian kondisi ini dari sisi jasa angkutan penumpang, perlu banyak melakukan penyesuaian. Pembatasan aktifitas manusia akan mengurangi jumlah penumpang angkutan orang. Ketentuan jarak fisik juga akan menimbulkan perubahan biaya dan periode pengembalian modal pada usaha jasa transportasi, sementara kondisi konsumen dan perekonomian belum siap untuk terjadi kenaikan biaya transportasi

### **ALAT TRANSPORTASI SEBAGAI SARANA MOBILITAS**

Moda transportasi selama ini menjadi andalan masyarakat untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Peran moda transportasi sejak itu menghubungkan bisnis dan memfasilitasi interaksi antar kota (Pedersen, 2019). Begitu manusia menemukan kendaraan yang bergerak cepat, hal tersebut akan menjadi katalisator bagi banyak sektor seperti sosial ekonomi, pariwisata, dan perdagangan. Transportasi terbagi menjadi dua jenis, yaitu angkutan pribadi dan umum. Kendaraan pribadi terdiri dari jenis kendaraan apa saja, terutama roda dua dan roda empat yang dimiliki oleh perorangan. Sedangkan kendaraan umum adalah kendaraan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dan biasanya dimiliki oleh pemerintah atau perusahaan swasta. Ketergantungan masyarakat Indonesia terhadap angkutan umum masih sangat besar. Banyak orang Indonesia masih mengandalkan transportasi umum bahkan dalam pandemi ini. Hal ini disebabkan faktor aksesibilitas, pendapatan, lokasi perumahan dan relatif murah yang strategis dengan ketersediaan transportasi massal (Dewita, Burke, & Yen, 2019). Jika dibandingkan dalam memilih angkutan, masyarakat memilih angkutan umum karena tidak melelahkan, relatif lebih cepat (tidak macet) dan tersedia trayek tertentu/disediakan jalur khusus. Namun, ada masyarakat yang lebih memilih transportasi pribadi daripada angkutan umum karena buruknya kinerja infrastruktur publik, prasangka, kepercayaan, simbolisme, status, dan faktor psikologis lainnya. (Dirgahayani & Sutanto, 2020; Thøgersen & Møller, 2008)

Tak dapat dipungkiri, transportasi memiliki tujuan penting di tengah pandemi ini. Orang lebih banyak tinggal di rumah daripada biasanya, karena bekerja/belajar dari rumah dan PSBB serta adanya pengurangan kapasitas pemrosesan, penutupan jalan dan pelabuhan, serta pembatasan transportasi untuk mencegah penyebaran penyakit. Namun, PSBB dapat mengganggu rantai



distribusi. Efeknya pada PSBB telah memperlambat rantai pasokan dan distribusi pangan secara signifikan (Amanta & Aprilianti, 2020; Inegbedion, 2020). Perannya dalam rantai distribusi membuat sulit untuk menemukan substitusi lain untuk hal tersebut. Untuk mencegah efek samping PSBB, pemerintah daerah dan pusat harus mengambil tindakan untuk meminimalkan wabah serta menjaga rantai pasokan secara optimal.

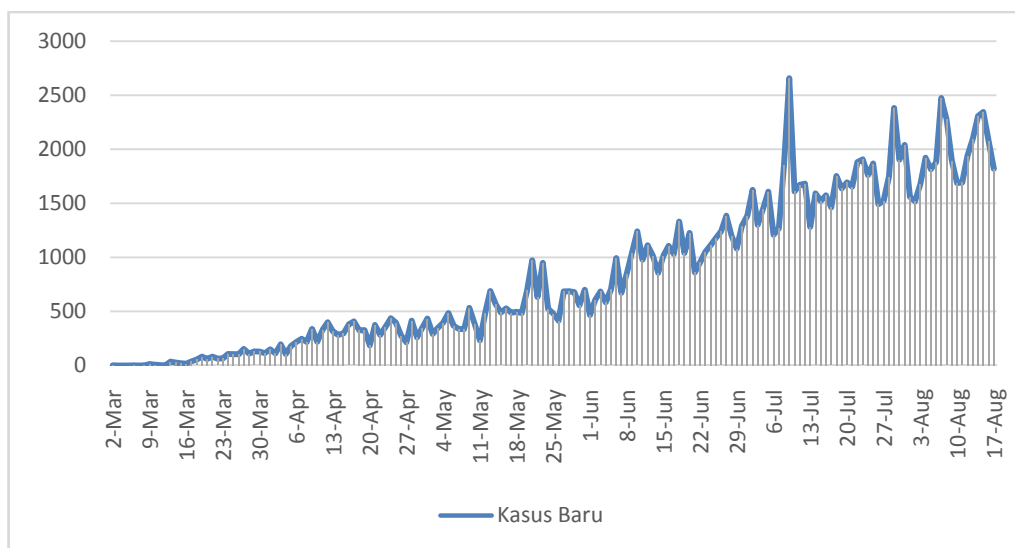
Selain kemungkinan terganggunya perubahan distribusi, selama PSBB di beberapa kota lokal di Indonesia, terdapat beberapa perubahan jadwal dan izin penumpang angkutan umum dan peraturan lainnya seperti kebijakan ganjil-genap, Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) di Jakarta, membuat bahkan lebih sulit bagi sebagian orang yang harus tetap bekerja untuk mengakses transportasi. Banyak orang harus antri untuk menuju KRL di beberapa kota karena keterbatasan penumpang dan jarak fisik serta peraturan lain yang melarang orang membatasi penumpang seperti sepeda motor dan mobil, meski itu hanya berlangsung sebentar. Peraturan tersebut dimaksudkan untuk mencegah penyebaran wabah lebih besar terutama di kota-kota dengan kasus yang terus meningkat. Sebaik-baiknya sebuah regulasi, ia memiliki kelemahan seperti sisi lain dari koin. Terlebih di beberapa kota besar di Indonesia perlu adanya peningkatan kualitas sarana dan prasarana untuk menunjang kenyamanan dan keamanan penumpang terutama pada saat pandemi (Pujiati, Nihayah, Adzim, & Nikensari, 2020; Pujiati, Nihayah, Bowo, & Prastiwi, 2019; Yuana, Sengers, Boon, & Raven, 2019). Dengan mengatasi masalah ini, sangat mungkin untuk menahan penyebaran wabah dan pada saat yang sama mendorong perekonomian.

## **COVID-19 DI INDONESIA**

Perkembangan Covid-19 di Indonesia belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Hingga 17 Agustus 2020, kasus aktif sebanyak 40.705 orang dan total kematian 6.207 orang. Kasus pertama yang dikonfirmasi diumumkan pada 2 Maret 2020. Sejak itu, pemerintah telah memberlakukan berbagai tindakan, seperti larangan sementara perjalanan udara dan laut domestik dan internasional, penyaringan di pelabuhan, dan pembatasan acara publik lainnya. Pemerintah juga melarang mudik tahunan selama Idul Fitri untuk mengekang COVID-19, tetapi itu tidak menghentikan beberapa orang untuk berangkat dari lokasi mereka ke lokasi lain. Perilaku tersebut tidak sejalan dengan rencana pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan melakukan *social distancing*.

Target pertumbuhan ekonomi 2020 sudah pasti tidak akan tercapai seperti rencana awal. Diperlukan banyak penyesuaian agar perekonomian kembali bergerak menuju perbaikan. Pada kuartal kedua, pertumbuhan

ekonomi Indonesia negatif. Pengurangan konsumsi dan investasi sebagai tindakan penahanan menyebabkan terganggunya mobilitas dan aktivitas menjadi alasan utama perlambatan tersebut. Banyak orang lebih suka uang mereka disimpan jika terjadi sesuatu daripada dihabiskan dan serta adanya pembatasan mobilitas dan aktivitas orang.



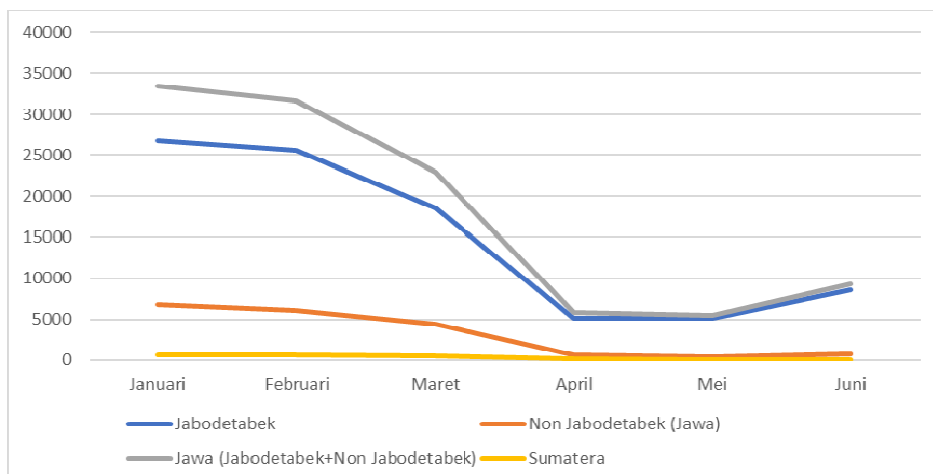
Sumber: (Kawal COVID-19, 2020)

**Gambar 1.** Jumlah Kasus Baru Covid-19 di Indonesia Maret-Agustus 2020

Menyusul jatuhnya pertumbuhan adalah fenomena lain yang muncul ke permukaan bagi pertumbuhan ekonomi. Karena beberapa orang mungkin bekerja dari rumah, hal ini meningkatkan waktu perdagangan di IHSG. Dampaknya adalah penguatan IHSG ketika investor asing melakukan net-selling asetnya dari emerging market. Menurut Inarno Djajadi, Direktur Bursa Efek Indonesia, investor ritel di Indonesia telah mencapai tiga juta Single Investor Identification (SID) dan jumlah investor yang aktif berdagang setiap hari pada tahun 2020 adalah 93.000 hingga 112.000.

Melihat pasang surut itu, ada juga fenomena lain dalam pandemi ini. Banyaknya orang yang di-PHK dari pekerjaannya, orang yang bekerja dan belajar dari rumah, dan perubahan mobilitas orang, sehingga mengganggu moda transportasi. Pada gambar terlihat bahwa ada perubahan di bulan Februari dan kumuh di bulan April. Padahal, pada Januari 2020 dibandingkan Januari 2019 dengan data year-on-year, jumlah penumpang lebih rendah dibanding tahun 2019. Hal ini juga terjadi pada kendaraan lain seperti kapal dan pesawat. Masuk akal karena ketika orang berada di dalam pesawat, tidak banyak kemungkinan untuk menjauhkan orang asing secara fisik. Menurut Knittel dan Ozaltun (2020) ada hubungan yang menarik antara tingkat

kematian dan penggunaan transportasi umum. Prolaps ini menyebabkan pertumbuhan yang lebih rendah di sektor transportasi, sebagai kontributor utama pertumbuhan negatif secara agregat.



Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2020)

**Gambar 2.** Jumlah Penumpang Kereta Api Tahun 2020 (Ribu Orang)

## MOBILITAS MASYRAKAT INDONESIA PADA PANDEMI COVID-19

Selama pandemi ini, hampir semua rutinitas telah ditunda karena adanya pembatasan dan PSBB. Sejalan ini, hal itu telah memengaruhi mobilitas dan rantai distribusi barang dan jasa. Penurunan jumlah penumpang dari moda transportasi seperti kereta api, kapal, dan pesawat yang masuk dan keluar Indonesia relatif besar pada tahun 2020. Hal ini menyebabkan menipisnya jumlah mobilitas seperti orang yang berangkat kerja, sekolah, belanja, liburan, dan distribusi. Hal ini tentunya akan menjadi tantangan dalam beberapa bulan ke depan karena dapat menimbulkan efek domino bagi sektor lain.

Community Mobility Report adalah alat yang dikembangkan oleh Google dengan membuat laporan berdasarkan kumpulan data yang dikumpulkan dan dianonimkan dari pengguna yang telah mengaktifkan setelan riwayat lokasi di ponsel mereka. Di Indonesia, praktik ini bisa dilakukan dengan menyalakan GPS di smartphone sehingga Google bisa mengambil history lokasi. Hal ini juga dapat dilakukan tanpa disengaja dengan menyalakan GPS atau melalui Mobile JKN dengan mengisi Skrining Mandiri dan dengan demikian data lokasi dapat disimpan dan diperoleh secara sistematis dari masing-masing individu dalam suatu wilayah geografis. Selama ini masyarakat bisa mengaksesnya secara regional dan nasional. Alat ini dapat digunakan untuk melacak aktivitas orang dan pelacakan kontak serta untuk menganalisis mobilitas orang. Semoga ketika orang menggunakan aplikasi ini dan dengan sukarela menjawab

pertanyaannya, membuat pelacakan kontak lebih mudah dan lebih detail, seperti Korea Selatan membuktikan bahwa pelacakan kontak benar-benar berfungsi. (Korea Centers for Disease Control and Prevention (KCDC); Reuters, 2020)



Novel Coronavirus (nCoV) atau yang biasa kita sebut virus corona adalah jenis virus corona baru yang menimbulkan penyakit yang bernama COVID-19.

Sebagai upaya penekanan perkembangan Covid-19, maka Mobile JKN turut serta menekan perkembangan Covid-19 dengan melakukan Skrining Mandiri terhadap peserta yang dilakukan oleh peserta sendiri dengan ketentuan:

- Lokasi pengisian akan disimpan pada sistem.
- Data diisi sejujur-jujurnya.
- Data yang digunakan adalah data riwayat skrining dalam waktu 14 hari terakhir.

Kerahasiaan Data akan dijamin oleh BPJS Kesehatan.

Keluar

Mulai

Sumber: (BPJS Kesehatan, 2020)

**Gambar 2.** Disclaimer Skrining Mandiri COVID-19

Perubahan laporan ditunjukkan oleh headline number dan trend graph. Headline number membandingkan mobilitas pada hari tersebut dengan hari dasar. Kecuali ada celah, laporan dihitung dan dilaporkan sebagai persentase positif dan negatif. Trend graph adalah persentase perubahan dalam 6 minggu sebelum tanggal laporan. Hari dasar menunjukkan nilai normal untuk hari itu dalam seminggu. Hari dasar adalah nilai median dari periode 5 minggu 3 Jan - 6 Feb 2020 (Google LLC, 2020).

Ada enam kategori tempat berbeda di laporan. Semua kategori ini menunjukkan laporannya sendiri ke beberapa tempat yang terhubung ke kategori. Masing-masing memiliki angka dasar, grafik tren, dan judulnya sendiri. Ini adalah enam kategori tempat yang berbeda:

1. Ritel dan rekreasi (*Retail and recreation*) menunjukkan tren mobilitas untuk tempat-tempat seperti restoran, kafe, pusat perbelanjaan, taman hiburan, museum, perpustakaan, dan bioskop.

2. Toko kelontong dan apotek (*Grocery and pharmacy*) menunjukkan tren mobilitas untuk tempat-tempat seperti pasar grosir, gudang makanan, pasar petani, toko makanan khusus, toko obat, dan apotek.
3. Taman (*Parks*) menunjukkan tren mobilitas untuk tempat-tempat seperti taman nasional, pantai umum, marina, taman anjing, plaza, dan taman umum.
4. Stasiun transit (*Transit station*) menunjukkan tren mobilitas untuk tempat-tempat seperti pusat transportasi umum seperti stasiun kereta bawah tanah, bus, dan kereta api.
5. Tempat kerja (*Workspace*) mencakup tren mobilitas untuk tempat-tempat seperti tempat kerja.
6. Hunian (*Residential*) meliputi tempat tinggal.



Sumber: (Google LLC, 2020)

**Gambar 3.** Indeks Mobilitas Nasional di Indonesia

Seperti terlihat pada gambar di atas, dari tanggal 15 Februari 2020 hingga 10 Maret 2020, mobilitas masyarakat tidak terlalu terganggu hingga seminggu setelah pemerintah mengumumkan kasus aktif untuk pertama kalinya. Kemudian, pembatasan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari masyarakat, termasuk pergerakan mobilitas mereka. Pada saat mencapai pertengahan Maret, sebagian masyarakat mulai lebih banyak tinggal di pemukiman dari biasanya (baseline) hal ini dikarenakan bekerja / belajar dari rumah. Kategori toko dan apotek tercermin lebih tinggi dari biasanya ketika tiga hari sebelum Idul Fitri di mana beberapa orang menyiapkan bahan makanan dan pada 30 Juli 2020, pada Idul Adha. Mobilitas tertinggi ke toko bahan makanan sejauh ini pada tahun 2020. Kategori lain telah tertidur dari baseline sejak 10 Maret 2020. Terutama, kategori Tempat Kerja dan Stasiun Transit, yang selalu merupakan yang terendah dari semua kategori, adalah kategori yang terkena imbas paling tinggi daripada yang lain. Sehingga,

menjadikan transportasi menjadi salah satu kontributor utama penurunan pertumbuhan ekonomi.

## PENUTUP

Perlunya penyesuaian tarif jasa angkutan transportasi untuk keberlangsungan sektor transportasi di Indonesia merupakan salah satu jalan untuk menghidupkan kembali sektor transportasi pada situasi pandemi Covid-19. Pengusaha sebaiknya menerapkan jarak aman di dalam angkutan umum dan mengurangi stigma angkutan umum sebagai salah satu tempat penyebaran virus. Penyesuaian ini diatur sedemikian mungkin agar pengusaha tidak mengalami kerugian, serta agar membuat masyarakat merasa aman dalam menggunakan sarana transportasi publik. Masyarakat perlu terlibat dalam mengedukasi diri sendiri dalam keamanan berkendara selama pandemi. Alhasil, dengan adanya integrasi antara pihak pengusaha dan masyarakat sebagai penumpang akan berdampak dengan berjalannya perekonomian kembali di Indonesia secara umum dan di sector transportasi secara khusus.

## REFERENSI

- Amanta, F., & Aprilianti, I. (2020, May 5). *[Policy Brief] Indonesian Food Trade Policy during Covid-19*. Diambil kembali dari Center for Indonesia Policy Studies: <https://www.cips-indonesia.org/post/policy-brief-indonesian-food-trade-policy-during-covid-19>
- Badan Pusat Statistik. (2020, August 5). *Berita Resmi Statistik*. Diambil kembali dari Badan Pusat Statistik: <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/08/05/1737/-ekonomi-indonesia-triwulan-ii-2020-turun-5-32-persen.html>
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Jumlah Penumpang Kereta Api (Ribu Orang)*. Diambil kembali dari Badan Pusat Statistik: <https://bps.go.id/indicator/17/72/1/jumlah-penumpang-kereta-api.html>
- Bartik, A., Bertrand, M., Cullen, Z., Glaeser, E., Luca, M., & Stanton, C. (2020). How are small business adjusting to COVID-19? Early evidence from a survey. *The National Bureau of Economic Research*, 1-36.
- BPJS Kesehatan. (2020, August 10). *Skrining Mandiri COVID-19*. Diambil kembali dari Mobile JKN: [bps.go.id](https://bps.go.id)
- Dewita, Y., Burke, M., & Yen, B. (2019). The relationship between transport, housing and urban form: Affordability of transport and housing in Indonesia. *Case Studies on Transport Policy*, 252-262.
- Dirgahayani, P., & Sutanto, H. (2020). The effect of transport demand management policy on the intention to use public transport: A case in

- Bandung, Indonesia. *Case Studies on Transport Policy*.
- Google LLC. (2020, August 11). *Community Mobility Reports*. Diambil kembali dari Google COVID-19 Community Mobility Reports:  
<https://www.google.com/covid19/mobility/>
- Inegbedion, H. (2020). COVID-19 lockdown: implication. *Journal of Agribusiness in Developing and Emerging Economies*.
- Kawal COVID-19. (2020, August 17). *Statistik Harian*. Diambil kembali dari COVID-19 di Indonesia :  
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ma1T9hWbec1pXlwZ89WakRk-OfVUQZsOCF14FwZxzVw/htmlview#>
- Knittel, C. R., & Ozaltun, B. (2020). What does and does not correlate with COVID-19 death rates. *medRxiv*.
- Korea Centers for Disease Control and Prevention (KCDC); Reuters. (2020, March 20). *The Korean Clusters*. Diambil kembali dari Reuters Graphic:  
<https://graphics.reuters.com/CHINA-HEALTH-SOUTHKOREA-CLUSTERS/0100B5G33SB/index.html>
- Pedersen, J. H. (2019). *Transport infrastructure and quality of life index*. Denmark: Trafik Dage.
- Pujiati, A., Nihayah, D., Adzim, F., & Nikensari, S. (2020). IMPLEMENTATION OF SUSTAINABLE TRANSPORTATION USING GAP ANALYSIS: CASE STUDY OF SEMARANG CITY. *Journal of Critical Reviews* 7(7), 47-54.
- Pujiati, A., Nihayah, D., Bowo, P., & Prastiwi, F. (2019). Willingness To Pay For Improving The Quality Of Public Transportation. *Jejak* Vol 12 (2) , 365-381.
- The Strait Times. (2020, August 6). *Business*. Diambil kembali dari The Strait Times: [https://www.straitstimes.com/business/economy/indonesia-economy-shrinks-for-first-time-since-1999-by-sharper-than-expected-53?utm\\_term=Autofeed&utm\\_campaign=sttw&utm\\_medium=social&utm\\_source=Twitter#Echobox=1596605715](https://www.straitstimes.com/business/economy/indonesia-economy-shrinks-for-first-time-since-1999-by-sharper-than-expected-53?utm_term=Autofeed&utm_campaign=sttw&utm_medium=social&utm_source=Twitter#Echobox=1596605715)
- Thøgersen, J., & Møller, B. (2008). Breaking car use habits: The effectiveness of a free one-month travelcard. *Trans (Amst)* 35, 329-345.
- Walmsley, T., Rose, A., & Wei, D. (2020). Impacts on the U.S. macroeconomy of mandatory business closure in response to the COVID-19 Pandemic. *SSRN Electronic Journal*, 1-10.
- Yuana, S., Sengers, F., Boon, W., & Raven, R. (2019). Framing the sharing economy: A media analysis of ridesharing platforms in Indonesia and the Philippines. *Journal of Cleaner Production* Volume 212, 1154-1165.

---

## TRANSFORMASI MODA PRODUKSI USAHA PETERNAKAN SAPI PERAH

M. Ali Mauludin

### PENDAHULUAN

Perkembangan peternakan sapi perah di Pangalengan Kabupaten Bandung Jawa Barat mendapat perhatian maksimal dan dipandang positif dari sisi peningkatan penghidupan peternak dan tambahan pendapatan daerah serta menjadikan wilayah ini menjadi pusat pengembangan sapi perah di Jawa Barat. Hal tersebut tidak terlepas dari keberadaan kelembagaan lokal di sektor peternakan sapi perah yang menjadikan keberlanjutan kehidupan para peternak sapi perah. Dalam tulisan ini dipaparkan bagaimana ternak sapi perah yang ada di Pangalengan dari dulu hingga sekarang dapat berkembang dan bagaimana usaha pengembangan yang telah dilakukan dengan menggunakan pendekatan moda produksi.

Pemahaman moda produksi mengacu pada "*mode of production*" yang merupakan kombinasi dan dua elemen penting yang saling terkait, yaitu "*force of production*" (kekuatan produksi) dan "*relation of production*" (hubungan produksi) yang membahas mengenai realitas sosial dalam membentuk sebuah sejarah yang spesifik dari organisasi sosial. Secara umum, moda produksi merepresentasikan "cara" yang ditempuh masyarakat dalam melakukan proses produksi (*way of production*) guna menyediakan produk untuk memenuhi kebutuhan materil (Shanin, 1990)

Pada bagian ini, perspektif moda produksi di tinjau dari aspek historis. Hal tersebut bertujuan untuk memetakan tipe-tipe moda produksi yang hadir dari masa ke masa serta formasi sosial yang terbangun di Pangalengan. pengembangan peternakan sapi perah di Pangalengan terjadi dalam beberapa periode, diantaranya: periode penjajahan (sebelum tahun 1945), Periode Perintis (1945 s/d 1975) dan Periode kontemporer (1975 s.d sekarang). Pembagian periode tersebut berdasarkan faktor dominan yang mempengaruhi moda produksi perkembangan peternakan sapi perah di Pangalengan sehingga terjadi perubahan-perubahan dalam struktur komunitas peternak sapi perah.



## PEMBAHASAN

### 1. Moda Produksi pada Periode Penjajahan (Sebelum tahun 1945)

Periode ini merupakan awal dari pembentukan usaha peternakan sapi perah, diawali dari masa kolonial Belanda dilanjutkan dengan penjajahan oleh Jepang. Periode penjajahan ini merupakan masa pembentukan formasi sosial kapitalis awal, hal tersebut di tandai dengan masuknya moda produksi kapitalis kolonial melalui perkebunan sebagai artikulasinya<sup>1</sup> dan dilanjutkan dengan peternakan sapi perah sebagai artikulasinya. Eksploitasi terhadap hasil perkebunan seperti teh, kopi dan kina merupakan komoditi komersial tinggi yang digunakan untuk ekspor hal tersebut bertolak belakang atau berbeda dengan peternakan sapi perah yang sudah masuk ke Indonesia khususnya Pangalengan sebelum abad ke-19 atau sekitar tahun 1880-an. Pemerintah kolonial Belanda mengimpor sapi dari bangsa *Fries Hollands* (FH) ke Indonesia dengan orientasi awal adalah mengembangkan peternakan sapi perah yang berfungsi untuk pemenuhan kebutuhan mereka dalam mengkonsumsi susu dan selanjutnya komersialisasi (Soehadji, 2009). Bangsa Belanda terbiasa untuk mengkonsumsi susu sebagai pemenuhan kebutuhan protein hewani maka dari itu upaya kolonial Belanda untuk mengimpor dan mengembangbiakan di daerah jajahannya.

Penyebaran ternak sapi di daerah Pangalengan pada periode ini tidak sebanyak yang sekarang. Namun, dengan waktu berjalan akhirnya didirikan empat perusahaan peternakan sapi perah yang berkembang di Pangalengan diantaranya *de Friesche Trep*, *Almanak*, *Van der Est* dan *Bigman*. Empat perusahaan ini diorientasikan kepada komoditi produksi susu dengan penyebaran di daerah Pangalengan dan diwilayah Bandung dan sekitarnya.

Pangalengan dulu dan sekarang berbeda, yang membedakannya adalah dulu hanya satu wilayah yaitu pangalengan saja tetapi sekarang terjadi pemekaran sehingga Kecamatan Pangalengan terbagi menjadi 13 Desa. Komoditas utama dari pangalengan pada periode ini adalah disektor perkebunan antar lain kopi, teh dan kina. Produksi perkebunan tersebut berorientasi ekspor dengan perusahaan sebagai unit produksinya. Teknologi budidaya dan alat yang digunakan perkebunan lebih modern. Paling tidak sudah diperkenalkan mesin angkut dan pengolahan hasil perkebunan. Tenaga kerja mengandalkan buruh upahan sehingga hubungan sosial produksi lebih cenderung kearah hubungan hierarkis.

---

<sup>1</sup> Mengartikulasikan dan mengkontruksi bagaimana moda produksi pada masa kolonial terbentuk atau hadir pada masa ini didasarkan pada wawancara terhadap tokoh atau sesepuh orang tua yang dahulu pernah bekerja di perkebunan dan digabungkan dengan kontruksi yang telah dilakukan peneliti lain untuk di daerah pegunungan di Jawa.

Awal pembentukan moda produksi yang diartikulasikan peternakan sapi perah terus berjalan hingga saat ini, moda produksi peternakan sapi perah di Pangalengan pada waktu periode ini hanya satu yang terbentuk dan tidak memunculkan moda produksi peternakan sapi perah yang lain. Hal tersebut dikarenakan kekuasaan kolonial Belanda sangat besar dan kuat, sehingga tidak memungkinkan munculnya tipe-tipe moda produksi yang lain.

### 1.1. Kekuatan Produksi

Artikulasi Moda produksi usaha peternakan sapi perah dengan kekuatan produksi (alat produksi, modal, unit produksi, dan tenaga kerja utama) dan hubungan produksi (batas sosial hubungan produksi, struktur hubungan produksi, dan sifat produksi hubungan produksi) berkembang di Pangalengan pada masa penjajahan.

Kekuatan produksi peternakan sapi perah mengandalkan kemampuan modal uang untuk menggerakkan usaha peternakan sapi perah. Tidak ada segala kebutuhan tidak membutuhkan uang, meskipun lahan yang ada dapat dimiliki secara gratis tetapi biaya operasional lainnya membutuhkan biaya. Dukungan pendanaan yang kuat diperlukan untuk mengimpor sapi dari tempat asalnya dan mendatangkannya ke Pangalengan. Walaupun jalan menuju Pangalengan sudah di buka aksesnya dengan mengembangkan di sektor perkebunan. Tetapi hal tersebut tetap menjadi suatu perhatian dalam mengoperasionalkan usaha peternakan sapi perah. Selain pengadaan ternak melalui impor, modal uang digunakan untuk pembangunan kandang, penyediaan pakan (konsentrat), mengupah buruh, membeli alat-alat pendukung produksi dan lain-lain.

Alat produksi yang utama sebagai salah satu kekuatan produksi adalah lahan dan ternak sapi itu sendiri. Jenis sapi yang dikembangkan di pangalengan adalah jenis atau bangsa *Fries Holland* (FH) yang berasal dari Belanda. Adapun ciri-ciri dari sapi perah FH adalah 1) berwarna belang hitam dan putih, atau coklat dan putih, 2) pada kaki bagian bawah dan ekornya berwarna putih, 3) tanduk pendek dan menghadap ke muka, 4) terkadang pada dahinya terdapat belang warna putih yang berbentuk segitiga, 5) sifatnya jinak dan mudah dikuasai, 6) tidak tahan panas, 7) lambat dewasanya, 8) berat badan jantan rata-rata 850 kg atau lebih, sedang yang betina bisa mencapai 650 kg, dan 9) tubuhnya tegap (Mamun et al., 2015).

Artikulasi peternakan sapi perah hampir sama dengan artikulasi perkebunan dalam cara atau moda produksi, yang membedakan adalah penggunaan alat teknologi. Kekuatan produksi peternakan mengandalkan kemampuan modal untuk menggerakkan produksi. Ternak sapi perah sebagai kekuatan produksi utama dilanjutkan dengan lahan dalam pengembalaan atau penyediaan

hijauan, serta kandang yang disiapkan untuk ternak sapi. Berdasarkan organisasi atau unit produksi bahwa peternakan sapi perah yang berada di Pangalengan pada periode ini adalah berbentuk perusahaan. Dengan organisasi atau unit produksi usaha peternakan sapi perah adalah sebuah perusahaan, maka pastilah bahwa para pekerja atau buruh ternak yang dilibatkan adalah masyarakat sekitar perusahaan.

Karakteristik penjajah dan lamanya menjajah di Indonesia akan membedakan terhadap moda produksi usaha peternakan sapi perah yang berkembang di Pangalengan. Hal tersebut dapat dilihat bahwa pada masa kolonial Belanda tidak ada upaya bagi masyarakat untuk dapat mengakses terhadap kekuatan produksi yang ada adalah mereka selalu menjadi buruh ternak. Berbeda dengan kondisi pada masa pendudukan Jepang, kekuatan produksi tetap di kuasai oleh Jepang tetapi sebagian buruh ternak sudah dapat memelihara ternak yang sudah afkir tetapi masih memproduksi. Hal tersebut dikarenakan bahwa kondisi penjajah Jepang masih dalam kondisi yang tidak aman, dan membutuhkan logistik untuk siap berperang.

Dengan kondisi yang terjadi pada masa pendudukan Jepang terdapat moda produksi subsisten dalam usaha peternakan sapi perah yang dikelola oleh masyarakat sekitar perusahaan dalam hal ini adalah buruh ternak. Kekuatan produksi dalam usaha peternakan sapi perah rakyat antara lain: bahwa modal dalam artian uang adalah sangat terbatas, pengadaan sapi diperoleh dari pemberian dari pihak Jepang karena telah bekerja sebagai buruh ternak di perusahaan sapi perah, lahan yang dipergunakan untuk kandang terbatas dengan artian si ternak sapi perah dipelihara di samping atau dibelakang rumah. Selanjutnya kekuatan produksi yang berkembang untuk peternakan sapi perah secara subsisten antara lain : organisasi atau unit produksi dan tenaga kerja utama dilakukan oleh keluarga inti (semua terlibat dalam struktur keluarga) (Kahn, 1980)

## **1.2 Hubungan Produksi**

Hubungan produksi dalam moda produksi kapitalis kolonial usaha peternakan sapi perah tercermin dari batasan sosial. Batas sosial yang terbentuk adalah perusahaan dengan jelas berbagai aturan dalam pelaksanaan kegiatan produksi peternakan sapi perah serta perhitungan dalam analisis pengeluaran dan pemasukan keuangan. Dalam situasi sekarang, jika perusahaan berdiri dan menggerakkan produksi suatu barang maka pembagian yang tampak diperusahaan tersebut didasarkan atas tingkatan atau level yang diperolehnya. Hal tersebut akan sama dan terjadi pada perusahaan peternakan sapi perah yaitu sudah jelas tentang pembagian kerja serta akses yang diperoleh dari masing-masing pekerja dalam suatu struktur pekerjaan.

Buruh ternak jika dipandang dari stratifikasi dalam suatu perusahaan maka buruh ternak mendapati pada level yang paling bawah. Selanjutnya, mandor, manajer hingga sampai pemilik. Hal inilah yang menjadikan struktur hubungan produksi menjadi suatu hierarkis atau adanya suatu tingkatan dalam pekerjaan, seperti antara majikan dan buruh dimana terdapat jarak diantara mereka sehingga akan memunculkan bahkan dialami oleh setiap buruh yaitu adanya eksploitatif dalam mengerjakan aktivitas pekerjaannya.

Perkembangan cara produksi kapitalis Belanda di Pangalengan tidak dapat dipisahkan dari skema kapitalisme kolonial secara nasional dan dunia. Masuknya moda produksi kapitalis kolonial yang diartikulasikan pada peternakan sapi perah selain perkebunan teh dan kina di Pangalengan secara perlahan mengintegrasikan ekonomi desa pada aktivitas peternakan. Tenaga kerja yang dulunya hanya untuk pertanian keluarga terseret menjadi buruh upahan dalam perusahaan peternakan sapi perah milik kolonial Belanda. Hal lain dengan pendudukan Jepang dengan waktu yang cukup singkat tersebut ditambah kebutuhan tentara Jepang untuk mempertahankan dan ekspansi wilayah dalam perang dunia II menjadikan perhatian tidak maksimal dalam pengembangan peternakan sapi perah yang sudah di rintis sebelumnya oleh pihak kolonial Belanda. Hal ini yang menjadai para buruh ternak dapat memelihara ternak sapi perusahaan dilingkungannya.

Moda produksi subsisten yang terbentuk pada usaha peternakan rakyat, memberikan informasi tentang hubungan produksi. Batas sosial yang terbentuk dalam usaha peternakan sapi perah adalah keluarga inti yang terlibat. Tidak ditemukan hubungan produksi seperti di perusahaan yaitu buruh dan majikan, sedangkan struktur hubungan produksi adalah egaliter antar sesama anggota keluarga. Hal lain yang di perhatikan adalah bagaimana sifat dari hubungan produksi yang terbentuk. Sifat hubungan produksi adalah tidak ditemukannya eksploitatif terhadap unit atau orrganiasi produksi. Mengenai aspek moda produksi yang berkembang pada periode penjajahan (sebelum tahun 1945) dapat dilihat pada tabel 1.

## **2. Moda Produksi pada Periode Perintis (tahun 1945 - 1975)**

Pada periode ini seluruh aktivitas peternakan sapi perah sudah mulai dengan lembaran baru, tidak seperti pada jaman penjajah yang memiliki sifat hubungan produksi eksploitatif. ternak sapi perah yang dipelihara oleh warga sekitar diperoleh sebagai dampak dari menyerahnya jepang terhadap sekutu. Ternak sapi perah yang ada di perusahaan peninggalan Belanda dilimpahkan kepada Jepang selanjutnya dengan kekalahan jepang sisa-sisa ternak banyak dipelihara oleh warga sekitar dan inilah awal atau perintisan usaha peternakan sapi perah rakyat di Pangalengan.

**Tabel 1.** Moda produksi kapitalis kolonial Belanda dan subsisten

<b>Aspek Moda Produksi</b>	<b>Kapitalis Kolonial</b>	<b>Subsisten</b>
<b>A Kekuatan Produksi</b>		
1 Alat Produksi	Ternak Sapi perah & Lahan	Ternak Sapi perah & Lahan
2 Organisasi (unit) Produksi	Perusahaan	Keluarga Inti
3 Tenaga Kerja Utama	Buruh Upahan	Keluarga Inti
<b>B Hubungan Produksi</b>		
1 Batas Sosial Hubungan	Perusahaan	Keluarga Inti
2 Produksi	Hierarkis (majikan dan buruh)	Egaliter (antar keluarga inti)
3 Struktur Hubungan Produksi Sifat Hubungan Produksi	Eksplotatif	Non-Eksplotatif

Pengembangan peternakan sapi perah tidak semulus apa yang dicita-citakan, tantangan terbesar adalah bagaimana keberlanjutan peternakan sapi perah tetap berjalan sedangkan ketidaktersebutnya konsentrat atau pakan pendukung selain hijauan yang susah untuk diperoleh dan juga hasil pemerahan yang berupa susu yang tidak mungkin untuk dikonsumsi terus menerus dengan kata lain butuh pasar alias konsumen dalam penerimaan susu segar. Pada periode ini mengalami ketidakpastian dalam usaha peternakan sapi perah dan akhirnya untuk mendukung hal tersebut para tokoh masyarakat Pangalengan membentuk suatu kelembagaan yang dinamakan GAPPISIP (Gabungan Petani Peternak Sapi Indonesia) (Syarief, 1997) dan paran kolektor (penampung susu) sudah mulai hadir di Pangalengan.

Dibentuknya Gappsip memberikan ruang untuk dapat mengembangkan usaha peternakan lebih maju. Tapi hal tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal. Masalah yang dihadapi adalah masalah internal dan eksternal yaitu ketidaksalingpercayaan diantara anggota dengan pengurus dan situasi serta kondisi perpolitikan Negara Indonesia yang masih labil. Hal tersebut mempengaruhi kehidupan para petani peternak sapi perah yang ada di Pangalengan. Moda produksi yang berkembang pada periode dibagi menjadi dua tipe moda produksi antara lain moda produksi subsisten dan moda produksi semi-komersial pada usaha peternakan sapi perah.

### **2.1. Kekuatan Produksi**

Berbicara cara atau moda produksi sebagai artikulasi peternakan sapi perah tidak terlepas dari kekuatan produksi dan hubungan produksi. Moda produksi di periode perintisan atau di awal tahun 1945 sampai dengan 1975 memunculkan dua moda produksi. Salah satu moda produksi di awal kemerdekaan adalah moda produksi subsisten. Kekuatan produksi yang terbentuk pada moda produksi ini berupa alat-alat produksi yang tercermin dalam

penguasaan jumlah ternak dan luasnya lahan yang diperuntukan untuk kandang dan kebun rumput sebagai pakan hijauan. Pada awal atau periode perintisan pengembangan peternakan sapi perah bahwa penguasaan ternak sapi perah banyak di perihara oleh para buruh ternak yang dulu pernah bekerja pada perusahaan peternakan sapi perah dan juga sebagian lagi adalah petani yang menggarap lahan untuk hasil palawija atau hortikultura.

Sebutan peternak murni belum melekat pada periode ini, kebanyakan mereka adalah petani peternak dengan memelihara ternak sapi perah sebagai mata pencaharian sampingan bukan pekerjaan utama. Orientasi pemeliharaan ternak sapi yang dilakukan oleh petani peternak adalah mencari limbah dari kotoran sapi yang diperuntukan sebagai pupuk alami, sedangkan komoditi produksi susu jarang untuk dikomersialisasi.

Alat-alat produksi yang lainnya adalah kandang, struktur kandang yang dibangun masih sangat tradisional dengan bahan-bahan yang digunakan dari lingkungan sekitar seperti untuk dinding digunakan kayu atau bambu, sedangkan atapnya menggunakan ijuk. Penguasaan ternak sapi perah masih sangat minim yaitu berada di bawah 3 ekor dan dapat dikatakan berada dalam skala kecil. Aktivitas peternakan hanya dilakukan oleh pihak keluarga inti artinya peran bapak dan ibu serta anak dilibatkan dalam aktivitas produksi sapi perah. Mulai dari mencari pakan hijauan, pemerah dan juga membersihkan sapi dan kandang. Unit produksi petani peternak sapi perah adalah usaha rumah tangga yang secara manajemen usaha dilakukan dengan sederhana dengan pengetahuan yang minimal.

Tenaga kerja yang terlibat dalam usaha peternakan sapi perah adalah struktur keluarga. Kekuatan produksi pada moda produksi subsiten masih sangat minim dan terbatas tidak ada orientasi lebih dalam upaya pengembangan peternakan sapi perah. Hasil produksi susu masih minimal dikarenakan pakan penguat seperti konsentrat sulit didapatkan oleh petani-peternak. Pada periode ini untuk sumber pakan hijauan masih berlimpah terlebih jumlah petani-peternak masih sedikit dan jumlah ternak pun masih kecil.

Moda produksi yang muncul dan berkembang pada periode ini adalah moda produksi semi-komersial disamping moda produksi subsisten. Moda produksi semi-komersial berkembang disaat para petani-peternak sudah banyak memelihara sapi perah dan membentuk suatu komunitas petani-peternak sapi perah dengan nama Gappsip. Fungsi Gappsip hampir menyerupai koperasi yang berkembang pada saat sekarang. Teknis sederhana yang dilakukan oleh Gappsip adalah peternak pemerah susu, ditampung oleh ember dan antarkan ke tempat penampungan susu dan akhirnya di bawa ke Gappsip, setelah itu baru Gappsip membawa susu dari peternak kepada pembeli di Bandung.

Menelaah moda produksi semi-komersial tidak terlepas dari dua poin penting yaitu kekuatan produksi dan hubungan produksi. Berdasarkan informasi didapatkan bahwa kekuatan produksi pada moda produksi semi-komersial hampir meyerupai kekuatan produksi pada moda produksi subsisten, yang membedakannya antara lain : alat-alat produksi berupa ternak sapi perah yang kepemilikannya sudah lebih besar dari yang subsisten, jika dilihat dari jumlah ternak yang dipelihara lebih dari 3 ekor tetapi masih di bawah 7 ekor sapi laktasi. Hal tersebut dikarena bahwa petani-peternak sudah mulai memahami bahwa komoditi produksi susu sudah memiliki nilai jual dan dapat menjadi sumber keuangan tambahan. Mengenai unit produksi usaha peternakan sapi perah pada moda produksi semi-komersial masih menggunakan keluarga inti sebagai penggerak produksi peternakan sapi perah. Keluarga inti disini adalah keterlibatan dari orang tua dan anak, bahkan ada beberapa kerabat (masih dalam satu keluarga) diperbantukan dalam usaha peternakan sapi perah. Semi-komersial disini bahwa pemasaran komoditi produksi susu sudah mulai jelas arah dan tujuannya.

## **2.2. Hubungan Produksi**

Hubungan produksi mengacu pada bentuk hubungan antara produsen dan non produsen, dalam hal ini produsen adalah aktivitas peternak untuk memperoleh produksi susu melalui pemerahan dan non produksi adalah hubungan yang terjalin antara peternak dengan pembeli, peternak dengan peternak lain ataupun peternak dengan institusi atau kelembagaan. Hubungan produksi dalam moda produksi subsisten tidak ada hierarkis yang ada adalah bersifat egaliter. Hal tersebut disebabkan karena unit produksi dan tenaga kerja yang digunakan adalah tenaga kerja keluarga inti, yang merupakan unit terkecil dalam satu komunitas.

Hubungan produksi bersifat sederhana yang dicirikan oleh terbatasnya spesialisasi pekerjaan, yang hanya terdiri dari peternak sapi perah dan pembeli hasil produksi susu. Peternak sapi perah pada umumnya mengerjakan kegiatan yang terkait dengan aktivitas atau proses produksi, yaitu mulai membersihkan kandang, memandikan ternak sapi, memberi pakan dan melakukan pemerahan. Hasil yang diperoleh berupa susu murni siap untuk dipasarkan. Pemasaran yang berhasil jika produksi susu dapat diterima oleh pembeli atau penampung dalam hal ini kolektor susu. Dalam periode perintis, moda produksi subsisten dan semi-komersial terjadi dalam proses pengembangan peternakan sapi perah. Moda produksi subsisten mengarah pada nilai guna atau pakai sehingga komoditi produksi susu hanya digunakan untuk keperluan atau kepentingan dalam kelangsungan hidup. Selanjutnya, moda produksi semi-komersial mengarah pada nilai tukar, sehingga nilai suatu susu dapat di tukar dengan sesuatu yang berharga dan bernilai.

Dengan melihat kepada nilai tukar, maka posisi komoditi produksi susu sudah dapat perhatian lebih untuk dioptimalkan sebagai sumber keuangan. Maka dari itu upaya telah dilakukan oleh para sesepuh atau tokoh masyarakat yang peduli terhadap keberlanjutan usaha peternakan sapi perah dengan membentuk suatu kelembagaan lokal. Keberadaan lokal tersebut berbarengan hadir dengan para kolektor (pengumpul susu) secara individual. Para kolektor memiliki akses dan hubungan dengan pasar di luar Pangalengan, begitu pula kelembagaan lokal (Gappsip) yang lumayan berkiprah di Pangalengan ± 14 tahun dapat memberi manfaat kepada para petani-peternak

Dalam konteks struktur hubungan produksi, tidak ada dominasi petani-peternak terhadap struktur keluarga yang membantu, karena mereka masih dalam satu usaha bersama dalam keluarga inti. Sebagai unit produksi keluarga, maka kegiatan produksi dilakukan bersama-sama dengan landasan saling membantu dalam keluarga. Bentuk hubungan lebih berorientasi pada hubungan sosial daripada hubungan ekonomi, karena saling bantu dalam keluarga tidak dinilai secara ekonomi berupa upah dari tenaga yang telah dikeluarkan oleh anggota keluarga. Dengan demikian surplus produksi diserap oleh keluarga inti petani-peternak sapi perah, sehingga sifat hubungan produksi tidak menunjukkan adanya gejala eksploitasi. Menurut (Russel, 1989), menyebutkan konsep hubungan produksi bahwa hubungan produksi menggambarkan hubungan ekonomi dan sosial antara produsen dan non produsen dalam produksi ekonomi. Hubungan produksi dalam moda produksi subsisten tidak menggambarkan pola hubungan yang berorientasi ekonomi namun yang menonjol adalah orientasi pada hubungan sosial. Hal ini dapat di pahami bahwa unit produksi adalah keluarga.

Jumlah peternak sapi perah pada awal kemerdekaan tidak sebanyak pada awal berdirinya kelembagaan lokal. Antusiasme masyarakat menjadi lebih tinggi untuk memelihara ternak sapi perah. Hal tersebut diyakini masyarakat bahwa ternak sapi perah bukan hanya memiliki nilai guna atau pakai melainkan nilai tukar dengan prospek kedepan sangat menjanjikan. Model pengadaan ternak sapi perah dapat dilakukan dengan cara membeli langsung kepada peternak lain atau melalui sistem gaduh. Pola penggaduhan dengan metode bagi hasil dapat dilaksanakan oleh pihak yang mau melakukan penggaduhan. Dengan rasa saling percaya dan jujur serta adanya saling menghormati satu sama lain menjadikan pola penggaduhan dapat dilaksanakan. Hubungan produksi dalam moda produksi semi-komersial mengarah kepada batas sosial yaitu bahwa pekerja dalam hal ini adalah petani-peternak masih dalam satu keluarga atau famili.

Perbedaan yang muncul dalam setiap moda produksi yang berkembang adalah penguasaan ternak yang dimiliki, baik ternak sapi perah jantan maupun



betina, pedet atau dara terlebih adalah jumlah ternak sapi perah laktasi (menghasilkan susu). Struktur hubungan produksi dalam hal ini adalah keluarga, maka tidak ada kesenjangan yang terjadi masih egaliter antar anggota keluarga inti. Kecuali jika petani-peternak dibantu oleh orang lain baik masih dalam satu keluarga/kerabat atau diluar itu, tentulah struktur hubungan produksi akan berubah terhadap potensi hierarkis. Budaya yang berkembang di Pangalengan yang menghargai sesama manusia tercermin dalam usaha peternakan sapi perah. Telah disinggung sebelumnya bahwa sifat hubungan produksi dalam moda produksi subsisten adalah non eksploitatif berbeda pula jika moda produksi semi komersil dalam sifat hubungan produksi berpotensi eksploitatif tapi hal tersebut tidak pernah ditemukan dalam usaha peternakan sapi perah pada periode perintis. Mengenai aspek moda produksi tersebut diuraikan dalam tabel 2.

**Tabel 2.** Moda produksi Subsisten dan Moda Produksi semi-komersial

Aspek Moda Produksi	Subsisten	Semi-Komersial
<b>A. Kekuatan Produksi</b>		
1. Alat Produksi	Ternak Sapi dan Lahan	Ternak Sapi dan Lahan
2. Organisasi (unit) Produksi	Keluarga Inti	Keluarga Inti
3. Tenaga Kerja Utama	Keluarga Inti	Keluarga Inti + (pegawai) Buruh ternak
<b>B. Hubungan Produksi</b>		
1. Batas Sosial Hubungan Produksi	Keluarga Inti	Keluarga Inti
2. Struktur Hubungan Produksi	Egaliter (antar keluarga inti)	potensi Hirearkis, lebih banyak Egaliter (antar keluarga inti)
3. Sifat Hubungan Produksi	Non-Eksploitatif	Non-Eksploitatif

### 3. Moda Produksi pada Periode Kontemporer (tahun 1975 - sekarang)

Periode ini merupakan periode yang memiliki karakter tersendiri, dan menjadi gambaran peternakan sapi perah yang ada di Pangalengan. Melihat populasi ternak sapi perah yang ada di Pangalengan pada periode ini mengalami peningkatan dan perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat Pangalengan. Kebanggaan peternak bergabung dalam komunitas peternak sapi perah serta keterlibatan menjadi anggota koperasi menjadikan para peternak semangat bekerja untuk dapat menjangkau kehidupannya sebagai peternak. Hal tersebut membuka peluang bagi masyarakat lain untuk terlibat dan bergabung dalam prekonomian lokal (peternakan sapi perah).

Dengan begitu para peternak ikut bertambah banyak sehingga pekerjaan pun menjadi lebih terbuka. Hal yang menjadikan kondisi ini menjadi lebih baik dari sebelumnya adalah adanya itikad untuk memperbaiki institusi yang sudah pernah ada dan berkembang di Pangalengan yaitu Gappsip. Institusi ini tidak

berjalan lagi setelah ketidakmampuan untuk mengelola organisasi dan kondisi perpolitikan yang belum stabil yang terjadi pada tahun 1963. Tahun 1969 merupakan awal dari pembentukan pembangunan Negara Indonesia melalui Pelita dan Repelita yang tertuang dalam GBHN. Dengan waktu yang bersamaan pula daerah Pangalengan dengan para penggagas dan para tokoh masyarakat kembali membangun usaha peternakan sapi perah menjadi lebih baik yang sempat terhenti  $\pm 7$  tahun dimulai dari tidak beropersinya Gappsip sampai akhirnya dibentuk koperasi yang berbadan hukum yaitu Koperasi Peternakan Bandung Selatan (KPBS, 2019).

Dinamika perkembangan peternakan sapi perah tidak selesai dengan dibetuknya sebuah institusi yang menaungi para peternak sapi perah. Melainkan bagaimana keberlanjutan usaha para peternak sapi perah di Pangalengan siap menghadapi penetrasi modernisasi peternakan. Moda produksi yang berkembang di Pangalengan pada periode kontemporer ini dibagi dalam 2 moda produksi, antara lain: moda produksi komersial dan moda produksi kapitalis yang diartikulasikan peternakan sapi perah.

### **3.1. Kekuatan Produksi**

#### *3.1.1. Kekuatan Produksi dalam Moda Produksi Komersial*

Moda produksi komersial yang diartikulasikan peternakan sapi perah tampil semenjak tahun 1975 ketika hadirnya Industri Pengolahan Susu (IPS) yang diprakarsai oleh kebijakan pemerintah tentang Penanaman Modal Asing (PMA), lebih dari 5 perusahaan yang terbangun di Indonesia telah siap menerima susu dari peternak rakyat. Moda produksi komersial adalah moda produksi yang menghasilkan komoditas untuk kepentingan pasar domestik (memiliki nilai tukar/*exchange value*). Moda produksi komersial memiliki ciri-ciri antara lain peranan modal relatif lemah, tenaga kerja umumnya berasal dari lingkungan luar keluarga atau kerabat, dan organisasi produksinya relatif sederhana menunjuk pada organisasi produksi keluarga atau rumah tangga (Kahn, 1980).

Merujuk pada usaha peternakan sapi perah di Pangalengan, peternak dapat digolongkan menurut kepemilikan ternaknya. Jumlah ternak yang dimiliki banyak maka lahan yang dimiliki juga cukup luas. Hal ini berkorelasi dikarenakan lahan digunakan untuk penyediaan tempat (kandang), gudang pakan, dan lahan untuk kebun rumput. Pembagian dalam penguasaan ternak terbagi ke dalam tiga tingkatan sesuai dengan jumlah ternak yang dimiliki yaitu peternak dengan skala kecil yaitu (kurang dari 3 ekor sapi laktasi), skala menengah (antara 4 – 8 ekor sapi laktasi) dan skala besar (lebih dari 9 ekor sapi laktasi).

Modal, modal yang diperlukan untuk beternak sapi perah bisa diawali dengan membeli sapi kepada bandar atau melalui kredit ke bank atau koperasi. Kebanyakan dari para peternak diawali pada saat itu dengan mulai mencoba beternak sapi perah dengan cara menggaduh dari para peternak yang sudah lebih dahulu dan memiliki ternak yang lumayan cukup banyak. Jika di nominalkan dengan harga pasaran sekarang bahwa ternak dapat dibeli dengan harga  $\pm$  RP 15.000.000,- dengan asumsi 1kg daging adalah Rp 75.000,- dan berat yang ditaksir perkiran di posisi 200 kg, sehingga jika menginginkan 2 ekor ternak maka jumlah uang yang harus disediakan  $\pm$  Rp 30.000.000,-. Melihat jumlah nominal seperti itu sangatlah tinggi maka upaya yang lain dengan menggaduh kepada pihak penggaduh (peternak lain dengan jumlah ternak cukup banyak disertai adanya kesepakatan untuk membagi rata hasil yang diperoleh).

Selain dari penggaduhan terhadap ternak sapi ada juga beberapa cara peternak memperoleh modal usahanya yakni dengan pengajuan kredit usaha kepada bank atau koperasi dengan memenuhi sejumlah persyaratan. Peternak mempunyai pertimbangan sendiri untuk melakukan kemana ia harus mendapatkan modal usaha. Jika peternak menjatuhkan pilihannya untuk meminjam bank atau koperasi, maka ia harus menyiapkan agunan sebagai syarat dan sadar akan konsekuensi untuk mengangsur hutangnya setiap bulan dengan jumlah rupiah tertentu yang telah disepakati dan besarnya angsuran tetap. Besarnya pinjaman kepada bank atau koperasi dihitung berdasarkan kemampuan rata-rata peternak yang bersangkutan dalam mengangsur hutang tiap bulan. Pembayaran biasanya melalui produksi susu yang disetorkan ke koperasi, nanti dihitung di akhir bulan apakah cicilan dapat terpenuhi dengan produksi susu yang dihasilkan oleh peternak. Berbagai penelusuran tentang keberadaan awal ternak sapi yang dimiliki oleh para peternak.

Sementara itu, banyak peternak melakukan penggaduh sapi dari pihak peternak lain dengan dasar kepercayaan sehingga si peternak yang mau menggaduh mau bekerjasama. Tidak ada perjanjian secara tertulis yang ada adalah kepercayaan diantara mereka. Hal tersebut pernah dialami oleh hampir semua peternak yang ada di Pangalengan. Biasanya mereka mencari siapa peternak yang mau menggaduh ternaknya. ini merupakan salah satu bagi hasil di dunia peternakan sapi perah. Biasanya ternak yang digaduh adalah sapi perah dara yang sudah di sepet/ IB (inseminasi Buatan). Sebelum memulai penggaduhan, harga ternak disepakati terlebih dahulu selanjutnya setiap pakan ternak (konsentrat) yang dikonsumsi ternak tersebut dihitung. Jika setelah disuntik ternyata berhasil sampai hamil dan akhirnya melahirkan pedet maka pembagian bisa dari pedet tersebut atau pedet dijual nanti hasilnya di bagi dua. Semuanya tergantung hasil kesepakatan bersama.

Unit produksi. Usaha peternakan sapi perah merupakan usaha individu tidak berkelompok walaupun dalam satu wilayah terdapat banyak kelompok. Hal ini dikarenakan ketika peternak melakukan penyeteroran susu ke TPK maka nama anggota yang tertera sebagai penyeteror susu. Hampir seluruh peternak di Pangalengan unit produksinya adalah rumah tangga. Tinggal melihat apakah jumlah ternak yang dimiliki tergolong pada skala apa (kecil, menengah atau besar). Karena hal tersebut akan menentukan pegawai atau buruh ternak yang dilibatkan dalam usaha peternakan sapi perah.

Pelibatan anggota keluarga dalam usaha peternakan masih banyak terlihat. Biasanya kepala keluarga menjadi *center point* dalam usaha peternakan sapi perah mulai dari bersihkan kandang, mencari rumput, memeras ambing sapi sampai penyeteroran ke TPK. Sedangkan istri membantu dalam penyediaan air hangat, menyiapkan makanan dan ada juga yang membersihkan kandang sapi.

Tenaga kerja. Dengan skala kecil dan menengah diras masih bisa kondisikan oleh keluarga inti tetapi jika skala pemilikan besar maka mau tidak mau harus mendatangkan pegawai dalam hal ini adalah buruh ternak. Hal tersebut menjadi beban tambahan yang harus dikeluarkan untuk mengupah buruh tersebut, sedangkan jika menggunakan keluarga inti sebagai tenaga kerja maka tidak ada orientasi ekonomi dari masing-masing anggota keluarga yang ada adalah sikap kekeluargaan dan merasa bahwa usaha ini adalah usaha keluarga yang harus dibangun dengan dasar keikhlasan.

### 3.1.1. Kekuatan Produksi dalam Moda Produksi Kapitalis

Melihat karakteristik moda produksi kapitalis antara lain modal relatif kuat, tenaga kerja terutama berasal dari luar keluarga atau kerabat, organisasi produksinya relatif kompleks (umumnya menunjuk pada unit produksi berupa perusahaan skala kecil sampai besar). Hampir memiliki kesamaan antara moda produksi komersial dengan moda produksi kapitalis yaitu menghasilkan komoditas berorientasi nilai tukar (*exchange value*). Atau dengan kata lain, bahwa komersial belum tentu kapitalis tetapi kapitalis sudah pasti komersial.

Moda produksi kapitalis terbentuk dari penetrasi kapital melalui industri pengolahan susu. Ekspansi yang dilakukan oleh IPS sebagai bagian strategi peningkatan produksi, pada tahun 2008 membangun perusahaan berskala internasional di daerah Pangalengan. Bangunan kandang, mess, dan gudang serta kantor berada di wilayah Pangalengan yang dulu pernah hadir tepat di salah satu perusahaan pada jaman kolonial Belanda yaitu Almanak.

Perusahaan peternakan sapi perah yang hadir di Pangalengan ± 5 tahun yang lalu memberikan warna dalam usaha peternakan sapi perah di Pangalengan. industri pengolahan susu tidak ragu-ragu mengeluarkan modal

yang besar untuk dapat mendirikan perusahaan tersebut. Melihat skala dalam jumlah ekor ternak yang dipelihara pada saat sekaarng berjumlah  $\pm$  3000 ekor dan kurang lebih 2000 an ekor yang laktasi dilanjutkan dengan pendirian kantor, kandang, mess karyawan, dan gudang tentulah akan mengeluarkan modal yang cukup besar dan beraktivitasnya perusahaan peternakan tersebut berharap dapat mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan. Pendirian perusahaan yang dibangun di Pangalengan tergantung modal atau saham yang dimiliki oleh IPS. Bisa jadi IPS dengan saham yang dimiliki atau pinjaman kepada bank.

Melihat struktur bangunan dan sistem yang dilakukan layaknya sebuah perusahaan yang direncanakan untuk pengembangan sapi perah modern dan berstandar internasional. Alat-alat produksi berupa lahan dan ternak sapi perah menjadi hal utama dalam pendirian sebuah perusahaan. Perlatan dalam menunjang aktivitas produksi sudah berskala internasional. Salah satu peralatan yang tidak ditemukan di peternakan rakyat adalah proses pemerahan yang tidak dilakukan seecara konvensional atau manual yaitu menggunakan tangan melainkan dengan mesin perah yang sudah disiapkan sebanyak 40 ekor, serta dari masing-masing sapi dikalungkan sebuah benda kecil yang di dalamnya terdapat *software* dan GPS untuk dapat mengetahui *recording* dalam produksi susu, birahi, serta posisi dimana ternak tersebut. Informasi dapat diakses langsung di perusahaan tersebut atau di pantau jarak jauh di luar perusahaan peternakan sapi tersebut.

Unit Produksi. Perusahaan peternakan sapi perah pasti didatangkan dari luar artinya perusahaan tersebut menerima karyawan yang nantinya ditempatkan sebagai buruh ternak. Pembagian kerja sudah jelas dilakukan di perusahaan tersebut. Sebagian karyawan ada yang sibuk di bagian administarsi, gudang dan juga berada di kandang. Berdirinya perusahaan peternakan sapi perah telah bekerja sama dengan pihak koperasi, malahan buruh ternak yang bekerja di perusahaan tersebut memiliki keanggotaan koperasi peternakan.

Tenaga kerja. Dalam konteks buruh ternak, pembagian kerja dibagi dalam beberapa *shift* (giliran) serta dibagi beberapa kelompok. Tiga shift dibagi dalam mengurus ternak sapi yang ada diperusahaan tersebut. Aktivitas terbagi dalam mengurus ternak di kandang (memberikan makan, membersihkan kandang, menggiring atau mengarahkan ternak), bagian gudang (melihat stok makanan yang masih tersedia), bagian penyabitan rumput sebabagai pakan hijauan.

## 3.2. Hubungan Produksi

### 3.2.1. Hubungan Produksi dalam Moda Produksi Komersial

Hubungan produksi dalam moda produksi komersial merujuk pada skala kepemilikan ternak sapi perah (kecil, menengah dan besar). Tidak ada hierarkis murni yang terjadi pada moda produksi komersil, kecenderungan ada tetapi tidak dominan dan itu ditemukan pada kepemilikan ternak berskala besar. Budaya yang berkembang menjadikan toleransi sebagai acuan dalam hubungan peternak dengan buruh. Berbeda pula dengan moda produksi kapitalis yang sudah dibentuk untuk menjadi beberapa startifikasi dlam pekerjaan. batas sosial dlam hal ini jumlah tenaga kerja masih tercukupi oleh keluara inti kecuali beberapa peternak dengan skala menengah atau besar yang membutuhkan pegawai atau buruh ternak. Tidak ditemukan adanya kontrak pekerjaan antara peternak pemilik dengan buruh ternak yang ada adalah kesaling pemahaman dan mengetahui masing-masing posisi dalam beraktivitas.

Keterkaitan hubungan kerja dengan buruh bisa jadi dari keluarga terdekat ataupun tetangga yang membutuhkan pekerjaan menjadi buruh ternak. Aktivitas buruh ternak adalah semua pekerjaan dikerjakan mulai dari bersih-bersih kandang, ternak sapi, dilanjutkan dengan pemberian rumput atau konsentrat, serta pemerahan dan dilanjutkan dengan loper (penyetoran susu ke TPK).

Struktur. Struktur yang berlaku pada moda produksi komersial tergolong egaliter, semua sama dalam struktur anggota keluarga kecuali kepala keluarga memiliki peran yang lebih dominan berdasarkan usia, pengalaman dan akses yang luas. Kecenderungan hierarkis muncul jika skala kepemilikan ternak tergolong besar, makna atau panggilan majikan atau juragan serta buruh tidak diberlakukan di Pangalengan. Hal tersebut dikarenakan budaya yang berkembang, saling menghargai, toleransi masih berlaku pada masyarakat Pangalengan. Dengan struktur yang berlaku dalam hubungan produksi, menjadikan posisi kepala rumah tangga sebagai penggerak kehidupan peternak sapi perah, hal tersebut dikarenakan kepala keluarga terdaftar sebagai anggota koperasi. Dalam perkembangannya bahwa peran perempuan dalam usaha peternakan sapi perah sudah ada sejak dahulu. Keterlibatan perempuan tercipta dalam keanggotaan di koperasi. Hal ini menjadikan aktivitas produksi dapat dilakukan oleh perempuan.

Karena sifat struktur yang masih sederhana dan belum banyak spesialisasi, maka ada beberapa peran yang dilakukan oleh orang yang sama. Peran rangkap ini tidak membawa konsekuensi pada sistem pengupahan terlebih peternak pemilik selalu terlibat dan membantu dalam aktivitas produksi, bisa jadi yang memerah adalah pemilik produksi hal tersebut beranggapan bahwa

ternak sapi yang sering dipegang oleh pemiliknya memiliki hubungan yang erat.

Sifat produksi. Dengan manajemen keuangan yang sederhana, segala kerusakan alat produksi dan kekurangan hasil produksi menjadi tanggung jawab peternak pemilik. Hal tersebut bukt bahwa sifat produksi yang non eksploitatif masih berlaku pada aktivitas produksi. Hal yang lain jika telah terjadi kesepakatan antara peternak pemilik dengan buruh ternak atau antara peternak yang satu dengan peternak yang lain melalui proses penggaduhan ternak sapi.

### 3.2.2. Hubungan Produksi dalam Moda Produksi Kapitalis

Hubungan produksi dalam moda produksi kapitalis merujuk pada status sosial yang terbagi dalam beberapa katagori yaitu buruh ternak, karyawan tetap, manajer dan pemilik modal. Interaksi yang sering dilakukan adalah antara buruh ternak, manajer dan karyawan tetap, sedangkan pemilik modal ada di pusat atau IPS. Batas sosial dalam hubungan produksi adalah perusahaan diserahkan kepada orang lain, pemilik tidak terjun langsung di perusahaan peternakan. Karyawan terbagi dalam bebarapa bagian diantaranya karyawan tetap, karyawan tidak tetap, dan karyawan borongan. Sedangkan sebagai bagian dari CSR perusahaan peternakan memberikan tempat untuk menjadi pegawai di perusahaan. Perekrutan dilakukan memalui sistem tes kepada calon. Dibukanya pendaftaran secara terbuka dan diprioritaskan adalah anak atau kerabat dari peternak sapi perah yang masuk ke dalam anggota koperasi.

Kekurangan buruh ternak selalu di informasikan kepada koperasi atau buruh yang bekerja sehingga kekosongan yang ada di posisi tersebut dapat tergantikan. Ciri khas yang sering menjadi permasalahan adalah perusahaan yang membuka *outsourcing* dalam pengadaan karyawan inilah yang menjadi awal konflik dari perusahaan dengan warga sekitar. Perusahaan dengan standar internasional menjadikan aturan sebagai kiblat dalam bekerja, salah satunya adalah pemberlakuan jam masuk dan pulang yang menggunakan sistem elektronik.

Struktur. Perusahaan dengan jumlah karyawan dan buruh ternak yang banyak menjadikan posisi atau struktur menjadi tampak jelas. Keegaliteran tidak terlihat dari perusahaan ini yang ada adalah hierarkis dan spesialisasi pekerjaan yang terdiferensiasi. Hal ini bisa menjadi bumerang jika potensi eksploitatif terjadi antara majikan dengan bawahan antara manajer dengan buruh ternak. Sifat struktur yang tidak lagi sederhana melainkan sudah kompleks serta didukung dengan spesialisasi pekerjaan, maka tidak ada peran yang dilakukan oleh orang lain. Tidak ada peran rangkap dalam pekerjaan,

walaupun ada hanya dalam tataran administrasi sedangkan bagi buruh ternak karena bekerja berdasarkan *shift* dan kelompok maka dapat saling mengisi jika ada kekurangan atau kekosongan dalam bekerja di perusahaan peternakan sapi perah.

Sifat produksi. Karyawan, manajer, dan buruh ternak mereka bekerja pada perusahaan tersebut untuk mendapatkan upah atau gaji yang diperolehnya. Dengan sifat produksi yang jelas-jelas eksploitatif menjadikan para pegawai harus siap ditindak dan menurut atas perintah atasan. Hal tersebut tampak pada atasan yang selalu memerintah terhadap bawahan. Mandor wilayah yang memiliki peran dapat menegur atau memerintah buruh ternak. Mengenai artikulasi dua moda produksi pada periode kontemporer dilihat dalam tabel 3.

**Tabel 3.** Moda produksi Moda Produksi Komersial dan Moda Produksi Kapitalis

Aspek Kekuatan Produksi	Moda Produksi	
	Komersial	Kapitalis
Alat Produksi / modal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lahan (kandang, kebun rumput)</li> <li>- Jumlah ternak sapi laktasi (induk) lebih dari 3 ekor</li> <li>- Kandang Konvensional</li> <li>- <i>Milkcan</i> ukuran 10 dan 15 liter</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lahan (kandang, kebun rumput) <math>\geq 1</math> ha</li> <li>- Jumlah ternak sapi laktasi (induk) <math>\geq 1000</math> ekor</li> <li>- Kandang Permanen</li> <li>- Gudang pakan</li> <li>- Mesin perah permanen langsung ke penyimpanan (<i>cooling unit</i>)</li> </ul>
Produksi susu	10 – 15 liter / hari/ ekor	30 – 35 liter / hari/ ekor
Penyaluran Susu	TPK, <i>Milk Treatment</i>	IPS
Unit Produksi	Keluarga Inti	Karyawan, buruh ternak
Tenaga Kerja Utama	Anggota keluarga inti + pegawai (buruh ternak)	Karyawan, buruh ternak
<b>Aspek Hubungan Produksi</b>		
Pola Hubungan Produksi	<p><u>Batas Sosial</u> : Jumlah tenaga kerja tercukupi oleh famili + pegawai (buruh ternak)</p> <p><u>Struktur</u> : egaliter (antar anggota keluarga inti), potensi hierarkis pada skala kepemilikan besar</p> <p><u>Sifat Produksi</u> : Non-eksploitatif</p>	<p><u>Batas Sosial</u> : usaha diserahkan orang lain</p> <p><u>Struktur</u> : hierarkhis terlihat spesialisasi</p> <p><u>Sifat Produksi</u> : eksploitatif, atasan dengan bawahan tampak.</p>
Pola Hubungan Pemasaran	Langsung berhubungan dengan koperasi	Tidak ada perantara langsung dengan pabrik/ IPS



## KESIMPULAN

Pengembangan peternakan sapi perah terjadi di Pangalengan mulai dari pemerintahan kolonial Belanda hingga sekarang memberikan informasi terhadap moda produksi yang berlangsung. Perubahan moda produksi menjadikan adanya suatu penetrasi yang terjadi di Pangalengan salah satunya adalah modernisasi. Berdasarkan periodisasi kejadian bahwa moda produksi peternakan sapi perah dapat dibagi dalam tiga periode yaitu periode sebelum kemerdekaan (sebelum tahun 1945) yaitu pada masa kolonial Belanda dan Jepang. Selanjutnya, periode perintis (tahun 1945 - 1975), dan yang terakhir pada periode kontemporer (tahun 1975 - sekarang).

Periode sebelum kemerdekaan moda produksi peternakan sapi perah didominasi oleh perusahaan peternakan sapi perah yang dikembangkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Sifat produksi yang terjadi adalah eksploitatif dan hubungan produksi yang terjadi adalah hierarkis. Pada periode ini tidak di temukan peternakan rakyat yang berkembang. Hal tersebut dikarenakan masyarakat sekitar perusahaan dilibatkan untuk bekerja menjadi buruh. Pada periode selanjutnya adalah periode perintis yaitu awal tahun 1945 hingga 1975. Pada periode ini tercatat bahwa tidak ditemukannya perusahaan peternakan sapi perah melainkan peternakan rakyat yang berkembang di Pangalengan. Peternakan rakyat yang bersifat tradisional dimiliki oleh warga Pangalengan yang sebelumnya pernah berkerja pada perusahaan peternakan pada jaman Belanda maupun Jepang. Moda produksi yang berkembang pada usaha peternakan sapi perah tercatat moda produksi subsiten dan moda produksi semi-komersial. Periode yang terakhir dan masih berkembang adalah periode kontemporer (tahun 1975 - sekarang), moda produksi yang terbentuk adalah moda produksi komersial dan moda produksi kapitalis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Kahn, J. S. (1980). *Minangkabau Social Formation, Indonesian Peasant and the World Economy*. Cambridge University Press. London.
- KPBS. (2019). *Laporan Tahunan ke-50 KPBS Pangalengan*. Dokumen Koperasi Peternakan Bandung Selatan.
- Mamun, M. J. A., Khan, M. A. S., Sarker, M. A. H., & ... (2015). Productive and reproductive performance of Holstein Friesian crossbred and indigenous cow under small holder farming system. *Bangladesh Journal of ...*  
<https://www.banglajol.info/index.php/BJAS/article/view/26367>
- Russel, W. J. (1989). *Modes of Production in World History*. London and New York, Routlge.
- Shanin, T. (1990). *Defining Peasant, Essays Coserning Rural Societies, Exspolary Economies, and learning from them in the contemporary world*. Basil

Blackwell. Cambridge.

Soehadji. (2009). *Sejarah Perkembangan Industri Persusuan*. . Direktorat Jendral Industri Agro dan kimia, Departemen Perindustrian, Jakarta.

Syarief, A. (1997). *Membangun Usaha Koperasi Persusuan Mandiri*. Dokumen Koperasi Peternakan Bandung Selatan.

---

## POTENSI USAHA PETERNAKAN SAPI PERAH RAKYAT DALAM MENGHADAPI PASAR GLOBAL

Marina Sulistyati, Hermawan, dan Anita Fitriani

### PENDAHULUAN

#### Latar Belakang

Saat ini sebagian besar (90%) usaha peternakan sapi perah di Indonesia masih merupakan usaha peternakan rakyat yang merupakan defenisi usaha tani dalam arti sempit dengan tujuan utama untuk memenuhi kebutuhan subsistensi petani dan keluarganya (Mubyarto, 1995), akan tetapi dari tahun ke tahun usaha peternakan sapi perah mengalami perkembangan salah satunya disebabkan oleh meningkatnya permintaan susu sebagai akibat dari meningkatnya jumlah penduduk dan kesadaran masyarakat terhadap gizi seimbang akan pangan sumber protein hewani.

Pengelolaan peternakan sapi perah rakyat di Indonesia masih dikelola dengan manajemen tradisional dan skala pemilikan yang belum ekonomis. Selanjutnya Atmadilaga (1975) mengemukakan bahwa peternakan rakyat merupakan suatu usaha keluarga yang tidak menggunakan hukum ekonomi produksi secara ketat. Kesempatan ekonomi dalam memanfaatkan setiap peluang yang menguntungkan, sedangkan manifestasinya berbeda-beda di berbagai daerah sesuai dengan pola pertanian dan pola tanam. Namun demikian, usaha peternakan sapi perah sampai saat ini masih terus bertahan. Rendahnya produktivitas sapi perah disebabkan oleh kondisi manajemen usaha sapi perah di tingkat peternak yang masih tradisional. Manajemen budidaya (on farm) yang baik dan benar belum diadopsi dengan sempurna oleh peternak.

Pengembangan usaha sapi perah dibudidayakan dalam rangka meningkatkan produksi susu, untuk mengantisipasi kebutuhan susu masyarakat yang tinggi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peluang usaha ini masih cukup tinggi, dan dapat diperbaiki melalui perbaikan manajemen (Nurtini dan Anggriani, 2014).

Berdasarkan keberadaan dan keberlanjutan usaha peternakan sapi perah dari waktu ke waktu hingga saat ini, usaha peternakan sapi perah

termasuk usaha yang tahan terhadap kondisi krisis moneter tahun 1997, yang mengguncang dunia usaha secara global. Tanpa bantuan dan kebijakan yang mendukung secara nyata, usaha peternakan sapi perah rakyat ini mampu bertahan dan tetap eksis mampu memberikan penerimaan yang sepadan kepada peternaknya. Padahal, pada saat guncangan krisis moneter berlangsung, pemerintah membuat kebijakan yang sangat tidak berpihak pada peternak, yakni pada tahun 1998 mencabut Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri, yang menjamin (keharusan) penyerapan produksi susu di tingkat petani oleh IPS (industri pengolahan susu) dikaitkan dengan impor susu yang IPS lakukan. Akibatnya, mulai saat itu IPS tidak mempunyai kewajiban untuk membeli susu produksi dalam negeri terkait dengan kepentingan IPS untuk memproduksi susu olahannya, artinya, posisi tawar koperasi sebagai pengelola susu peternak menjadi sangat rendah.

Tingginya nilai tukar dollar menyebabkan harga susu impor menjadi dirasakan mahal oleh IPS, dan harga susu dalam negeri dianggap lebih menguntungkan daripada susu impor. Kondisi ini memberi keuntungan tersendiri pada usaha sapi perah di Indonesia, produksinya diserap oleh pelaku usaha pengolahan susu. Seiring dengan perjalanan waktu, harga bahan baku pakan dan sarana penunjang usaha sapi perah terus merangkak naik, tanpa diimbangi dengan perbaikan manajemen usaha koperasi, bahkan manajemen usaha pada sebagian besar koperasi tidak dikelola dengan baik dan benar, terbukti dengan belum optimalnya tata niaga susu di tingkat peternak dan koperasi. Pada akhirnya, beberapa koperasi persusuan mulai menghilang dari peredaran, bahkan untuk tingkat koperasi susu yang cukup besar pun terkena masalah ini, satu demi satu berguguran, termasuk KUD Puspa Mekar Parongpong yang berada di antara KUD Sarwa Mukti Cisarua dan KPSBU Lembang. Dari sekian banyak peternak mantan anggota KUD Puspa Mekar, masih tersisa beberapa peternak yang bergabung dalam kelompok peternak sapi perah yang bertahan hingga saat ini, dan mereka bergabung dalam satu gabungan kelompok tani-ternak Mitra Puspa Mekar dan berafiliasi dengan KPSBU Lembang.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penelitian ini bertujuan untuk melihat potensi yang dimiliki peternak sapi perah saat ini, bagaimana kondisi peternakan sapi perah dalam menghadapi pasar global yang menuntut standar kualitas produksi yang baku, dan bagaimana peran koperasi dalam membantu pelaksanaan usaha ternak sapi perah anggotanya. Sehingga dapat memberikan gambaran kebijakan yang harus diberikan oleh pemerintah, agar usaha peternakan sapi perah rakyat dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi yang nyata dalam memenuhi kebutuhan susu nasional.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan metode survei, yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan mengambil sampel dari populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data yang pokok (Singarimbun, 1989). Penelitian ini dilakukan di wilayah kerja Gabungan Kelompok Tani-Ternak Mitra Puspa Mekar, Parongpong, kabupaten Bandung Barat, yang saat ini kondisinya dalam posisi berbenah diri setelah koperasi susu yang menaungi mereka kolaps karena kesalahan manajemen, dan dalam pengelolaannya bermitra dengan KPSBU Lembang dalam hal pakan, reproduksi, dan pemasaran susu.

Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara sensus, karena seluruh peternak yang tercatat sebagai anggota Gapoktannak Mitra Puspa Mekar dan ditemukan pada saat pencacahan. Dari hasil pencacahan ke lapangan diperoleh responden sebanyak 244 peternak, yang tersebar di tiga kecamatan, yakni Parongpong, Cisarua, dan Ngamprah.

## **Analisis Data**

Dari responden diungkap profil mereka sebagai peternak sapi perah, pengelolaan usaha peternakan, dan potensi yang mereka miliki sebagai peternak sapi perah saat ini. Analisis data dilakukan setelah mendapat jawaban dari responden, selanjutnya dilakukan tabulasi data, setelah itu kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis statistika deskriptif dan teknik analisis statistika inferensial.

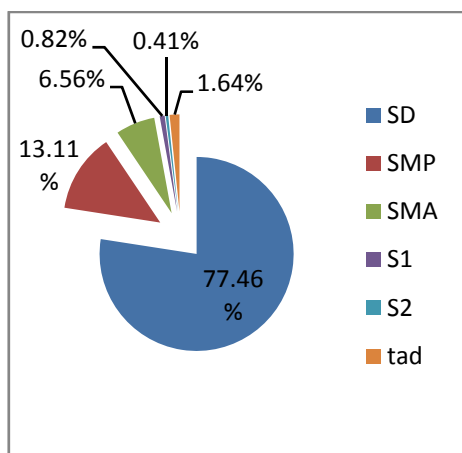
## **PEMBAHASAN**

### **Profil peternak sapi perah rakyat**

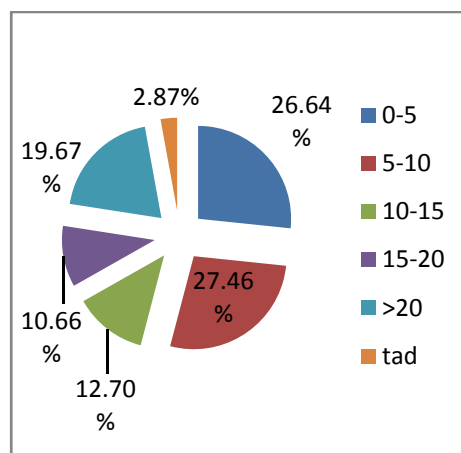
Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa, usaha peternakan sapi perah di Indonesia dilakukan pada berbagai jenis dan bentuk usaha mulai dari usaha peternakan rakyat dengan skala usaha kecil hingga peternakan yang dikelola swasta dengan skala usaha besar. Usaha peternakan sapi perah rakyat merupakan jenis usaha peternakan sapi perah yang paling dominan diusahakan di Indonesia. Fakta ini secara tersirat menegaskan bahwa peningkatan efisiensi usaha peternakan sapi perah rakyat semestinya menjadi prioritas utama.

Pendidikan formal peternak sapi perah rakyat didominasi dengan tingkat pendidikan SD dan SMP, namun adanya peternak dengan tingkat pendidikan S1 dan S2, menjadi fenomena baru. Hal ini menunjukkan bahwa usaha peternakan sapi perah mulai menarik minat para lulusan PT untuk berkecimpung langsung di lapangan. Pendidikan merupakan salah satu frame

of reference atau kerangka tujuan yang akan mempengaruhi seorang memberi makna pada pesan yang diterimanya (Rachmat, 2002). Latar belakang pendidikan formal sebagian besar responden (77,46%) hanya Sekolah Dasar (SD), walaupun relatif rendah, pemahaman dan keterampilan pemeliharaan sapi perah diperoleh melalui penyuluhan dan sosialisasi pengetahuan dari orang tuanya yang merupakan salah satu faktor penunjang bagi responden untuk memahami mengenai budidaya pemeliharaan sapi perah. Tingkat pendidikan mempengaruhi peternak dalam adaptasi dan inovasi dalam beternak.



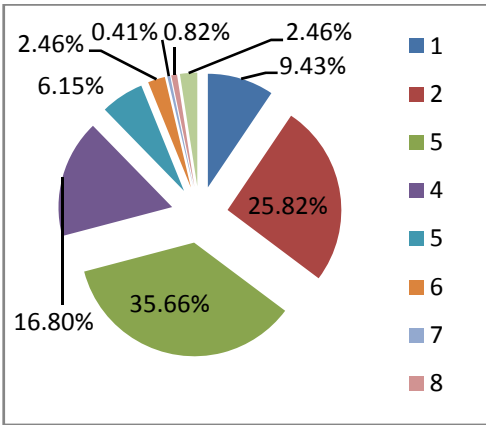
Gambar 1. Tingkat Pendidikan Formal



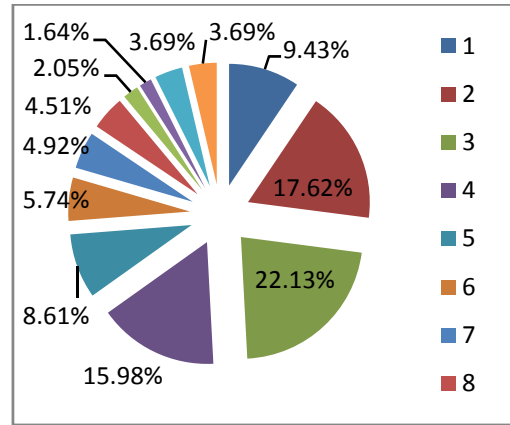
Gambar 2. Pengalaman beternak (tahun)

Lebih menarik lagi jika pengamatan diarahkan kepada lamanya pengalaman beternak sapi perah, justru didominasi oleh peternak dengan pengalaman 5-10 tahun (27,46%). Jika dicermati, 10 tahun ke belakang berarti setelah pemasaran susu di Indonesia memasuki pasar bebas (1998), tidak ada proteksi terhadap produksi susu dalam negeri. Pengalaman beternak merupakan faktor penting yang harus dimiliki oleh seorang peternak memutuskan segala kebijakan yang akan diterapkan dalam usaha termasuk memutuskan untuk menggunakan sumber modal. Setiap keputusan yang diambil diharapkan berpatokan dari pengalaman, baik itu pengalaman sendiri atau pengalaman dari orang lain (Anggainsi dan Putra, 2017). Lebih jauh diungkapkan, seseorang yang mempunyai pengalaman lebih lama akan lebih cepat tanggap dalam pengambilan keputusan, karena pengalaman merupakan pedoman dalam kegiatan usahanya.

Kondisi tersebut terjadi pada saat produksi susu dalam negeri dianggap murah oleh IPS daripada harga susu impor, sehingga mereka berlomba untuk mencari dan membeli susu hasil peternakan sapi perah rakyat yang dipasarkan oleh koperasi.

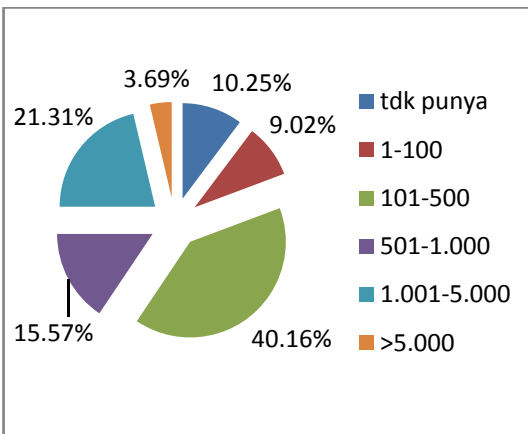


Gambar 3. Tanggungan peternak



Gambar 4. Penguasaan ternak (ekor, campuran)

Anggota keluarga yang menjadi tanggungan peternak menjadi kendala tersendiri dalam upaya pengembangan usahanya, hasil usaha hampir selalu terserap untuk digunakan untuk keperluan rumah tangga, sehingga tidak ada kesempatan untuk mengalokasikan sebagian dana hasil usaha untuk mengembangkan usahanya. Sehingga skala pemilikan ternak (campuran) didominasi pada kisaran 1-5 ekor, skala usaha yang secara umum tidak dapat diandalkan sebagai usaha pokok.



Gambar 5. Pemilikan lahan (m²)

Faktor pembatas lain dalam upaya peningkatan skala usaha adalah keterbatasan pemilikan lahan yang dikuasai peternak, sehingga pengadaan hijauan pakan hanya dapat mengandalkan pihak luar. Baik itu membeli kepada pihak luar, kerjasama pemanfaatan lahan terlantar, optimalisasi lahan kehutanan, dan lain-lain, sebagai upaya pemenuhan kebutuhan hijauan bagi sapi perah yang dipe-liharanya.

Dengan kata lain, untuk keperluan hijauan pakan bagi ternak yang ada pun sudah mengandalkan kepada pihak luar, dan menjadi beban tersendiri bagi peternak.

Tampak bahwa dalam periode awal pasar bebas susu di Indonesia dengan nilai tukar Rupiah ke Dollar rendah, harga susu produksi dalam negeri jauh lebih rendah daripada harga susu impor, sehingga seluruh produksi susu produksi dalam negeri diserap cepat oleh IPS, tidak terlalu memperhatikan

kualitas susu yang dihasilkan. Sehingga meng-genjot peternak untuk memproduksi susu semaksimal mungkin, dan kondisi ini diperhatikan oleh masyarakat non peternak atau oleh anggota keluarga peternak untuk ikut menjadi peternak sapi perah. Kondisi ini diperkuat dengan faktor penunjangnya, antara lain: terbatasnya lapangan kerja yang bisa mereka geluti karena tingkat pendidikan yang rendah (dominasi SD dan SMP), keterbatasan pemilikan lahan untuk berusaha dibidang pertanian (sayur dan tanaman hias), dan anggota keluarga yang harus ditanggung oleh peternak juga relatif banyak (dominasi 2-4 orang), yang potensial dijadikan tenaga kerja keluarga dalam usaha peternakan sapi perah.

### Pengelolaan usaha

Pengelolaan usaha sebagian besar responden secara subsisten dengan menggunakan tenaga kerja keluarga. Terdapat beberapa kegiatan yang dikerjakan, seperti pemeliharaan, pemerahan, penyeteroran susu, mencari rumput, pengambilan keputusan, dan penerimaan uang setoran. Semua aktivitas tersebut dilakukan berdasarkan kesulitan jenis pekerja-annya. Berbagai kegiatan terkait dengan pengelolaan usaha sapi perahnya, peternak mengandalkan bapak sebagai pekerja utamanya dibantu oleh isterinya, kecuali untuk masalah penerima uang setoran susu justru didominasi oleh para Ibu dibantu oleh Bapak seperti; pemeliharaan, menyabit rumput, pemerahan dan penyeteroran susu.

**Tabel 1.** Pemanfaatan Tenaga Kerja Keluarga dalam Pengelolaan Usaha

No	Kegiatan	Pelaksana kegiatan (N)				Pelaksana kegiatan (%)			
		Bapak	Ibu	Anak	LuKel	Bapak	Ibu	Anak	LuKel
1.	Pemeliharaan ternak dan kandang	182	131	11	19	73,4	52,8	4,4	7,7
2.	Pemerahan	178	119	15	24	71,8	48,0	6,0	9,7
3.	Penyeteroran susu	159	132	11	17	64,1	53,2	4,4	6,9
4.	Mencari rumput	184	124	11	19	74,2	50,0	4,4	7,7
5.	Pengambilan keputusan	206	179	6	7	83,1	72,2	2,4	2,8
6.	Penerima uang setoran susu	138	164	4	3	55,6	66,1	1,6	1,2

*Catatan:* (a) data diperoleh dari 231 responden, (b) satu pekerjaan dapat dikerjakan oleh lebih dari satu orang.

Sebagian kecil anak dimanfaatkan sebagai tenaga kerja keluarga dalam usaha peternakan sapi perah, seperti pemeliharaan ternak dan kandang, demikian pula tenaga kerja luar keluarga porsinya masih kecil (<10%). Tenaga kerja luar



keluarga ini banyak dimanfaatkan oleh peternak dengan skala pemilikan di atas 5 ekor sapi produktif.

Kondisi kandang dan sarana pelaksanaan pemerahan masih jauh dari ideal, perlu segera dibenahi untuk meningkatkan kualitas ternak dan hasil ternak. Perbaikan sarana dan prasarana ini perlu dilakukan dengan sistem program perguliran, dengan modal awal bisa dari dana pemerintah atau dana pinjaman oleh kelompok. Sementara itu pemberian pakan yang seimbang dan sesuai dengan kebutuhan, perlu diketahui dan dilaksanakan oleh peternak, agar diperoleh produksi susu yang optimal dengan kualitas standar, tanpa mengorbankan kondisi sapi perahnya.

### Pelayanan Gapoktannak

Pelayanan yang diberikan gapoktannak kepada peternak, merupakan hal yang penting dilaksanakan, karena selain keterbatasan waktu dan tenaga, keterbatasan pengetahuan jadi pembatas peternak, oleh arena itu keberadaan gapoktannak merupakan solusi bagi mereka.

**Tabel 2.** Jenis Pelayanan Gapoktannak kepada Peternak dan tanggapan peternak

No	Jenis Pelayanan	Cepat	Cukup	Lambat	Cepat	Cukup	Lambat
1.	Pelaksanaan IB	201	15	15	87,01 %	6,49 %	6,49 %
2.	Pelaksanaan PKB	199	26	6	86,15 %	11,26 %	2,60 %
3.	Pelaksanaan pemerik- saan kesehatan dan pengobatan ternak	200	23	8	86,58 %	9,96 %	3,46 %

*Catatan:* hanya 231 responden yg memberikan jawaban

Peternak mengandalkan pelayanan gapoktannak dalam mengelola ternaknya, sebagai pelaksana masalah reproduksi (IB dan pemeriksaan kebuntingan) dan pemeliharaan kesehatan ternaknya (pemeriksaan dan pengobatan), dan untuk masalah ini sebagian besar peternak memberikan penilaian yang sangat baik kepada petugas pelaksana dalam merespon kebutuhan mereka. Perlu diperhatikan disini bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan perkawinan sapi perah dengan IB, tidak hanya tergantung pada petugas, namun juga pada kecermatan dan ketepatan peternak dalam mendeteksi awal terjadinya berahi dan melaporkannya kepada petugas, di samping itu juga kondisi sapi perah itu pada saat berahi menjadi faktor yang sangat berperan.

### Penjualan sapi perah setahun terakhir

Rendahnya produktivitas sapi perah yang dimiliki peternak, menyebabkan peternak harus mendapatkan penerimaan di luar penjualan susu, di antaranya adalah penjualan ternak.

**Tabel. 3** Penjualan Sapi Satu Tahun Terakhir

	Penjualan sapi satu tahun terakhir					
	Induk	Dara	Betina muda	Pedet betina	Pedet jantan	Jantan
Pelaku ( <i>orang</i> ) =	63	11	9	30	53	32
Jumlah ( <i>ekor</i> ) =	148	14	23	70	90	79
Rataan ( <i>ekor/org</i> ) =	<b>2,35</b>	<b>1,27</b>	<b>2,56</b>	<b>2,33</b>	<b>2,81</b>	<b>2,47</b>

Dalam setahun terakhir, **63** peternak atau sekitar **27,27** persen dari responden lakukan penjualan ternaknya. Berbagai argumentasi diajukan oleh peternak untuk masalah penjualan ternaknya, dan jika dikelompokkan untuk penjualan pedet (jantan dan betina) lebih dikarenakan ketidakadaan biaya untuk memelihara hingga besar dan sebagai sumber penerimaan di luar susu, penjualan betina muda dan dara dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, penjualan jantan (bukan pejantan) sebagai sapi pedaging untuk menambah penghasilan usaha, sedangkan penjualan induk (dengan jumlah di atas 25% dari total induk) lebih dikarenakan produktivitasnya sudah dianggap tidak memadai lagi oleh peternak.

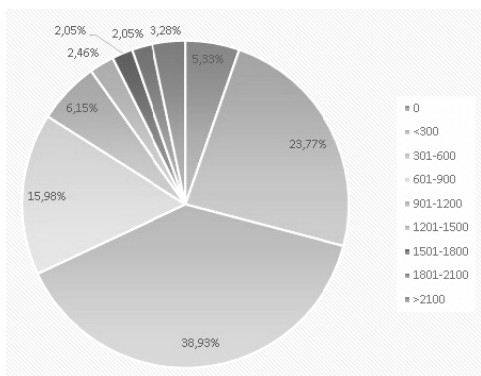
Angka di atas perlu mendapat perhatian, karena tingginya jumlah penjualan ternak dan khusus untuk induk, jika argumentasinya karena produktivitas dan kesehatan, maka berarti performans induk cepat menjadi turun sebagai akibat kurang baiknya manajemen pemeliharaan (khususnya pemberian pakan yang tidak seimbang dan tidak sesuai dengan kebutuhannya).

### Potensi usaha peternakan sapi perah rakyat

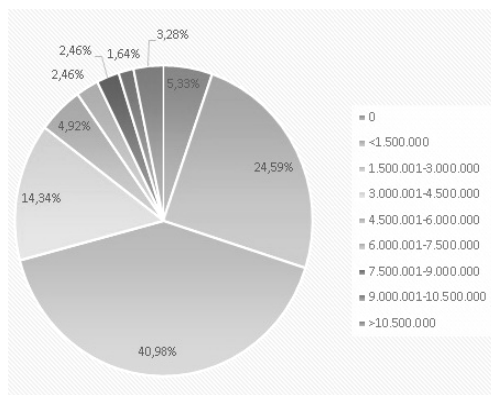
Produksi susu rata-rata di peternakan sapi perah rakyat umumnya rendah (Owen et al., 2005; Musalia dkk., 2007; Lukuyu et al., 2011) dalam Odhong (2015), dan produktivitas yang lebih tinggi sulit dicapai karena keterbatasan pakan, penyakit dan parasit, manajemen pemeliharaan yang buruk, serta rendahnya akses untuk mengikuti penyuluhan dan layanan kesehatan (Ayantunde et al 2005; Njarui et al., 2011; Onono et al, 2013) dalam Odhong (2015).

Pemberian pakan hijauan berupa jerami padi dan konsentrat yang dicampur dengan ampas tahu dan onggok, produksi susu dapat digenjot lebih tinggi dari normal, namun dengan kualitas kurang baik dan berdampak buruk pada induknya (ambruk). Produksi susu bulanan berkisar antara 24 – 7.940

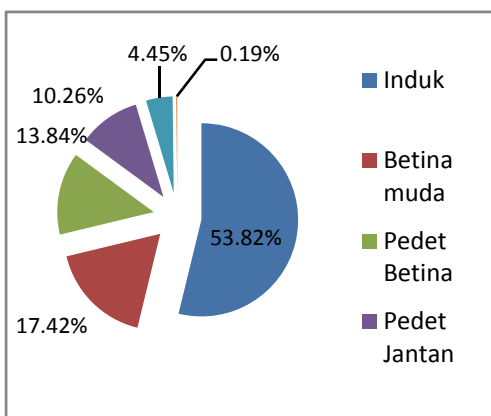
liter/bulan dengan rata-rata 698 liter/pe-ternak/bulan atau 22,89 liter/hari/peternak dengan harga susu antara Rp 4.800-5.000 /liter dengan rata-rata Rp. 4.877 /liter, menghasilkan penerimaan dari susu berkisar antara Rp 117.600 – 38.112.000 dengan rata-rata Rp. 3.404.237 /peternak/bulan, yang jika dikurangi dengan biaya-biaya yang harus dikeluarkan maka pendapatan peternak menjadi sangat rendah.



**Gambar 6.** Penjualan (setor) susu



**Gambar 7.** Penerimaan dari susu



**Gambar 8.** Struktur Populasi

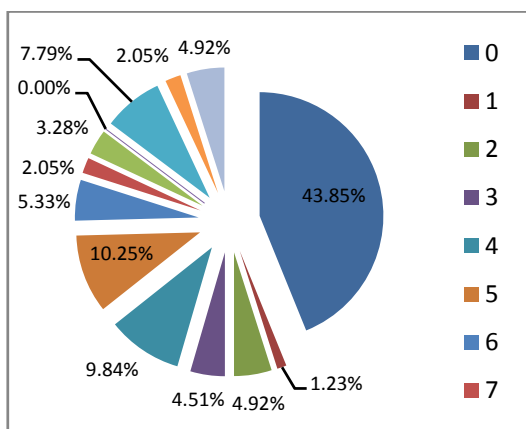
Jumlah sapi perah campuran sebanyak 1.033 ekor, menunjukkan bahwa struktur populasinya kurang baik jika ditinjau dari aspek keberlanjutan usaha. Populasi sapi perah non produktif (di luar induk) terlalu banyak (46,18%) padahal idealnya ada pada angka 30,00%, hal ini menyebabkan beban yang harus ditanggung oleh sapi produktif menjadi lebih berat lagi. Tampaknya dipertahankannya (pedet) jantan menjadi penyebab utamanya, tingginya

harga jual sapi potong, menjadi alasan yang paling masuk akal.

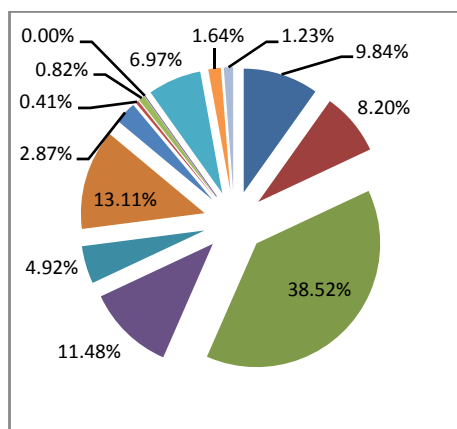
### **Penyediaan lahan untuk kandang cadangan dan keinginan menambah jumlah ternak**

Dengan keterbatasan pemilikan lahan, peternak tidak melupakan untuk menyediakan lahan untuk unit kandang cadangan jika terjadi penambahan populasi sapi perahnya. Sebanyak 56,15% peternak menyediakan lahan cadangan untuk unit kandang cadangan, dengan dominasi pada 4-5 unit

kandang cadangan, dengan total unit kandang cadangan sebanyak 990 unit kandang. Namun ternyata, peternak yang tidak meng-alokasikan cadangan kandang tambahan tetap berminat menambah ternaknya, sebanyak 88,93% peternak berminat menambah sapi perahnya dengan total penambahan ternak sebanyak 997 ekor.



Gambar 9. Cadangan unit kandang



Gambar 10. Keinginan menambah Jumlah sapi

Melalui perbaikan manajemen pemberian pakan, dapat diharapkan peningkatan produksi dan kualitas susu, sekaligus memperbaiki kondisi sapi, sehingga dapat memperpanjang masa produksi sapi perah. Pemeliharaan sapi perah jantan (pedet hingga muda) dapat dilakukan secara spesialis terpisah dari usaha sapi perah, sehingga tidak membebani modal usaha sapi perah, oleh karena itu seluruh pedet jantan dikeluarkan pada umur optimal (paling besar memberikan keuntungan), sekaligus untuk memperbaiki struktur populasi secara keseluruhan. Jika kondisi di atas dapat dipertahankan, maka penerimaan usaha meningkat dan masa produksi sapi perah lebih panjang, dan peternak memelihara pedet betina, maka peluang untuk meningkatkan skala usaha menjadi lebih terbuka, tanpa tergantung kepada pihak lain.

Pemasaran susu dari peternak dapat difokuskan ke pihak Gapoktannak atau Koperasi, tidak kepada pihak lain yang hanya menerima susu tanpa memberikan pelayanan sebagaimana biasa koperasi lakukan. Rendahnya posisi tawar koperasi dalam memasarkan susu yang dikelolanya, menyebabkan harga susu yang diterima koperasi menjadi terbatas, lebih lanjut yang akan diterima oleh peternak pun menjadi rendah. Oleh karena itu, perlu bantuan dari pihak pemerintah agar pemasaran susu yang dilakukan oleh koperasi dapat diterima oleh IPS dan pihak lainnya dengan harga yang wajar.

## **PENUTUP**

1. Usaha peternakan sapi perah masih dapat menarik minat masyarakat, upaya peningkatan kuantitas dan kualitas produksi susu masih perlu dibantu dalam hal sarana dan prasarana, yang diikuti dengan peningkatan pemahaman dan kesadaran untuk memperbaiki manajemen pengelolaan usaha,
2. Pemasaran susu yang dilakukan oleh koperasi, masih memerlukan bantuan proteksi dari pemerintah, agar IPS tetap membeli susu hasil produksi peternak sapi perah rakyat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Atmadilaga, D. 1975. *Kedudukan Usaha Ternak Tradisional dan Perusahaan Ternak dalam Sistem Pembangunan Pertanian*. Biro Research dan Afiliasi Fakultas Peternakan UNPAD. Bandung.
- Mubyarto. 1995. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. LP3ES. Jakarta.
- Anggraini N., dan R. A. Putra. 2017. *Analisis Potensi Wilayah dalam Pengembangan Peternakan Sapi Potong di Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung*. Jurnal Agrifo, Vol. 2 November 2017.
- Nurtini S., dan M. Anggriani 2014. *Profil Peternakan Sapi Perah Rakyat di Indonesia*. Cetakan Pertama. Gadjah Mada University Press.
- Odhong C., R. Wahome, M. Vaarst, M. Kiggundu, S. Nalubwama, N. Halberg and S. Githigia. 2015. *Dairy cattle management, health and welfare in smallholder farms: An organic farming perspective*. Journal of Organics (JO), Volume 2 Number 1, 2015.
- Rachmat, J. 2002. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Singarimbun, M. dan Efendi. 1989. *Metode Penelitian Survei*. Lembaga Penelitian dan Penerangan Ekonomi dan Sosial. Jakarta.

---

## PENGALIHAN FUNGSI LAHAN PERTANIAN RAKYAT DI KABUPATEN PEMALANG PROVINSI JAWA TENGAH

Grace Natalia Marpaung, Arief Budiman

### ABSTRACT

Tujuan dari artikel ini yaitu menganalisis pengalihan fungsi lahan pertanian di kabupaten Pemalang yang membahas mengenai faktor penunjang adanya alih fungsi lahan pertanian, kondisi sosial masyarakat kabupaten pemalang, dampak yang ditimbulkan dari pengalihan fungsi lahan pertanian, dan upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan alih fungsi lahan pertanian di kabupaten Pemalang, penelitian ini bersifat deskriptif menjelaskan kondisi yang terjadi, faktor dan juga kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten pemalang variabel yang diamati antara lain kesejahteraan petani, pendapatan petani, pembangunan infrastruktur, lahan pertanian, dan kebijakan pemerintah. Hasil dari analisis yaitu adanya faktor penunjang alih fungsi lahan yang meliputi penjualan tanah pertanian, jumlah penduduk, fasilitas sosial ekonomi, pembangunan infrastruktur serta berbagai macam dampak dan kondisi masyarakat yang ditimbulkan dari pengalihan fungsi lahan pertanian, perlu adanya upaya yang masiv dari pemerintah untuk dapat mengendalikan permasalahan tersebut sehingga dapat mencapai keseimbangan yang baik, guna tercapainya tingkat kesejahteraan masyarakat kabupaten pemalang.

**Kata kunci:** *alih fungsi lahan, dampak sosial, faktor penunjang, kebijakan pemerintah*

### PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara agraris yang sebagian besar penduduknya bekerja pada sektor pertanian dan mengandalkan sektor tersebut untuk meningkatkan perekonomian. Namun seiring dengan berjalannya waktu, tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi mendorong terjadinya alih fungsi lahan yang dimanfaatkan sebagai perumahan maupun untuk membuka lahan baru. Akibatnya lahan pertanian kian menyempit karena beralih fungsi menjadi pemukiman warga. Hal ini memang tidak dapat dihindari, namun dapat diminimalisir guna menjaga ketahanan pangan bagi masya-

rakatnya. Pemilihan penggunaan lahan merupakan suatu pilihan ekonomi namun perlu diperhatikan terhadap keseimbangan pemanfaatan lahan secara keseluruhan.

Jumlah lahan pertanian subur terutama lahan pertanian beririgasi teknis sangat penting peranannya dalam mempertahankan ketahanan pangan. Peran daerah bersama-sama pemerintah pusat untuk tetap mempertahankan lahan pertanian, terutama lahan produksi padi, dalam jumlah yang dapat menjamin ketahanan pangan nasional untuk mencegah ketergantungan terhadap bahan pangan impor sangat diperlukan. Untuk itu, pengamanan lahan pertanian terutama yang beririgasi teknis perlu dilakukan secara bersama-sama, dan pemerintah daerah secara langsung berperan besar dalam pengelolaan dan pengamanan lahan, dalam wadah sistem pertanahan dan tata ruang nasional. (*rendi kustriawan, 2014*). Lahan merupakan sumberdaya alam yang memiliki fungsi penting dalam pembangunan suatu negara. Dalam pembangunan, hampir semua sektor memerlukan lahan seperti sektor pertanian, industri, perdagangan, dan infrastruktur. Di sektor pertanian, lahan merupakan sumberdaya yang sangat penting, baik bagi petani maupun bagi pembangunan pertanian, adapun berbagai macam faktor yang membuat meningkatnya kebutuhan akan lahan. Seperti yang ada didalam buku Administrasi Pertanahan Pelaksanaan Hukum Pertanahan dalam Praktek oleh Rusmadi Murad, SH, MH yaitu: (Rusmadi Murad, SH, MH, 2013)

1. Populasi;
2. Kebutuhan penduduk terhadap ruang karena peningkatan kualitas hidup;
3. Memaksimalkan kota dengan fungsinya yang;
4. Terbatasnya persediaan tanah yang langsung dapat dikuasai atau dimanfaatkan;
5. Meningkatnya pembangunan.

Kebutuhan akan tempat tinggal yang terus meningkat menjadikan tingkat pengalih fungsian lahan menjadi permasalahan yang sulit untuk diselesaikan. Lahan yang kerap kali menjadi korban dalam memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal tersebut tentunya tidak lain adalah lahan pertanian. Meskipun Indonesia adalah negara dengan pertanian yang bagus namun jika lahan pertanian terus menerus dialihkan menjadi kelain fungsi tidak menutup kemungkinan pertanian di Indonesia kemudian hari akan tetep aman terjaga. Pengalih fungsian lahan sekarang sangatlah banyak dan terjadi dimana mana karena begitu banyaknya tuntutan kebutuhan akan tempat tinggal akhirnya petanipun tergiur untuk menjualnya dengan harga tinggi tanpa mepedulikan kesalahan apa yang mereka lakukan atau dampak apa yang akan terjadi di masa depan.

Menurut Hakim (2002:149) pertumbuhan ekonomi yang tinggi menyebabkan pertumbuhan yang sangat cepat di beberapa sektor ekonomi. Pada hasil kajian empiris Mustopa (2011) pertumbuhan tersebut juga membutuhkan lahan yang lebih luas sehingga terjadi peningkatan kebutuhan lahan untuk pembangunan di berbagai sektor khususnya sektor industri. Pentingnya lahan bagi berbagai sektor tersebut membuat permintaan akan kegunaan lahan semakin meningkat.

Ini sejalan dengan makin meningkatnya penambahan penduduk, namun ketersediaan lahan relatif terbatas, karena lahan merupakan faktor produksi yang tidak bisa diproduksi lagi oleh manusia atau sering disebut non produced input (Mubyarto, 1996:89), maka mengakibatkan terjadinya degradasi. Dalam situasi tersebut upaya untuk mengurangi kehilangan produksi beras yang terjadi akibat alih fungsi lahan pertanian tanaman padi menjadi penting guna mengimbangi stagnasi pertumbuhan produksi beras, sehingga adanya alih fungsi lahan pertanian pangan telah menurunkan daya dukung wilayah dalam menjaga kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan. Di Provinsi Jawa Tengah, sektor pertanian memiliki peranan penting dalam menyumbangkan kontribusinya terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah. Sektor pertanian menempati urutan ketiga setelah sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan, hotel, dan restoran.

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang diharapkan dapat mendukung ketahanan pangan nasional. Hal ini dikarenakan tersedianya lahan sawah yang subur serta sarana dan prasarana irigasi yang memadai, disisi lain kemajuan pembangunan telah mengakibatkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian. Alih fungsi lahan yang terjadi tentu mempunyai dampak negatif, karena pada dasarnya lahan pertanian mempunyai fungsi yang luas baik dilihat dari aspek ekonomi, sosial maupun lingkungan. Secara ekonomi dan sosial dampak yang amat jelas adalah berkurangnya ketersediaan lapangan kerja pertanian dan pendapatan petani dan dilihat dari sisi lingkungan, sejumlah manfaat akan hilang bersama hilangnya fungsi sawah yang telah dikonversi ke non pertanian (Budi, 2011:6), sehingga alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan pangan serta mempunyai implikasi yang serius terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, serta kesejahteraan masyarakat pertanian dan perdesaan yang kehidupannya bergantung pada lahannya. salah satu daerah di provinsi Jawa Tengah yang berperan dalam menyumbang pdrb sektor pertanian yakni kabupaten Pemalang, potensi komoditas pertanian kabupaten Pemalang sudah tidak diragukan lagi, bahkan salah satu komoditas beras pemalang hanya dapat disaingi oleh komoditas beras delanggu Klaten, sehingga sudah terjamin akan kualitas komoditas pertanian kabupaten pemalang (*bagong.s dprd fraksi pdip, pemalang 2015*). Kabupaten Pemalang merupakan dataran



rendah, sedang bagian selatan berupa pegunungan, dengan puncaknya dari Gunung Slamet (di perbatasan dengan Kabupaten Tegal dan Kabupaten Purbalingga), gunung tertinggi di Jawa Tengah. Sungai terbesar adalah Kali Comal, yang bermuara di Laut Jawa (Ujung Pemalang) (BAPPEDA, 2007).

Kabupaten Pemalang banyak daerah pertanian yang subur. Dimana masyarakat kabupaten Pemalang masih sangat mengandalkan pertanian sebagai tempat mereka untuk bekerja. Sumber penghidupan mereka ada pada pertanian, sehingga masyarakat petani berusaha menjaga serta merawat padi yang ditanamnya semaksimal mungkin, agar mendapatkan hasil panen yang memuaskan. Masyarakat petani amat mahir dalam mengatur sistem irigasi di sawah yang mereka garap. Ketika di berbagai daerah mengalami kekeringan, dan khawatir akan mendapat hasil panen yang buruk, maka mayoritas masyarakat petani di Pemalang mampu mengatasi ancaman kekeringan, bahkan banyak daerah pertanian di Pemalang yang sudah menuai hasil panen yang bagus. Kesuburan dan luasnya daerah pertanian, menjadikan Pemalang sebagai daerah yang memiliki lumbung padi terbesar di Jawa Tengah. Oleh sebab itu, pendapatan APBD dan masyarakat Pemalang khususnya di sektor agraris semakin meningkat. *(syarafina nandanisita, 2015)*

Kini pertumbuhan penduduk semakin pesat, dan kebutuhan pokok masyarakat seperti sandang, pangan, papan harus terpenuhi. Setiap masyarakat membutuhkan rumah untuk berlindung dan berkumpul dengan keluarga. Untuk membuat sebuah rumah haruslah mengorbankan sebuah lahan. Karena kebutuhan akan rumah tidak hanya dirasakan oleh satu orang saja tetapi banyak orang, maka lahan yang dibutuhkan untuk membangun beberapa rumah pun semakin besar dan luas. Hal ini menjadi peluang bagi pemilik bisnis properti untuk mengembangkan usahanya di daerah Pemalang. Sudah banyak perumahan-perumahan yang dibangun, tetapi dengan adanya pembangunan perumahan, banyak lahan pertanian yang terkorbankan. Selain itu masyarakat yang bekerja sebagai petani, akan kehilangan kesempatan kerja dan juga sumber penghidupan. Kemudian akan muncul dampak lainnya seperti krisis pangan yang disebabkan kurangnya lahan untuk pertanian, bila usaha property semakin meluas. Apalagi mayoritas petani bukanlah pemilik tanah pertanian tersebut. Mereka hanya dipekerjakan untuk menggarap sawah oleh pemilik tanah, sehingga mereka tidak memiliki wewenang apabila tanah pertanian tersebut dijual dan otomatis mereka tidak dapat mengakses sumber daya dan juga tidak dapat memiliki pekerjaan tetap lagi. Ketika permasalahan akan kebutuhan papan sudah dapat diselesaikan, tetapi dengan adanya solusi pembangunan perumahan, akan memunculkan berbagai masalah baru. Di satu sisi ada pihak yang diuntungkan dengan adanya perumahan, selain para pengusaha properti yakni masyarakat yang membutuhkan rumah. Masyarakat modern tentunya lebih memilih

membeli kavling perumahan. Hal ini disebabkan kavlingan perumahan yang mereka beli langsung dapat dihuni, daripada mereka harus membeli tanah terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan membangun rumah. Kemudian di sisi lain ada komunitas yang dirugikan dengan adanya pembangunan kawasan perumahan yaitu masyarakat petani. Jika masyarakat petani tidak memiliki lahan untuk diolah, maka mereka tidak bisa menjadi petani dan sumber pendapatan mereka terus berkurang. Apalagi keterampilan seorang petani terbatas, seringkali masyarakat petani tidak memiliki keterampilan lain kecuali bertani. Hal ini akan menyulitkan mereka dalam mencari pekerjaan baru. Belum lagi munculnya permasalahan keseimbangan ekosistem bila lahan pertanian semakin berkurang. Semakin berkembangnya kabupaten Pemalang maka di khawatirkan lahan-lahan di sepanjang jalur nantinya menjadi lahan terbangun dengan jenis kegiatan yang menimbulkan bangkitan besar sehingga fungsinya sebagai jalan tidak bisa berfungsi di karenakan lalu lintas yang padat.

Selain itu perubahan lahan ini dapat memberikan tekanan terhadap sektor pertanian dan memiliki potensi untuk mengurangi produktivitas pertanian yang berdampak pada menurunnya ketahanan pangan. alih fungsi lahan dapat menyebabkan pendapatan petani berkurang, dikarenakan lahan yang seharusnya dijadikan ladang pertanian kini berubah menjadi lahan untuk perumahan ataupun non pertanian, apalagi mengingat pemalang merupakan kabupaten kecil yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani dan mengandalkan pertanian untuk mencukupi kebutuhan sehari hari.

Jika dilihat dari data penggunaan lahan pertanian dan non pertanian di kabupaten Pemalang dari tahun 2013 sampai tahun 2018, lahan pertanian selalu mengalami penurunan dari tahun ke tahun akan tetapi penggunaan lahan non pertanian selalu mengalami peningkatan, dikarenakan banyaknya pembangunan perumahan di pemalang menjadi salah satu faktor pendukung adanya alih fungsi lahan pertanian. hal ini tentu sangat memprihatinkan sekali sebagaimana dijelaskan diatas bahwa kabupaten pemalang memiliki potensi yang unggul dalam sektor pertanian akan tetapi lahan pertanian yang tersedia tidak sebanding dengan tingkat produktivitas pertaniannya. perlu adanya solusi yang tepat atas permasalahan tersebut baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Table 1. Data penggunaan lahan pertanian dan non pertanian 2013 sampai 2018

Kecamatan	2013		2014		2015		2016		2017		2018	
	Perta- nian	Bukan Pertanian	Perta- nian	Bukan Pertanian	Perta- nian	Bukan Pertanian	Perta- nian	Bukan Pertanian	Perta- nian	Bukan Pertanian	Perta- nian	Bukan Pertanian
M o g a	13.99	27.41	13.94	27.46	13.67	27.73	12.49	28.91	12.51	28.89	12.50	28.90
Warungpring	12.12	14.19	12.12	14.19	12.12	14.19	9.30	17.01	8.86	17.45	8.86	17.45
Pulosari	2.40	85.12	2.40	85.12	2.40	85.12	2.40	85.12	2.40	85.12	2.40	85.12
B e l i k	25.67	98.87	25.67	98.87	25.59	98.95	24.74	99.80	24.74	99.80	24.74	99.80
Watukumpul	54.51	74.51	54.51	74.51	54.51	74.51	33.25	95.77	33.26	95.76	33.26	95.76
B o d e h	21.60	64.38	28.25	57.73	28.25	57.73	26.52	59.46	26.50	59.78	26.50	59.48
Bantarbolang	26.96	112.2	26.96	112.2	26.96	112.2	26.96	112.2	26.96	112.2	26.96	112.2
Randudongkal	32.88	57.44	26.89	63.43	26.84	63.48	34.48	55.84	33.63	56.69	33.63	56.69
Pemalang	41.53	60.40	41.49	60.44	41.23	60.70	44.01	57.92	41.23	60.70	41.23	60.70
T a m a n	36.39	31.02	36.35	31.06	36.35	31.06	40.89	26.52	37.62	29.79	37.62	29.79
Petarukan	51.70	29.59	53.70	27.59	53.70	27.59	55.10	26.19	52.52	28.77	52.52	28.77
Ampelgading	26.07	27.23	26.07	27.23	26.07	27.23	28.59	24.71	28.58	24.72	28.58	24.72
C o m a l	11.17	15.37	12.30	14.24	12.30	14.24	13.32	13.22	12.15	14.39	12.15	14.39
Ulujami	21.75	38.80	22.86	37.69	22.86	37.69	23.83	36.72	22.86	37.69	22.40	38.15
<b>J u m l a h</b>	<b>378.7</b>	<b>736.5</b>	<b>383.5</b>	<b>731.7</b>	<b>382.8</b>	<b>732.4</b>	<b>375.8</b>	<b>739.4</b>	<b>363.8</b>	<b>751.4</b>	<b>363.3</b>	<b>751.9</b>
<b>jumlah total sawah</b>	<b>2248.15</b>											
<b>jumlah total bu- sawah</b>	<b>4443.65</b>											

sumber: BPS kab. pemalang, 2019, data diolah)

Dengan adanya alih fungsi lahan pertanian yang terjadi di kabupaten pemalang, tentunya memunculkan beberapa pertanyaan antara lain

- a. Bagaimana alih fungsi lahan pertanian di Pemalang semakin masiv?
- b. Bagaimana kondisi masyarakat yang bekerja pada sektor pertanian di kabupaten Pemalang ?
- c. Bagaimana dampak yang ditimbulkan adanya penglihan fungsi lahan pertanian di kabupaten Pemalang?
- d. Bagaimana upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah kabupaten Pemalang dalam menangani permasalahan alih fungsi lahan pertanian.

Dari pertanyaan diatas dapat dijadikan dasar penelitian mengenai analisis alih fungsi lahan pertanian di kabupaten Pemalang.

### **TINJAUAN TEORI PENGALIHAN FUNGSI LAHAN**

Soepraptohardjo (1962) dalam penelitian untuk menilai kemampuan lahan suatu wilayah memerlukan peninjauan beberapa sifat tanah dan faktor sekeliling. Sifat tanah merupakan sifat yang menguntungkan, sedangkan faktor yang terbagi dalam faktor penghambat dan faktor bahaya merupakan faktor yang merugikan. Nilai lahan dan penggunaan lahan mempunyai kaitan yang sangat erat. Dalam hal ini faktor lokasi merupakan salah satu penentu nilai lahan. Faktor lokasi disini di wakilkkan oleh derajat aksesibilitas, semakin tinggi aksesibilitas suatu lokasi semakin tinggi pula nilai lahannya dan biasanya hal ini di kaitkan dengan keberadaan konsumen akan barang atau jasa. Derajat keterjangkauan ini berkaitan dengan kemudahan untuk dating dan pergi kea tau dari lokasi tersebut (Hadi Sabari Yunus 1994). Daya dukung lahan merupakan kemampuan suatu lingkungan untuk mendukung kehidupan. Untuk daya dukung agraris (pertanian) pada dasarnya bergantung pada persentase lahan yang dapat dipakai untuk pertanian dan besarnya hasil pertanian persatuan luas dan waktu. Makin besar perentase lahan yang dapat digunakan sebagai lahan pertanian makin benar pula daya dukung lahan daerah tersebut (Otto, 1983 dalam Kukuh Wahyu, 2009). Sebagai penunjang kebutuhan manusia tidak hanya membutuhkan lahan yang digunakan sebagai lahan pertanian tetapi juga membutuhkan lahan untuk dijadikan permukiman dan aktivitas sosialekonomi yang lain. Semakin tinggi jumlah penduduk akan menyebabkan kebutuhan lahan untuk dijadikan permukiman dan aktivitas sosial-ekonomi yang lain. Semakin tinggi jumlah penduduk akan menyebabkan kebutuhan lahan untuk permukiman juga akan semakin tinggi, hal ini akan menyebabkan terjadinya penurunan daya dukung lahan. Menurut M. Lutfi (2007) Penggunaan lahan secara umum adalah penggolongan penggunaan lahan secara umum, seperti pertanian, tadah hujan, pertanian beririgasi,

padang rumput, kehutanan atau daerah rekreasi. Lahan secara umum biasanya digunakan untuk evaluasi lahan secara kualitatif atau dalam survei tinjau.

Menurut Hadi Sabari Yunus (1981), secara garis besar perubahan penggunaan lahan dipengaruhi oleh daya tarik tempat, antara lain: 1) Masih luasnya tanah yang tersedia di daerah pemekaran. 2) Masih rendahnya harga tanah di daerah pemekaran, sehingga mendorong penduduk untuk tinggal di daerah tersebut. 3) Suasana yang lebih menyenangkan terutama di daerah pemekaran yang masih mempunyai kondisi lingkungan yang bebas dari segala macam polusi. 4) Adanya pendidikan yang cenderung mengambil lokasi di luar kota. 5) Mendekati tempat kerja. Perubahan penggunaan lahan pada dasarnya adalah peralihan fungsi lahan yang awalnya untuk peruntukan tertentu berubah menjadi peruntukan tertentu pula (yang lain). Perubahan penggunaan lahan tersebut suatu daerah mengalami perkembangan, terutama jumlah sarana dan prasarana fisik, baik berupa jalan maupun sarana prasarana yang lainnya. Perubahan penggunaan lahan yang terjadi akan saling tumpang tindih jika tidak teratur dalam tata ruang wilayah yang jelas dan terencana. Perubahan penggunaan lahan dapat dilacak dari penutup lahannya (land cover), yakni semua perwujudan yang menutup lahan, baik perwujudan alamiah ataupun perwujudan buatan manusia. Sebagai contoh: sawah mencerminkan kegiatan pertanian, pabrik mencerminkan kegiatan industri, terminal bus dan stasiun kereta mencerminkan transportasi laut dan sebagainya (Sugiharto budi s, 1999 dalam Kukuh wahyu 2009).

## **PMBAHASAN DASAR ADANYA PENGALIHAN FUNGSI LAHAN PERTANIAN DI PEMALANG**

Pemalang merupakan daerah yang ada di provinsi Jawa Tengah dengan potensi sektor pertanian dapat dikatakan sangat baik, komoditas pertanian di kabupaten Pemalang sangat beragam, +kualitasnya pun tidak kalah dengan komoditas diluar Jawa Tengah tanah atau lahan pertanian di Jawa Tengah sangat subur sekali sehingga memungkinkan untuk dapat mengembangkan sektor pertanian, mengingat sebagian besar masyarakat kabupaten pemalang mengandalkan sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhannya. Namun seiring, adanya pengalihan fungsi lahan pertanian untuk kepentingan pembangunan mengakibatkan petani resah dikarenakan lahan pertanian yang dijadikan untuk bercocok tanam sudah beralih menjadi bangunan bangunan, sehingga jelas mengurangi penghasilan para petani. bisa jadi petani yang biasa makan nasi menggunakan beras sendiri, dengan adanya alih fungsi lahan mengharuskan petani untuk membeli beras agar dapat tercukupi kebutuhannya.

## 1. Permasalahan dasar adanya pengalihan fungsi lahan pertanian di Pemalang

Alih fungsi lahan pertanian di kabupaten pemalang saat ini semakin masiv adanya, banyak sekali lahan lahan pertanian yang dijadikan untuk membangun tempat maupun infrastruktur yang tak lain tujuannya untuk memaksimalkan nilai ekonomi dan mempermudah aktivitas masyarakat, adapun beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya:

### 1. Penjualan tanah pertanian untuk dijadikan sebagai kawasan perumahan

Kawasan perumahan memang sangat bernilai ekonomis baik bagi pengusaha property maupun pemerintah sebagai pengambil kebijakan, akan tetapi dengan kondisi tersebut tentu hanya dapat menguntungkan pihak pihak tertentu saja.lahan pertanian yang dijadikan pengalihan untuk pembangunan kawasan perumahan biasanya lahan yang tidak jauh dari perkotaan dan tidak jauh juga dengan pedesaan, karena tentu menginginkan suasana yang asri dan nyaman sehingga peminat akan tertarik untuk menempatinnya. Pemalang yang merupakan kota kecil, sudah banyak sekali pembangunan perumahan yang dilakukan. Terutama di kecamatan Pemalang dan Taman banyak terpampang papan yang bertuliskan tipe-tipe rumah serta harga yang dipatok untuk setiap kavlingnya. Namun belum tentu setiap perumahan banyak memiliki peminat, misalnya di kelurahan widuri dari beberapa tahun yang lalu hingga sekarang hanya terlihat lahannya saja belum ada rumah yang dibangun. Menurut pendapat masyarakat, kavlingan tersebut tidak terlalu banyak peminat karena pengusaha mematok harga yang terlalu tinggi.

### 2. Pertambahan penduduk Kabupaten Pemalang

**Table 2.** Jumlah penduduk kab.pemalang tahun 2016 sampai 2018

Tahun	Jumlah penduduk
2016	1 292 573
2017	1 296 272
2018	1 299 432

Sumber: BPS kab.pemalang 2019

Dengan melihat data diatas menunjukkan bahwa dari tahun 2016 sampai tahun 2018 jumlah penduduk di kabupaten pemalang selalu mengalami peningkatan, hal ini tentu menjadi salah satu faktor adanya pengalihan fungsi lahan pertanian, karena penduduk tentu membutuhkan sandang papan untuk dapat menjalani kehidupannya dengan baik, sehingga penggunaan lahan pertanian untuk mencukupi kebutuhan papan tidak dapat dihindari, apalagi jika penduduk tersebut merupakan pemilik lahan.

### 3. Pembangunan fasilitas sosial ekonomi

Pengalihan fungsi lahan di pemalang juga diakibatkan adanya pembangunan fasilitas sosial ekonomi yang terbagi pada beberapa bidang antara lain

#### a. Pendidikan

Pada bidang pendidikan pengalihan fungsi lahan pertanian untuk pembangunan sekolah baik SD, SMP, SMA.guna untuk menunjang sektor pendidikan Kabupaten Pemalang agar semakin unggul

#### b. Kesehatan

Pada bidang kesehatan alih fungsi lahan juga dilakukan untuk membangun berbagai macam fasilitas kesehatan antara lain rumah sakit, puskesmas dan tempat bersalin, menurut data BPS Kabupaten Pemalang, pembangunan fasilitas kesehatan tertinggi yakni pada tempat bersalin yang tersebar di berbagai kecamatan yang ada di Kabupaten Pemalang.

#### c. Perdagangan

Pada sektor perdagangan alih fungsi lahan digunakan untuk pembangunan pasar umum, toko, dan kios

#### d. Peribadahan

Sektor terakhir yang mengakibatkan alih fungsi lahan yakni pembangunan sarana peribadahan seperti gereja, masjid dan surau

### 4. Pembangunan infrastruktur (jalan tol trans jawa)

Pembangunan tol trans jawa yang merupakan proyek dari pemerintahan yang bertujuan untuk mempercepat akses dan distribusi barang dari daerah satu ke daerah lainnya, yang mana biasanya distribusi barang melewati jalan pantura yang memakan banyak waktu, sekarang dengan adanya pembangunan jalan tol.akses lebih cepat dan efisien, tol yang membentang dari jawa barat hingga jawa timur ini juga melewati daerah kabupaten pemalang, tentu pembangunan jalan tol yang sudah diperhitungkan dari awal akan melewati beberapa area hutan dan persawahan di Kabupaten Pemalang, yang tak lain merupakan daerah pertanian, dengan adanya pembangunan infrastruktur tersebut tentu akan berdampak terhadap aktivitas pertanian.

Keempat faktor tersebut dinilai menjadi penyebab adanya alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Pemalang, perlu adanya upaya bersama untuk dapat mengatasi permasalahan tersebut.

## **2. Kondisi masyarakat Kabupaten Pematang**

Dengan adanya pengalihan fungsi lahan pertanian yang digunakan untuk pembangunan tentunya berdampak pada kondisi dari para petani. Saat ini para petani di Kabupaten Pematang mengalami berbagai macam permasalahan antara lain:

- a. Pendapatan berkurang
- b. Kebutuhan konsumsi tidak dapat terpenuhi dengan baik
- c. Adanya kesenjangan sosial pada petani buruh
- d. Tingkat kesejahteraan petani menurun
- e. Petani tidak dapat mencari pekerjaan lain

## **3. Dampak pengalihan fungsi lahan pertanian Kabupaten Pematang**

Alih fungsi lahan pertanian akan berdampak terhadap beberapa aspek, yang mana aspek aspek tersebut saling berkaitan satu sama lain, dampaknya antara lain:

- a. Pengangguran
- b. Lahan pertanian berkurang
- c. Produktivitas (beras) mengalami penurunan
- d. Impor kebutuhan pangan meningkat
- e. Ekosistem dan lingkungan terganggu

## **4. Upaya pemerintah dalam menghadapi permasalahan alih fungsi lahan pertanian**

Kabupaten Pematang sendiri memiliki kebijakan yang terkait dengan alih fungsi lahan itu sendiri yaitu adalah kebijakan mengenai penataan Ruang dalam Peraturan daerah Kabupaten Pematang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pematang tahun 2011 - 2031, bunyi pada pasal 5 ayat 2 (f) yang menyebutkan pada salah satu bagiannya yaitu mengenai Pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif, agar dapat mewujudkan ruang daerah yang berbasis dalam pertanian yang didukung bidang perdagangan dan industri dalam sistem wilayah terpadu dan berkelanjutan. Perda tersebut menangani tentang kasus tingginya tingkat pengalihan fungsi lahan pertanian yang seharusnya dapat mampu memberikan solusi dari pertumbuhan yang berkesinambungan antara ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi di salah satu daerah melalui kontrol angka pengalihan fungsi lahan. Sehingga pembangunan dilakukan tanpa perlu mengesampingkan bidang pertanian sebagai yang menyediakan bahan pangan dan menjadikan sumber mata pencaharian bagi sebagian besar masyarakat.



Pemerintah Kabupaten Pemalang sendiri telah berupaya dalam mengurangi pengalih fungsian lahan. Adapun upaya tersebut adalah: (Rendi Kustriawan, 2015)

1. Melalui Rencana Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Luas lahan sawah irigasi teknis yang berada di Kabupaten Pemalang adalah 27.100,13 hektar, luas sawah irigasi  $\frac{1}{2}$  teknis adalah 3.441,08 hektar, luas irigasi sederhana adalah 1.894,72 hektar, dan luas sawah tadah hujan adalah 1.403,72 hektar.
2. Melalui Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Insentif, Insentif fiskal dapat berupa:
  - a. keringanan pajak dan/atau retribusi daerah
  - b. kompensasi
  - c. subsidi silang;
  - d. imbalan;
  - e. sewa ruang; dan/atau
  - f. kontribusi saham.

Insentif Non Fiskal dapat berupa:

- a. pembangunan dan pengadaan prasarana;
  - b. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
  - c. penghargaan dari Pemerintah Daerah.
3. Disinsentif, merupakan kegiatan yang berupaya untuk mengurangi segala bentuk kegiatan yang tidak perlu dilakukan. Kegiatan yang dimaksud disini adalah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh petani yang telah melakukan aling fungsi lahan pertaniannya. Antara lain, yaitu:
    - a. Pembebanan Pajak, dimana pembebanan pajak diberikan lebih tinggi dari yang biasanya dan disesuaikan bersama besarnya biaya dalam mengatasi timbulnya dampak terhadap pemanfaatan ruang yang tidak memenuhi aturan tata ruang ;
    - b. Mencabut subsidi pupuk;
    - c. Membatasi akses yang memadai terhadap sarana dan prasarana pertanian;
    - d. Membatasi akses terhadap informasi pertanian.
  4. Pengenaan Sanksi, disini sanksi yang dibentuk ialah pemberian hukuman kepada petani karena telah melakukan pengalih fungsian lahan. Adapun sanksi tersebut ialah:
    - a. Denda materi

b. Hukuman kerja sosial

c. Hukuman pidana

Terkait dengan usaha pemerintah untuk pengalih fungsian lahan ini terdapat beberapa teori dalam melakukan penguatan kelembagaan mengingat pemerintahlah yang bertindak sebagai lembaga yang bertanggung jawab menanganinya. Penguatan kelembagaan itu sendiri dilakukan untuk meningkatkan kualitas institusi, sistem, maupun individu dalam memperbaiki kinerja organisasi secara keseluruhan. Menurut Muyungi dalam ada 3 aspek terkait dengan perkuatan kelembagaan, yaitu : (Suhendri, & Purnonomo, E. P, 2017)

1. Pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan
2. Penguatan institusi melalui penyempurnaan prosedur dan metode pada organisasi
3. Penumbuhan kapasitas sistem, seperti halnya penumbuhan kesadaran mengenai peraturan yang konduisit serta pengelolaan sistem lingkungan.

## KESIMPULAN

Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa alih fungsi lahan pertanian memang salah satu fungsinya yakni mensejahterakan masyarakat sebagai contoh pembangunan perumahan akan tetapi dengan adanya pengalihan fungsi lahan tersebut tentu memiliki dampak buruk terhadap masyarakat dan lingkungan. Alih fungsi lahan di Kabupaten Pemalang sampai saat ini masih terjadi dan mengalami peningkatan. hal ini menyebabkan para petani kehilangan mata pencahariannya dan tidak dapat memutar pikiran untuk mencari pekerjaan lain karena terbatasnya kemampuan dan pendidikan petani.

Dampak lain yang muncul akibat berkurangnya kawasan pertanian, yaitu kemungkinan erosi lebih besar dibandingkan dengan masih adanya daerah persawahan. Karena sawah memiliki fungsi sebagai pengendalian erosi dan juga mampu untuk membantu peresapan air di musim penghujan. Dengan adanya sawah, fungsi produksi dapat terpenuhi, sehingga masyarakat tidak akan mengalami kekurangan pangan. Fungsi lain dari adanya persawahan yaitu fungsi sosial- budaya, yang mana para petani dalam komunitasnya sudah terbiasa dengan kegiatan gotong royong dalam upaya pembasmian hama, atau bagaimana cara pengolahan lahan yang baik untuk mendapatkan hasil panen yang berkualitas di kemudian hari. (syarafina 2014)

Upaya dari pemerintah harus terus digencarkan dan direalisasikan dengan baik, mengingat dampak yang ditimbulkan dari adanya pengalihan fungsi lahan pertanian sangat besar, terutama terhadap kesejahteraan petani, perlu adanya kebijakan dari pemerintah agar kepentingan dalam mendorong

pertumbuhan ekonomi dapat sebanding dengan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. sehingga sektor pertanian yang ada di kabupaten pemalang dapat dikembangkan dengan baik dan menjadi potensi unggulan agar masyarakat dapat merasakan dampak positif adanya lahan pertanian.

## REFERENSI

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2012
- Peraturan daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2011
- [BPS] Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Tengah. 2000. Luas Penggunaan Lahan di Propinsi Jawa Tengah Tahun 2000. Semarang.
- Dewi, Nurma Kumala, & Rudiarto, Iwan. (2014). Pengaruh Konversi Lahan terhadap Kondisi Lingkungan di Wilayah Peri-urban Kota Semarang (Studi Kasus: Area Berkembang Kecamatan Gunungpati). Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota, 1.
- Irawan, Bambang. (2015). Konversi Lahan Sawah : Potensi Dampak, Pola Pemanfaatannya, dan Faktor Determinan. Forum Penelitian Agro Ekonomi, 1-18.
- Rendi Kustriawan. (2015). PERAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG DALAM PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO. 3 TAHUN 2011 (Konversi Lahan Pertanian Menjadi Non Pertanian di Kelurahan Wanarejan Selatan, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang).
- Dwidjowijoto, Riant Nugroho. 2006. "Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang: Model-Model Perumusan, Implementasi, dan Evaluasi". Jakarta: Elex Media Komputindo
- Gutama, Sudargo. 1973. Masalah Agraria. Bandung: Alumni Indiahono, Dwiyanto. 2009. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis. Jogjakarta: Gava Media
- Rusmadi Murad, SH, MH. (2013). Administrasi Pertanahan Pelaksanaan Hukum Pertanahan dalam Praktek. Bandung: CV Mandar Maju.
- Zara rosalia, putri. 2015. ANALISIS PENYEBAB ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN KE LAHAN NON PERTANIAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH 2003-2013
- Nandanisita.Syarafina.2014.pengalihan fungsi lahan pertanian di Kabupaten Pemalang.

---

---

## **PEMBANGUNAN EKONOMI PERIKANAN BERKELANJUTAN STUDI KASUS KABUPATEN BATANG, JAWA TENGAH**

**Dian Ayunita N.N. Dewi**

### **PENDAHULUAN**

Teori Malthus mengenai pertumbuhan populasi penduduk dan kebutuhan akan pangan dunia memprediksikan bahwa akan terjadi kesenjangan yang sangat tinggi. Karena pertumbuhan populasi akan meningkat seperti deret ukur namun produksi pangan bertambah sesuai deret hitung (Vaitsos, 2003). Sehingga pemenuhan kebutuhan pangan penduduk menjadi krusial untuk dijaga kecukupannya. Ketahanan pangan dapat terwujud jika semua orang memiliki akses untuk kecukupan, keselamatan dan gizi makanan yang sesuai dengan kebutuhan angka gizi dan preferensi makanan untuk aktivitas dan kehidupan yang sehat sepanjang masa (FAO, 2008 dalam Virapat, 2011).

Lautan merupakan area yang menyelimuti hampir tiga per empat permukaan bumi dan pada tahun 2025 diprediksikan sekitar 75% populasi penduduk dunia akan tinggal sekitar 100 km dari tepi pantai (Virapat, 2011). Lebih dari 90% kehidupan biomassa di bumi ditemukan di lautan. Laut sebagai penyedia sumber kehidupan yang menjadi sandaran bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan akan pangan namun juga sebagai salah satu pondasi penting bangunan perekonomian. Hubungan antara lautan dan pantai mengindikasikan adanya tekanan yang bersifat jangka panjang pada lautan sebagai dampak dari pertumbuhan populasi manusia di area kota pantai dan juga efek dari perubahan iklim (Behnam, 2010).

Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan yang terdiri dari 17.500 gugusan pulau merupakan negara yang bersandar pada kekayaan sumberdaya alam laut sebagai sumber mata pencaharian penduduk. Pulau Jawa merupakan pulau terpadat populasi penduduknya dan sebagian besar tinggal di wilayah pesisir pantai. Wilayah Pantai Utara Jawa adalah salah satu area konsentrasi nelayan dengan wilayah eksploitasi penangkapan terdekat di Laut Jawa. Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No 47/2016 tentang Estimasi potensi, jumlah tangkapan yang diperbolehkan dan tingkat pemanfaatan sumberdaya ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, total estimasi potensi perikanan di Laut Jawa (WPP 712) per tahun sebesar 981,680 ton. Potensi tersebut terdiri atas ikan pelagis kecil,

ikan pelagis besar, ikan demersal, ikan karang, udang penaeid, lobster, kepiting, rajungan dan cumi-cumi. Provinsi Jawa Tengah menjadi salah satu provinsi yang mendapatkan keuntungan dari kegiatan perikanan laut. Salah satu daerah yang cukup berpotensi untuk perikanan laut adalah Kabupaten Batang. Total produksi perikanan tangkap Kabupaten Batang tahun 2017 mencapai 56,550 ton dengan nilai produksi sebesar Rp 181.394.203.000,00 (Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Batang, 2017).

Konsep ekonomi perikanan berkelanjutan sudah digagas oleh pemerintah daerah setempat dengan adanya Kawasan Konservasi Laut Daerah. Di area wilayah pesisir Kabupaten Batang terdapat program pengelolaan wilayah pesisir yang dinamakan "Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD)". Program tersebut disahkan oleh SK Bupati Nomor: 523/283/2005 Tahun 2005 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) Pantai Ujungnegoro-Roban Kabupaten Batang. Kawasan Pantai Ujungnegoro terletak di Desa Ujungnegoro, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang. Keberadaan ekosistem estuaria, ekosistem padang lamun, ekosistem terumbu karang, dan ekosistem mangrove melengkapi pemandangan Pantai Ujungnegoro (Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Batang, 2008 dalam Dewi dan Hapsari, 2012). Tahun 2012, nama area konservasi ini dirubah menjadi Taman Pesisir Ujungnegoro-Roban sesuai dengan aturan dari Peraturan Menteri Perikanan dan Kelautan RI No. 17 tahun 2008 tentang Kawasan Konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan pengelolaan dibawah pemerintah Kabupaten Batang. Aturan pengelolaan dituangkan dalam Peraturan Bupati Batang No. 18 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Kawasan Taman Pesisir Ujungnegoro-Roban. Diharapkan dampak dari kawasan lindung tersebut dapat memberikan suksesi terhadap perbaikan ekosistem di sekitarnya.

Eksplotasi yang berlebihan, berkurangnya stok ikan, kerusakan lingkungan perairan berdampak pada berkurangnya kemampuan daya dukung lingkungan untuk tumbuh dan berkembangnya sumberdaya perikanan. Pembangunan ekonomi perikanan yang terkait secara ekonomi dan ekologi dimanfaatkan dengan konsep pemanfaatan secara berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan mensyaratkan pada derajat konsistensi dan kondisi stabilitas, viabilitas sistem sosial ekonomi (Vaitsos, 2002). Pengurangan kemiskinan nelayan skala kecil harus dilakukan dari kedua sisi, yaitu sisi pendapatan dan pengeluaran. Pendapatan nelayan bisa dinaikkan tidak hanya dari sisi aktivitas penangkapan namun juga dari ekowisata dan kegiatan ekonomi rumah tangga yang dapat menambah pendapatan (Virapat, 2011). Di beberapa tempat kegiatan ekowisata sudah dikembangkan dengan baik bahkan ada investor dari luar yang ikut terlibat pada pengelolaan ekowisata. Namun keterlibatan dari pihak investor tentunya memiliki motif mencoba memaksimalkan eksploitasi untuk keperluan mendapat keuntungan lebih. Ini

dapat mengancam pengelolaan ekowisata yang bergeser dari tujuan pembangunan berkelanjutan. sehingga perlu kerjasama antara pihak instansi pemerintah, masyarakat dan juga LSM. Untuk menjaga perikanan berkelanjutan dan ketahanan pangan, maka perlu peningkatan kapasitas kemampuan individu dan kelompok. Belajar dengan melakukan secara langsung merupakan langkah terbaik dalam peningkatan kapasitas kemampuan.

Kabupaten Batang sebagai salah satu wilayah di Provinsi Jawa tengah yang terletak di pesisir Laut Utara Jawa. Penduduk yang bermata pencaharian sebagai nelayan memiliki presentase lebih dari 50%. Namun sayangnya, alat tangkap yang digunakan oleh masyarakat di daerah ini masih kurang selektif untuk menangkap ikan. Baru-baru ini muncul Peraturan Menteri Perikanan dan Kelautan RI No.2/2015 mengenai larangan penggunaan alat penangkapan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets) di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia. Salah satu jenis yang dilarang beroperasi adalah alat tangkap cantrang yang merupakan modifikasi dari trawl. Nelayan di Kabupaten Batang termasuk yang menggunakan alat tangkap tersebut untuk usaha penangkapan ikan. Gejolak protes atas diterbitkannya aturan ini membuat konflik yang cukup pelik. Usaha untuk mengganti alat tangkap cantrang dengan alat tangkap lain yang lebih selektif juga tidak mudah dilakukan. Selain itu juga masalah pencemaran area muara sungai dan kerusakan lahan kawasan mangrove yang menjadikan perairan pantai juga ikut terdampak sehingga mengurangi kemampuan daya dukung untuk kehidupan biota laut.

Keberadaan kawasan konservasi Taman Pesisir Ujungnegero-Roban di Kabupaten Batang memberikan harapan untuk usaha menjaga kelestarian ekosistem laut di pesisir laut. Penjagaan daerah "spawning ground" dan "nursery ground" di wilayah konservasi menjadi sangat penting agar keberlangsungan kehidupan biota laut tetap terjaga. Di area Taman Pesisir ini terdapat zona inti yang diperuntukkan bagi proses perkembangbiakan biota laut yang dilindungi. Selain itu juga digunakan sebagai kawasan ekowisata yang dapat membantu masyarakat sekitar dalam hal peningkatan pendapatan dari kegiatan penunjang wisata di Pantai Ujungnegero. Namun perlu juga diperhatikan bagaimana keberlanjutan usaha penangkapan ikan dengan menjaga keberlangsungan biota target penangkapan dengan kearifan.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Eksploitasi Perikanan Laut**

Kabupaten Batang memiliki 5 (lima) buah Tempat Pelelangan Ikan (TPI), yaitu Roban Barat, Roban Timur, Celong, Siklayu dan Klidang Lor. Dari kelima TPI tersebut yang paling besar adalah TPI Klidang Lor karena memiliki

dermaga dan pelabuhan dengan tipe Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP). Sedangkan empat TPI yang lain hanya berupa tempat yang kecil dengan tipe Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI). Jenis alat tangkap yang digunakan oleh nelayan setempat adalah jaring insang (gill net), trammel net, bubu, cantrang dan arad. Pada tahun 2016 dari total keseluruhan alat tangkap yang paling dominan digunakan adalah alat tangkap arad dan cantrang. Alat tangkap ini target utama tangkapannya udang dengan hasil sampingan berupa ikan tenggiri, manyung, layur, bambangan, belong, tiga waja, beloso, belanak, petek, cumi-cumi dan kerang simping. Berikut adalah tabel jumlah alat penangkap ikan yang ada di Kabupaten Batang tahun 2016.

**Tabel 1.** Jenis dan jumlah alat penangkap ikan setiap TPI di Kabupaten Batang

No	Nama TPI	2016				
		Gill Net	Trammel Net	Wadong/Bubu	Cantrang	Arad
1	Roban Barat	48	32	22	0	160
2	Roban Timur	37	24	16	0	158
3	Celong	42	27	15	0	86
4	Siklayu	92	8	12	0	2
5	Klidang Lor	5	15	90	340	0
Jumlah		224	106	155	340	406

Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Batang, 2017

**Tabel 2.** Total Alat Tangkap, Produksi dan Rata-rata Produksi per Alat Tangkap Tahun 2016 di Kabupaten Batang

No	Nama TPI	Total alat tangkap	Produksi 2016 (kg)	Produksi per alat tangkap 2016 (kg)
1	Roban Barat	262	154.933	591,3473
2	Roban Timur	235	208.855	888,7447
3	Celong	170	129.979	764,5824
4	Siklayu	114	104.268	914,6316
5	Klidang Lor	450	27.677.129	61.504,73
Jumlah		1231	28275164	

Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Batang, 2017

Nampak bahwa konsentrasi alat tangkap cantrang ada di Pangkalan Pendaratan Pantai (PPP) Klidang Lor karena armada penangkapan berukuran antara 10-30 GT. Sedangkan alat tangkap arad terkonsentrasi di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Roban Barat dan Roban Timur. Ini dikarenakan ukuran armada penangkapan yang lebih kecil, yaitu maksimal berukuran 5 GT. Ukuran kapal terpengaruh dengan kemampuan Pelabuhan atau Pangkalan Pendaratan Ikan untuk dilewati dan dijadikan tempat bersandar oleh armada penangkapan. PPI Roban Barat, Roban Timur, Siklayu dan Celong hanya memanfaatkan

kan aliran sungai sebagai jalur keluar masuk armada penangkapan yang akan melaut atau bersandar dan bongkar muat. Sehingga dengan kedalaman yang rendah tidak dimungkinkan untuk dilewati armada penangkapan yang berukuran besar.

Jumlah produksi yang paling besar dari empat TPI kecil di Batang adalah di TPI Roban Timur. Namun komposisi produksi penangkapan tidak terlalu banyak. Di TPI Roban Barat, Roban Timur, Siklayu dan Celong jenis hasil tangkapan utama yang dilelang adalah udang dan kerang simping, serta jenis ikan kecil hasil sampingan seperti tiga waja, beloso, belanak dan petek. Sedangkan untuk produksi rata-rata per alat tangkap yang paling banyak ada di TPI Siklayu karena jumlah alat tangkap yang berpangkalan disana lebih sedikit dibandingkan dengan tiga TPI yang lain.

### **A.1. Ikan dan biota laut sebagai komoditas**

Jenis ikan dan moluska yang menjadi hasil tangkapan dan memiliki nilai jual tinggi diantaranya adalah ikan tenggiri, manyung, layur, udang jerbung, udang dogol, cumi-cumi, rajungan dan kerang simping. Data tahun 2017 menunjukkan udang jebung harga per kg mencapai Rp 57.500,00 dan udang dogol Rp 24.400/kg. Cumi-cumi per kg Rp 21.600,00, rajungan Rp 39.000,00/kg dan simping Rp 8.600,00 per kg. Ikan tenggiri harga per kg Rp 45.000,00; manyung Rp 25.000,00/kg, dan bambangan Rp 20.000/kg. Komoditas tersebut termasuk dalam komoditas perikanan yang laku diekspor ke manca negara. Sehingga perlu diperhatikan tidak hanya total produksi namun juga kualitas produknya. Selama ini yang menjadi fokus dari nelayan adalah jumlah produksi penangkapan yang besar. Namun, tidak dibarengi dengan penjagaan mutu hasil tangkapan dan juga ukuran hasil tangkapan yang berdampak pada harga jual. Nelayan sering dirugikan karena informasi harga hasil tangkapan tidak tersedia dan lebih ditentukan oleh bakul yang menjadi peserta lelang. Atau bahkan beberapa jenis komoditas tidak diperjualbelikan melalui proses lelang karena sudah ada pengepul atau supplier yang menjadi pembeli langganan.

### **A.2. Indikator Ekonomi Perikanan Berkelanjutan**

Pengaturan mengenai penggunaan alat tangkap yang memiliki selektivitas tinggi diperlukan untuk menjaga keberlangsungan dari sumber daya perikanan di masa yang akan datang. Jangan sampai kegiatan eksplorasi penangkapan memutus rantai kehidupan dari biota perairan. Sehingga memerlukan pengaturan yang dapat menjaga keseimbangan antara kebutuhan hidup dan kelangsungan stok sumberdaya sebagai penyangga kebutuhan



pangan manusia. Adapun indikator perikanan berkelanjutan yang digagas oleh OECD adalah sebagai berikut (Gallic, 2002):

- 1) Adanya aturan jumlah tangkap yang diperbolehkan, diterapkannya kuota penangkapan untuk spesies dengan nilai jual tinggi
- 2) Kuantitas dan nilai dari hasil tangkapan yang didaratkan
- 3) Jumlah pekerja yang terserap
- 4) Kapasitas armada penangkapan
- 5) Rekreasi perikanan
- 6) Perdagangan perikanan dan produk hasil olahan ikan
- 7) Kuantitas dan nilai produksi ikan hasil budidaya
- 8) Transfer finansial dari pemerintah untuk menstimulus perkembangan usaha penangkapan, budidaya dan pengolahan ikan.

Berdasarkan kriteria tersebut maka perlu diidentifikasi spesies yang memiliki nilai jual tinggi untuk diawasi dan diatur jumlah penangkapannya. Tujuannya adalah agar kualitas hasil tangkapan dapat sesuai dengan standar perdagangan yaitu ukuran dan grade yang diminta oleh pasar perdagangan. Sebab nilai jual komoditas penangkapan sangat tergantung dengan persyaratan tersebut. Selama ini nelayan maupun pengusaha penangkapan ikan kurang memperhatikan standar ikan target tangkapan. Sehingga harga ikan seringkali dibawah rata-rata dan berdampak merugikan bagi mereka. Kedenderungan penggunaan alat tangkap dengan model jarring yang memiliki ukuran mata jaring kecil adalah untuk mendapatkan hasil tangkapan sebanyak-banyaknya. Banyak disini dalam ukuran berat secara keseluruhan, bukan dari berat per ekor atau per satu kilogram berisi berapa ekor. Kesalahan pemahaman jumlah tangkapan tanpa melihat kualitas hasil tangkapan membuat pengusaha penangkapan maupun nelayan kecil merugi saat harga yang didapatkan terlalu rendah. Pembahasan ini berhubungan dengan kriteria kedua indikator perikanan berkelanjutan yaitu kuantitas dan nilai hasil tangkapan yang didaratkan.

Indikator ketiga dan keempat jumlah pekerja dan kapasitas armada penangkapan sangat menentukan dalam upaya menjaga kelestarian biota dan habitatnya. Mengapa demikian? Di Kabupaten batang khususnya dan di Pulau Jawa pada umumnya, nelayan lebih memilih yang menggunakan armada penangkapan berukuran kecil dan jumlahnya banyak. Karena hasil dari kegiatan menangkap ikan bisa dijual dan dikonsumsi sendiri atau dikenal dengan istilah nelayan subsisten. Sehingga pengaturan perlu diarahkan untuk meningkatkan kapasitas penangkapan dengan menggunakan model kelompok nelayan untuk mengoperasikan alat tangkap dengan ukuran armada yang lebih besar dan penggunaan alat tangkap yang tidak merusak habitat perairan.

Indikator kelima rekreasi perikanan, pengembangan kegiatan rekreasi perikanan dapat dijadikan alternative untuk memecah konsentrasi kegiatan nelayan yang hanya menangkap ikan untuk keperluan sendiri. Rekreasi perikanan dapat berupa kegiatan olah raga memancing atau penyewaan kapal atau perahu wisata. Indikator keenam adalah perdagangan perikanan dan produk olahan ikan, Semakin banyak varian produk olahan ikan dapat menggerakkan kegiatan perdagangan perikanan. Karena sifat ikan dan biota laut yang mudah rusak, maka perlu proses pengawetan dan pengolahan agar bisa sampai kepada konsumen akhir dengan kondisi yang masih layak dikonsumsi. Variasi produk olahan ikan dapat memberikan nilai tambah pada perdagangan produk perikanan. Ketujuh kuantitas dan nilai produksi hasil budidaya, di negara maju kegiatan budidaya perikanan sudah sangat beragam Sedangkan di Indonesia masih terbatas pada budidaya ikan air tawar. Meski belakangan ini sudah mulai banyak dikembangkan bahkan dibuat proyek percontohan budidaya ikan air laut oleh Balai Budidaya Air Laut dibawah Kementerian Kelautan dan Perikanan, namun belum dapat dilakukan secara meluas oleh pembudidaya ikan. Sehingga masyarakat nelayan masih sangat tergantung dengan hasil tangkapan ikan laut dari alam. Indikator ketujuh ini masih dalam taraf uji coba dan belum dapat diaplikasikan secara meluas untuk saat ini. Dan delapan adalah transfer finansial dari pemerintah untuk menstimulus perkembangan usaha penangkapan, budidaya dan pengolahan ikan yang dapat memberikan dampak positif terhadap usaha perikanan di daerah-daerah. Namun sebaiknya, stimulus ini tidak diberikan dalam bentuk dana hibah karena cenderung digunakan untuk keperluan konsumtif daripada produktif mengembangkan usaha. Kedelapan indikator tersebut dapat diterapkan di Kabupaten Batang dengan catatan ada upaya yang intensif dan didukung oleh semua stakeholder perikanan.

## **B. Kawasan Konservasi (KKLD) Ujungnegoro-Roban**

Pada Undang-undang No. 31 Tahun 2004 yang diubah terakhir dengan UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan menggunakan istilah taman nasional perairan, taman wisata perairan, suaka alam perairan dan suaka perikanan. Tata cara penetapan kawasan konservasi perairan sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor PER.02/MEN/2009 dalam pasal 4 disebutkan bahwa kawasan konservasi perairan ditetapkan berdasarkan kriteria ekologi, sosial budaya dan ekonomi. Secara ekologi kawasan konservasi perairan harus memiliki keanekaragaman hayati, kealamiah, keterkaitan ekologis, keterwakilan, keunikan, produktivitas, daerah ruaya, habitat ikan langka, daerah pemijahan ikan daerah pengasuhan. Kriteria sosial budaya meliputi dukungan masyarakat, potensi konflik kepentingan, potensi ancaman dan kearifan lokal serta adat istiadat, serta kriteria ekonomi meliputi

nilai penting perikanan, potensi rekreasi dan pariwisata, estetika dan kemudahan akses mencapai kawasan.

Berdasarkan kriteria di atas, Kawasan Konservasi Laut Daerah Ujungnegoro - Roban Kabupaten Batang telah sesuai berdasarkan komponen yang dimiliki dan dilindungi berupa kawasan Karang Kretek dan Karang Maeso, kawasan sosial budaya situs makam Syekh Maulana Maghribi, dan kawasan wisata pantai Ujungnegoro (Yusmanto et.al, 2012).

Taman Pesisir Ujungnegoro-Roban Kabupaten Batang meliputi antara lain empat desa, yaitu Desa Ujungnegoro, Desa Karanggeneng, Desa Ponowareng, Desa Kedung Segog. Sementara secara administratif, pantai yang menjadi KKPD berbatasan dengan sebelah barat Pantai Ujungnegoro Desa Ujungnegoro Kecamatan Kandeman, sebelah utara Pantai Utara Laut Jawa, sebelah timur Pantai Roban Timur, Desa Sengon Kecamatan Subah, dan sebelah selatan Pantai Ujungnegoro-Roban (Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan, 2015).

### **B.1. Zonasi Kawasan Konservasi Ujungnegoro-Roban**

Zonasi kawasan konservasi laut daerah dibagi menjadi tiga zona utama, yaitu zona inti, zona pemanfaatan terbatas, dan zona lainnya sesuai dengan peruntukkan kawasan.

#### *1. Zona Inti*

Zona inti di kawasan konservasi laut daerah Ujungnegoro-Roban terletak di kawasan Karang Kretek. Sub zona inti Karang Kretek pada posisi 06°53,497'LS-109°49,135'BT, 06°53,482'LS-109°48,841'BT dan 06°53,594'LS - 109°49,096'BT.

Zona inti ini terdiri atas:

- Sub zona perlindungan terumbu Karang Kretek, dan
- Sub zona situs budaya tradisional.

Penentuan sub zona perlindungan terumbu Karang Kretek termasuk zona inti antara lain karena sub zona ini memiliki ekosistem terumbu karang yang unik dan merupakan habitat penting bagi biota perairan untuk melakukan berbagai aktivitas seperti pemijahan (*spawning*), pengasuhan/perawatan (*nursery*) anak-anak ikan atau biota laut, mencari makan (*feeding*), dan lain-lain aktivitas untuk tumbuh dan berkembang. Sementara itu kondisinya pada saat ini sangat mengkhawatirkan karena dari hasil data menunjukkan tutupan karangnya kurang lebih hanya 6%, ini berarti kondisi ekologisnya sangat buruk. Belum lagi keanekaragaman jenisnya juga rendah. Dengan menetapkan sub zona ini menjadi bagian dari zona inti diharapkan ekosistem-

nya akan pulih kembali dan mampu menjadi sumber benih (plasma nutfah) bagi ketersediaan ikan-ikan di perairan laut secara berkelanjutan.

Sub zona perlindungan Karang Kretek dapat dimanfaatkan untuk pendidikan dan penelitian guna kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan yang dapat dijadikan sebagai referensi tentang ekosistem terumbu karang.

Secara umum, tujuan penetapan sub zona perlindungan terumbu Karang Kretek di Kawasan Konservasi Laut Daerah Ujungnegoro-Roban adalah :

- 1) Memelihara dan menjaga kualitas terumbu Karang Kretek.
- 2) Melindungi keragaman spesies hayati yang ada.
- 3) Melindungi bagian ekosistem yang sensitif terhadap gangguan lingkungan.
- 4) Menjaga kualitas air.
- 5) Mengembalikan kondisi ekosistem terumbu karang yang telah mengalami kerusakan.
- 6) Mengembalikan sumberdaya perikanan di lingkungan terumbu karang yang telah menipis (*overfishing*).

Rambu-rambu yang diletakkan pada posisi batas sub zona digunakan untuk melindungi ekosistem terumbu Karang Kretek dari ancaman kerusakan oleh manusia. Sedangkan untuk mencegah kerusakan akibat sedimentasi yang berasal dari daerah hulu diperlukan koordinasi dengan instansi Kehutanan, Bapedalda, dan instansi lain yang terkait. Disamping itu juga perlu ditingkatkan penghijauan pantai dengan menanam mangrove di sempadan pantai serta sosialisasi sadar lingkungan kepada masyarakat baik di bagian hulu maupun hilir Daerah Aliran Sungai (DAS).

Sub zona situs budaya tradisional berada di kawasan wisata ziarah/rohani makam Syech Maulana Maghribi yang terletak di bukit Ujungnegoro pada posisi 06°53'31,8"LS - 109°47'57"BT. Sub zona situs budaya tradisional Makam Syech Maulana Maghribi termasuk situs budaya yang harus dilindungi dari pemanfaatan yang tidak bertanggungjawab karena lokasi ini memiliki potensi yang dapat dikembangkan sebagai kawasan wisata rohani dan dapat memberikan keuntungan secara ekonomi bagi masyarakat lokal pada khususnya dan Kabupaten Batang pada umumnya. Pengelolaan wisata rohani harus tetap dalam semangat ramah terhadap lingkungan sehingga kepentingan ekologi tidak terabaikan.

Perlindungan terhadap sub zona situs budaya tradisional ditujukan untuk melindungi lingkungan wisata ziarah Syech Maulana Maghribi yang perkembangannya dari tahun ke tahun makin sering dikunjungi wisatawan, sehingga fasilitas yang ada seperti sekarang ini perlu ditambah.

## 2. Zona Pemanfaatan Terbatas

Zona pemanfaatan terbatas di kawasan konservasi laut Ujungnegoro-Roban terletak di kawasan rekreasi pantai Ujungnegoro termasuk di dalamnya terdapat Karang Maeso dan karang-karang yang lain di sepanjang pantai Ujungnegoro.

Zona pemanfaatan terbatas terdiri atas:

- 1) Sub zona pariwisata pantai (wisata bahari),
- 2) Sub zona perlindungan habitat, dan
- 3) Sub zona penelitian dan pengembangan budidaya pantai.

Penentuan zona pemanfaatan terbatas tersebut didasarkan pada pertimbangan ekologis, pertimbangan kesesuaian lahan, dan pertimbangan kondisi eksisting.

Sub zona pariwisata pantai kawasan rekreasi Ujungnegoro berada pada posisi 06°53'30,3"LS - 109°47'51,9"BT, yang menurut kondisi eksisting telah memiliki beberapa fasilitas pariwisata, sehingga sub zona ini dapat dikembangkan sesuai dengan apa yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah Ujungnegoro - Roban Kabupaten Batang.

Secara umum dalam pengembangan kegiatan pariwisata dan rekreasi pesisir perlu memenuhi beberapa kriteria, yaitu :

- Atraksi, merupakan kegiatan wisatanya sendiri, termasuk kondisi fisik dan kegiatan wisatanya. Sehubungan dengan atraksi ini maka yang harus diperhatikan adalah daya tarik obyek wisata. Kriteria yang harus diperhatikan untuk daya tarik jenis obyek wisata pantai (pesisir) adalah keselamatan lokasi, keutuhan, keunikan, dan kepekaan; bentang alam, variasi flora dan fauna, kejernihan air, lebar pakai, kebersihan laut, keindahan, kebersihan kawasan, kenyamanan dan variasi kegiatan.
- Amenity, merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan kenyamanan wisatawan, termasuk di dalamnya keamanan, kesehatan (*health center*), hotel, rumah makan dan bank. Di beberapa kelengkapan amenity ini dapat menjadi salah satu daya tarik wisatawan datang ke lokasi wisata.
- Aksesibilitas, adalah kemudahan wisatawan untuk datang ke lokasi wisata. Aksesibilitas ini dapat dilihat dalam dua jenis peluang investasi, yaitu : a) Sistem transportasi, baik berupa kapal maupun jalan umum, b) Infrastruktur, seperti dermaga, terminal, bandara dan jalan raya.

Berdasarkan kriteria di atas, maka ada beberapa hal yang perlu dikembangkan di sub zona pariwisata pantai Ujungnegoro-Roban, agar semakin

banyak dikunjungi wisatawan, terutama akses menuju lokasi yaitu dengan perbaikan infrastruktur yang ada saat ini.

Sub zona perlindungan habitat dan populasi ikan kawasan Karang Maeso, ditujukan untuk melindungi habitat ikan dan biota perairan laut lainnya yang ada di perairan Karang Maeso dari eksploitasi berlebihan. Dengan demikian diharapkan sumberdaya ikan karang akan memiliki kesempatan untuk berkembang dan dapat dimanfaatkan secara lebih optimal menggunakan alat tangkap yang selektif agar perkembangannya tidak terganggu.

Beberapa arahan pengelolaan yang harus dilakukan berkaitan dengan penetapan sub zona perlindungan habitat dan populasi ikan di Karang Maeso adalah :

- Memasang rambu-rambu di sub zona perlindungan habitat dan populasi ikan di Kawasan Karang Maeso.
- Melakukan pengawasan intensif dari penangkapan ikan yang bersifat merusak.

Sub zona penelitian dan pengembangan budidaya pantai kawasan Karang Pancer Darat, Karang Pancer, Karang Jojogan, Karang Wuluhan, Karang Kembar dan Karang Ipik, dimanfaatkan untuk kepentingan dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perikanan budidaya laut.

### 3. Zona Lainnya

Zona lainnya merupakan zona di luar zona inti dan zona pemanfaatan terbatas yang karena fungsi dan kondisinya ditetapkan sebagai zona tertentu antara lain zona rehabilitasi mangrove.

Kriteria yang digunakan dalam penetapan sub zona rehabilitasi mangrove adalah :

- Berdasarkan hasil diskusi panel oleh panitia program MAB Indonesia – LIPI menyarankan lebar jalur hijau (hutan mangrove) ditentukan dengan rumus :  $L = (130 \times p)$ , dimana L = Lebar jalur hijau; p = nilai rata-rata perbedaan pasang tertinggi dan terendah diukur dari garis pantai.
- Minimal 400 – 500 meter dari surut terendah (tergantung situasi setempat) dan maksimal 1.000 meter untuk daerah yang belum diusahakan.
- Dekat dengan zona penangkapan ikan.
- Kawasan hutan bakau yang telah mengalami kerusakan dan perlu direhabilitasi.
- Kawasan hutan bakau kondisinya baik dan perlu dikonservasi.

Zona lainnya di Kawasan Konservasi Laut Daerah Ujungnegoro-Roban adalah sub zona rehabilitasi mangrove dan sub zona perikanan tangkap tradisional.

#### Sub Zona Rehabilitasi Mangrove

Sub zona rehabilitasi mangrove kawasan muara Sungai Sono dan muara Sungai Sipatan, memiliki kondisi eksisting sesuai untuk menumbuhkan tanaman mangrove. Keberadaan zona ini akan bermanfaat baik bagi pemulihan ekosistem mangrove (bermanfaat bagi tumbuh kembangnya biota pantai) maupun perlindungan pantai dan ancaman abrasi. Kondisi vegetasi mangrove di sekitar muara Sungai Sono dan Sipatan cukup memprihatinkan karena telah banyak berkurang akibat perluasan lahan pertambakan oleh karena itu sangat perlu menetapkan kawasan ini sebagai zona rehabilitasi mangrove. Vegetasi pantai yang dikembangkan di zona rehabilitasi mangrove dapat berupa mangrove sejati seperti Bakau, Api-api, Tanjung dan sebagainya atau mangrove asosiasi seperti Waru, Pandan dan sebagainya.

#### Sub zona perikanan tangkap tradisional

Sub zona perikanan tangkap tradisional di Kawasan Konservasi Laut Daerah Ujungnegoro – Roban ditempatkan di luar semua sub zona yang ditetapkan. Perikanan tangkap tradisional didefinisikan sebagai suatu kegiatan pemanfaatan sumberdaya hayati laut melalui penangkapan ikan skala kecil (ukuran kapal < 50 GT) atau pengumpulan hewan dan tumbuhan laut lainnya, yang selanjutnya hasil tangkapan tersebut digunakan untuk memenuhi langsung atau memasarkan dalam bentuk ikan segar atau ikan olahan.

- Sub zona perikanan tangkap tradisional meliputi :
- Wilayah perairan pantai dari batas surut terendah hingga 2 mil laut
- Wilayah perairan pantai 2 – 4 mil laut
- Wilayah perairan pantai 4 – 12 mil laut
- Jenis kegiatan penangkapan ikan unuk setiap wilayah perairan pada sub zona perikanan tangkap tradisional menggunakan jenis alat tangkap yang ramah lingkungan harus benar-benar diterapkan agar pola pemanfaatan sumberdaya ikan dapat dikelola dan dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.

## **B.2. Alokasi dan Posisi Zona Konservasi Laut Daerah Ujungnegoro-Roban**

Alokasi zonasi pada Kawasan Konservasi Laut Daerah Ujungnegoro-Roban dari hasil kajian DKP Kabupaten Batang tahun 2009 adalah sebagai berikut:

a) *Zona inti :*

Z1.1 : Sub zona perlindungan terumbu Karang Kretek (06°53,497'LS – 109°49,135'BT, 06°53,482'LS – 109°48,841'BT dan 06°53,594'LS – 109°49,096'BT).

Z1.2 : Sub zona situs budaya tradisional (06°53'31,8'LS – 109°47,57'BT).

b) *Zona Pemanfaatan Terbatas :*

Z2.1 : Sub zona pariwisata pantai (06°53'30,3'LS – 109°47'51,9'BT).

Z2.2: Sub zona perlindungan habitat dan populasi ikan (06°53,234'LS– 109°47,219'BT, 06°53,154'LS – 109°47,285'BT).

Z2.3: Sub zona penelitian dan pengembangan budidaya pantai (06°53,246'LS–109°47,275'BT, 06°53,352'LS–109°47,605'BT, ..... 06°53,662'LS–109°48,164'BT, 06°53,525'LS – 109°48,063'BT).

c) *Zona Lainnya :*

Z3.1 : Sub zona rehabilitasi mangrove (06°53,370'LS – 109°47,699'BT, 06°53,954'LS – 109°48,708'BT).

Z3.2 : Sub zona perikanan tangkap tradisional (06°53,744'LS – 109°48,258'BT, 06°53,266'LS – 109°49,811'BT).

Penentuan zonasi KKLD Ujungnegoro – Roban merupakan hasil dari beberapa kajian yang mendukung dalam pengelolanya. Zonasi yang terbentuk terdiri dari 3 zona yaitu zona inti, zona pemanfaatan terbatas dan zona lainnya.

Berdasarkan kajian dan analisa yang telah dilakukan, kondisi zonasi KKLD Kabupaten Batang yang tertuang dalam Peraturan Bupati Batang No. 47 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Bupati Batang No. 07 Tahun 2011 tentang Pengelolaan KKLD/Taman Pesisir Ujungnegoro–Roban Kabupaten Batang, dijelaskan sebagai berikut (Tabel 3.):

**Tabel 3.** Zonasi KKLD Ujungnegoro – Roban

Zona	Lingkup	Peruntukkan
Zona Inti	Kawasan perairan karang Kretek, perairan karang Maheso dan kawasan makam Syeikh Maulana Maghribi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan, serta alur migrasi biota laut (udang lobster, mimi lan mintuno, lumba-lumba, ikan-ikan karang)</li> <li>- Perlindungan ekosistem pesisir yang unik dan/ atau rentan terhadap perubahan (Rhizopora sp, Avicenia, Cemara laut, Nyaplung)</li> <li>- Perlindungan situs budaya/adat tradisional</li> <li>- Penelitian dan/ atau pendidikan</li> </ul>



Zona	Lingkup	Peruntukkan
Zona Pemanfaatan Terbatas	Kawasan perairan Ujung-negoro sekitar kawasan makam Syeikh Maulana Maghribi dan kawasan pantai Ujungnegoro sampai dengan Karang Maheso	- Pariwisata dan rekreasi - Penelitian dan pengembangan budidaya perairan pantai dan/atau - Pendidikan
Zona Lainnya	Kawasan pantai dan perairan sampai dengan 4 mil	- Rehabilitasi mangrove - Daerah penangkapan ikan tradisional - Kegiatan lainnya yang mendapat rekomendasi Bupati Batang setelah mendapat pertimbangan Tim Penataan KKLD

Sumber: Peraturan Bupati Batang No. 47 Tahun 2011 dalam Dewi dan Hapsari (2012)

Kajian zonasi KKLD Ujungnegoro – Roban adalah untuk mengetahui kondisi dan potensi sumberdaya, sehingga masih bisa/tidak jika dikategorikan sebagai kawasan konservasi khususnya KKLD. Sesuai dengan peraturan terbaru dari pemerintah yaitu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 17 Tahun 2008, model kawasan konservasi KKLD sudah tidak berlaku, perubahan nomenklatur menjadi KKP3K (Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil). Memperjelas kondisi dan kategori KKLD akan diuraikan dalam analisis menggunakan panduan teknis pengelolaan KKLD (DKP, 2007 dalam Dewi dan Hapsari, 2012). Penilaian KKLD disesuaikan dengan peraturan yang berlaku dan hasil identifikasi data empirik, maka:

#### 1. Mendefinisikan Zona Inti (core zone atau sanctuaries)

Habitat yang mempunyai nilai konservasi yang sangat tinggi dan sangat rentan. Tidak ada kegiatan yang ekstratif diizinkan dalam zona inti. Kategori dibawah ini akan membantu dalam penentuan zona-zona kawasan, yaitu:

**Tabel 4.** Pendefinisian Zona Inti

No	Kriteria	Data Empirik	Penilaian
		<b>Perlindungan Ekologi</b>	
1	Jumlah spesies dan genus yang ada dalam kawasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mangrove : teridentifikasi <i>Rhizophora sp</i>, <i>Avicennia sp</i> dan <i>Sonneratia sp</i>.</li> <li>• Terumbu karang : <i>Porites Lobata</i> dan <i>Favites</i></li> <li>• Ikan karang : <i>Pomacentridae Labridae</i> dan <i>Siganidae</i></li> </ul>	Ada spesies ekosistem tersebut tetapi kurang keanekaragamannya, termasuk dalam biota yang umum ditemukan di perairan dan rentan terhadap perubahan.

No	Kriteria	Data Empirik	Penilaian
<b>Perlindungan Ekologi</b>			
2	Jarak zona dari hunian penduduk	Jarak dengan rumah penduduk kurang lebih 1 km, tetapi bersinggungan secara langsung dengan kawasan wisata	Cukup dekat dengan area konsentrasi penduduk terutama kawasan pariwisata.
3	Tingkat pemanfaatan dan ketergantungan masyarakat	Lebih banyak masyarakat yang bermatapencaharian di bidang pertanian pangan	Ketergantungan masyarakat terhadap habitat pesisir kurang.
4	Pola migrasi dari spesies target konservasi	Tidak teridentifikasi	Kurang sesuai.
5	Pola pemasangan dan sebaran target konservasi	Tidak teridentifikasi	Kurang sesuai.
6	Jarak dari sumber benih dan larva dari spesies target	Tidak teridentifikasi	Kurang sesuai.
<b>Situs Budaya/Adat Tradisional</b>			
1	Status Kawasan Makam Syeikh Maulana Maghribi	Dikelola oleh ulama setempat sebagai warisan budaya lokal	Sudah merupakan warisan sehingga menjadi salah satu 'trade mark' sisi kerohanian masyarakat Batang

*Sumber:* Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Batang 2012 dalam Dewi dan Hapsari, 2012.

## 2. Mendefinisikan Zona Pemanfaatan Terbatas

Zona ini merupakan zona yang memiliki nilai konservasi, tetapi dapat bertoleransi dengan pemanfaatan oleh pengguna terbatas (nelayan dan pembudidaya) dan juga zona yang berpotensi untuk berbagi pemanfaatan ramah lingkungan.

**Tabel 5.** Pendefinisian Zona Pemanfaatan Terbatas

No	Kriteria	Data Empirik	Penilaian
1	Perlindungan habitat dan populasi ikan	Masih ada yang menggunakan sebagai daerah penangkapan yang potensial	Kurang sesuai
2	Pariwisata dan rekreasi	Adanya perahu wisata dan rekreasi pancing	Cukup sesuai
3	Penangkapan dan budidaya ikan yang ramah lingkungan	Penangkapan dengan pancing	Cukup sesuai

*Sumber:* Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Batang, 2012 dalam Dewi dan Hapsari, 2012.

### 3. Mendefinisikan Zona Lainnya

Zona di luar zona inti dan zona pemanfaatan terbatas yang karena fungsi dan kondisinya ditetapkan sebagai zona tertentu.

**Tabel 6.** Pendefinisian Zona Lainnya

No	Kriteria	Data Empirik	Penilaian
1	Rehabilitasi	Ekosistem mangrove masih ada di area muara sungai	Cukup sesuai

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Batang, 2012 dalam Dewi dan Hapsari, 2012.

Hasil dari penilaian terhadap ketiga zona menunjukkan KKLD Ujungnegoro-Roban telah berubah kondisi dan potensinya. Dengan perubahan tersebut mewajibkan kawasan ini bisa dilakukan *rezoning* atau zonasi ulang terhadap pemanfaatan kawasan konservasi. *Rezoning* bertujuan untuk menyediakan alternatif kebijakan dalam pengelolaan KKLD secara lebih komprehensif, yaitu pengelolaan yang dapat mengakomodasi berbagai kepentingan stakeholders khususnya kegiatan yang ditujukan untuk kepentingan konservasi, perikanan dan wisata didasarkan atas prinsip keberlanjutan.

Tujuan dari perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Batang adalah mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang memenuhi kebutuhan pembangunan dengan senantiasa berwawasan lingkungan, efisien dalam alokasi investasi, bersinergi dan dapat dijadikan acuan dalam penyusunan program pembangunan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat. Sasaran dari perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Batang adalah:

- a. Terkendalinya pembangunan di wilayah kabupaten baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- b. Terciptanya keserasian antara kawasan lindung dan kawasan budaya.
- c. Tersusunnya rencana dan keterpaduan program-program pembangunan di wilayah kabupaten;
- d. Terdorongnya minat investasi masyarakat dan dunia usaha di wilayah kabupaten;
- e. Terkoordinasinya pembangunan antar wilayah dan antar sektor pembangunan.

### C. Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Pesisir Kabupaten Batang

Masyarakat kawasan KKLD/Taman Pesisir mayoritas adalah petani tanaman pangan dan jasa, sehingga jumlah nelayan sangat kecil kecuali di Desa Kedungsegog dan Sengon yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan. Fungsi KKLD/Taman Pesisir sebagai tempat wisata rekreasi memiliki dua potensi wisata yaitu wisata alam pantai pasir Ujungnegoro dan wisata religi Makam

Syekh Maulana Maghribi. Peran kiai atau penyebar agama Islam sangat dijunjung tinggi di masyarakat seperti uraian Abdurahman (2009) dalam Yusmanto et.al, (2012) perbedaan dalam status sosial, seringkali lebih rumit dan terkadang tumpang tindih. Namun dalam kehidupan sosial, sering ditandai dengan norma yang membedakan tua muda, kaya miskin, pimpinan bawahan, kiai santri. Dalam sistem norma ini, terutama di daerah perdesaan, para kiai memperoleh penghormatan yang lebih daripada pemimpin lokal lainnya

Karakteristik masyarakat pesisir di Kawasan Taman Pesisir Ujung-negoro-Roban Kabupaten Batang memiliki beberapa ciri sikap yaitu cenderung lugas, spontan, tutur kata yang digunakan cenderung menggunakan bahasa ngoko. Dalam menghadapi atau menyelesaikan masalah cenderung tidak suka berbelit-belit. Cara hidupnya bersifat boros dan menyukai kemewahan serta mobilitasnya cukup tinggi.

Kearifan lokal yang masih dilestarikan antara lain gotong-royong, sedekah laut, Sedekah Bumi, Nyadran Desa, Khaul Massal dan Legenongan. Budaya merupakan pilar keempat dalam pembangunan berkelanjutan bersama dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan (Nurse, 2006). Budaya sendiri menurut Williams (1983) dalam Nurse (2006) didefinisikan menjadi 4 macam, yaitu pertama pengembangan pemikiran dalam diri manusia yang berbudaya, kedua proses pengembangannya berupa ketertarikan budaya (cultural interest) dan aktivitas budaya (cultural activities), ketiga dalam artian proses budaya dalam sebuah seni dan kasil karya intelektual manusia dan keempat sebagai keseluruhan cara hidup (way of life), system yang mengikat melalui aturan social yang dikominikasikan, dibuat kembali, berdasarkan pengalaman dan dieplorasi. Definisi yang sering digunakan adalah definisi ketiga dan keempat, sebagai contoh untuk mengkaitkan dengan pembangunan berkelanjutan mesti berbicara lebih lanjut mengenai pembentukan "seni", "peninggalan budaya", dan "identitas budaya" yang termasuk dalam gagasan peradaban luas menyatu dalam budaya sebagai cara hidup yang terbentuk berdasarkan system kepercayaan, cara pandang keduniawian, epistemoogi dan kosmologi yang membentuk hubungan interaksi manusia dengan lingkungannya (Nurse, 2006).

Kebudayaan dalam kehidupan nelayan pesisir yang dapat dikembangkan adalah gotong royong dan sedekah laut. Dari sini disisipkan pengetahuan mengenai ekologi interaksi manusia dan alam yang mengarahkan pada kesediaan masyarakat nelayan untuk menangkap dengan lebih arif dan bijaksana demi kelangsungan keberadaan sumberdaya ikan sebagai sumber pangan. Selain itu juga memanfaatkan kebudayaan masyarakat untuk menetapkan peraturan tradisional yang sifatnya mengikat dan diakui oleh pemerintah serta disahkan agar memiliki kekuatan hukum. Peraturan tersebut

dapat menjadi upaya menginternalisasi eksternalitas yang mengakibatkan kerusakan lingkungan sebagai wujud biaya sosial bagi siapapun yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Karena biaya untuk menjaga kelestarian lingkungan tidaklah murah.

#### **D. Konsep dan masukan untuk pembangunan ekonomi perikanan berkelanjutan di Kabupaten Batang**

Pemahaman masyarakat sekitar akan perlunya menjaga kelestarian lingkungan menjadi fokus utama dalam pembangunan ekonomi perikanan berkelanjutan. Masyarakat adalah aktor utama yang menjadi pelaku dalam penjagaan dan penyelamatan lingkungan. Sehingga sosialisasi mengenai area konservasi dan jenis kegiatan yang dilarang untuk dilakukan penting sekali diadakan untuk memberikan pengetahuan bagi masyarakat di sekitar kawasan konservasi. Perlibatan dalam aktivitas penjagaan kawasan konservasi juga sebaiknya diaktifkan kembali agar muncul rasa ikut memiliki. Serta untuk bersama-sama menjalankan dan sekaligus mengontrol pelaksanaan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Rencana Zonasi Kawasan Konservasi Laut Daerah, Rencana Tata Ruang Pantai maupun RTRW Kabupaten Batang. Arahan kebijakan insentif diberikan untuk mendorong pengembangan di Pusat Wilayah Pengembangan Pesisir. Disinsentif khusus akan dikenakan untuk membatasi pembangunan di kawasan lindung yang ada di wilayah pesisir Kabupaten Batang. Pengawasan dan pembatasan aktivitas perikanan dilakukan pada kawasan konservasi perairan seperti, Daerah Perlindungan Laut untuk terumbu karang dan Kawasan Konservasi Laut Daerah (dari Kawasan Karang Maeso sampai Ujungnegero-Roban).

Selain itu juga memberikan pengetahuan mengenai ekologi, rantai makanan, dan rantai kehidupan biota laut yang perlu dijaga oleh masyarakat sebagai suatu kewajiban bersama. Insentif juga bisa menjadi pilihan untuk menstimulasi masyarakat agar mau ikut menjaga kawasan konservasi. Berdasarkan penelitian Dewi dan Hapsari (2012) terdapat hubungan positif antara persepsi dan tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) Ujungnegero-Roban. Dengan adanya kerjasama antara masyarakat dan pemerintah diharapkan proses menjaga kawasan konservasi dapat berjalan sinergi dan menggalang kesuksesan. Mengingat kawasan konservasi merupakan area yang mampu mewujudkan suksesi alam untuk menjaga rantai kehidupan di wilayah perairan. Perbaikan kondisi perairan akan memicu peningkatan kapasitas daya dukung lingkungan habitat bagi biota laut baik produsen maupun konsumen. Penjagaan kawasan konservasi dapat mengaktifkan Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan yang ada di tiap wilayah dengan bantuan Satuan Kerja

Pengawas Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang bertugas di Kabupaten Batang.

Sisi eksplorasi penangkapan juga perlu pengelolaan sumberdaya perikanan dengan pendekatan ekosistem dan pemanfaatan perikanan berkelanjutan. Hal ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan data pencatatan hasil tangkapan dari setiap jenis spesies yang didaratkan. Data berupa jumlah kilogram berat hasil tangkapan perlu ditambah dengan data sampling panjang dan berat per spesies agar dapat disusun informasi mengenai kelayakan ikan hasil tangkapan secara biologis. Informasi ini sangat berguna untuk mendeteksi apakah ikan atau biota laut yang tertangkap masih dalam kondisi "infant" atau "mature" secara biologis. Data dan informasi tersebut menjadi dasar dalam kajian pendugaan stok ikan atau biota laut. Selain itu perlu data total jumlah upaya penangkapan dari keseluruhan armada penangkapan dari tahun ke tahun yang terekam dengan baik. Fungsi data upaya (trip) penangkapan dan jumlah hasil tangkapan per spesies sangat berguna untuk mengestimasi status dari ikan target penangkapan, apakah masih dalam status "*under*", "*fully*" atau "*over*" *exploited* secara biologi. Pengamatan secara berkelanjutan akan bermanfaat untuk mengawasi tingkat eksplorasi penangkapan yang dilakukan. Sehingga memungkinkan untuk mulai melakukan upaya budidaya untuk jenis biota yang memiliki nilai ekonomis tinggi di perdagangan lokal maupun global. Karena semakin lama sediaan stok ikan di alam tentunya juga akan makin terancam kepunahan, baik oleh aktivitas penangkapan, perubahan iklim dan juga pencemaran perairan.

## **PENUTUP**

Kabupaten Batang memiliki potensi perikanan yang masih dapat dikembangkan yaitu nelayan yang masih bersifat subsisten dan tradisional. Dengan menerapkan delapan indikator perikanan berkelanjutan diharapkan dapat dijadikan pilihan untuk memberikan arahan dalam mengembangkan perikanan di Kabupaten Batang terutama untuk indikator kesatu hingga keenam. Penerapan indikator perikanan berkelanjutan ditujukan bagi masyarakat pesisir yang tinggal dan menggantungkan hidup dari hasil penangkapan ikan agar dapat memiliki tambahan pendapatan selain dari menangkap ikan. Dan, juga memberikan nilai tambah dari hasil tangkapan yang didapatkan. Keberadaan Taman Pesisir Ujungnegero-Roban memberikan harapan untuk menjaga dan memberikan dampak besar bagi keberlanjutan usaha perikanan dan penyelamatan habitat ekosistem mangrove, karang, padang lamun di Kabupaten Batang. Kerjasama yang baik antara masyarakat sekitar dan pemerintah diperlukan dalam penjagaan kawasan konservasi.

Perlunya pencatatan data hasil tangkapan dari setiap jenis spesies yang tertangkap dan data sampling panjang dan berat per spesies agar dapat disusun informasi mengenai kelayakan ikan hasil tangkapan secara biologis. Sehingga dapat digunakan untuk menghitung stok ikan dan menetapkan kuota penangkapan per spesies ikan. Tujuannya adalah menjaga kualitas hasil tangkapan agar dapat sesuai dengan standar perdagangan dan memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Selain itu juga memanfaatkan kebudayaan masyarakat dengan mengesahkan peraturan tradisional yang sifatnya mengikat dan diakui oleh pemerintah agar memiliki kekuatan hukum. Peraturan tersebut dapat menjadi upaya menginternalisasi efek yang mengakibatkan kerusakan lingkungan sebagai wujud sanksi biaya sosial bagi siapapun yang mengakibatkan kerusakan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Behnam, A. (2007, 5-8 November). Biodiversity: An issue of governance. In *Wave of Change: Women, Youth and the Sea Conference, Partnering for the protection of the marine environment and the sustainable use of its resources*, Pacem in Maribus XXXII, Corinthia Palace Hotel, Attard, Malta. (page 67-74). Retrieved from <http://www.capemalta.net/pim2007/proceedings/Theme%203/Theme%203%20-%20YoP.pdf>
- Bone, Quentin and R. H. Moore. (2008). *Biology of fishes 3rd edition*. New York: Taylor and Francis.
- Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan. (2015). *Profil kawasan konservasi Provinsi Jawa Tengah*. Jakarta: Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan, Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Batang. (2017). *Statistik perikanan tangkap Kabupaten Batang 2016*. Batang: Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Batang
- Dewi, Dian Ayunita N.N. dan T. D. Hapsari. (2012). Analisis persepsi dan partisipasi masyarakat pada pengelolaan KKLK Ujungnegero, Kabupaten Batang. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*, 9(1), (117-124).
- Elliot, J.A. (2006). *An introduction to sustainable development 3rd editions*. New York: Routledge.
- Emas, R. (2015). *The concept of sustainable development: Definition and defining principles*. Brief for GSDR 2015. Malta: United Nations (page 1-3). Retrieved from [https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5839GSDR%202015\\_SD\\_concept\\_definiton\\_rev.pdf](https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5839GSDR%202015_SD_concept_definiton_rev.pdf)

- Gallic, B. (2002. October 28-29). *Fisheries sustainability indicators: The OECD experience*. Joint workshop EEA-EC DG Fisheries-DG Environment on Tools for measuring (integrated) Fisheries Policy aiming at Sustainable Ecosystem, Brussels, Belgium. Retrieved from <https://www.oecd.org/greengrowth/fisheries/2507611.pdf>.
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No 47/2016 tentang Estimasi potensi, jumlah tangkapan yang diperbolehkan dan tingkat pemanfaatan sumberdaya ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
- Anderson, L.G. (1986). *The economic of fisheries management*. Baltimore: John Hopkins. University Press.
- Mulyana, Ridwan. (2007). *Pengelolaan perikanan dan teori perizinan*. Subdit pemantauan dan evaluasi, Direktorat PUP, Dirjen Perikanan Tangkap. Jakarta Departemen Kelautan dan Perikanan, Retrieved from <http://www.perizinan.dkp.go.id>
- Nurse, K. (2006). *Culture as the Fourth Pillar of Sustainable Development*. London: Commonwealth Secretariat Marlborough House.
- Suharno. (2008). Analisis sumberdaya udang dengan model bioekonomi pada nelayan trammel net di Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Semarang: Thesis S2 Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro (tidak dipublikasikan).
- Vaitsos, C.V. (October 2003). *Growth theory revisited: Enduring questions with changing answers*. The Netherlands: United Nations University, Institute for New Technologies Discussions Papers (page 7-77). Retrieved from <https://ideas.repec.org/p/unm/unuint/200309.html>.
- Virapat, C. (2011. June 20-24). *Relationship between oceans and the three pillars of sustainable development*, Segment I: Sustainable Development, Oceans, and The Law of The Sea. The 12<sup>th</sup> Meeting of The United Nations Open-ended Informal Consultative Process on Oceans The Law of the Sea. Malta: United Nations and International Ocean Institute. Retrieved from [https://www.un.org/Depts/los/consultative\\_process/ICP12\\_Presentations/Virapat\\_Presentation.pdf](https://www.un.org/Depts/los/consultative_process/ICP12_Presentations/Virapat_Presentation.pdf)
- Yusmanto, S. Anggoro, dan T. Taruna. (2012, 11 September). *Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah (Taman Pesisir) Ujungnegero-Roban Kabupaten Batang*. Prosiding Seminar Nasional Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (hal 43-49).
- Yusmanto, S. Anggoro, dan T. Taruna. (2012). Kerawanan dan kebijakan pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah Ujungnegero-Roban Kabupaten Batang. *Jurnal Ekosains*, 4(3), 48-59.



---

## POTENSI KEUANGAN INKLUSIF DI PROVINSI MALUKU

Yerimias Manuhutu

### PENDAHULUAN

*Financial exclusion* merupakan batasan keuangan mencegah kelompok sosial dan individu tertentu untuk mendapatkan akses ke sistem keuangan formal atau dapat juga dikatakan sebagai ketidakmampuan (yang terjadi) dari beberapa kelompok masyarakat untuk mengakses sistem keuangan. Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat *financial exclusion* cukup tinggi, antara lain disebabkan karena tingkat penetrasi layanan perbankan yang rendah. Survei Bank Indonesia kerjasama dengan Lembaga Demografi Universitas Indonesia (2012), pada lima (5) provinsi (Sumatera Selatan, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Selatan) menunjukkan bahwa 35 persen responden merupakan nasabah bank yang juga menggunakan jasa/produk bank yang ditawarkan sedangkan sisanya tidak pernah berhubungan atau tidak lagi aktif sebagai nasabah bank. Aksesibilitas bukan satu-satunya penyebab karena mayoritas responden cukup mudah dalam menjangkau kantor bank terdekat.

Peran penting institusi keuangan melalui fungsi intermediasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan serta pencapaian stabilitas sistem keuangan. Perkembangan pesat industri keuangan tidak didukung dengan akses keuangan yang memadai, di lain pihak keterlibatan masyarakat luas dalam sistem perekonomian yakni ketersediaan akses layanan jasa keuangan merupakan *necessary condition*. Aksesibilitas masyarakat Indonesia terkait pada jasa layanan keuangan lebih besar dari India dan Cina, hal ini mengindikasikan bahwa terdapat celah ruang untuk memperbaiki sistem keuangan sehingga sistem keuangan menjadi lebih inklusif dan mencapai *social gain* yang cenderung lebih besar. Permasalahan kompleks aksesibilitas jasa keuangan yang timbul umumnya terkait pada sisi masyarakat sebagai konsumen dan sisi lembaga keuangan sebagai produsen.

Keuangan inklusif merupakan agenda penting perbankan mengingat *share* kegiatan keuangan mencapai 80 persen keuangan inklusif merupakan bagian dari strategi pembangunan nasional yang terus diperluas dalam menjangkau masyarakat yang *unbanked*. Keuangan Inklusif dapat diartikan sebagai hak setiap orang untuk memiliki akses dan layanan penuh dari

lembaga keuangan secara tepat waktu, nyaman, informatif, dan terjangkau biayanya, dengan penghormatan penuh kepada harkat dan martabatnya. Layanan keuangan tersedia bagi seluruh segmen masyarakat, dengan perhatian khusus kepada orang miskin, orang miskin produktif, pekerja migran, dan penduduk di daerah terpencil (Perpres, 2016).

Provinsi Maluku merupakan wilayah kepulauan (*archipelagic region*) memiliki permasalahan yang kompleks mengenai layanan jasa keuangan. Kondisi geografis yang berpulau-pulau berpengaruh besar terhadap akses masyarakat yang cenderung terbatas. Kendala infrastruktur merupakan permasalahan umum yang dihadapi pihak perbankan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berada di daerah terpencil maupun pedesaan. Keterbatasan layanan perbankan juga tidak lepas dari perhitungan skala ekonomis operasional bank di suatu daerah tersebut dan pertimbangan bank mengenai distribusi penduduk di suatu daerah yang akan dijangkau oleh layanan kantor cabang bank. Akibatnya, terdapat disparitas layanan perbankan dalam menjangkau seluruh daerah administrasi pemerintahan baik di tingkat provinsi, kabupaten dan terutama kecamatan.

Keterbatasan layanan perbankan di Provinsi Maluku tidak dapat dilepaskan dari keberadaan bank-bank umum di kabupaten/kota dalam menunjang kegiatan perbankan. Jumlah kantor bank umum dan jumlah Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dapat digunakan untuk mengukur kemampuan penggunaan jasa keuangan formal, guna melihat potensi hambatan untuk membuka dan mempergunakan rekening bank. Jumlah kantor bank umum dan jumlah ATM di Provinsi Maluku terkonsentrasi di Kota Ambon, yakni jumlah kantor bank umum sebanyak 58 buah atau 39,18 persen dari total provinsi dan jumlah ATM sebanyak 189 buah atau 71,59 persen. Sedangkan jumlah kantor bank umum yang kurang dari 10 adalah Kabupaten Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Kepulauan Aru dan Kota Tual. Sementara bila dilihat dari jumlah ATM terdapat 7 kabupaten/kota yang memiliki jumlah ATM kurang dari 5 persen atau dibawah 15 unit yakni Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku Tenggara Barat, Buru, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Kepulauan Aru dan Kota Tual.

Layanan keuangan digital sangat dipengaruhi oleh ketersediaan ketenagalistrikan, hal ini terkait dengan input daya alat elektronik yang digunakan dalam transaksi keuangan dan ketersediaan infrastruktur telekomunikasi, hal ini terkait dengan jangkauan sinyal yang dapat diakses oleh pelaku layanan keuangan digital. Kota Ambon merupakan daerah dengan jumlah kwh terjual terbanyak di Provinsi Maluku, yakni pada tahun 2016 sebanyak Rp. 230,4 miliar atau 53 persen dari jumlah kwh yang terjual di Provinsi Maluku. Sedangkan wilayah terendah adalah Kabupaten Seram Bagian Timur. Mengin-

dikasikan bahwa dengan ketersediaan listrik yang dapat menjangkau wilayah kepulauan, maka aktivitas ekonomi akan dapat ditingkatkan dengan menaikkan intensitas aktivitas layanan keuangan digital.

Infrastruktur telekomunikasi yang tercermin dalam presentase *coverage provider* berkembang cukup baik dan menyebar pada semua kabupaten/kota, hal ini mengindikasikan bahwa pengembangan keuangan inklusif dalam implementasi layanan keuangan digital pada wilayah regional dengan karakteristik *archipelagic region* berdampak positif meminimalisir waktu dan biaya dalam transaksi keuangan sehingga diharapkan responsif terhadap perkembangan perekonomian wilayah.

Potensi aktivitas ekonomi yang cukup jauh dari wilayah pusat pertumbuhan dapat dikembangkan dengan program layanan keuangan digital, rangsangan aktivitas ekonomi diharapkan dapat menimbulkan efek multiplier terhadap perkembangan sektor-sektor utama pada wilayah tersebut.

Dewasa ini, perkembangan teknologi dan peran digitalisasi tidak dapat dihindari, dengan melibatkan peran digitalisasi dalam memacu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi merupakan tujuan utama yang ingin dicapai terlebih dalam membangun daerah dari pinggiran. Identifikasi potensi lokal dipandang tepat dalam membangun layanan keuangan digital kedepan. Tujuan pembahasan yakni, hendak: 1) mengetahui besaran nilai keuangan inklusif kabupaten/kota di Provinsi Maluku; 2) mengidentifikasi kondisi dan potensi penerapan layanan keuangan digital di Provinsi Maluku.

Dalam penulisan ini, data perbankan untuk Kabupaten Buru Selatan dan Kabupaten Maluku Barat Daya dijadikan satu dengan kabupaten induknya, hal ini dikarenakan keterbatasan data yang tersedia, sehingga bila terjadi penggabungan maka jumlah kabupaten/kota yang ada dalam penelitian ini menjadi 9 kabupaten/kota di Provinsi Maluku.

### **Metode Perhitungan Indeks Keuangan Inklusif**

Dalam pengukuran Keuangan Inklusif, kajian ini menggunakan dimensi yang telah diformulasikan oleh *Alliance for Financial Inclusion* (AFI) melalui forum yang bernama *The Financial Inclusion Data Working Group* (FIDWG). Penggunaan dimensi yang diformulasikan oleh AFI karena merupakan masalah yang paling sering dihadapi oleh Negara sedang berkembang sehingga diharapkan dapat memberikan solusi terbaik.

AFI merupakan jaringan bank sentral dan penentu kebijakan di bidang keuangan inklusif yang berada di negara berkembang. Ada 2 (dua) dimensi yang digunakan oleh AFI-FIDGW, yaitu :

- a) Dimensi Akses, adalah dimensi yang digunakan untuk mengukur kemampuan penggunaan jasa keuangan formal, sehingga dapat dilihat terjadinya potensi hambatan untuk membuka dan mempergunakan rekening bank, seperti biaya atau keterjangkauan fisik layanan jasa keuangan (kantor bank, ATM, dll.).
- b) Dimensi Penggunaan, adalah dimensi yang digunakan untuk mengukur kemampuan penggunaan aktual produk dan jasa keuangan, antara lain terkait keteraturan, frekuensi dan lama penggunaan.

Menurut *Crisil Limited* (2013), perusahaan pemeringkat asal India bahwa batas nilai minimum suatu dimensi ditetapkan sesuai dengan nilai terkecil pada sampel data, sedangkan batas maksimum suatu dimensi ditetapkan dengan nilai terbesar dari sampel data. Selanjutnya menurut *Crisil Limited* setiap dimensi mempunyai bobot yang sama (*equally weighted*) dalam perhitungan Indeks Keuangan Inklusif (IKI), yakni dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini.

**Tabel 1.** Dimensi, Bobot Dimensi, Indikator dan Bobot Indikator Indeks Keuangan Inklusif

No.	Dimensi	Bobot Dimensi	Indikator	Bobot Indikator
A.	Dimensi Akses	1	Jumlah kantor bank umum (BU) per 100.000 penduduk dewasa	0.200
			Jumlah ATM per 100.000 penduduk dewasa	0.050
			Jumlah kantor bank umum (BU) per 1.000 km <sup>2</sup>	0.200
			Jumlah ATM per 1.000 km <sup>2</sup>	0.050
			Jumlah BPR per 100.000 penduduk dewasa	0.125
			Jumlah BPR per 1.000 km <sup>2</sup>	0.125
			Jumlah Koperasi aktif per 100.000 penduduk dewasa	0.125
			Jumlah Koperasi aktif per 1.000 km <sup>2</sup>	0.125
B	Dimensi Penggunaan	1	Jumlah rekening Dana Pihak Ketiga (Dana Pihak Ketiga–Deposito, Giro, Tabungan) per 1.000 penduduk dewasa	0.300
			Jumlah rekening Kredit per 1.000 penduduk dewasa	0.200
			Jumlah nominal Dana Pihak Ketiga (Dana Pihak Ketiga–Deposito, Giro, Tabungan) per Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar Harga Berlaku	0.300
			Jumlah nominal Kredit per Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar Harga Berlaku	0.200

Sumber: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, data diolah, 2017.

Sarma (2012), membangun sebuah indeks yang dapat mengukur akses keuangan inklusif. Sarma menyebutkan bahwa terdapat berbagai indikator yang menunjukkan keuangan inklusif dari sisi makro maupun mikro. Namun setelah diteliti, apabila keuangan inklusif dilihat dari satu per satu indikator maka dapat menghasilkan informasi parsial dan tidak lengkap. Penggunaan indikator individu juga dapat menyebabkan kesalahan dalam penafsiran tingkat keuangan inklusif. Untuk itu, Sarma membangun Indeks Komposit (Indeks Keuangan Inklusif) untuk menjumlahkan beberapa indikator.

Perhitungan Indeks Komposit terdiri dari dua tahap, yaitu menghitung Indeks per Dimensi, kemudian menghitung Indeks Komposit yang menggabungkan seluruh dimensi. Dengan tahapan sebagai berikut :

### 1. Menghitung Indeks per Dimensi

Untuk menghitung Indeks per Dimensi digunakan persamaan sebagai berikut:

$$d_i = W_i \frac{A_i - m_i}{M_i - m_i}$$

dimana:

$d_i$  = Indeks per dimensi  $i$

$W_i$  = Bobot per dimensi  $i$ ,  $0 \leq W \leq 1$

$A_i$  = Nilai aktual dari dimensi  $i$

$M_i$  = Batas maksimum nilai dimensi  $i$

$m_i$  = Batas minimum nilai dimensi  $i$

Menurut *Crisil Limited* (2013), perusahaan pemeringkat asal India yang memiliki mayoritas sahamnya oleh Standard & Poor's (S&P), batas nilai minimum suatu dimensi ditetapkan sesuai dengan nilai terkecil pada sampel data, sedangkan batas nilai maksimum suatu dimensi ditetapkan dengan nilai terbesar dari sampel data. Selanjutnya menurut *Crisil Limited*, setiap dimensi mempunyai bobot yang sama (*equally weighted*) dalam perhitungan, yaitu 1.

### 2. Menghitung Indeks Komposit Potensi Daerah

Indeks komposit potensi daerah dihitung menggunakan formula Euclidean Distance, dimana formula perhitungan jarak ini dapat digunakan untuk berapapun jumlah dimensi yang digunakan. Formula pada tahap 1 memastikan bahwa  $0 \leq d_i \leq W_i$ . Jika jumlah dimensi yang digunakan adalah  $n$ , maka pencapaian indeks sebuah negara direpresentasikan dalam  $X = (d_1, d_2, \dots, d_n)$ , sedangkan situasi terburuk dipresentasikan dalam  $O = (0, 0, \dots, 0)$ , dan situasi ideal dipresentasikan dalam  $W = (W_1, W_2, \dots, W_n)$ .

*Euclidean Distance* membangun rata-rata dari jumlah jarak X terhadap O (berikutnya disebut sebagai  $X_1$ ) dan invers dari jarak W terhadap X (berikutnya disebut  $X_2$ ). Formula *Euclidean Distance* adalah sebagai berikut:

$$X_1 = \frac{\sqrt{d_1^2 + d_2^2 + \dots + d_n^2}}{\sqrt{W_1^2 + W_2^2 + \dots + W_n^2}}$$

$$X_2 = \frac{\sqrt{(W_1 - d_1)^2 + (W_2 - d_2)^2 + \dots + (W_n - d_n)^2}}{\sqrt{W_1^2 + W_2^2 + \dots + W_n^2}}$$

Indeks komposit potensi daerah =  $\frac{1}{2} [X_1 + X_2]$

Hasil perhitungan dari indeks komposit keuangan inklusif dikategorikan menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Nilai Potensi Daerah > 0,6 - 1 dikategorikan tinggi
2. Nilai Potensi Daerah 0,3 sampai 0,6 dikategorikan medium
3. Nilai Potensi Daerah < 0,3 dikategorikan rendah

## PEMBAHASAN

### Indeks Keuangan Inklusif (*Financial Inclusion Index*)

Terdapat dua kabupaten pemekaran yang digabung dengan kabupaten induknya, yakni Kabupaten Buru Selatan digabung dengan Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Barat Daya digabung dengan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, hal ini dilakukan karena terbatasnya data perbankan untuk daerah pemekaran baru.

Nilai indeks keuangan inklusif yang diperoleh dapat menjadi acuan utama penentuan kabupaten/kota yang diprioritaskan untuk menerapkan program-program layanan keuangan digital guna merangsang kegiatan ekonomi masyarakat dan pertumbuhan perekonomian daerah. Prioritas dipilih berdasarkan Indeks Keuangan Inklusif yang terdiri dari 2 dimensi, yaitu dimensi akses dan dimensi penggunaan. Selain indeks keuangan inklusif, penentuan prioritas wilayah juga didukung dimensi aktivitas ekonomi dan dimensi infrastruktur. Aktivitas ekonomi yang berkembang tetapi tidak didukung sarana dan prasarana perbankan, infrastruktur dalam hal ini telekomunikasi yang cukup memadai juga diperlukan karena menyangkut dengan digitalisasi keuangan.

Indeks keuangan inklusif merupakan indeks komposit yang menunjukkan tingkat inklusifitas suatu daerah, terdiri dari dimensi akses dan dimensi penggunaan. Setiap dimensi dibentuk dari beberapa indikator. Antar indikator

memiliki nilai bobot yang berbeda, tergantung dari besaran pengaruhnya terhadap keuangan inklusif.

Dimensi akses, bobot dari indikator yang melibatkan jumlah kantor bank umum lebih besar dari indikator lain karena keberadaan bank umum dinilai lebih berpengaruh dalam meningkatkan keuangan inklusif karena memiliki fasilitas keuangan yang lebih lengkap (dilengkapi dengan fasilitas sistem pembayaran). Bobot dari indikator yang melibatkan ATM (Anjungan Tunai Mandiri) lebih kecil dibandingkan dengan indikator lain karena dinilai paling kecil pengaruhnya dalam meningkatkan keuangan inklusif karena masyarakat tidak akan dapat menggunakan ATM jika belum memiliki akun rekening terlebih dahulu, dimana tersedia di bank umum/bank perkreditan rakyat.

Dimensi penggunaan, bobot dari indikator yang melibatkan dana pihak ketiga lebih tinggi dari indikator yang melibatkan kredit. Dikarenakan masyarakat tidak dapat menerima kredit bila belum ada rekening dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga merupakan *entry point* yang lebih berpengaruh terhadap keuangan inklusif suatu daerah.

Indeks dimensi akses merupakan akumulasi dari beberapa indikator. Menunjukkan bahwa terdapat 4 wilayah yang memiliki nilai indeks dimensi akses yang lebih rendah dari 0,3, yakni Kabupaten Seram Bagian Timur merupakan daerah dengan nilai indeks dimensi akses terendah, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Kabupaten Seram Bagian Barat. Sedangkan Kota Ambon memiliki tingkat keuangan inklusif yang paling tinggi dari sisi dimensi akses, Kota Ambon merupakan pusat ibu kota provinsi sehingga kegiatan perekonomian dan pemerintahan cenderung tinggi di wilayah ini.

Tabel 2. Indeks Dimensi Akses

Kabupaten / Kota	Indeks Indikator								Indeks Dimensi Akses	Rank
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
Kabupaten Maluku Tengah	0.03661	0.00640	0.00141	0.00019	0.07064	0.00206	0.01918	0.00118	<b>0.13767</b>	<b>8</b>
Kabupaten Maluku Tenggara	0.08250	0.00328	0.00278	0.00014	0.21221	0.00694	0.08616	0.00527	<b>0.39928</b>	<b>4</b>
Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Kabupaten Maluku Barat Daya	0.02848	0.00259	0.00000	0.00000	0.11152	0.00159	0.02039	0.00000	<b>0.16457</b>	<b>7</b>
Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan	0.05102	0.00374	0.00093	0.00008	0.24777	0.00512	0.03635	0.00112	<b>0.34613</b>	<b>5</b>
Kabupaten Seram Bagian Barat	0.00000	0.00000	0.00152	0.00008	0.27258	0.01168	0.00000	0.00083	<b>0.28669</b>	<b>6</b>
Kabupaten Seram Bagian Timur	0.03126	0.00092	0.00096	0.00007	0.00000	0.00000	0.02798	0.00117	<b>0.06236</b>	<b>9</b>
Kabupaten Kepulauan Aru	0.06758	0.00418	0.00078	0.00009	0.48616	0.00754	0.02072	0.00014	<b>0.58719</b>	<b>3</b>
Kota Ambon	0.20193	0.05113	0.20014	0.05009	0.12510	0.12509	0.04639	0.12546	<b>0.92533</b>	<b>1</b>
Kota Tual	0.18584	0.00957	0.04527	0.00273	0.38126	0.09265	0.12511	0.06305	<b>0.90548</b>	<b>2</b>

## Provinsi Maluku

Sumber : data diolah, 2018.

Keterangan: (1) Jumlah kantor bank umum per 100.000 penduduk dewasa; (2) Jumlah ATM per 100.000 penduduk dewasa; (3) Jumlah kantor bank umum per 1.000 km<sup>2</sup>; (4) Jumlah ATM per 1.000 km<sup>2</sup>; (5) Jumlah BPR per 100.000 penduduk dewasa; (6) Jumlah BPR per 1.000 km<sup>2</sup>; (7) Jumlah koperasi aktif per 100.000 penduduk dewasa, dan; (8) Jumlah Koperasi aktif per 1.000 km<sup>2</sup>.



**Tabel 3.** Indeks Dimensi Penggunaan

Kabupaten / Kota	Indeks Indikator				Indeks Dimensi Penggunaan	Rank
	(1)	(2)	(3)	(4)		
Kabupaten Maluku Tengah	0.09547	0.10605	0.06004	0.07776	<b>0.33932</b>	<b>3</b>
Kabupaten Maluku Tenggara	0.29202	0.20000	0.30000	0.20000	<b>0.99202</b>	<b>1</b>
Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Kabupaten Maluku Barat Daya	0.03901	0.05672	0.03309	0.04372	<b>0.17254</b>	<b>6</b>
Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan	0.07048	0.05928	0.06960	0.06689	<b>0.26625</b>	<b>4</b>
Kabupaten Seram Bagian Barat	0.03547	0.04175	0.01625	0.04181	<b>0.13528</b>	<b>7</b>
Kabupaten Seram Bagian Timur	0.06194	0.04421	0.05289	0.04002	<b>0.19906</b>	<b>5</b>
Kabupaten Kepulauan Aru	0.02074	0.03832	0.01823	0.03734	<b>0.11463</b>	<b>8</b>
Kota Ambon	0.30000	0.18605	0.17113	0.09844	<b>0.75562</b>	<b>2</b>
Kota Tual	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	<b>0.00000</b>	<b>9</b>

Sumber : data diolah, 2018.

Keterangan : (1) Jumlah rekening dana pihak ketiga (dana pihak ketiga – deposito, giro, tabungan) per 1.000 penduduk dewasa; (2) Jumlah rekening kredit per 1.000 penduduk dewasa; (3) Jumlah nominal dana pihak ketiga (dana pihak ketiga – deposito, giro, tabungan) per produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku, dan; (4) Jumlah nominal kredit per produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku.

Tabel 3 menunjukkan bahwa terdapat 6 wilayah yang memiliki nilai indeks penggunaan lebih kecil dari 0,3, yakni Kota Tual memiliki nilai yang terendah, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Buru. Mengindikasikan bahwa kemampuan bank dalam menghimpun dana yang beredar dalam masyarakat masih rendah, kondisi geografis daerah kepulauan turut berpengaruh terhadap pengambilan keputusan terkait dengan likuiditas uang, apakah menyimpan di bank atau menyimpan sendiri sehingga sewaktu-waktu bila dibutuhkan dalam kondisi mendesak dapat dipenuhi karena akses perbankan cukup sulit. Kondisi ini dapat menyebabkan tidak optimalnya pemanfaatan produk/jasa keuangan dan perbankan.

Terdapat 2 wilayah yang mempunyai nilai indeks dimensi penggunaan tergolong tinggi, yaitu Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Ambon. Kedua wilayah tersebut merupakan wilayah yang paling aktif menggunakan produk/jasa perbankan

Indeks keuangan inklusif merupakan indeks komposit dari 2 dimensi, yaitu dimensi akses dan dimensi penggunaan. Indeks komposit tersebut dihitung menggunakan formula Euclidean Distance. Berdasarkan tabel 4 terlihat bahwa terdapat 2 wilayah yang memiliki nilai indeks keuangan inklusif yang tinggi, yakni Kota Ambon sebesar 0,85 dan Kabupaten Maluku Tenggara

sebesar 0,72. Kota Ambon memiliki akses yang baik kepada perbankan dan keuangan, disamping produk dan jasa perbankan dapat dioptimalkan dengan baik. Berbeda terbalik dengan yang terjadi di Kabupaten Maluku Tenggara, diman wilayah ini hanya mempunyai akses keuangan dan perbankan yang berada pada tingkatan medium (sufficient) namun mempunyai tingkat penggunaan produk perbankan yang sangat tinggi dibandingkan dengan wilayah yang lain.

**Tabel 4.** Indeks Komposit Keuangan Inklusif

Kabupaten / Kota	Indeks Dimensi Akses	Indeks Dimensi Penggunaan	X <sub>1</sub>	X <sub>2</sub>	Indeks Keuangan Inklusif	Rank
	Bobot : 1	Bobot : 1				
Kabupaten Maluku Tengah	0.13767	0.33932	0,25884	0,45670	<b>0,35777</b>	<b>6</b>
Kabupaten Maluku Tenggara	0.39928	0.99202	0,75579	0,69893	<b>0,72736</b>	<b>2</b>
Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Kabupaten Maluku Barat Daya	0.16457	0.17254	0,16847	0,41198	<b>0,29022</b>	<b>8</b>
Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan	0.34613	0.26625	0,30848	0,50841	<b>0,40844</b>	<b>5</b>
Kabupaten Seram Bagian Barat	0.28669	0.13528	0,22401	0,43945	<b>0,33173</b>	<b>7</b>
Kabupaten Seram Bagian Timur	0.06236	0.19906	0,14741	0,38326	<b>0,26534</b>	<b>9</b>
Kabupaten Kepulauan Aru	0.58719	0.11463	0,42254	0,51141	<b>0,46698</b>	<b>4</b>
Kota Ambon	0.92533	0.75562	0,84253	0,87162	<b>0,85708</b>	<b>1</b>
Kota Tual	0.90548	0.00000	0,63900	0,49769	<b>0,56834</b>	<b>3</b>

Sumber : data diolah, 2017

Sementara wilayah dengan nilai indeks keuangan inklusif terendah yaitu Kabupaten Seram Bagian Timur, diikuti oleh Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Kedua wilayah dengan indeks yang rendah tersebut memiliki akses terhadap keuangan atau perbankan yang rendah seperti kantor bank umum, kantor bank perkreditan rakyat, dan ATM (Anjungan Tunai Mandiri). Juga tingkat penggunaan produk atau jasa perbankan pada wilayah tersebut tergolong rendah. Kondisi ini dapat saja terjadi karena terdapat ketimpangan tingkat penggunaan produk perbankan antar wilayah di Provinsi Maluku, dimana hanya 2 wilayah dengan indeks tinggi, 1 wilayah dengan indeks medium, dan 6 wilayah dengan indeks rendah.

### Potensi Dimensi Aktivitas Ekonomi

Penentuan prioritas implementasi layanan jasa keuangan digital pada suatu wilayah harus juga mempertimbangkan perkembangan ekonomi wilayah

bersangkutan. Kontribusi pendapatan domestik regional bruto atas dasar harga berlaku dan pendapatan per kapita menjadi indikator yang dilihat dalam melihat perkembangan ekonomi daerah.

**Tabel 5.** Dimensi Aktivitas Ekonomi

Kabupaten / Kota	Indeks Keuangan Inklusif	Rank IKI	Kontribusi PDRB ADHB	Rank PDRB	Pendapatan perkapita (PPK)	Rank PPK
Kabupaten Maluku Tengah	0,35777	6	14,49%	2	5,20	7
Kabupaten Maluku Tenggara	0,72736	2	5,09%	6	6,79	4
Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Kabupaten Maluku Barat Daya	0,29022	8	10,66%	3	7,79	2
Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan	0,40844	5	6,77%	5	5,03	8
Kabupaten Seram Bagian Barat	0,33173	7	6,99%	4	5,48	6
Kabupaten Seram Bagian Timur	0,26534	9	3,30%	9	4,14	9
Kabupaten Kepulauan Aru	0,46698	4	4,56%	7	6,77	5
Kota Ambon	0,85708	1	44,69%	1	15,51	1
Kota Tual	0,56834	3	3,46%	8	7,12	3
<b>Provinsi Maluku</b>			<b>100,00%</b>		<b>8,09</b>	

Sumber : data diolah, 2017

Keterangan : (1) sumber Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Provinsi Maluku.

(2) sumber Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku

Kota Ambon memberikan terbesar terhadap produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku mencapai 44,69 persen. Sementara Kabupaten Seram Bagian Timur berkontribusi terkecil, yaitu 3,3 persen. Kota Ambon juga menjadi wilayah dengan tingkat pendapatan per kapita tertinggi mencapai Rp. 15,51 juta berada di atas rata-rata provinsi sebesar Rp. 8,09 juta. Sedangkan Kabupaten Seram Bagian Timur menjadi wilayah dengan pendapatan per kapita terendah yakni, sebesar Rp. 4,14 juta.

Dalam menentukan wilayah prioritas layanan keuangan digital, tidak dapat memilih daerah dengan tingkat keuangan inklusif yang sudah tinggi karena tujuan dari layanan ini adalah untuk mengembangkan daerah-daerah yang masih rendah tingkat keuangan inklusifnya. Jika diterapkan pada daerah yang telah banyak kantor bank umum, kantor bank perkreditan rakyat, dan/atau koperasi, maka layanan ini tidak akan dapat hidup secara berkelanjutan karena kehilangan potensi pasar/nasabah. Impelemntasi layanan keuangan digital lebih cocok untuk daerah dengan tingkat keuangan inklusif rendah (di bawah 0,3, tidak menutup kemungkinan dikembangkan pada wilayah dengan nilai indeks inklusif medium).

Disamping mengacu pada nilai indeks keuangan inklusif dalam menentukan prioritas daerah terkait implementasi layanan keuangan digital, juga harus melihat aspek ekonomi daerah. Layanan keuangan digital yang diimplementasikan cenderung sulit berkembang di daerah dengan aktivitas ekonomi yang rendah, sehingga sebaiknya daerah implementasi merupakan daerah dengan tingkat ekonomi yang tinggi namun nilai indeks keuangan inklusifnya masih cenderung rendah, serta mempunyai pendapatan per kapita yang tinggi. Kondisi-kondisi tersebut akan memberikan potensi pasar atau nasabah yang tinggi sehingga layanan keuangan digital dapat berjalan secara berkelanjutan.

Bila dilihat dari nilai indeks keuangan inklusif, produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku, dan pendapatan per kapita, ada 3 daerah yang cocok menjadi prioritas implementasi layanan keuangan digital, yaitu Kabupaten Maluku Tengah, Gabungan Kabupaten Maluku Tenggara Barat – Maluku Barat Daya (MTB-MBD), dan Kabupaten Seram Bagian Barat. Karena nilai indeks keuangan inklusif yang relatif rendah, namun memiliki potensi tingkat ekonomi yang tinggi, terlihat dari tingginya kontribusi PDRB dan pendapatan per kapita.

Prioritas pengembangan layanan keuangan digital sebaiknya disesuaikan dengan sektor utama yang mendorong ekonomi daerah tersebut. Sektor utama Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten gabungan MTB-MBD adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pertanian, dan sektor jasa-jasa. Sedangkan sektor utama Kabupaten Seram Bagian Timur adalah sektor pertanian dan sektor perdagangan, hotel, dan restoran.

### **Potensi Dimensi Infrastruktur**

Bila dilihat dari infrastruktur telekomunikasi, dalam pemilihan daerah implementasi layanan keuangan digital maka yang dipilih adalah daerah yang mempunyai indeks keuangan inklusif yang rendah (tingkat keuangan inklusif yang masih rendah, namun memiliki kesiapan infrastruktur telekomunikasi yang memadai). Kesiapan infrastruktur telekomunikasi dilihat dari total *coverage* layanan dari perusahaan telekomunikasi yang ada di daerah tersebut. Semakin tinggi luas wilayah yang dapat dilayani oleh *provider* telekomunikasi, maka implementasi layanan keuangan digital dinilai cocok dilakukan di daerah tersebut. Selain *coverage*, perlu dilihat juga seberapa besar pengguna layanan telepon genggam yang ada di daerah tersebut, mengingat layanan keuangan digital menggunakan media telepon genggam. Semakin besar masyarakat yang telah menggunakan telepon genggam maka daerah tersebut semakin siap untuk implementasi layanan keuangan digital.

**Tabel 9.** Dimensi Infrastruktur Telekomunikasi

Kabupaten / Kota	Indeks Keuangan Inklusif	Rank IKI	Provider	% Coverage Provider Telekomunikasi
Kabupaten Maluku Tengah	0,35777	6	Telkom, Indosat	14,49%
Kabupaten Maluku Tenggara	0,72736	2	Telkom	5,09%
Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Kabupaten Maluku Barat Daya	0,29022	8	Telkom, Indosat	10,66%
Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan	0,40844	5	Telkom, Indosat	6,77%
Kabupaten Seram Bagian Barat	0,33173	7	Telkom, Indosat	6,99%
Kabupaten Seram Bagian Timur	0,26534	9	Telkom, Indosat	3,30%
Kabupaten Kepulauan Aru	0,46698	4	Telkom, Indosat	4,56%
Kota Ambon	0,85708	1	Telkom, Indosat, XL	44,69%
Kota Tual	0,56834	3	Telkom, Indosat	3,46%
<b>Provinsi Maluku</b>				<b>100,00%</b>

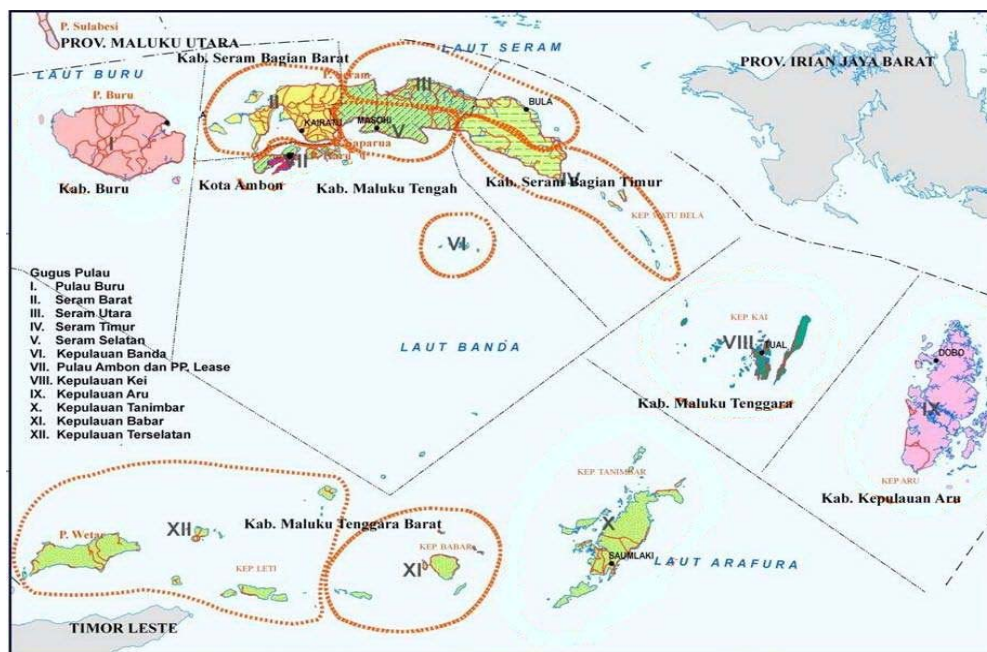
Sumber : provider telekomunikasi diolah, 2017.

Bila mempertimbangkan dimensi infrastruktur telekomunikasi, dapat dilihat bahwa implementasi layanan keuangan digital paling optimal dilaksanakan di Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Maluku Tengah, dan Gabungan Kabupaten Buru dan Buru Selatan. Ketiga daerah tersebut memiliki nilai indeks keuangan inklusif yang relatif rendah namun memiliki kesiapan infrastruktur yang cukup memadai dan potensi pasar yang tinggi tercermin dari tingginya pengguna telepon genggam.

### Potensi Finansial Inklusif di Provinsi Maluku

Hasil analisis perhitungan indeks keuangan inklusif, menunjukkan bahwa terdapat empat wilayah di Provinsi Maluku yang memiliki nilai indeks keuangan inklusif yang rendah yakni lebih kecil dari 0,4 (dengan mempertimbangkan daerah pada medium terendah) adalah Kabupaten Maluku Tengah (0,357), gabungan Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Kabupaten Maluku Barat Daya (0,290), Kabupaten Seram Bagian Barat (0,331) serta Kabupaten Seram Bagian Timur (0,265). Merupakan wilayah yang tepat untuk pengembangan layanan keuangan digital, pertimbangan lain yang perlu dimasukkan sebagai dasar pengambilan keputusan yakni aktivitas ekonomi pada wilayah yang bersangkutan serta infrastruktur layanan telekomunikasi yang tersedia. Potensi aktivitas ekonomi pada keempat wilayah kabupaten dengan potensi layanan keuangan yang tertinggi yakni Maluku Tengah dengan kontribusi

PDRB sebesar 14,49 persen, selanjutnya gabungan Kabupaten Maluku Maluku Tenggara Barat dengan Kabupaten Maluku Barat Daya yakni sebesar 10,66 persen. Jika dilihat dari sisi pendapatan perkapita maka gabungan Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan Kabupaten Maluku Barat Daya merupakan wilayah potensi layanan keuangan digital dengan nilai tertinggi pada keempat wilayah tersebut yakni sebesar 7,79 dan berada pada peringkat kedua setelah Kota Ambon. Untuk ketersediaan provider jaringan telekomunikasi pada wilayah potensi layanan keuangan digital, Kabupten Maluku Tengah dan gabungan Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan Kabupaten Maluku Barat Daya ketersediaannya cukup baik dengan presentase di atas 10 persen. Sementara Kabupaten Seram Bagian Timur merupakan wilayah dengan potensi LKD yang paling rendah dibanding tiga wilayah lainnya. Sehingga kabupaten yang dapat diterapkan layanan keuangan digital dengan mempertimbangkan daya dukung aktivitas ekonomi, ketersediaan infrastruktur listrik dan telekomunikasi maka Kabupaten Maluku Tengah, Gabungan Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan Kabupaten Maluku Barat Daya serta Kabupaten Seram Bagian Barat merupakan wilayah yang mendukung dalam implementasi layanan keuangan digital di Provinsi Maluku. Pemetaan potensi keuangan inklusif terkait implementasi layanan keuangan digital terlihat pada gambar 1 yakni wilayah yang dilingkari garis putus-putus warna merah, sebagai berikut.



Sumber: BPS, Provinsi Maluku, 2019  
**Gambar 1.** Potensi Keuangan Inklusif

Implementasi layanan keuangan digital sendiri merupakan upaya menyeluruh yang terfokus untuk menghilangkan semua hambatan dan kendala layanan keuangan yang bersifat harga maupun non harga bagi kemudahan aksesibilitas masyarakat terutama yang miskin dan terisolir dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan. Berdasarkan survei Bank Indonesia (2016), menunjukkan bahwa presentase rumah tangga yang menabung di lembaga keuangan formal dan non lembaga keuangan sebesar 48 persen. Rendahnya akses ini disebabkan karena tingkat pendapatan yang rendah, tata operasional bank yang rumit, kurangnya edukasi keuangan dan perbankan, biaya administrasi bank yang tinggi serta jauhnya lokasi bank dari tempat tinggal. Sehingga timbul pemikiran (ide) untuk menerapkan strategi keuangan inklusif untuk mendorong kegiatan ekonomi kelompok masyarakat yang belum menikmati layanan keuangan, dalam upaya pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan.

Peran pemerintah dalam mendukung pelaksanaan implementasi Strategi Nasional Keuangan Inklusif, melalui peranan sebagai berikut :

- 1) Koordinasi dalam menjalankan keuangan inklusif dengan kementerian /lembaga terkait;
- 2) Pemetaan potensi daerah merupakan poin penting sebagai dasar penetapan program dan prioritas kegiatan keuangan inklusif;
- 3) Menetapkan program dan prioritas kegiatan keuangan inklusif;
- 4) Sebagai *focal point* untuk kegiatan tertentu yang menjadi kewenangan Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan strategi nasional keuangan inklusif;
- 5) Mensosialisasikan program keuangan inklusif;
- 6) Kerjasama dan sinergitas dengan pemangku kepentingan terkait di luar Bank Indonesia perlu dibangun dengan semangat yang positif, dan;
- 7) Melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan keuangan inklusif.

Terdapat beberapa keuntungan (manfaat) dari implementasi layanan keuangan digital :

- 1) Meningkatkan efisiensi ekonomi melalui penurunan biaya transaksi;
- 2) Mendukung stabilitas sistem keuangan;
- 3) Mengurangi *shadow banking* atau *irresponsible finance*;
- 4) Mendukung pendalaman pasar keuangan;
- 5) Memberikan potensi pasar baru bagi perbankan;
- 6) Mendukung peningkatan *Human Development Index* (HDI);
- 7) Berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional yang *sustain* dan berkelanjutan, dan;

- 8) Mengurangi kesenjangan dan *rigiditas low income trap*, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya berujung pada penurunan tingkat kemiskinan.

### **Pengembangan Keuangan Inklusif ke Depan**

Tantangan terkait upaya mengubah pola pertumbuhan ekonomi yang sarat tergantung pada sumber daya alam yang berlimpah menjadi pola pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, tidak hanya menghasilkan peluang ekonomi, tetapi juga menjamin akses yang adil bagi seluruh masyarakat terhadap peluang ekonomi yang tercipta, atas dasar kesetaraan terlepas dari latar belakang sosial ekonomi yang berbeda (Hill, Khan, Zhuang, 2012).

Maluku masih memiliki banyak peluang dan tantangan untuk lebih meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi inklusif di masa depan. Tantangan dalam membangun pertumbuhan ekonomi inklusif yang lebih berkualitas, antara lain: rendahnya modal sosial yang disebabkan oleh rendahnya kapasitas modal manusia, rendahnya tingkat teknologi dan tidak memadainya kualitas infrastruktur. Di samping itu juga sangat tergantung pada kondisi geografis.

Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk mendorong konektivitas dan biaya logistik yang lebih rendah dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia merupakan langkah penting perlu diambil oleh pemerintah daerah dalam merangsang aktivitas ekonomi melalui kegiatan perbankan keuangan inklusif.

### **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, nilai indeks komposit terendah, yakni Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Maluku Tengah. Sementara dimensi aktivitas ekonomi yang cukup tinggi pada daerah-daerah dengan indeks keuangan inklusif rendah merupakan potensi pengembangan layanan keuangan digital, dimana dimensi infrastruktur telekomunikasi yang tersedia cukup baik dalam implementasi layanan keuangan digital, hal ini terlihat dari coverage provider pada daerah dengan indeks keuangan inklusif rendah tetapi aktivitas ekonomi tinggi.

Saran yang dapat dikemukakan bahwa indeks keuangan inklusif merupakan acuan bagi program nasional dalam menjalankan layanan keuangan digital guna meningkatkan akses masyarakat ke layanan keuangan. Penerapannya dapat memberikan dampak yang besar bagi aktivitas perekonomian tanpa dibatasi kondisi geografis dan administratif. Sosialisasi program dan pelatihan terstruktur dalam pengenalan layanan keuangan digital diharapkan agar



masyarakat lebih siap dalam menjalankan program nasional ini. Terdapat wilayah dengan nilai indeks keuangan inklusif rendah, tetapi memiliki potensi penerapan layanan keuangan digital kondisi ini terlihat dari potensi aktivitas ekonomi dan potensi infrastruktur telekomunikasi yang tinggi sehingga diharapkan implementasi layanan keuangan digital dapat berkelanjutan dan tetap berkembang. Disamping itu, prioritas pengembangan layanan keuangan digital sebaiknya disesuaikan dengan sektor utama yang mendorong aktivitas ekonomi pada daerah tersebut. Terdapat dua sektor yang paling menonjol yaitu sektor pertanian dan sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Tanpa mengabaikan sektor yang lain, fokus utama pada kedua sektor tersebut diharapkan memberikan efek multiplier yang besar. Langkah kebijakan dari pihak pemerintah daerah, seharusnya terus memacu pembangunan ketersediaan infrastruktur pada daerah-daerah yang geografisnya cukup jauh dari pusat aktivitas ekonomi wilayah terlebih Maluku sebagai daerah kepulauan sehingga diharapkan layanan keuangan digital ini dapat dinikmati dan bermanfaat bagi masyarakat sampai ke pelosok daerah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad Lincoln (2004). *Ekonomi Pembangunan*, Edisi ke-4, cet. ke-2, STIE-YKPN, Yogyakarta.
- Asli Demirguc-Kunt, F. A. (2012). *The Foundations of Financial Inclusion. The World Bank, Development Research Group, Finance and Private Sector Development Team*.
- Badan Pusat Statistik, Maluku dalam Angka, Beberapa Edisi.
- Bank Indonesia. (2009). Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik. Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. (2014). Buku Saku Keuangan Inklusif. Bank Indonesia, Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM.
- Bank Indonesia. (2014). Peraturan Bank Indonesia No. 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik. Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. (2014). Surat Edaran No. 16/11/DKSP perihal Penyelenggaraan Uang Elektronik (Electronic Money) . Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. (2014). Surat Edaran No. 16/12/DPAU perihal Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital Dalam Rangka Keuangan Inklusif Melalui Agen Layanan Keuangan Digital Individu. Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. (2015). Data Keuangan. Kantor Perwakilan Provinsi Maluku.
- Berger, Demirguc-Kunt, Levine N., Haubrich J. (2004) *Bank concentration and competition: An evolution in the making. Global perspective. Journal of Money, Credit and Banking*.

- Carbo S., Gardener E.P., and Molyneux P. (2005). Financial Exclusion in Europe. In *Financial Exclusion*. Palgrave MacMilan. UK. Pp. 98-111.
- CRISIL (2013). *CRISIL Inclusix - An index to measure India's progress on Financial Inclusion*. CRISIL. Inclusion, Alliance for Financial. (2011). *Measuring Financial Inclusion - Core Set of Financial Inclusion Indicators*. Alliance for Financial Inclusion.
- Grant, A. E. & Meadows, J. H. (2010). *Communication Technology Update and Fundamentals*. 12<sup>th</sup> Edition. Focal Press.
- Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 1979, menetapkan PLN sebagai Perusahaan Perseroan.
- H. Hill, M.E. Khan and J. Zhuang. (2012). *Diagnosing the Indonesian Economy: Toward Inclusive and Green Growth*. London: Anthem Press for the Asian Development Bank.
- Leyshon Andrew and Nigel Thrift. (1995). *Geographies of Financial Exclusion: Financial Abandonment in Britain dan United States*. *Transactions of the Institute of British Geographers*. Vol. 20. No.3. pp. 312-341.
- Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2005, tentang Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur.
- Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016, tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif.
- Puslitbang PPI-Kominfo (2015). *Indikator Teknologi Informasi dan Komunikasi 2015*. Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia. Jakarta.
- Robert Metcalfe (2000). *Packet Communication, internet collapses and other InfoWorld Punditry*. United State of America.
- Samuelson, Paul A. dan Nordhaus William D. (1995). *Ekonomi* (Edis Terjemahan). Edisi 12 jilid 2. Erlangga. Jakarta.
- Sanjaya I Made dan Nursechafia (2016). *Inklusi Keuangan dan Pertumbuhan Inklusif: Analisis Antar Provinsi di Indonesia*. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan* Vol. 18 No. 3 Januari 2016.
- Sanusi B. (2004) *Pengantar Ekonomi Pembangunan*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Sharma Mandira (2010). *Index of Financial Inclusion. Discussion Paper of Economic*, November 2010.
- Sharma Mandira (2012). *Index of Financial Inclusion - A Measure of Financial Sector Inclusiveness*. *Berlin Working Papers on Money, Finance, Trade, and Development*.
- Sharma Mandira dan Jesim Pais (2011) *Financial inclusion and development: a cross country analysis*.
- Setiawan Moh. Agung (2016). *Analisis Keterkaitan Inklusi Keuangan terhadap Perilaku Keuangan Personal Masyarakat di Wilayah Kota dan Kabupaten*

Provinsi Jawa Timur. Jurnal Ilmiah FEB, Universitas Brawijaya. Vol. 3, No. 2, 2016.

Suryana,. (2000). Ekonomi Pembangunan: Problematika dan Pendekatan. Salemba Empat. Jakarta.

Todaro, Michael P dan Stephen C. Smith (2000), Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga, Edisi Kedelapan, Erlangga, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan.

World Bank Group. (2015). *The Little Data Book on Financial Inclusion. The World Bank.*

---

## KETIMPANGAN PENDAPATAN ANTAR KABUPATEN/KOTA DI PROPINSI JAWA TENGAH

Lilis Siti Badriah, Dijan Rahajuni

### PENDAHULUAN

Tujuan pembangunan ekonomi adalah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, mengurangi pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan Todaro (2012). Dalam proses pembangunan, *trade off* antara pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan pendapatan merupakan kondisi yang sering dihadapi. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, memiliki konsekuensi kurang terperhatikannya masalah pemerataan pendapatan dan jika pemerataan pendapatan menjadi prioritas tujuan pembangunan, maka capaian pertumbuhan ekonomi menjadi relatif terbatas. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Sari (2017). Pada umumnya, strategi yang diambil dalam pelaksanaan pembangunan adalah strategi untuk menciptakan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan harapan akan terjadi efek menetes ke bawah (*trickle down effect*) ataupun terjadi efek positif yang menyebar (*spread effect*) dari proses pembangunan yang dilaksanakan. Namun seringkali dampak yang diharapkan itu tidak terjadi karena faktanya ketimpangan pendapatan itu masih terjadi, baik dilihat berdasarkan kesenjangan vertikal maupun secara horizontal.

Kesenjangan vertikal tampak antara lain berdasarkan data Bank Dunia (Kompas, 16 Juli 2020) bahwa Pendapatan Nasional Kotor (GNI) per kapita Indonesia meningkat dari US\$3.840 menjadi US\$4.050 sehingga Indonesia masuk ke dalam kelompok Negara berpendapatan menengah atas (*upper middle income country*). Walaupun demikian, peningkatan status tersebut belum disertai dengan pemerataan pendapatan karena masih adanya kesenjangan pendapatan yang belum tertangani dengan baik. Dalam kurun waktu 2010-2019, rasio gini Indonesia naik relatif kecil dari 0,378 menjadi 0,380. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesenjangan di Indonesia tidak banyak mengalami perubahan berarti. Laporan Credit Suisse (2018) dalam Sugiarto (2020) menunjukkan bahwa 1% orang terkaya di Indonesia menguasai 46% kekayaan penduduk Indonesia dan 10% orang terkaya menguasai 75,3% kekayaan penduduk Indonesia. Fakta ini menunjukkan bahwa *trickle-down*

*effect* dari proses pembangunan belum terjadi, justru yang terjadi adalah *trickle-up effect*.

Kesenjangan horizontal terlihat dari adanya pembangunan antar wilayah yang timpang. Fakta menunjukkan bahwa banyak daerah yang kaya dengan sumberdaya alam namun sebagian besar penduduknya hidup dalam kemiskinan, seperti terjadi di Papua Barat dan Papua (Gama, 2009). Hal ini sejalan dengan pendapat Sirojuzilam (2005) bahwa dalam proses pembangunan, sering terjadi adanya ketimpangan, baik berupa ketimpangan pembangunan antar wilayah maupun ketimpangan distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat. Yeniwati (2013), yang sejalan juga dengan Todaro (2012) dan Sjafrizal (2008), menyatakan bahwa perbedaan kepemilikan sumberdaya menjadi salah satu penyebab terjadinya ketimpangan pendapatan antar wilayah.

Capaian tujuan pembangunan nasional tidak terlepas dari dukungan pembangunan daerah. Agar terbebas dari jebakan *middle income trap*, maka pembangunan daerah sebagai bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional harus berjalan selaras dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pencapaian tujuan pembangunan nasional lainnya. Dalam perspektif pembangunan daerah, beberapa permasalahan yang masih dihadapi oleh pemerintah antara lain ketimpangan perekonomian daerah dan pengangguran (Djojohadikusumo, 1994). Permasalahan tersebut tampaknya bersifat persisten dan masih terjadi sampai saat ini.

Sesuai dengan semangat Otonomi Daerah yang telah diimplementasikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, disadari bahwa pelaksanaan pembangunan daerah yang didasarkan pada potensi daerah (*endogenous development*) menjadi karakteristik utama dalam pembangunan daerah. Dengan berbasis pada potensi ekonomi masing-masing daerah, maka optimis bahwa pertumbuhan ekonomi daerah dapat terus ditingkatkan.

Pertumbuhan ekonomi daerah menjadi salah satu indikator kinerja pembangunan daerah. Kinerja pembangunan yang baik, dapat berimplikasi pada meningkatnya pendapatan masyarakat karena semakin luasnya kesempatan kerja yang tersedia. Tetapi perlu dikaji apakah pertumbuhan ekonomi tersebut memberikan dampak terhadap pemerataan ataukah tidak? Terdapat fenomena bahwa pertumbuhan ekonomi yang diharapkan terjadi melalui investasi yang dilakukan di pusat-pusat pertumbuhan ternyata tidak disertai dengan pemerataan. Hal ini sejalan dengan pendapat Myrdal (1957) bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak diikuti dengan *trickle down effect*, sehingga ketimpangan terjadi seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang

dicapai suatu daerah. Hal ini sejalan dengan data dari Bank Dunia. Oleh karena itu, upaya pencapaian pertumbuhan ekonomi berdimensi pemerataan menjadi sangat penting.

Keberhasilan pembangunan daerah menjadi salah satu pendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi nasional. Jawa Tengah merupakan salah satu propinsi dengan potensi kabupaten/kota yang beragam. Upaya mencapai sasaran umum pembangunan jangka panjang di Jawa Tengah, salah satunya ditempuh dengan pelaksanaan pembangunan di bidang ekonomi. Sasarannya adalah memperkuat landasan pembangunan berkeadilan dan berkelanjutan.

Berdasarkan data BPS Jawa Tengah (2020), proses pembangunan ekonomi daerah di Jawa Tengah telah berhasil menciptakan pertumbuhan ekonomi selama tahun 2012-2019 dengan pertumbuhan rata-rata 5,32% per tahun. Keberhasilan pembangunan ekonomi tersebut dapat terwujud karena adanya dukungan pembangunan ekonomi kabupaten/kota yang ada di wilayah propinsi tersebut. Tetapi apakah pencapaian pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tersebut disertai dengan pemerataannya? Hal ini masih perlu dikaji. Oleh karena itu, selain mengamati pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota, pembangunan daerah juga dapat dikaji melalui pendapatan per kapita. Telaah ketimpangan pembangunan antar wilayah di Indonesia atau ketimpangan regional (*regional gap atau regional disparity*) difokuskan pada ketimpangan distribusi pendapatan per kapita antar daerah sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang dicapai.

Ketimpangan bisa terjadi dalam proses pembangunan daerah karena perbedaan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, arus modal, kebijakan pembangunan pemerintah pusat yang tidak menguntungkan wilayah tertentu, dan perencanaan daerah yang kurang tepat (Tarigan, 2005). Melihat gambaran data dari BPS Jawa Tengah ([jateng.bps.go.id](http://jateng.bps.go.id)), fakta menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dalam pencapaian hasil pembangunan antar daerah. Perbedaan tersebut dapat diamati berupa perbedaan dalam distribusi penduduk antar daerah, perbedaan infrastruktur, posisi wilayah dan beberapa perbedaan prioritas sasaran kegiatan ekonomi. Akibatnya dapat berdampak terhadap kesenjangan pembangunan daerah. Adanya perbedaan sumberdaya tersebut menjadi hal menarik untuk dianalisis terkait pola ketimpangan yang terjadi dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah dengan fokus analisis (1) Bagaimana ketimpangan pendapatan antar Kabupaten/Kota di Jawa Tengah?; (2) Bagaimana pemetaan wilayah kabupaten/kota di Jawa Tengah berdasarkan potensi ekonominya?

## PEMBAHASAN

### 1. Kajian Pustaka

#### 1.1. Teori Pertumbuhan Wilayah

Terdapat dua diantaranya mengenai Teori Pertumbuhan Wilayah, yaitu:

##### *a. Teori Pertumbuhan Wilayah Neo-Klasik*

Dalam teori Neo-Klasik, modal, teknologi, dan tenaga kerja merupakan faktor-faktor penting yang dapat mempengaruhi tingkat pendapatan dan pertumbuhan ekonomi wilayah (Tarigan, 2005). Teori Neo-Klasik ini memiliki penekanan pada terjadinya mobilitas tenaga kerja dan modal antar wilayah. Asumsi yang digunakan dalam teori Neo-Klasik adalah bahwa adanya kesempurnaan dalam harga faktor yang fleksibel sehingga perbedaan harga antara wilayah terkait dengan mobilitas modal dan tenaga kerja tersebut menjadi hilang. Selanjutnya, hal ini menyebabkan kecenderungan masing-masing wilayah akan memiliki pendapatan per kapita yang relatif sama. Tetapi asumsi tersebut menyebabkan implementasi model menjadi tidak efektif.

Teori Neo-Klasik kurang memberikan perhatian terhadap sisi permintaan. Padahal seharusnya suatu wilayah yang memiliki pertumbuhan permintaan yang tinggi terhadap suatu produk, dapat menjadi daya tarik bagi kegiatan penanaman modal dan dapat menarik lebih banyak tenaga kerja dan modal masuk ke wilayah tersebut. Sehingga dengan adanya asumsi tersebut membuat pertumbuhan antar wilayah yang seimbang dan stabil dapat tetap dipertahankan.

##### *b. Teori Ketidakseimbangan Pertumbuhan Wilayah*

Teori ini merupakan reaksi terhadap teori pertumbuhan wilayah Neo-Klasik. Menurut teori ketidakseimbangan pertumbuhan wilayah, perbedaan antar wilayah tidak dapat dihilangkan dengan kekuatan pasar bahkan hal tersebut dapat memperburuk dan menciptakan perbedaan antar wilayah. Myrdal (1957) menyatakan bahwa dalam proses pembangunan ekonomi dimungkinkan bekerjanya dua kekuatan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah. *Pertama*, bekerjanya efek balik negatif (*backwash effect*), karena adanya aliran sumberdaya (tenaga kerja dan modal) dari wilayah kurang berkembang ke wilayah yang lebih maju sehingga kondisi ini akan merugikan wilayah yang kurang berkembang. *Kedua*, efek penyebaran positif (*spread effect*). Dalam hal ini terjadi aliran investasi dari wilayah yang lebih maju ke wilayah yang berkembang. Sehingga efek ini dapat menguntungkan bagi wilayah sekitar. Konsep pemikiran Myrdal selanjutnya dikembangkan oleh Hirschman (1958) dengan memperkenalkan *trickling down effect* dan *polarization effect* (Todaro, 2012).

## 1.2. Distribusi pendapatan antar wilayah

Terdapat beberapa teori yang menjelaskan tentang distribusi pendapatan antar wilayah, yaitu:

### a. *Hipotesis U terbalik Kuznets*

Kuznets (1955) melakukan penelitian dengan mengamati karakteristik antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan, dan menemukan adanya hubungan yang berbentuk huruf U terbalik. Kuznets mengungkapkan bahwa proses pertumbuhan melalui perluasan sektor modern yang pada awalnya mengakibatkan peningkatan ketimpangan pendapatan, kemudian mencapai tingkat pendapatan rata-rata tertentu, dan akhirnya menurun.

Analisis Kuznets menyatakan bahwa diantara faktor politik, sosial, dan ekonomi, yang mempengaruhi pola U terbalik, terdapat dua faktor penting, yaitu konsentrasi modal pada kelompok berpendapatan tinggi dan pergeseran penduduk (tenaga kerja) dari sektor pertanian ke sektor industri modern.

### b. *Pengembangan model Kuznets.*

Williamson (1965) mengembangkan model Kuznets untuk menganalisis terjadinya hipotesis U terbalik pada cakupan wilayah dengan mengkaji hubungan antara pertumbuhan ekonomi pada tingkat regional di suatu negara dengan distribusi pendapatan yang terjadi. Hasil kajian Williamson sejalan dengan Kuznets bahwa ketika terjadi kenaikan pendapatan per kapita maka akan diikuti ketimpangan wilayah yang meningkat, kemudian relatif tetap pada jangka waktu tertentu, dan akhirnya ketimpangan tersebut menurun. Menurut Williamson, perbedaan sumberdaya alam antar daerah, terjadinya perpindahan modal dan tenaga kerja dari daerah yang kurang maju ke daerah yang lebih maju serta kebijakan pemerintah yang kurang tepat menjadi penyebab terjadinya peningkatan kesenjangan wilayah seperti terlihat dalam pola U terbalik.

Pengembangan lain dilakukan oleh Adelman dan Morris (1973) untuk menganalisis hubungan berbagai indikator ekonomi dan sosial terhadap distribusi pendapatan. Dengan menggunakan teknik analisis diskriminan, Adelman dan Morris menemukan bahwa tingkat GNP per kapita, peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang cepat, potensi pengembangan ekonomi, dan adanya dualisme sosial ekonomi merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi distribusi pendapatan.

## 2. Kerangka Berpikir

Ketimpangan pendapatan merupakan salah satu masalah yang umum dihadapi oleh berbagai negara, termasuk oleh Indonesia. *Trade off* yang



dihadapi dalam pencapaian tujuan pembangunan antara prioritas pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan distribusi pendapatan, biasanya pemerintah menempuh upaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan harapan dapat memberikan *trickle down effect* atau *spread effect*.

Efek menetes kebawah yang diharapkan dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi faktanya belum tentu terjadi. Hal ini ditunjukkan dari hasil penelitian Wiliamson (1965), laporan Bank Dunia (2020), Iswanto (2015) dan laporan Credit Suisse (2018) dalam Sugiarto (2020), walaupun penelitian Sjafrizal (1997) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi diikuti dengan pemerataan yang relatif baik.

Menurut Teori Pertumbuhan Neo-Klasik, ketersediaan modal, tenaga kerja, dan kemajuan teknologi dapat mempengaruhi tingkat pendapatan dan pertumbuhan wilayah. Dalam keterkaitannya dengan hal tersebut, menurut Todaro (2012), apakah pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan kualitas hidup orang miskin atau tidak, ditentukan juga oleh karakter pertumbuhan ekonomi (*character of economic growth*) itu sendiri, tidak hanya fokus pada tingkat pertumbuhan semata.

Oleh karena itu, untuk mengatasi terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan, diperlukan adanya kebijakan yang tepat, sesuai dengan potensi dan karakteristik dari masing-masing wilayah. Dengan demikian perlu adanya pemetaan wilayah sesuai dengan potensinya sehingga dapat berdampak pada pengambilan kebijakan yang tepat. Data BPS Jawa Tengah menunjukkan bahwa sumberdaya yang dimiliki kabupaten/kota di Jawa Tengah relatif bervariasi, dan menurut teori Pertumbuhan Neo-Klasik bahwa kepemilikan sumberdaya tersebut akan menentukan tingkat pendapatan dan pertumbuhan wilayah. Oleh karena itu, dapat diduga bahwa ketimpangan distribusi pendapatan antar wilayah di Jawa Tengah masih terjadi sampai saat ini.

### 3. Metode Analisis

Ketimpangan distribusi pendapatan antar wilayah di Propinsi Jawa Tengah dianalisis dengan menggunakan Indeks Williamson, yang dirumuskan sebagai berikut (Sjafrizal, 2008):

$$V_w = \frac{\sqrt{\sum(Y_i - \bar{Y})^2 \frac{f_i}{n}}}{\bar{Y}}$$

Keterangan:

$V_w$  = Indeks Williamson

$Y_i$  = PDRB per kapita di kabupaten i

$\bar{Y}$  = PDRB per kapita rata-rata seluruh kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah

$f_i$  = Jumlah penduduk di kabupaten  $i$

$n$  = Jumlah penduduk seluruh kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah

Adapun kriteria yang digunakan untuk menentukan tingkat ketimpangan adalah: jika  $0,1 < V_w < 0,35$ , tingkat ketimpangan termasuk rendah; jika  $0,35 < V_w < 0,5$ , tingkat ketimpangan termasuk sedang; jika  $V_w > 0,5$ , tingkat ketimpangan termasuk tinggi

Sedangkan untuk menganalisis pemetaan wilayah berdasarkan potensi ekonominya, menggunakan analisis *Klassen Typologi*. Dalam *Klassen Typologi* analisis dilakukan dengan membandingkan kriteria pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan per kapita di masing-masing wilayah studi (Kabupaten/Kota) dengan variabel yang sama di tingkat wilayah referensi (Propinsi). Selanjutnya akan terbentuk matriks yang menggabungkan penilaian terhadap variabel-variabel tersebut. matriks *Klassen Typologi* dapat terlihat pada Tabel 1.

**Tabel 1.** Matrik *Klassen Typologi*

Laju Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Per Kapita	$r_i \geq r$	$r_i < r$
$Y_i \geq Y$	Wilayah Maju (Maju dan Tumbuh Cepat)	Wilayah Potensial (Maju Tetapi Tertekan)
$Y_i < Y$	Wilayah Berkembang	Wilayah Terbelakang

Sumber: Sjafrizal, 2008.

Keterangan:

$Y_i$  = Pendapatan per kapita kabupaten/kota ke- $i$

$Y$  = Rata-rata pendapatan per kapita Propinsi

$r_i$  = Pertumbuhan ekonomi Kabupaten/kota ke- $i$

$r$  = Rata-rata pertumbuhan ekonomi Propinsi

#### 4. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat menjadi salah satu indikator kinerja pembangunan ekonomi daerah tersebut. Berdasarkan data BPS yang diolah, diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah pada tahun 2012-2019 cenderung berfluktuasi. Terdapat 9 Kabupaten dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi yang relatif rendah dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi Propinsi Jawa Tengah (5,32%), yaitu Kabupaten Cilacap (3,65%), Purworejo (5,13%), Wonosobo (4,85%), Wonogiri (5,30), Grobogan (5,29%), Kudus (3,64%), Demak (5,23%), Temanggung

(5,09%), dan Kabupaten Pekalongan (4,79%). Terlihat bahwa Kabupaten Kudus dan Cilacap merupakan 2 Kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi terendah. Sedangkan 26 Kabupaten/Kota lainnya memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi daripada rata-rata pertumbuhan ekonomi Propinsi Jawa Tengah. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja ekonomi sebagian besar wilayah di Jawa Tengah relatif baik.

Sesuai dengan konsep dasarnya bahwa pertumbuhan ekonomi itu hanya melihat terjadinya kenaikan dalam PDRB dari tahun ke tahun tanpa memperhitungkan apakah peningkatan tersebut dibarengi dengan modernisasi struktur ekonominya atau pertumbuhan jumlah penduduknya. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi itu belum dapat dijadikan tolok ukur kesejahteraan masyarakat. Untuk bisa menjadi tolok ukur kesejahteraan masyarakat, maka nilai PDRB per tahun tersebut harus dibandingkan dengan jumlah penduduk per tahun, yang disebut sebagai pendapatan per kapita. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu mencerminkan kesejahteraan penduduknya apabila peningkatan laju pertumbuhan ekonomi itu tidak diimbangi oleh menurunnya laju pertumbuhan penduduknya.

## **5. Pertumbuhan Penduduk Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah**

Berdasarkan data BPS yang diolah, diketahui bahwa pertumbuhan penduduk di Propinsi Jawa Tengah selama tahun 2012-2019 sebesar 0,75%. Pertumbuhan penduduk ini lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonominya. Tentu saja hal ini dapat berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Terdapat 9 Kabupaten/Kota dengan pertumbuhan penduduk lebih tinggi dari 1%, yaitu Kabupaten Purbalingga (1,03%), Boyolali (1,98%), Kudus (1,23%), Jepara (1,49%), Demak (1,04%), Kabupaten Semarang (1,35%), Kota Salatiga (1,43%), Kota Semarang (1,67%), dan Kota Pekalongan (2,84%). Pertumbuhan penduduk tertinggi berada di Kota Pekalongan, yaitu 2,84% per tahun, sedangkan pertumbuhan penduduk terendah berada di Kabupaten Kebumen dan Purworejo masing-masing 0,33%. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap nilai pendapatan per kapita dari masing-masing Kabupaten/Kota tersebut.

## **6. Pendapatan Per Kapita Kabupaten/Kota Propinsi di Jawa Tengah**

Pendapatan per kapita merupakan rasio antara PDRB suatu wilayah dengan jumlah penduduknya. Semakin besar jumlah penduduk, dengan nilai PDRB yang tetap maka menyebabkan pendapatan per kapita menurun. Apabila pertumbuhan ekonomi lebih rendah daripada pertumbuhan penduduk akan menyebabkan pendapatan per kapita akan semakin kecil dan sebaliknya. Oleh karena itu, untuk meningkatkan pendapatan per kapita yang dapat meningkat-

kan kesejahteraan masyarakat, maka perlu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan upaya mengendalikan jumlah penduduk.

Berdasarkan data BPS yang diolah, diketahui bahwa pendapatan per kapita rata-rata Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah selama tahun 2012-2019 adalah Rp24.577,3 ribu. Terdapat lima dari 6 wilayah Kota yang memiliki rata-rata pendapatan per kapita lebih besar daripada rata-rata Propinsi Jawa Tengah, sedangkan Kota Pekalongan memiliki rata-rata pendapatan per kapita yang lebih rendah dari rata-rata Propinsi. Secara keseluruhan, Kabupaten Kudus memiliki rata-rata pendapatan per kapita tertinggi di Propinsi Jawa Tengah, yaitu sebesar Rp78.359,6 ribu, sedangkan pendapatan per kapita terendah berada di Kabupaten Pemalang sebesar Rp11.771,3 ribu.

## 7. Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah

Ketimpangan pendapatan antar wilayah dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan Indeks Williamson. Untuk menganalisis secara lebih rinci kondisi per wilayah, maka analisis ketimpangan pendapatan antar wilayah ini dibedakan menjadi ketimpangan antar Kabupaten/Kota secara keseluruhan, ketimpangan antar kabupaten, dan ketimpangan antar kota.

Hasil perhitungan nilai Indeks Williamson untuk 35 Kabupaten/Kota secara keseluruhan, yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota, dapat dilihat pada Tabel 2. sedangkan untuk melihat ketimpangan di wilayah yang secara administratif berbeda, dapat dilihat pada Tabel 3 dan Tabel 4.

### a. Ketimpangan pendapatan antar Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah

**Tabel 2.** Nilai Indeks Williamson Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah, 2012-2019

Tahun	Indeks Williamson
2012	0.679
2013	0.671
2014	0.656
2015	0.662
2016	0.649
2017	0.645
2018	0.638
2019	0.632
Rata-rata	0.654

Sumber: Data diolah, 2020

Berdasarkan data pada Tabel 2 dapat diketahui bahwa rata-rata nilai Indeks Williamson sebesar 0,654. Nilai ini lebih besar dari 0,5. Artinya, ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota di Jawa Tengah berada dalam kategori ketimpangan tinggi.

*b. Ketimpangan pendapatan antar Kabupaten di Propinsi Jawa Tengah*

Hasil perhitungan nilai Indeks Williamson untuk wilayah Kabupaten, dapat dilihat pada Tabel 3. Berdasarkan data pada Tabel 3. dapat diketahui bahwa rata-rata nilai Indeks Williamson sebesar 0,619. Nilai tersebut lebih besar dari 0,5. Artinya, ketimpangan pendapatan antar kabupaten di Jawa Tengah berada dalam kategori ketimpangan tinggi.

**Tabel 3.** Nilai Indeks Williamson Kabupaten di Jawa Tengah, 2012-2019

Tahun	Indeks Williamson
2012	0.663
2013	0.648
2014	0.634
2015	0.632
2016	0.614
2017	0.608
2018	0.586
2019	0.569
Rata-rata	0.619

*Sumber:* Data diolah, 2020.

*c. Ketimpangan pendapatan antar Kota di Propinsi Jawa tengah*

Hasil perhitungan nilai Indeks Williamson untuk wilayah Kota, dapat dilihat pada Tabel 4. Berdasarkan data pada Tabel 4 dapat diketahui bahwa rata-rata nilai Indeks Williamson sebesar 0,399. Nilai ini berada dalam rentang antara 0,35 - 0,5. Artinya, Ketimpangan pendapatan antar kota di Jawa Tengah berada dalam kategori ketimpangan sedang.

Apabila dibandingkan antara ketimpangan antar kabupaten dan antar kota, maka terlihat bahwa pendapatan di wilayah kota relatif lebih merata dibandingkan dengan di wilayah kabupaten. Sehingga dapat dikatakan bahwa kontribusi terbesar pada terjadinya ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah berasal dari ketidakmerataan pendapatan di wilayah Kabupaten.

**Tabel 4.** Nilai Indeks Williamson Kota di Jawa Tengah, 2012-2019

Tahun	Indeks Williamson
2012	0.411
2013	0.409
2014	0.348
2015	0.405
2016	0.404
2017	0.404
2018	0.403
2019	0.405
Rata-rata	0.399

Sumber: Data diolah, 2020.

Hasil penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu, yaitu Sjafrizal (2002) dan Akita & Alisjahbana (2002) yang menunjukkan bahwa terdapat ketimpangan pembangunan antar wilayah di Indonesia, Iswanto (2015) yang menunjukkan tingginya ketimpangan pendapatan antar Kabupaten/Kota di Jawa Timur, Maulana (2019) yang menunjukkan adanya ketimpangan pendapatan sedang dan tinggi antar kabupaten/kota di Kalimantan selatan, Yeniwati (2013) yang menunjukkan dari 10 wilayah sampel yang diteliti di Propinsi Sumatera, sebagian besar menunjukkan ketimpangan sedang dan tinggi, Aprianoor & Muktiali (2015) yang menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di Jawa Barat juga berada dalam kategori ketimpangan tinggi, sebesar 0,6. Angka tersebut relatif sama dengan angka ketimpangan Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah.

Menurut Todaro (2012), dampak negatif terjadinya ketimpangan antara lain melemahnya stabilitas sosial dan solidaritas serta perekonomian bekerja secara tidak efisien. Bahkan dalam kondisi ketimpangan yang sangat berat, dianggap bahwa ketimpangan tersebut adalah tidak adil.

Terjadinya ketimpangan yang relatif tinggi antara daerah kabupaten dan kota menunjukkan bahwa *spread effect* yang diharapkan terjadi dalam keterkaitan antara daerah maju (kota) dan daerah relatif terbelakang (kabupaten) tidak terjadi. Salah satu faktor penyebab terjadinya ketimpangan antar daerah maju dan daerah berkembang adalah seperti dikemukakan dalam Teori Heckser-Ohlin bahwa kegiatan perdagangan antar wilayah yang kurang lancar akan menyebabkan proses penyamaan harga faktor produksi menjadi terhambat dan mengakibatkan penyebaran proses pembangunan juga akan terhambat dan mendorong terjadinya ketimpangan antara wilayah. Disamping itu, kondisi ini dapat terjadi karena seperti pada umumnya wilayah perkotaan

relatif lebih maju dibandingkan dengan wilayah kabupaten dengan dukungan berbagai aspek pembangunan yang lebih baik, baik dilihat dari aspek sosial, penduduk, infrastruktur, dan akses sumberdaya, termasuk tersedianya kesempatan kerja, yang relatif lebih banyak.

Argumen tersebut sejalan dengan Amrillah (2013) bahwa perbedaan sumberdaya antara daerah, baik sumber daya alam maupun sumberdaya manusia menjadi faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya ketimpangan antar daerah. Perbedaan infrastuktur, sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, yang tersedia di daerah maju dan daerah berkembang, juga memperberat terjadinya ketimpangan antara daerah (Awandari, 2016; Calderón & Servén, 2004; Démurger, 2001; Maryaningsih, Hermansyah, & Savitri, 2014; Sumadisa, 2016; Sukwika, 2018; Yap, 2013).

Ketersediaan unsur pendukung yang memperlancar kegiatan ekonomi akan menarik berkembangnya investasi di suatu daerah. Investasi ini merupakan salah satu unsur penting dalam mendukung proses pembangunan yang dilaksanakan. Investasi dapat menyerap tenaga kerja, meningkatkan produktivitas masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga dapat mengurangi ketimpangan pendapatan yang terjadi, baik antar individu maupun antar wilayah (Démurger, 2001; Kamal & Shah, 2015; Putri, 2014).

Dengan demikian, di wilayah kota memungkinkan terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi yang lebih tinggi. Terjadinya perbedaan dalam konsentrasi kegiatan ekonomi antar wilayah akan mendorong terjadinya ketimpangan pembangunan antar wilayah (Sjafrizal, 2008). Wilayah dengan konsentrasi kegiatan ekonomi yang lebih tinggi akan mendapat nilai tambah ekonomi yang lebih besar dibandingkan wilayah dengan konsentrasi kegiatan ekonomi yang lebih rendah.

## **8. Pemetaan Wilayah Berdasarkan Potensi Ekonomi Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah**

Pemetaan potensi ekonomi Kabupaten/Kota dalam hal ini adalah pemetaan wilayah Kabupaten/Kota dengan membandingkan antara variabel pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita suatu kabupaten/kota dengan kedua variabel tersebut di tingkat propinsi. Pendapatan per kapita menjadi salah satu indikator kesejahteraan masyarakat suatu daerah sedangkan pertumbuhan ekonomi menjadi indikator pencapaian kinerja pembangunan yang dilaksanakan di suatu daerah.

Analisis potensi ini dilakukan dengan menggunakan metode *Klassen Typology*. Dalam metode ini akan diperoleh matriks yang menghubungkan antara pendapatan per kapita dengan pertumbuhan ekonomi selama tahun 2012-2019. Matriks *Klassen Typology* dapat dilihat pada Tabel 5. Berdasarkan

matriks *Klassen Typology* pada tabel tersebut terlihat bahwa di Propinsi Jawa Tengah, terdapat 10 kabupaten/kota yang termasuk dalam kategori wilayah Prima (Maju). Artinya, wilayah dalam kategori ini memiliki pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang tinggi, lebih tinggi daripada di wilayah Propinsi.

Rata-rata pendapatan per kapita sebesar 5,32% per tahun selama periode 2012-2019. Terdapat 5 kabupaten dalam kategori wilayah maju, yaitu Sukoharjo, Karanganyar, Sragen, Semarang, dan Kendal. Sedangkan selebihnya adalah wilayah kota. Dari enam wilayah kota, hanya lima yang termasuk kategori wilayah maju, yaitu Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kota Semarang, dan Kota Tegal. Sedangkan untuk kota Pekalongan termasuk kategori wilayah berkembang.

Berdasarkan Tabel 5, juga diketahui bahwa terdapat dua kabupaten yang termasuk kategori wilayah Potensial karena memiliki pendapatan per kapita yang tinggi tetapi laju pertumbuhan ekonominya relatif rendah dibandingkan Propinsi. Kedua wilayah tersebut adalah Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Kudus. Rata-rata pendapatan per kapita di kedua kabupaten ini relatif tinggi masing-masing sebesar Rp52.925,10 ribu dan Rp78.359,64 ribu, sedangkan rata-rata pertumbuhan ekonominya masing-masing sebesar 3,65% dan 3,64%. Karena nilai pendapatan per kapita yang sudah relatif tinggi dibandingkan wilayah lain, maka tingkat pertumbuhan ekonominya relatif menjadi terbatas. Sehingga wilayah yang berada dalam kategori ini disebut juga sebagai wilayah maju tapi tertekan.

Selanjutnya, dapat diketahui bahwa terdapat 16 wilayah yang termasuk wilayah Berkembang, satu diantaranya adalah wilayah kota, yaitu Kota Pekalongan. Wilayah berkembang memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi pendapatan per kapitanya lebih rendah dibandingkan wilayah propinsi. Dengan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, maka kabupaten/kota dalam kategori ini dapat didorong terus untuk memanfaatkan berbagai potensi ekonomi yang dimilikinya dan mengendalikan pertumbuhan penduduk sehingga pendapatan per kapitanya dapat meningkat.

Berdasarkan Tabel 5 juga terlihat bahwa di Propinsi Jawa Tengah terdapat tujuh wilayah Kabupaten yang termasuk dalam kategori wilayah Terbelakang, yaitu Purworejo, Wonosobo, Wonogiri, Demak, Grobogan, Temanggung, dan Kabupaten Pekalongan. Ke-7 kabupaten ini memiliki laju pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang lebih rendah dibandingkan Propinsi Jawa Tengah.



**Tabel 5.** Matriks *Klassen Typologi* potensi ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

Laju Pertumbuhan Ekonomi  Pendapatan Per Kapita	$r_i \geq r$	$r_i < r$
	$Y_i \geq Y$	Kabupaten/Kota Maju (Maju dan tumbuh cepat)  Sukoharjo, Karanganyar, Sragen, Semarang, Kendal, Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kota Tegal
$Y_i < Y$	Kabupaten/Kota Berkembang  Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Magelang, Boyolali, Klaten, Jepara, Pemalang, Tegal, Brebes, Kota Pekalongan, Batang, Blora Rembang, Pati	Kabupaten /Kota Terbelakang  Purworejo, Wonosobo, Wonogiri, Demak, Grobogan, Temanggung, Pekalongan

Sumber: Data diolah, 2020.

Apabila diperhatikan berdasarkan data pada matriks *Klassen Typology*, dapat diketahui bahwa wilayah kota termasuk ke dalam kategori wilayah maju. Hal ini menunjukkan hasil yang sejalan dengan perhitungan Indeks Williamson dimana ketimpangan di wilayah kota relatif lebih rendah dibandingkan wilayah kabupaten. Hanya saja, selama periode tahun 2012-2019 tampaknya kemajuan yang dicapai oleh wilayah kota belum mampu memberikan dampak positif bagi pengembangan wilayah-wilayah lainnya. Dengan kata lain, *spread effect* yang diharapkan terjadi dari pembangunan di wilayah maju ke wilayah sekitarnya belum terjadi. Fakta ini sesuai dengan pernyataan Tambunan (2014) bahwa daerah dengan fokus kegiatan ekonomi yang tinggi akan mampu menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan daerah yang bukan menjadi fokus kegiatan ekonomi sehingga hal ini akan berdampak terhadap tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Dengan kata lain, tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi dapat berdampak terhadap distribusi pendapatan yang terjadi. Hal ini seperti ditunjukkan dalam penelitian Bouncha & Mohamed

(2018), Fawaz, Rahnama, & Valcarcel (2014), Hartini (2017), Nemati & Raisi (2015) dan Putri (2015).

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota secara keseluruhan dan ketimpangan pendapatan antar Kabupaten di Propinsi Jawa Tengah menunjukkan terjadinya ketimpangan yang tinggi, sedangkan ketimpangan pendapatan antar kota termasuk kategori ketimpangan sedang. Berdasarkan pemetaan potensi ekonomi wilayah dapat diketahui bahwa di Propinsi Jawa Tengah terdapat 10 wilayah termasuk wilayah Prima (maju), 16 wilayah termasuk wilayah Berkembang, dua wilayah termasuk wilayah Maju Tapi Tertekan (Potensial), dan tujuh wilayah termasuk wilayah terbelakang. Sebagian besar wilayah kota termasuk kategori wilayah Prima (Maju).

### **Rekomendasi**

Memperhatikan kondisi tersebut di atas, perlu adanya kebijakan pemerintah untuk lebih pemeratakan pembangunan antar wilayah dengan menyediakan fasilitas dan infrastruktur yang memadai dan proporsional dengan kondisi wilayah masing-masing. Kondisi seperti ini dapat mendorong berkembangnya aktivitas ekonomi di masing-masing daerah dan terkoneksinya hubungan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain sehingga dapat memberikam *spread effect* seperti yang diharapkan. Disamping itu juga pemerintah perlu meningkatkan kesempatan kerja di wilayah Kabupaten sehingga penduduk produktif dan terdidik tidak pindah ke wilayah perkotaan. Oleh karena itu perlu dibuat perencanaan pembangunan yang efektif berdasarkan potensi masing-masing wilayah agar semua wilayah dapat berkembang secara lebih merata.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adelman, I, & Morris, C. 1973. *Economic Growth and Social Equity in Developing Countries*. California: Standford University Press
- Akita, T dan Alisjahbana, A.2002. "Regional Income Inequality in Indonesia and the Initial Impact of the Economic Crisis". *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 38(2), 201-222.
- Amrillah & Mahaendra, Y. (2013). Analisis Disparitas Pendapatan Per Kapita Antar Kecamatan dan Potensi Pertumbuhan Ekonomi Kecamatan di Kabupaten Karangasem. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, Volume 2, Nomor 4, hlm 181-189.

- Aprianoor, P. & Mukhtali, M. (2015). Kajian Ketimpangan Wilayah Di Provinsi Jawa Barat. *Teknik PWK*, Volume. 4, Nomor 4, hlm. 484-498.
- Awandari, P. & Indrajaya. (2015). Pengaruh Infrastruktur, Investasi, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kesejahteraan Masyarakat melalui Kesempatan Kerja. *Jurnal Ekonomi Pembangunan niversitas Udayana*, Volume 5, Nomor 12, hlm. 1435-1462.
- Badan Pusat Statistik (2020). *Propinsi Jawa Tengah Dalam Angka*. Semarang: Author.
- Bouincha, M., & Mohamed, K. (2018). Income Inequality and Economic Growth: An Analysis Using a Panel Data. *International Journal of Economics and Finance*, 10(5). doi:10.5539/ijef.v10n5p242
- Calderón, C., & Servén, L. (2004). The Effects of Infrastructure Development on Growth and Income Distribution. *Working Papers No. 3400*. doi:10.1596/1813-9450-3400.
- Démurger, S. (2001). Infrastructure Development and Economic Growth: An Explanation for Regional Disparities in China?. *Journal of Comparative Economics*, 29(1), 95–117. doi:10.1006/jcec.2000.1693.
- Djojohadikusumo, S. (1994). *Perkembangan Pemikiran Ekonomi: Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- Fawaz, F, Rahnama, M, & Valcarcel, V.J. (2014). A Refinement Of The Relationship Between Economic Growth And Income Inequality. *Applied Economics*, 46(27), 3351-3361 [doi.org/10.1080/00036846.2014.929624](https://doi.org/10.1080/00036846.2014.929624)
- Gama, A. S. (2009). Disparitas dan Konvergensi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi Dan Sosial (INPUT)*, Volume 2, Nomor 1, hlm. 38-48.
- Hartini, N. T. (2017). Pengaruh PDRB per Kapita, Investasi dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2015. eprints@UNY. Retrieved 12 Juli 2020, from <https://eprints.uny.ac.id/51092/>
- Iswanto, D. (2015). Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten/Kota dan Pertumbuhan Ekonomi di Propinsi Jawa Timur *Signifikan*, Volume 4, Nomor 1, April 2015, hlm. 41-66.
- Kamal, M. & Shah, A. K. P. (2015). Identifying Factors Influencing Visitor to Visit Museum in Bangladesh and Setting Marketing Strategies for Museum. *Journal of Business and Management*, 17(10), 955-988.
- Kuznets, S. (1955). Economic Growth and Income Inequality. *The American Economic Review*, 45(1), 1-28.

- Maryaningsih, N., Hermansyah, O., & Savitri, M. (2014). Pengaruh Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 17(1): 61–98. doi:10.21098/bemp.v17i1.44.
- Maulana, A. (2019). Analisis Ketimpangan Pembangunan Antarkabupaten/ Kota Di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010-2017. *JIEP-Vol. 19*, No 1, Maret 2019, hlm. 1-6.
- Myrdal, G. (1957). *Economic Theory and Underdeveloped Regions*. London: G. Duckworth.
- Nemati, M., & Raisi, G. (2015, September). Economic Growth and Income Inequality in Developing Countries. *International Journal of Life Sciences*, 9(6), 79-82. doi:10.3126/ijls.v9i6.12743
- Putri, V. & Nata. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Unud*, Volume 4, Nomor 1 : 41-49.
- Putri, Y. E., Amar, S., & Aimon, H. (2015). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi*, 3. Retrieved Juli 7, 2020, from <http://ejournal.unp.ac.id/>
- Sari, A. C. (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi ASEAN Member Countries Pada Tahun 2011-2016 . *Jurnal Ilmiah Bisnis dan Ekonomi Asia*, Volume 11, Nomor 1, hlm. 24-29.
- Sirojuzilam. (2005). Beberapa Aspek Pembangunan Regional. Bandung: Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia.
- Sjafrizal (1997). Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat, *Prisma*, Tahun XXVI, Nomo. 34, hlm. 27-38.
- Sjafrizal. (2008). *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Padang: Baduose Media.
- Sjafrizal. (2012). Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat, Jakarta, *Jurnal Buletin Prisma*, Volume 8, Nomor 2, hlm. 72-85.
- Sugiarto, A. (2020). *Peluang dan Tantangan Menjadi Negara Berpendapatan Menengah Atas*. Kompas, 16 Juli 2020.
- Sumadiasa, I.K., Tisnawati, N.M., & Wirathi, I.G.A.P. (2016). Analisis Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Jalan, Listrik dan PMA Terhadap Pertumbuhan PDRB Provinsi Bali Tahun 1993-2014. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, Volume 5, Nomor 7, hlm. 925-947.
- Sukwika, T. (2018). Peran Pembangunan Infrastruktur terhadap Ketimpangan Ekonomi Antarwilayah di Indonesia. *Jurnal Wilayah & Lingkungan*, Volume 6, Nomor 2, hlm. 115-130. doi.org/10.14710/jwl.6.2.115-130
- Tambunan, T. (2014). *Perekonomian Indonesia : Teori dan Temuan Empiris*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Tarigan, R. (2005). *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara
- Todaro, M.P dan Smith, S. C. (2012). *Economic Development*. 11<sup>th</sup> Edition. United Kingdom: Pearson Education Limited.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999, Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pemerintah Daerah
- Williamson, J.G. (1965). Regional Inequality and Process of National Development: A Description of The Pattern, *Economic Development and Cultural Change*, Vol. XIII, hlm. 3-45.
- Yap, J.:T. (2013). Addressing Inequality in East Asia through Regional Economic Integration. *Eria Rin Statement* No. 3. The ERIA Research Institute Network, May 2013.
- Yeniwati. 2013. Ketimpangan Ekonomi Antar Provinsi Di Sumatera, *Jurnal Kajian Ekonomi*, Volume II, Nomor 03, Juli 2013, hlm. 1-21.

---

## **PRO MEGA PINTAR KEMBANGKAN SIKAP DAN ANALISIS PBB SEBAGAI PAJAK PUSAT DAN DAERAH**

**Hanjar Giri Anggraini**

### **PENDAHULUAN**

Pendidikan menengah atas merupakan pendidikan yang mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi (UU Nomor 20 Tahun 2003). Tujuan yang diharapkan oleh peserta didik dalam proses pendidikan adalah untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, akhlak mulia, kepribadian, pengendalian diri, kecerdasan, serta keterampilan yang diperlukan dirinya. Tentu saja, memperoleh pendidikan harus melalui usaha sadar dan terencana dengan mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang menyenangkan agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya, sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai.

Pola pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, interaktif, jejaring, aktif mencari, berbasis tim, berbasis multimedia, klasikal-massal dengan tetap memperhatikan pengembangan potensi khusus yang dimiliki setiap peserta didik, ilmu pengetahuan jamak (*multidisciplines*), dan pola pembelajaran kritis itulah yang diharapkan muncul pada pendidikan menengah. Untuk itu seorang guru dituntut mampu melakukan perluasan pengetahuan dan penguatan materi dengan cara mengurangi materi yang tidak relevan serta memperdalam dan memperluas materi yang relevan bagi peserta didik melalui pola pembelajaran yang diharapkan dalam Kurikulum 2013 SMA/MA dan pengelolaan kelas yang baik (Lampiran I Permendikbud Nomor 59 Tahun 2014).

Perkembangan dan perubahan ekonomi tak dapat dibendung lagi seiring dengan perubahan regulasi pemerintah dan perilaku pelaku ekonomi yang memunculkan fenomena-fenomena baru dalam bidang ekonomi. Begitu pula mata pelajaran ekonomi di tingkat sekolah menengah atas, pada kompetensi dasar 3.7 menganalisis perpajakan dalam pembangunan ekonomi kelas XI semester 2 sub materi pajak bumi dan bangunan (PBB) mengalami perubahan. Hal ini karena terjadi perubahan regulasi perpajakan yaitu dengan dikeluarkannya UU No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah menyebabkan pajak bumi dan bangunan berubah menjadi pajak pemerintah daerah dan bukan lagi pajak pemerintah pusat. Untuk itu guru perlu menghadirkan pembelajaran menarik

dan menyenangkan yang mampu meningkatkan analisis peserta didik pada materi PBB dan mampu menjawab perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat.

Kenyataan yang ada dalam proses pembelajaran sangat jarang melakukan eksperimen ekonomi menggunakan fakta-fakta dari pelaku ekonomi. Proses pembelajaran yang mengabaikan fakta-fakta dapat mengurangi minat dan keaktifan peserta didik karena merasa terlalu lebar perbedaan teori ekonomi yang disajikan di kelas dengan perilaku yang terlihat dalam kehidupan sehari-hari.

Guru harus mampu menghadirkan pembelajaran bermakna di dalam kelas sehingga kemudahan belajar bagi para peserta didiknya tercapai. Menghubungkan fenomena baru ke dalam struktur pengetahuan peserta didik melalui alat/media/bahan merupakan syarat terjadinya pembelajaran bermakna. Dengan demikian pengalaman nyata dapat dihadirkan di dalam kelas tanpa harus peserta didik meninggalkan kelas sehingga pengalaman nyata ini selain menciptakan kebermaknaan belajar juga akan membentuk ketrampilan sosial dan memperoleh hasil belajar yang berupa perpaduan antara mantra kognitif, afektif, dan psikomotorik (Rachmawati dan Daryanto, 2015:314-319). Pembelajaran yang demikian ini membawa manfaat bahwa pajak bukan lagi merupakan sesuatu yang paling asing dan membentuk pemikiran peserta didik bahwa pajak sebagai salah satu kewajiban dalam bernegara yaitu merupakan sarana untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan.

Hasil tanya jawab guru di awal pembelajaran adalah sebagian besar peserta didik menyatakan (1) kurang memahami materi PBB karena materi PBB yang ada di buku paket dengan yang diperoleh dari hasil browsing berbeda, (2) Peserta didik meragukan penjelasan guru yang ada dalam bahan ajar karena perbedaan dengan yang ada di buku paket, (3) Peserta didik kurang minat dalam pembelajaran ekonomi karena guru hanya menyajikan bahan ajar tentang PBB. Untuk peningkatan sikap (minat dan keaktifan) dan membuktikan keraguan akan materi PBB, guru dituntut untuk selalu berinovasi dan improvisasi mengenai strategi pengajarannya di kelas melalui model *problem based learning* dan pembuatan media pembelajaran seperti pada kehidupan nyata sehari-hari. Misalnya pada kompetensi dasar pajak sub materi PBB, peserta didik dapat menggunakan MEGA PINTAR. Media Galeri SPPT PBB dan tabel pintar (MEGA PINTAR) dapat meningkatkan analisis peserta didik tentang PBB sebagai pajak pusat dan sebagai pajak daerah. SPPT beberapa tahun adalah fakta nyata dari para pelaku ekonomi di Kabupaten Batang dan dapat digunakan untuk melakukan eksperimen ekonomi yang dapat mengembangkan sikap dan daya analisis peserta didik.

Berdasarkan hal tersebut di atas permasalahan yang diajukan adalah “Bagaimanakah efektifitas pembelajaran menggunakan model pembelajaran *problem based learning* berbantuan media Galeri SPPT PBB dan tabel Pintar (PRO MEGA PINTAR) untuk mengembangkan sikap dan analisis PBB sebagai pajak pusat dan daerah kelas XI IPS 1 Semester 2 Tahun Pelajaran 2018/2019 SMA Negeri 2 Batang”.

## **PEMBAHASAN**

### **Belajar Dan Pembelajaran**

Undang-undang nomor 20 tahun 2003 memaknai pembelajaran terjadi pada suatu lingkungan belajar dimana proses interaksi terjadi antara peserta didik, pendidik, dan sumber belajar. Aqib (2013:66) mengemukakan bahwa untuk mewujudkan proses pembelajaran berjalan secara efektif dan efisien yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proses belajar mengajar, maka guru harus melakukan upaya secara sistematis. Syarat mutlak agar terwujud kompetensi professional maka guru harus memiliki kemampuan mengelola pembelajaran. Konsekuensinya, guru harus memiliki pemahaman yang utuh dan tepat terhadap konsep belajar.

Guna menunjang dan memperkuat penulisan dalam penelitian ini, teori belajar yang penulis pilih adalah teori belajar konstruktivisme dan teori pembelajaran bermakna. Pendekatan konstruktivisme memiliki beberapa strategi dalam proses belajar. Menurut Slavin (1994) dalam Baharuddin dan Wahyu (2015:178) strategi-strategi tersebut adalah: *Top-down processing*, *Cooperative learning*, *Generative learning*. Belajar bermakna yang digagas oleh Davi Paulus Ausubel (1963) dalam Rachmawati dan Daryanto (2015:309) adalah suatu proses pembelajaran dimana peserta didik lebih mudah memahami dan mempelajari karena guru mampu dalam memberikan kemudahan bagi peserta didiknya sehingga mereka dengan mudah mengaitkan pengalaman atau pengetahuan yang sudah ada dalam pikirannya, sehingga belajar hafalan tidak bermakna bagi peserta didik.

### **Model Berbasis Masalah (*Problem Based Learning*)**

Model pembelajaran berbasis masalah (*problem based learning/PBL*) oleh Tan Onn Seng (2000) dalam Zainal Aqip (2013) merupakan pembelajaran yang menggunakan berbagai kemampuan berpikir dari peserta didik secara individu maupun kelompok untuk mengatasi permasalahan sehingga bermakna, relevan, dan kontekstual dalam lingkungan nyata. Permasalahan dalam PBL menuntut penjelasan atas sebuah fenomena. Sedangkan kemamuan peserta didik dalam mengidentifikasi isu pembelajaran dan mencarikan alternatif-alternatif penyelesaian merupakan fokus dari model ini. PBL juga melatih



peserta didik terampil menyelesaikan masalah, oleh karenanya pembelajarannya selalu dihadapkan pada permasalahan-permasalahan kontekstual. *Sintak* model *problem based learning* menurut Arends (2012) meliputi orientasi peserta didik pada masalah, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, dan menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah.

### **Media Pembelajaran**

Upaya-upaya pembaharuan dalam pemanfaatan hasil-hasil teknologi dalam proses pembelajaran tak bisa dibendung lagi, hal ini merupakan dampak dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi dunia pendidikan. Untuk menghadapi perkembangan dan tuntutan zaman, sekolah diharapkan menyediakan alat-alat/media kekinian dan tentu saja guru harus mampu menggunakannya. Jika hal tersebut belum bisa diupayakan sekolah, maka sekurang-kurangnya guru dapat menggunakan media yang murah dan efisien yang meskipun sederhana sehingga tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat tercapai.

Sekolah dan guru bekerja sama dan berupaya terhadap tersedianya media pembelajaran. Lantas apa sebenarnya media pembelajaran itu? Yang dimaksud dengan media pembelajaran di sini adalah media yang berfungsi memperjelas makna pesan yang disampaikan dan dapat membantu proses belajar mengajar, sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan lebih baik dan sempurna. Seperti Levie dan Lents (1982) dalam Kustandi dan Sutjipto (2013:19) mengemukakan empat fungsi media pembelajaran, khususnya media visual, yaitu: fungsi atensi, fungsi afektif, fungsi kognitif, fungsi kompensatoris.

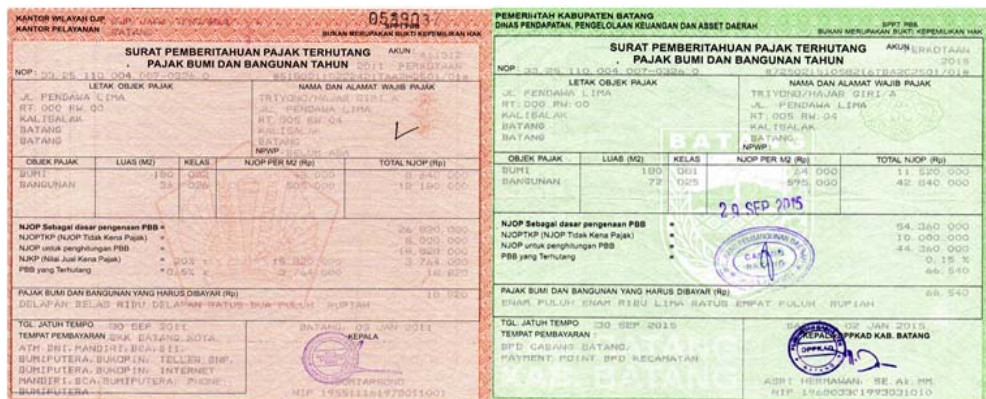
### **Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)**

Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 Bab II pasal 2 angka (2) menyebutkan bahwa pajak bumi dan bangunan (PBB) perdesaan dan perkotaan merupakan jenis pajak kabupaten/kota (daerah). Kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan tidak dikenai pajak, sehingga PBB perdesaan dan perkotaan dikenakan atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. Dalam kondisi tidak terdapat transaksi jual beli, maka nilai jual objek pajak (NJOP) ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti. Sedangkan jika terjadi transaksi jual beli secara wajar maka NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi tersebut. NJOP ini dijadikan dasar

pengenaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya, sedangkan untuk objek pajak secara umum besarnya NJOP ditetapkan setiap tiga tahun. Penetapan besarnya NJOP dilakukan oleh Kepala Daerah. Nilai jual objek pajak tidak kena pajak (NJOPTKP) ditetapkan dengan peraturan daerah (UU No. 28 Tahun 2009).

### Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)

Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak (UU No. 28 Tahun 2009). Sebelum dikeluarkan UU Nomor 28 Tahun 2009, SPPT merupakan selambar kertas hasil cetakan yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak untuk diberikan kepada wajib pajak yang memiliki objek pajak berupa bumi/tanah dan bangunan. Dengan dikeluarkannya UU ini, Kepala Daerah memiliki kewenangan menerbitkan SPPT melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD). Setiap lembar SPPT terdapat simbol/materi/bahasan tentang tahun pajak, letak objek pajak, nama dan alamat subjek pajak, objek pajak, NJOP, NJOPTKP, tarif, cara menghitung PBB, dan lembaga pemungut PBB, yang terdapat dalam contoh SPPT di bawah ini.



Sumber: Kantor Pelayanan Pajak (KPP Pratama)

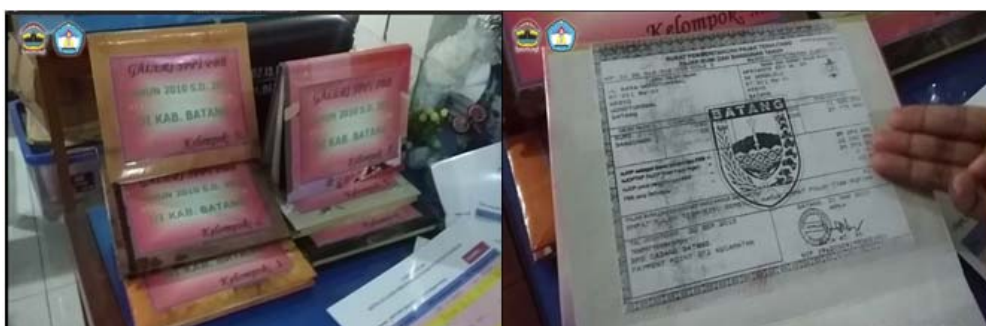
Sumber: DPPKAD Kabupaten Batang

Gambar 1. SPPT PBB

### Media Galeri SPPT PBB dan Tabel Pintar (MEGA PINTAR)

Peserta didik dapat memiliki pemahaman yang utuh tentang penerapan PBB sebagai pajak pusat dan pajak daerah melalui media galeri SPPT PBB. SPPT beberapa tahun adalah fakta nyata dari para pelaku ekonomi di Kabupaten Batang. Setiap lembar SPPT terdapat simbol/materi/bahasan tentang

tahun pajak, letak objek pajak, nama dan alamat subjek pajak, objek pajak, NJOP, NJOPTKP, tarif, cara menghitung PBB, dan lembaga pemungut PBB. Jika SPPT ini disajikan dalam beberapa tahun secara runtut waktu (tahun pajak 2010-2018), maka peserta didik dapat memperoleh analisis yang kuat tentang materi PBB, bahkan peserta didik dapat memperoleh fenomena-fenomena nyata ketika PBB sebagai pajak pemerintah pusat dan PBB sebagai pajak pemerintah daerah. Sedangkan tabel pintar adalah sebuah media yang digunakan untuk mempresentasikan hasil analisis terhadap PBB sebagai pajak pusat dan daerah. MEGA PINTAR dapat dilihat pada gambar berikut ini.



**TABEL PINTAR  
MENGANALISIS PBB SEBAGAI PAJAK PUSAT DAN DAERAH**

*Objek yang diamati: SPPT PBB Tahun 2010 – 2018 di Kabupaten Batang*

		KELOMPOK: .....	
No.	Aspek Analisis	PBB sebagai pajak pusat	PBB sebagai pajak daerah
1	Tahun berlaku		
2	Besarnya NJOPTKP		
3	Adakah pengenaan NJOPTKP untuk objek pajak : a. Tanah/bumi b. Tanah/bumi dan bangunan		
4	Besarnya tarif PBB		
5	Rumus menghitung PBB		

**Gambar 2.** Mega Pintar

### Sikap dan Analisis Peserta Didik

Dua hal yang dinilai dalam ranah afektif menurut Sunarti dan Selly Rahmawati (2014) yaitu (1) kompetensi afektif dan (2) sikap dan minat peserta didik terhadap mata pelajaran serta proses belajar. Sedangkan komponen ranah kognitif analisis meliputi kemampuan mengklasifikasi, menggolongkan, memerinci, dan mengurai suatu objek. Hasil yang dicapai oleh peserta didik tidak hanya berupa nilai hasil belajar peserta didik semata, tetapi dapat juga dilihat dari ekspresi peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung seperti adanya minat dan keaktifan.

Standar kompetensi sikap dan analisis peserta didik dianggap berhasil apabila mempunyai indikator sebagai berikut: (a) sekurang-kurangnya 75% peserta didik mendapat nilai akhir lebih besar sama dengan tujuh puluh lima (b) minat, keaktifan, partisipasi, dan kerjasama peserta didik selama proses pembelajaran meningkat. Sedangkan untuk guru, dianggap berhasil apabila kemampuan pengelolaan pembelajaran meningkat.

### **Metode Penelitian**

Lokasi tempat penelitian berada di SMA Negeri 2 Batang. Jumlah peserta didik kelas XI IPS 2 sebanyak 36 terdiri dari 13 laki-laki dan 23 perempuan. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan jam KBM selama sepuluh jam pelajaran, dimana untuk tiap minggunya jam KBM mapel ekonomi kelas XI sebanyak empat jam pelajaran. Sepuluh jam pelajaran dibagi untuk kegiatan prasiklus (tindakan/pengamatan dan evaluasi) selama dua jam pelajaran, kegiatan siklus 1 (tindakan/pengamatan dan evaluasi) selama empat jam pelajaran, dan siklus 2 (tindakan/pengamatan dan evaluasi) selama empat jam pelajaran. Adapun kegiatan lainnya dalam penelitian tindakan kelas (PTK) dilaksanakan di luar jam KBM, agar tidak mengganggu kompetensi dasar lainnya dalam mapel ekonomi.

Penelitian yang menggunakan siklus atau putaran tindakan yang berkelanjutan maka itulah yang disebut PTK dan jumlah putaran atau siklusnya minimal dua kali. Sedangkan dalam satu putaran melalui empat tahap yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. PTK meliputi tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan, pada tahap ini dilakukan identifikasi permasalahan secara seksama dengan cara menggali data selengkap-lengkapnyanya baik peserta didik maupun guru. Data tentang latar belakang atau penyebab rendahnya kompetensi peserta didik dalam materi pajak bumi dan bangunan digali dengan cara wawancara dengan peserta didik. Semua data dikumpulkan untuk diorganisir dan dianalisis, kemudian hasilnya digunakan sebagai masukan dalam menyusun program pembelajaran dan rencana tindakan yang akan diterapkan untuk pemecahan masalah.
2. Pelaksanaan tindakan, pada tahap ini dilakukan pembelajaran dengan memanfaatkan PRO MEGA PINTAR pada materi PBB sebagai pajak pusat dan daerah. Pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan oleh guru. Sementara itu observer dalam kegiatan pembelajaran adalah guru senior.
3. Pengamatan atau observasi, merupakan tindakan untuk setiap siklus dilakukan pada saat berlangsungnya proses pembelajaran.

4. Tahap analisis dan refleksi, pada tahap ini hasil pengamatan/observasi akan dilakukan suatu analisis. Hasil observasi disampaikan pada kegiatan diskusi antara guru dan observer/guru senior. Didalam diskusi nantinya akan dibahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran, yang kemudian hasilnya akan digunakan untuk perbaikan pelaksanaan proses pembelajaran pada siklus berikutnya.

Subjek dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas XI IPS 1 SMA Negeri 2 Batang yang berjumlah 36 orang. Fokus dalam penelitian ini adalah peningkatan keaktifan dan analisis peserta didik pada materi PBB sebagai akibat dari penggunaan PRO MEGA PINTAR. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Lembar Wawancara, instrumen wawancara dalam penelitian ini berupa lembar wawancara, lembar ini digunakan untuk mengetahui pendapat peserta didik di awal pembelajaran sebelum media SPPT digunakan pada materi pajak bumi dan bangunan.
2. Lembar Observasi, instrumen observasi dalam penelitian ini berupa lembar observasi, lembar ini digunakan untuk mengamati aktivitas peserta didik atau guru selama proses pembelajaran sebelum dan sesudah menggunakan PRO MEGA PINTAR. Lembar observasi dalam penelitian ini terdiri dari lembar observasi aktivitas peserta didik (prasiklus, siklus 1, dan siklus 2) dan lembar observasi aktivitas guru (membuka pelajaran, inti, dan menutup pelajaran)
3. Lembar Soal Tes, dalam penelitian ini berupa lembar soal yang digunakan untuk mengungkap hasil belajar materi pajak bumi dan bangunan, instrumen yang digunakan adalah tes prestasi/hasil belajar. Jenis tes yang digunakan tes uraian. Lembar soal tes terdiri dari lembar soal tes prasiklus, siklus 1, dan siklus 2.

Penelitian tindakan kelas ini, jenis data kuantitatif diolah dengan menggunakan statistik deskriptif yaitu dengan mencari jumlah, nilai rata-rata, persentase, menyajikan data yang menarik, mudah dibaca, dan diikuti berfikirnya (grafik, tabel, dan chart). Sedangkan untuk data kualitatif diolah dengan proses koding untuk mengorganisasi data. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini sebagian besar bersumber dari peserta didik SMA Negeri 2 Batang kelas XI IPS 1 sejumlah 36 orang, data-data ini disebut data primer. Sedarmayati dan Hidayat (2011) menyatakan bahwa data primer adalah data yang dikumpulkan melalui pihak pertama, biasanya dapat melalui angket, wawancara, dan lain-lain. Penelitian ini juga menggunakan data sekunder, dimana data sekunder diperoleh dengan cara mengumpulkan data dari berbagai literatur dan publikasi untuk mendukung teori, data nama peserta didik, dan data lainnya. Dengan demikian menurut Sedarmayanti dan Hidayat

(2011:73), data sekunder adalah data yang dikumpulkan melalui pihak kedua. Untuk memperoleh data seperti yang dimaksud itu digunakan teknik-teknik dalam pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian tindakan ini adalah sebagai berikut :

1. Wawancara, dilaksanakan pada saat kegiatan prasiklus, digunakan untuk mengetahui pendapat peserta didik di awal pembelajaran sebelum PRO MEGA PINTAR digunakan pada materi pajak bumi dan bangunan. Kegiatan wawancara ini menghasilkan data komulatif, yaitu data yang berbentuk kalimat (Arikunto, Suhardjono, dan Supardi, 2015:227). Data yang berbentuk kalimat ini memberikan gambaran ekspresi peserta didik tentang tingkat pemahaman terhadap materi PBB, pandangan atau sikap peserta didik terhadap proses pembelajaran, dan minat peserta didik saat belajar materi PBB. Data-data tersebut (data komulatif) dapat dianalisis secara kualitatif.
2. Observasi, dalam penelitian ini dilakukan untuk mengamati aktivitas peserta didik dan guru (peneliti) selama proses pembelajaran sebelum dan sesudah menggunakan PRO MEGA PINTAR. Dengan demikian kegiatan observasi dilakukan sebanyak tiga kali yaitu: (1) Observasi terhadap aktivitas peserta didik pada saat kegiatan prasiklus yang dilakukan oleh guru mapel/peneliti, (2) Observasi terhadap aktivitas peserta didik dan guru/peneliti pada saat siklus 1 bersamaan dengan pelaksanaan tindakan, dengan observer guru lain, dan (3) Observasi terhadap aktivitas peserta didik dan guru pada saat siklus 2 bersamaan dengan pelaksanaan tindakan, dengan observer guru lain.

Data yang dihasilkan dari kegiatan observasi adalah data primer yang berupa data kualitatif. Dengan diketahui hasil observasi ini, maka peneliti dapat merencanakan kegiatan yang dapat dilakukan selanjutnya agar dapat memperbaiki proses pembelajaran dan meningkatkan pengelolaan pembelajaran.

3. Dokumentasi, dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh informasi atau data-data yang diperlukan di awal penelitian yaitu data untuk mendukung teori dalam penelitian, data nama peserta didik, data jumlah peserta didik, dan data-data lainnya yang digunakan untuk menunjang kegiatan penelitian. Data yang dihasilkan termasuk data sekunder yang berupa data kualitatif maupun kuantitatif.
4. Tes, digunakan untuk mengungkap hasil belajar materi pajak bumi dan bangunan sebelum dan sesudah PRO MEGA PINTAR diberikan. Jenis tes yang digunakan adalah tes uraian. Tes diberikan kepada peserta didik setelah akhir pembelajaran pada kegiatan prasiklus, siklus 1, dan siklus 2. Data yang dihasilkan dari tes termasuk data primer berupa data kuantitatif.

Indikator kinerja yang ingin diperoleh dalam penelitian tindakan kelas ini adalah meningkatnya sikap dan analisis peserta didik materi PBB pada kelas XI IPS 1 SMA Negeri 2 Batang setelah menerapkan PRO MEGA PINTAR. Standar kompetensi peserta didik dianggap berhasil apabila mempunyai indikator sebagai berikut: (a) sekurang-kurangnya 75% peserta didik mendapat nilai akhir lebih besar sama dengan tujuh puluh lima (b) minat, keaktifan, partisipasi, dan kerjasama peserta didik selama proses pembelajaran meningkat. Sedangkan untuk guru, dianggap berhasil apabila kemampuan pengelolaan pembelajaran meningkat. Jika pada siklus 1 indikator yang ditetapkan belum tercapai maka akan dilanjutkan ke siklus 2 begitu seterusnya. Siklus akan berhenti jika a) sekurang-kurangnya 75% peserta didik mendapat nilai akhir lebih besar sama dengan tujuh puluh lima (b) minat, keaktifan, partisipasi, dan kerjasama peserta didik selama proses pembelajaran meningkat. Sedangkan untuk guru, dianggap berhasil apabila kemampuan pengelolaan pembelajaran meningkat.

## Hasil dan Pembahasan

### A. Hasil Penelitian

#### 1. Prasiklus

Proses pembelajaran pada tahap prasiklus menggunakan pendekatan saintifik, model pembelajaran *problem based learning*, dan metode pembelajaran menggunakan studi pustaka, diskusi, dan presentasi. Kelas dibagi menjadi beberapa kelompok dengan jumlah 6-7 peserta didik tiap kelompok. Pada proses pembelajaran dimana MEGA PINTAR belum digunakan terlihat bahwa peserta didik tidak minat mempelajari materi PBB karena guru hanya menyajikan bahan ajar tentang PBB.

**Tabel 4.1** Data Hasil Analisis Tentang Prestasi Belajar Peserta didik Prasiklus

No.	Keterangan	Peserta didik	Prosentase
1	Nilai $\geq 75$	4	12%
2	Nilai $< 75$	32	88%
	Jumlah	36	100%

Sumber: hasil olahan.

#### 2. Siklus 1

##### a. Proses Pembelajaran

Proses pembelajaran pada tahap siklus 1 menggunakan pendekatan saintifik, model pembelajaran *problem based learning*, dan metode pembelajaran menggunakan studi pustaka, diskusi, dan presentasi.

Kelas dibagi menjadi beberapa kelompok dengan jumlah 6-7 peserta didik tiap kelompok. Pada tahap siklus 1 dilakukan tindakan dengan mengimplementasikan pembelajaran memanfaatkan MEGA PINTAR dengan objek pajak bumi dan bangunan.

**Tabel 4.2** Data Pengelolaan Pembelajaran Oleh Guru Siklus 1

No	Keterangan	Variabel Yang Diamati	Keterangan Siklus 1
1	Membuka pelajaran	Ketepatan dalam memberikan pengantar pembelajaran	3
2	Membuka pelajaran	Intonasi suara	3
3	Membuka pelajaran	Penggunaan bahasa	3
4	Inti (Pembelajaran dengan memanfaatkan SPPT PBB)	Variasi penggunaan sumber belajar	2
5	Inti (Pembelajaran dengan memanfaatkan SPPT PBB)	Ketepatan penggunaan media	2
6	Inti (Pembelajaran dengan memanfaatkan SPPT PBB)	Ketepatan penggunaan metode	2
7	Inti (Pembelajaran dengan memanfaatkan SPPT PBB)	Intonasi suara	3
8	Inti (Pembelajaran dengan memanfaatkan SPPT PBB)	Penggunaan bahasa	3
9	Inti (Pembelajaran dengan memanfaatkan SPPT PBB)	Kejelasan dalam memberikan arahan	2
10	Penutup	Ketepatan evaluasi	2

Keterangan: 1=K, 2=C, 3=B, 4=SB

Tabel 4.2 tampak bahwa ketrampilan guru dalam mengelola pembelajaran diamati dari 10 variabel yang merupakan bagian dari kegiatan pembelajaran mulai dari membuka pelajaran sampai menutup pelajaran. Pada siklus pertama, semua variabel membuka pelajaran bernilai baik (tiga) yang meliputi ketepatan guru dalam memberikan pengantar pelajaran, intonasi suara, dan penggunaan bahasa. Kemampuan guru pada kegiatan inti bernilai cukup (dua) untuk variabel variasi penggunaan sumber belajar, ketepatan penggunaan media, ketepatan penggunaan metode, dan kejelasan dalam memberikan arahan. Sedangkan kegiatan inti yang bernilai baik (tiga) untuk variabel intonasi suara dan penggunaan bahasa. Pada kegiatan menutup pembelajaran yang diamati melalui ketepatan dalam memberikan evaluasi bernilai cukup (dua).



### b. Peningkatan Hasil Belajar

Setelah dilakukan tindakan dengan mengimplementasikan pembelajaran memanfaatkan PRO MEGA PINTAR pada siklus pertama jumlah peserta didik yang memperoleh nilai lebih besar sama dengan 75 sebanyak 26 orang (72%) dan peserta didik yang nilainya kurang dari 75 berjumlah 10 orang (28%).

### c. Perubahan Perilaku/Sikap

Hasil observasi mengenai keaktifan dan perhatian peserta didik dalam proses pembelajaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.4** Data Hasil Observasi Peserta didik Siklus 1

No	Variabel Yang Diamati	Keterangan Siklus 1
1	Minat peserta didik terhadap materi pelajaran	2
2	Keaktifan peserta didik selama pembelajaran	2
3	Partisipasi peserta didik dalam pencapaian tujuan pembelajaran	2
4	Kerjasama antar peserta didik dalam proses pembelajaran	2
5	Kemampuan peserta didik dalam membedakan penerapan PBB sebagai pajak pusat dan PBB sebagai pajak daerah di Kabupaten Batang	2
6	Kemampuan peserta didik dalam menghitung PBB sebagai pajak pusat dan PBB sebagai pajak daerah di Kabupaten Batang	2
7	Kemampuan peserta didik dalam menganalisis penerapan PBB jika dikaitkan dengan besaran pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, lebih mahal mana PBB sebagai pajak pusat dan PBB sebagai pajak daerah.	2

Keterangan: 1=K, 2=C, 3=B, 4=SB

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa pada siklus pertama semua variabel yang diamati bernilai cukup (dua) yang meliputi minat peserta didik terhadap materi PBB bernilai, keaktifan peserta didik selama pembelajaran, partisipasi peserta didik dalam pencapaian tujuan pembelajaran, kerjasama antar peserta didik dalam proses pembelajaran, kemampuan peserta didik dalam membedakan penerapan PBB sebagai pajak pusat dan PBB sebagai pajak daerah di Kabupaten Batang, kemampuan peserta didik dalam menghitung PBB sebagai pajak pusat dan PBB sebagai pajak daerah di Kabupaten Batang, dan kemampuan peserta didik dalam menganalisis penerapan PBB jika dikaitkan dengan besaran pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, lebih mahal mana PBB sebagai pajak pusat dan PBB sebagai pajak daerah.

### 3. Siklus 2

#### a. Proses Pembelajaran

Proses pembelajaran pada tahap siklus 2 menggunakan pendekatan saintifik, model pembelajaran *problem based learning*, dan metode pembelajaran menggunakan studi pustaka, diskusi, dan presentasi. Kelas dibagi menjadi beberapa kelompok dengan jumlah 4 peserta didik tiap kelompok. Pada tahap siklus 2 dilakukan tindakan dengan mengimplementasikan MEGA PINTAR.

Pengelolaan pembelajaran oleh guru dan selama kegiatan pembelajaran berlangsung diamati dengan pedoman observasi, hasilnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 4.5** Data Pengelolaan Pembelajaran Oleh Guru Siklus 2

No	Keterangan	Variabel Yang Diamati	Keterangan Siklus 2
1	Membuka pelajaran	Ketepatan dalam memberikan pengantar pembelajaran	4
2	Membuka pelajaran	Intonasi suara	4
3	Membuka pelajaran	Penggunaan bahasa	4
4	Inti (Pembelajaran dengan memanfaatkan SPPT PBB)	Variasi penggunaan sumber belajar	3
5	Inti (Pembelajaran dengan memanfaatkan SPPT PBB)	Ketepatan penggunaan media	3
6	Inti (Pembelajaran dengan memanfaatkan SPPT PBB)	Ketepatan penggunaan metode	3
7	Inti (Pembelajaran dengan memanfaatkan SPPT PBB)	Intonasi suara	4
8	Inti (Pembelajaran dengan memanfaatkan SPPT PBB)	Penggunaan bahasa	4
9	Inti (Pembelajaran dengan memanfaatkan SPPT PBB)	Kejelasan dalam memberikan arahan	3
10	Penutup	Ketepatan evaluasi	3

Keterangan : 1=K, 2=C, 3=B, 4=SB

Ketepatan guru membuka pelajaran di siklus dua bernilai sangat baik (empat) pada variabel memberikan pengantar pelajaran, intonasi suara, dan penggunaan bahasa. Pada kegiatan inti kemampuan guru bernilai baik (tiga) untuk variabel variasi penggunaan sumber belajar, ketepatan penggunaan media, ketepatan penggunaan metode, dan kejelasan dalam memberikan arahan. Sedangkan pada kegiatan inti untuk variabel intonasi suara dan penggunaan bahasa masing-masing bernilai sangat baik (empat). Kegiatan guru dalam menutup pembela-

jaran melalui variabel ketepatan dalam memberikan evaluasi bernilai baik (empat).

### b. Peningkatan Hasil Belajar

Siklus dua nampak bahwa jumlah peserta didik yang memperoleh nilai lebih besar sama dengan 75 sebanyak 33 orang (92%) dan peserta didik yang nilainya kurang dari 75 berjumlah 3 orang (8%). Berdasarkan data hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah peserta didik yang memperoleh nilai di atas sama dengan 75 mengalami peningkatan dari 26 orang menjadi 33 orang. Pada siklus kedua salah satu indikator keberhasilan pembelajaran dengan menggunakan PRO MEGA PINTAR telah tercapai yaitu 75% peserta didik memperoleh nilai di atas sama dengan 75, pada siklus yang memperoleh nilai di atas sama dengan 75 ada 33 orang (92%).

### c. Perubahan Perilaku/Sikap

Hasil observasi mengenai keaktifan dan perhatian peserta didik dalam proses pembelajaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 4.7** Data Hasil Observasi Peserta didik Siklus 2

No.	Variabel Yang Diamati	Keterangan Siklus 2
1	Minat peserta didik terhadap materi pelajaran	4
2	Keaktifan peserta didik selama pembelajaran	3
3	Partisipasi peserta didik dalam pencapaian tujuan pembelajaran	3
4	Kerjasama antar peserta didik dalam proses pembelajaran	3
5	Kemampuan peserta didik dalam membedakan penerapan PBB sebagai pajak pusat dan PBB sebagai pajak daerah di Kabupaten Batang	3
6	Kemampuan peserta didik dalam menghitung PBB sebagai pajak pusat dan PBB sebagai pajak daerah di Kabupaten Batang	3
7	Kemampuan peserta didik dalam menganalisis penerapan PBB jika dikaitkan dengan besaran pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, lebih mahal mana PBB sebagai pajak pusat dan PBB sebagai pajak daerah.	3

Keterangan: 1=K, 2=C, 3=B, 4=SB

Siklus kedua nampak bahwa minat peserta didik terhadap materi PBB nilainya 4 (sangat baik), keaktifan peserta didik selama pembelajaran nilainya 3 (baik), partisipasi peserta didik dalam pencapaian

tujuan pembelajaran nilainya 3 (baik), kerjasama antar peserta didik dalam proses pembelajaran nilainya 3 (baik), kemampuan peserta didik dalam membedakan penerapan PBB sebagai pajak pusat dan PBB sebagai pajak daerah di Kabupaten Batang nilainya 3 (baik), kemampuan peserta didik dalam menghitung PBB sebagai pajak pusat dan PBB sebagai pajak daerah di Kabupaten Batang nilainya 3 (baik), dan kemampuan peserta didik dalam menganalisis penerapan PBB jika dikaitkan dengan besaran pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, lebih mahal mana PBB sebagai pajak pusat dan PBB sebagai pajak daerah nilainya 3 (baik).

## **B. Pembahasan**

Penelitian tindakan kelas ini mengimplementasikan pembelajaran dengan memanfaatkan PRO MEGA PINTAR. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, pembelajaran dengan memanfaatkan PRO MEGA PINTAR dapat meningkatkan pemahaman peserta didik materi pajak bumi dan bangunan sebagai pajak pusat dan daerah. Pada siklus pertama di kegiatan pelaksanaan pembelajaran target penelitian 75% peserta didik memperoleh nilai di atas sama dengan 75 belum tercapai sehingga siklus diulang kembali. Pada siklus pertama peserta didik yang memperoleh nilai di atas sama dengan 75 hanya 26 orang (72%) hal ini disebabkan peserta didik masih dalam tahap penyesuaian dengan adanya perubahan metode pembelajaran. Semula guru biasanya mengajarkan pajak bumi dan bangunan dengan studi literatur dan menghitung PBB yang soalnya direkayasa saja tidak sesuai fakta-fakta yang terjadi di Kabupaten Batang. Sehingga pada siklus pertama peserta didik belum terbiasa memanfaatkan PRO MEGA PINTAR. Sedangkan yang 10 orang masih banyak hasil pekerjaannya yang keliru, sehingga nilainya tidak optimal. Oleh karena itu berdasarkan hasil refleksi dari guru dan observer maka siklus diulang.

Pada siklus kedua, jumlah peserta didik yang memperoleh nilai di atas sama dengan 75 meningkat menjadi 33 orang (92%). Pada siklus kedua ini target penelitian telah tercapai, yaitu 75% peserta didik memperoleh nilai di atas sama dengan 75. Oleh karena target penelitian telah tercapai maka tindakan diberhentikan pada siklus kedua. Berkenaan dengan pengelolaan pembelajaran oleh guru, pada siklus pertama masih belum optimal. Terutama pada saat kegiatan inti yaitu penyampaian materi PBB dengan pembelajaran memanfaatkan PRO MEGA PINTAR. Guru dalam penggunaan sumber belajar belum bervariasi sehingga nilai yang diperoleh 2 (cukup) hal ini disebabkan karena buku pegangan guru dan buku teks peserta didik belum ada yang membahas secara detail penerapan PBB sebagai pajak daerah. Kelemahan lainnya yang ditemukan guru memberikan arahan kepada peserta didik tidak

jelas dan runtut. Hal ini mengakibatkan peserta didik kebingungan dalam memanfaatkan PRO MEGA PINTAR. Untuk itu pada siklus berikutnya diperlukan pengulangan tindakan.

Pada siklus kedua, dari hasil observasi oleh observer pengelolaan pembelajaran oleh guru mengalami peningkatan. Ketepatan guru membuka pelajaran di siklus dua yang semula bernilai baik menjadi sangat baik pada variabel memberikan pengantar pelajaran, intonasi suara, dan penggunaan bahasa. Pada kegiatan inti kemampuan guru meningkat dari bernilai cukup menjadi baik untuk variabel variasi penggunaan sumber belajar, ketepatan penggunaan media, ketepatan penggunaan metode, dan kejelasan dalam memberikan arahan. Sedangkan pada kegiatan inti untuk variabel intonasi suara dan penggunaan bahasa masing-masing meningkat dari bernilai baik menjadi sangat baik. Kegiatan guru dalam menutup pembelajaran pada variabel ketepatan dalam memberikan evaluasi juga meningkat dari bernilai cukup menjadi baik. Kemampuan guru secara keseluruhan di siklus dua mengalami peningkatan.

Keaktifan dan perhatian peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung pada siklus pertama berdasarkan hasil penelitian menunjukkan minat peserta didik terhadap materi pelajaran nilainya hanya 2 (cukup), hal ini diakibatkan dalam tahapan penyesuaian yang selama ini hanya dengan menggunakan studi kasus yang direkayasa menjadi belajar dengan menggunakan fakta-fakta nyata yang ada di SPPT PBB. Keaktifan peserta didik dalam pembelajaran juga masih belum optimal, dari 36 peserta didik hanya 3 orang yang aktif bertanya atau menjawab pertanyaan dari guru, kerjasama antar peserta didik masih kurang dikarenakan mereka cenderung sungkan untuk bertanya pada temannya yang bias mengerjakan. Sehingga dari refleksi siklus pertama perlu mengulang tindakan pada siklus berikutnya.

Pada siklus kedua, minat peserta didik terhadap materi pembelajaran meningkat dari cukup menjadi sangat baik, hal ini dapat dilihat pada keseriusan peserta didik dalam proses pembelajaran. Selain itu kemampuan peserta didik dalam membedakan penerapan PBB sebagai pajak pusat dan PBB sebagai pajak daerah di Kabupaten Batang meningkat dari cukup menjadi baik, kemampuan peserta didik dalam menghitung PBB sebagai pajak pusat dan PBB sebagai pajak daerah di Kabupaten Batang meningkat dari cukup menjadi baik, dan kemampuan peserta didik dalam menganalisis penerapan PBB jika dikaitkan dengan besaran pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, lebih mahal mana PBB sebagai pajak pusat dan PBB sebagai pajak daerah meningkat dari cukup menjadi baik. Sehingga secara keseluruhan dapat disimpulkan pembelajaran dengan memanfaatkan PRO MEGA PINTAR sangat efektif dalam meningkatkan pemahaman peserta didik pada materi PBB sebagai pajak pusat

dan daerah. Selain itu juga meningkatkan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran mater pajak bumi dan bangunan serta meningkatkan aktifitas dan perhatian peserta didik selama proses pembelajaran.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan:

1. Pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning berbantuan media galeri SPPT PBB dan tabel pintar (PRO MEGA PINTAR) sangat efektif dalam meningkatkan/mengembangkan sikap dan analisis peserta didik pada materi PBB sebagai pajak pusat dan daerah. Selain itu juga meningkatkan keaktifan dan perhatian peserta didik selama proses pembelajaran dan kemampuan guru meningkat dalam pengelolaan pembelajaran materi pajak bumi dan bangunan.
2. Analisis PBB peserta didik sangat terpercaya dan sesuai dengan fakta di lapangan karena menggunakan SPPT PBB tahun 2010-2018 di Kabupaten Batang, hasil analisis diantaranya: 1) pejabat yang mengesahkan SPPT PBB untuk tahun 2010-2012 adalah kepala kantor pelayanan pajak (KPP) PRATAMA sedangkan tahun 2013-2018 adalah kepala DPPKAD, 2) sampai dengan tahun 2012 PBB sebagai pajak pusat dan sejak tahun 2013 PBB sebagai pajak daerah, 3) tarif PBB sebagai pajak pusat sebesar 0,5% sedangkan sebagai pajak daerah sebesar 0,15%, 4) NJOPTKP sebagai pajak pusat sebesar Rp8.000.000,00 sedangkan sebagai pajak daerah sebesar Rp10.000.000,00, 5) rumus menghitung PBB sebagai pajak pusat= $\text{tarif} \times \text{dasar pengenaan pajak} \times \text{NJOPKP}$ , sedangkan sebagai pajak daerah= $\text{tarif} \times \text{NJOPKP}$ , dan 6) setelah dibandingkan ternyata semenjak menjadi pajak daerah besarnya PBB yang harus dibayar oleh masyarakat lebih besar.

### **Saran**

Saran terkait dengan hasil penelitian ini ialah :

- a. Pada saat mengimplementasikan pembelajaran dengan memanfaatkan PRO MEGA PINTAR pada materi pajak bumi dan bangunan sebaiknya pastikan bahwa Galeri SPPT PBB sudah tersusun secara urut dan runtut berdasarkan urutan tahun dan urutan objek pajak
- b. Supaya proses pembelajaran lebih optimal, pada saat awal pembelajaran guru sebaiknya memberikan waktu yang cukup luas kepada peserta didik untuk mengobservasi fakta-fakta yang ada di Galeri SPPT PBB untuk memperoleh gambaran awal tentang SPPT PBB.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku/Jurnal

- Andriawati, Yohana Richa. 2012. *Peningkatan Kreativitas dan Prestasi Belajar Akuntansi Pada Materi Penjurnalan di Kelas X B SMK PL Tarcisius 2 Semarang Tahun Pelajaran 2011/2012 Melalui Media Paku*. Jurnal Pendidikan Ekonomi, Vol. VII, No. 2, Desember 2012, hlm. 158-168.
- Aqib, Zaenal. 2013. *Model-Model, Media, dan Strategi Pemelajaran Kontekstual (Inovatif)*. Cet. 1. Bandung: Yrama Widya.
- Arikunto, Suharsimi, Suhardjono, dan Supardi. 2015. *Penelitian Tindakan Kelas*. Ed. Revisi. Cet. 1. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arends, R.I. 2012. *Learning to Teach*. New York: McGraw-Hill Companies, Inc.
- Baharuddin dan Wahyu, Esa Nur. 2015. *Teori Belajar & Pembelajaran*. Cet. 1. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Gunawan, Imam. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Ed. 1. Cet. 3. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kustandi, Cecep dan Sutjipto, Bambang. 2013. *Media Pembelajaran Manual Dan Digital*. Ed. 2. Cet. 1. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Muliawati, Weni. 2012. *Penerapan Media Lembar Kerja Peserta didik dan Quiz dalam Meningkatkan Hasil Belajar Peserta didik Materi Pendapata Nasional pada Kelas X SMA Negeri 10 Semarang Tahun Pelajaran 2011-2012*. Jurnal Pendidikan Ekonomi, Vol. VII, No. 2, Desember 2012, hlm. 169-176.
- Rachmawati, Tutik dan Daryanto. 2015. *Teori Belajar Dan Proses Pembelajaran Yang Mendidik*. Cet. 1. Yogyakarta: Penerbit Gaya Media.
- Sukardi. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Tindakan Kelas Implementasi Dan Pengembangannya*. Ed. 1. Cet. 2. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sedarmayanti dan Hidayat, Syarifudin. 2011. *Metodologi Penelitian*. Cet. 2. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Setiasi, Yuliana. 2015. *Peningkatan Aktivitas dan Hasil Belajar Materi Gejala Alam Abiotik Dengan Pemanfaatan Media Lingfa Pada Peserta Didik Kelas X BB 1 SMK Negeri 1 Jambu Semester 2 Tahun Pelajaran 2014/2015*. Didaktika Jurnal Kependidikan. September 2015, hlm. 135-134.
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Depdikbud, Jakarta.

### B. Peraturan Perundangan

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Sarana Prasarana.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Lampiran I Permendikbud Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah



---

## DETERMINAN KINERJA PEREKONOMIAN PROVINSI JAWA TENGAH: PERSPEKTIF DEMOGRAFI

Agus Arifin

### PENDAHULUAN

Tujuan pembangunan ekonomi adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam menggapai kesejahteraan (*welfare*). Untuk mewujudkan tujuan tersebut, sasaran antara yang diupayakan adalah di antara menaikkan pendapatan riil masyarakat dan produktivitas setiap pelaku ekonomi. Tidak itu saja, ketersediaan sumber daya (*endowments*) di suatu negara atau wilayah juga menjadi faktor utama penentu keberhasilan pembangunan ekonomi. Sumber daya tersebut meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, level teknologi, kondisi pasar, dan sistem perekonomian (Irawan & Suparmoko, 2016). Tidak bisa dipungkiri bahwa di negara berkembang, termasuk Indonesia ketergantungan pada *endowments* yang bersifat *natural giving* masih sangat tinggi. Misalnya, Indonesia sampai saat ini masih mengandalkan *Crude Palm Oil* (CPO) sebagai sumber daya yang disediakan oleh alam. Di samping itu, banyaknya jumlah penduduk yang dimiliki Indonesia secara umum masih didominasi oleh mereka yang mempunyai kemampuan teknis sementara masih relatif sedikit yang mempunyai kemampuan manajerial dan kemampuan finansial.

Di antara berbagai sumber daya tersebut, sumber daya manusia memegang peranan penting dan strategis dalam menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi tersebut (Adioetomo & Omas, 2010). Jika tidak dikelola dengan baik, maka sumber daya manusia ini dapat menjadi bumerang bagi negara dan bangsanya sendiri. Jumlah sumber daya manusia yang banyak merupakan modal kuat suatu pembangunan, namun tidak serta merta demikian. Jika tidak ada perencanaan yang baik dan matang dalam membangun sumber daya manusia justru akan memberikan kontra produktif bagi pembangunan, baik cepat maupun lambat. Oleh karenanya, analisis demografi dalam menopang kinerja pembangunan, dalam hal ini perekonomian suatu negara atau wilayah, menjadi prioritas yang tidak bisa ditawar-tawar lagi (Samuelson & Nordhaus, 2004).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menentukan kinerja perekonomian Provinsi Jawa Tengah menurut sudut pandang demografi. Secara lebih rinci, tujuan penelitian ini adalah menganalisis penga-

ruh laju pertumbuhan penduduk, kepadatan penduduk, rasio ketergantungan penduduk, dan indeks pembangunan manusia terhadap kinerja perekonomian Provinsi Jawa Tengah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah selama 8 tahun observasi, dari tahun 2011 sampai dengan 2018.

## PEMBAHASAN

### Pertumbuhan Ekonomi dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Sesuai dengan tinjauan ekonomi makro dan ekonomi pembangunan bahwa salah satu parameter penting untuk mengetahui keadaan ekonomi suatu negara atau wilayah dalam suatu periode tertentu adalah Produk Domestik Bruto (PDB). Selanjutnya, dari data series PDB ini akan dapat dianalisis pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). PDB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi (Mantra, 2003). Dengan kata lain, PDB menunjukkan kinerja perekonomian suatu negara atau wilayah. Badan Pusat Statistik (2019) melaporkan bahwa PDB Indonesia mengalami tren kenaikan selama tiga tahun, yaitu dari tahun 2016 sampai dengan 2018 (lihat Tabel 1).

**Tabel 1.** Produk Domestik Bruto Indonesia (Harga Konstan), 2016–2018

Tahun	PDB (triliyun rupiah)	Laju (%)
2016	9.434.613,00	-
2017	9.912.704,00	5,07
2018	10.425.316,00	5,17

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019

Pada Tabel 1 dapat dijelaskan bahwa PDB Indonesia mengalami kenaikan dari tahun 2016 ke 2017 sebesar 5,07 persen dan dari tahun 2017 ke 2018 sebesar 5,17 persen. BPS (2019) juga melaporkan bahwa 59 persen PDB disumbang oleh kabupaten/kota dan provinsi-provinsi di Pulau Jawa. Sementara itu, sisanya sebesar 41 persen disumbang oleh berbagai daerah di luar Pulau Jawa, yaitu sumbangan PDB dari Pulau Sumatera sebesar 22 persen, Pulau Kalimantan sebesar 8 persen, Pulau Sulawesi sebesar 6 persen, Pulau Bali dan Nusa Tenggara sebesar 3 persen, serta Pulau Papua dan Kepulauan Maluku sebesar 2 persen.

Lebih detail lagi, di Pulau Jawa, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Tengah memberikan sumbangan sebesar 8 persen terhadap PDRB Jawa Tengah atau menempati peringkat keempat. Kondisi ini menggambarkan bahwa kinerja PDRB Provinsi Jawa Tengah masih perlu ditingkatkan lagi agar mampu memberikan sumbangan yang lebih besar terhadap Provinsi

Jawa Tengah. Oleh karena itu, salah satu potensi yang dapat dioptimalkan adalah kuantitas dan kualitas penduduk. Di bawah ini ditampilkan perkembangan PDRB Jawa Tengah dan kuantitas/jumlah penduduk di Provinsi Jawa Tengah.

**Tabel 2.** PDRB Perkapita Provinsi Jawa Tengah (Harga Berlaku), 2016–2018

Tahun	PDRB (milyar rupiah)	Jumlah Penduduk (ribu orang)	Laju Penduduk (%)	PDRB per kapita (rupiah/tahun)	PDRB per kapita (rupiah/bulan)
2016	1.087.316,68	34.019,10	0,73*	31.962.044,85	2.663.503,74
2017	1.172.794,52	34.257,90	0,70	34.222.763,22	2.851.896,95
2018	1.268.454,78	34.490,80	0,68	36.783.722,04	3.065.310,17

\*Jumlah penduduk tahun 2015 adalah 33.774,10

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019; Bank Indonesia, 2019.

PDRB Provinsi Jawa Tengah menunjukkan tren meningkat selama tiga tahun, yaitu dari tahun 2016 sampai dengan 2018. Pada tahun 2016 PDRB sebesar Rp1.087.320,00 juta meningkat pada tahun 2017 menjadi Rp1.172.400,00 juta kemudian meningkat kembali pada tahun 2018 menjadi Rp1.268.700,00 juta. Tren meningkat ini juga diiringi dengan kenaikan jumlah penduduk selama tiga tahun tersebut. Namun demikian, laju kenaikan PDRB masih lebih cepat daripada laju kenaikan jumlah penduduk, bahkan laju kenaikan jumlah penduduk menunjukkan angka yang semakin kecil, yaitu dari 0,73 persen ke 0,70 persen kemudian ke 0,68 persen. Oleh karena itu, keadaan ini menyebabkan PDRB per kapita semakin meningkat dari tahun ke tahun selama tiga tahun tersebut. Pada tahun 2016 PDRB per kapita sebesar Rp31,96 juta per tahun atau Rp2,7 juta per bulan, meningkat pada tahun 2017 menjadi Rp34,22 juta per tahun atau Rp2,85 juta per bulan, kemudian meningkat kembali pada tahun 2018 menjadi Rp36,78 juta per tahun atau Rp3,07 juta per bulan.

### **Tingkat Kepadatan Penduduk dan Rasio Ketergantungan**

Dalam tinjauan demografi, penduduk di Provinsi Jawa Tengah tidak tersebar merata, namun secara umum kepadatan penduduk cukup tinggi, terpadat ketiga di Pulau Jawa dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 1.059,82 jiwa/km<sup>2</sup> pada tahun 2018. Berdasarkan data dari BPS (2019) bahwa luas wilayah Provinsi Jawa Tengah tidak berubah sejak tahun 2011 hingga 2018, yaitu seluas 32.544,12 km<sup>2</sup>. Dengan jumlah penduduk yang semakin bertambah, maka tingkat kepadatannya pun semakin bertambah pula. Secara lengkap, tingkat kepadatan penduduk di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel 3 di bawah ini.

**Tabel 3.** Tingkat Kepadatan Penduduk di Provinsi Jawa Tengah, 2011-2018

Tahun	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	Tingkat Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> )	Laju kepadatan (%)
2011	32.544,12	1.005,57	-
2012	32.544,12	1.013,97	0,84
2013	32.544,12	1.022,13	0,80
2014	32.544,12	1.030,07	0,78
2015	32.544,12	1.037,80	0,75
2016	32.544,12	1.045,32	0,72
2017	32.544,12	1.052,66	0,70
2018	32.544,12	1.059,82	0,68

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019

Jika diamati lebih detail, meskipun tingkat kepadatan semakin meningkat, tetapi laju kepadatannya semakin menurun. Hal ini mengindikasikan bahwa penambahan penduduk semakin lama semakin berkurang dari tahun ke tahun. Jika tren ini berlanjut, maka dalam jangka panjang penambahan penduduk akan nol atau jumlah penduduk tidak berubah. Namun demikian, banyak faktor yang mempengaruhi naik-turunnya jumlah penduduk ini, misalnya angka kelahiran, angka kematian, migrasi, dll.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa penduduk merupakan bagian dari potensi sumberdaya manusia yang dapat menentukan berhasil atau tidaknya suatu perekonomian. Dalam tinjauan demografi, terdapat beberapa parameter yang digunakan untuk menilai keadaan penduduk, apakah menguntungkan atau malah justru menjadi beban bagi sebuah negara atau wilayah. Parameter yang sering digunakan oleh para pakar untuk menilai keadaan penduduk adalah rasio ketergantungan (*dependency ratio*), yaitu rasio yang menunjukkan perbandingan antara jumlah penduduk usia nonproduktif (kurang dari 15 tahun dan lebih dari 65 tahun) dan penduduk usia produktif (15 - 64 tahun) (Kominfo, 2015). Artinya, penduduk usia produktif harus menanggung berapa penduduk usia nonproduktif. Tentu saja dengan meningkatnya jumlah penduduk usia nonproduktif maka rasio ketergantungan penduduk menjadi semakin tinggi. Dengan kata lain, penduduk usia produktif menanggung lebih banyak penduduk usia nonproduktif. Rasio ketergantungan di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan tren menurun dari tahun ke tahun, sejak tahun 2011 hingga 2018. Selengkapnya, keadaan ini dapat dilihat pada Tabel 4.

Pada Tabel 4 dapat diamati bahwa rasio ketergantungan penduduk di Jawa Tengah mengalami penurunan dari 48,47 persen pada tahun 2011 menjadi 47,63 persen pada tahun 2018. Keadaan ini berarti bahwa jika jumlah penduduk usia nonproduktif yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif semakin berkurang, maka tentu geliat perekonomian akan lebih baik

sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurut Kominfo (2015) bahwa jika rasio ketergantungan penduduk berada di bawah 50 persen, maka keadaan ini sangat baik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara maksimal. Hal ini karena potensi pada penduduk produktif semakin dapat dioptimalkan sehingga tidak saja meningkat dari sisi kuantitas, tetapi juga dari sisi kualitasnya. Pada gilirannya nanti hal ini akan berdampak pada peningkatan pendapatan riil mereka sehingga kebutuhan sehari-hari mereka dapat semakin terpenuhi serta dapat menyisihkannya untuk ditabung dan kelak diinvestasikan.

**Tabel 4.** Rasio Ketergantungan Penduduk di Provinsi Jawa Tengah, 2011-2018

Tahun	Usia Nonproduktif (jiwa)	Usia Produktif (jiwa)	Rasio Ketergantungan (%)
2011	10.656.900	21.986.712	48,47
2012	10.900.561	22.369.646	48,73
2013	10.899.587	22.364.752	48,74
2014	10.929.739	22.592.924	48,38
2015	10.968.508	22.805.633	48,10
2016	11.011.516	23.007.579	47,86
2017	11.062.790	23.195.075	47,69
2018	11.127.650	23.363.185	47,63

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019, data diolah

### Indeks Pembangunan Manusia

Selanjutnya, untuk menilai kualitas hidup penduduk dapat dilakukan melalui analisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Parameter ini penting untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu negara atau wilayah dalam membangun kualitas hidup penduduk atau masyarakat yang berada di dalamnya. Analisis IPM mengukur tingkat aksesibilitas penduduk terhadap hasil-hasil pembangunan, misalnya bagaimana penduduk mendapatkan fasilitas kesehatan, pendidikan, kemudahan dalam berusaha/bekerja dalam memperoleh pendapatan, dll. Analisis IPM pertama kali diperkenalkan pada tahun 1990 oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) dan kemudian direvisi metodenya pada tahun 2010. Di Indonesia, penyesuaian metode tersebut dilakukan pada tahun 2014 oleh BPS. Indikator utama atau dimensi dasar dalam analisis IPM meliputi (1) umur panjang dan hidup sehat, (2) pengetahuan, dan (3) standar hidup layak (BPS, 2019). Pertama, umur panjang dan hidup sehat, diukur dengan Angka Harapan Hidup (AHH), yaitu rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur  $x$ , pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya (BPS, 2020). Pada umumnya, ukuran

AHH adalah saat lahir yang mencerminkan kondisi kesehatan pada saat itu, sehingga AHH menunjukkan rata-rata jumlah tahun yang akan dijalani oleh seseorang sejak orang tersebut lahir.

Kedua, pengetahuan, diukur dengan indikator Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Rata-rata Lama Sekolah (RLS) atau *Mean Years School* (MYS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal, dan Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang (BPS, 2020). Ketiga, standar hidup layak, diukur dengan nilai pengeluaran perkapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*) (BPS, 2020). Perkembangan IPM Provinsi Jawa Tengah menunjukkan tren meningkat dari tahun ke tahun, sejak tahun 2011 hingga 2018. Selengkapnya, perkembangan IPM tersebut dapat dilihat pada Tabel 5 di bawah ini.

**Tabel 5.** IPM Provinsi Jawa Tengah, 2011-2018

Tahun	IPM	Perubahan	
		Poin	%
2011	66,64	-	-
2012	67,21	0,57	0,86
2013	68,02	0,81	1,21
2014	68,78	0,76	1,12
2015	69,49	0,71	1,03
2016	69,98	0,49	0,71
2017	70,52	0,54	0,77
2018	71,12	0,60	0,85
Rata-rata	69,30	0,64	0,93

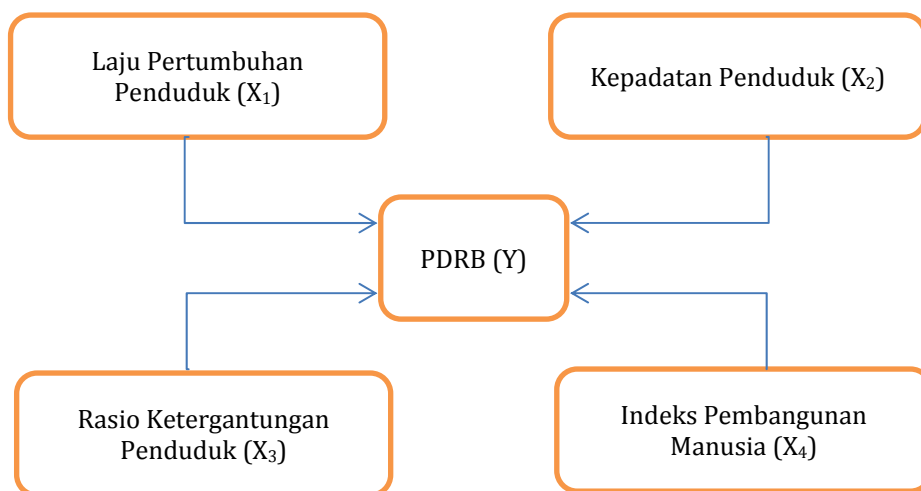
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019

IPM Jawa Tengah meningkat dari 66,64 pada tahun 2011 menjadi 71,12 pada tahun 2018. Selama periode tersebut, IPM Jawa Tengah rata-rata tumbuh sebesar 0,93 persen per tahun. Pertumbuhan IPM Jawa Tengah tertinggi terjadi pada tahun 2012-2013, yaitu 1,21 persen, sedangkan terendah terjadi pada tahun 2015-2016, yaitu 0,71 persen. Pada periode 2011-2016 IPM Jawa Tengah masih tergolong sedang, yaitu berada pada kisaran 66 hingga 69-an. Namun, pada tahun 2018 IPM Jawa Tengah mengalami kenaikan mencapai 71,12. Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Tengah menunjukkan kemajuan yang besar. Pada tahun itu IPM Jateng lebih unggul daripada Jawa Timur yang sebesar 70,77 dan hampir mendekati IPM Nasional yang sebesar 71,39. Di pulau Jawa, IPM tertinggi terdapat pada DKI Jakarta (80,47), selanjutnya DI Yogyakarta (79,53), Banten (71,59), Jawa Barat (71,30), dan Jawa Tengah (71,12).

## Pengaruh Variabel-Variabel Demografi terhadap PDRB

Dalam tinjauan ekonomi makro, PDB atau PDRB merupakan salah satu parameter atau indikator kinerja perekonomian suatu negara atau wilayah. Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa penduduk merupakan bagian dari sumber daya manusia yang menjadi faktor penting dalam pembangunan ekonomi karena dapat menjadi katalisator kinerja perekonomian. Oleh karena itu, variabel-variabel yang tercakup di dalam ruang lingkup kependudukan (demografi) menjadi penting untuk dianalisis seberapa besar peranan dan pengaruhnya terhadap kinerja perekonomian.

Variabel-variabel demografi terpilih yang dianalisis tersebut meliputi laju pertumbuhan penduduk, kepadatan penduduk, rasio ketergantungan, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Untuk menggambarkan pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap kinerja perekonomian dapat dimodelkan pada Gambar 1 di bawah ini.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Beberapa riset terdahulu menjelaskan pengaruh variabel-variabel demografi terhadap kinerja perekonomian. Rosyetti (2009) menyimpulkan bahwa pertumbuhan penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perekonomian di Kabupaten Kuantan Singingi, yang diukur dengan PDRB, pendapatan perkapita, maupun kesempatan kerja. Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat didominasi oleh tingginya tingkat fertilitas. Sejalan dengan hasil riset tersebut, maka hipotesis yang dapat diambil adalah:

$H_1$ : Pertumbuhan penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perekonomian Provinsi Jawa Tengah.

Selanjutnya, Fitriani, Militina, dan Effendi (2012) menyimpulkan bahwa kepadatan penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi kepadatan penduduk di suatu wilayah, maka semakin tinggi pertumbuhannya. Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi terpadat ketiga se-Indonesia dengan rata-rata kepadatan sebesar 1.060 jiwa/km<sup>2</sup>. Oleh karena itu, sejalan dengan hasil riset ini, maka dapat diambil hipotesis sebagai berikut:

H<sub>2</sub>: Kepadatan penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perekonomian Provinsi Jawa Tengah.

Menurut Hasibuan (2014) rasio ketergantungan penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi persentase rasio beban tanggungan menunjukkan semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi dan akan semakin rendah pertumbuhan ekonomi yang dicapai. Hal ini dikarenakan tingkat jumlah penduduk yang tidak produktif semakin tinggi. Rasio ketergantungan Provinsi Jawa Tengah menurun dari 48,47 persen pada tahun 2011 menjadi 47,63 persen pada tahun 2018. Merujuk hasil riset ini, maka hipotesis yang dapat diambil adalah:

H<sub>3</sub>: Rasio ketergantungan penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja perekonomian Provinsi Jawa Tengah.

Di samping itu, Nurmainah (2013) menyimpulkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya, semakin tinggi angka IPM maka semakin tinggi pertumbuhannya. Provinsi Jawa Tengah memiliki nilai IPM yang tinggi termasuk ke dalam kategori menengah ke atas. Sejalan dengan riset tersebut, maka dapat diambil hipotesis sebagai berikut:

H<sub>4</sub>: Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perekonomian Provinsi Jawa Tengah.

### **Teknik Analisis Data**

Data yang digunakan adalah data panel, yaitu merupakan data gabungan antara data lintas waktu (*time series*) dan data lintas individu (*cross section*) (Widarjono, 2009; Basrowi, 2007). Untuk memilih model terbaik, apakah *Fixed Effect Model* (FEM), *Common Effect Model* (CEM), atau *Random Effect Model* (REM), maka dilakukan serangkaian uji, yaitu Uji *Chow* dan Uji *Hausman* (Gujarati & Porter, 2008; Winarno, 2015). Hasil yang diperoleh dari serangkaian uji tersebut adalah bahwa model estimasi data panel yang terbaik adalah *Fixed Effect Model* (FEM).



Secara rinci, dapat dijelaskan bahwa Uji *Chow* dimaksudkan untuk memilih model terbaik, apakah CEM atau FEM. Hasilnya menunjukkan bahwa FEM adalah yang dipilih karena berdasarkan hasil uji *Chow* bahwa nilai probabilitas *Chi-square* menunjukkan 0,00 yang berarti  $H_0$  ditolak, sehingga model yang dipilih adalah FEM (lihat Tabel 6).

**Tabel 6.** Hasil Uji *Chow*

<i>Effect Test</i>	<i>Prob.</i>
<i>Cross-section F</i>	0,0000
<i>Cross-section Chi-square</i>	0,0000

*Sumber: Eviews 10, data diolah*

Selanjutnya, uji Hausman dilakukan untuk memilih model terbaik, apakah FEM atau REM. Hasil uji menunjukkan bahwa nilai probabilitas *Chi-square* adalah 0,00, yang berarti  $H_0$  ditolak, sehingga model yang dipilih adalah tetap FEM (lihat Tabel 7).

**Tabel 7.** Hasil Uji *Chow*

<i>Effect Test</i>	<i>Chi-square</i>	<i>Prob.</i>
<i>Cross-section F</i>	80,139153	0,0000

*Sumber: Eviews 10, data diolah*

Model FEM terpilih kemudian diinterpretasikan hasilnya. Sebelumnya, uji asumsi klasik telah meloloskan Model FEM ini di mana koefisien korelasi antarvariabel bebas tidak lebih dari 0,8, sehingga dapat disimpulkan bahwa model tidak memiliki masalah multikolinieritas (lihat Tabel 8). Uji uji heteroskedastisitas dan autokorelasi tidak lagi diperlukan dalam analisis data panel (Gujarati & Porter, 2008; Basuki dan Prawoto, 2017).

**Tabel 8.** Hasil Uji Multikolinieritas

	$X_1$	$X_2$	$X_3$	$X_4$
$X_1$	1,000	-0,094	0,259	-0,140
$X_2$	-0,094	1,000	-0,681	0,671
$X_3$	0,259	-0,681	1,000	-0,713
$X_4$	0,140	0,671	-0,713	1,000

*Sumber: Eviews 10, data diolah.*

Analisis regresi panel FEM menyimpulkan bahwa dalam persamaan umum variabel yang berpengaruh signifikan adalah laju pertumbuhan penduduk ( $X_1$ ), kepadatan penduduk ( $X_2$ ), dan Indeks Pembangunan Manusia ( $X_4$ ), sementara rasio ketergantungan penduduk ( $X_3$ ) tidak berpengaruh. Persamaan umum FEM dapat ditulis di bawah ini.

$$\hat{Y}_{it} = -28,012 + 0,046X_{1it} + 1,869X_{2it} - 0,368X_{3it} + 7,730X_{4it}$$

Persamaan umum tersebut disusun berdasarkan hasil regresi panel FEM yang terdapat pada Tabel 9 di bawah ini.

**Tabel 9.** Hasil Regresi *Fixed Effect Model (FEM)*

Variabel	Koefisien	Kesalahan Standar	t-hitung	Prob.
<i>intercept</i>	-28,012	2,698	-10,382	0,000
X <sub>1</sub>	0,046	0,017	2,708	0,007
X <sub>2</sub>	1,869	0,260	7,183	0,000
X <sub>3</sub>	-0,368	0,428	-0,860	0,391
X <sub>4</sub>	7,730	0,282	27,440	0,000
<i>R-squared</i>		0,995		
<i>Adjusted R-squared</i>		0,994		
<i>S.E. of regression</i>		0,050		
<i>F-statistic</i>		1247,962		
<i>Prob(F-statistic)</i>		0,000		

Sumber: *Eviews 10*, data diolah.

Nilai *Adjusted R-squared* sebesar 0,994 artinya variasi variabel kinerja perekonomian dapat dijelaskan oleh variasi variabel-variabel demografi yang ada dalam model sebesar 99,4 persen, sisanya sebesar 0,6 persen dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Hal ini berarti kemampuan menjelaskan variabel-variabel demografi di dalam model terhadap kinerja perekonomian sangat tinggi. Hal ini juga ditopang oleh hasil uji F yang signifikan, yaitu nilai F-hitung sebesar 1247,962 dengan probabilitas 0,00. Artinya, secara bersama-sama seluruh variabel demografi dalam model berpengaruh terhadap kinerja perekonomian.

Di samping itu, hasil penting lainnya adalah hasil uji t yang menunjukkan bahwa secara parsial, ketiga variabel demografi yang sudah dijelaskan sebelumnya (X<sub>1</sub>, X<sub>2</sub>, X<sub>4</sub>) berpengaruh signifikan terhadap kinerja perekonomian. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 9 bahwa nilai probabilitas untuk tiap-tiap variabel X<sub>1</sub>, X<sub>2</sub>, dan X<sub>4</sub> adalah di bawah 0,05.

Selanjutnya, karena yang digunakan adalah FEM, maka masing-masing *cross section* akan memiliki nilai *intercept* masing-masing, yaitu masing-masing kabupaten/kota akan memiliki nilai *intercept* yang unik. Nilai-nilai unik inilah yang akan memberikan dampak yang berbeda-beda terhadap kinerja perekonomian (variabel Y) sementara nilai koefisien regresi masing-masing variabel demografi (variabel X<sub>1</sub>, X<sub>2</sub>, X<sub>3</sub>, dan X<sub>4</sub>) selalu akan sama untuk semua *cross section* (kabupaten/kota). Di bawah ini ditampilkan secara urut dari terbesar ke terkecil nilai *intercept* dari masing-masing *cross section* (kabupaten/kota) (lihat Tabel 10).

**Tabel 10.** Nilai *Intercept* Tiap-Tiap Kabupaten/Kota (*Fixed Effect Model*)

Kabupaten/Kota	Intersep	$\beta_1$	$\beta_2$	$\beta_3$	$\beta_4$
Kota Magelang	-33,012262	0,045572	1,869391	-0,368299	7,729881
Kota Surakarta	-32,740798	0,045572	1,869391	-0,368299	7,729881
Kota Pekalongan	-32,335897	0,045572	1,869391	-0,368299	7,729881
Kota Tegal	-32,182043	0,045572	1,869391	-0,368299	7,729881
Kota Salatiga	-31,779738	0,045572	1,869391	-0,368299	7,729881
Kota Semarang	-29,63455	0,045572	1,869391	-0,368299	7,729881
Kab. Sukoharjo	-28,945295	0,045572	1,869391	-0,368299	7,729881
Kab. Klaten	-28,661309	0,045572	1,869391	-0,368299	7,729881
Kab. Demak	-27,9786	0,045572	1,869391	-0,368299	7,729881
Kab. Karanganyar	-27,919312	0,045572	1,869391	-0,368299	7,729881
Kab. Jepara	-27,783041	0,045572	1,869391	-0,368299	7,729881
Kab. Kudus	-27,74052	0,045572	1,869391	-0,368299	7,729881
Kab. Tegal	-27,638402	0,045572	1,869391	-0,368299	7,729881
Kab. Purbalingga	-27,539963	0,045572	1,869391	-0,368299	7,729881
Kab. Pekalongan	-27,517589	0,045572	1,869391	-0,368299	7,729881
Kab. Boyolali	-27,46379	0,045572	1,869391	-0,368299	7,729881
Kab. Semarang	-27,33594	0,045572	1,869391	-0,368299	7,729881
Kab. Magelang	-27,307397	0,045572	1,869391	-0,368299	7,729881
Kab. Pemasang	-27,300822	0,045572	1,869391	-0,368299	7,729881
Kab. Purworejo	-27,279814	0,045572	1,869391	-0,368299	7,729881
Kab. Banyumas	-27,272028	0,045572	1,869391	-0,368299	7,729881
Kab. Sragen	-27,250714	0,045572	1,869391	-0,368299	7,729881
Kab. Batang	-27,186629	0,045572	1,869391	-0,368299	7,729881
Kab. Temanggung	-27,165142	0,045572	1,869391	-0,368299	7,729881
Kab. Kebumen	-26,977094	0,045572	1,869391	-0,368299	7,729881
Kab. Wonosobo	-26,976071	0,045572	1,869391	-0,368299	7,729881
Kab. Kendal	-26,975391	0,045572	1,869391	-0,368299	7,729881
Kab. Banjarnegara	-26,842594	0,045572	1,869391	-0,368299	7,729881
Kab. Rembang	-26,832427	0,045572	1,869391	-0,368299	7,729881
Kab. Grobogan	-26,644804	0,045572	1,869391	-0,368299	7,729881
Kab. Pati	-26,604783	0,045572	1,869391	-0,368299	7,729881
Kab. Brebes	-26,396121	0,045572	1,869391	-0,368299	7,729881
Kab. Wonogiri	-25,99687	0,045572	1,869391	-0,368299	7,729881
Kab. Blora	-25,933284	0,045572	1,869391	-0,368299	7,729881
Kab. Cilacap	-25,271068	0,045572	1,869391	-0,368299	7,729881

Sumber: *Eviews 10*, data diolah.

Merujuk pada Tabel 10 bahwa Kabupaten Magelang memiliki nilai *intercept* tertinggi sementara Kabupaten Cilacap memiliki nilai *intercept* teren-

dah. Hal ini menunjukkan bahwa jika suatu kebijakan pemerintah dilakukan berkaitan dengan perlakuan terhadap salah satu atau beberapa variabel demografi tersebut ( $X_1$ ,  $X_2$ ,  $X_3$ , dan  $X_4$ ), di mana kebijakan tersebut berlaku sama untuk setiap kabupaten/kota, maka Kabupaten Magelang adalah kabupaten yang kinerja perekonomiannya memperoleh dampak terbesar sedangkan kinerja perekonomian Kabupaten Cilacap terdampak paling kecil atas perlakuan kebijakan tersebut. Contoh ini tepat jika kebijakan tersebut dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah yang berlaku sama untuk semua kabupaten/kota di wilayah Jawa Tengah.

Koefisien regresi laju pertumbuhan penduduk ( $X_1$ ) bernilai positif sebesar 0,046 menunjukkan bahwa jika laju pertumbuhan penduduk naik 1 persen maka kinerja perekonomian akan meningkat sebesar 0,046 persen. Interpretasi ini menggambarkan kondisi yang inelastis, artinya, percepatan laju pertumbuhan penduduk masih lebih besar daripada percepatan variabel dampaknya, yaitu kinerja perekonomian. Hal ini dapat diinterpretasikan juga bahwa pertumbuhan jumlah penduduk belum diiringi dengan produktivitas penduduk secara optimal sehingga dampaknya terhadap kinerja perekonomian juga belum optimal. Temuan ini sejalan dengan riset Rosyetti (2009) yang menyimpulkan bahwa pertumbuhan penduduk di Kabupaten Singingi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan ekonomi di mana keberhasilan pembangunan ekonomi yang dicapai dapat dilihat dari meningkatnya pendapatan perkapita dan kesempatan kerja. Namun demikian, menurut Jhingan (2004:97) dalam buku Malthus yang berjudul *Principles of Political Economy* bahwa pertumbuhan penduduk saja tidak cukup untuk berlangsungnya pembangunan ekonomi, bahkan pertumbuhan penduduk tersebut sebenarnya adalah hasil dari proses pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, pertumbuhan penduduk harus diiringi pula dengan kualitas penduduk.

Selanjutnya, koefisien regresi kepadatan penduduk bernilai positif sebesar 1,869 menunjukkan bahwa jika kepadatan penduduk naik 1 persen maka kinerja perekonomian akan meningkat sebesar 1,87 persen. Kondisi ini bersifat elastis, artinya penduduk yang semakin padat di Provinsi Jawa Tengah akan menyebabkan kinerja perekonomian juga akan meningkat semakin besar lagi. Untuk temuan ini, tentu harus sangat berhati-hati dalam menginterpretasikan karena kepadatan penduduk yang dimaksudkan di sini lebih bermakna pada tingginya aktivitas ekonomi yang terjadi. Semakin padat penduduk, maka diinterpretasikan semakin tinggi aktivitas perekonomian di wilayah tersebut. Hal ini sesuai dengan teori aglomerasi yang menjelaskan konsentrasi spasial dari aktivitas perekonomian di kawasan perkotaan atau pusat kota, sehingga di situ akan terjadi kepadatan penduduk yang lebih tinggi dibandingkan di daerah sekitarnya (*hinterland*) (Mills dan Hamilton, 1989). Dengan demikian,

semakin banyaknya aktivitas perekonomian di pusat kota tentu saja akan berdampak pada meningkatnya kinerja perekonomian di wilayah tersebut.

Temuan tersebut sejalan dengan riset Fitriani, Militina, dan Effendi (2012) yang menyimpulkan bahwa kepadatan penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perekonomian Provinsi Jawa Tengah. Wilayah yang semakin padat penduduknya dapat menghasilkan produksi barang dan jasa lebih banyak sehingga akan berpengaruh pada peningkatan pendapatan. Smith menyatakan bahwa penduduk yang bertambah besar akan memperluas pasar, maka akan meningkatkan spesialisasi dalam perekonomian tersebut. Pembagian kerja dan perkembangan spesialisasi akan mempercepat proses pembangunan ekonomi karena adanya spesialisasi akan meningkatkan produktifitas tenaga kerja dan mendorong perkembangan teknologi (Sukirno, 2010:12).

Variabel demografi yang berpengaruh selanjutnya adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Koefisien regresi IPM bernilai positif sebesar 7,730 menunjukkan bahwa jika IPM naik 1 persen (lihat Tabel 5), maka kinerja perekonomian akan meningkat sebesar 7,73 persen. Hal ini menunjukkan tingkat elastisitas yang tinggi di mana satu porsi kenaikan IPM berdampak sekitar tujuh kali kenaikan pada kinerja perekonomian. Artinya, berdasarkan temuan ini bahwa IPM menjadi variabel demografi yang sangat penting dalam rangka meningkatkan kinerja perekonomian di Provinsi Jawa Tengah. Seperti telah dijelaskan di awal bahwa terdapat tiga indikator utama atau dimensi dasar IPM yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak (BPS, 2019). Oleh karena itu, sudah seharusnya Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah umumnya dan Kabupaten/Kota di seluruh Jawa Tengah khususnya memprioritaskan pembangunan ekonomi di Jawa Tengah ini pada peningkatan IPM yang secara empiris telah memberikan dampak yang besar bagi kinerja perekonomian di Jawa Tengah secara umum.

Temuan ini mendukung riset Nurmainah (2013) bahwa IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. IPM dapat dilihat pada dimensi kesehatan, yaitu indikator usia harapan hidup saat lahir di Jawa Tengah mengalami peningkatan. Menurut BPS Jawa Tengah (2018), angka harapan hidup saat lahir mencapai 74,18. Dengan demikian secara rata-rata bayi yang lahir pada tahun 2018 diperkirakan dapat bertahan hidup sampai dengan usia 74,18 tahun. Pada dimensi pendidikan juga mengalami kemajuan, yaitu salah satunya indikator rata-rata lama sekolah di Jawa Tengah mencapai 7,35 tahun. Artinya, secara rata-rata penduduk usia 15 tahun keatas telah menempuh pendidikan selama 7,35 tahun atau sampai dengan kelas satu SMP/ sederajat. Di samping itu, indikator harapan lama sekolah di Jawa Tengah sudah mencapai 12,36, yang berarti bahwa secara rata-rata usia 7 tahun ke atas di Jawa Tengah dapat bersekolah hingga

12,36 tahun atau sampai dengan Diploma I. Pada dimensi kehidupan yang layak dapat dilihat pada indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan, di mana pengeluaran per kapita semakin meningkat. pengeluaran per kapita tercatat sebesar Rp10.777,00 pada tahun 2018.

## PENUTUP

Variabel-variabel demografi baik secara teori maupun empiris telah terbukti mampu mendorong kinerja perekonomian suatu negara atau wilayah. Dalam pembahasan ini dapat disimpulkan beberapa poin berikut ini. Pertama, laju pertumbuhan penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perekonomian Provinsi Jawa Tengah. Temuan ini sesuai dengan hipotesis (H<sub>1</sub>). Kedua, kepadatan penduduk juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perekonomian Provinsi Jawa Tengah. Hal ini juga sesuai dengan hipotesis (H<sub>2</sub>). Ketiga, rasio ketergantungan penduduk tidak berpengaruh terhadap kinerja perekonomian Provinsi Jawa Tengah, sehingga tidak sesuai dengan hipotesis (H<sub>3</sub>). Keempat, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perekonomian Provinsi Jawa Tengah. Temuan ini juga sesuai dengan hipotesis (H<sub>4</sub>).

Beberapa hal yang dapat diimplikasikan adalah meliputi poin-poin berikut ini. Pertama, pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/ Kota di wilayah Jawa Tengah harus meningkatkan lagi produktivitas penduduknya serta menyediakan sarana dan prasarana yang lebih memadai untuk mendukung kontribusi dan peran serta penduduk dalam pembangunan ekonomi, terutama yang menunjang kualitas hidup masyarakat/penduduk. Kedua, padatnya penduduk harus diikuti pula dengan penambahan modal untuk penyediaan teknologi mesin yang lebih modern agar produksi barang dan jasa dapat lebih efisien. Di samping itu, padatnya penduduk juga mesti diimbangi dengan peningkatan program pelatihan keterampilan usaha bagi mereka agar kualitas sumber daya manusia semakin meningkat sehingga produktivitas tenaga kerja juga meningkat. Padatnya penduduk juga diimbangi dengan memfasilitasi penyediaan lapangan pekerjaan, misalnya melalui *Job Fair* agar semakin banyak penduduk yang terserap pada pasar tenaga kerja. Ketiga, berkaitan dengan IPM, maka pemerintah dapat lebih meningkatkan program dan kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas penduduk, seperti fokus pada pembangunan dimensi umur panjang dan hidup sehat yang dapat menjadi potensi besar bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Semakin banyak penduduk yang sehat maka akan semakin banyak penduduk yang dapat hidup secara layak sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan produksinya yang kelak berdampak pada kenaikan pendapatannya.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Adioetomo, S.M & Omas, B.S. (2010). *Dasar-Dasar Demografi* (Ed. 2). Jakarta: Salemba Empat.
- Basrowi, S. (2007). *Metode Analisis Data Sosial*. Kediri: CV Jenggala Pustaka Utama.
- Bank Indonesia. (2019). *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)*. Retrieved from <https://www.bi.go.id/statistic/metadata/sekda/Documents>.
- BPS. (2019). *PDRB Provinsi-Provinsi di Indonesia Menurut Lapangan Usaha, 2014-2018*. Retrieved from <https://bps.go.id/publication.html>.
- Basuki, A.T. dan Prawoto, N. (2017). *Analisis Regresi dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis: Dilengkapi Aplikasi SPSS & EViews*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Fitriani, N., Militina, T., & Effendi, A.S. (2012). Pengaruh Faktor Demografi dan Investasi Swasta Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Mulawarman*. Volume 10, Nomor 1, hlm. 46-58. Retrieved from <https://doi.org/10.22219/jep.v10i1.3715>.
- Gujarati, D. & Porter, D.C. (2008). *Basic Econometrics* (Ed. 5). McGraw-Hill/Irwin Companies.
- Irawan dan Suparmoko, M. (2016). *Ekonomika Pembangunan* (Ed. 6). Yogyakarta: BPFE.
- Kominfo (2015). *Siapa Mau Bonus? Peluang Demografi Indonesia*. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
- Mantra, B.I. (2003). *Demografi Umum* (Ed. 2). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mills, E.S. & Hamilton, B.W. (1989). *Urban Economic* (Fourth ed.). London: Harper Collin.
- Nurmainah, S. (2013). Analisis Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Daerah, Tenaga Kerja Terserap dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan (Studi Kasus 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal Bisnis dan Ekonomi FE Universitas Diponegoro*, Volume 20. Nomor 2, hlm. 131-141. Retrieved from <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fe3/article/view/3158>.
- Rosyetti (2009). Studi Keterkaitan Pertumbuhan Penduduk dengan Pembangunan Ekonomi di Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Ilmu Ekonomi FE Universitas Riau*, Volume 17, Nomor 2, hlm 51-63. Retrieved from <https://ejournal.unri.ac.id>.
- Samuelson, P.A. & Nordhaus, W.D. (2004). *Ilmu Makroekonomi*. Jakarta: PT. Media Global Edukasi.
- Widarjono, A. (2009). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasi*. Yogyakarta: EKONISIA.
- Winarno, W.W. (2015). *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews* (Ed.4). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

---

## ***LOCAL IDENTIFICATION SPATIAL ASSOCIATION (LISA)*** **TENAGA KERJA PROPINSI JAWA TENGAH**

**Caroline, Ety Puji Lestari, Ceasilia Srimindarti**

### **PENDAHULUAN**

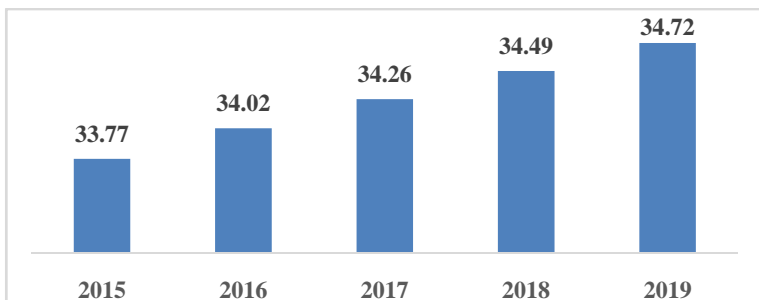
Tenaga kerja Propinsi Jawa Tengah dengan tingkat pendidikan dan keterampilan tertentu berkeinginan untuk melakukan migrasi keluar Propinsi Jawa Tengah dalam bentuk Tenaga Kerja di Propinsi Jawa Tengah. Ada beberapa faktor pendorong tenaga kerja melakukan migrasi keluar Propinsi Jawa Tengah adalah jumlah penduduk yang banyak, tingkat pengangguran yang terjadi di daerah asal, tingkat kemiskinan di daerah asal. Penduduk Propinsi Jawa Tengah dari tahun 2015 sampai dengan 2019 terus meningkat, yaitu 33,77 juta jiwa; 34,02 juta jiwa; 34,26 juta jiwa; 34,49 juta jiwa, dan 34,72 juta jiwa. Peningkatan jumlah penduduk yang banyak di Propinsi Jawa Tengah membawa konsekuensi adanya persaingan kerja yang ketat, lapangan pekerjaan yang terbatas mendorong tenaga kerja melakukan migrasi ke wilayah lain. Lapangan pekerjaan yang minim, banyak orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan sehingga tidak adanya penghasilan yang mencukupi kebutuhan memaksa mereka menjadi miskin. Faktor kemiskinan inilah yang mendorong pekerja untuk berpindah ke wilayah lain dengan tujuan untuk memperoleh penghasilan yang layak untuk kehidupan mereka.

Gambar 2 menampakkan adanya garis kemiskinan yang meningkat di Propinsi Jawa Tengah dari tahun 2005 sampai dengan 2019. Garis kemiskinan Propinsi Jawa Tengah dari tahun 2005 sampai dengan 2019 terus meningkat yaitu 309.314 rupiah/kapita/bulan; 322.748 rupiah/kapita/bulan; 338.815 rupiah/kapita/bulan; 357.825 rupiah/kapita/bulan, dan 381.992 rupiah/kapita/bulan tahun 2019.

Pertumbuhan ekonomi Propinsi Jawa Tengah dari tahun 2016 sampai dengan 2019 yang terus meningkat membawa konsekuensi pada tingginya tingkat pengangguran terbuka di Propinsi Jawa Tengah dari tahun 2016 sampai dengan 2019. Pertumbuhan ekonomi Propinsi Jawa Tengah 2015 ada 5,47 persen dengan tingkat pengangguran terbuka 4,99 persen; kemudian pertumbuhan ekonomi Propinsi Jawa Tengah 2016 menurun menjadi 5,25 persen dengan tingkat pengangguran terbuka 4,63 persen; pertumbuhan ekonomi Propinsi Jawa Tengah 2017 ada 5,26 persen dengan tingkat pengangguran terbuka 4,57 persen; Pertumbuhan ekonomi Propinsi Jawa Tengah 2018

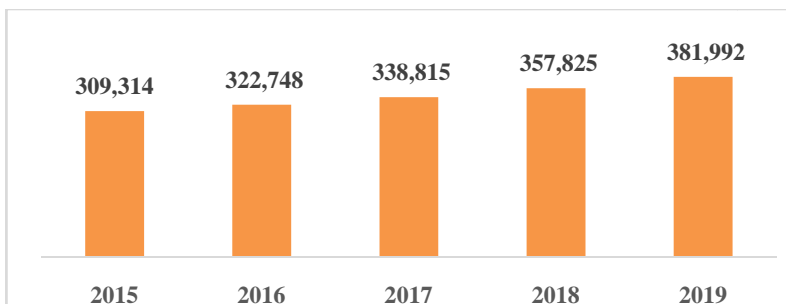


ada 5,31 persen dengan tingkat pengangguran terbuka 4,51 persen, dan pertumbuhan ekonomi Propinsi Jawa Tengah 2019 ada 5,41 persen dengan tingkat pengangguran terbuka 4,49 persen.



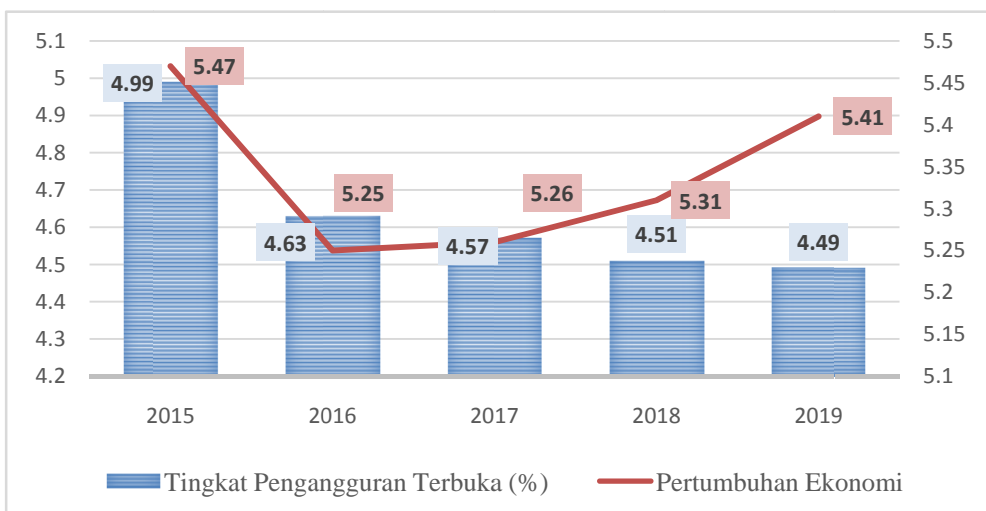
Sumber : Beberapa Indikator Jawa Tengah Januari 2020

**Gambar 1.** Jumlah Penduduk Jawa Tengah (Juta)



Sumber : Beberapa Indikator Jawa Tengah Januari 2020

**Gambar 2.** Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bulan) Propinsi Jawa Tengah



Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka 2020, diolah

**Gambar 3.** Peertumbuhan Ekonomi, dan Tingkat Pengangguran Terbuka Jawa Tengah Tahun 2015 s.d. 2019 (%)

## PEMBAHASAN

Tabel 1 menampakkan adanya pola interaksi spasial yang tenaga kerja kuat (HH) antar kabupaten/kota di Jawa Tengah. Hal ini ditunjukkan bahwa Kabupaten Cilacap, Kabupaten Demak, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati, Kota Semarang, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Semarang dengan karakteristik tenaga kerja tinggi berinteraksi spasial dengan kabupaten/kota yang karakteristik tenaga kerjanya tinggi. Pola interaksi yang lemah terjadi pada Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Batang, Kabupaten Blora, Kota Magelang, Kabupaten Karanganyar, Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Rembang.

**Tabel 1.** Pola Interaksi Spasial Tenaga Kerja Jawa Tengah Tahun 2015

HH	LL
Kabupaten Cilacap	Kabupaten Banjarnegara
Kabupaten Demak	Kabupaten Batang
Kabupaten Banyumas	Kabupaten Blora
Kabupaten Jepara	Kota Magelang
Kabupaten Pati	Kabupaten Karanganyar
Kota Semarang	Kota Pekalongan
Kabupaten Tegal	Kabupaten Pekalongan
Kabupaten Semarang	Kabupaten Temanggung
	Kabupaten Wonosobo
	Kabupaten Purworejo
	Kabupaten Rembang

Sumber : Data diolah dengan Stata 14

Gambar 4 menampakkan adanya peta kluster LISA tenaga kerja Hot Spot yang berwarna merah dan Cold Spot yang berwarna hijau. Kabupaten/kota yang termasuk dalam kluster Hot Spot adalah Kabupaten Cilacap, Kabupaten Demak, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati, Kota Semarang, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Semarang, sedangkan kabupaten/kota yang termasuk kluster LISA Tenaga Kerja Cold Spot adalah Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Batang, Kabupaten Blora, Kota Magelang, Kabupaten Karanganyar, Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Rembang.



Sumber : Data diolah dengan GeoDa 1.14 yang release agustus 2019

**Gambar 4.** Peta Kluster Lisa Tenaga Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah 2015

Tabel 2 menampakkan adanya pola interaksi spasial yang tenaga kerja kuat (HH) antar kabupaten/kota di Jawa Tengah. Hal ini ditunjukkan bahwa Kabupaten Cilacap, Kabupaten Demak, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Jepara, Kabupaten Kebumen, Kota Semarang, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Semarang, Kabupaten Sukoharjo dengan karakteristik tenaga kerja tinggi berinteraksi spasial dengan kabupaten/kota yang karakteristik tenaga kerjanya tinggi. Pola interaksi spasial tenaga kerja yang rendah (LL) ditampakkan oleh Kabupaten Batang, Kabupaten Blora, Kota Magelang, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Pati, Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Purworejo, dan Kabupaten Rembang dengan karakteristik tenaga kerja rendah berinteraksi spasial dengan kabupaten/kota yang karakteristik tenaga kerjanya rendah.

Gambar 5 menampakkan adanya peta kluster LISA tenaga kerja *Hot Spot* yang berwarna merah dan *Cold Spot* yang berwarna hijau. Kabupaten/kota yang termasuk dalam kluster *Hot Spot* adalah Kabupaten Cilacap, Kabupaten Demak, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Jepara, Kabupaten Kebumen, Kota Semarang, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Semarang, Kabupaten Sukoharjo, sedangkan kabupaten/kota yang termasuk kluster LISA Tenaga Kerja *Cold Spot* adalah Kabupaten Batang, Kabupaten Blora, Kota Magelang, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Pati,

Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Purworejo, dan Kabupaten Rembang.

**Tabel 2.** Pola Interaksi Spasial Tenaga Kerja Jawa Tengah Tahun 2016

HH	LL
Kabupaten Cilacap	Kabupaten Batang
Kabupaten Demak	Kabupaten Blora
Kabupaten Banjarnegara	Kota Magelang
Kabupaten Banyumas	Kabupaten Karanganyar
Kabupaten Jepara	Kabupaten Pati
Kabupaten Kebumen	Kota Pekalongan
Kota Semarang	Kabupaten Pekalongan
Kabupaten Pemalang	Kabupaten Temanggung
Kabupaten Tegal	Kabupaten Wonosobo
Kabupaten Semarang	Kabupaten Purworejo
Kabupaten Sukoharjo	Kabupaten Rembang

Sumber : Data diolah dengan Stata 14



Sumber : Data diolah dengan GeoDa 1.14 yang release agustus 2019

**Gambar 5.** Peta Kluster Lisa Tenaga Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah 2016

Tabel 3 menampakkan adanya pola interaksi spasial yang tenaga kerja kuat (HH) antar kabupaten/kota di Jawa Tengah. Hal ini ditunjukkan bahwa Kabupaten Cilacap, Kabupaten Demak, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati, Kota Semarang, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Semarang dengan karakteristik tenaga kerja tinggi berinteraksi spasial dengan kabupaten/kota yang karakteristik tenaga kerjanya tinggi. Pola interaksi spasial tenaga kerja yang rendah ditampakkan oleh Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Batang, Kabupaten Blora, Kota Surakarta, Kabupaten Karanganyar, Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Rembang, dan Kabupaten Sukoharjo dengan karakteristik tenaga kerja rendah berinteraksi spasial dengan kabupaten/kota yang karakteristik tenaga kerjanya rendah.

**Tabel 3.** Pola Interaksi Spasial Tenaga Kerja Jawa Tengah Tahun 2017

HH	LL
Kabupaten Cilacap	Kabupaten Banjarnegara
Kabupaten Demak	Kabupaten Batang
Kabupaten Banyumas	Kabupaten Blora
Kabupaten Jepara	Kota Magelang
Kabupaten Pati	Kabupaten Karanganyar
Kota Semarang	Kota Pekalongan
Kabupaten Pemalang	Kota Surakarta
Kabupaten Tegal	Kabupaten Pekalongan
Kabupaten Semarang	Kabupaten Temanggung
	Kabupaten Wonosobo
	Kabupaten Purworejo
	Kabupaten Rembang
	Kabupaten Sukoharjo

*Sumber* : Data diolah dengan Stata 14

Gambar 6 menampakkan adanya peta kluster LISA tenaga kerja *Hot Spot* yang berwarna merah dan *Cold Spot* yang berwarna hijau. Kabupaten/kota yang termasuk dalam kluster Hot Spot adalah Kabupaten Cilacap, Kabupaten Demak, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati, Kota Semarang, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Semarang, sedangkan kabupaten/kota yang termasuk kluster LISA Tenaga Kerja Cold Spot adalah Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Batang, Kabupaten Blora, Kota Surakarta, Kabupaten Karanganyar, Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Rembang, dan Kabupaten Sukoharjo.



Sumber : Data diolah dengan GeoDa 1.14 yang release agustus 2019

**Gambar 6.** Peta Kluster Lisa Tenaga Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah 2017

Tabel 5 menampakkan adanya pola interaksi spasial yang tenaga kerja kuat (HH) antar kabupaten/kota di Jawa Tengah. Hal ini ditunjukkan bahwa Kabupaten Cilacap, Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati, Kota Semarang, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Semarang dengan karakteristik tenaga kerja tinggi berinteraksi spasial dengan kabupaten/kota yang karakteristik tenaga kerjanya tinggi. Pola interaksi spasial tenaga kerja yang rendah (LL) ditampakkan oleh Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Batang, Kabupaten Blora, Kota Magelang, Kabupaten Karanganyar, Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Rembang, dan Kabupaten Sukoharjo dengan karakteristik tenaga kerja rendah berinteraksi spasial dengan kabupaten/kota yang karakteristik tenaga kerjanya rendah.

Gambar 7 menampakkan adanya peta kluster LISA tenaga kerja Hot Spot yang berwarna merah dan *Cold Spot* yang berwarna hijau. Kabupaten/kota yang termasuk dalam kluster Hot Spot adalah Kabupaten Cilacap, Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati, Kota Semarang, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Semarang, sedangkan kabupaten/kota yang termasuk kluster LISA Tenaga Kerja Cold Spot adalah Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Batang, Kabupaten Blora, Kota Magelang, Kabupaten Karanganyar, Kota Pekalongan, Kabupaten Peka-

longan, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Rembang, dan Kabupaten Sukoharjo.

**Tabel 5.** Pola Interaksi Spasial Tenaga Kerja Jawa Tengah Tahun 2018

HH	LL
Kabupaten Cilacap	Kabupaten Banjarnegara
Kabupaten Demak	Kabupaten Batang
Kabupaten Grobogan	Kabupaten Blora
Kabupaten Jepara	Kota Magelang
Kabupaten Pati	Kabupaten Karanganyar
Kota Semarang	Kota Pekalongan
Kabupaten Pemalang	Kabupaten Pekalongan
Kabupaten Tegal	Kabupaten Temanggung
Kabupaten Semarang	Kabupaten Wonosobo
	Kabupaten Purworejo
	Kabupaten Rembang
	Kabupaten Sukoharjo

Sumber : Data diolah dengan Stata 14



**Gambar 7.** Peta Kluster Lisa Tenaga Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah 2018

Sumber : Data diolah dengan GeoDa 1.14 yang release agustus 2019

Tabel 6 menampakkan adanya pola interaksi spasial yang tenaga kerja kuat (HH) antar kabupaten/kota di Jawa Tengah. Hal ini ditunjukkan bahwa Kabupaten Cilacap, Kabupaten Demak, Kabupaten Pati, Kabupaten Jepara, Kota Semarang, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Semarang dengan karakteristik tenaga kerja tinggi berinteraksi spasial dengan kabupaten/kota yang karakteristik tenaga kerjanya tinggi. Pola interaksi spasial tenaga kerja (LL) yang rendah ditampakkan oleh Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Batang, Kabupaten Blora, Kota Magelang, Kabupaten Karanganyar, Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Rembang, dan Kabupaten Sukoharjo dengan karakteristik tenaga kerja rendah berinteraksi spasial dengan kabupaten/kota yang karakteristik tenaga kerjanya rendah.

**Tabel 6.** Pola Interaksi Spasial Tenaga Kerja Jawa Tengah Tahun 2019

HH	LL
Kabupaten Cilacap	Kabupaten Banjarnegara
Kabupaten Demak	Kabupaten Batang
Kabupaten Pati	Kabupaten Blora
Kabupaten Banyumas	Kota Magelang
Kabupaten Jepara	Kabupaten Karanganyar
Kota Semarang	Kota Pekalongan
Kabupaten Pemalang	Kabupaten Pekalongan
Kabupaten Tegal	Kabupaten Temanggung
Kabupaten Semarang	Kabupaten Wonosobo
	Kabupaten Purworejo
	Kabupaten Rembang
	Kabupaten Sragen
	Kabupaten Sukoharjo

*Sumber:* Data diolah dengan Stata 14

Gambar 7 menampakkan adanya peta kluster LISA tenaga kerja Hot Spot yang berwarna merah dan Cold Spot yang berwarna hijau. Kabupaten/kota yang termasuk dalam kluster Hot Spot adalah Kabupaten Cilacap, Kabupaten Demak, Kabupaten Pati, Kabupaten Jepara, Kota Semarang, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Semarang, sedangkan kabupaten/kota yang termasuk kluster LISA Tenaga Kerja Cold Spot adalah Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Batang, Kabupaten Blora, Kota Magelang, Kabupaten Karanganyar, Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Rembang, dan Kabupaten Sukoharjo.



Pola Distribusi LISA Tenaga Kerja dari tahun 2015 sampai dengan 2019 dengan karakteristik tenaga kerja yang tinggi berinteraksi spasial dengan kabupaten/kota yang karakteristik tenaga kerja tinggi tidak mengalami perubahan pola interaksi spasial tenaga kerja yang kuat. Ada delapan Kabupaten/Kota dengan pola interaksi spasial tenaga kerja kuat yaitu Kabupaten Cilacap, Kabupaten Demak, Kabupaten Pati, Kabupaten Jepara, Kota Semarang, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Semarang.



Sumber : Data diolah dengan GeoDa 1.14 yang release agustus 2019

**Gambar 8.** Peta Kluster Lisa Tenaga Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah 2019

Pola Distribusi LISA Tenaga Kerja yang lemah tahun 2015 dan tahun 2018 tidak mengalami perubahan ada 11 kabupaten/kota yaitu Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Batang, Kabupaten Blora, Kota Magelang, Kabupaten Karanganyar, Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Purworejo, dan Kabupaten Rembang. Perubahan pola interaksi spasial tenaga kerja yang lemah terjadi di tahun 2019 yaitu Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Batang, Kabupaten Blora, Kota Magelang, Kabupaten Karanganyar, Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Rembang, dan Kabupaten Sukoharjo.

Perubahan pola interaksi spasial tenaga kerja di Propinsi Jawa Tengah diduga karena adanya perbedaan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang berbeda antara satu kabupaten/kota yang satu dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) kabupaten/kota lainnya tahun 2015, dan tahun 2019. Tabel 7 tampak bahwa Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2015 hanya Kota Semarang yang nilai upahnya diatas Upah Minimum Propinsi (UMP) Jawa Tengah (Rp. 1.605.396,00) , yaitu Rp. 1.685.000, 00. Tahun 2019

Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2019 ada 21 Kabupaten/Kota yang UMK lebih besar dari UMP yaitu Kota Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Kendal, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kudus, Kabupaten Cilacap, Kota Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten Magelang, Kabupaten Jepara, Kota Salatiga, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Karanganyar, Kota Surakarta, Kabupaten Klaten, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Sukoharjo, Kota Tegal, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Tegal, Kabupaten Pati.

**Tabel 7.** Upah Minimum Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah Tahun 2015, dan 2019 (dalam rupiah)

No.	UMK 2015	UMK 2019
1	Kota Semarang 1.685.000,00	Kota Semarang 2.495.587,53
2	Kab. Demak 1.535.000,00	Kab. Demak 2.240.000,00
3	Kabupaten Semarang 1.419.000,00	Kab. Kendal 2.084.393,48
4	Kab. Kendal 1.383.450,00	Kab. Semarang 2.055.000,00
5	Kabupaten Kudus 1.380.000,00	Kab. Kudus 2.044.467,75
6	Kota Pekalongan 1.291.000,00	Kab. Cilacap 1.989.058,08
7	Kota Salatiga 1.287.000,00	Kota Pekalongan 1.906.922,47
8	Kabupaten Cilacap: 1.287.000,00	Kab. Batang 1.900.000,00
9	Kabupaten Pekalongan 1.271.000,00	Kab. Magelang 1.882.000,00
10	Kabupaten Batang 1.270.000,00	Kab. Jepara 1.879.031,00
11	Kabupaten Magelang 1.255.000,00	Kota Salatiga 1.875.325,24
12	Kabupaten Karanganyar 1.226.000,00	Kab. Pekalongan 1.859.855,05
13	Kabupaten Sukoharjo 1.223.000,00	Kab. Karanganyar 1.833.000,00
14	Kota Surakarta 1.222.400,00	Kota Surakarta 1.802.700,00
15	Kota Magelang 1.211.000,00	Kab. Klaten 1.795.061,43
16	Kota Tegal 1.206.000,00	Kab. Boyolali 1.790.000,00
17	Kabupaten Boyolali 1.197.800,00	Kab. Purbalingga 1.788.500,00
18	Kabupaten Pemalang 1.193.400,00	Kab. Sukoharjo 1.783.500,00
19	Kabupaten Blora 1.180.000,00	Kota Tegal 1.762.000,00
20	Kabupaten Temanggung 1.178.000,00	Kab. Banyumas 1.750.000,00
21	Kabupaten Pati 1.176.500,00	Kab. Tegal 1.747.000,00
22	Kabupaten Klaten 1.170.000,00	Kab. Pati 1.742.000,00
23	Kabupaten Brebes 1.166.550,00	Kab. Pemalang 1.718.000,00
24	Kabupaten Wonosobo 1.166.000,00	Kab. Wonosobo 1.712.500,00
25	Kabupaten Purworejo 1.165.000,00	Kota Magelang 1.707.000,00
26	Kabupaten Grobogan 1.160.000,00	Kab. Purworejo 1.700.000,00
27	Kabupaten Kebumen 1.157.500,00	Kab. Blora 1.690.000,00
28	Kabupaten Tegal 1.155.000,00	Kab. Kebumen 1.686.000,00
29	Kabupaten Jepara 1.150.000,00	Kab. Grobogan 1.685.500,00

No.	UMK 2015	UMK 2019
30	Kabupaten Rembang 1.120.000,00	Kab. Temanggung 1.682.027,10
31	Kabupaten Banjarnegara 1.112.500,00	Kab. Sragen 1.673.500,00
32	Kabupaten Sragen 1.105.000,00	Kab. Brebes 1.665.850,00
33	Kabupaten Purbalingga 1.101.600,00	Kab. Rembang 1.660.000,00
34	Kabupaten Wonogiri 1.101.000,00	Kab. Wonogiri 1.655.000,00
35	Kabupaten Banyumas 1.100.000,00	Kab. Banjarnegara 1.610.000,00
<b>UMP Jawa Tengah 1.605.396,00</b>		<b>1.742.015,22</b>

Sumber : Kemenaker, diolah (2020)

Pekerja dengan tingkat pendidikan tertentu dan tingkat ketrempilan tertentu akan berpikir untuk melakukan migrasi ke daerah lain dengan tujuan untuk memperoleh tingkat penghasilan yang tinggi dari daerah asalnya. Kabupaten/Kota yang memiliki jarak yang dekat akan memiliki pengaruh yang kuat ketimbang kabupaten/kota dengan jarak yang jauh.

## PENUTUP

Perubahan pola interaksi spasial tenaga kerja yang lemah di Propinsi Jawa Tengah terjadi pada tahun 2019 pada Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Batang, Kabupaten Blora, Kota Magelang, Kabupaten Karanganyar, Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Rembang, dan Kabupaten Sukoharjo . Hal ini diduga karena tenaga kerja melakukan migrasi ke daerah lain akibat dari adanya perbedaan UMK dan UMP pada tahun 2019. Tahun 2019 Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2019 ada 21 Kabupaten/Kota yang UMK lebih besar dari UMP yaitu Kota Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Kendal, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kudus, Kabupaten Cilacap, Kota Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten Magelang, Kabupaten Jepara, Kota Salatiga, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Karanganyar, Kota Surakarta, Kabupaten Klaten, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Sukoharjo, Kota Tegal, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Tegal, Kabupaten Pati. Pekerja dengan tingkat pendidikan tertentu dan tingkat ketrempilan tertentu akan berpikir untuk melakukan migrasi ke daerah lain dengan tujuan untuk memperoleh tingkat penghasilan yang tinggi dari daerah asalnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anselin, L. (1995). Local indicators of spatial association—LISA. *Geographical analysis*, 27(2), 93-115.
- Caroline, C. Sugiyanto, F.X., Kurnia, A.S., (2019). The Impact Of Spillover Labor On The Economic Growth Of Central Java Province With Spatial

- Econometrics Model Approach. *International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET)* Volume 10, Issue 09, September 2019, pp. 16-26.
- Caroline, C., Sugiyanto, F.X., Kurnia, A.S., (2019). Local indicators of spatial association (LISA) of Indonesian workers. *Journal of Economics, Business, and Accountancy Ventura Vol. 22, No. 2, August - November 2019, pages 177 - 192.*
- Caroline, C., Sugiyanto, F.X., Kurnia, A.S., Etty Puji Leestari, Ceacilia Srimindarti, (2019). Dampak Spillover Pekerja Migran Indonesia (Pmi) Asal Jawa Tengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Propinsi Jawa Tengah. *Indicators Journal of Economics and Business Volume 1 Issue 2 Tahun 2019.*
- Caroline, C., Sugiyanto, F.X., Kurnia, A.S., Firmansyah, F. Human capital category interaction pattern to economic growth of asean member countries in 2015 by using GeoDa "geo-information technology data". *International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET)* Volume 8, Issue 11, November 2017, pp. 889-900.
- Caroline, Sugiyanto, Kurnia, A.S., Firmasyah (2018). Spatial Human Capital Interaction Pattern to Indonesian Economic Growth. *International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET)* Volume 9, Issue 1, January 2018, pp. 713-727.
- Dattorro, J. (2010). *Convex optimization & Euclidean distance geometry*. Lulu.com.
- Dube, J., & Legros, D. (2014). *Spatial Econometrics Using Microdata*: John Wiley and Sons, Inc.
- Fotheringham, A. S., Brunsdon, C., & Charlton, M. (2000). *Quantitative geography: perspectives on spatial data analysis*. Sage.
- Haining, R. P. (2003). *Spatial data analysis: theory and practice*. Cambridge University Press.
- Hugo, G. (1993). Indonesian labour migration to Malaysia: trends and policy implications. *Southeast Asian Journal of Social Science*, 21(1), 36-70.
- Kassim, A. (1997). International Migration and Its Impact on Malaysian. Makalah disampaikan pada Confidence Building and Conflict Reduction. 11th. ASPAC Rountable, Malaysia, 5-8 Juni 1997. <http://www.buruhmigran.net>
- Lucas, R. E. (1988). On the mechanics of economic development. *Journal of monetary economics*, 22(1), 3-42.
- Mathur, V. K. (1999). Human Capital-Based Strategy for Regional Economic Development. *Economic Development Quarterly, Vol. 13*(Issue 3), pp. 203-216. doi: 10.1177/089124249901300301

- Moretti, E. (2004). Workers' Education, Spillovers, and Productivity Evidence from Plant-Level Production Functions. *The American Economic Review*, Vol. 94(Issue 3), pp. 656-690.
- Romer, P. M. (1990). Endogenous Technological Change. *Journal of Political Economy*, Vol. 98(No. 5).
- Skeldon, R. (1997). Rural-to-urban migration and its implications for poverty alleviation. *Asia-Pacific Population Journal*, 12(1), 3-16.

---

## **ANALISIS EFISIENSI PENGELOLAAN SAMPAH PERKOTAAN DI INDONESIA (STUDI KASUS BEBERAPA KOTA BESAR DI INDONESIA)**

**Hastarini Dwi Atmanti, Evi Yulia Purwanti**

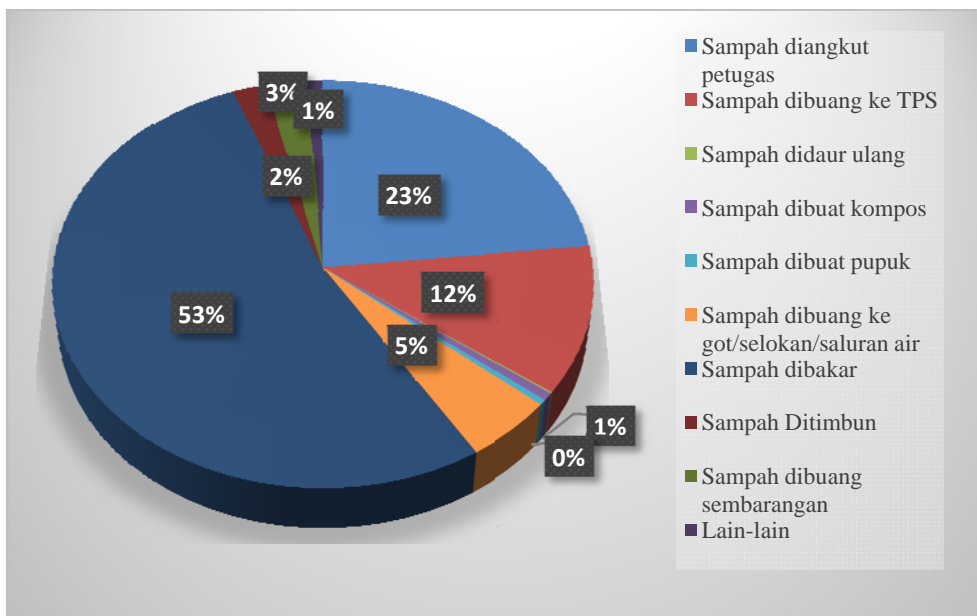
### **PENDAHULUAN**

Sampah merupakan salah satu masalah lingkungan yang dialami oleh banyak negara. Seiring meningkatnya jumlah penduduk, maka timbulan sampah juga meningkat (Kumar, 2016; Sujauddin dkk., 2008; Vieira dan Matheus, 2018). Sampah akan menjadi masalah, apabila pengelolaannya tidak sesuai dengan prosedur yang benar. Pengelolaan sampah yang tidak benar sebagai pemicu permasalahan lingkungan lebih lanjut (Juju, 2012). Malaria, diare, tipes dan penyakit kulit adalah penyakit yang dibawa oleh hewan dari tempat yang kotor seperti sampah yang berserakan dan dapat menjangkiti manusia (Ejaz dkk., 2010; Kafando dkk., 2013; Needhidasan dkk., 2014; Reddy, 2011). Selain penyakit, pengelolaan sampah dapat mengakibatkan banjir dan estetika lingkungan menjadi kurang baik.

Penelitian yang dilakukan oleh tim riset dan analisis katadata pada tahun 2019, menunjukkan bahwa setiap jam timbulan sampah berjumlah 7300 ton sampah, jika tidak dikelola, maka dalam satu jam tumpukan sampah dapat menutupi setengah dari tinggi Monas (tinggi monas adalah 132 m). Sehingga dalam satu hari, timbulan sampah yang dihasilkan sekitar 175ribu ton sampah dan dapat menimbun Stadion Utama Gelora Bung Karno dengan tinggi sekitar tiga kali lipat. Dalam 10 tahun, dengan asumsi yang sama, 640 juta ton sampah dapat menimbun sebagian Kota Jakarta dan tumpukan membentang dari Jl. Thamrin hingga Senayan setinggi lima kali tinggi Monas.

Pengelolaan sampah yang tidak benar, banyak terjadi di negara berkembang, termasuk di Indonesia (BPS, 2015; Hazra dan Goel, 2009; Henry dkk., 2006; Jambeck dkk., 2015; Khajuria dkk., 2008;). Pengelolaan sampah yang banyak dilakukan oleh rumah tangga di Indonesia adalah dengan dibuang ke sembarang tempat, dibuang ke got atau saluran air atau ke laut, sampah di bakar, sampah ditimbun, sampah dijual ke pengepul, sampah dibuat pupuk, sampah untuk pakan ternak, sampah di daur ulang dan sampah dibuang ke tempat sampah kemudian diangkut petugas kebersihan untuk bermuara ke

TPA (Tempat Pembuangan Akhir (BPS, 2015). Riset yang dilakukan oleh Sustainable Waste Indonesia pada tahun 2019, hanya sekitar 3 % sampah di Indonesia yang di daur ulang. Sisanya berakhir di TPA. Datanya adalah sebagai berikut.



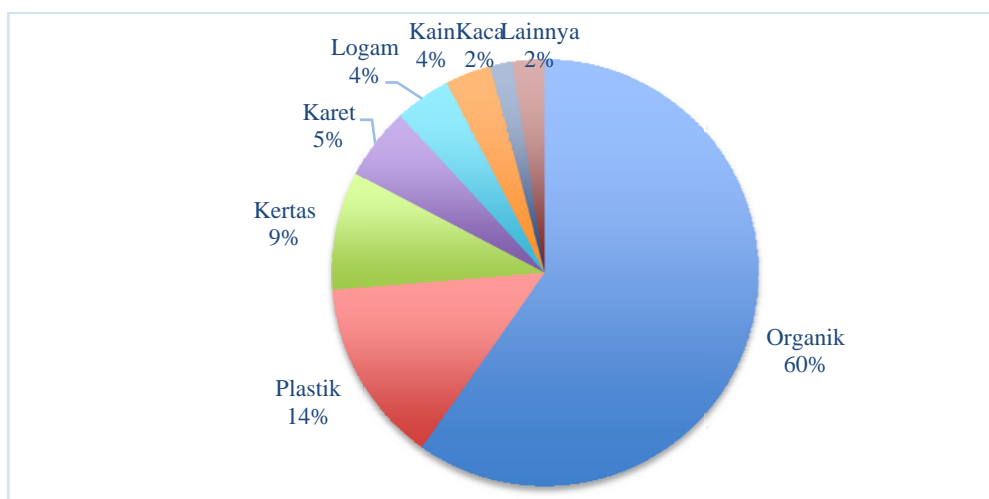
**Gambar 1.** Perlakuan Sampah yang Dilakukan oleh Rumah Tangga di Indonesia Tahun 2017  
*Sumber: BPS, 2018*

Pengelolaan sampah yang kurang baik dibuktikan oleh Jambeck, dkk. (2015), bahwa Indonesia menduduki peringkat ke-2 dunia, di mana sampah plastiknya berakhir di laut. Selain sampah plastik yang bermuara di laut, menurut BPS (2015), masih adanya kegiatan open dumping di Indonesia. Open dumping atau sampah yang dihamparkan kemudian ditimbun dengan pasir banyak dilakukan TPA di Indonesia (BPS, 2015). Menurut UU No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah, bahwa sistem open dumping dilarang karena sistem ini dapat memperpendek umur TPA. Luas TPA yang tetap, namun tumpukan sampah yang terus bertambah menyebabkan daya dukung TPA akan berkurang. Ledakan yang ditimbulkan oleh tumpukan sampah dapat menyebabkan korban jiwa. Sebagai contoh adalah di Kota Addis Ababa, Ethiopia, 113 orang menjadi korban longsor sampah pada tahun 2017, 200 orang meninggal di Filipina pada tahun 2000, tahun 2008 longsor sampah juga melanda Guatemala dengan 50 orang korban jiwa, kemudian 43 orang tewas di Medellin, Kolombia dan 13 orang korban jiwa di Cina pada tahun 2005. Longsor sampah juga terjadi di Indonesia pada tahun 2005. Peristiwa tersebut terjadi di TPA Leuwigajah, Cimahi, Jawa Barat. Korban yang

meninggal sebanyak 143 orang, 86 rumah lenyap dan 8,5 ha sawah lenyap ditimbun sampah.

Berdasarkan peristiwa tersebut, undang-undang pun mengatur pengelolaan sampah di TPA. Sanitary landfill merupakan pengelolaan sampah di TPA yang disarankan oleh UU No. 18/2008. Sistem ini berbiaya mahal dan sulit dipenuhi daerah (DPD-RI, 2017), sehingga banyak daerah yang memilih untuk menggunakan open dumping yang berbiaya murah, meskipun tidak sesuai dengan undang-undang.

Sampah yang dibuang meliputi sampah organik dan anorganik. Adapun komposisi sampah adalah sebagai berikut.



**Gambar 2.** Komposisi Sampah di Indonesia Berdasarkan Jenisnya Tahun 2017

Sumber: Widowati, 2019

Berdasarkan Gambar 2, sampah yang paling banyak dihasilkan adalah sampah organik. Kebiasaan rumah tangga di Indonesia adalah tidak memilah sampah antara sampah organik dan sampah anorganik, sejak dari sumbernya. Sampah langsung dibuang ke tempat sampah masing-masing rumah tangga. Tidak dipilahnya sampah ini karena beberapa alasan. Menurut BPS (2015) tidak dipilahnya sampah karena malas yaitu sebesar 47,14 %, tidak ada gunanya sebesar 27 %, tidak tahu sampah harus dipilah sebesar 22,33 %, tidak ada fasilitas sebesar 7,13 % dan tidak ada aturannya sebesar 1,80 %.

Mayoritas rumah tangga tidak memilah sampah dan langsung membuang sampahnya di tempat sampah dikenal dengan sindrom NIMBY (Not in My Back Yard). NIMBY merupakan sikap yang menjaga kebersihan hanya sebatas pada lingkungan terbatas yaitu rumah dan tanpa memperhatikan lingkungan yang lebih luas (Juju, 2012). Kegiatan pilah sampah dari rumah



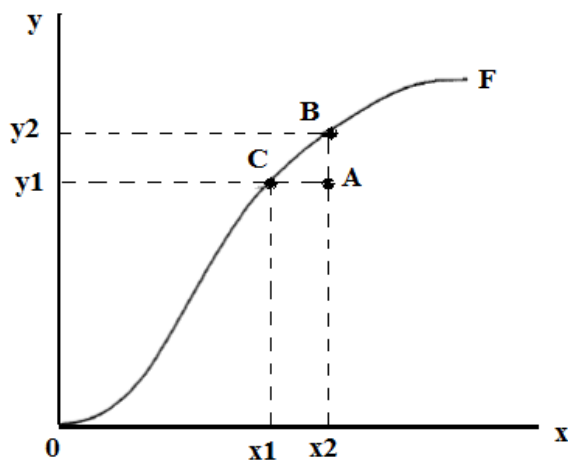
dapat mengurangi sampah sebesar 30 persen. Namun demikian, kegiatan pilah sampah harus dilakukan secara massif dan memerlukan dukungan dari masyarakat.

Masyarakat masih menganggap bahwa tanggung jawab untuk mengelola sampah adalah pemerintah. Selama ini masyarakat membayar retribusi sampah agar sampah yang ditimbulkan segera ditangani (diangkut ke TPA). Imbal balik kewajiban masyarakat dalam membayar retribusi sampah tidak diimbangi dengan baiknya layanan persampahan dari pemerintah.

Bentuk pelayanan pemerintah kepada masyarakat dalam mengelola sampah berupa penyediaan infrastruktur persampahan (Callan dan Thomas, 2013). Namun demikian, peran pemerintah dalam mengelola sampah hanya mencapai 40,09% di perkotaan dan 1,02% di perdesaan (Faizah, 2008). Penyediaan sarana dan prasarana persampahan masih terbatas dan tidak sebanding dengan timbulan sampah yang terjadi. Jumlah armada yang kurang, kurangnya tenaga kerja pengambil sampah, terbatasnya alat berat di TPA, terbatasnya jumlah TPS sebagai kendala pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah.

## PEMBAHASAN

Sharholy dkk. (2008) menyatakan bahwa pengelolaan sampah perkotaan menghadapi masalah yang kompleks. Mengingat lahan TPA yang terbatas dan rendahnya kegiatan pilah sampah serta daur ulang sampah yang dilakukan oleh rumah tangga di Indonesia. Oleh karena itu studi ini membahas bagaimana efisiensi pengelolaan sampah perkotaan di Indonesia.



**Gambar 3.** Batas (Frontier) Produksi dan Efisiensi Teknis  
*Sumber:* Coelli dkk. (2005)

Studi ini, hanya membahas mengenai efisiensi teknis. Efisiensi teknis diperkenalkan oleh Farrell pada tahun 1957. Efisiensi teknis berkaitan dengan kemampuan perusahaan memproduksi sejumlah output pada tingkat tertentu dengan menggunakan input minimum dan pada tingkat teknologi tertentu (Farrell, 1957). Kombinasi antara input yang digunakan dapat digambarkan pada Gambar 3 berikut. Misalnya input yang digunakan adalah  $x$  dan output yang dihasilkan adalah  $y$ . Kombinasi tersebut berada di sepanjang frontier produksi OF. Titik B dan C, berada pada frontier produksi, maka dikatakan efisien secara teknis. Sedangkan titik A, karena tidak berada pada frontier produksi, maka A dapat dikatakan tidak efisien secara teknis.

Alat analisis yang digunakan adalah *Data Envelopment Analysis* (DEA). DEA didasarkan pada programasi linear untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja relatif dari serangkaian *Decision Making Units* (DMU). Efisiensi yang diukur oleh analisis DEA memiliki karakter berbeda dengan konsep efisiensi pada umumnya. Pertama, efisiensi yang diukur adalah bersifat teknis, bukan ekonomis. Artinya, analisis DEA hanya memperhitungkan nilai absolut dari suatu variabel. Satuan dasar pengukuran yang mencerminkan nilai ekonomis dari tiap-tiap variabel seperti harga, berat, panjang, isi dan lainnya tidak dipertimbangkan. Oleh karenanya dimungkinkan suatu pola perhitungan kombinasi berbagai variabel dengan satuan yang berbeda-beda. Kedua, nilai efisiensi yang dihasilkan bersifat relatif, atau hanya berlaku dalam serangkaian *Decision Making Units* (DMU) yang diperbandingkan tersebut.

Ada dua model untuk mengukur efisiensi apabila menggunakan DEA, yaitu CCR yang dibuat oleh Charnes, Cooper dan Rhodes pada tahun 1978 (Charnes, Cooper, & Rhodes, 1978) dan BCC dibuat oleh Banker, Charnes dan Cooper pada tahun 1984 (Banker, Charnes, & Cooper, 1984). Model CCR diasumsikan sebagai *constant return to scale* (CRS). Jika ada input tambahan  $x$  kali, maka itu akan menghasilkan output yang akan meningkat  $x$  kali juga. Model BCC dianggap *variabel return to scale* (VRS). Jika ada input tambahan  $x$  kali, maka itu akan menghasilkan output dengan kenaikan atau penurunan dibandingkan dengan input tambahan.

Data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi data volume sampah yang terangkut ke TPA sebagai variabel output dan variabel inputnya adalah retribusi sampah, sarana transportasi pengangkut sampah, tenaga kerja pemungut sampah, Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan alat berat yang digunakan di TPA. Data retribusi sampah bersumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Data yang lain bersumber dari Statistik Lingkungan Hidup yang diterbitkan oleh BPS. Tahun analisis yang digunakan pada studi ini selama tiga tahun yaitu tahun 2016-2018. DMUnya adalah Banda Aceh, Medan, Jambi, Pekanbaru,

Bengkulu, Bandar Lampung, Pangkal Pinang, Tanjung Pinang, Jakarta, Serang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Mataram, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, Samarinda, Manado, Palu, Kendari, Gorontalo, Ambon, Ternate dan Jayapura. Karena keterbatasan data, maka tidak semua kota di Indonesia diteliti.

Formulasi DEA untuk analisis efisiensi pengelolaan sampah di kota besar di Indonesia adalah sebagai berikut:

$$\max_{\mu_k, v_i} \sum_{k=1}^p \mu_k y_{k0} - \mu_0 \quad (1)$$

Dengan batasan atau kendala:

$$\sum_{i=1}^m v_i x_{i0} = 1 \quad (2)$$

$$\sum_{k=1}^p \mu_k y_{kj} - \sum_{i=1}^m v_i x_{ij} - \mu_0 \leq 0 \quad (3)$$

$$\mu_k \geq \varepsilon, v_i \geq \varepsilon \quad (4)$$

$$j=1, \dots, n \quad (5)$$

$$k=1, \dots, p \quad (6)$$

$$i=1, \dots, m \quad (7)$$

di mana :

$y_{kj}$  : jumlah output k (volume sampah yang terangkut) per kota besar di Indonesia (j).

$x_{ij}$  : jumlah input i (retribusi sampah, sarana transportasi pengangkut sampah, tenaga kerja pemungut sampah, Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan alat berat yang digunakan di TPA) yang diperlukan oleh kota besar di Indonesia (j).

$\mu_k$  : bobot tertimbang dari output k (volume sampah yang terangkut) yang dihasilkan tiap kota besar di Indonesia

n : jumlah kota besar yang diteliti (studi ini terdapat 25 kota besar)

$v_i$  : bobot tertimbang dari input i (retribusi sampah, sarana transportasi pengangkut sampah, tenaga kerja pemungut sampah, TPS dan alat berat yang digunakan di TPA) yang digunakan tiap kota besar di Indonesia.

Berdasarkan analisis DEA dengan *software Banxia Frontier Analyis 3 Profesional* versi 3.2.2, nilai efisiensi pengelolaan sampah per kota besar di Indonesia dengan asumsi berorientasi output dan VRS. Karena dengan input yang sama akan dihasilkan output yang lebih besar serta penambahan input

dan outputnya tidak sama. Nilai efisiensi adalah 100% dan inefisien jika kurang dari 100 %.

Hasil analisisnya disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 1.** Kota yang Efisien Selama Pengamatan

Tahun	Kota
2016	Jayapura, Pekanbaru, Manado, Gorontalo, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Banda Aceh, Bengkulu, Yogyakarta, Denpasar, Surabaya, Jakarta
2017	Ternate, Gorontalo, Jayapura, Palangkaraya, Ambon, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Manado, Yogyakarta, Medan, Pontianak, Jakarta, Denpasar.
2018	Ternate, Jayapura, Palangkaraya, Mataram, Ambon, Tanjungpinang, Manado, Pekanbaru, Pontianak, Bengkulu, Medan, Denpasar, Jakarta

*Sumber:* data sekunder, diolah

Berdasarkan hasil olahan data yang tersaji pada Tabel 1, menunjukkan bahwa Jayapura, Pekanbaru, Jakarta, Denpasar, Tanjung Pinang dan Bengkulu sebagai kota di Indonesia yang efisien sepanjang tahun pengamatan. Hasil yang tersaji dengan analisis DEA, bukan mengukur efisiensi mutlak Artinya bahwa efisiensi yang ditentukan dengan metode DEA adalah suatu nilai yang relatif, sehingga bukan merupakan suatu nilai mutlak yang dapat dicapai oleh suatu unit (Chiu dan Wu, 2010).

Capaian efisiensi tiap-tiap kota sebagai DMU adalah tersaji pada Table 2.

Tabel 2 menunjukkan bahwa kota yang efisien ditunjukkan oleh capaian efisiensinya sebesar 100% dan kota yang inefisien ditunjukkan oleh capaian efisiensi yang kurang dari 100%. Capaian efisiensi yang paling banyak diraih oleh kota besar di Indonesia, terjadi pada tahun 2017. Tabel 2 juga menunjukkan bahwa kota-kota di Indonesia yang menjadi pengamatan, pengelolaan sampahnya, inefisien.

Hasil analisis menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Indonesia masih rendah. Timbulan sampah yang dibuang ke tempat sampah tidak segera ditangani. Masalah yang sering dihadapi dalam operasional penanganan sampah adalah:

1. Kapasitas peralatan yang belum memadai.
2. Pemeliharaan alat yang kurang.
3. Lemahnya pembinaan tenaga pelaksana khususnya tenaga harian lepas.
4. Terbatasnya metode operasional yang sesuai dengan kondisi daerah.
5. Siklus operasi persampahan yang tidak lengkap atau terputus karena perbedaan penanggung jawab.
6. Koordinasi sektoral antar birokrasi pemerintah sangat lemah.

**Tabel 2.** Capaian Efisiensi Kota Besar di Indonesia

Kota	Tahun		
	2016	2017	2018
Banda Aceh	100,00%	30,40%	31,09%
Medan	64,77%	100,00%	100,00%
Pekanbaru	100,00%	100,00%	100,00%
Jambi	39,04%	48,18%	66,22%
Bengkulu	100,00%	100,00%	100,00%
Bandar Lampung	52,13%	52,84%	62,78%
Pangkal Pinang	100,00%	88,61%	93,83%
Tanjung Pinang	100,00%	100,00%	100,00%
Jakarta	100,00%	100,00%	100,00%
Yogyakarta	100,00%	100,00%	39,87%
Serang	72,38%	52,77%	95,19%
Surabaya	100,00%	47,66%	55,63%
Denpasar	100,00%	100,00%	100,00%
Mataram	53,99%	82,09%	100,00%
Pontianak	71,83%	100,00%	100,00%
Palangkaraya	97,40%	100,00%	100,00%
Banjarmasin	13,44%	19,81%	14,14%
Samarinda	18,26%	23,35%	20,29%
Manado	100,00%	100,00%	100,00%
Palu	85,89%	69,76%	70,81%
Kendari	16,18%	9,67%	12,85%
Gorontalo	100,00%	100,00%	13,48%
Ambon	5,60%	100,00%	100,00%
Ternate	8,66%	100,00%	100,00%
Jayapura	100,00%	100,00%	100,00%

*Sumber:* data sekunder, diolah

Manajemen operasional lebih dititikberatkan pada aspek pelaksanaan, sedangkan aspek pengendalian lemah (Damanhuri & Padmi, 2010).

Menurut UU No. 18/ 2008 tentang Pengelolaan Sampah, menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan. Pengelolaan sampah meliputi tersedianya sarana prasarana persampahan. Penyedia sarana dan prasarana kebersihan di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia No. 3/PRT/M/2013 tentang Penyelenggara Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga. Peraturan menteri ini sebagai

acuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan (PSP) di masing-masing daerah. Pemerintah pusat maupun daerah mempunyai tanggung jawab dalam pengadaan sarana prasarana persampahan (Shekdar, 2009; Callan dan Thomas, 2013; Damanhuri dan Padmi, 2010; Suparmoko, 2002).

Pengangkutan sampah dari sumbernya ke TPA, selain bergantung pada sarana prasarana persampahan, juga bergantung pada retribusi yang dibayarkan oleh rumah tangga. Pengelolaan sampah membutuhkan biaya yang memadai salah satunya bersumber dari retribusi sampah (Hertomo dkk., 2018). Retribusi sampah dipungut terhadap layanan pengangkutan sampah yang dilakukan pemerintah. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi digunakan untuk menutup biaya operasional penyelenggaraan pelayanan sampah yang terdiri dari biaya pengumpulan, pengangkutan dan pengelolaan sampah di TPA.

Guna mewujudkan kondisi zero waste, maka akan muncul biaya operasional pengelolaan sampah yang tinggi (Taboada-González dkk., 2014). Menurut Sari (2008), biaya operasional pengelolaan sampah di Indonesia sangat kecil. Oleh karena itu, jika pengelolaan sampah hanya dibebankan kepada pemerintah, maka dimungkinkan sampah yang tidak dikelola akan semakin bertambah di kemudian hari.

Pengelolaan sampah yang baik mensyaratkan peningkatan sarana prasarana persampahan yang akan mempengaruhi pada peningkatan retribusi sampah yang dipungut kepada rumah tangga. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk mengendalikan kebersihan yang merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan seluruh masyarakat dengan tetap memperhatikan biaya penyelenggaraan pelayanan dengan mempertimbangkan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.

Kendala pemungutan retribusi dapat terjadi karena rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi dan tarif retribusi yang rendah. Masyarakat enggan membayar retribusi, karena menilai layanan persampahan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat masih kurang (Hertomo dkk, 2018). Hertomo dkk. (2018) juga menyebutkan bahwa sistem pemungutan retribusi sampah yang saat ini berjalan, dimungkinkan terjadi kebocoran dalam pemungutannya. Kondisi ini dapat juga sebagai penyebab rendahnya pelayanan pemungutan sampah yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat.

TPA di Indonesia yang menggunakan sanitary landfill adalah Surabaya. Sanitary landfill sebagai suatu sistem pengelolaan sampah yang sesuai dengan undang-undang, namun pengelolaan sampah dengan sanitary landfill berbiaya mahal. Sanitary landfill akan mengolah air lindi sebelum dibuang, sehingga sumber air di sekitar TPA tidak tercemar. Sanitary landfill juga mampu untuk menangkap gas metan yang dihasilkan sampah. Gas metan berguna untuk pembangkit listrik maupun untuk memasak. Tertangkapnya gas metan pada pipa-pipa di TPA yang merupakan bagian dari sanitary landfill, akan mengurangi bau sampah.

Meskipun Surabaya telah menggunakan sanitary landfill pada pengelolaan sampahnya di TPA, namun sesuai Tabel 2, pada tahun 2017 dan 2018, Surabaya inefisien. Hal ini karena mahalnya pengelolaan sampah dengan sanitary landfill serta mahalnya sarana angkutan sampah. Surabaya telah memiliki truk pengangkut sampah modern, di mana truk yang digunakan adalah truk compactor yaitu truk yang memiliki alat pres sampah dan bak tertutup. Selain mahalnya pengelolaan sampah di tingkat akhir, tenaga pengumpul sampah di Surabaya cukup banyak. Hal ini mengingat Surabaya sebagai kota metropolitan yang padat penduduk. Namun demikian, banyaknya tenaga pengumpul sampah akan membebani biaya tenaga kerja.

Jika di Surabaya menggunakan sanitary landfill, tidak demikian kondisi di kota lain di Indonesia. Kota lain di Indonesia masih menggunakan open dumping dalam pengelolaan sampahnya. Selain berbiaya murah, open dumping juga mudah pengoperasiannya. Pengelolaan sampah di tingkat akhir membutuhkan lahan yang luas. Lahan ini menjadi masalah di tingkat perkotaan. Keterbatasan lahan TPA karena sampah yang masuk ke TPA tidak sebanding dengan sampah yang diproses (Pringgohardjoso, 2016).

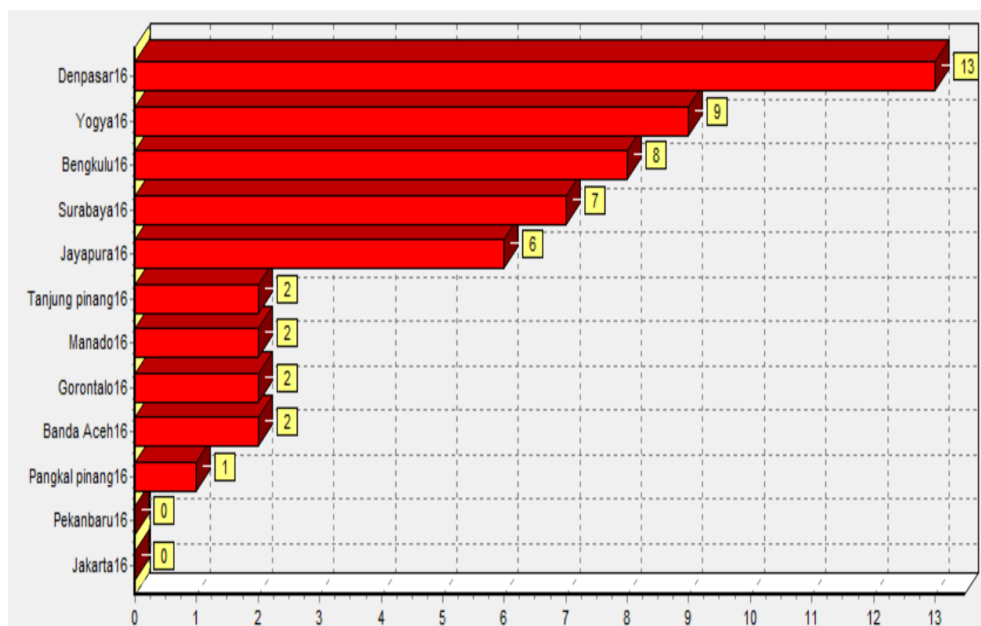
Sebelum sampah diproses di TPA, terkadang sampah akan ditampung terlebih dahulu di TPS (Tempat Penampungan Sementara). Akan tetapi, banyak daerah yang kekurangan jumlah TPS. Sampah akan menumpuk di sembarang tempat. Kondisi ini mengurangi estetika lingkungan dan menyebabkan datangnya lalat atau hewan sebagai inang penyakit yang dapat berpindah ke manusia. Sampah yang timbul terlebih di daerah yang padat penduduk sebaiknya harus segera diangkut sampahnya agar tidak menimbulkan masalah lebih lanjut (Johnstone dan Labonne, 2004; Matsunaga dan Themelis, 2002).

Pengangkutan sampah dari sumber sampah ke TPS maupun ke TPA juga menjadi kendala dalam mengelola sampah. Selain jumlah sarana pengangkut sampah yang terbatas, kualitas sarana pengangkut sampah pun dapat menjadi

penghalang pengelolaan sampah yang cepat. Jadwal pengambilan sampah dari sumber sampah terkendala dengan terbatasnya sarana pengangkut sampah. Penumpukan sampah akan terjadi, jika pengambilan sampahnya terganggu. Selain jumlah sarana pengangkut sampah yang terbatas, kualitas sarana pengangkut sampah juga mempengaruhi layanan pengambilan sampah. Jika terdapat armada yang rusak, maka semua jadwal pengambilan sampah akan tersendat. Sarana prasarana yang digunakan hendaknya dilakukan pemeliharaan atau pembaruan serta disesuaikan dengan cakupan luas wilayah layanan.

Tidak semua sampah diangkut oleh petugas. Apabila rumah tangga memiliki halaman yang luas, maka sampah akan dibuang ke pekarangannya sendiri dan sampah tersebut dikelola sendiri dengan cara dibakar maupun ditimbun. Berdasarkan kondisi tersebut, maka efisiensi pengelolaan akan tercapai manakala jumlah sampah yang diangkut sedikit dan sebanding dengan sarana prasarana persampahan serta retribusi sampah yang sesuai target.

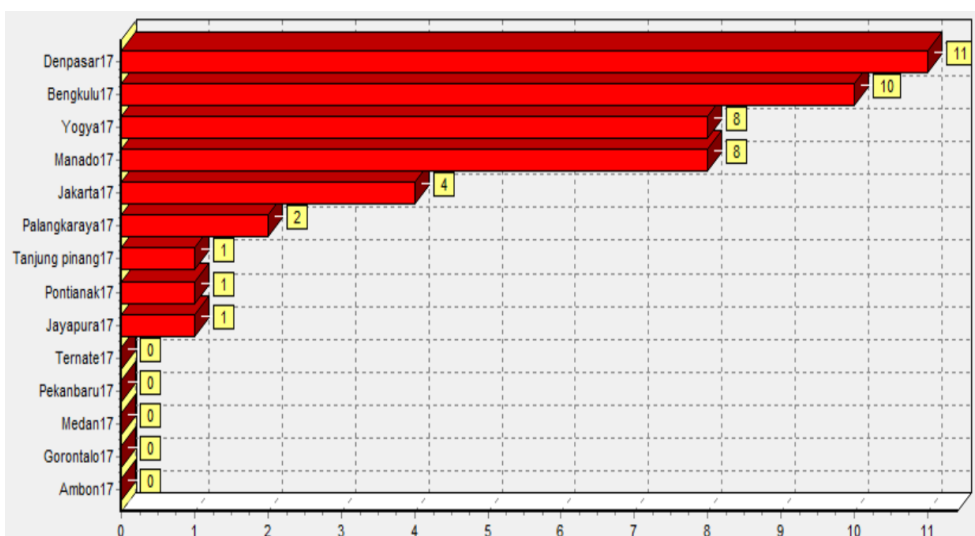
Selain capaian efisiensi tiap-tiap DMU yang dianalisis, terdapat referensi kota yang efisien terhadap kota yang tidak efisien. Hasilnya tersaji pada gambar berikut.



**Gambar 4.** Kota yang Menjadi Referensi bagi Kota Lain di Indonesia Tahun 2016

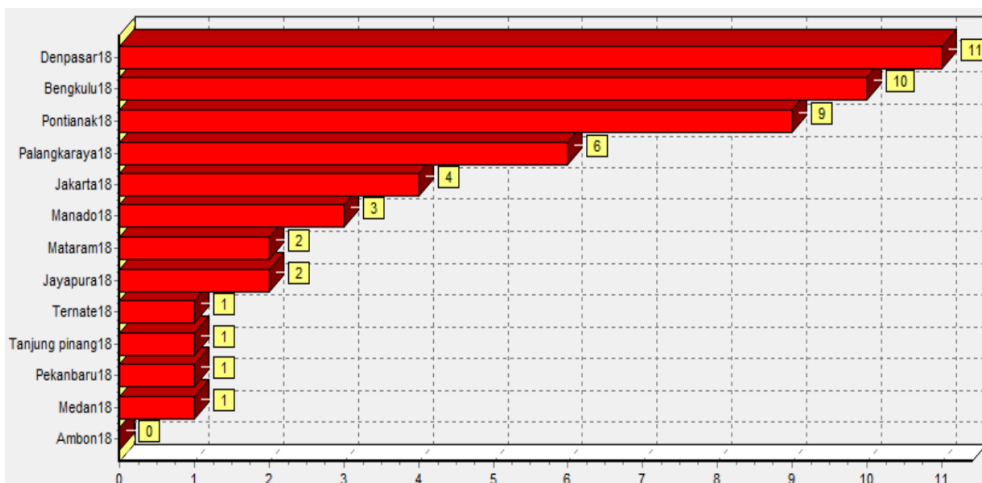
Sumber: data sekunder diolah





**Gambar 5.** Kota yang Menjadi Referensi bagi Kota Lain di Indonesia Tahun 2017

Sumber: data sekunder diolah



**Gambar 6.** Kota yang Menjadi Referensi bagi Kota Lain di Indonesia Tahun 2018

Sumber: data sekunder diolah

Selama pengamatan, Kota Denpasar menjadi kota yang menjadi referensi bagi banyak kota lain yang inefisien. Terdapat 13 kota yang merujuk Kota Denpasar pada tahun 2016, 11 kota yang merujuk pada tahun 2017 dan 2018. Makna dari Kota Denpasar sebagai referensi karena kedekatan satu DMU dengan DMU lainnya dalam garis atau frontier. DMU pada studi ini adalah kota besar yang dianalisis. Denpasar sebagai kota yang pengelolaannya efisien dan paling banyak dirujuk oleh kota lain. Sebagai kota tujuan wisata, pemerintah Kota Denpasar menerapkan pengelolaan sampah yang tertuang dalam Perwali No 36 Tahun 2018 tentang pembatasan kantong plastik dan program

“PESANMAMA” yang bertujuan untuk mengajak masyarakat memanfaatkan sampah agar menjadi barang yang bernilai ekonomis (Winarsih dkk, 2019). Menurut Wardi (2011), masyarakat Bali pada umumnya telah melakukan swakelola sampah sejak dulu karena beberapa alasan yaitu kesadaran terhadap masalah sampah yang cenderung semakin kompleks, Bali sebagai daerah atau tujuan wisata (eco-tourism), adanya lomba kebersihan lingkungan yang diprakarsai oleh pemerintah, terdapat peran proaktif LSM lingkungan untuk memberdayakan masyarakat dalam mengelola sampah, dan kesadaran budaya bahwa lingkungan yang sacral atau suci.

## **PENUTUP**

Pengelolaan sampah di Indonesia dibebankan kepada pemerintah. Kapasitas pemerintah daerah yang terbatas akan menyebabkan buruknya kualitas pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah yang baik dimulai dari hulu (sumber sampah) sampai ke hilir (TPA). Sarana prasarana persampahan mulai dari hulu ke hilir menentukan keberhasilan pengelolaan persampahan.

Kualitas dan kuantitas sarana pengumpul sampah baik tenaga kerja yang mengoperasikan maupun alat transportasi serta alat berat untuk memadatkan sampah di TPA menentukan pengelolaan sampah berjalan baik atau tidak. Di samping itu, retribusi sampah sebagai iuran yang digunakan untuk menambah biaya operasional pengelolaan sampah. Efisiensi pengelolaan sampah ditentukan oleh jumlah sampah yang terangkut serta sarana prasarana dan retribusi sampah yang dibayarkan oleh pihak yang menerima layanan persampahan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- BPS. (2015). *Indikator Perilaku Peduli Lingkungan Hidup 2014*. Jakarta: BPS.
- BPS. (2018). *Laporan Indeks Perilaku Ketidakpedulian Lingkungan Hidup Indonesia 2018*. Jakarta: BPS
- Banker, R. D., Charnes A., Cooper, W.W. (1984). Some Models For Estimating Technical and Scale Inefficiencies in Data Envelopment Analysis. *Management Science*, 30 (9), 1078-1092.
- Callan, S. J. dan Thomas, J. M. (2013). *Environmental economics and management: Theory, policy, and applications*. South-Western: Cengage Learning.
- Charnes A., Cooper W.W., Rhodes, E. (1978). Measuring the Efficiency of Decision Making Units. *European Journal of Operational Research* 2, 429-444.
- Chiu, Y. dan Wu, M-F. (2010). Environmental Efficiency Evaluation in China: Application of ‘Undesirable’ Data Envelopment Analysis. *Polish Journal of Environmental Studies*, 19 (6), 1159-1169.

- Coelli, T. J., Rao, D. S. P., O'Donnell, C. J. dan Battese, G. E. (2005). *An introduction to efficiency and productivity analysis*. New York: Springer Science & Business Media.
- Damanhuri, E. dan Padi, T. (2010). *Pengelolaan Sampah*. Bandung: Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan ITB.
- DPD-RI. (2017). Sangat Mahal, Teknologi Pengolahan Sampah Sulit Dipenuhi Daerah. Retrieved January 24, 2018, from <http://www.dpd.go.id>.
- Ejaz, N., Akhtar, N. dan Naeem, U. A. (2010). Environmental Impacts of Improper Solid Waste Management in Developing Countries: A Case Study of Rawalpindi City. *The sustainable world*, 142, 379-388. doi: 10.2495/SW100351
- Faizah. (2008). *Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Masyarakat (Studi Kasus di Kota Yogyakarta)*. (Tesis S2, Universitas Diponegoro, Indonesia). Diunduh Mei 17, 2015, dari <http://eprints.undip.ac.id>.
- Farrell, M.J. (1957). The Measurement of Productive Efficiency. *Journal of The Royal Statistical Society*, 120 (3), 253-290.
- Hazra, T. dan Goel, S. (2009). Solid waste management in Kolkata, India: Practices and challenges. *Waste Management*, 29(1), 470-478. doi: 10.1016/j.wasman.2008.01.023
- Hertomo, E.Y.W., Kusnadi, N., Falatehan, A. F. (2018). Strategi Peningkatan Retribusi Sampah Rumah Tangga Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, Vol. 10 No. Khusus April, 82-92.
- Henry, R. K., Yongsheng, Z. dan Jun, D. (2006). Municipal solid waste management challenges in developing countries – Kenyan case study. *Waste Management*, 26(1), 92-100. doi: 10.1016/j.wasman.2005.03.007
- Jambeck, J. R., Geyer, R., Wilcox, C., Siegler, T. R., Perryman, M., Andrady, A., Narayan, R., Law, K. L. (2015). Plastic waste inputs from land into the ocean. *Science*, 347(6223), 768-771.
- Johnstone, Nick. dan Labonne, J. (2004). Generation of household solid waste in OECD countries: an empirical analysis using macroeconomic data. *Land Economics*, 80(4), 529-538.
- Juju. (2012). Sumber, Karakteristik dan Timbulan Sampah. Diunduh Maret 27, 2017 dari <https://jujubandung.wordpress.com>.
- Kafando, P., Segda, B. G., Nzihou, J. F. dan Koulidiati, J. (2013). Environmental Impacts of Waste Management Deficiencies and Health Issues: A Case Study in the City of Kaya, Burkina Faso. *Journal of Environmental Protection*, 4(10), 1080-1087. doi: 10.4236/jep.2013.410124.
- Khajuria, A, Yamamoto, Y dan Morioka, T. (2008). Solid waste management in Asian countries: problems and issues. *WIT Transactions on Ecology and the Environment*, 109, 643-653.

- Kumar, S. (2016). *Municipal Solid Waste Management in Developing Countries*. New York: CRC Press is an Imprint of Taylor & Francis Group.
- Matsunaga, K. dan Themelis, N. J. (2002). Effects of affluence and population density on waste generation and disposal of municipal solid wastes. *Earth Engineering Center Report*, 1-28.
- Needhidasan, S., Samuel, M. dan Chidambaram, R. (2014). Electronic waste—an emerging threat to the environment of urban India. *Journal of Environmental Health Science and Engineering*, 12(1), 2-9.
- Pringgohardjoso, S. (2016). *Data TPA di Indonesia*. Diunduh Desember 4, 2017, dari <https://ciptahijauindonesia.wordpress.com>.
- Reddy, P. J. (2011). *Municipal solid waste management*. Florida: CRC Press (Taylor & Francis Group).
- Sari, N. dan Mulasari, S. A. (2017). Pengetahuan, Sikap dan Pendidikan dengan Perilaku Pengelolaan Sampah di Kelurahan Bener Kecamatan Tegalrejo Yogyakarta. *Medika Respati*, 12(2), 74-84.
- Sharholy, M., Ahmad, K., Mahmood, G. dan Trivedi, R. C. (2008). Municipal solid waste management in Indian cities—A review. *Waste Management*, 28(2), 459-467.
- Shekdar, A. V. (2009). Sustainable solid waste management: an integrated approach for Asian countries. *Waste Management*, 29(4), 1438-1448.
- Sujauddin, M., Huda, S. M. S. dan Hoque, A. T. M. R. (2008). Household solid waste characteristics and management in Chittagong, Bangladesh. *Waste Management*, 28(9), 1688-1695.
- Suparmoko, M. (2002). *Ekonomi Publik Untuk keuangan dan pembangunan daerah*. Yogyakarta: Andi Publisher.
- Taboada-González, P., Aguilar-Virgen, Q., Ojeda-Benítez, S. dan Cruz-Sotelo, S. (2014). Application of analytic hierarchy process in a waste treatment technology assessment in Mexico. *Environmental Monitoring and Assessment*, 186(9), 5777-5795. doi: 10.1007/s10661-014-3819-1
- Vieira, V. H. A. d. M. dan Matheus, D. R. (2018). The impact of socioeconomic factors on municipal solid waste generation in São Paulo, Brazil. *Waste Management & Research*, 36(1), 79-85.
- Wardi, I. N. (2011). Pengelolaan Sampah Berbasis Sosial Budaya: Upaya Mengatasi Masalah Lingkungan di BPali. *Jurnal Bumi Lestari*, Vol. 11 (1), 167-177.
- Widowati, H. (2019). Komposisi Sampah di Indonesia Didominasi Sampah Organik. Retrieved from [databooks.katadata.co.id/datapublish/2019](http://databooks.katadata.co.id/datapublish/2019)
- Winarsih, N.W.E., Candranegara, I. M. W., Mahardhika, I. P. E. (2019). Efektivitas Pengelolaan Sampah di Kota Denpasar (Suatu Penelitian di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar). *SINTESA: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol 2 (2), 74-77.

---

---

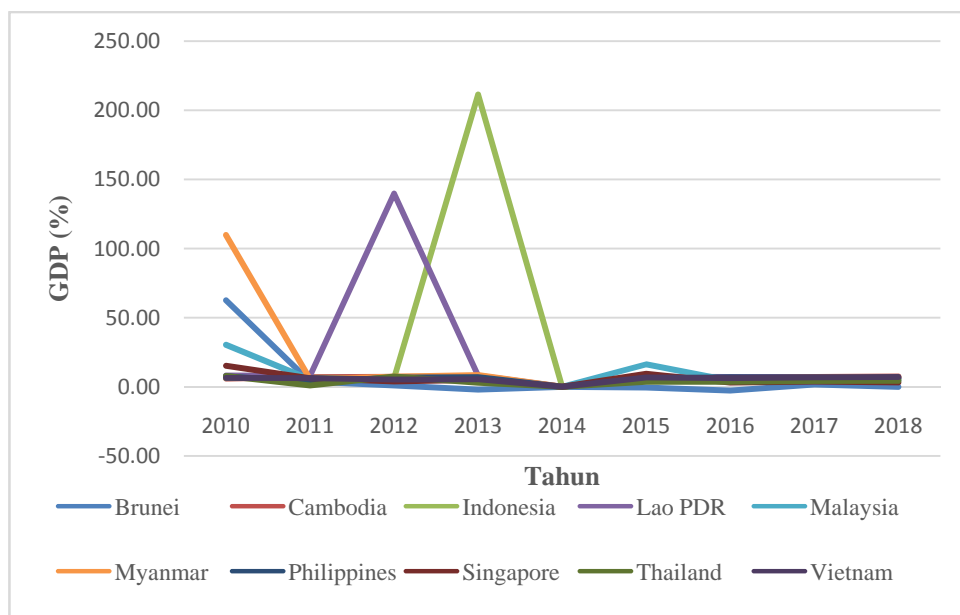
## DETERMINAN PERTUMBUHAN EKONOMI NEGARA- NEGARA DI KAWASAN ASEAN PASCA KRISIS EKONOMI TAHUN 2008

Dyah Maya Nihayah, Siti Aisyah Tri Rahayu

### PENDAHULUAN

Pentingnya modal manusia dalam pembangunan dimulai tahun 1960 an oleh Theodore Schultz dengan *Investment in Human Capital* nya. Menurut Schultz, pendidikan merupakan suatu bentuk investasi dalam pembangunan. Lebih lanjut dikatakan bahwa pendidikan dalam pembangunan dengan manusia sebagai fokus utamanya memberikan kontribusi langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi suatu negara. Pemikiran ini kemudian diikuti dengan banyak studi-studi empirik yang menunjukkan bahwa modal fisik bukan merupakan faktor fundamental yang menentukan Pertumbuhan Ekonomi . Modal fisik dan modal manusia tampaknya sama pentingnya dalam meningkatkan output ekonomi (Breton, 2014). Perkembangan human capital terus ditunjukkan dengan teori pertumbuhan Solow, diikuti dengan berkembangnya Teori Perumbuhan Baru (*New Growth Theory*) atau Teori Pertumbuhan Endogen (*Endogenous Growth Theory*). Pada tahun 1990, United Nation pertama kali me-*release* tentang pendekatan baru untuk memajukan kesejahteraan manusia melalui pembangunan manusia.

Dengan mengacu pada peran human capital tersebut, maka orientasi untuk terus meningkatkan kualitas hidupnya terus diteliti baik dalam lingkup mikro ataupun makro. Pembangunan manusia tercermin dari peningkatan kualitas hidup dan itu dapat dilihat dari indikator tingkat kesejahteraannya. Selama ini untuk mengukur tingkat kesejahteraan adalah dengan penggabungan Pertumbuhan Ekonomi (yang diukur dengan perubahan dalam PDB) dan pembangunan atau kemajuan. Dua asumsi umum yang dibuat oleh para pendukung ukuran ini: Pertama, Pertumbuhan Ekonomi secara otomatis "menetes ke bawah" dan menyebarkan manfaatnya ke seluruh masyarakat; kedua, ketika Pertumbuhan Ekonomi gagal turun dan malah menyebabkan kesenjangan pendapatan, pemerintah akan mengambil langkah untuk memperbaiki situasi (Stanton, 2007).



Sumber: ASEAN Statistical Yearbook 2019, diolah  
**Gambar 1.** Pertumbuhan Ekonomi Negara- Negara ASEAN Tahun 2010-2018 (%)

Pada gambar 1. terlihat bahwa pada kurun waktu setelah krisis tahun 2008, ternyata memberikan pengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi semua negara di kawasan ASEAN. Ini terlihat dari trend Pertumbuhan Ekonomi yang mulai menurun dari tahun 2009. Perkembangan ini tidak semakin membaik tetapi cenderung memburuk, bahkan pada tahun 2014 hampir semua negara di kawasan ASEAN tingkat pertumbuhannya tidak lebih dari 1%. Secara global, Pertumbuhan Ekonomi negara berkembang (*emerging markets*) melambat, sedangkan Pertumbuhan Ekonomi negara maju menunjukkan tren pemulihan secara gradual. Meskipun tumbuh lebih rendah dari perkiraan awal, Pertumbuhan Ekonomi negara-negara maju mengalami peningkatan dari 1,8% pada 2014 menjadi 1,9% pada 2015. Di sisi lain, Pertumbuhan Ekonomi negara berkembang turun dari 4,6% pada 2014 menjadi 4,0% pada 2015 (Bank Indonesia, 2015).

Setiap negara berupaya memperkuat posisinya di semua sektor terutama sektor ekonomi melalui keterlibatan di beragam forum bilateral, regional maupun multilateral. Di sector perdagangan ekspor dan import, isu-isu global serta perlambatan ekonomi tiangkok juga berimbas pada kondisi ekspor dan impor negara- negara di Kawasan ASEAN. Lihat tabel 1

**Tabel 1.** Total Ekspor- Import ASEAN

Tahun	Total ASEAN			
	Export (Juta \$)	%	Import (Juta \$)	%
2009	810785.60	-	727010.50	-
2010	1049043.20	29.39	952399.80	31.00
2011	1242190.20	18.41	1156138.20	21.39
2012	1257708.00	1.25	1222883.80	5.77
2013	1278416.70	1.65	1254652.60	2.60
2014	1293987.50	1.22	1241221.00	-1.07
2015	1171733.60	-9.45	1101128.20	-11.29
2016	1152688.40	-1.63	1085912.30	-1.38
2017	1324777.80	14.93	1246505.00	14.79
2018	1436415.00	8.43	1388848.30	11.42

Sumber: ASEAN Statistical Yearbook 2019, diolah

Dari tabel 1. dapat diamati bahwa pertumbuhan ekspor negara- negara di kawasan ASEAN mengalami penurunan sejak krisis tahun 2008 dan semakin memburuk sampai mencapai minus 9.45% pada tahun 2015. Kondisi yang sama juga terlihat pada sisi impor nya, dimana pada tahun yang sama mencapai minus 11.29. Kondisi ini. Kondisi ini mungkin terjadi karena aktivitas konsumsi global melambat dipicu oleh pelemahan daya beli –seiring perlambatan ekonomi– dan pemburukan *consumer confidence* antara lain akibat trade tension. Pelemahan aktivitas konsumsi dialami baik oleh negara maju maupun berkembang, kecuali Inggris dan Kawasan Euro (PEKKI, 2019).

Pada tahun 2015, sektor keuangan, pasar keuangan global diwarnai oleh meningkatnya volatilitas sebagai cerminan masih tingginya ketidakpastian. Meningkatnya volatilitas di pasar keuangan global pada 2015 terutama dipengaruhi oleh tiga faktor, yakni: (i) sentimen terhadap normalisasi kebijakan moneter AS yang memengaruhi pasar keuangan global sejak awal 2015; (ii) sentimen dari kekhawatiran penyelesaian krisis Yunani pada triwulan I 2015; dan (iii) devaluasi yuan yang dilakukan oleh otoritas moneter Tiongkok pada Agustus 2015. Ketidakpastian kenaikan suku bunga AS (Federal Funds Rate, FFR) mendorong perilaku investor global cenderung risk-off sehingga mengakibatkan penurunan inflows ke pasar keuangan negara berkembang yang selanjutnya menekan nilai tukar (Bank Indonesia, 2015). Aktivitas ekspor dan import tersebut merefleksikan keterbukaan perdagangan atau *trade openness* suatu negara yang dibagi dengan GDP (Purnomo & Mudakir, 2020). Dengan meningkatnya *trade openness* suatu negara maka negara tersebut akan mendapatkan keuntungan dengan menjual produknya dan dari kegiatan impornya. Trade openness menjadikan suatu negara harus siap untuk

berinovasi dan berkarya agar dapat bersaing dengan negara luar (Aprillia & Hariyanti, 2014).

Negara-negara mengharapkan akan mendapatkan keuntungan bagi Pertumbuhan Ekonominya dari kesepakatan negara-negara yang terjalin di kawasan Asia Tenggara melalui ASEAN. Jumlah negara anggota ASEAN saat ini mencapai sepuluh negara, yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Kamboja, dan Myanmar dimana masing-masing negara memiliki kondisi perekonomian yang beragam dimana terdapat potensi besar untuk ditingkatkan. Terlebih pasca krisis tahun 2008 serta kondisi perekonomian global serta isu-isu ekonomi seperti pelemahan perekonomian Tiongkok, perang dagang USA dan China yang akan terus terimbas kepada variabel-variabel ekonomi baik mikro maupun makro sehingga berdampak kepada perekonomian suatu negara. Oleh karena itu pada paper ini akan dibahas faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi negara-negara di kawasan ASEAN pasca krisis tahun 2008.

## PEMBAHASAN

Teori Pertumbuhan Baru (*New Growth Theory*) atau sering juga dikenal dengan Teori Pertumbuhan Endogen (*Endogenous Growth Theory*) dikemukakan faktor-faktor dalam proses produksi seperti *increasing returns to scale* dan stimulus untuk perubahan teknologi, menjadi fokus utama pada model Pertumbuhan Ekonomi. Pada tulisan ini dilakukan analisis data panel dengan menggabungkan data runtut waktu (*time series data*) 10 tahun (terhitung dari setelah krisis ekonomi tahun 2008 yaitu dari tahun 2009 - 2018) dan data *cross section* (10 negara ASEAN yaitu Brunai Darussalam, Cambodia, Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Philipina, Singapore, Thailand dan Vietnam). Ada enam variabel yang akan diteliti yaitu Pertumbuhan Ekonomi (GDP), *Foreign Direct Investment* (FDI), keterbukaan perdagangan (NX), Kualitas Sumber Daya Manusia (HDI), Nilai Tukar (FRX) dan infrastruktur transportasi (LR). Dari hasil uji penentuan model dengan menggunakan uji Chow dan Uji Hausman, maka diperoleh rekap hasil olah data dalam seperti pada table 2.

Pada tabel 2. terlihat bahwa pada semua model, variabel *Foreign Direct Investment* (FDI), dan kualitas sumber daya manusia (HDI) memiliki pengaruh yang kuat pada Pertumbuhan Ekonomi. Pada indikator koefisien determinasi ( $R^2$ ), terlihat bahwa model CEM dan model FEM memiliki nilai  $R^2$  yang tinggi yaitu di atas 0.90. Hal ini memperlihatkan bahwa variasi dari variabel independen (FDI, NX, FRX, HDI dan LR) dapat menjelaskan variabel Pertumbuhan Ekonomi sebesar lebih dari 90%. Setelah dilakukan uji asumsi klasik dan uji statistik diperoleh hasil bahwa dari 5 variabel independen, ada 3 variabel yang nilai  $|t \text{ hitung}| \text{ variabel} > t(0,0025;84)$  (1,66) dan nilai  $p \text{ value} < \alpha(0,05)$ ,



**Tabel 2.** Rekap Parameter Model Data Panel ASEAN

	<i>Pooled OLS (CEM)</i>	<i>Fixed Effect Model (FEM)</i>	<i>Random Effect Model (REM)</i>
<b>Konstanta</b>	3.316313 (6.10)***	0.213576 (0.43)	0.490064 (1.006)
<b>LFDI</b>	0.874899 (9.89)***	0.050590 (2.915)**	0.139947 (3.28)***
<b>NX</b>	-3.99E-06 (-1.48)	-0.000000608 (-1.40)	-0.00000198 (-2.37)**
<b>FRX</b>	0.000114 (16.50)***	0.0000318 (2.370)**	0.0000848 (8.66)***
<b>HDI</b>	-0.068805 (-12.06)***	0.045378 (9.679)***	0.024174 (4.0006)***
<b>LLR</b>	0.423595 (5.560)***	010470 (1.5512)	0.233982 (3.209)***
<b>Koefisien Determinasi (R2)</b>	0.94	0.997	0.5548

Sumber : Data diolah

Keterangan : \*, \*\* dan \*\*\* mengindikasikan signifikan pada level 10%, 5% dan 1%

sehingga hipotesis null (H0) ditolak dan menerima hipotesis alternatif (Ha). Artinya bahwa ketiga variabel tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi negara di kawasan ASEAN. Ketiga variabel tersebut adalah *Foreign Direct Investment* (FDI), Nilai Tukar (FRX) dan kualitas sumber daya manusia (HDI) sehingga diperoleh model akhir penelitian menjadi seperti pada persamaan (1).

$$\widehat{GDP}_{it} = 0.213576 + 0.051FDI_{it} - 0.00000061NX_{it} + 0.000032FRX_{it} + 0.045HDI_{it} + 0.105LR_{it} + \hat{\mu}_i \dots \dots \dots (1)$$

Dimana  $\widehat{GDP}_{it}$  adalah Penduga Pertumbuhan Ekonomi (%),  $FDI_t$  yaitu *Foreign Direct Investment* (juta \$),  $NX$  merupakan *opened trade* (juta \$),  $FRX$  adalah Foreign Rate Exchange (mata uang nasional per \$),  $HDI$  merepresentasikan *Human Development Index* (indeks) dan  $LR$  merupakan panjang jalan (Km). Sementara  $\hat{\mu}_i$  dan  $i$  masing- masing adalah intersep  $i$  dan negara ( $i = 1,2,3,\dots,10$  ;  $t =$  tahun ke- $t$  (2009–2018)). Dari hasil akhir diperoleh besarnya intersep (nilai  $\hat{\mu}_i$ ) yang berbeda- beda tiap negara. Dengan Model *Fixed Effect* (FEM) seperti pada persamaan (1) dapat digunakan untuk menghitung nilai taksiran Pertumbuhan Ekonomi negara ( $i$ ) negara-negara di kawasan ASEAN pada tahun tertentu ( $t$ ). Sebagai contoh membandingkan nilai taksiran

Pertumbuhan Ekonomi negara di kawasan ASEAN tahun 2009 dengan tahun 2018 sehingga diperoleh hasil seperti pada tabel 3.

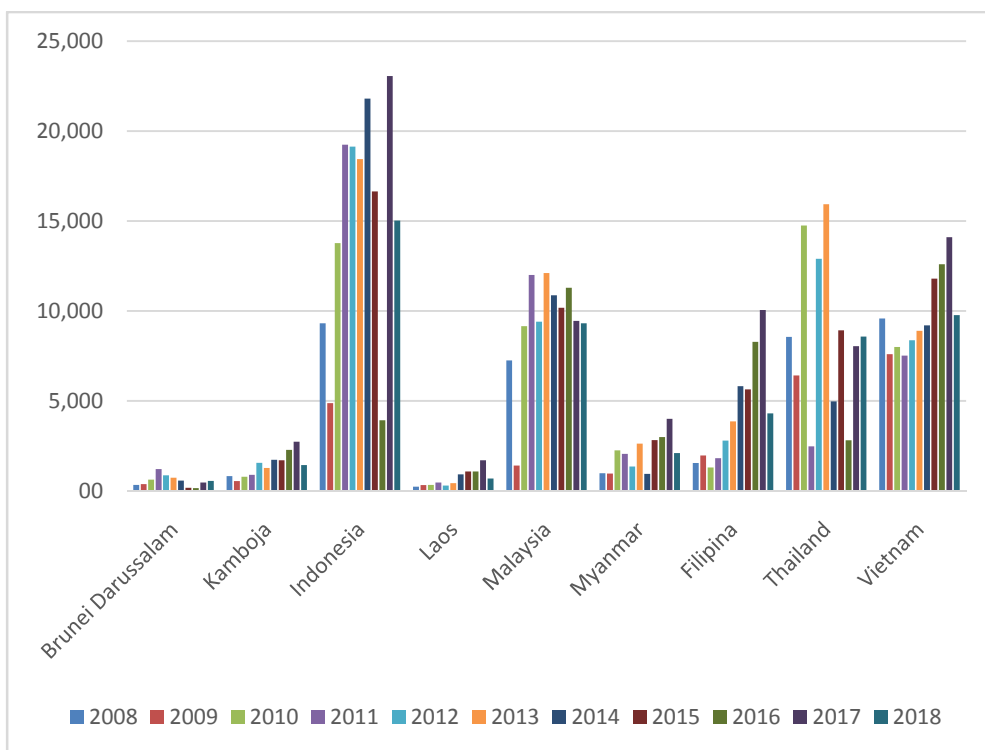
**Tabel 3.** Nilai taksirasn Pertumbuhan Ekonomi Negara di Kawasan ASEAN (%)

	2009	2018
BRU	1.2	1.2
CAM	4.4	4.7
IND	6.5	7.0
LAO	4.7	4.9
MAL	2.8	3.1
MYAN	4.5	4.8
PHI	3.7	4.0
SGP	2.4	2.7
THAI	3.8	4.1
VNM	6.2	6.6

Sumber : Data diolah

Dari tabel 3. terlihat bahwa setelah krisis ekonomi tahun 2008, negara-negara di kawasan ASEAN belum mengalami perbaikan perkembangan Pertumbuhan Ekonomi yang signifikan. Pergerakan Pertumbuhan Ekonomi hanya mengalami peningkatan sebesar 0,3% saja. Peningkatan tertinggi dialami oleh Indonesia dan Vietnam dengan perubahan sebesar 0,5% di tahun 2018. Sementara Brunai Darussalam masih belum dapat meningkatkan Pertumbuhan Ekonominya.

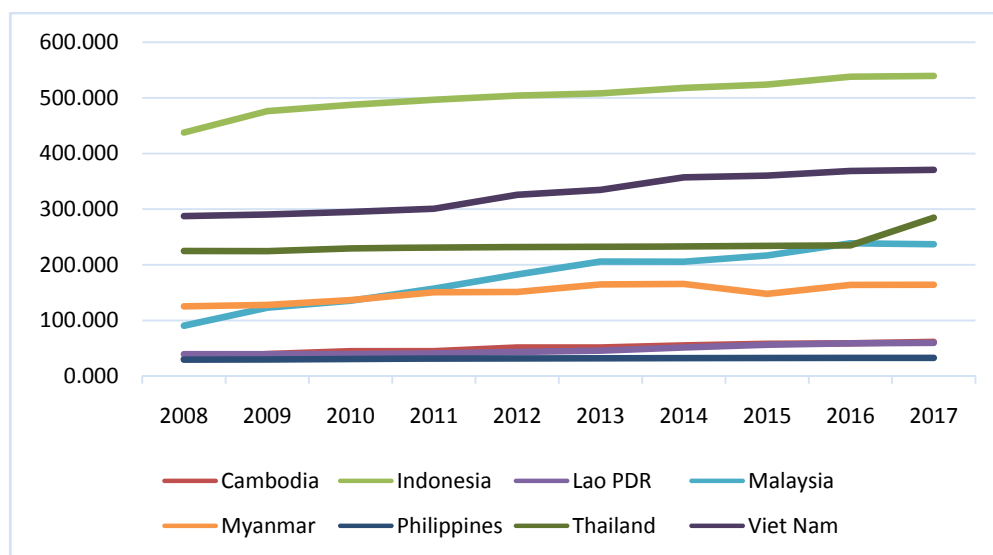
Dari nilai Pertumbuhan Ekonomi dari tahun 2008 sampai 2009 dapat diamati perkembangan dari setiap variabel yang mempengaruhinya. FDI atau Investasi Asing Langsung dapat menjadi salah satu signal bahwa sebuah negara memiliki iklim perekonomian yang baik, dan stabil, sekaligus memiliki potensi untuk investor asing mengembangkan bisnis. Pada gambar 2 dapat diamati bahwa trend FDI di negara-negara di Kawasan ASEAN tidak stabil. Padahal di negara-negara berkembang, investasi terutama untuk industri primer dan manufaktur diharapkan akan dapat membawa dampak yang lebih luas bagi Pertumbuhan Ekonomi melalui bertambahnya lapangan pekerjaan, nilai produksi meningkat, dan lain sebagainya.



Sumber: ASEAN Statistical Yearbook 2017/2018 diolah  
**Gambar 2.** *Foreign Direct Investment* di ASEAN (dalam Juta \$)

Melalui FDI, eksternalitas-eksternalitas ini dapat ditransfer dari negara-negara industri ke negara-negara berkembang sebagai aset penting untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi lebih lanjut (Raz et al., 2012). Lebih lanjut dikatakan bahwa bagi negara berkembang, FDI dapat bertindak sebagai sarana untuk mentransfer faktor-faktor dari negara maju ke negara berkembang karena FDI memperlancar kecepatan *General Purpose Technology* (GPT) dan memperkenalkan teknologi canggih dan ilmu pengetahuan yang tidak ada di negara-negara berkembang. Dengan demikian, negara-negara berkembang akan memanfaatkan faktor-faktor ini sebagai aset dalam rangka meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi. Pengaruh FDI atau *Foreign Direct Investment* sebagai variabel independen berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di ASEAN. Variabel ini yang menggambarkan keterbukaan ekonomi dari sisi finansial ini dibuktikan mempunyai pengaruh untuk Pertumbuhan Ekonomi (Purnomo & Mudakir, 2020). Oleh karena itu, mengembangkan kawasan-kawasan ekonomi baru yang potensial perlu dilakukan untuk mendorong perbaikan kondisi ekonomi sehingga perbaikan fisik seperti infrastruktur dan telekomunikasi merupakan unsur yang tidak dapat diabaikan untuk mendorong dan mengoptimalkan Pertumbuhan Ekonomi negara.

Ketersediaan infrastruktur transportasi yaitu jalan raya sebenarnya memainkan peran penting dalam penyatuan negara-negara dengan ekonomi dunia, karena biaya transportasi yang lebih rendah telah memfasilitasi dan meningkatkan kegiatan perdagangan internasional. Transportasi mendukung kegiatan ekonomi dengan menyediakan infrastruktur yang mendukung pergerakan produk dan orang. Peningkatan ini akan memperbesar pembagian produksi global dan meningkatnya persaingan global (Tang & Abosedra, 2019). Di Kawasan ASEAN, kondisi infrastruktur fisik jalan negara- negara dapat dilihat pada gambar 3.



Sumber: ASEAN Statistical Yearbook 2017/2018 diolah

**Gambar 3.** Panjang Jalan di ASEAN (Km)

Dilihat dari gambar 3 tersebut negara-negara di Asia Tenggara memiliki jumlah panjang jalan yang cenderung bertambah terkecuali Myanmar. Indonesia menjadi negara dengan ruas jalan raya terpanjang dengan 518.153 km pada tahun 2017, hal itu juga karena Indonesia merupakan negara dengan wilayah terluas. Panjang jalan dari setiap negara tidak dapat dibandingkan hanya dari kuantitasnya saja, karena kebutuhan setiap negara pun berbeda, ada faktor geografis seperti luas wilayah, kondisi topografi, dan lain sebagainya. Seperti Brunei Darussalam, negara dengan luas hanya 5.765 km<sup>2</sup> memiliki panjang jalan yang sangat sedikit pula yaitu hanya 3,053 km pada 2017. Sementara Indonesia sebagai negara terluas dengan pulau-pulau besar didalamnya memiliki panjang jalan lebih dari 500.000 km. Pertumbuhan panjang jalan ditentukan oleh pembangunan yang dilakukan, khususnya oleh pemerintah masing-masing negara, cepat atau lambatnya pembangunan pada suatu periode pada sebuah negara ditentukan oleh besarnya pengeluaran pemerintah. Namun hal tersebut belum tentu dapat menentukan pengaruh

terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada masing-masing negaranya, maka dari itu diperlukan tinjauan secara ilmiah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh infrastruktur jalan terhadap Pertumbuhan Ekonomi negara di ASEAN. Ini diperkuat dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa infrastruktur jalan darat ternyata belum memiliki pengaruh terhadap tinggi rendahnya Pertumbuhan Ekonomi di ASEAN.

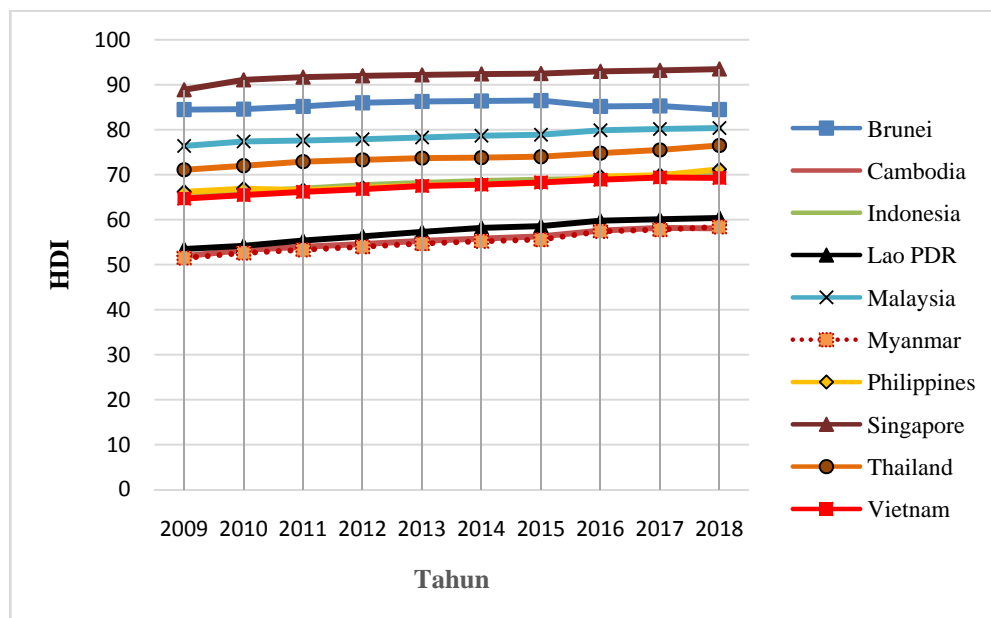
Nilai tukar atau *Foreign Rate Exchange* (FRX) ternyata berpengaruh terhadap perekonomian negara di kawasan ASEAN. Ini didukung dengan beberapa studi menunjukkan hubungan antara volatilitas nilai tukar dan Pertumbuhan Ekonomi. Setiap perubahan dalam nilai tukar mata uang asing menjadi efektif pada variabel ekonomi suatu negara. Valuta asing, di sisi lain, dipengaruhi tidak hanya oleh faktor ekonomi (inflasi, pengangguran, jumlah uang beredar, dll) tetapi juga oleh keputusan politik. Oleh karena itu, untuk mencapai tingkat Pertumbuhan Ekonomi yang baik, persentase investasi dalam pendapatan nasional harus meningkat. Ini disebabkan karena ekspektasi kenaikan suku bunga bersama dengan nilai tukar mata uang asing signifikan dalam mempengaruhi variabel pertumbuhan dan pengangguran suatu negara (Korkmaz, 2013).

Sementara penelitian di 183 negara selama periode pasca-Bretton Woods, ditemukan bahwa di negara-negara berkembang, rezim nilai tukar yang kurang fleksibel dikaitkan dengan pertumbuhan yang lebih lambat, serta volatilitas output yang lebih besar. Sementara di negara-negara maju, kondisi tersebut tidak memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan (Levy-Yeyati & Sturzenegger, 2003). Kondisi yang berbeda ditunjukkan oleh Ghosh, Gulde, dan Wolf (Suselo et al., 2008) yang menunjukkan bahwa sistem nilai tukar fixed dan intermediate menghasilkan tingkat pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan sistem nilai tukar floating.

Selain FDI dan nilai tukar, kualitas sumber daya manusia memberikan andil yang besar terhadap Pertumbuhan Ekonomi di negara-negara di kawasan ASEAN. Pada teori pertumbuhan baru (*New Growth Theory*), Pertumbuhan Ekonomi suatu negara akan ditentukan bagaimana negara tersebut mengelola kualitas hidup sumber daya manusianya. Kualitas hidup manusia dapat dilihat dari bagaimana masyarakat dapat mengakses fasilitas kesehatan dan pendidikan untuk mencapai kepuasan dan tingkat kesejahteraan. Oleh karena itu, kualitas hidup penduduk dapat dilihat dari nilai Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Indeks*, HDI), sementara tingkat kesejahteraan negara dapat diukur dengan menggunakan pendekatan *Gross Domestic Brutto* (GDP). HDI dapat digunakan untuk melihat kualitas hidup karena ada 3 indikator utama yang digunakan, yaitu indikator kesehatan, tingkat pendidikan dan indikator ekonomi. Pengukuran HDI juga menggunakan tiga dimensi dasar,

yaitu: lamanya hidup, pengetahuan, dan standar hidup yang layak. Sementara menurut Hajduová et al.(2014) HDI terdiri dari beberapa indikator yang mengukur pencapaian suatu negara dalam tiga bidang utama pembangunan manusia yaitu a). Pertumbuhan Ekonomi dinyatakan melalui indikator PDB per kapita, ini mewakili standar rata-rata kehidupan; b). Tingkat pendidikan - diekspresikan melalui indikator literasi populasi orang dewasa; c). Kesehatan (umur panjang/rentang hidup) - diekspresikan melalui indikator harapan hidup, yang mencerminkan kemungkinan orang untuk hidup panjang dan sehat.

Jika dilihat dari indikator HDI, kualitas hidup sumber daya manusia di negara- negara di kawasan ASEAN mengalami fluktuasi sejak krisis ekonomi tahun 2008. Gambar 4.



Sumber : ASEAN Statistical Year Book 2019, diolah

**Gambar 4.** Trend Nilai Indeks Pembangunan Manusia (HDI) ASEAN Tahun 2009- 2018

Pada tabel 4, terlihat bahwa Singapore dan Brunei adalah negara ASEAN yang masuk kategori HDI sangat tinggi, sementara Myanmar, Lao PDR dan Cambodia memiliki nilai HDI rendah. Meskipun demikian ternyata ketiga negara tersebut mengalami pertumbuhan HDI yang paling tinggi di antara negara- negara lain di kawasan ASEAN dengan rata- rata pertumbuhan per tahunnya mencapai 1.4%, 1,36% dan 1.27% masing- masing untuk Myanmar, Lao PDR dan Cambodia. Sementara pertumbuhan HDI terendah dialami oleh Brunei Darussalam dengan tingkat pertumbuhan rata- rata per tahunnya

hanya 0.03% pada kurun waktu 2009- 2018. Bahkan perkembangan HDI di negara ini pernah mengalami penurunan sebanyak 2 kali yaitu tahun 2016 dan 2018.

Oleh karena itu, peran modal manusia ini harus menjadi perhatian sebagai dasar untuk menarik investasi masuk ke dalam suatu perekonomian domestik. Ini penting untuk ASEAN karena ekonomi di ASEAN termasuk perekonomian yang matang artinya modal manusia ini penting untuk menarik dan bersaing dalam hal memperoleh FDI (Thangavelu & Narjoko, 2014). Kualitas modal manusia ini digunakan untuk memudahkan akses terhadap infrastruktur, teknologi dan informasi serta komunikasi dalam perkembangan perekonomian. Studi di Afrika Sub-Sahara pada 1990 hingga 2017 memperlihatkan bahwa kemampuan manusia atau pembangunan manusia memiliki pengaruh yang signifikan untuk mengakses teknologi sehingga mampu meminimalkan kerentanan terhadap kemiskinan (Sarkodie & Adams, 2020).

## **PENUTUP**

Artikel ini memiliki tujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menentukan Pertumbuhan Ekonomi negara-negara di kawasan ASEAN setelah terjadinya krisis ekonomi tahun 2008. Dari hasil analisis data panel ditemukan bahwa model terbaik untuk mengamati Pertumbuhan Ekonomi negara- negara di Kawasan ASEAN adalah model FEM *cross section weight* dengan nilai  $R^2$  sebesar 0,998520 atau sebesar 99,85%. Artinya variabel prediktor atau variable independent seperti *Foreign Direct Investment (FDI)*, *opened trade (NX)*, nilai tukar (FRX), kualitas sumber daya manusia (HDI) dan infrastruktur jalan (LR) dapat menjelaskan variabilitas variabel respon atau variable dependen sebesar 99,85% dan sisanya sebanyak 0,15% dijelaskan oleh variabel lain di luar model yang dibuat. Dari hasil uji t statistik diperoleh bahwa *Foreign Direct Investment*, interaksi pelaku ekonomi yang tercermin dari nilai tukar (FRX) dan kualitas modal manusia di masing- masing negara memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi negara di kawasan ASEAN. Sementara keterbukaan ekonomi serta ketersediaan Infrastruktur fisik Jalan ternyata belum terlihat pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Ekonomi negara di kawasan ASEAN. Inilah yang menjadi catatan, bahwa untuk mendapatkan model estimasi Pertumbuhan Ekonomi yang terbaik maka kesesuaian dan keterwakilan definisi operasional variabel dengan teori sangat menentukan. Oleh karena itu pada penelitian selanjutnya untuk variabel keterbukaan perdagangan dan infrastruktur fisik perlu dicari proksi yang tepat untuk dapat menggambarkan miniatur dari sebuah fenomena yang sesungguhnya sehingga diharapkan akan diperoleh model ekonomi sederhana namun masuk akal, akurat, memiliki kemampuan menjelaskan dan peramalan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Aprillia, & Hariyanti, D. (2014). Determinasi Pertumbuhan Ekonomi Di Negara Asean-6. *Media Ekonomi*, 22(3), 205.  
<https://doi.org/10.25105/me.v22i3.3192>
- Breton, T. R. (2014). A Human Capital Theory of Growth: New Evidence for an Old Idea. In *SSRN Electronic Journal* (No. 14–13; Issue 14).  
<https://doi.org/10.2139/ssrn.2456903>
- Hajduová, Z., Andrejovský, P., & Beslerová, S. (2014). Development of Quality of Life Economic Indicators with Regard to the Environment. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 110, 747–754.  
<https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.919>
- Indonesia, B. (2015). PEREKONOMIAN GLOBAL. In *Laporan Perekonomian Indonesia 2015* (Issue Bagian 1).  
<https://doi.org/10.3923/ijss.2017.32.38>
- Korkmaz, S. (2013). The Effect of Exchange Rate on Economic Growth. *2nd International M-Sphere Conference*.  
<https://doi.org/10.17261/pressacademia.2020.1191>
- Levy-Yeyati, E., & Sturzenegger, F. (2003). To float or to fix: Evidence on the impact of exchange rate regimes on growth. *American Economic Review*, 93(4), 1173–1193. <https://doi.org/10.1257/000282803769206250>
- PEKKI, B. I. (2019). *PERKEMBANGAN EKONOMI KEUANGAN DAN KERJA SAMA INTERNASIONAL EDISI II 2019*.
- Purnomo, R. N., & Mudakir, Y. B. (2020). Analisis Pengaruh Keterbukaan Ekonomi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus: Asean Tahun 2007 – 2017). *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 2(2), 20.  
<https://doi.org/10.14710/jdep.2.2.20-35>
- Raz, A. F., Indra, T. P. ., & Artikasih, D. K. (2012). Krisis Keuangan Global Dan Pertumbuhan Ekonomi: Analisa Dari Perekonomian Asia Timur. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 15(2), 37–56.  
<https://doi.org/10.21098/bemp.v15i2.61>
- Sarkodie, S. A., & Adams, S. (2020). Electricity access, human development index, governance and income inequality in Sub-Saharan Africa. *Energy Reports*, 6, 455–466. <https://doi.org/10.1016/j.egy.2020.02.009>
- Stanton, E. A. (2007). Human Development Index: A History. In *Political Economy Research Institute Working Paper Series* (Vol. 127, Issue February).
- Suselo, S. L., Sihaloho, H. D., & Tarsidin, T. (2008). Pengaruh Volatilitas Nilai Tukar Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 10(3), 181–221.  
<https://doi.org/10.21098/bemp.v10i3.225>



- Tang, C. F., & Abosedra, S. (2019). Logistics performance, exports, and growth: Evidence from Asian economies. *Research in Transportation Economics*, July, 100743. <https://doi.org/10.1016/j.retrec.2019.100743>
- Thangavelu, S. M., & Narjoko, D. (2014). Human capital, FTAs and Foreign Direct Investment flows into ASEAN. *Journal of Asian Economics*, 35(8), 65–76. <https://doi.org/10.1016/j.asieco.2014.11.002>.
- ASEAN Statistical Year Book. <https://www.aseanstats.org/category/yearbook/>

---

## **PENGEMBANGAN DAYA TARIK WISATA DESA MELALUI *BRANDING* WISATA SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT**

**Fafurida & Dyah Maya Nihayah**

### **PENDAHULUAN**

Pariwisata merupakan salah satu sektor ekonomi yang cukup penting di Indonesia. Pada tahun 2019, pariwisata menempati urutan ketiga dalam hal penerimaan devisa setelah komoditi minyak dan gas bumi serta minyak kelapa sawit. Berdasarkan data tahun 2019, jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia sebesar 7 juta lebih atau tumbuh sebesar 10,74% dibandingkan tahun sebelumnya, dan menyumbangkan devisa bagi negara sebesar 7.603,45 juta dolar Amerika Serikat.

Kekayaan alam dan budaya merupakan komponen penting dalam pariwisata di Indonesia. Alam Indonesia memiliki kombinasi iklim tropis, 17.508 pulau yang 6.000 di antaranya tidak dihuni, serta garis pantai terpanjang ketiga di dunia setelah Kanada dan Uni Eropa. Indonesia juga merupakan negara kepulauan terbesar dan memiliki penduduk terbanyak di dunia. Pantai-pantai di Bali, tempat menyelam di Bunaken, Gunung Rinjani di Lombok, dan berbagai taman nasional di Sumatera merupakan contoh tujuan wisata alam di Indonesia. Tempat-tempat wisata itu didukung dengan warisan budaya yang kaya yang mencerminkan sejarah dan keberagaman etnis Indonesia yang dinamis dengan 719 bahasa daerah yang ada. Candi Prambanan dan Borobudur, Toraja, Yogyakarta, Minangkabau, dan Bali merupakan contoh tujuan wisata budaya di Indonesia.

Dalam Undang-Undang Kepariwisataan No. 10 2009 disampaikan definisi pariwisata yaitu berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Indonesia merupakan negara yang memiliki peluang yang besar di industri wisata, terutama di daerah-daerah yang belum terekspose seperti pulau-pulau kecil di bagian Indonesia Timur, namun di daerah-daerah yang sudah padat penduduk seperti di Pulau Jawa juga masih banyak daerah yang menyuguhkan pemandangan yang tak kalah menarik,

salah satunya adalah Desa Lobang yang terletak di Kabupaten Batang, Jawa Tengah.

Desa Lobang adalah satu-satunya desa di Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang yang memiliki areal hutan pinus dan hutan damar. Desa ini terletak di dataran yang lebih tinggi dari desa lain di Kecamatan Limpung maka suhu udara rata-rata di desa ini juga lebih rendah. Pada awal tahun 2017, Desa Lobang merintis berdirinya wanawisata baru di wilayah Kecamatan Limpung, yaitu dengan memanfaatkan dan mengembangkan potensi yang ada di Desa Lobang yaitu keindahan hutan pinus, hutan damar dan Curug Pager. Wanawisata ini diberi nama "WANAWISATA LOBANG POLOWONO" sebagai nama yang unik dan bersejarah. Kawasan ini berpotensi untuk dijadikan wanawisata dan bumi perkemahan sekaligus karena areal hutan yang luas dan cenderung datar sekaligus didukung keindahan alamnya.

Wanawisata ini pertama kali dirintis oleh pemuda karang taruna yang sadar akan potensi wisata di desa Lobang. Ide ini disampaikan ke pihak desa untuk mendapat dukungan. Tetapi ternyata diluar dugaan dukungan juga datang dari pihak perhutani dan kecamatan. Untuk menarik para wisatawan, di area wisata Desa Lobang dibangun atau dilengkapi dengan fasilitas gardu pandang, aula pertemuan, toilet, mushola, area selfie, area parkir sepeda motor dan mobil, rumah pohon, perbaikan jalan ke Curug Pager, Curug Kembar, flying fox, jembatan cinta, gazebo, kantin dan fasilitas pendukung lainnya.

Tak hanya indah, sejuk dan dingin hawa perbukitan disertai desiran angin menerpa rimbunan pohon pinus menambah keasrian alam Wana Wisata Lobang yang memiliki ketinggian 700 Mdpl sangat cocok juga bagi pecinta wisata adventure. Ditempat itu, pengunjung juga bisa menikmati keasrian dan dinginya air tiga Curug yaitu, Curug pager, Curug pawon dan Curug kembar. Selain kaya akan pemandangan alamnya, pengunjung juga akan disuguhi produk lokal yakni kopi Robusta asli dari Lobang Kecamatan Limpung, serta edukasi kopi oleh pemandu wisata.

Potensi wisata merupakan segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah untuk daya tarik wisata dan berguna untuk mengembangkan industri pariwisata di daerah tersebut (Sukardi, 1998). Seperti halnya yang dapat dilihat di Desa Lobang yang memiliki potensi yang tinggi di sektor pariwisata, daerah tersebut dapat dikembangkan menjadi desa wisata yang nantinya akan memberikan kontribusi pada perekonomian desa.

Adanya pengembangan wanawisata yang telah dilakukan, ternyata belum diiringi dengan tingkat kunjungan wisatawan yang tinggi. Lokasinya yang jauh dari perkotaan menyebabkan banyak masyarakat luas belum mengenal objek wisata yang berkembang di daerah ini. Berkembangnya berbagai media sosial di masa ini ternyata juga belum digunakan untuk sarana promosi. Untuk

memaksimalkan kunjungan, perlu dilakukan upaya yang harus dilakukan pengelola, pemerintah daerah maupun masyarakat setempat. Agar selanjutnya upaya tersebut mampu menambah jumlah kunjungan wisatawan juga dapat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat melalui adanya *multiplier effect* yang di timbulkan dengan berkembangnya suatu objek wisata desa.



**Gambar 1.** Daya Tarik Wisata Desa Lobang, Batang

## PEMBAHASAN

Menurut James J. Spillane (1987) terdapat lima unsur industri pariwisata yang sangat penting, dan menjadi pokok dalam pengembangan daya tarik wisata diantaranya yaitu:

### 1. *Attractions* (daya tarik)

*Attractions* dapat digolongkan menjadi dua yaitu *site attractions* dan *event attractions*. *Site attractions* merupakan daya tarik fisik yang permanen dengan lokasi yang tetap seperti kebun binatang, keraton dan museum.

Sedangkan *event attractions* adalah atraksi yang berlangsung sementara dan lokasinya dapat dipindah dengan mudah seperti festival, pameran atau pertunjukan kesenian daerah.

#### 2. *Facilities* (fasilitas-fasilitas yang diperlukan)

Fasilitas cenderung berorientasi pada daya tarik disuatu lokasi karena fasilitas harus terletak dengan pasarnya. Selama tinggal ditempat tujuan wisata wisatawan memerlukan tidur, makan dan minum oleh karena itu sangat dibutuhkan fasilitas penginapan. Selain itu ada kebutuhan akan *support industries* seperti toko souvenir, cuci pakaian, pemandu, dan fasilitas rekreasi.

#### 3. *Infrastructure* (infrastruktur)

Daya tarik dan fasilitas tidak dapat dicapai dengan mudah kalau belum ada infrastruktur dasar. Perkembangan infrastruktur perlu untuk mendorong perkembangan pariwisata. Infrastruktur dan suatu daerah sebenarnya dinikmati baik oleh wisatawan maupun masyarakat yang juga tinggal di daerah wisata, maka penduduk akan mendapatkan keuntungan. Pemenuhan atau penciptaan infrastruktur adalah suatu cara untuk menciptakan suasana yang cocok bagi perkembangan pariwisata.

#### 4. *Transportations* (transportasi)

Dalam sector pariwisata, kemajuan dunia transportasi atau angkutan sangat dibutuhkan karena sangat menentukan jarak dan waktu dalam suatu perjalanan wisata. Transportasi baik darat, udara maupun laut merupakan suatu unsur utama langsung yang merupakan tahap dinamis gejala-gejala pariwisata.

#### 5. *Hospitality* (keramahtamahan)

Wisatawan yang berada dalam lingkungan yang tidak mereka kenal memerlukan kepastian jaminan keamanan khususnya untuk wisatawan asing yang memerlukan gambaran tentang tempat tujuan wisata yang akan didatangi. Maka kebutuhan dasar akan keamanan dan perlindungan harus disediakan dan juga keuletan serta keramahtamahan tenaga kerja wisata perlu dipertimbangkan supaya wisatawan merasa aman dan nyaman selama perjalanan wisata.

Adanya potensi wisata yang dapat dikembangkan di desa, antara lain adanya objek "Wanawisata Polowono" di Desa Lobang yang menjual keindahan alamnya, dalam pengembangannya juga harus memperhatikan pengembangan dan inovasi daya tarik, fasilitas, infrastruktur, transportasi serta keramahtamahan penduduk dalam keterbukaannya terhadap kedatangan

wisatawan. Berikut merupakan gambaran daya tarik wisata yang dimiliki oleh Desa Lobang.

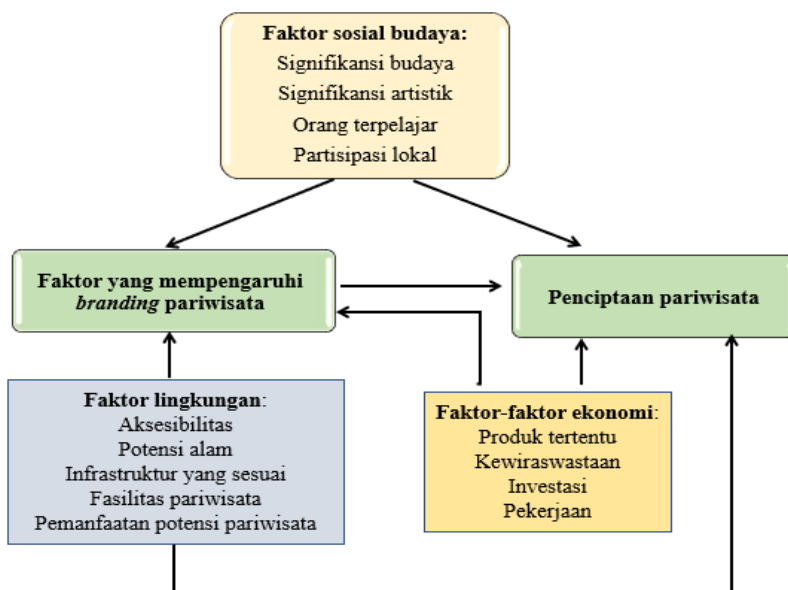


**Gambar 2.** Potensi Wisata Desa Lobang

Hal terpenting lainnya setelah unsur-unsur utama terpenuhi adalah peran *branding* dan pemasaran atau promosi sangatlah diperlukan. Ini dilakukan untuk menciptakan merek pariwisata di desa Lobang sehingga membuat lokasi tampak menarik bagi wisatawan dan mendorong mereka untuk menghabiskan lebih banyak waktu di tempat ini sehingga dapat meningkatkan taraf hidup penduduk Desa Lobang. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi *branding* wisata di suatu tempat. Faktor-faktor yang mempengaruhi brand wisata pedesaan terbagi dalam tiga kategori yaitu ekonomi, sosial dan fisik-lingkungan (Anabestani, 2016). Gambar 3.

*Branding* merupakan tindakan yang strategis dan didukung oleh pemikiran yang logis serta didasarkan pada kebutuhan sasaran, maka brand suatu komoditas atau destinasi harus memiliki fungsi yang sejalan dengan pemasaran. Masing-masing fungsi tersebut merupakan data keluaran dari kegiatan yang diharapkan dalam pemasaran dan *branding*. Pada Desa Lobang sasaran yang ingin dicapai dari penciptaan pariwisata adalah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga upaya yang dilakukan adalah pengembangan daya tarik desa yang dimiliki Desa Lobang. Salah satunya

melalui kegiatan aksi penguatan ekonomi masyarakat local. Hal ini menyiratkan prinsip keberlanjutan (*sustainability*) yang menguntungkan secara ekonomi dan dapat dipertanggungjawabkan secara ekologis. Sedangkan prinsip partisipasi diwujudkan dengan melibatkan masyarakat lokal sebagai subyek aksi. Dalam hal ini kegiatan *branding* dan pemasaran wisata dapat dilakukan melalui pelatihan SDM pengelola, pendampingan dan pemantauan dapat dilakukan kepada masyarakat terutama karang taruna sebagai penggerak wisata daerah setempat. Berikut kerangka kegiatan pengembangan daya tarik wisata yang dapat diimplementasikan.



Sumber : (Anabestani, 2016)

**Gambar 3.** Faktor yang mempengaruhi pembentukan *brand* pariwisata.



**Gambar 4.** Kerangka Pengembangan Wisata

Beberapa pendekatan yang dilakukan adalah sebagai berikut;

1. *Focus Group Discussion* memetakan potensi Pariwisata dan *Branding* Wisata

Sosialisasi ini penting untuk dilakukan supaya pengelola objek wisata atau para karang taruna tergerak untuk mengetahui manfaat dari adanya *branding* dan pemasaran wisata. Dimana hal tersebut akan sangat berguna bagi pengembangan wisata Desa Lobang. Kegiatan ini dilakukan sebagai salah satu tahapan supaya diperoleh satu kesepahaman mengenai pengembangan Desa Lobang sebagai desa wisata. Seperti yang dikemukakan oleh (Ayazlar & Ayazlar, 2016) bahwa untuk menjadi desa wisata maka tahapan yang dapat dilalui antara lain;

- a. Tahap 1 Beberapa penduduk mengenali peluang dan mengintegrasikan sumber daya pariwisata ke dalam perencanaan sosial ekonomi.
- b. Tahap 2 Kelompok masyarakat merencanakan dan melaksanakan strategi pariwisata sebagai bagian dari pembangunan ekonomi
- c. Tahap 3 Mengembangkan kemitraan masyarakat dan badan pariwisata formal membantu mengubah rencana menjadi atraksi yang bertahan lama
- d. Tahap 4 Terjadi perencanaan dan pemasaran pariwisata yang sepenuhnya terpusat, kooperatif, dan berjangka Panjang.

Meski Desa Lobang memiliki keadaan geografis atau historis yang menguntungkan, diperlukan kepemimpinan yang karismatik dan terampil untuk memberi dorongan pada kemampuan komunitas desa dalam mencapai tujuan yang tinggi. Selain itu perlu ada adanya pembagian baik keuntungan maupun partisipasi dari stakeholder yang terlibat. Sifat partisipasi dalam proyek *Community Based Tourism* (CBT) akan berhasil dan tercapai keseimbangan optimal apabila ada keterlibatan internal dan eksternal (Kontogeorgopoulos et al., 2014). Lebih lanjut dicontohkan pada sebuah kampung wisata di Thailand yaitu Kampung Mae yang digambarkan bahwa pembagian keuntungan dan partisipasi yang luas menjadikannya CBT yang sukses. Pelajaran yang berharga bahwa mobilisasi mandiri desa ini diinspirasi dan dikelola oleh kepala desa, bekerja sama dengan elit kunci dari komunitas lain seperti kepala vihara desa, tetua desa, dan pemimpin informal dari enam dusun (dikenal dalam bahasa Thai sebagai pang) yang membentuk Kampung Mae. Dengan cara ini, pariwisata di Kampung Mae berbasis komunitas, di mana komunitas itu sendiri memprakarsai pariwisata dan mempertahankan kendali atas alam dan arahnya, dan berorientasi pada komunitas, di mana para elit desa dan aktor eksternal mengambil langkah-langkah untuk menghasilkan manfaat bagi komunitas sebagai semua.





**Gambar 5.** *Focus Group Discussion* memetakan potensi Pariwisata dan *Branding* Wisata

## 2. *Capacity Building* Melalui Training Pemasaran Berbasis IT (Pemasaran Secara Online).

Saat ini website dan sosial media merupakan alat yang sangat berguna bagi pemasar dalam menciptakan merek yang kuat dan menciptakan keunggulan kompetitif (Suryadinatha Gordha et al., 2020). Inilah yang menjadi tantangan bagi pengelola wisata Desa Lobang untuk dapat mengoptimalkan media digital tersebut sebagai saluran pemberian informasi kepada calon pengunjung, menghubungkan dengan para pemangku kepentingan, dan akhirnya menghasilkan kunjungan wisatawan yang meningkat. Harapannya, Desa Wisata Lobang menjadi lebih dikenal baik wisatawan local maupun dari mancanegara. Dengan adanya *capacity building* ini, pengelola wisata Desa Lobang menjadi lebih mengerti dan lebih fasih menggunakan teknologi informasi sehingga mampu melakukan update terhadap media digital yang dimiliki.

## 3. Kegiatan Supervisi (Pengawasan)

Kegiatan pendampingan sangat perlu dilakukan sebagai upaya implementasi hasil pelatihan yang diberikan kepada pengelola daya tarik wisata. Secara berkala tenaga ahli harus turun ke desa guna meninjau secara langsung bagaimana perkembangan di lapang sekaligus memonitor dan memberikan pengarahan terhadap kegiatan yang dilakukan pendamping. Setelah kegiatan pendampingan berakhir, supervisi tetap dilakukan untuk mengetahui bagaimana keberlanjutan program yang dilakukan atas inisiatif masyarakat sendiri.

Pengawasan dapat dilakukan untuk memastikan proses pembuatan *brand* wisata di Desa Lobang dengan melihat beberapa poin penting antara lain:

- a. Memberikan perhatian khusus pada produk khas yang dimiliki, seperti tanaman dan buah-buahan, batu dan kayu untuk menciptakan brand pariwisata pedesaan.
- b. Memberikan perhatian khusus pada kewirausahaan di pedesaan untuk menciptakan atraksi baru di pedesaan yang dapat membuka jalan bagi pengembangan brand pariwisata.
- c. Menyediakan fasilitas pariwisata seperti restoran, tempat penginapan berlatar belakang desa-yang sejuk dan hijau untuk menarik lebih banyak wisatawan dan menciptakan brand pariwisata pedesaan.
- d. Untuk memulihkan unsur-unsur budaya dan lebih memperhatikan adat istiadat yang terkadang sudah mulai tergerus jaman, maka perlu dimunculkan untuk memberi peluang baru bagi penciptaan merek pariwisata pedesaan baru di Desa Lobang.

## **PENUTUP**

Desa Lobang di Kabupaten Batang Jawa Tengah memiliki potensi yang besar untuk dapat dikembangkan menjadi Desa Wisata yang berbasis masyarakat (*Community Based Tourism, CBT*). Artikel ini memiliki tujuan untuk menggali cara bagi pengembangan daya tarik wisata melalui *branding* wisata di Desa Lobang. Potensi endowment yang dimiliki perlu dikenali sehingga akan diperoleh produk yang unik bagi pengembangan daya tarik sehingga mampu berperan sebagai *branding* wisata. Penyiapan sumber daya manusia yang fasih dan melek teknologi menjadi kunci sukses atau tidaknya *branding* wisata ini. Poin terakhir yang sangat penting adalah bahwa pengembangan Desa Lobang sebagai CBT tidak akan berhasil tanpa partisipasi yang kuat dari masyarakat local sebagai pelaku utama serta pimpinan dan perangkat elit desa yang bijak dan paham dengan kondisi yang dimiliki di wilayahnya. Sinergi itulah yang diharapkan mampu mewujudkan Desa Lobang sebagai sebuah Desa Wisata.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- A J, Muljadi.2012. *Kepariwisata dan Perjalanan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Anabestani, A. (2016). an Analysis of Factors Affecting Tourism Brands in Rural Settlements of Iran (Case Study: Binaloud County). *The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication*, 6(AGSE), 2061–2075. <https://doi.org/10.7456/1060agse/084>

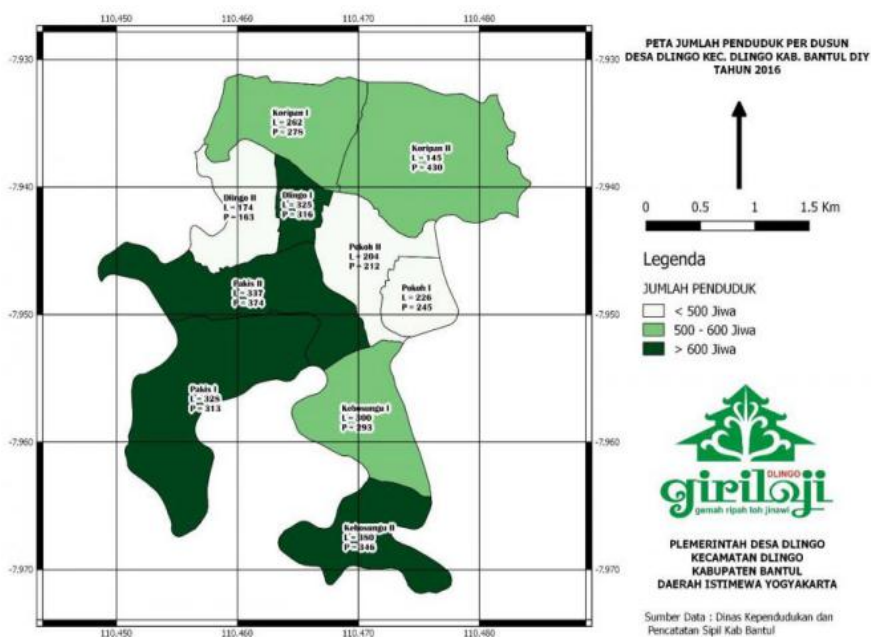
- Ayazlar, G., & Ayazlar, R. (2016). Rural Tourism : A Conceptual Approach. In *Tourism, Environment and Sustainability* (Issue 14, pp. 167–184).
- Kontogeorgopoulos, N., Churyen, A., & Duangsaeng, V. (2014). Success Factors in Community-Based Tourism in Thailand: The Role of Luck, External Support, and Local Leadership. *Tourism Planning and Development*, 11(1), 106–124. <https://doi.org/10.1080/21568316.2013.852991>
- Oka. A. Yoeti. 2008. *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata Jakarta: Pradnya Paramita*.
- Spillane, J.J. 1987. *Pariwisata Indonesia Sejarah dan Prospeknya*. Yogyakarta: Kanisus.
- Suwantoro, Gamal. 2004. *Dasar-dasar Pariwisata*. Yogyakarta: Andi
- Suryadinatha Gorda, A. A. N. O., Widya Hadi Saputra, W. H. S., & Yunita Anggreswari, N. P. (2020). Komunikasi Pemasaran Pariwisata Berbasis Digital (Studi pada Desa Sambangan Kabupaten Buleleng). *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 3(1), 1–11. <https://doi.org/10.37329/ganaya.v3i1.418>.

## PENGADAAN DAN PENDAMPINGAN PENGELOLAAN *WEBSITE* WISATA ALAM MAHESA JAYA RIVER TUBING SEBAGAI USAHA PENINGKATAN EKONOMI WARGA KEBOSUNGU DLINGO BANTUL

Nurul Aisyah, Marsudi, Deantari Dwikan Putri Aji,

### PENDAHULUAN

Dusun Kebosungu terletak desa Dlingo, kecamatan Dlingo, kabupaten Bantul, provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dusun Kebosungu merupakan dusun paling ujung wilayah timur dari kabupaten Bantul, dan berbatasan dengan kabupaten Gunung Kidul. Jarak dusun Kebosungu dari pusat desa adalah 3 km. Jarak dari pusat pemerintahan kecamatan adalah 4 km. Dan jarak dari pusat pemerintahan provinsi adalah 40 km. Dusun Kebosungu I terdiri 5 (lima) RT. Dusun Kebosungu I terdiri dari tanah tempat tinggal yang dikelilingi sungai Oya sebagai perbatasan antara kabupaten Bantul dan kabupaten Gunung Kidul. Digambarkan melalui peta berikut:



Gambar 1. Peta desa Dlingo

Masyarakat dusun Kebosungu merupakan salah satu dusun di Dlingo kabupaten Bantul yang memiliki destinasi wisata susur sungai (*River Tubing*). *River Tubing* yang dikenal dengan Mahesa Jaya ini merupakan salah satu potensi wisata alam yang dimiliki oleh Dlingo. Dalam berjalannya waktu, Mahesa Jaya River Tubing (MJRT) ini belum memiliki website sebagai sarana promosi guna memperkenalkan destinasi wisata baru di Dlingo. Penggunaan website juga sebagai optimalisasi media publikasi (Ni'mah, 2015). Hingga kini promosi sudah sering dilakukan melalui lisan - kelisan dan media sosial seperti Facebook maupun Instagram. Media sosial merupakan media paling efektif dalam promosi (Oktaviani & Fatchiya, 2019; Purbohastuti, 2017). Namun demikian keberadaan website juga dirasa penting, maka perlu pengadaan website sebagai media pemasaran yang terpercaya (Riyanto, 2015), Maka perlu adanya pengadaan website untuk meningkatkan ekonomi warga melalui potensi wisatanya.

Berbagai produk lokal dapat menggunakan website sebagai promosi pengenalan produk daerah kepada khalayak luas. Wibisono & Susanto (2015) menyampaikan bahwa pengadaan website sebagai media informasi dan promosi berbagai produk. Di Kebosungu memiliki produk lokal yaitu olahan makanan yang diberi nama "PINGU". "PINGU" kepanjangan dari Emping Mbesungu, olahan ini nantinya juga akan dipasarkan melalui website MJRT. Sehingga destinasi wisata lokal dan produk makanannya dapat dikenal khalayak luas. Pemasaran "PINGU" dua tahun lalu telah dibantu oleh tim KKN UMY. Selain dipasarkan melalui website, "PINGU" juga didesain seunik mungkin dengan memperbarui kemasan menjadi kekinian sebagaimana gambar 2 berikut:



Gambar 2. Kemasan Baru PINGU

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk pengembangan inovasi promosi melalui pengadaan website khusus MJRT yang nantinya juga diisikan konten paket-paket wisata disana, dan pengenalan produk makanan lokal Kebosungu Dlingo, agar kedepannya dapat dikenal khalayak luas sebagai objek wisata air Dlingo dan mampu meningkatkan jumlah pengunjung yang mana nantinya secara tidak langsung akan mengangkat perekonomian warga dusun setempat. Hal ini senada dengan yang dipaparkan oleh Riyanto (2015) dalam seminarnya bahwa jika website diberi muatan konten sesuai dengan konten pemasaran yang sesuai maka akan meningkatkan pengunjung atau konsumen.

**PEMBAHASAN**

**Pengadaan Website Wisata Alam MJRT**

Penelitian ini diawali dengan koordinasi dan pembagian tugas yang disusun sebagai berikut:

**Tabel 1.** Tim Lapangan

Nama	Tugas
Ais	Mendampingi, mengontrol, membimbing keseluruhan kegiatan
Fitro, Septian, Fikri	Pengumpulan konten – Pendokumentasian aktivitas MJRT
Ris, Dea, Dika	Pembuatan <i>Website</i> MJRT
all	Pedampingan Pengelolaan <i>Website</i> MJRT
all	Penyusunan Modul

Sebelum kegiatan pendampingan, dilakukan pengontrolan untuk memastikan kesiapan desain program pendampingan dan kesiapan antara pendamping dengan peserta. Para peserta yaitu para admin website yang telah ditunjuk oleh tim MJRT memulai menerima materi pendampingan yang meliputi mengupload konten, menambah menu, maupun mengedit konten. Para pendamping yaitu mahasiswa IT dan dosen UMY.

Langkah-langkah yang dilakukan yaitu, pertama melakukan koordinasi dengan warga setempat meliputi Kepala Desa hingga Kepala Dusun sebagaimana gambar 1, kemudian melakukan verifikasi kepada tim MJRT. Kedua melakukan koordinasi internal tim sebagaimana pada Gambar 2.

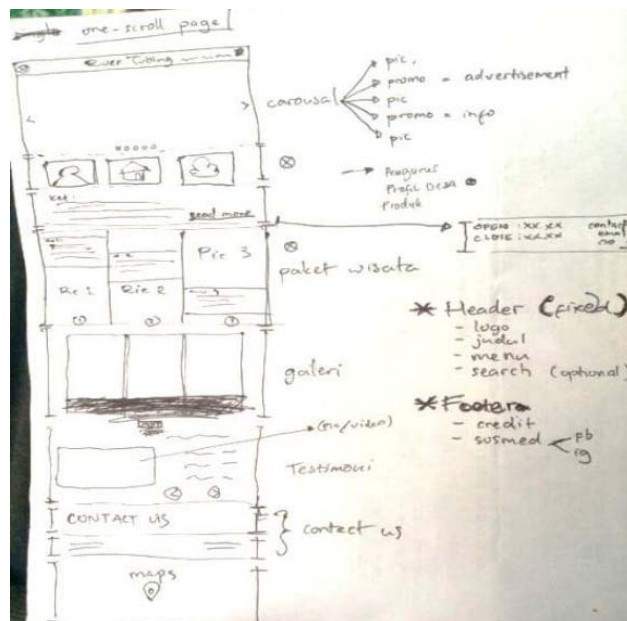
Website memiliki tujuan sebagai media publikasi paling efektif dalam menyebarkan informasi terkait konten didalamnya dan juga memiliki tampilan yang komunikatif guna menarik antusiasme calon penikmat wisata/ user (Ni'mah, 2015). Dalam pembuatan website dipilih website wix yang mana ini berdasarkan hasil koordinasi dengan tim MJRT. Kami bersama tim website mulai mendaftar dan mulai membuat *mockup*, kemudian dirancanglah *mockup* seperti berikut pada Gambar 3.



Gambar 1. Koordinasi Tim Pelaksana dengan Masyarakat Kebosunggu

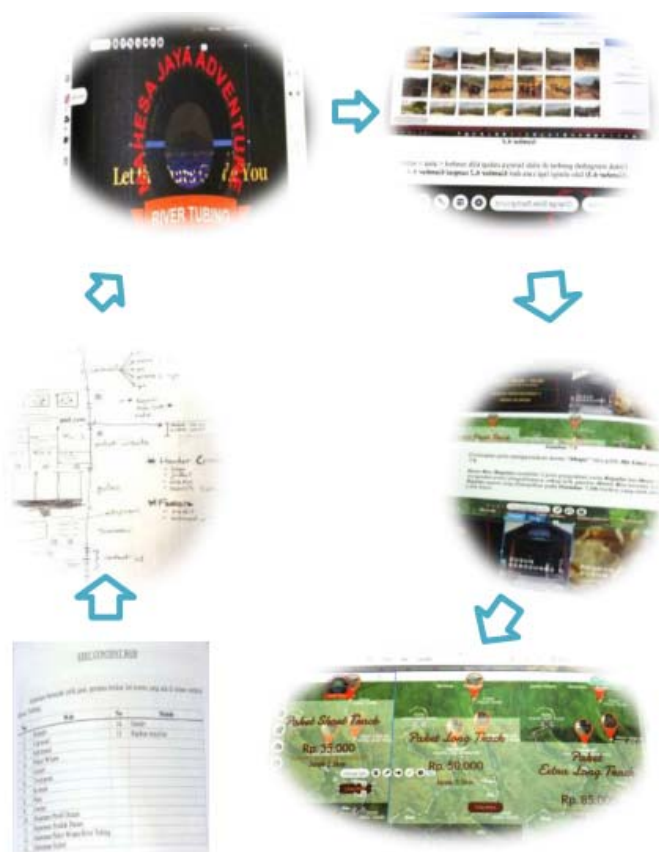


Gambar 2. Koordinasi Internal Tim



Gambar 3. Mockup

*Mockup* adalah suatu desain visual dua dimensi hasilnya menyerupai bentuk asli, yang mana memberikan gambaran awal dari sebuah konsep yang akan terlihat jelas detail-detailnya jika sudah terealisasi (primecybr.com; dinus.ac.id). Perlu kiranya *mockup* digunakan untuk bisa menyatukan komunikasi antara desainer dengan programmer website yang akan membuat sebuah halaman website dengan desain dan fungsi yang diinginkan. Dengan rangkaian tahapan sebagai berikut:



**Gambar 4.** Alur penyusunan (*design*) Website

Uraian tahapan sebagaimana berikut:

- Pada tahap I : Menentukan apa saja yang akan dijadikan konten website
- Pada tahap II : Penyusunan *mockup* website (kasar)
- Pada tahap III : Menentukan templete yang akan di gunakan.
- Pada tahap IV : Mempersiapkan berbagai foto maupun video, guna untuk tampilan *slides*
- Pada tahap V : Menyusun teks untuk tampilan tiap slide nya



Pada tahap VI : Tertera tampilan yang sudah dibuat.

Pada tahap VI terdapat hasil design paket *river tubing track* beserta jarak panjang *track* yang ditawarkan, sebagaimana desain banner dibuat sedemikian rupa untuk memikat pengunjung, tampilan banner terlihat sebagai berikut:



Gambar 5. Panjang Track dari MJRT

### Pendampingan Mengelola Website kepada Para Admin Website

Di atas tentang tahapan penyusunan website, maka berikutnya tentang pendampingan (pelatihan website) yang ditujukan untuk para admin MJRT yang baru saja dibentuk.

Tahap I: Menyusun jadwal kesepakatan berlangsungnya pendampingan mengelola website.

Jadwal pelaksanaan tertera pada Tabel 2 berikut:

**Tabel 2.** Jadwal pelaksanaan

Pekan	Σ Pertemuan	Peserta (admin MJRT)	Tim Pendamping
I (3X)	2 X P 1X BM		
II(4X)	2 X P 2 X BM	Luthfi Alfian Saiful	Dika Dea Risna
III(3X)	1 X P 2 X BM		

Ket:

P: Pertemuan didampingi tim pendamping

BM: Pertemuan tanpa didampingi tim pendamping (eksplora mandiri)

Tahap II: Pengenalan website kepada para admin.

Pengenalan website dan pengantar sebagaimana tertera pada Gambar 6 berikut:



**Gambar 6.** Tampilan Website Halaman utama

Tahap III: Pelaksanaan pendampingan mengelola website

Sebagaimana Gambar 7 berikut:

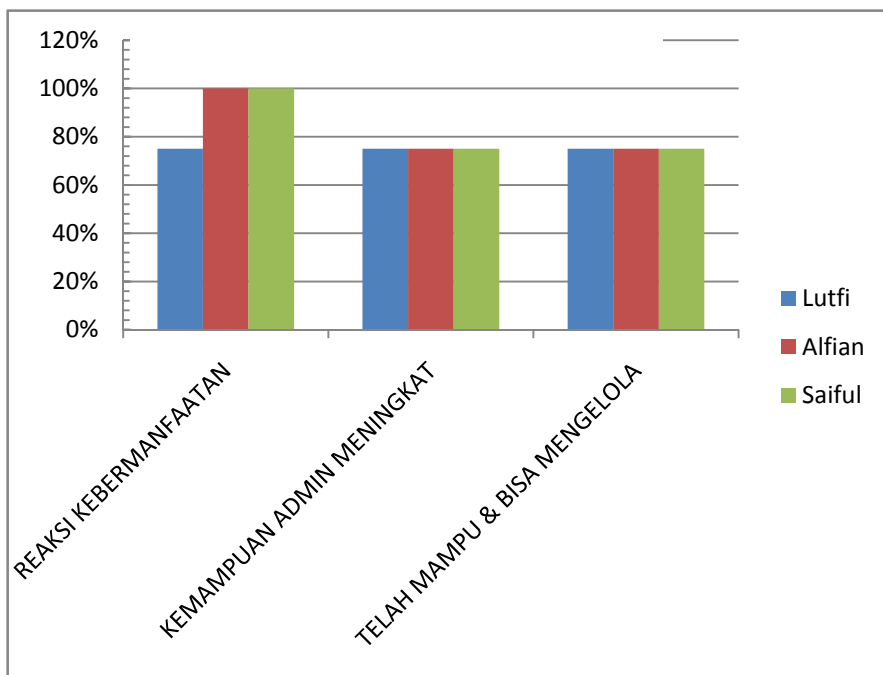


**Gambar 7.** Pelaksanaan Pendampingan Pengelolaan Website MJRT

#### Tahap IV: Evaluasi kegiatan

Setelah kegiatan pendampingan dilakukan maka dilakukan evaluasi terkait dengan proses pelaksanaan hingga kepada penyerapan materi oleh peserta pendampingan.

Penyerapan materi selengkapnya digambarkan pada Grafik 1 berikut:



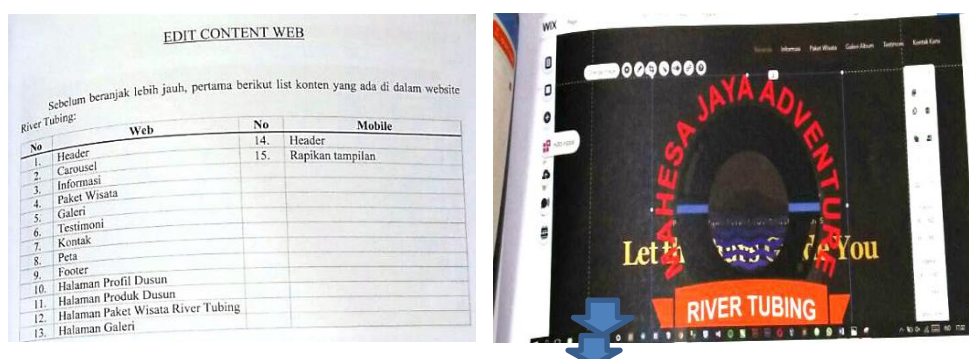
**Grafik 1.** Hasil Angket Peserta Pendampingan

Pendampingan pengelolaan *website* ini dirasa berhasil dengan beberapa angket yang diberikan setelah admin menyelesaikan pelaksanaan pendampingan.

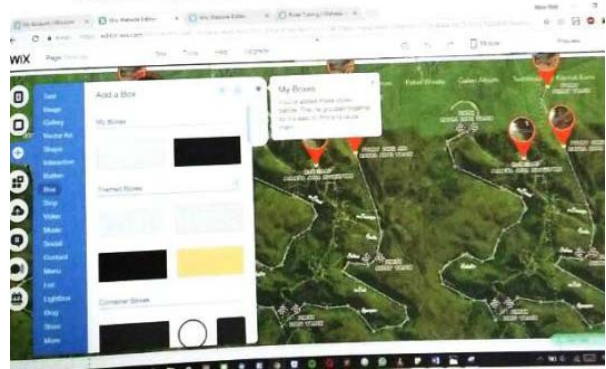
Hasil *website* yang telah dikelola oleh admin website dapat di cek di laman berikut:

<https://mahesajayaadventure.wixsite.com/>

Tahap V: Penyusunan modul panduan pengelolaan website dengan beberapa langkah berikut:

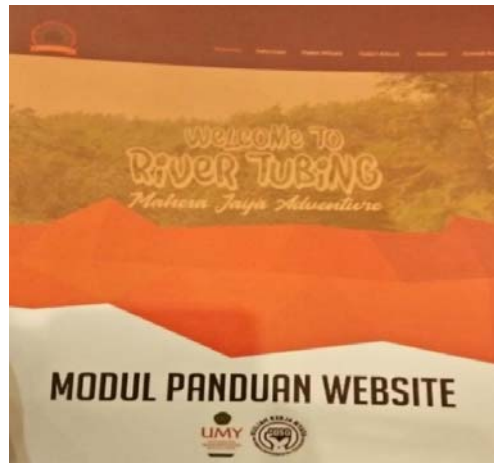


Selanjutnya tambahkan *Container Box* dengan cara memilih menu *Box* lalu pilih *Theme Box* seperti (Gambar 8.9)



Gambar 7. Proses Penyusunan Panduan Pengelolaan Website MJRT

Dalam penyusunan modul panduan pengelolaan website, tim pendamping menyusun dimulai dari menentukan konten isi modul, langkah untuk merubah *layout* awal, langkah untuk menambah tampilan-tampilan pada slides yang tersedia pada *one scroll page* di tampilan website. Tampilan *one scroll page* yang dimaksud adalah 1 halaman layar yang mampu menampilkan keseluruhan *content*, tampilannya dapat digeser (*slides*). Terakhir finishing dan mendesain *cover* modul yaitu sebagai berikut:



**Gambar 8.** Tampilan Cover Modul

Setelah modul panduan tersusun, 10 modul diserahkan kepada tim MJRT dan pemerintah desa Dlingo. Hal ini dilakukan guna untuk pendampingan secara *self study* bagi para admin website MJRT. Jikalau secara teknis ada beberapa langkah yang terlupa dalam mengelola website MJRT, maka dengan penyerahan beberapa modul ini diharapkan para admin tidak menemui kendala pengelolaan website di waktu-waktu kedepan.



**Gambar 9.** Penyerahan Modul kepada Tim MJRT



**Gambar 10.** Penyerahan Modul kepada Pemerintah Desa Dlingo Sebagai Literasi Baca

### **Peningkatan Jumlah Pengunjung MJRT sebagai Usaha Peningkatan Ekonomi**

Peningkatan ekonomi warga ditandai dengan semakin meningkatnya pemasukan ke Desa melalui wisata alam MJRT. Adanya peningkatan jumlah pengunjung sebagaimana pada gambar 11 berikut:



**Gambar 11.** Pengunjung dari Rombongan Tim Hotel Hyat Yogyakarta

Mulai mendapatkan perhatian lebih dari dinas pariwisata DIY, hal ini terlihat dari gambar 12 berikut:



**Gambar 12.** Kunjungan dari Dinas Pariwisata DIY

Kebermanfaatan yang diperoleh dari pengadaan website wisata alam MJRT ini cukup signifikan yaitu memberikan kebermanfaatan kepada masyarakat Kebosunggu diantaranya berupa: peningkatan jumlah pengunjung, perhatian dari dispar setempat dan meningkatnya jumlah ajakan kerjasama dengan destinasi wisata di Dlingo lainnya seperti wisata Puncak Becici, serta sudah bisa mendirikan stan-stan informasi di sekitar Hutan Pinus Dlingo dan Gunung Mungker Dlingo. Pengunjung yang terdata setelah terpublikasinya website yaitu diantaranya rombongan tim dari hotel Hyat Yogyakarta, Dimas

dan Diajeng Bantul beserta net TV, rombongan pengunjung dari RSUD Wonosari dan tamu berbagai daerah lainnya seperti Jakarta, Sumatra. Senada dengan yang disapaikan Oktaviani dan Fatchiya (2019) bahwa semakin meningkatnya pengunjung maka diindikasikan bahwa website telah memberikan informasi yang jelas dan terang tentang keberadaan obyek wisata yang ditawarkannya.

## **PENUTUP**

Hasil yang didapatkan dari pengadaan website wisata alam MJRT ini cukup signifikan yaitu memberikan kebermanfaatn kepada masyarakat Kebosungu diantaranya berupa: peningkatan jumlah pengunjung dan meningkatnya kerjasama dari destinasi wisata disekitarnya. Hal ini dibuktikan dengan saat website sudah terpublikasikan berbagai pengunjung mengunjungi MJRT ini mulai dari hotel Hyat Yogyakarta, Dimas dan Diajeng Bantul beserta net TV, pengunjung dari RSUD Wonosari dan tamu berbagai daerah lainnya seperti Jakarta, Sumatra, serta Wisata MJRT mendapatkan perhatian lebih dari Dispar DIY. Ditambah mulai adanya ajakan kerjasama dengan destinasi wisata Puncak Becici Bantul. Selain itu, sudah mulai bisa untuk mendirikan stan stan informasi di pusat pusat keramaian di Dlingo seperti Hutan Pinus maupun Gunung Mungker Dlingo. Dengan usaha ini, perekonomian warga perlahan mulai meningkat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ni'mah, Khoirun. (2015). *Optimalisasi Penggunaan Website sebagai Media Publikasi Pengelolaan Zakat oleh Dompot Dhuafa*. UIN Yogyakarta.
- Oktiviani, Wanda Fazriah dan Fatchiya, Anna (2019). *Efektifitas Media Sosial Sebagai Media Promosi Wisata Umbul Ponggok, Kabupaten Klaten*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol 17 No. 1.
- Purbohastiti, Arum Wahyuni (2017). *Efektifitas Media Sosial Sebagai Media Promosi*. *Tirtayasa Ekonomika* Vol 12 No. 2.
- Riyanto, Andi Dwi (2015). *Pengadaan Website sebagai Media Promosi Terpercaya*. *SemnasIF UPN Veteran Yogyakarta*.
- Wibisono, Guntur dan Eko Susanto, Wahyu. (2015). *Perancangan Website Sebagai Media Informasi Dan Promosi Batik Khas Kabupaten Kulonprogo*. *Jurnal Evolusi*, Vol 2 No. 3. 64-69.
- Dinus.ac.id. *An Introduction to Web Design and Programming*.  
<http://dlingo-bantul.desa.id>  
[primecybr.com](http://primecybr.com).

---

## PERBATASAN DAN KETERBATASAN: MENEROPONG PELAKSANAAN NAWACITA DI KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Afriyadi

### PENDAHULUAN

Narasi membangun Indonesia dari perbatasan bukan wacana baru, namun kawasan perbatasan belum banyak mengalami perubahan. Masih banyak kendala dan keterbatasan yang dihadapi. Kendala dan keterbatasan, semakin terasa di tengah pandemi *Covid-19*. Dalam kondisi normal, wilayah perbatasan sudah memprihatinkan, baik dari segi aksesibilitas, fasilitas pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi. Selama ini kawasan perbatasan dikelola dengan mengedepankan pendekatan keamanan (*safety belt approach*) sehingga pembangunan sosial ekonomi menjadi terabaikan (*Partnership for Governance Reform*, 2011).

Kondisi yang sama terjadi di wilayah perbatasan di Kepulauan Riau, dengan 20 pulau terdepan (Perpres No.78 Tahun 2005) telah menempatkan Provinsi Kepulauan Riau sebagai Provinsi terbesar yang memiliki pulau terdepan dibandingkan dengan Provinsi Maluku (18 pulau terdepan), Provinsi Sulawesi Utara (11 pulau terdepan) serta Provinsi Papua (9 pulau terdepan). Masalah keterbatasan, keamanan dan peningkatan kesejahteraan (*prosperity*) menjadi perhatian khusus pemerintah, terutama dalam penerapan kebijakan pembangunan di kawasan perbatasan.

Jika berkaca dari pelaksanaan pembangunan di beberapa negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia, mereka telah mengembangkan kawasan perbatasan sebagai salah satu kawasan pertumbuhan ekonomi yang telah maju dengan dukungan sarana dan prasarana fisik yang lengkap, disertai dengan sumberdaya manusia yang berkualitas. Kondisi ini jelas membuat iri beberapa kawasan perbatasan, terutama pada kawasan perbatasan yang memiliki potensi, namun pemanfaatannya belum dilakukan secara maksimal dan hanya menjadi ladang penjarahan dari negara lain, dengan mengeksplotasi sumber daya alamnya.

Tuntutan peningkatan kesejahteraan, pengembangan kegiatan perekonomian serta penyediaan sarana dan prasarana menjadi suatu keniscayaan yang harus dipenuhi, tidak hanya oleh Pemerintah Pusat tetapi juga oleh



Pemerintah Provinsi. Tidak sedikit Undang-Undang yang mengamankan perlakuan khusus dalam mengelola kawasan perbatasan, seperti UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan dipertegas kembali melalui UU No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Namun secara keluruhan belum terpenuhi dengan baik, diperparah lagi dengan pelaksanaannya yang belum terintegrasi dan tumpang tindih antar sektor dan institusi serta tidak berjalannya koordinasi karena ego-sektoral dan prioritas yang berbeda.

Untuk mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat, diperlukan pengembangan sektor prioritas, yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah guna menciptakan efek *spillover* terhadap output, lapangan kerja, dan investasi (Caporaso dan Levine, 2008).

## PEMBAHASAN

### 1. Lebih Dekat dengan Pulau Terdepan di Kabupaten Kepulauan Anambas

Kepulauan Anambas, secara terletak antara  $2^{\circ} 10' 0''$  -  $3^{\circ} 40' 0''$  Lintang Utara dan  $105^{\circ} 15' 0''$  -  $106^{\circ} 45' 0''$  Bujur Timur, Memiliki berada di Laut Natuna antara Malaysia timur, barat dan juga Kalimantan. Sebagai wilayah kepulauan, kabupaten ini memiliki 238 pulau, 26 pulau berpenghuni dan 212 pulau lainnya belum berpenghuni, termasuk 5 pulau terdepan yang berbatasan langsung negara Malaysia dan Vietnam. Kelima pulau tersebut adalah : Pulau Tokong Berlayar, Pulau Tokong Nanas, Tokong Malang Biru, Pulau Mangkai serta Pulau Damar (BNPP, 2020).



Sumber : Dokumentasi BALITBANG Provinsi Kepulauan Riau, 2020

**Gambar 1.** Pulau Terdepan di Kabupaten Kepulauan Anambas

Selain berfungsi sebagai titik terdepan, kelima pulau tersebut ditetapkan sebagai Taman Wisata Perairan melalui Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 53/KEPMEN-KP/2014 dan menjadi bagian dari 50 destinasi pariwisata nasional. Dari kelima pulau tersebut, hanya Pulau Mangkai yang memiliki daratan, tumbuhan dan pantai berpasir, sedangkan keempat pulau lainnya tersusun dari bebatuan alami dan tidak memiliki tanah maupun hamparan pasir.

Selain menjadi salah satu destinasi wisata, Pulau Mangkai juga dimanfaatkan sebagai tempat penangkaran penyu yang terancam punah. Tingginya harga jual penyu, mendorong berbagai pihak untuk memburu dan memperdagangkannya. Penyu dimanfaatkan dagingnya untuk santapan lezat dan karapasnya digunakan sebagai suvenir.

jenis Penyu Lekang (*Lepidochelys olivacea*), Penyu Tempayan (*Caretta caretta*) dan Penyu Sisik (*Eretmochelys imbricata*), Ketiga spesies tersebut, merupakan jenis satwa yang dilindungi berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 716/Kpts-Um/10/1980; Keputusan Menteri Pertanian No. 176/Kpts/U/10/1980 dan Keputusan Menteri Kehutanan No. 882/Kpts-II/1992 (BALITBANG Provinsi Kepulauan Riau, 2015). Upaya konservasi di Pulau Mangkai diawali pada Tahun 2009, dengan memfasilitasi masyarakat disekitarnya untuk melakukan penangkaran penyu yang terancam punah. Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat, kegiatan penangkaran semakin berkembang dan ini menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk mengunjungi Pulau Mangkai.



Sumber : Dokumentasi Survey Lapangan, 2019

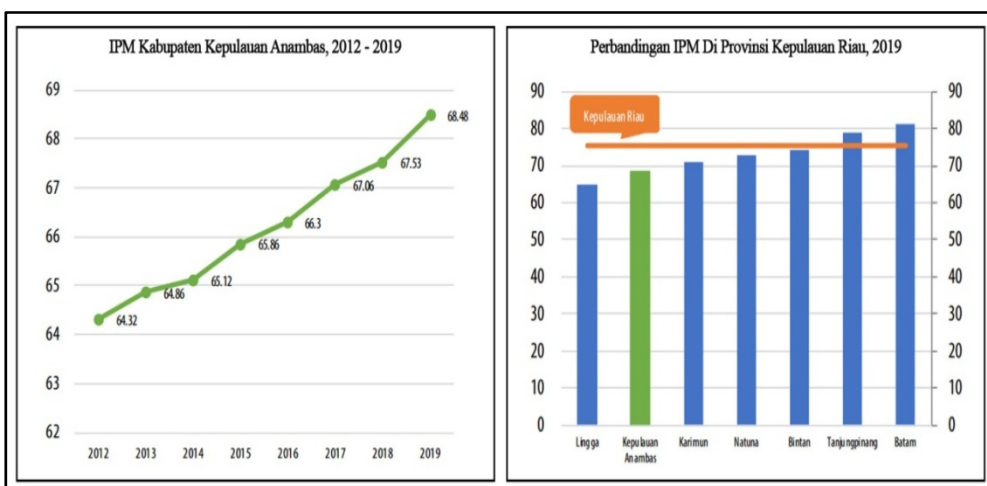
**Gambar 2.** Kegiatan Penangkaran Penyu Berbasis Masyarakat di Pulau Mangkai

## 2. Membangun Beranda Depan Indonesia

Wilayah perbatasan identik dengan daerah tertinggal, miskin dan cenderung termarginalkan (Budianta, 2010). Menjadikan kawasan perbatasan sebagai beranda depan, merupakan PR besar yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Komitmen pemerintah dipertegas lagi pada point ketiga Program Nawacita “Membangun Indonesia dari Pinggiran” (Nurmandi, dkk., 2012).

Membangun kawasan perbatasan tidaklah mudah, perlunya pemahaman tersendiri terhadap karakteristik kawasan perbatasan. Pembangunan harus dimulai dengan mengenali terlebih dahulu potensi dan masalah yang dilihat dari karakteristik serta tipologi kawasan perbatasan (Hendardy, 2018). Tidak hanya geografis spatial, keterbatasan sarana dan prasarana tetapi kondisi sosial ekonomi masyarakat dan potensi sumberdaya alam juga harus menjadi pertimbangan dalam membangun beranda depan Indonesia. Pengelolaan kawasan perbatasan yang terabaikan, berakhir pada lepasnya Pulau Sepadan dan Ligitan dari pangkuan “Bunda Pertiwi”. NKRI harga mati hanya menjadi jargon kosong dan dibicarakan saat kontestasi politik, setelah itu hilang sendiri seperti “asap ditelan bumi”.

Terbentuknya Kabupaten Kepulauan Anambas (UU No. 33 Tahun 2008), telah membawa perubahan terhadap tata kelola pemerintahan dan pelayanan umum. Kesan terabaikan sedikit menghilang, namun belum mampu menghilangkan citra “keterbatasan” dan peningkatan kesejahteraan. Fakta ini terlihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kepulauan Anambas, tahun 2019 termasuk status “sedang” dan tetap menjadi IPM terendah nomor dua se-Kepulauan Riau setelah Kabupaten Lingga (BPS Kabupaten Kepulauan Anambas, 2020).



Sumber : Kabupaten Kepulauan Anambas Dalam Angka, 2020

**Gambar 3.** IPM Kabupaten Kepulauan Anambas

Walaupun secara nilai, IPM Kabupaten Kepulauan Anambas mengalami pertumbuhan setiap tahunnya, tetapi pada sisi pengeluaran perkapita setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan biaya hidup yang cukup signifikan, kurang lebih sebesar 953 ribu rupiah setiap tahunnya. Peningkatan ini lebih disebabkan oleh biaya transportasi yang terus meningkat akibat dari peningkatan harga BBM. Barang seperti beras, gula, gas dan kebutuhan pokok lainnya harus dibeli di Tanjungpinang dan selanjutnya di distribusi di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas yang terpusat di Pulau Tarempa. Sementara untuk mendistribusikannya ke wilayah kecamatan lain, dihadapkan pada permasalahan geografis yang berjarak cukup jauh dan ditempuh melalui transportasi laut, menambah biaya pengeluaran masyarakat.

**Tabel 1.** IPM Kabupaten Kepulauan Anambas Menurut Komponen, 2015 - 2019

Komponen	2015	2016	2017	2018	2019
Umur Harapan Hidup (Tahun)	66,33	66,54	66,76	66,91	67,06
Harapan Lama Sekolah (Tahun)	11,63	11,87	12,14	12,32	12,75
Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	6,62	6,63	6,69	6,70	6,91
Pengeluaran yang disesuaikan (Rp. 000) per kapita per tahun	11.251	11.320	11.654	11.894	12.065
IPM	65,86	66,30	67,06	67,53	68,48
Pertumbuhan IPM (%)	1,14	0,67	1,15	0,70	1,41

Sumber : Kabupaten Kepulauan Anambas Dalam Angka, 2020

### 3. Akses Pelayanan Infrastruktur Dasar

Penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2019 berjumlah 47.473 jiwa atau hanya sebesar 2,41% dari jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Riau. Jumlah angkatan kerja mencapai 18.749 jiwa. Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) usia produktif (15-64 tahun) dengan usia non produktif (0-14 tahun dan > 65 tahun) mencapai 39.49%, artinya setiap 100 orang usia produktif akan menanggung 39 penduduk di usia non produktif. Dominasi usia non produktif adalah penduduk yang masih sekolah dan Balita.

Ketersediaan fasilitas pendidikan, cukup memprihatikan. Selain tidak memiliki Perguruan Tinggi, masih terdapat beberapa kecamatan yang belum memiliki fasilitas pendidikan dari tingkat SD hingga SMA. Kondisi ini mengharuskan mereka menempuh perjalanan laut, hanya untuk sekolah. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, telah menyediakan “*Pompong*” gratis untuk anak sekolah. Perjalanan penuh resiko, dengan kondisi cuaca buruk dan bergelombang terpaksa harus ditempuh siswa, hanya untuk mendapat pendidikan. Untuk mendapatkan pendidikan dengan jenjang yang lebih tinggi (S1), mereka harus bersekolah di Kota Tanjungpinang dan Kota Batam.

Minimnya fasilitas pendidikan, menjadi permasalahan tersendiri dalam pengembangan sumberdaya manusia yang berkualitas. Kondisi ini lah yang menyebabkan angka Harapan Lama Sekolah hanya mencapai 12,75 tahun atau hanya mencapai jenjang pendidikan tingkat SMA.

**Tabel 2.** Ketersediaan Fasilitas Pendidikan di Kabupaten Kepulauan Anambas, 2019

No.	Kecamatan	SD	SMP	SMA	PT
1	Jemaja	12	3	1	-
2	Jemaja Barat	-	-	-	-
3	Jemaja Timur	4	1	-	-
4	Siantan Selatan	8	6	-	-
5	Siantan	10	6	1	-
6	Siantan Timur	10	3	1	-
7	Siantan Tengah	7	2	-	-
8	Palmatak	16	5	2	-
9	Siantan Utara	-	-	-	-
10	Kute Siantan	-	-	-	-
Kepulauan Anambas		67	26	5	-

Sumber : Kabupaten Kepulauan Anambas Dalam Angka, 2020

Tidak semua siswa tamatan SMP melanjutkan pendidikannya ke jenjang berikutnya tetapi langsung bekerja sebagai nelayan atau membantu orang tua untuk melaut. Hal ini terlihat dari Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang pendidikan SMA pada tahun 2019 hanya mencapai 76,55%.

**Tabel 3.** Ketersediaan Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Kepulauan Anambas, 2019

No.	Kecamatan	RS	Poliklinik	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Apotik
1	Jemaja	1	-	1	7	1
2	Jemaja Barat	-	-	-	-	-
3	Jemaja Timur	-	-	1	3	-
4	Siantan Selatan	-	-	1	6	-
5	Siantan	1	2	1	3	2
6	Siantan Timur	-	-	1	5	-
7	Siantan Tengah	-	-	1	5	-
8	Palmatak	1	1	1	12	1
9	Siantan Utara	-	-	-	-	-
10	Kute Siantan	-	-	-	-	-
Kepulauan Anambas		3	3	7	41	4

Sumber : Kabupaten Kepulauan Anambas Dalam Angka, 2020

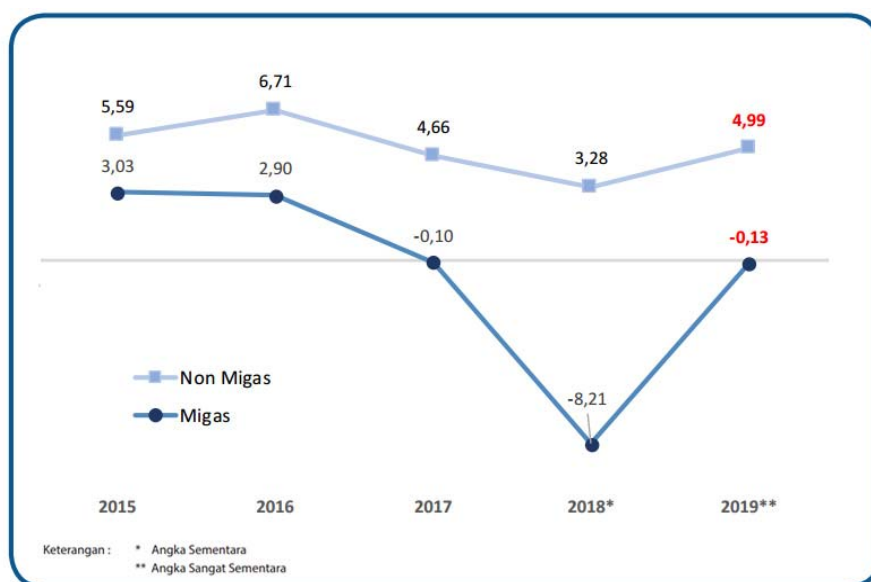
Tidak hanya pendidikan, ketersediaan fasilitas kesehatan juga menjadi masalah tersendiri bagi masyarakat dalam mendapat pelayanan. Hingga tahun 2019, di Anambas hanya memiliki 3 Rumah Sakit, 3 Poliklinik, 7 Puskesmas, 41

Puskesmas Pembantu dan 4 Apotik. Dilihat dari persebarannya, fasilitas kesehatan masih terpusat di Ibukota Kabupaten. Sementara untuk mengaksesnya, masyarakat harus menempuh perjalanan melalui laut.

Pelayanan listrik hanya mampu menjangkau 71,6% rumah tangga, akses sanitasi layak hanya menjangkau 25,9% rumah tangga, sedangkan akses air minum layak hanya dapat dijangkau oleh 33,3% rumah tangga. Kurangnya akses pelayanan umunya lebih disebabkan oleh faktor geografis wilayah yang berbentuk kepulauan, sehingga dalam mewujudkannya diperlukan pembiayaan yang cukup besar, sementara kondisi keuangan daerah memiliki keterbatasan.

#### 4. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2019 mengalami pertumbuhan sebesar -0,13 persen. Dengan mengeluarkan sektor migas, perekonomian Kabupaten Kepulauan Anambas masih mengalami pertumbuhan yang positif, mencapai 4,99 persen. Berdasarkan lapangan usaha, sebagian besar mengalami pertumbuhan kecuali pertambangan dan penggalan sebesar -1,13 persen dan pengadaan listrik dan gas sebesar -0,40 persen. Pertumbuhan terbesar terjadi pada kategori Informasi dan Komunikasi sebesar 11,44 persen; diikuti oleh kategori Penyedia Akomodasi dan Makan Minum sebesar 9,57 persen dan kategori konstruksi sebesar 8,33 persen (BPS Kabupaten Kepulauan Anambas, 2020).



Sumber : PDRB Kabupaten Kepulauan Anambas, 2015 -2019

**Gambar 4.** Kabupaten Kepulauan Anambas Dalam Angka, 2020

Secara regional, kontribusi PDRB Kabupaten Kepulauan Anambas terhadap Provinsi Kepulauan Riau hanya mencapai 1,33 persen dan merupakan kontribusi terkecil di dibandingkan dengan wilayah lainnya.

**Tabel 4.** Ringkasan PDRB per Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, 2019

Kabupaten/ Kota	PDRB ADHK 2010	Pertum- buan Migas (%)	Pertum- buan Non Migas (%)	Kontribusi PDRB Migas Terhadap Kepri (%)	Kontribusi PDRB Non Migas Terha- dap Kepri (%)
Karimun	9.456,92	4,89	4,89	5,15	6,04
Bintan	14.540,09	4,71	4,71	8,10	9,29
Natuna	15.299,36	1,75	5,95	8,29	2,75
Lingga	2.934,66	5,18	5,18	1,62	1,87
Kepulauan Anambas	12.047,35	-0,13	4,99	6,63	1,33
Batam	108.804,35	5,92	5,92	62,55	69,50
Tanjungpinang	14.436,94	3,27	3,27	7,67	9,22
Kepulauan Riau	182.183,73	4,49	4,89	100,00	100,00

Sumber : PDRB Provinsi Kepulauan Riau, 2020

## 5. Kemiskinan

Hampir 90% masyarakat Kepulauan Anambas adalah nelayan. Untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, mereka sangat tergantung dari hasil tangkapan laut. Dengan ketidakpastian hasil tangkapannya, nelayan sangat rentan terhadap permasalahan kemiskinan. Kemiskinan dipandang sebagai suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan (Retnowati, 2011). Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Pada tahun 2019, garis kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar 382.449 rupiah.

Selama periode 2011-2019, persentase jumlah penduduk miskin cenderung meningkat. Pada tahun 2011 penduduk miskin mencapai 3,95% dan meningkat menjadi 6,44 persen di tahun 2019. Berbagai upaya pengentasan kemiskinan telah dilakukan, tetapi upaya yang dilakukan belum menunjukkan hasil yang signifikan. Penurunan persentase jumlah penduduk miskin hanya terjadi pada tahun 2019.



Sumber : Kabupaten Kepulauan Anambas Dalam Angka, 2020

**Gambar 5.** Persentase Penduduk Miskin, 2011-2019

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P<sub>1</sub>*) Kabupaten Kepulauan Anambas, tahun 2019 mencapai 1,14 dan Indeks Keparahannya (*Proverty Severity Index-P<sub>2</sub>*) mencapai 0,26 (nilai tertinggi kedua setelah Kabupaten Lingga). Nilai  $P_1$  menunjukkan bahwa rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin melebar. Sementara Nilai  $P_2$  menunjukkan bahwa terjadi ketimpangan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

**Tabel 5.** Kemiskinan di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau, 2019

Kabupaten/Kota	Penduduk Miskin (Jiwa)	P0	P1	P2	Garis Kemiskinan
Karimun	15.360	6,61	0,60	0,11	Rp. 376.853
Bintan	10.140	6,37	0,63	0,09	Rp. 384.396
Natuna	3.430	4,42	0,49	0,09	Rp. 378.873
Lingga	11.560	12,88	1,97	0,46	Rp. 429.764
Kep. Anambas	2.720	6,44	1,14	0,26	Rp. 384.449
Batam	66.210	4,85	0,53	0,09	Rp. 686,956
Tanjungpinang	19.050	9,03	1,13	0,23	Rp. 659,170
Kepulauan Riau	128.460	5,90	0,69	0,12	Rp. 594,059

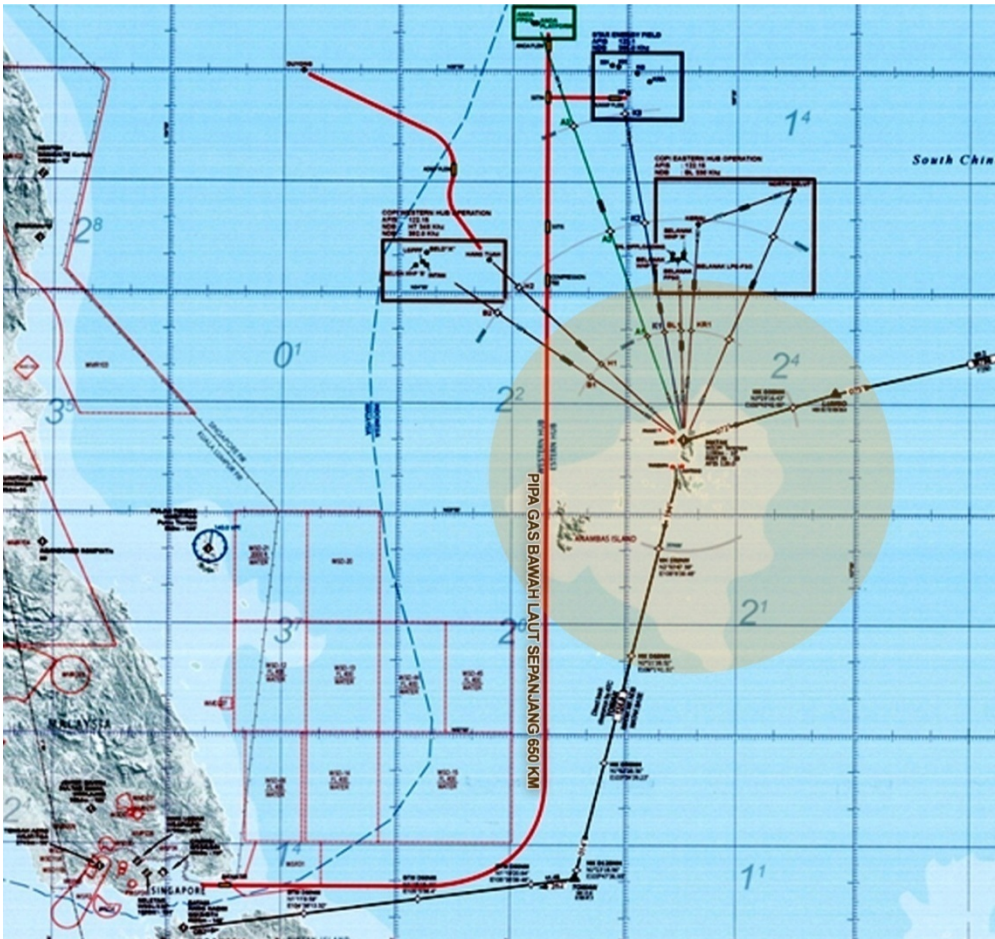
Sumber : Kabupaten Kepulauan Anambas Dalam Angka, 2020

## 6. Sumberdaya Alam

Kepulauan Anambas memiliki cadangan minyak bumi sebesar 326,15 MMSTB (peringkat 4 cadangan minyak nasional) dan gas alam sebesar 53,06



TSCF (peringkat 1 cadangan gas nasional yg telah produksi). Kegiatan eksploitasi migas di perairan utara Kepulauan Anambas telah dimulai sejak tahun 1975 hingga sekarang. Hasil migas tersebut digunakan untuk mensuplai kebutuhan energy Singapura melalui jaringan pipa bawah laut sepanjang 650 KiloMeter (Bapelitbang Kabupaten Kepulauan Anambas, 2010).



Sumber : RTRW Kabupaten Kepulauan Anambas, 2011-2031

**Gambar 6.** Potensi Sumberdaya Migas Kabupaten Kepulauan Anambas

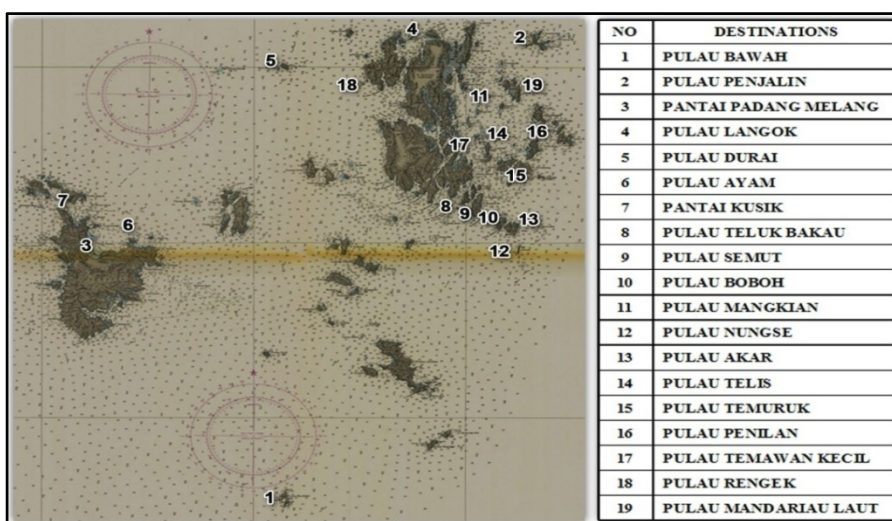
Sebagai wilayah kepulauan, keberadaan pulau-pulau kecil yang tersebar di Anambas menawarkan panorama yang eksotis, perpaduan air laut yang jernih, hamparan pasir putih serta terumbu karang yang alami, memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk berkunjung ke wilayah ini. Sayangnya akses menuju pulau-pulau kecil tersebut masih belum begitu baik. CNN menetapkan Pulau Bawah sebagai *The Best Tropical Islands In Asia*, "a naturally protected lagoon with beautiful clear blue waters and corals" (CNN, 2012).

Selain Pulau Bawah, Kepulauan Anambas masih terdapat pulau-pulau lainnya yang memiliki potensi dan daya tarik wisata. keindahan alamnya. Pendataan potensi wisata yang telah dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Anambas, terdapat 19 Pulau yang berpotensi dikembangkan sebagai destinasi wisata.



Sumber : Dokumentasi Survey Lapangan, 2019

**Gambar 7.** Keindahan Panorama Pulau Bawah



Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau, 2012

**Gambar 8.** Potensi Pariwisata Bahari Kabupaten Kepulauan Anambas

Pulau-pulau tersebut tidak hanya menawarkan keindahan pantainya tetapi juga menawarkan keindahan alam bawah laut, dengan terumbu karang yang masih alami disertai keberagaman spesies bawah laut.



Sumber : Dokumentasi Disparbud Kabupaten Kepulauan Riau, 2019

**Gambar 9.** Panorama Bawah Laut Perairan Kepulauan Anambas

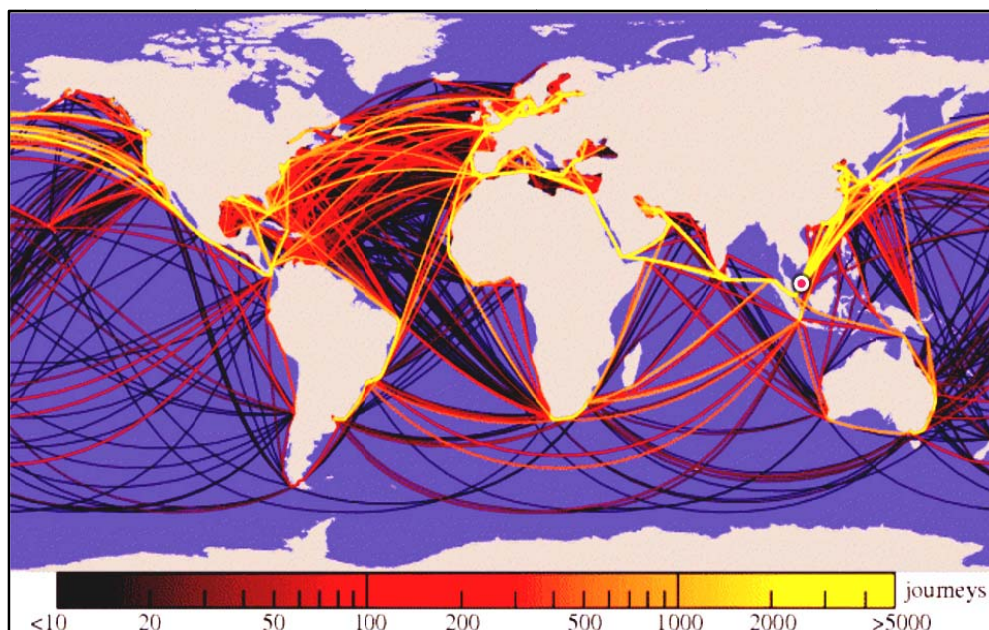
Luas laut yang mencapai 98,73 % dari total luas wilayah administratif, memiliki potensi yang cukup besar bagi kegiatan perikanan tangkap. Data potensi lestari untuk perikanan tangkap mencapai 88.792,20 ton/tahun, dengan komposisi ikan pelagis mencapai 5.550,72 ton/tahun, ikan pelagis kecil mencapai 52.206,00 ton/tahun, ikan demersal mencapai 28.123,20 ton/tahun, ikan karang mencapai 1,811,88 ton/tahun dan lainnya (cumi-cumi, udang dan lobster) mencapai 1.100,40 ton/tahun (DPPP, 2016). Potensi ini baru dimanfaatkan rata-rata mencapai 14.153,30 ton atau hanya mencapai 0,08% dari potensi lestari yang dimiliki laut Anambas.

## 7. Potret Masa Depan Anambas

Ditengah merosotnya perekonomian di kawasan Eropa dan Amerika, kawasan Asia menjelma menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia. Beberapa negara di Asia tumbuh menjadi raksasa ekonomi dunia seperti China, India, Korea Selatan, Jepang, Singapura dan Malaysia. Diperkirakan beberapa dekade kedepan kawasan Asia akan tetap dan bahkan akan semakin mendominasi pertumbuhan ekonomi dunia disebabkan kawasan ini kaya dengan sumber daya alam sebagai bahan baku produk dan juga tak dapat dipungkiri bahwa Asia merupakan pangsa pasar terbesar karena separoh penduduk dunia berada dikawasan ini, dan diperkuat lagi dengan penguasaan teknologi strategis yang semakin maju oleh negara-negara di Asia.

Kabupaten Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki nilai geostrategis yang sangat tinggi karena letak geografisnya berada di Laut Natuna yang saat ini merupakan jalur pelayaran internasional tersibuk di dunia. Namun demikian, keterbatasan infrastruktur yang ada, khususnya infrastruktur konektivitas dan aksesibilitas menjadikan wilayah ini seolah-olah terpencil dari pusat pertumbuhan ekonomi nasional maupun dunia.

Lebih dari 90% pelayaran internasional yang melewati perairan Indonesia melintasi perairan Kepulauan Anambas. Perairan ini di lewati oleh jalur pelayaran tersibuk di dunia, rata-rata lebih 250 kapal per hari, karena jalur ini merupakan penghubung pelabuhan mega hub dari Asia Tenggara ke Arah Asia Pasifik atau sebaliknya (Bapelitbang Kabupaten Kepulauan Anambas, 2019).



Sumber : Bapelitbang Kabupaten Kepulauan Anambas, 2010

**Gambar 10.** Pelayaran Di Wilayah Perairan Kepulauan Anambas

Posisi strategis Kabupaten Kepulauan Anambas, memberikan peluang peluang jasa yang dapat “dijual” untuk melayani kebutuhan aktifitas kapal-kapal yang melewati ataupun beroperasi disekitar perairan Kepulauan Anambas, yaitu :

1. Jasa Perbaikan Kapal (*Ship Repair Service*)

Sudah menjadi hal yang wajar apabila sebuah kendaraan/alat transportasi mengalami kerusakan dalam perjalanan maka pastilah perlu perbaikan dengan mencari “bengkel terdekat”. Disepanjang jalur pelayaran di Laut

China Selatan yang panjangnya mencapai 3000 Km tidak banyak menawarkan lokasi yang ideal sebagai tempat singgah sementara untuk perbaikan kapal, dan Anambas menjadi pilihan ideal untuk itu.

2. Jasa Labuh Kapal Saat Cuaca Ekstrim (*Rest Area*)

Laut China Selatan terkenal dengan gelombangnya yang besar, pada musim utara tinggi gelombang dapat mencapai 6 meter. Pada saat cuaca ekstrim kapal-kapal untuk ukuran tertentu yang memiliki resiko tinggi untuk menghadang gelombang memilih berlindung dibalik gugusan pulau-pulau, dan ini sering terjadi dimana kapal-kapal kargo dan kapal tanker memilih labuh jangkar dilepas pantai barat Pulau Jemaja berlindung di sebelah selatan gugusan pulau Mengkait, Rewak dan Sunggak. Ini merupakan peluang yang sudah di depan mata untuk dikelola secara baik.

3. Jasa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Kapal (*Fuel Oil Service*)

Dalam era persaingan bisnis yang sangat ketat saat ini setiap perusahaan harus mengoptimalkan efisiensi dan efektifitas kinerja usahanya, dan dalam industri pelayaran salah satu yang menjadi pertimbangan utama adalah komponen waktu tempuh dan kapasitas angkut. Sehingga Industri pembuat kapal pun berusaha memproduksi kapal dengan teknologi yang mampu membawa muatan lebih banyak dengan waktu tempuh yang lebih cepat. Selain melalui pendekatan teknologi sebenarnya melalui pendekatan manajemen operasional kapal, waktu tempuh dapat dipercepat dan kapasitas muatan juga bisa diperbesar.

Strategi ini sebenarnya bisa diterapkan pada industri pelayaran internasional khususnya pada jalur pelayaran yang melewati Laut Natuna dengan syarat harus ada "*pit stop*" pengisian bahan bakar kapal di jalur pelayaran tersebut. Lokasi ideal untuk "*pit stop*" tersebut adalah Kepulauan Anambas. Selama ini kapal-kapal kargo dan kapal tanker yang bertolak dari Singapura menuju Shanghai, Hongkong dan Busan ataupun sebaliknya, melakukan pengisian bahan bakar dengan kapasitas maksimal (*full tank*) karena memang tidak adanya stasiun pengisian bahan bakar disepanjang perjalanan.

Seandainya pelabuhan stasiun pengisian bahan bakar kapal ini dibangun di Anambas maka perusahaan pelayaran internasional akan mendapatkan nilai tambah dengan meningkatnya kapasitas angkut dan lebih cepatnya waktu tempuh tanpa memodifikasi armada kapal mereka yang telah ada.

4. Jasa Suplai Makanan dan Air Bersih (*Food and Clean Water Supply*)

Disamping mengisi bahan bakar, kapal-kapal tersebut juga dapat mengisi suplai air bersih untuk kebutuhan operasional kapal serta kru ataupun anak buah kapal juga dapat istirahat dan membeli kebutuhan hariannya

dan melapor pada kantor cabangnya yang ada di kawasan pelabuhan *ship service* ini nantinya.

Selain itu, Kepulauan Anambas berada “di depan pintu gerbang *Global Network*” karena perairannya termasuk jalur jaringan fiber optik internasional yang “tersibuk”. Terdapat 14 jaringan fiber optik aktif yang sudah terpasang di perairannya dan melayani lebih dari 40 perusahaan telekomunikasi internasional. Jaringan fiber optik bawah laut ini dibangun melewati perairan Kepulauan Anambas dan langsung menuju Singapura. Keberadaan jaringan fiber optik internasional di perairan Anambas ini membuka peluang bagi pengembangan konsep *cyber city* di daerah kepulauan (*Cyber Archipelago*) ataupun konsep pengembangan kawasan pesisir berbasis teknologi telekomunikasi informasi (*Silicon Coastal*). Peluang ini harus dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk mendukung pengembangan industri pariwisata, industri perikanan, industri *ship services* dan industri migas yang akan dikembangkan di Kabupaten Kepulauan Anambas (Bapelitbang Kabupaten Kepulauan Anambas, 2019).

Di balik ketertinggalan dan keterbatasan infrastruktur, Kepulauan Anambas masih memiliki 5 potensi besar (*Oil And Gas, Ship Services, Tourism, International Sub Sea Fiber Optic, and Fishery*) yang mampu menjadi daya ungkit besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan berpotensi menjadi “**Bandar Maritim Dunia**”. Cita-cita besar Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, secara bertahap diwujudkan melalui enam kebijakan yang telah digariskan dalam RPJPD Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2005-2025, yaitu :

1. Menjadikan kawasan perbatasan sebagai pintu gerbang ke Negara tetangga;
2. Membangun kawasan perbatasan dengan pendekatan kesejahteraan (*prosperity*), keamanan (*security*), dan lingkungan (*environment*) secara serasi;
3. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di kecamatan-kecamatan yang langsung berbatasan secara selektif dan bertahap sesuai prioritas dan kebutuhan;
4. Meningkatkan perlindungan sumberdaya alam hutan tropis (*tropical forest*) dan kawasan konservasi, serta mengembangkan kawasan budidaya secara produktif bagi kesejahteraan masyarakat lokal;
5. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM) melalui pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, perhubungan dan informasi;
6. Meningkatkan kerjasama pembangunan di bidang sosial, budaya, ekonomi dan keamanan dengan negara tetangga.

## PENUTUP

Menyandang nama sebagai daerah perbatasan, tidak serta merta memberi status yang lebih baik dibandingkan dengan wilayah lain. Keteringgalan dan keterbatasan harus diterima, walaupun memiliki segudang sumberdaya alam. Sejatinya, beranda terdepan nusantara merupakan cerminan dari halaman depan Negara. Stimulus dan percepatan pembangunan telah diupayakan, namun belum mampu mewujudkan kawasan perbatasan sebagai beranda terdepan yang aman, berdaulat, dan berdaya saing.

Harapan kembali muncul saat Pemerintah Pusat mencanangkan Gerakan Pembangunan Terpadu Kawasan Perbatasan (Gerbangdutas) 2020 di Kabupaten Kepulauan Anambas dengan menyalurkan anggaran sebesar 300 miliar rupiah, untuk membangun fasilitas pendidikan, kesehatan, pariwisata, dan infrastruktur lainnya yang mampu meningkatkan konektivitas antar wilayah. Gerbangdutas merupakan kegiatan tahunan untuk mendorong percepatan pembangunan perbatasan negara secara komprehensif, terpadu serta terintegrasi melalui kegiatan lintas Kementerian/Lembaga di kawasan perbatasan. Penetapan tujuh kecamatan di Kabupaten Anambas (Siantan, Palmatak, Siantan Selatan, Siantan Utara, Jemaja Barat, Jemaja Timur dan Jemaja) sebagai lokasi prioritas pembangunan perbatasan negara di tahun 2020-2024, menambah keyakinan masyarakat bahwa kegiatan perekonomian akan tumbuh dan pada akhirnya mampu mengakhiri keterbatasan dan ketimpangan yang terjadi selama ini.

Adapun saran yang dapat diberikan dalam mengembangkan kawasan perbatasan sebagai kawasan terdepan yang aman, berdaulat, dan berdaya saing, adalah dengan mengembangkan :

1. Transportasi laut berbiaya murah; Kelancaran pergerakan orang dan barang akan mampu membuka keterisolasian wilayah. Keterbukaan akses dari dan menuju Anambas, akan memacu sektor pariwisata tumbuh dan berkembang menjadi motor penggerak perekonomian yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Anambas.
2. Pengembangan pariwisata berkelanjutan dan berdaya saing; Pengembangan pariwisata lebih didasarkan pada kekuatan daya tarik wisata yang didukung dengan keberadaan pulau-pulau kecilnya yang eksotik dan memiliki keindahan panorama bawah laut.
3. Menjadikan pulau-pulau kecil sebagai destinasi kapal-kapal pesiar; Perairan Kepulauan Anambas di lewati oleh jalur pelayaran *Cruise Internasional* dan *Regional*, dan disamping itu letak Kepulauan Anambas dikelilingi oleh beberapa pelabuhan *International Cruise Center*, diantara-

- nya; *Singapore Cruise Center*, *Hongkong Cruise Center*, dan *Macau Cruise Center*. Dengan menyediakan infrastruktur pendukung, diharapkan potensi daya tarik wisata dapat termanfaat secara optimal
4. Pengembangan Industri Perikanan; Potensi perikanan yang melimpah tidak akan mampu memberikan manfaat kepada masyarakat secara maksimal jika masih dilakukan secara tradisional. Untuk itu, pengembangan kegiatan perikanan secara modern sangat diperlukan. Industri pengolahan hasil perikanan, merupakan kata kunci yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.
  5. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat guna pemanfaatan posisi strategis perairan Kepulauan Anambas, terutama dalam pemanfaatan potensi *Oil And Gas*, *Ship Services*, serta *Cyber Archipelago*.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Badan Nasional Pengelola Perbatasan. (17/07/2020). Lima Pulau Terluar Milik RI yang Ada di Kabupaten Kepulauan Anambas. <https://bnpp.go.id/home/beritadetail/lima-pulau-terluar-milik-ri-yang-ada-di-kabupaten-kepulauan-anambas>.
- BALITBANG Provinsi Kepulauan Riau. (2015). Masterplan Pulau Mangkai Kabupaten Kepulauan Anambas, Tahun 2016-2020.
- BAPELITBANG Kabupaten Kepulauan Anambas. (2010). Materi Teknis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kepulauan Anambas, Tahun 2011-2031.
- BPS Kabupaten Kepulauan Anambas. (2020). Kabupaten Kepulauan Anambas Dalam Angka, Tahun 2020.
- BPS Provinsi Kepulauan Riau. (2020) PDRB Provinsi Kepulauan Riau.
- Budianta, Aziz. (2010). Pengembangan Wilayah Perbatasan Sebagai Upaya Pemerataan Pembangunan Wilayah di Indonesia. SMARTek, vol. 8, no. 1. 2010.
- Caporaso, J.A, dan D.V. Levine. (2008). Teori-Teori Ekonomi Politik. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- CNN.Com. (17/07/2020). Asia's Top Five Tropical Island Paradises. <https://edition.cnn.com/2012/04/13/sport/south-east-asia-sailing/index.html>.
- Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau. (2012). Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (Rippda) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2012-2022.
- DPPP Kabupaten Kepulauan Anambas. (2016). Rencana Strategis (RENSTRA), Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas, Tahun 2016-2021.



- Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Anambas. (2016).
- Hendrayady, Agus. (2018). Membangun Wilayah Perbatasan Di Provinsi Kepulauan Riau (Mencari Solusi Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Pulau-Pulau Terdepan). Jurnal Ilmu Pemerintahan UMRAH. Volume 04 Nomor 01 Agustus 2019. Open Access at: <https://ojs.umrah.ac.id/index.php/kemudi>. DOI: <https://doi.org/10.31629/kemudi.v4i1.1305>
- Nurmandi, Achmad., Trisno Aji Putra., Nikolas Panama. (2012). Menjaga Indonesia dari Kepri : Peluang, Tantangan dan Profil 19 Pulau Terdepan Indonesia di Kepulauan Riau. Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau. Tanjungpinang.
- Partnership for Governance Reform*. (2011). Kebijakan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Indonesia. *Partnership Policy Paper* No. 2/2011.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 - 2031.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2005-2025.
- Retnowati, Endang. (2011). Nelayan Indonesia Dalam Pusaran Kemiskinan Struktural (Perspektif Sosial, Ekonomi Dan Hukum). Jurnal Perspektif, Volume XVI. No. 3 Tahun 2011 Edisi Mei.
- Zakariya Anwar, dan Wahyuni. (2019). Miskin di Laut Yang Kaya: Nelayan Indonesia Dan Kemiskinan. Jurnal Sosioreligius. Nomor IV. Volume 1 Juni 2019.

---

## **ANALISIS KOMPETENSI BHAYANGKARA PEMBINA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT (BHABINKAMTIBMAS) KETERKAITANNYA DENGAN KINERJA**

**Chairul Muriman Setyabudi**

### **PENDAHULUAN**

Personel Polri dengan tugas dan tanggung jawabnya dalam lingkup: Pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat; Pemelihara Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat); Penegakan hukum, dituntut dapat melaksanakan tugas secara profesional. Profesionalitas personel Polri ditentukan oleh aspek *knowledge, skill* dan *attitude*.

Profesionalisme Polri akan terwujud jika konsep "*the right man in the right place*" diterapkan. Oleh karena itu diperlukan kesesuaian antara kompetensi dengan pangkat dan jabatan, sehingga pangkat dan jabatan seseorang mencerminkan kompetensinya. Kompetensi akan mendorong kinerja positif karena terdapat kesesuaian antara kompetensi dengan tugas yang diembannya.

Masalah sumber daya manusia masih menjadi sorotan dan tumpuhan bagi organisasi untuk tetap dapat bertahan di era globalisasi. Sumber daya manusia mempunyai peran utama dalam setiap kegiatan organisasi. Walaupun didukung dengan sarana dan prasarana serta sumber dana yang berlebihan, tetapi tanpa dukungan sumber daya manusia yang andal kegiatan organisasi tidak akan terselesaikan dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa Kompetensi merupakan kunci pokok yang harus diperhatikan dengan segala kebutuhannya. sebagai kunci pokok, sumber daya manusia akan menentukan keberhasilan pelaksanaan kegiatan organisasi. Tuntutan organisasi untuk memperoleh, mengembangkan dan mempertahankan sumber daya manusia yang berkualitas semakin mendesak sesuai dengan dinamika lingkungan yang selalu berubah. (Rosento, diakses 2019).

Sehingga Kompetensi kerja anggota bhabinkamtibmas merupakan suatu proses kerja yang memberikan pemahaman dan kemampuan kepada karyawan dalam melakukan aktivitas, sehingga apa yang diharapkan oleh organisasi dapat tercapai dengan baik guna meningkatkan kinerja .

Setiap personel bhabinkamtibmas membutuhkan pengetahuan yang cukup tentang ruang lingkup pekerjaannya, sehingga personel tersebut dapat menunjukkan peningkatan prestasi dan kreatifitas dalam setiap tugas yang dibebankan kepadanya. Oleh sebab itu, diperlukan penilaian kompetensi untuk menentukan peta kompetensi personel bhabinkamtibmas yang berkorelasi dengan peningkatan kinerja.

## PEMBAHASAN

### Keterkaitan Kompetensi dengan Kinerja

Hasil penelitian Dina Rande (2016), maka untuk meningkatkan kinerja diperlukan kompetensi dari pegawai. Adapun hasil uji F dalam penelitian ini yang menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 23,951 sedangkan F tabel sebesar 2,512. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen yang berarti dan hipotesis  $H_0$  diterima yang menyatakan bahwa "besarnya pengaruh kompetensi secara simultan terhadap kinerja pegawai Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mamuju Utara ditentukan oleh motif (*motives*), sifat (*traits*), konsep diri (*self-concepts*), pengetahuan (*knowledge*), dan keterampilan (*skills*)". Besar pengaruh kompetensi terhadap kinerja pegawai yang ditunjukkan dari hasil nilai R square sebesar 0,789 (78,9%). Hasil tersebut menjelaskan bahwa kemampuan variabel kompetensi dalam berkontribusi terhadap variabel kinerja pegawai adalah 78,9% dan sisanya 21,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk dalam model penelitian. Kompetensi menjelaskan apa yang dilakukan orang ditempat kerja pada berbagai tingkatan dan memperinci standard masing-masing tingkatan, mengidentifikasi karakteristik pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan individual yang memungkinkan menjalankan tugas dan tanggung jawab secara efektif sehingga mencapai standard kualitas profesional dalam bekerja. Kompetensi merupakan karakteristik yang mendasar pada setiap individu yang dihubungkan dengan kriteria yang direferensikan terhadap kinerja yang unggul atau efektif dalam sebuah pekerjaan atau situasi. Karakteristik yang mendasari berarti kompetensi merupakan bagian dari kepribadian seseorang yang telah tertanam dan berlangsung lama dan dapat memprediksi perilaku dalam berbagai tugas dan situasi kerja. Penyebab terkait berarti bahwa kompetensi menyebabkan atau memprediksi perilaku dan kinerja. Acuan kriteria berarti bahwa kompetensi secara aktual memprediksi siapa yang mengerjakan sesuatu dengan baik atau buruk, sebagaimana diukur oleh kriteria spesifik atau standar. Demikian merupakan sejumlah karakteristik yang mendasari seseorang dan menunjukkan cara-cara bertindak, berpikir, atau menggeneralisasikan situasi secara layak dalam jangka panjang.

Hasil penelitian Erni Yuningsih dan Ardianti (2019) tentang Pengaruh Kompetensi Dan Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Pt Xxx. Untuk membuktikan bersama-sama/simultan kompetensi dan motivasi terhadap kinerja pegawai mempergunakan statistic uji-F. Dan dari hasil perhitungan diperoleh bahwa Fhitung sebesar 30,828 dan nilai Ftabel untuk  $\alpha = 0,05$  dengan derajat kebebasan  $V1 = 3-1=2$  dan  $V2 = 82-2-1 = 79$  sebesar 3,11 maka dapat dilihat bahwa Fhitung lebih besar dari Ftabel ( $30,828 > 3,11$ ) maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima artinya dengan tingkat kepercayaan 95% variabel independen kompetensi (X1) dan motivasi (X2) berpengaruh positif dan signifikan secara simultan (bersama-sama) terhadap kinerja pegawai (Y). Berdasarkan perhitungan diperoleh hasil pengujian setiap variabel bebas (kompetensi dan motivasi) terhadap kinerja pegawai yaitu:

- Pengaruh Kompetensi (X1) Kinerja Pegawai (Y). Hasil perhitungan pada tabel thitung pada variabel kompetensi (X1) sebesar 1,694 dan nilai ttabel untuk  $\alpha = 0,05$  dengan derajat kebebasan  $82-2-1=79$  sebesar 1,664 berarti thitung  $>$  ttabel ( $1,694 > 1,664$ ). Maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, kompetensi (X1) mempunyai pengaruh positif juga signifikansi pada kinerja pegawai (Y).

Kompetensi menurut Spencer & Spencer dalam Palan (2007) adalah sebagai karakteristik dasar yang dimiliki oleh seorang individu yang berhubungan secara kausal dalam memenuhi kriteria yang diperlukan dalam menduduki suatu jabatan. Kompetensi terdiri dari 5 tipe karakteristik, yaitu motif (kemauan konsisten sekaligus menjadi sebab dari tindakan), faktor bawaan (karakter dan respon yang konsisten), konsep diri (gambaran diri), pengetahuan (informasi dalam bidang tertentu) dan keterampilan (kemampuan untuk melaksanakan tugas). Spencer dan Spencer dalam Sutrisno (2011) juga mengemukakan karakteristik kompetensi terdapat lima aspek, yaitu :

1. *Motives*, adalah sesuatu dimana seseorang secara konsisten berpikir sehingga ia melakukan tindakan. Misalnya: orang memiliki motivasi berprestasi secara konsisten mengembangkan tujuan-tujuan yang member tantangan pada dirinya dan bertanggung jawab penuh untuk mencapai tujuan tersebut serta mengharapkan *feedback* untuk memperbaiki dirinya.
2. *Traits*, adalah watak yang membuat orang untuk berperilaku atau bagaimana seseorang merespons sesuatu dengan cara tertentu. Misalnya: percaya diri, control diri, stress atau ketabahan.
3. *Self concept*, adalah sikap dan nilai-nilai yang dimiliki seseorang. Sikap dan nilai diukur melalui tes kepada responden untuk mengetahui bagaimana nilai yang dimiliki seseorang, apa yang menarik bagi seseorang melakukan sesuatu. Misalnya: seseorang yang dinilai menjadi pimpinan seyogianya memiliki perilaku kepemimpinan sehingga perlu adanya tes tentang *leadership ability*.

4. *Knowledge*, adalah Informasi yang dimiliki seseorang untuk bidang tertentu. Pengetahuan merupakan kompetensi yang kompleks. Skor atas tes pengetahuan sering gagal untuk memprediksi kinerja Sumber Daya Manusia karena skor tersebut tidak berhasil mengukur pengetahuan dan keahlian seperti apa seharusnya dilakukan dalam pekerjaan. Tes pengetahuan mengukur kemampuan peserta tes untuk memilih jawaban yang paling benar, tetapi tidak bisa melihat apakah seseorang dapat melakukan pekerjaan berdasarkan pengetahuan yang dimiliki.
5. *Skills*, adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu baik secara fisik maupun mental. Misalnya, seorang programmer komputer membuat suatu program yang berkaitan dengan SIM SDM.

Menurut Ruky dalam Sutrisno (2011) hubungan kompetensi dan prestasi kerja adalah kompetensi yang terdiri dari sejumlah perilaku kunci yang dibutuhkan untuk melaksanakan peran tertentu untuk menghasilkan prestasi kerja yang memuaskan. Perilaku ini biasanya ditunjukkan secara konsisten oleh para pekerja yang melakukan aktivitas kerja. Perilaku tanpa maksud dan tujuan tidak bisa didefinisikan sebagai kompetensi. Sebagai contoh, pihak manajemen berjalan-jalan dilingkungan kantor. Tanpa mengetahui mengapa manajer berjalan-jalan dilingkungan kantor. Maksud dan tujuan manajer berjalan-jalan di lingkungan kantor tersebut dapat diasumsikan memantau suatu pekerjaan. Sedangkan Moeheriono (2014), kompetensi pegawai dapat diukur melalui lima komponen kompetensi generik sebagai berikut:

1. Kemampuan merencanakan dan mengimplementasikan
2. Kemampuan melayani atau customer service
3. Kemampuan memimpin atau kepemimpinan
4. Kemampuan berfikir
5. Kemampuan bersikap dewasa

Sejalan dengan pendapat Spencer & Spencer, Becker and Ulrich dalam Suparno (2005) bahwa competency refers to an individual's knowledge, skill, ability or personality characteristics that directly influence job performance. Artinya, kompetensi mengandung aspek-aspek pengetahuan, ketrampilan (keahlian) dan kemampuan ataupun karakteristik kepribadian yang mempengaruhi kinerja. Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2004, tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) menjelaskan tentang sertifikasi kompetensi kerja sebagai suatu proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional Indonesia dan atau Internasional Menurut Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negeri Nomor: 46A tahun 2003, tentang pengertian kompetensi adalah :kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan,

dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien. Dengan kata lain, kompetensi adalah penguasaan terhadap seperangkat pengetahuan, ketrampilan, nilai-nilai dan sikap yang mengarah kepada kinerja dan direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai dengan profesinya. Selanjutnya, Wibowo (2007), kompetensi diartikan sebagai kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi oleh keterampilan dan pengetahuan kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Dengan demikian kompetensi menunjukkan keterampilan atau pengetahuan yang dicirikan oleh profesionalisme dalam suatu bidang tertentu sebagai suatu yang terpenting. Kompetensi sebagai karakteristik seseorang berhubungan dengan kinerja yang efektif dalam suatu pekerjaan atau situasi. Dari pengertian kompetensi tersebut di atas, terlihat bahwa fokus kompetensi adalah untuk memanfaatkan pengetahuan dan ketrampilan kerja guna mencapai kinerja optimal. Dengan demikian kompetensi adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh seseorang berupa pengetahuan ketrampilan dan faktor-faktor internal individu lainnya untuk dapat mengerjakan sesuatu pekerjaan. Dengan kata lain, kompetensi adalah kemampuan melaksanakan tugas berdasarkan pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki setiap individu.

Charles E. Jhonson dalam Wina Sanjaya (2005) dalam Anita Christine Runtu, Jantje Mandey, dan Martha Ogotan (diakses 10 nopember 2019) membagi kompetensi kedalam 3 bagian yakni : 1). Kompetensi pribadi, yakni kompetensi yang berhubungan dengan pengembangan kepribadian (personal competency), 2). Kompetensi profesional, yakni kompetensi atau kemampuan yang berhubungan dengan penyelesaian tugas-tugas tertentu, dan 3). Kompetensi sosial, yakni kompetensi yang berhubungan dengan kepentingan sosial. Sedangkan pada Kunandar (2007), kompetensi dapat dibagi 5 (lima) bagian yakni: 1. Kompetensi intelektual, yaitu berbagai perangkat pengetahuan yang ada pada diri individu yang diperlukan untuk menunjang kinerja 2. Kompetensi fisik, yakni perangkat kemampuan fisik yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas 3. Kompetensi pribadi, yakni perangkat perilaku yang berkaitan dengan kemampuan individu dalam mewujudkan diri, transformasi diri, identitas diri dan pemahaman diri. 4. Kompetensi sosial, yakni perangkat perilaku tertentu yang merupakan dasar dari pemahaman diri sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari lingkungan sosial. 5. Kompetensi spiritual, yakni pemahaman, penghayatan serta pengamalan kaidah-kaidah keagamaan.

Aspek analisa kinerja bhabinkamtibmas terlihat pada indikator pelaksanaan kerja , antara lain:

a. Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat

Bhabinkamtibmas pada Polda metro DKI memiliki kinerja memberikan pelayanan umum kepada masyarakat selalu dilaksanakan dengan baik, terbukti 65% (44 bhabin dari 68) responden menjawab dengan jawaban **selalu**, pada Polda Jawa Tengah jawaban **selalu** berjumlah 72% (181 dari 254), sementara pada Polda Kalimantan Timur jawaban **selalu** mencapai 73% (86 dari 119), sedangkan pada Polda Jambi jawaban **selalu** menunjukkan 73% (110 dari 152). Persentase ini dapat dilihat bahwa rata-rata menunjukkan lebih dari 60% para anggota bhabin melaksanakan tugas kinerjanya dengan pelayanan.

b. Memberikan Pengetahuan kepada Masyarakat

Peran seluruh bhabinkamtibmas memberikan pengetahuan hanya berdasarkan pada pengalaman dan kemampuan yang dimiliki saat ini, namun melihat perkembangan sosial, maka bhabin harus mampu menyesuaikan pengetahuannya dalam memberikan pengetahuan kepada masyarakat, hal inilah kompetensi pengetahuan strategis harus dimiliki oleh bhabinkamtibmas. Data pada Polda Metro DKI menunjukkan 53% (36 dari 68) bhabin memberikan pengetahuan kepada masyarakat, sementara Polda Jawa Tengah dengan jawaban **selalu** hanya 65% (163 dari 254), Polda Kalimantan Timur selalu 50% (59 dari 119), dan Polda Jambi selalu 64% (96 dari 152), prosentase ini tergolong masih kecil yang seharusnya seluruh bhabin di wilayah penelitian ini mencapai 100% dalam memberikan pengetahuan, hal ini dikarenakan distribusi jawaban juga mengatakan jarang, karena terjadinya keterbatasan pengetahuan dari para bhabin tersebut.

c. Memberi Pelayanan Konseling Pada Masyarakat

Konseling merupakan pengetahuan yang melekat pada petugas bhabinkamtibmas selama berada pada daerah binaannya, namun konseling ini memerlukan pengetahuan yang spesifik, keterbatasan pengetahuan tersebut menyebabkan kinerja bidang ini masih rendah, terbukti pada Polda Metro DKI jarang melakukan konseling 31% (21 dari 68), sering 30% (20 dari 68), sedangkan pada Polda Jawa Tengah selalu, namun besarnya hanya 35% (89 dari 254) dan jarang 24% (74 dari 254), pada Polda Kalimantan Timur juga jarang dan hanya sebesar 36% (42 dari 119), sedangkan pada Polda Jambi menunjukkan selalu, namun hanya sebesar 42% (63 dari 152) dan jarang 25% (44 dari 152). Rata-rata bhabinkamtibmas memberikan konseling lebih rendah dari 40%, hal ini menandakan bahwa kinerja konseling ini sangat tergantung pada kompetensi pengetahuan. Semakin besar kompetensi pengetahuan maka semakin besar aktifitas konseling tersebut dilakukan.

d. Memberi Pelayanan Dengan Ramah dan Senyum

Rata-rata kinerja pelayanan dengan ramah dan senyum itu menjadi ikon bhabinkamtibmas dalam memberikan pembinaan kepada masyarakat, terbukti pada Polda Metro DKI selalu 85% (60 dari 68), Polda Jawa Tengah selalu 94% (238 dari 254), Polda Kalimantan Timur selalu 88% (104 dari 119), Polda Jambi selalu 91% (137 dari 152), persentase aktifitas ini sangat optimal karena rata-rata melebihi 85%, sementara pekerjaan ini tidak secara mutlak memerlukan pengetahuan yang tinggi dan rumit. Demikian juga dalam memberikan pelayanan pilihan Bahasa yang mudah difahami hanya memerlukan penyesuaian anggota bhabin saat ditempat tugas, pemahaman terhadap Bahasa tidak terlalu rumit memerlukan pengetahuan yang tinggi, namun ketika Bahasa komunikasi menjadi sandaran baru memerlukan kompetensi pengetahuan. Terbukti pelayanan dengan Bahasa yang mudah difahami Nampak pada data Polda Metro DKI selalu 84% (57 dari 68), Polda Jawa Tengah selalu 78% (198 dari 254), Polda Kalimantan Timur selalu 77% ( 91 dari 119), Polda Jambi selalu 87% (132 dari 152)

e. Menjalinkan Komunikasi Terhadap Aparat Desa

Menjalinkan komunikasi terhadap aparat desa ditunjukkan pada Polda Metro DKI selalu 53% (36 dari 68), Polda Jawa Tengah selalu 54% (136 dari 254), Polda Kalimantan Timur selalu 44% (52 dari 119), Polda Jambi selalu 60% (91 dari 152), prosentase ini relative masih rendah karena rata-rata masih dibawah 50%, dan komunikasi ini memerlukan kompetensi pengetahuan yang tinggi tidak hanya kompetensi sosial, rata-rata pada wilayah penelitian ini terbukti kompetensi sosial masih dominan, sehingga pengembangan kualitas komunikasi belum optimal karena terhalang oleh pengetahuan berkomunikasi.

f. Menyediakan Waktu Untuk Menerima Masukan

Keterbukaan bhabinkamtibmas pada Polda Metro DKI selalu 53% (36 dari 68), Polda Jawa Tengah selalu 53% (133 dari 254) Polda Kalimantan Timur selalu 40% (47 dari 119), Polda Jambi selalu 55% (83 dari 152), keterbukaan ini menjadi dasar bahwa kinerja bhabin salah satunya adalah mampu memberikan waktu untuk menerima masukan masyarakat, sehingga ini mendorong bhabin untuk selalu belajar mencari penyelesaian dengan cara belajar, yang akan meningkatkan kompetensi pengetahuannya.

g. Respon cepat terhadap persoalan sosial ditunjukkan oleh anggota bhabinkamtibmas, pada Polda Metrojaya terdapat 61,76% (42 dari 68) menyatakan **selalu**, Polda Jawa Tengah 143 dari 255 atau 56,08% menyatakan **selalu**, Polda Kalimantan Timur 43,70% (52 dari 119) menyatakan **selalu**, dan Polda Jambi 70% (105 dari 150) menyatakan **selalu**. Respon cepat ini



sebagai pertanggungjawaban atas tugas pokok bhabinkamtibmas sebagai mitra masyarakat atas pandangan program Quick Win sehingga keberadaan bhabinkamtibmas di wilayah desa binaannya dapat menjadi partner untuk menyelesaikan berbagai persoalan di desa termasuk permasalahan sosial pada umumnya.

Menurut Mangkunegara (2009) Istilah kinerja berasal dari kata Job Performance atau Actual Performance (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang). Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja adalah sebagai berikut :

#### 1. Faktor Kemampuan (ability)

Secara psikologis, kemampuan (ability) pegawai terdiri dari kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan reality (knowledge) + skill), artinya, pegawai yang memiliki IQ di atas rata-rata (IQ 110-120) dengan pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan terampil dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari, maka ia akan lebih mudah mencapai kinerja yang diharapkan.

#### 2. Faktor Motivasi (motivation)

Motivasi terbentuk dari sikap (attitude) seorang pegawai dalam menghadapi situasi (situation) kerja. Motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan diri pegawai yang terarah untuk mencapai tujuan organisasi (tujuan kerja).

Menurut Mangkunegara dalam McClelland (2009) Pegawai akan mampu mencapai kinerja maksimal jika ia memiliki motif berprestasi tinggi. Motif berprestasi yang perlu dimiliki oleh pegawai harus ditumbuhkan dari dalam diri sendiri selain dari lingkungan kerja. Hal ini karena motif berprestasi dan ditumbuhkan dari dalam sendiri akan membentuk sesuatu kekuatan diri dan jika situasi lingkungan kerja turut menunjang maka pencapaian kinerja akan lebih mudah.

Menurut Gilbert dalam Notoatmodjo (2009) mendefinisikan kinerja adalah apa yang dapat dikerjakan oleh seseorang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sementara Gibson dalam Notoatmodjo (2009) mengemukakan bahwa faktor-faktor yang menentukan kinerja seseorang, dikelompokkan menjadi 3 faktor utama, yakni :

1. Variabel individu, yang terdiri dari: pemahaman terhadap pekerjaan, pengalaman kerja, latar belakang keluarga, tingkat sosial ekonomi dan faktor demografi ( umur, jenis kelamin, etnis, dan sebagainya)

2. Variabel organisasi, yang antara lain terdiri dari: kepemimpinan desain pekerjaan, sumber daya yang lain, struktur organisasi dan sbagainya.
3. Variabel psikologis, yang terdiri dari persepsi terhadap pekerjaan, sikap terhadap pekerjaan, motivasi, kepribadian dan sebagainya.

Dengan demikian bahwa kinerja adalah pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi sehingga kinerja merupakan sebuah proses formal untuk melakukan peninjauan kembali dan evaluasi seseorang secara periodik, sehingga kinerja dapat ditujukan untuk pengembangan hasil kerja karyawan dalam sebuah organisasi, dengan dimensinya adalah sebagai berikut :

1. Kualitas Kerja
2. Kepuasan Kerja
3. Kepribadian

Setiap anggota bhabinkamtibmas diharapkan mencapai kinerja yang tinggi dalam bekerja. Kinerja sebagai hasil dari kegiatan unsur-unsur kemampuan yang dapat diukur dan terstandarisasi. Keberhasilan suatu kinerja akan sangat tergantung dan ditentukan oleh beberapa aspek dalam melaksanakan pekerjaan, sehingga agar mencapai kinerja yang optimal hendaknya pengaruh dari faktor-faktor kompetensi diupayakan semaksimal mungkin sesuai dengan area pekerjaan yang dibebankan kepada karyawan. Dengan demikian, kompetensi sebagai karakteristik individual diperlukan untuk mencapai kinerja efektif dalam pelaksanaan tugas pekerjaan. Boyatzis, konseptor kompetensi dan implementasinya yang dikutip Spencer dan Spencer (1993) mengemukakan karakteristik mendasar individu yang secara kausal berhubungan dengan efektivitas atau kinerja yang sangat baik. *Underlying characteristic* memiliki makna bahwa kompetensi adalah bagian dari kepribadian yang mendalam dan melekat kepada seseorang serta perilaku yang dapat diprediksi pada berbagai keadaan dan tugas pekerjaan. *Causally related* bermakna kompetensi merupakan sesuatu yang menyebabkan atau memprediksi perilaku dan kinerja. Sedangkan *criterion-referenced* mempunyai pengertian bahwa kompetensi dapat memprediksi secara aktual siapa yang berkinerja dengan baik atau kurang baik, diukur dengan kriteria standar yang digunakan. Kaitan perilaku dengan kinerja menurut Walker (1992) dalam Eka Marlina Putri (2015) adalah: "*Underlying the way we manage performance are certain assumptions about employee behavior, or "motivation". From commonsense viewpoint, job performance is obviously affected by how people reason to condition influencing their work.*"

Keterkaitan kompetensi dengan kinerja bhabinkamtibmas dikemukakan berlandaskan pada pandangan Charles E. Jhonson dalam Wina Sanjaya (2005)

dalam Anita Christine Runtu, Jantje Mandey, dan Martha Ogotan (diakses 10 nopember 2019) ,dimana bahwa kompetensi dibagi kedalam 3 bagian yakni : 1). Kompetensi pribadi, yakni kompetensi yang berhubungan dengan pengembangan kepribadian (personal competency), 2). Kompetensi profesional, yakni kompetensi atau kemampuan yang berhubungan dengan penyelesaian tugas-tugas tertentu, dan 3). Kompetensi sosial, yakni kompetensi yang berhubungan dengan kepentingan sosial. Sedangkan pada Kunandar (2007), kompetensi dapat dibagi 5 (lima) bagian yakni: 1. Kompetensi intelektual, yaitu berbagai perangkat pengetahuan yang ada pada diri individu yang diperlukan untuk menunjang kinerja 2. Kompetensi fisik, yakni perangkat kemampuan fisik yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas 3. Kompetensi pribadi, yakni perangkat perilaku yang berkaitan dengan kemampuan individu dalam mewujudkan diri, transformasi diri, identitas diri dan pemahaman diri. 4. Kompetensi sosial, yakni perangkat perilaku tertentu yang merupakan dasar dari pemahaman diri sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari lingkungan sosial. 5. Kompetensi spiritual, yakni pemahaman, penghayatan serta pengalaman kaidahkaidah keagamaan. Sejalan dengan analisis ini bahwa kompetensi memiliki hubungan dengan kinerja bhabinkamtibmas, disandarkan pada pendapat Gilley, Boughton dan Maycunich (1999) dalam Eka Marlina Putri (2015) bahwa "*Competency are useful in recruiting and selection of employees a given job classification. They can also be used to determine the training and development activities in which employees must participate to acquireadequate levels of performance mastery.*" Dalam hal ini berarti kinerja dipengaruhi oleh kompetensi dari tiap individu yang ditentukan oleh pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia agar mencapai tingkat yang diinginkan. Lebih lanjut Spencer (1993) menjelaskan bahwa niat menyertai kompetensi. Niat seseorang meliputi  *motive, trait, self concept* dan  *knowledge* dilanjutkan dengan tindakan yang terlihat sebagai perilaku dan tindakan tersebut disertai dengan keterampilan (*skills*). Dari tindakan tersebut dicapai hasil, dimana kompetensi dapat dihubungkan dengan kinerja dan mencakup niat, tindakan, dan hasil akhir.

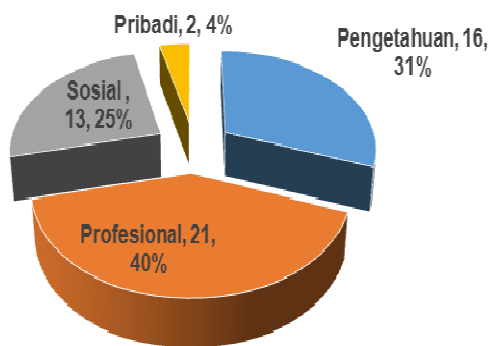
Keterkaitan antara kompetensi dengan kinerja tersebut telah banyak dibuktikan berdasarkan riset terdahulu, Dina Rande (2016) dan Erni Yuningsih **dan** Ardianti (2019), membuktikan secara simultan dan parsial melalui pendekatan kuantitatif, bahwa variabel kompetensi memiliki hubungan atau pengaruh pada variabel kinerja dengan positif, ini bermakna bahwa kenaikan atau penurunan kompetensi akan mempengaruhi naik turunnya kinerja. Penelitian ini sejalan dengan analisis ini bahwa anggota bhabinkamtibmas dalam memberikan kinerjanya tergantung pada kompetensi yang dimiliki, namun dari berbagai kompetensi tersebut kompetensi pengetahuan memiliki ranking pertama dalam membangun dan meningkatkan kinerja

bhabin, disbanding kompetensi lainnya, seperti kompetensi sosial, profesional, dan kompetensi pribadi.

**Faktor kompetensi yang diperlukan oleh bhabinkamtibmas dalam menunjang keberhasilan kinerja**

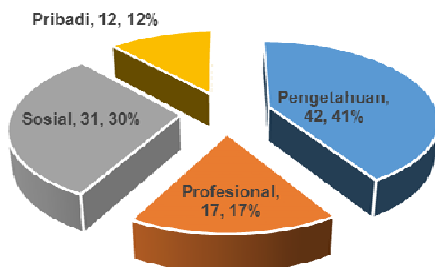
Kompetensi bhabinkamtibmas menjadi ukuran apakah anggota bhabin berhasil memberikan kinerja. berdasarkan hasil penelitian kompetensi pada **Polda Metro jaya** lebih mengedepankan **kompetensi professional (40%)** dibanding pengetahuan sebesar 30%, Analisa peneliti pemahaman kompetensi professional yang dipahami oleh bhabinkamtibmas Polda Metro jaya secara keseluruhan melekat pada tugas-tugas kepolisian secara umum, tidak menunjukkan pada profesioanl khusus.

**RANGKING KOMPETENSI**

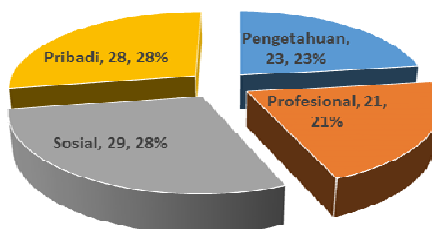


**Pada Polda Jawa Tengah** kompetensi yang diunggulkan adalah **Pengetahuan (42, 41%)**, pengetahuan ini merupakan kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh setiap anggota bhabinkamtibmas, karena dengan pengetahuan secara mindset terbangun pemahaman untuk menganalisis terkait dengan persoalan-persoalan yang terjadi di wilayah kerja bhabin, termasuk bagaimana memanaj berbagai persoalan sosial.

Ranking Kompetensi

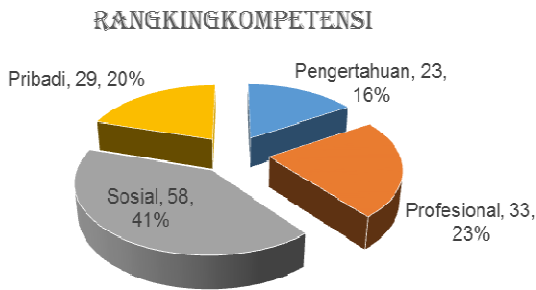


**RANGKING KOMPETENSI**



**Polda Kalimantan Timur** pilihan rangking kompetensi pada **Sosial (29,28%)**, ini menjadi pilihan karena dengan kontak sosial menjamin hubungan antara bhabinkamtibmas dengan masyarakat terasa erat, sehingga segala hal yang menyangkut permasalahan social bias dikendalikan dengan membina hubungan baik dengan masyarakat, bhabin merasa dapat diterima oleh masyarakat karena secara sosial dapat menyesuaikan diri dengan

kebiasaan yang terjadi didaerah binaannya, sehingga persoalan soaial dapat diselesaikan dengan baik. Hal ini berlaku juga pada aktivitas bhabin meberikan pelayanan kinerja pada. kondisi ini juga tidak jauh berbeda dengan bhabin-kamtibmas pada **Polda Jambi**, seperti tertera dibawah ini, bahwa **kompetensi sosial** memiliki rangking pertama yaitu **58,41%**.



Kompetensi menurut Spencer & Spencer dalam Palan (2007) adalah sebagai karakteristik dasar yang dimiliki oleh seorang individu yang berhubungan secara kausal dalam memenuhi kriteria yang diperlukan dalam menduduki suatu jabatan. Kompetensi terdiri dari 5 tipe karakteristik, yaitu motif (kemauan

konsisten sekaligus menjadi sebab dari tindakan), faktor bawaan (karakter dan respon yang konsisten), konsep diri (gambaran diri), pengetahuan (informasi dalam bidang tertentu) dan keterampilan (kemampuan untuk melaksanakan tugas). Selanjutnya, Wibowo (2007), kompetensi diartikan sebagai kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi oleh keterampilan dan pengetahuan kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Dengan demikian kompetensi menunjukkan keterampilan atau pengetahuan yang dicirikan oleh profesionalisme dalam suatu bidang tertentu sebagai suatu yang terpenting. Kompetensi sebagai karakteristik seseorang berhubungan dengan kinerja yang efektif dalam suatu pekerjaan atau situasi. Charles E. Jhonson dalam Wina Sanjaya (2005) dalam Anita Christine Runtu, Jantje Mandey, dan Martha Ogotan (diakses 10 nopember 2019) membagi kompetensi kedalam 3 bagian yakni : 1). Kompetensi pribadi, yakni kompetensi yang berhubungan dengan pengembangan kepribadian (personal competency), 2). Kompetensi professional, yakni kompetensi atau kemampuan yang berhubungan dengan penyelesaian tugas-tugas tertentu, dan 3). Kompetensi sosial, yakni kompetensi yang berhubungan dengan kepentingan sosial. Kunandar (2007), kompetensi dapat dibagi 5 (lima) bagian yakni: 1. Kompetensi intelektual, yaitu berbagai perangkat pengetahuan yang ada pada diri individu yang diperlukan untuk menunjang kinerja 2. Kompetensi fisik, yakni perangkat kemampuan fisik yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas 3. Kompetensi pribadi, yakni perangkat perilaku yang berkaitan dengan kemampuan individu dalam mewujudkan diri, transformasi diri, identitas diri dan pemahaman diri. 4. Kompetensi sosial, yakni perangkat perilaku tertentu yang merupakan dasar dari pemahaman diri sebagai bagian

yang tidak terpisahkan dari lingkungan sosial. 5. Kompetensi spiritual, yakni pemahaman, penghayatan serta pengamalan kaidah kaidah keagamaan.

## **PENUTUP**

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas maka dapat disimpulkan beberapa hal, antara lain:

- a. Kompetensi yang diunggulkan oleh bhabinkamtibmas rata-rata hanya pada kompetensi sosial, sementara yang diharapkan adalah pada kompetensi pengetahuan (di Polda Jawa tengah) sebagai dasar bhabinkamtibmas mampu menyelesaikan permasalahan alokasi dana desa.
- b. Kinerja bhabinkamtibmas dalam melaksanakan tugasnya di desa dapat dilihat dari indikator kinerja antara lain kinerja bidang pelayanan, menyediakan waktu menerima masukan, bimbingan konseling, memberikan pengetahuan kepada masyarakat, menjalin komunikasi dengan aparat desa, memberikan pelayanan dengan ramah dan senyum, dan memberikan pelayanan dengan Bahasa yang mudah difahami, serta respon cepat terhadap persoalan sosial.
- c. Keterkaitan kompetensi bhabinkamtibmas dengan peningkatan kinerja, secara fakta bahwa kompetensi pengetahuan memiliki peran mendorong anggota bhabinkamtibmas mengembangkan pola pikirnya sehingga mampu melaksanakan tugas dan mampu membuat kreatifitas pada bidang tugasnya.

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka direkomendasikan antara lain:

- a. Peningkatan Kompetensi bhabinkamibmas secara terintegrasi yang melibatkan komponen terkait sehingga bhabinkamtibmas mempunyai pengetahuan yang terkait dengan bidang tugas yang mendorong terjadinya peningkatan kinerja.
- b. Kinerja bhabinkamtibmas dipertahankan bahkan ditingkatkan terkait dengan bidang pelayanan dan respon terhadap persoalan sosial melalui peningkatan kompetensi pengetahuan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Anita Christine Runtu Jantje Mandey Martha Ogotan, (2019, 10 Nopember), "Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Dalam Meningkatkan Kinerja Tenaga Kependidikan Pada Bagian Akademik Universitas Sam Ratulangi Manado". <https://media.neliti.com/media/publications/1330-ID-kompetensi-sumber-daya-manusia-sdm-dalam-meningkatkan-kinerja-tenaga-kependidika.pdf>,

- Dina Rande.( 2016). “ Pengaruh Kompetensi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Mamuju Utara”. *e Jurnal Katalogis*, Volume 4 Nomor 2, Februari 2016 hlm 101-109. ISSN: 2302-2019
- Eka Marlina Putri.(2015). “Pengaruh Faktor-Faktor Kompetensi SumberDaya Manusia Terhadap Kinerja Pegawai Dalam Implementasi Sistem E-Procurement (Studi Kasus Pada Kementerian Pekerjaan Umum)”, *Tesis*, Program Magister Manajemen Teknologi Bidang Keahlian Manajemen Proyek Program Pascasarjana Institut Teknologi Sepuluh Nopember: Surabaya
- Erni Yuningsih dan Ardianti. (2019). “Pengaruh Kompetensi Dan Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Pt XXX”. *Jurnal Visionida*, Volume 5 Nomor 1 Juni 2019.
- Kunandar. (2007). “GuruProfesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Persiapan Menghadapi Sertifikasi Guru”. Jakarta : Raja Grafindo: Persada.
- Mangkunegara, A.A. Anwar Prabu. (2009). *MSDM Perusahaan.*, Bandung: Refika Aditama.
- Moehiono, 2014, *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*, Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Notoatmodjo,Soekidjo. 2009. *Pengembangan Sumber Daya Manusia. Jakarta: Rineka Cipta.*
- Palan, R. (2007). “Competency Management: Teknis Mengimplementasikan Manajemen SDM Berbasis Kompetensi untuk Meningkatkan Daya Saing Organisasi” .PPM: Jakarta.
- Rosento. (2019, 2 Desember) “Analisis Hubungan Kompetensi Terhadap Kinerja Karyawan”, *Program Studi Manajemen Administrasi* , Akademik Sekretari dan Manajemen Bina Sarana Informatika (ASM BSI), Jakarta Pusat rosentor.st@bsi.ac.id.
- Spencer, Lyle and Signe Spencer. (1993). *Competence at Work*. Canada, Jhon Wiley & Sons,Inc.
- Suparno, Paul. (2005). *Miskonsepsi dan Perubahan Konsep dalam Pendidikan Fisika*, :Yogyakarta
- Sustrisno,Edi.iswanto.(2011) *.Manajemen Sumber Daya Manusia.Jakarta: Kencana*
- Wibowo. (2007). *Manajemen Kinerja*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

---

## MENINGKATKAN EFEKTIVITAS KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DENGAN LINGKUNGAN KERJA YANG KONDUSIF DI MASA WORK FROM HOME

Heldy Vanni Alam

### PENDAHULUAN

Setelah diumumkannya pandemi virus Covid-19 oleh WHO, maka serta merta membawa dampak pada seluruh aspek kehidupan, baik sektor ekonomi, sosial, pembangunan, hingga layanan di organisasi pemerintahan. Salah satu instruksi pemerintah dalam rangka memutus rantai penyebaran dan pencegahan terhadap wabah virus covid-19 adalah menghimbau dan menginstruksikan masyarakat Indonesia untuk mengurangi kegiatan di luar rumah yang tidak penting termasuk menerapkan system kerja dari rumah (*work from home*). *Work from home* (WFH) secara harfiah dapat diartikan sebagai bekerja dari rumah. Pelaksanaan WFH di berbagai perkantoran swasta maupun instansi pemerintahan di Gorontalo dilatarbelakangi oleh meluasnya penyebaran COVID-19 di sejumlah daerah termasuk Gorontalo sendiri. Hal ini juga dapat dikaitkan dengan hak pekerja atas keselamatan dan kesehatan kerja. Upaya pencegahan dan perlindungan bagi ASN di jajaran Pemerintah Provinsi Gorontalo memberlakukan kebijakan WFH untuk sementara waktu. Kebijakan WFH yang ditempuh pemerintah Provinsi Gorontalo didasarkan pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah dan perubahannya. Selain itu, terdapat Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja bagi Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah yang Berada di Wilayah dengan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar. Namun, kedua edaran tersebut telah dicabut dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru. Edaran ini memuat sistem kerja bagi pegawai Aparatur Sipil Negara ("ASN") dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan kementerian/lembaga/daerah untuk beradaptasi dengan tatanan normal baru produktif dan aman COVID-19.



Kebijakan pelaksanaan WFH ini tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan, bahkan menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan termasuk pimpinan daerah, mengingat ketidaksiapan mereka dalam menjalankannya apalagi yang berhubungan dengan pelayanan publik. Di satu sisi instansi pemerintah dituntut untuk senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang membutuhkan. Di samping itu juga, seluruh program yang telah dituangkan dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) harus tuntas dan terlaksana sebagaimana rencana yang ada. Bagi sebagian pegawai, program WFH memberikan nuansa kerja tersendiri mengingat dalam keseharian mereka tetap berada di rumah berkumpul dengan keluarga, lebih fleksibel, tingkat stress kerja berkurang, sehingga memunculkan kepuasan kerja dan loyalitas meningkat. Sementara itu bagi ASN lainnya WFH memberi dampak kurang baik diantaranya : kesulitan dalam hal pengawasan/ monev pekerja, motivasi kerjanya menurun karena terbiasa bekerja tim dan suasana kantornya, masalah keamanan data, banyak gangguan dari anggota keluarga, terjadinya miskomunikasi, dll. Hal ini tentunya berimbas pada efektivitas kerja pegawai yang bersangkutan. Sementara itu, ditinjau dari sudut organisasi bahwa keberhasilan pencapaian tujuan merupakan indikator keberhasilan dari organisasi tersebut. Setiap proses kegiatan dan kelembagaannya diarahkan untuk menghasilkan sesuatu benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia dengan sebaik-baiknya. Salah satu sumber daya yang paling penting dalam menggerakkan roda organisasi adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia terdiri dari individu-individu yang ada dalam sebuah organisasi dan merupakan penggerak aktivitas organisasi. Sebagai salah satu asset penting organisasi, sumber daya manusia ini mampu menyelesaikan berbagai masalah yang sedang dihadapi ataupun yang mungkin muncul di kemudian hari. Bahkan dalam aktivitas organisasi sumber daya manusia mampu menciptakan efisiensi dan efektivitas organisasi. Suatu pekerjaan dikatakan efektif jika pekerjaan tersebut dapat menghasilkan atau mencapai sasaran dan diselesaikan tepat waktu sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Hal ini bisa diwujudkan jika individu-individu dalam organisasi bekerja secara efektif dan efisien.

### **Efektivitas Kerja**

Efektivitas kerja merupakan suatu keadaan tercapainya tujuan yang ingin diharapkan atau dikehendaki melalui penyelesaian pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Efektivitas secara umum menunjukkan taraf tercapainya hasil melalui penggunaan sumber daya yang ada. Hal ini sejalan dengan definisi menurut Siagian (2007:24) bahwa : "Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sasaran dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas

jasa kegiatan yang dijalankan.” Dalam pelaksanaannya efektivitas seringkali disamakan dengan efisien. Namun sebenarnya ada perbedaan diantarnya. Efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sedangkan efisien adalah kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar. Efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara *input* dan *outputnya*. Jadi efektivitas kerja karyawan adalah penyelesaian pekerjaan dengan tepat waktu yang dilakukan oleh karyawan sesuai dengan peraturan-peraturan dan praktik-praktik yang digunakan perusahaan dengan menggunakan sumber daya dan sarana tertentu untuk mencapai tujuan.

Efektivitas kerja menurut Siagian (2014: 151) berkaitan dengan ketepatan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan. Artinya bahwa baik dan tidaknya pekerjaan tergantung dari konsistensi pelaksanaannya, bukan pada aspek bagaimana melaksanakannya dan berapa biaya yang dibutuhkan. Pendapat lain dikemukakan oleh Liana (2016:4), bahwa efektivitas kerja lebih mengarah pada capaian hasil sesuai target dan sasaran dari seluruh program yang menjadi tupoksi pegawai. Kedua pendapat tersebut menekankan pentingnya pencapaian hasil yang merupakan serangkaian aktivitas jasmani dan rohani yang dilakukan oleh manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian, kemampuan pegawai dalam memilih sumber daya yang tepat untuk pencapaian tujuan yang ditetapkan merupakan aspek terpenting, sehingga hasilnya lebih efektif.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas kerja sebagaimana yang dijelaskan oleh Steers (2005:20).

- (1) Karakteristik Organisasi; yang meliputi struktur yang berkaitan dengan penempatan sumber daya manusia yang tepat dalam bekerja dan teknologi yang digunakan dalam menghasilkan produk.
- (2) Karakteristik Lingkungan Organisasi; yang meliputi aspek fisik dan non fisik baik internal maupun eksternal.
- (3) Karakteristik Pekerja; perilaku pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya di organisasi.
- (4) Kebijakan dan Praktek Manajemen; meliputi tanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam aktivitas di organisasi.

Menurut Campel yang dikutip Steers (1998:45) bahwa untuk mengukur efektivitas kerja ada beberapa indikator yang biasa dipergunakan yaitu:

- (1) Kesiagaan; Penilaian menyeluruh sehubungan dengan kemungkinan bahwa organisasi mampu menyelesaikan sebuah tugas khusus dengan baik jika diminta.

- (2) Kemangkiran; Frekuensi kejadian-kejadian pekerja bolos dari pekerjaan.
- (3) Semangat kerja; Kecenderungan anggota organisasi berusaha lebih keras mencapai tujuan dan sasaran organisasi termasuk perasaan terikat. Semangat kerja adalah gejala kelompok yang melibatkan kerja sama dan perasaan memiliki.
- (4) Motivasi; Kecenderungan seseorang individu melibatkan diri dalam kegiatan berarahkan sasaran dalam pekerjaan, ini bukanlah perasaan senang yang relatif terhadap hasil berbagai pekerjaan sebagaimana halnya kepuasan, tetapi lebih merupakan perasaan sedia atau rela bekerja untuk mencapai tujuan pekerjaan.
- (5) Kepuasan kerja; Tingkat kesenangan yang dirasakan seseorang atas peran pekerjaannya dan organisasi. Tingkat rasa puas individu bahwa mereka merasa dihargai karena pekerjaan mereka.
- (6) Beban pekerjaan; Beban pekerjaan yang diberikan pimpinan kepada bawahan sesuai dengan kemampuan seseorang dan sesuai dengan jumlah kelompok mereka.
- (7) Waktu menyelesaikan tugas; Waktu merupakan salah satu pengukuran efektivitas kerja yang sangat penting sebab dapat dilihat apakah waktu yang digunakan suatu organisasi sudah dijalankan dengan sebaik-baiknya oleh setiap anggota organisasi.

Selanjutnya Hasibuan (2014:105), menyebutkan beberapa indikator efektivitas kerja yakni: (1) kuantitas kerja, (2) kualitas kerja, dan (3) pemanfaatan waktu. *Kuantitas kerja* berkaitan dengan volume pekerjaan/ beban kerja yang mampu diselesaikan oleh pegawai. Kualitas kerja berkaitan dengan hasil kerja yang ditunjukkan oleh pegawai antara lain aspek ketelitian, kebenaran, kerapian dengan tidak mengabaikan volume pekerjaan dalam pelaksanaannya. Sementara itu pemanfaatan waktu menitikberatkan pada kemampuan pegawai dalam menggunakan waktu dengan baik selama bekerja sesuai ketentuan organisasi.

### **Lingkungan Kerja**

Nitisemito (2000) dalam Wihartanti (2016:148) mendefinisikan lingkungan kerja sebagai sesuatu hal yang mempengaruhi individu dalam menjalankan tugas baik fisik maupun non fisik. Sedangkan Sedarmayati (2009: 11) mengartikannya sebagai sesuatu yang berhubungan dengan aspek fisik, mempengaruhi individu maupun kelompok dalam bekerja. Lingkungan kerja adalah segala hal yang terdapat di lingkungan dimana pegawai melakukan aktivitasnya (Mardiana, 2005: 74 dalam Wihartanti (2016:148). Jadi bisa dinyatakan bahwa lingkungan kerja mempunyai pengaruh langsung terhadap pegawai dalam melaksanakan tugas pekerjaannya. Sehingga sangatlah wajar

jika kondisi lingkungan yang kondusif berpotensi mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerjanya, sebaliknya pada kondisi lingkungan yang tidak kondusif akan berdampak pada penurunan kinerja pegawai. Pendapat lain dikemukakan oleh Sofyan (2013:20) dalam Wihartanti (2016) menjelaskan bahwa lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang berada di sekitar karyawan yang mempengaruhi dirinya dalam menjalankan dan menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan kepadanya dalam suatu wilayah. Sama halnya dengan pendapat Robbins (dalam Simamora, 2013: 34) lingkungan kerja atau lokasi kerja adalah segala sesuatu yang ada disekitar para pekerja dan yang dapat mempengaruhi dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan. Di sisi lain Sedarmayanti (2015:21) berpendapat lingkungan kerja adalah keseluruhan alat perkakas dan bahan yang dihadapi, lingkungan sekitarnya di mana seseorang bekerja, metode kerjanya, serta pengaturan kerjanya baik sebagai perseorangan maupun sebagai kelompok.

Selanjutnya, Sedarmayanti (2009: 21) mendefinisikan bahwa secara garis besar, jenis lingkungan kerja terbagi menjadi 2 yakni : (a) lingkungan kerja fisik, dan (b) lingkungan kerja non fisik. Soekanto dan Indriyo (2000: 151) dalam Wihartanti (2016) mengemukakan pula bahwa lingkungan kerja fisik meliputi pengaturan penerangan tempat kerja, pengontrolan terhadap suara gaduh dalam tempat kerja, pengontrolan terhadap udara, pengaturan kebersihan tempat kerja, dan pengaturan tentang keamanan tempat kerja". Dari pendapat di atas, dapat dimaknai bahwa lingkungan kerja fisik berkenaan dengan kondisi tempat atau ruangan, yang dapat mempengaruhi pegawai atau karyawan dalam melaksanakan pekerjaan atau efektivitas yang dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pandangan lain disampaikan Sedarmayanti (2015:46) bahwa indikator-indikator lingkungan kerja terdiri dari: penerangan, sirkulasi udara, kebisingan, ruang kerja, dan keamanan.

### Hubungan antara Lingkungan Kerja dengan Efektivitas Kerja Pegawai

Secara teoritik terungkap bahwa lingkungan kerja mempengaruhi efektivitas kerja pegawai di masa WFH. Demikian pula beberapa hasil penelitian yang menunjukkan hal yang sama. Hal tersebut setelah dikaji dan ditelusuri secara empirik menunjukkan pula hasil yang searah sebagaimana data berikut ini.

**Tabel 1.** Residuals Statistics<sup>a</sup>

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	60,2741	74,5416	68,9000	3,94147	60
Residual	-7,51197	10,45208	,00000	3,08310	60
Std. Predicted Value	-2,188	1,431	,000	1,000	60
Std. Residual	-2,395	3,332	,000	,983	60

a. Dependent Variable: Efektivitas kerja

**Tabel 2.** Hasil Uji Normalitas

		Lingkungan kerja	Efektivitas kerja
N		60	60
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	68,3500	68,9000
	Std. Deviation	5,76025	5,00407
Most Extreme Differences	Absolute	,154	,131
	Positive	,124	,111
	Negative	-,154	-,131
Kolmogorov-Smirnov Z		1,189	1,016
Asymp. Sig. (2-tailed)		,118	,254

**Tabel 3.** Hasil Uji Hipotesis Variabel Lingkungan Kerja terhadap Efektivitas Kerja

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	27,209	5,571		4,884	,000
	Lingkungan kerja	,610	,081	,702	7,510	,000

a. Dependent Variable: Efektivitas Kerja  
 Sumber : Olahan data SPSS19 tahun 2020

Tabel 3 tersebut menunjukkan bahwa  $\hat{Y} = 27,209 + 0,610X$ . Selanjutnya nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,025$ . Artinya bahwa kondisi lingkungan kerja yang baik diikuti pula oleh adanya peningkatan terhadap efektivitas kerja pegawai. Di sisi lain terlihat bahwa semua koefisien regresi bernilai positif, sehingga pengaruh lingkungan kerja mempunyai kecenderungan positif dan signifikan terhadap efektivitas kerja pegawai. Dengan demikian hipotesis penelitian teruji kebenarannya.

**Tabel 4.** Koefisien Determinan Variabel Lingkungan Kerja terhadap Efektivitas Kerja

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,702 <sup>a</sup>	,493	,484	3,59367

a. Predictors: (Constant), Lingkungan Kerja  
 b. Dependent Variable: Efektivitas Kerja  
 Sumber: Data Olahan SPSS19 2020

Dari tabel 4 di atas diketahui nilai R sebesar 0,702 artinya terdapat pengaruh yang kuat variabel lingkungan kerja terhadap efektivitas kerja sebesar 70,20%, sedangkan nilai R-square sebesar 0,493 atau sebesar 49,3% variabel lingkungan kerja memberikan kontribusi untuk mempengaruhi variabel efektivitas kerja pegawai. Ini mengandung makna bahwa jika lingkungan kerja baik dan kondusif, maka akan berdampak pada peningkatan efektivitas kerja walaupun di tengah pandemi covid19 dan masa WFH diberlakukan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hasibuan, Malayu S.P.(2013). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- (2014). *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sedamayanti.(2009). *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas kerja*.Bandung: CV Mandar Maju.
- .(2015). *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bandung : ReflikaAditama.
- .(2017). *Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas kerja*. Cetakan Pertama. Bandung: Refika Aditama.
- Simamora, Henry. (2013). *Human Resource Management*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Sondang P.Siagian, (2007). *Kerangka Dasar Ilmu Administrasi*, Jakarta, Rineka Cipta
- 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Steers, M. Richard. (1998). *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: LPPM
- .(2005). *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: LPPM
- Widodo Suparno (2015). *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wihartanti, Liana Vivin. (2016). *Pengaruh Lingkungan Kerja Fisik dan Pengawasan Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai (Studi Kasus Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen)* ASSETS: Jurnal Akuntansi dan Pendidikan, Vol. 5, No. 2.

---

## **SOCIAL ENTREPRENEURSHIP SEBAGAI MITIGASI DAMPAK COVID-19**

**P. Eko Prasetyo**

### **PENDAHULUAN**

Dampak global pandemi Covid-19 bersifat tidak pasti dan sangat kompleks, yang semula sebagai krisis kesehatan menjadi berdampak kepada krisis ekonomi, sosial, politik budaya, ketahanan dan keamanan, serta telah memasuki semua sendi kehidupan masyarakat global, khususnya dari sisi sosial-ekonomi. Pandemi Covid-19 telah memicu kekhawatiran akan krisis ekonomi dan resesi yang disebabkan oleh tingkat ketidakpastian yang tinggi (Nicola et al., 2020). Selain itu, belum ditemukannya obat atau vaksin membuat sifat Covid-19 yang sekarang sedang berlangsung telah menciptakan ketidakpastian lebih lanjut dan semakin kompleks bagi banyak orang. Kuatnya penyebaran virus corona secara eksponensial mendorong jarak sosial (social distance) dan secara ekonomi menyebabkan penutupan berbagai aktivitas; pasar keuangan, perusahaan, industri, bisnis dan sektor usaha baik formal maupun informal, serta berbagai aktivitas ekonomi lainnya.

Sektor-sektor utama telah terpengaruh, terutama sektor perjalanan dan pariwisata, ritel dan jasa lainnya; operasi bisnis dan supply chain terganggu; merusak pekerjaan dan mata pencaharian terancam; daya beli dan kepercayaan konsumen menurun, dan ekonomi global terjadi resesi, sehingga tiga masalah pokok pembangunan seperti; kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan menjadi semakin meningkat dan semakin sulit diturunkan (ASEAN Policy Brief, 2020; Prasetyo, 2020b, 2020d). Secara mikro ekonomi, dampak Covid-19 semakin menyulitkan kehidupan riil individu di dalam setiap masyarakat, dan secara makro membuat resesi ekonomi global semakin dalam dan menyulitkan para pembuat kebijakan publik. Karena itu, dampak negatifnya harus segera dapat dicegah (mitigasi) agar tidak semakin meluas.

Di lain pihak, sifat pandemi Covid-19 yang cenderung meningkat dan tidak pasti, menuntut kreatifitas dan inovasi dari berbagai pihak untuk melakukan mitigasi dengan terus tetap berupaya membuat vaksin serta cara-cara lain yang dianggap perlu, baik secara ekonomi, sosial, politik, budaya serta pertahanan dan keamanan. Belakangan ini, peran social entrepreneurship (kewirausahaan sosial) sebagai bagian dari ekonomi-sosial semakin penting

dan telah muncul sebagai salah satu bidang studi keilmuan tersendiri yang semakin berpotensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kegiatan pembangunan ekonomi (Staples, 2016; Kazmi, 2016; Prasetyo, 2020a, 2020b). Dalam masa krisis global akibat pandemi Covid-19, peran social entrepreneurship dapat lebih dimanfaatkan sebagai salah satu alat pencegah resesi ekonomi atau krisis ekonomi-sosial masyarakat serta merekonstruksi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan (Prasetyo, 2020b, 2020d). Karena, social entrepreneurship (SE) adalah bagian dari ekonomi sosial, dan ekonomi sosial adalah bagian dari realita kehidupan ekonomi masyarakat (Kazmi, 2016; Prasetyo, 2020b). Pada saat ini, “ekonomi sosial” telah memainkan peran semakin penting dalam menangani dan memitigasi dampak jangka pendek dan jangka panjang dari krisis pandemi Covid-19 terhadap ekonomi dan masyarakat (OECD, 2020).

Social entrepreneurship (kewirausahaan sosial) dalam hal ini dapat didiskripsikan sebagai bagian atau proses dari kewirausahaan ekonomi yang tujuan utamanya lebih memfokuskan diri untuk memenuhi kebutuhan riil ekonomi sosial masyarakat. Dalam sistem ekonomi sosialis, sebenarnya telah dicirikan bahwa kepemilikan sosial dan pengoperasian alat-alat produksi yang dapat berbentuk koperasi atau kepemilikan publik langsung, di mana produksi dilakukan secara langsung untuk digunakan dan bukan untuk keuntungan individu saja. Sementara itu, menurut OECD (2020) ekonomi sosial sendiri meliputi; perkumpulan, koperasi, yayasan, organisasi bersama dan usaha sosial. Sedangkan, fokus dan ciri khas dari ekonomi sosial adalah pada praktik ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, (OECD, 2020). Pokok permasalahannya adalah mengapa social entrepreneurship dapat digunakan sebagai mitigasi dampak global Covid-19. Tujuan umum makalah ini adalah untuk menjelaskan pentingnya peran social entrepreneurship sebagai mitigasi dampak krisis Covid-19.

Kewirausahaan sendiri secara umum telah diakui mampu memainkan peran semakin penting untuk perubahan struktur kelembagaan, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di berbagai Negara (Thurik, 2009; Acs, 2018; Prasetyo, 2020a). Di mana, ciri sikap mental wirausaha yang penuh semangat, kreatif dan inovatif merupakan kebutuhan utama dalam menjalankan aktivitas usaha sosial kewirausahaannya yang sering mampu muncul sekalipun pada masa resesi atau krisis. Pada kesempatan ini, orisinalitas dan urgensi pentingnya diusulkan konsep peran social entrepreneurship sebagai mitigasi dampak Covid-19 adalah untuk menutup celah yang tidak dapat ditutup atau tidak dapat disentuh oleh lembaga publik atau lembaga formal pemerintah dan swasta (Prasetyo, 2020b). Walaupun konsep dasar peran social entrepreneurship dalam hal ini bukan sebagai satu-satunya alat mitigasi, tetapi peran penting social entrepreneurship pada saat ini dan ke depan dapat membantu



memperkuat sendi kehidupan nyata ekonomi-sosial masyarakat, serta dapat membantu mengurangi masalah pokok pembangunan ekonomi.

## PEMBAHASAN

Pada umumnya, krisis cenderung terjadi tanpa peringatan, mereka memiliki jalur yang tidak dapat diprediksi yang membuat krisis tersebut sulit ditangani (Parker, 2019). Untuk merespons krisis secara efektif, perlu ada respons terkoordinasi yang melibatkan individu, pemerintah, dan bisnis (Shrivastava, 1993). Karena krisis dari dampak pandemi Covid-19 bersifat tidak pasti dan kompleks, sementara obat pencegah atau vaksin belum ditemukan, sehingga dibutuhkan pendekatan yang lebih kreatif, inovatif dan efektif sebagai alternatif mitigasi dampak krisis tersebut. Dalam kesempatan pembahasan ini diusulkan penjelasan dengan pendekatan peran social entrepreneurship sebagai solusi atau mitigasi yang kreatif, inovatif dan efektif. Dalam prakteknya, pendekatan ini dapat melibatkan kemitraan lintas lembaga baik formal dan informal untuk saling memperkuat dan mendorong di antara berbagai tingkat kehidupan ekonomi sosial masyarakat.

Argumentasinya, mengingat besarnya dampak krisis pandemi Covid-19 yang sangat kompleks, sementara itu obat atau vaksin sebagai mitigasi awal belum ditemukan, maka menjadi semakin penting untuk berikir positif, kreatif, dan inovatif. Dalam kesempatan ini, secara urgensi dan novelty, peran social entrepreneurship dapat dianggap sebagai model baru yang efektif atau sebagai "obat" dan mitigasi dari dampak krisis Covid-19 tersebut. Namun demikian, hingga saat ini belum ada definisi baku tentang social entrepreneurship (Prasetyo, 2020c). Ibarat gadis cantik, social entrepreneurship selalu sering menjadi konsep yang diperebutkan, baik dalam wacana akademis maupun praktik (Callavo, 2018; Prasetyo, 2020c). Berbagai upaya telah banyak diupayakan untuk menjelaskan berbagai definisi dan analisis tentang social entrepreneurship beserta konsekuensi positif dan negatifnya. Berbagai debat definisi juga masih tetap memiliki peluang untuk ikut memajukan social entrepreneurship ini dalam berbagai bidang penelitian. Namun dalam kesempatan ini, bukan untuk menjelaskan berbagai permasalahan tersebut. Dalam kesempatan ini, tujuan pembahasan diprioritaskan untuk menjelaskan argumentasi pentingnya mengapa social entrepreneurship dapat sebagai mitigasi dampak pandemi Covid-19. Jika masih dibutuhkan pemahaman berbagai definisi tentang social entrepreneurship tersebut, silahkan dapat dibaca kembali dalam (Dacin, 2010, 2011; Bacq, 2011; Callavo, 2018; dan Prasetyo, 2020c).

Dacin (2010) telah menjelaskan *Social Entrepreneurship: Why We Don't Need a New Theory and How We Move Forward From Here*. Dacin, (2010)

telah menguji social entrepreneurship sebagai konteks penyelidikan yang unik dengan menempatkan pemahaman dan mengevaluasi berbagai definisi dan literature yang ada. Selanjutnya, hasil riset Newbery (2018), telah menjelaskan ada peran negara dalam memfasilitasi institusi dan social entrepreneurship yang berpotensi untuk ketahanan transformative. Hasil riset tersebut merekomendasikan untuk riset ke depan dapat lebih memperluas dan mengembangkan pendekatan yang lebih fokus pada berbagai wilayah lain yang mengalami krisis, baik krisis ekonomi, sosial, lingkungan atau gabungan (Newbery, 2018). Secara alami, social entrepreneurship hadir untuk melihat peluang baru dan sering melakukan kolaborasi dengan komunitas masyarakat atau institusi terkait untuk menciptakan perubahan positif. Namun demikian, dalam pembahasan pada chapter ini, penjelasan tersebut tetap cenderung lebih difokuskan pada peran utama social entrepreneurship dan bukan kepada peran institusi.

Dalam kesempatan ini, penulis cenderung lebih menjelaskan pentingnya peran social entrepreneurship sebagai mitigasi di masa resesi ekonomi akibat pandemic Covid-19 tersebut. Sebaliknya, ada pertanyaan riset yang relevan apakah perlu resesi ekonomi untuk memajukan social entrepreneurship, telah di jawab oleh (Putten, 2011). Hasil riset Putten (2011) menemukan bahwa selama resesi, faktor-faktor seperti biaya rendah tenaga kerja terampil, persediaan lebih murah, tunjangan pajak, alat web baru, blog, jejaring sosial mempermudah masuk ke dalam usaha social entrepreneurship. Sekarang adalah waktu terbaik untuk menjadi bos Anda sendiri, dan memiliki kebebasan yang fleksibilitas untuk bekerja dan untuk kebutuhan masyarakat yang lebih baik (Putten, 2011).

Dengan demikian, peran social entrepreneurship tetap terus relevan baik ketika sedang terjadi resesi ekonomi atau tidak. Namun demikian, peran social entrepreneurship menjadi semakin dapat lebih dirasakan ketika sedang terjadi di masa resesi ekonomi, dan bukan harus dibutuhkan resesi ekonomi baru muncul peran social entrepreneurship. Hal ini mengingatkan bahwa kewirausahaan adalah aspek tindakan manusia yang dapat terjadi di mana-mana dalam pembangunan ekonomi. Karena itu, agar pembangunan ekonomi dapat berjalan lebih baik dibutuhkan peran kualitas institusi tertentu yang terkait agar spectrum social entrepreneurship dapat lebih berkembang semakin baik pula. Peran kualitas kebijakan institusi yang dimaksud dalam hal ini tidak harus berskala nasional, tetapi yang terpenting lebih terkait dengan masalah pokok di dalam masyarakat. Karena kebijakan kewirausahaan dalam konteks lokal, diskrit, dan subnasional memiliki nilai yang tidak kalah dengan konteks sosial di seluruh Negara (Jarvis, 2020).

## **Social Entrepreneurship dalam Kebijakan Pembangunan Ekonomi**

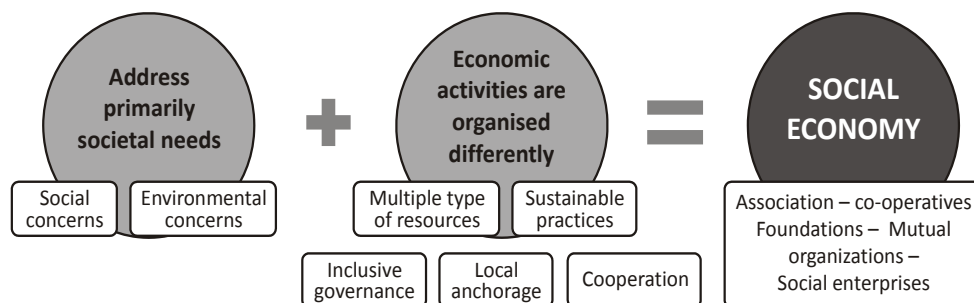
Adanya dampak pandemi Covid-19 yang penuh ketidakpastian dan berkepanjangan jelas sangat mengancam target sasaran dan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) baik global maupun di Indonesia. Jika ancaman tersebut dibiarkan, maka akan terjadi kemunduran dan dapat terancam “gagal” dalam pencapaian tujuan SDGs tersebut. Pada pertengahan tahun 2020 ini telah terjadi resesi global atau kontraksi besar di berbagai Negara, bahkan Negara maju seperti Amerika dan Jepang telah mengalami resesi yang lebih besar daripada Indonesia. Menurut data catatan CNBC Indonesia pada tanggal 18 Agustus 2020, dinyatakan telah ada 14 Negara terjun ke jurang resesi yakni; Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Jepang, Korea Selatan, Hong Kong, Inggris, Polandia, Jerman, Perancis, Italia, Spanyol, dan Amerika Serikat. Namun demikian, dalam menghadapi masalah krisis atau resesi tersebut, peran utama social entrepreneurship bukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi lebih cenderung memberikan mitigasi dampak buruk pada pembangunan ekonomi yang diakibatkan oleh turunnya peran pertumbuhan ekonomi tersebut.

Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak signifikan dan dahsyat pada bisnis dan ekonomi secara global. Tetapi, secara positif juga telah mengidentifikasi pemberdayaan eksternal dan internal dari penciptaan usaha baru atau model bisnis baru (Maritz, dkk. 2020; Prasetyo, 2020b). Namun demikian, dampak negatif musibah pandemi Covid-19 dapat dirasakan tetap lebih besar daripada dampak positifnya. Terkait dengan tujuan pembangunan ekonomi, dampak negatif tersebut dapat membuat kebijakan pemerintah dalam penyelesaian masalah pokok pembangunan ekonomi di Indonesia untuk mengatasi kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan menjadi semakin berat dan terancam gagal lagi (Prasetyo, 2020b, 2020e). Oleh karena itu, secara empiris social entrepreneurship hadir sangat terkait erat dengan upaya kebijakan pemerintah tersebut, termasuk ikut membantu kebijakan pemerintah yang secara institusi resmi upaya penyelesaian masalah tersebut belum dapat diatasi dengan berbagai program kebijakan yang telah ada. Dengan demikian, peran social entrepreneurship hadir bisa membutuhkan kolaborasi dengan pemerintah terkait baik secara lokal maupun pusat, sebagai institusi resmi dan juga bisa berdiri sendiri bersama komunitas masyarakat yang terkena dampak resesi terburuk dari krisis tersebut untuk segera bisa bangkit bersama. Oleh karena itu, dalam perspektif di Australia, social entrepreneurship hadir sebagai pahlawan tanpa tanda jasa selama krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19 pada saat ini (Maritz, dkk. 2020).

Krisis akibat dampak pandemi Covid-19 pada saat ini telah mengungkap berbagai kerentanan individu, masyarakat, dan ekonomi, sehingga kebijakan

baru OECD (2020) telah menyerukan pemikiran ulang (new normal) tentang bagaimana kegiatan ekonomi dan sosial diatur (OECD, 2020). Komitmen OECD (2020) juga telah menegaskan bahwa krisis ini membutuhkan tanggapan dan kebijakan yang kuat berdasarkan solidaritas, kerjasama dan tanggung jawab. Organisasi sosial ekonomi (asosiasi, koperasi, organisasi bersama, yayasan dan perusahaan sosial), yang model bisnisnya di bangun di sekitar prinsip-prinsip tersebut dapat membantu membentuk kembali ekonomi dan masyarakat pasca krisis akibat pandemi Covid-19 ini (OECD, 2020). Lebih lanjut OECD (2020) menjelaskan tantangan saat ini yang dihadapi oleh ekonomi sosial adalah menyoroti instrument kebijakan pemerintah yang dipilih dan merekomendasikan untuk mendukung para pelaku ekonomi sosial dalam upaya mereka untuk “memperbaiki” dan “mengubah” masyarakat (OECD, 2020).

Selanjutnya, OECD (2020) menjelaskan inti dari organisasi sosial ekonomi dalam menerapkan model bisnis baru tertentu (social entrepreneurship) yang dicirikan oleh dua elemen utama yakni; (i) mereka menangani kebutuhan masyarakat, dan (ii) mereka diatur secara berbeda dibandingkan dengan pelaku ekonomi arus utama. Pada gambar-1, merupakan diskripsi catatan penting peran yang dimainkan ekonomi sosial dan para aktornya dalam memitigasi dampak krisis Covid-19. Model mekanisme kerjanya adalah; di mana peran organisasi sosial ekonomi masyarakat yang ada menempatkan kepedulian sosial dan lingkungan di jantung model bisnis mereka, serta tujuan utamanya adalah lebih memprioritaskan mitigasi dampak sosial daripada memaksimalkan keuntungan. Karena itu, mereka lebih didorong untuk lebih melayani kepentingan bersama, melindungi kepentingan umum, dan meningkatkan kesejahteraan individu dan komunitas dengan mengatur aktivitas mereka dengan cara yang berbeda-beda (OECD, 2020).



**Gambar-1:** Inti dari organisasi sosial ekonomi  
 Sumber: (OECD, 2020).

Hubungan antara konteks sosio-ekonomi dan aktivitas kewirausahaan di masa resesi telah mendapat perhatian yang cukup besar dalam literature (Aceytuno, et al., 2020). Namun demikian, karena kompleksitasnya hubungan maka peran yang diperoleh tetap ada yang positif dan negatif terhadap

kewirausahaan. Selanjutnya, tantangan yang dihadapi oleh para pelaku ekonomi sosial adalah menyoroti instrument kebijakan publik, yang dipilih dan direkomendasikan kepada institusi dan para pelaku ekonomi lain untuk mendukung para pelaku ekonomi sosial tersebut agar upaya mereka semakin lebih kuat dalam “memperbaiki” dan “mengubah” masyarakat dengan standar baru (new normal). Argumentasi dilakukan hal tersebut karena pada awalnya, para pelaku ekonomi sosial (social entrepreneurship) adalah lebih menyoroti dan membantu masyarakat yang belum atau tidak dapat tersentuh oleh institusi kebijakan publik terkait. Dengan rekomendasi tersebut, berarti telah terjadi keterkaitan positif antara social entrepreneurship dengan institusi kebijakan publik dalam mengatasi masalah pembangunan. Secara teori ekonomi, modal dasar mekanisme kerja di dalam ekonomi sosial tersebut pada prinsipnya adalah lebih mengedepankan ekonomi of scope, sehingga tujuan pencapaian efektifitas lebih diutamakan daripada efisiensi.

Selain itu, social entrepreneurship juga menjadi semakin populer di bidang olahraga karena dampak olahraga terhadap masyarakat dapat ikut mencegah dampak Covid-19. Sektor olahraga sangat dipengaruhi oleh krisis Covid-19 dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya (Ratten, 2020; McSweeney, 2020). Karena itu, para individu di dalam masyarakat semakin lebih banyak fokus pada bagaimana olahraga mampu menciptakan nilai sosial melalui kewirausahaan (Ratten, 2020). Argumentasinya, karena sektor olahraga sangat dipengaruhi oleh krisis Covid-19 dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Fenomena ini berarti diperlukan kebutuhan mendesak bagi sebagian besar perusahaan olahraga untuk memikirkan dan menyediakan model bisnis baru sebagai mitigasi dan menghadapi perubahan baru (Ratten, 2020). Selanjutnya, riset McSweeney (2020) lebih berfokus untuk mengkaji dan menegaskan bagaimana telah terjadi peningkatan minat pada social entrepreneurship dalam olahraga, karena cara itu telah mampu menggabungkan perubahan sosial, keberlanjutan, dan inovasi.

### **Social Entrepreneurship sebagai Mitigasi Krisis Ekonomi**

Kegiatan yang telah dijelaskan di atas dalam bidang perusahaan keolahragaan juga merupakan sebuah contoh peran social entrepreneurship sebagai mitigasi krisis dampak Covid-19. Selanjutnya, hasil literature terbaru lainnya tentang bagaimana kewajiban social entrepreneurship dalam menghadapi tantangan utama dalam menghadapi pandemi Covid-19 dengan lebih cepat (efektif), telah dibahas oleh (Bacq, et al., 2020). Hasil riset Bacq, et al. (2020) menjelaskan bagaimana komunitas dengan cepat berkumpul, dan mendiskusikan hasil pembelajaran utama dari usaha kewirausahaan, dan dengan spontan untuk segera melakukan mitigasi dampak Covid-19. Selanjutnya, hasil riset tersebut memberikan bukti dari peserta dan mentor yang menunjukkan nilai

dari Virtual Idea Blitz yang dipadatkan waktunya dalam mempercepat tindakan kewirausahaan sosial. Selain itu, Bacq, et al. (2020) juga telah menawarkan panduan praktis kepada institusi akademis, komunitas, dan profesional yang ingin meniru dan atau upaya untuk memitigasi atau menggagalkan ancaman Covid-19 yang sedang berlangsung, serta mendorong tantangan para pelaku ekonomi sosial lainnya yang mungkin untuk segera muncul sekarang dan di masa depan. Selanjutnya, hasil studi Naimi, et al. (2020) juga menjelaskan bagaimana penciptaan peluang mitigasi krisis pada gilirannya ikut mempengaruhi identitas sosial pengusaha yang berkontribusi membangun konsep yang memandang kewirausahaan sebagai bentuk kebutuhan untuk menciptakan dan mengembangkan berbagai peluang social entrepreneurship di masa kini dan masa datang.

Terlepas dari kelemahan definisi social entrepreneurship yang belum baku, namun tindakan nyata dari para pelaku ekonomi social entrepreneurship tersebut adalah bukti nyata yang telah memberikan banyak manfaat bagi kehidupan masyarakat secara riil. Walaupun, secara akademis masih perlu disadari dan dimakhlumi bahwa pengukuran dimensi sosial yang standar baku secara kuantitatif memang sulit dilakukan secara pasti. Namun demikian, terkait dengan peran pentingnya dampak sosial terhadap penelitian social entrepreneurship, maka standar untuk mengukur dampak sosial organisasi yang masih terbelakang pada alasan teoritis dan empiris, untuk sementara masih dapat diterima terlebih dahulu sambil terus diperbaiki dalam berbagai kesempatan berikutnya.

Selanjutnya, terlepas dari kekurangan literatur yang ada tersebut, Dacin, (2011) telah menegaskan bahwa social entrepreneurship memiliki potensi untuk menambah dan memperluas teori organisasi sosial ekonomi dan oleh karena itu, riset lebih lanjut dalam bidang social entrepreneurship dapat lebih menjanjikan sebagai domain penyelidikan. Dacin (2011) telah merekomendasikan ada lima kemungkinan yang disarankan untuk membangun teori baru di berbagai riset social entrepreneurship yaitu; institutions and social movements, networks, culture, identity and image, and cognition. Selain itu, hasil riset kebijakan kewirausahaan lokal di Asia yang telah dilakukan oleh Mintrom (2020), juga telah merekomendasikan untuk riset di masa depan dapat menggunakan berbagai metode termasuk studi kasus sejarah, studi kasus komperatif, rangkaian waktu kuantitatif, pemodelan sejarah peristiwa, riset berbasis survey dan analisis jaringan.

Hasil riset empiris Nuringsih (2020) yang bertujuan untuk mengeksplorasi secara ilmiah terhadap kecenderungan kewirausahaan sosial (KKS) dalam kondisi Covid-19 dan pembatasan sosial besar di Jakarta, juga telah menemukan adanya hubungan dan efek signifikan dukungan sosial yang

dirasakan terhadap KKS serta menemukan efek mediasi efikasi diri pada kewirausahaan sosial. Hasil riset tersebut juga menunjukkan adanya pola pikir positif pada kewirausahaan sosial di kalangan mahasiswa, sehingga pandemi ini menjadi pemicu niat pada kewirausahaan sosial (Nuringsih, 2020). Dengan demikian, hasil riset Nuringsih (2020) tersebut berpotensi membentuk perilaku pro sosial di kalangan siswa dan pelaku kewirausahaan yang ada untuk ikut berkontribusi melakukan mitigasi dalam mengatasi masalah sosial yang disebabkan karena dampak Covid-19.

Penerapan bisnis model social entrepreneurship terkait sebagai mitigasi dampak Covid-19 dapat mencakup di tingkat mikro dan makro. Pada tingkat mikro dapat dilakukan oleh komunitas para pelaku ekonomi sosial yang ada pada setiap masyarakat lokal di daerah masing-masing. Sedangkan, secara makro dapat berkolaborasi dengan instrument kebijakan pemerintah terutama yang terkait dengan kebijakan peningkatan pengeluaran publik agar lebih tepat sasaran. Pada umumnya ketika terjadi krisis apapun, sudah dapat dipastikan pengeluaran pemerintah meningkat dengan tajam. Sebagai contoh, ketika terjadi wabah pandemi Covid-19 ini hampir pengeluaran pemerintah di berbagai Negara termasuk di Indonesia meningkat tajam. Anehnya, hampir pada saat itu pula tambahan pengeluaran sering tidak tepat sasaran dan sering tumpang tindih. Agar masalah “penyelewengan” tersebut tidak terus terjadi, maka peran social entrepreneurship dapat membantu kebijakan pemerintah tersebut agar lebih tepat sasaran, bahkan lebih produktif, sehingga dapat digunakan sebagai mitigasi dalam jangka pendek dan jangka panjang.

Kita harus menyadari bersama bahwa dampak pandemi Covid-19 dan resesi ekonomi dapat memiliki dampak yang tidak proporsional tergantung banyak elemen atau faktor terkait dan populasi penduduk yang rentan akibat telah terjadi konflik sebelumnya, sehingga adanya Covid-19 menjadi semakin memperburuk keadaan. Jika hal ini terjadi, maka peran social entrepreneurship dan peran institusi internal saja jelas tidak cukup mampu mengatasinya, sehingga sangat dibutuhkan peran lain dari sisi eksternal. Dalam konteks ini, jelas dibutuhkan peran PBB untuk menjaga dan memperkuat kohesi sosial, dan karena itu masalah tersebut harus menjadi tanggungjawab bersama secara global. Untuk memitigasi dampak sosial-ekonomi akibat Covid-19 tersebut, maka harus lebih menekankan pentingnya dimensi sosial-ekonomi, yang lebih berfokus kepada Negara atau mereka yang paling rentan akibat dampak Covid-19, tetapi tidak dapat tersentuh oleh kebijakan pemerintah Negara bersangkutan. Mekanisme yang harus dilakukan dapat memberikan perlindungan sosial dan sekaligus memperkuat peluang model bisnis social entrepreneurship untuk mencegah pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan.

Jika dampak Covid-19 terjadi pada Negara yang sebelumnya tidak terjadi konflik, maka mekanisme solusinya sedikit lebih mudah untuk mengatasinya. Karena kasus ini lebih merupakan kasus bencana nasional dan bukan tanggungjawab global seperti kasus di atas. Dalam kasus bencana nasional ini, cukup dibutuhkan solidaritas nasional dan lokal bersama yang tetap lebih mengutamakan kohesi sosial. Secara institusi, peran kebijakan makro ekonomi secara nasional dapat memberikan stimulus kebijakan fiskal otomatis untuk para pihak yang paling rentan terkena dampak pandemi Covid-19 tersebut, seperti kepada para pelaku UMKM, para pekerja rentan pengangguran dan kemiskinan, serta pendidikan dasar. Peran kualitas kelembagaan pada masalah ini jelas sangat dibutuhkan untuk saling berkolaborasi dengan peran social entrepreneurship yang ada di setiap daerah atau negaranya, agar tujuan bersama memitigasi bencana dampak Covid-19 lebih mudah diatasi sesuai target dan rencana. Dengan demikian, penyediaan lapangan kerja yang layak melalui peran social entrepreneurship dapat menjadi salah satu pilihan yang logis dan mamu untuk membantu memitigasi bencana dalam jangka pendek dan jangka panjang secara lebih mandiri dan berkelanjutan.

## **PENUTUP**

Dampak Covid-19 telah mengubah cara hidup baru yang harus dijalankan, dan ini memerlukan waktu untuk penyesuaian untuk kembali normal. Karena dampak krisis Covid-19 tersebut telah menyebabkan kemerosotan kesejahteraan individu, nasional dan global, terutama secara ekonomi dan sosial, sehingga dibutuhkan kreatifitas positif yang inovatif dan efektif untuk mengatasinya. Jika tidak segera diatasi, maka generasi mendatang akan semakin terpengaruh dan semakin sulit untuk bangkit lebih baik lagi.

Terlepas masih adanya kelemahan pada sisi definisi dan dimensi ukur yang belum baku, peran social entrepreneurship tetap dapat diterima dengan baik dan diakui sebagai salah satu alat mitigasi bencana akibat dampak pandemi Covid-19 resesi lainnya. Peran utama social entrepreneurship adalah membantu masyarakat yang secara formal dan informal belum dapat tersentuh oleh kebijakan pemerintah. Selain itu, peran social entrepreneurship muncul tidak harus didahului dengan terjadinya resesi. Tetapi peran positif dan manfaat social entrepreneurship menjadi semakin terasa ketika sedang terjadi resesi atau krisis. Oleh karena itu, peran social entrepreneurship sebagai alat mitigasi akan semakin lebih efektif dan produktif jika dapat terjadi kolaborasi bersama dengan peran kualitas institusional terkait pada setiap daerah, lokal, nasional maupun global.



## REFERENSI

- Aceytuno, M.T., Lopez, C.S. & Manuela, A. de P.B. (2020). Rising Inequality and Entrepreneurship during Economic Downturn: An Analysis of Opportunity and Necessity Entrepreneurship in Spain. *Sustainability*, 2(4540), 1-16. doi:10.3390/su12114540.
- Acs, Z.J., Estrin, S., Mickiewicz, T., & Szerb, L. (2018). Entrepreneurship, institutional economics, and economic growth: an ecosystem perspective. *Small Business Economics*, 2018(51), 501–514. <https://doi.org/10.1007/s11187-018-0013-9>
- Bacq, S., Geoghegan, W., Josefy, M., Stevenson, R., & Williams, T.A. (2020a). The Covid-19 “Virtual Idea Blitz”: Marshaling Social Entrepreneurship to Rapidly Respond to Urgent Grand Challenges. *Journal Business Horizons*, 12(5), 1-38.
- Bacq, S., & Janssen, F. (2011). The multiple faces of social entrepreneurship: A review of definitional issues based on geographical and thematic criteria. *Entrepreneurship & Regional Development*, 23(5-6), 373-403. doi: 10.1080/08985626.2011.577242
- Callavo, T. (2018). Unpacking Social Entrepreneurship: Exploring the Definition Chaos and Its Consequences in England. *Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI)*, 14(2), 49-82. doi: <https://doi.org/10.7341/201814213>
- Dacin, M. T., Dacin, P. A., & Tracey, P. (2011). Social entrepreneurship: A critique and future directions. *Organization Science*, 22(5), 1203–1213. doi.org/10.1287/orsc.1100.0620.
- Dacin, P.A., Dacin, M.T. & Matear, M. (2010). Social Entrepreneurship: Why We Don't Need a New Theory and How We Move Forward From Here. *Academy of Management Perspectives*, 24(3), 37-57.
- Jarvis, D.S.L. & He, A.J. (2020). Policy entrepreneurship and institutional change: Who, how, and why?. *Journal Public Administration and Development*, 40(1), 3-10. <https://doi.org/10.1002/pad.1876>.
- Kazmi, S.S.A., Hashim, M., Hung, D.M., & Khan, F.U. (2016). Social Entrepreneurship and its Impact on Economy: In Perspective of Pakistan. *International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences*, 6(4), 161-166.
- Maritz, A., Perenyi, A., de Waal, G., and Buck, C. (2020). Entrepreneurship as the Unsung Hero during the Current COVID-19 Economic Crisis: Australian Perspectives. *Sustainability*, 12(4612), 1-9. doi:10.3390/su12114612
- McSweeney, M. (2020), “Returning the ‘social’ to social entrepreneurship: future possibilities of critically exploring the sport for development and peace and social entrepreneurship”. *International Review for the Sociology of Sport*, 55(1), 3-21.

- Mintrom, M., Maurya, D., & He, A.J. (2020). Policy entrepreneurship in Asia: the emerging research agenda, *Journal of Asian Public Policy*, 13(1), 1-17. doi: 10.1080/17516234.2020.1715593.
- Naimi, A., Hehenberger, L.K., Bacq, S.C., & Kickul, J.R. (2020). How Social Entrepreneurs with a Migrant Background Create Opportunities for their Own Community. *Journal Academy of Management Proceedings*, 2020(1), 18946.
- Nicola, M., Alsafi, Z., Sohrabi, C., Kerwan, A., Al-Jabir, A., Iosifidis, C., Agha, M. and Agha, R. (2020). "The socio-economic implications of the coronavirus pandemic (COVID-19): a review". *International Journal of Surgery*, 78(1), 185-193.
- Nuringsih, K., Nuryasman, M.N., & Amelinda, R. (2020). The Propensity for Social Entrepreneurship During the Coronavirus Outbreak. *Jurnal Manajemen*, XXIV(02), 174-193. doi: <http://dx.doi.org/10.24912/jm.v24i1.615>.
- OECD (2020). Social economy and the COVID-19 crisis: current and future roles. Contributing to a Global Effort. <http://oecd.org/coronavirus/en/>
- Parker, H. and Ameen, K. (2018), "The role of resilience capabilities in shaping how firms respond to disruption". *Journal of Business Research*, 88(1), 535-541.
- Prasetyo, P.E., and Kistanti, N.R. (2020a). Human capital, institutional economics and entrepreneurship as a driver for quality & sustainable economic growth. *Entrepreneurship and Sustainability Issues*, 7(4), 2575-2589. [https://doi.org/10.9770/jesi.2020.7.4\(1\)](https://doi.org/10.9770/jesi.2020.7.4(1))
- Prasetyo, P.E., and Kistanti, N.R. (2020b). Role of Social Entrepreneurship in Supporting Business Opportunities and Entrepreneurship Competitiveness. *Open Journal of Business and Management*, 2020, 8(6), 1412-1425.
- Prasetyo, P.E., Setyadharma, A., & Kistanti, N.R. (2020c). Social Capital: The main determinant of MSME entrepreneurship competitiveness, *International Journal of Scientific & Technology Research*, 9(3), 6627-6637.
- Prasetyo, P.E., and Dzaki, F.Z. (2020d). Institutional performance and new product development value chain for entrepreneurial competitive advantage. *Uncertain Supply Chain Management*, 8(4), -
- Prasetyo, P. E. (2020e). Peran Strategis Kewirausahaan dalam Mendukung Kebijakan Four Track Strategy di Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Pembangunan; OPTIMUM*, 10(1), 84-94. <http://journal.uad.ac.id/index.php/OPTIMUM/article/view/14310>.

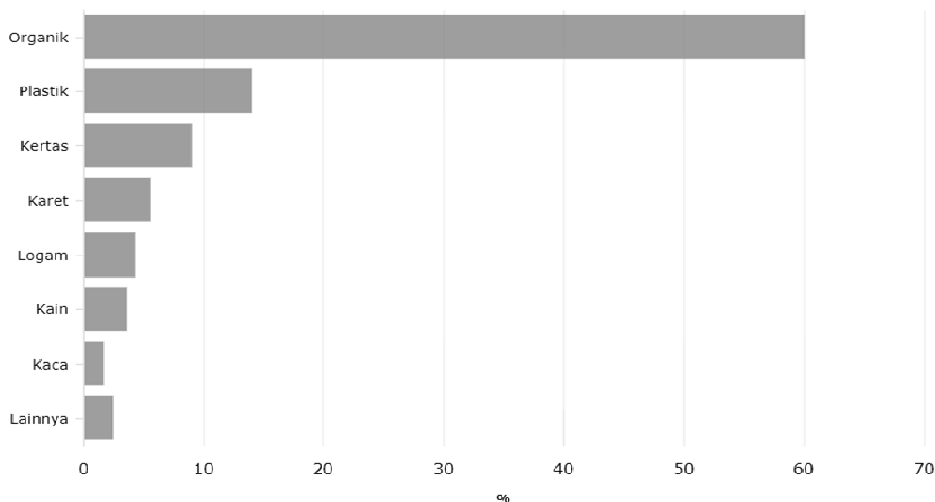
- Putten, P. V., and Green, R.D. (2011). Does it take an economic recession to advance social entrepreneurship?. *Research in Business and Economics Journal*, 3(2), 1-10.
- Ratten, V. (2020). Coronavirus disease (COVID-19) and sport entrepreneurship. *International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research*, 26(6), 1379-1388. doi. 10.1108/IJEER-06-2020-0387
- Shrivastava, P. (1993), "Crisis theory/practice: towards a sustainable future". *Industrial and Environmental Crisis Quarterly*, 7(1), 23-42.
- Staples, P. (2016). Social Entrepreneurialism as Economic Development Policy. *All Dissertations*. 1818.  
[https://tigerprints.clemson.edu/all\\_dissertations/1818](https://tigerprints.clemson.edu/all_dissertations/1818).
- Thurik, R. (2009). *Entrepreneuromics: entrepreneurship, economic growth and policy*. *Entrepreneurship, Growth and Public Policy*, 2009(1), 219-249. Cambridge University Press: Cambridge.

## ECOBRICKS SEBAGAI ALTERNATIF PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS LINGKUNGAN

Nurjannah Rahayu Kistanti, Shanty Oktavilia, Andryan Setyadharna

### PENDAHULUAN

Seiring berkembangnya industri makanan dan minuman, ada sisi negatif yang ditimbulkan dari industri ini. Sisi negative tersebut yaitu mengenai persoalan sampah plastik. Hal ini disebabkan karena industri makanan dan minum, menggunakan bungkus yang terbuat dari plastik. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Jenna Jambeck dari University of Georgia tahun 2017, menyatakan bahwa Indonesia menempati urutan kedua negara penghasil sampah plastik terbanyak di dunia. Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2017 menempatkan sampah plastik di urutan kedua (14%) dari total komposisi sampah di Indonesia.



Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2017

**Gambar 1.** Komposisi Sampah di Indonesia berdasarkan Jenis

Sampah plastik termasuk jenis sampah anorganik yang sangat sulit diurai. Berdasarkan sumber dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sekitar 10-15% plastik yang dapat didaur ulang dan 60-70% di timbun di TPA. Plastik terbuat dari zat-zat petrokimia. Zat-zat kimia ini tidak dapat diurai kembali ke ekologi di sekitar kita. Para ilmuwan menenukan dampak

mengerikan zat kimia plastik terhadap tubuh manusia yaitu menyebabkan alergi, ketidakseimbangan hormonal, kanker serta keracunan akut.

Penanganan sampah plastik yang populer selama ini adalah dengan 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*). *Reuse* adalah memakai berulang kali barang-barang yang terbuat dari plastik. *Reduce* adalah mengurangi pembelian atau penggunaan barang-barang yang terbuat dari plastik, terutama barang-barang yang sekali pakai. *Recycle* adalah mendaur ulang barang-barang yang terbuat dari plastik. Daur ulang dilakukan dengan mengolah kembali barang-barang yang dianggap sudah tidak mempunyai nilai ekonomis lagi melalui proses fisik maupun kimiawi atau kedua-duanya sehingga diperoleh produk yang dapat dimanfaatkan atau diperjualbelikan lagi. Masing-masing penanganan sampah tersebut di atas mempunyai kelemahan. Kelemahan dari *reuse* adalah barang-barang tertentu yang terbuat dari plastik, seperti kantong plastik, kalau dipakai berkali-kali lama kelamaan akan tidak layak pakai. Selain itu beberapa jenis plastik tidak baik bagi kesehatan tubuh apabila dipakai berkali-kali. Kelemahan dari *reduce* adalah harus tersedianya barang pengganti plastik yang lebih murah dan lebih praktis. Sedangkan kelemahan dari *recycle* adalah bahwa plastik yang sudah didaur ulang untuk dijadikan barang plastik lagi akan semakin menurun kualitasnya (Surono dan Ismanto, 2016).

Salah satu caranya yaitu dengan membuat *Ecobricks* di mana kita dapat mengubah garis produk polusi dalam lingkaran. *Ecobricks* adalah botol plastik yang diisi secara padat dengan sampah bukan biologis, yakni plastik. *Ecobrick* adalah solusi akar rumput atas sampah plastik. *Ecobrick* memberdayakan individu untuk bertanggung jawab atas sampah mereka dari sumbernya. Tekniknya sederhana dan sangat mudah, karenanya bisa menyebar dengan cepat melalui jaringan sosial (komunitas, desa, sekolah, dll.). Proyek komunitas dengan *ecobrick*, baik berupa arisan, pameran, membuat meja kursi bangku, alat permainan, membangun taman sekolah atau kebun sayur di lingkungan perumahan akan membawa masyarakat secara bersama-sama bergerak membersihkan dan menghijaukan lingkungan (Maier, Angway & Himawati, 2017).

Desa Lobang adalah salah satu desa di kecamatan Limpung, yang memiliki jarak 8 km dari pusat pemerintahan kecamatan Limpung. Desa Lobang memiliki wana wisata yang bernama Wanawisata Lobang Polowono yang banyak dikunjungi wisatawan. Para wisatawan yang berkunjung sering kali meninggalkan sampah plastik. Belum lagi kebiasaan masyarakat yang suka membuang sampah tidak pada tempatnya. Kesadaran akan kesehatan lingkungan dan menumpuknya sampah ini yang melandasi tim pengabdian untuk memberi pelatihan kepada masyarakat di Desa Lobang membuat *ecobricks*

sebagai salah satu upaya menjaga lingkungan dan dapat digunakan untuk menambah pendapatan masyarakat Desa Lobang.

## PEMBAHASAN

Seiring pertambahan jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi, ada sisi lain yang harus dihadapi masyarakat dewasa ini. Salah satunya yaitu permasalahan sampah. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008, penyebab pertambahan jumlah sampah, antara lain: 1. Adanya pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat yang memiliki dampak pada bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam; 2. Metode dan teknik pengelolaan sampah sejauh ini belum berwawasan lingkungan menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan; 3. Sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat; 4. Pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah, pemerintahan daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien (BPS, 2018).

Salah satu jenis sampah yang terbesar dan sulit terurai yaitu sampah plastik. Naphta adalah salah satu bahan untuk membuat plastik. Naphta ini dihasilkan dari penyulingan minyak bumi atau gas alam. Sebagai contoh, jika membuat 1 kg plastik maka memerlukan sekitar 1,75kg minyak bumi sebagai kebutuhan bahan baku maupun prosesnya (Kumar, dkk., 2011). Perkembangan jaman, penggunaan akan plastik semakin tinggi. Padahal plastik ini sulit terurai dan tidak mudah rusak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sahwan (2005) menyatakan bahwa plastik membutuhkan waktu 100 hingga 500 tahun agar dapat terurai dengan sempurna.

Ecobrick merupakan solusi agar limbah plastik khususnya plastik lunak seperti tas plastik kresek, bungkus makanan dan plastik minuman kemasan sachet yang merupakan bahan limbah dapat menjadi sesuatu yang bermanfaat. Ecobrick berasal dari kata *Eco* (lingkungan) dan *Brick* (bata) yang berarti bata yang ramah lingkungan. Ecobrick adalah bata ramah lingkungan, yaitu dengan memanfaatkan sampah plastik yang dipadatkan sedemikian rupa dalam suatu wadah tertentu. Ecobrick diprakarsai oleh Russell Maier dan Ani Himawati dari *Global Ecobrick Alliance* (GEA) yang merupakan pelopor gerakan Ecobrick di dunia.

Walaupun disebut dengan bata, bentuknya tidak seperti bata pada umumnya. Wadah untuk pemadatan plastiknya biasanya berupa botol plastik

minuman kemasan. Dalam jumlah banyak, ecobrick dapat digunakan sebagai pengganti batu bata untuk membangun bangunan. Apabila masih sedikit kita bisa memanfaatkannya untuk berbagai keperluan misalnya; membuat bangku-bangku dan meja-meja taman, pagar rumah atau kios, partisi, pot atau membuat panggung.

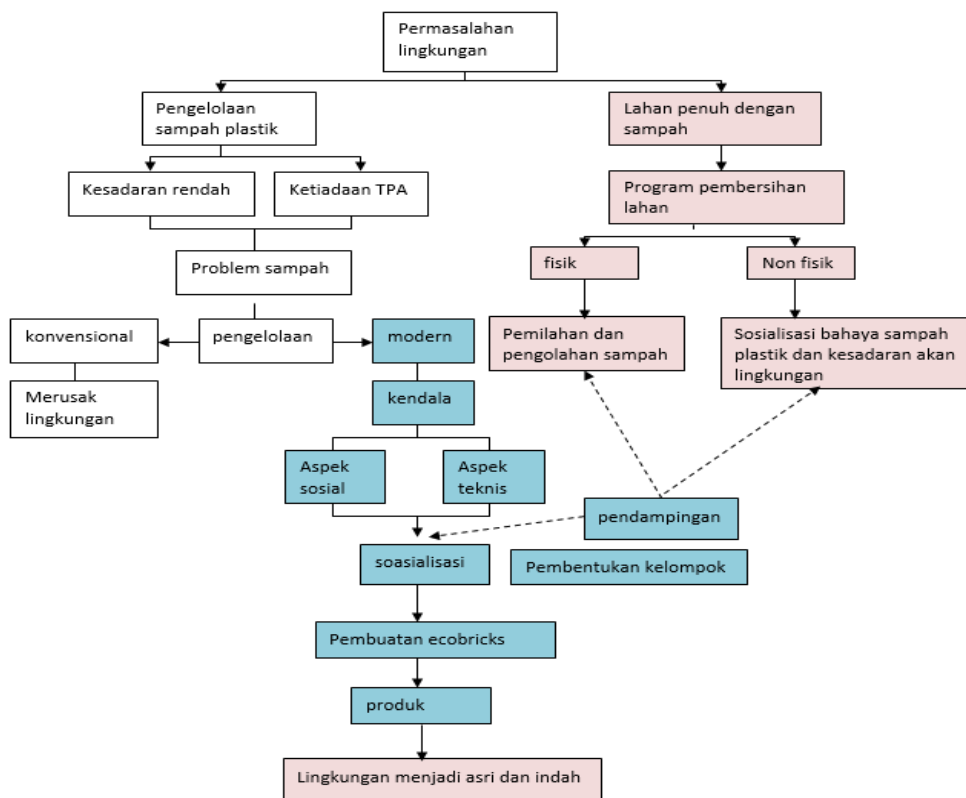
Kelebihan dari ecobrick yaitu (1) *ramah lingkungan*: ecobrick dapat mengurangi jumlah sampah plastik yang ada disekitar lingkungan kita, (2) *sehat*: jumlah sampah plastik yang berkurang membuat lingkungan menjadi sehat (3) *murah*: pembuatan ecobrick sangat murah, karena membutuhkan plastik bekas, botol bekas dan batang bambu, (4) *praktis dan mudah*: pembuatan ecobrick sangat mudah dan praktis tanpa membutuhkan mesin pengolahan, sehingga dengan mudah bisa dilakukan oleh semua orang tanpa ada keterampilan khusus. (5) *tahan lama*: sifat plastik yang sulit terurai dan tidak disukai oleh hewan pengerat yang menyebabkan ecobrick lebih tahan lama (6) *ringan* : berat ecobrick jauh lebih ringan dengan berat sekitar 200-210 gram dibandingkan dengan bata konvensional yang rata-rata memiliki berat 500-600 gram (7) *bersih*: ecobrick lebih bersih dari bata konvensional dan dapat disimpan di dalam rumah.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan tim pengabdian kepada Ketua RT 01 RW 02 Dusun Jetis Desa Lobang, masyarakat setempat membuang sampah sembarangan, kesadaran masyarakat masih rendah terhadap kesehatan lingkungan, banyak sampah yang menumpuk disekitar wana-wisata, dan belum adanya pengolahan sampah di wilayah tersebut. Oleh karena itu bagaimana membangun kesadaran secara masyarakat, menjadi suatu gerakan masyarakat akan pentingnya kesehatan dan pelestarian lingkungan dengan membuat *ecobricks*.

*Ecobricks* ini tidak membutuhkan *skill* khusus, dan tanpa biaya, karena berangkat dari bekas konsumsi sehari-hari, bisa dilakukan kapan saja, dan bisa juga dikerjakan bersama-sama maupun sendiri sambil melakukan kegiatan sehari-hari lainnya, sembari mengisi waktu. Ketika membuat *ecobricks* dari segala jenis sampah yang dihasilkan sehari-hari, bahkan ketika sudah dipilah-pilah pun, kesadaran bahwa semua "bakal racun" itu nantinya akan berakhir di lingkungan.

Tim pengabdian melakukan Pendekatan aksi pembuatan *ecobricks* yang dilakukan meliputi kegiatan pelatihan ketrampilan pembuatan *ecobricks*. Jenis ketrampilan yang dilatihkan di setiap warga. Kemudian setelah pelaksanaan pelatihan, dilakukan kegiatan pendampingan dan supervisi untuk menampung berbagai masukan dan aspirasi peserta pelatihan. Kegiatan lanjutannya adalah membantu masyarakat dalam mengembangkan produk *ecobricks* dan menatanya di lingkungan warga. Peta jalan yang dilakukan tim untuk menangani

permasalahan sampah dan membuatnya menjadi ecobricks di Desa Lobang dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1 Peta Jalan Pemecahan Masalah Sampah di Desa Lobang

### Kegiatan Pelatihan

Langkah awal yang dilakukan oleh tim aksi ekonomi adalah mengidentifikasi berbagai aspirasi dan temuan di lapang yang relevan dengan empat prinsip EGPS (keberlanjutan, kemitraan, partisipasi, dan desentralisasi). Dengan memperhatikan potensi alam dan hasil pertanian lokal dan sumberdaya manusia yang ada, kemudian ditentukan jenis pelatihan yang dipandang sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan masyarakat di masing-masing daerah yang terpilih.

Selain berorientasi ekonomi, jenis pelatihan yang diberikan juga menekankan aspek konservasi dan kegiatan yang ramah lingkungan. Langkah selanjutnya adalah Langkah selanjutnya adalah persiapan pelaksanaan pelatihan yang meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. Menghubungi instruktur tentang kesediaan, penyiapan modul/ panduan pelatihan, dan waktu pelatihan.



2. Menghubungi desa-desa yang akan diberikan pelatihan mengenai persetujuan waktu, tanggal, dan tempat, serta penjarangan peserta pelatihan.
3. Menyiapkan alat dan bahan pelatihan antara lain editing dan perbanyakkan modul pelatihan; pengadaan alat dan bahan sesuai dengan kebutuhan setiap jenis pelatihan.

Peserta pelatihan yang mengikuti kegiatan aksi ini berjumlah sekitar 30 warga RT 01 RW 02 Dusun Jetis Desa Lobang. Metode pelatihan yang digunakan berupa pemberian materi di kelas dan dilanjutkan dengan praktek bersama dan / atau peragaan oleh instruktur. Dalam pelaksanaan pelatihan personel yang terlibat antara lain pelatih atau instruktur lokal maupun yang didatangkan dan tenaga ahli tim ekonomi, asisten tim, asisten lokal, pendamping, panitia lokal, dan peserta pelatihan.



**Gambar 2.** Sosialisasi Ecobricks ke Peserta

Pelaksanaan Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Lobang Kecamatan Limpung Kabupaten Batang, pada awalnya dilakukan sosialisasi kepada peserta mengenai jenis-jenis sampah plastic, bahaya sampah plastik terhadap lingkungan serta manfaat plastik jika dilakukan daur ulang menjadi barang yang bernilai tinggi. Materi sosialisasi dilakukan dengan metode ceramah, kemudian pemutaran video mengenai dampak pencemaran lingkungan akibat sampah plastik dan video cara mengurangi sampah plastik menjadi barang yang berguna. Selain itu tim pengabdian juga memutar video bagaimana mengurangi sampah plastik dengan membuatnya menjadi ecobricks. Setelah kegiatan tersebut, peserta diberikan quiz untuk mengetahui sejauh

mana pemahaman peserta terhadap materi sosialisasi tersebut. Dalam sesi ini peserta yang dapat menjawab pertanyaan dari quiz akan mendapatkan souvenir dari tim pengabdian. Banyak peserta yang antusias dalam menjawab pertanyaan dari quiz yang diberikan dan menjawab dengan benar. Hal ini menunjukkan bahwa peserta sudah dapat memahami inti pesan dari video yang telah diputar di awal pertemuan.

Selanjutnya, tim pengabdian melakukan pelatihan memilih dan memilah sampah yang dapat digunakan untuk membuat ecobricks kepada peserta. Tidak semua sampah plastik dapat digunakan menjadi ecobricks. Kemudian tim pengabdian menjelaskan bagaimana cara membuat ecobricks mulai dari tahapan awal hingga menjadi barang yang berguna. Tim pengabdian memberikan contoh cara agar peserta dapat mudah memahami dan meniru cara membuat ecobricks. Setelah tim pengabdian memberikan contoh, tahap selanjutnya tim pengabdian mendampingi peserta untuk mempraktekkan langsung cara membuat ecobricks.



**Gambar 3.** Memilah Plastik

Pembuatan ecobricks dimulai dari mengumpulkan botol air minum kemasan (air mineral) yang memiliki ukuran dan bentuk yang sama. Kemudian sampah plastik yang akan dicacah berasal dari sampah rumah tangga para peserta dan tim pengabdian juga turut mempersiapkannya. Plastik bekas kebutuhan rumah tangga seperti plastik minyak goreng, deterjen, pewangi pakaian, sabun pencuci piring dan plastik bungkus belanja yang telah terkumpul yang terdiri dari berbagai macam ukuran dan kondisi yang berbeda-beda. Tongkat pendorong (stik) bahan sampah plastik ke dalam botol disediakan oleh tim pengabdian yang terbuat dari rotan sepanjang 40 cm yang digunakan untuk menekan dan memadatkan plastik cacahan ke dasar botol sehingga botol menjadi keras.



**Gambar 4.** Mencacah dan Menimbang Plastik

Plastik rumah tangga yang sudah terkumpul kemudian dicuci dan dijemur. Setelah kering, plastik tersebut dicacah (digunting) menjadi bagian kecil-kecil kemudian dimasukan ke dalam botol plastik air mineral tersebut dan kemudian ditekan menggunakan stik agar padat. Botol yang sudah terisi cacahan plastik, kemudian ditimbang agar berat botol terstandar. Botol plastik air mineral dengan volume 600 ml, memiliki minimal berat 200 gram jika kurang dari 200 gram makan peserta diminta untuk menambah cacahan plastiknya dan memadatkannya hingga mencapai berat minimal 200 gram. Tim pengabdian juga menyediakan alat timbang dan sekaligus memberikannya kepada perwakilan peserta untuk dipergunakan secara bersama.



**Gambar 5.** Foto Bersama dengan Peserta

Botol dengan berat yang telah ditentukan dan telah padat, selanjutnya dikelompokkan dan dirangkai untuk dibuat menjadi bangku kecil. Pola rangkai menjadi bangku kecil juga diajarkan oleh tim pengabdian agar kualitas bangku tersebut kuat. Botol yang telah terangkai, direkatkan menjadi bangku. Peserta diminta untuk mendudukinya. Bangku tersebut dicoba oleh masing-masing peserta untuk mendudukinya. Melihat bangku telah jadi, peserta semakin antusias untuk membuat ecobricks menjadi barang yang bernilai tinggi.

### Kegiatan Pendampingan

Untuk tujuan membantu masyarakat dalam mengembangkan aksi-aksi penguatan ekonomi dan mengetahui sejauh mana implementasi hasil pelatihan yang diberikan di tingkat masyarakat lokal, maka dilakukan kegiatan pendampingan. Fungsi dari pendamping adalah untuk merekam/mencatat respon, faktor-faktor yang menjadi kendala dan pendorong bagi keberlanjutan program, dan aspirasi masyarakat dalam kaitan antara aksi ekonomi dengan aspek konservasi.

Dalam hal ini, pelatihan merupakan alat penelitian bagi pendamping dengan penekanan pada proses yang berlangsung di masyarakat dan bukan pada output pelatihan. Sedapat mungkin pendamping memberi respon terhadap beberapa keluhan dan mencari penyelesaian terhadap berbagai hambatan yang dihadapi masyarakat dalam membuat *ecobricks*.



Gambar 6. Tim Pengabdian setelah melakukan kegiatan supervisi

Selama pendampingan terhadap masyarakat lokal, metode yang dilakukan oleh pendamping antara lain melalui metode diskusi bersama anggota masyarakat maupun para aparat desa. Melalui kegiatan diskusi tersebut diha-

rapkan dapat ditangkap informasi mengenai kendala-kendala yang dihadapi ataupun faktor-faktor pendorong dalam implementasi kegiatan aksi penguatan ekonomi.

### **Kegiatan Supervisi**

Selama tinggal bersama masyarakat lokal, pendamping melakukan komunikasi dan koordinasi dengan tim aksi/tenaga ahli. Berbagai temuan atau masalah di lapang dikonsultasikan untuk memberikan *follow up* selanjutnya. Secara berkala tim/tenaga ahli turun ke warga guna meninjau secara langsung bagaimana perkembangan di lapang sekaligus memonitor dan memberikan pengarahan terhadap kegiatan yang dilakukan pendamping. Setelah kegiatan pendampingan berakhir, supervisi tetap dilakukan untuk mengetahui bagaimana keberlanjutan program yang dilakukan atas inisiatif masyarakat sendiri. Disamping itu, pada tahap ini, dijelaskan pula keuntungan dan nilai ekonomi produk yang dibuat dari sampah plastik. Masyarakat diharapkan dapat memahami dan mempraktekkan cara mengelola sampah plastik yang ramah lingkungan serta dapat mensosialisasikannya kepada masyarakat yang ada disekitarnya.

Tahap akhir dari kegiatan pengabdian ini yaitu tim pengabdian melakukan supervisi kepada peserta dan mengevaluasi atas produk yang telah dihasilkan peserta dari ecobricks yang telah dibuatnya. Secara keseluruhan kegiatan pengabdian ini diikuti oleh peserta (warga dari Desa Lobang) dengan antusias, merasa senang dalam mengikuti serangkaian kegiatan pengabdian. Peserta semakin ahli dalam membuat ecobricks sebagai upaya turut menjaga kelestarian lingkungan dan sebagai alternatif produk yang ramah lingkungan serta tak menutup peluang adanya pendapatan yang dapat dihasilkan dari pembuatan ecobricks ini.

### **PENUTUP**

Pembuatan ecobricks yang dilakukan di Desa Lobang merupakan salah satu upaya dalam mengurangi sampah plastik yang ada. Masyarakat dapat memnbuat berbagai macam jenis perabotan rumah tangga seperti kursi, meja dari ecobricks. Selain mengurangi sampah dan membuat lingkungan lebih asri, ecobricks ini membantu masyarakat Desa Lobang untuk menghemat pengeluarannya. Dengan begitu diharapkan kesejahteraan masyarakat Desa Lobang dapat terwujud dan lingkungan menjadi asri. Untuk ke depannya diperlukan adanya bank sampah untuk memudahkan pengumpulan sampah plastik yang akan diolah menjadi ecobricks serta pembentukan kelompok bersama untuk menampung produk olahan ecobricks yang telah dibuat oleh masyarakat untuk dapat dijual sebagai tambahan penghasilan masyarakat.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Afriza, E. F., dkk. 2018. Edukasi Ecobrick Sebagai Solusi Manajemen Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat. *Proceeding of Community Development, Volume 2: 799-807*.
- Andriastuti, Bella Tri, dkk. 2019. Potensi Ecobrick dalam Mengurangi Sampah Plastik Rumah Tangga di Kecamatan Pontianak Barat. *Jurnal Teknologi Lingkungan Lahan Basah, Vol. 07, No. 2, 2019: 055 - 063*
- Damanhuri, E & Padmi, T. 2010. *Diktat Pengolahan Sampah*. ITB :Bandung Ecobricks.org. 2015. Panduan Visi Ecobrick
- Himawati, A. 2015. *Meng-Ecobrick di Rumah Sendiri*. Yogyakarta: Penerbit Kendi Aksara.
- Jenna, dkk. 2015. Plastic Waste Inputs From Land Into The Ocean. Vol. 347, Issue 6223, pp. 768-771. Feb 2015.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Komposisi Sampah di Indonesia Tahun 2017. Available at <http://sipsn.menlhk.go.id/?q=3a-komposisi-sampah> diakses pada tanggal 23 Maret 2020.
- Kumar S., Panda, A.K., dan Singh, R.K. (2011) *A Review on Tertiary Recycling of High-Density Polyethylene to Fuel*, Resources, Conservation and Recycling Vol. 55893– 910.
- Lestari, Wiwik, dkk. 2019. Edukasi Ecobricks Berbasis Cinta Lingkungan Sebagai Solusi Pengelolaan Sampah di Medan Marelan. *Jurnal Keuangan Umum dan Akuntansi Terapan, Volume 1 Nomer 3 November 2019*.
- Maier, R; Angway, I dan Himawati, A. 2017. *Plastic, Lingkungan dan Ecobricks*.
- Pratiwi, I.H; Wignjosoebroto, S dan Dewi, D.S. 2007. *Sistem Pengelolaan Sampah Plastik Terintegrasi dengan Pendekatan Ergonomi Total Guna Meningkatkan Peran Serta Masyarakat (Studi Kasus : Surabaya)*. Jurusan Teknik Industri, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya.
- Purwaningrum, P. 2016. Upaya Mengurangi Timbulan Sampah Plastik di Lingkungan. *Jurnal Teknik Lingkungan*. Vol 8 No.2, Desember 2016, 141-147
- Sahwan, F.L., Martono, D.H., Wahyono, S., Wisoyodharmo, L.A. (2005) *Sistem Pengolahan Limbah Plastik di Indonesia*, Jurnal Teknik Lingkungan BPPT 6 (1), halaman 311 – 318.
- Setyanto, Daniar Wikan dkk. 2019. Perancangan Infografis Instruksional Kampanye R3 (Reduce, Reuse, Recycle) Ecobrick. *Prosiding Seminar Nasional Pakar ke 2 Tahun 2019 Buku 2: Sosial Humaniora*.
- Suminto, Sekartaji. 2017. Ecobrick: Solusi Cerdas dan Kreatif Untuk Mengatasi Sampah Plastik. *Productum: Jurnal Desain Produk (Pengetahuan dan Perancangan Produk) Vol.3 No.1 Edisi Januari-Juni 2017*.
- Zerowaste Indonesia. *Ecobricks*. Available at <https://zerowaste.id/manajemen-sampah/ecobricks/> akses pada tanggal 23 Maret 2020.

---

## PENGARUH KESIAPAN MENGAJAR GURU TERHADAP EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN DARING DI MASA PANDEMI *COVID-19*

Lola Kurnia Pitaloka, Inaya Sari Melati, Fikri Ardianto

### PENDAHULUAN

*Corona Virus Disease 2019* atau biasa kita sebut Covid-19 adalah penyebab keadaan krisis kesehatan dunia yang ada diakhir tahun 2019. Virus ini muncul pertama kali di Wuhan, China dan terus melebar keseluruh penjuru China. Pada tahun 2019, China benar-benar krisis kesehatan karena pandemi ini yang mengakibatkan seluruh aspek yang ada di negara tersebut terhenti termasuk pendidikan. Pada awal pandemi ini berlangsung, seluruh sekolah di China di liburkan dan tidak boleh ada kegiatan belajar mengajar sedikitpun untuk mengurangi akses penyebaran. Namun, ternyata pandemi ini berlangsung lama dan tidak dapat diprediksi kapan bisa berhenti karena virus ini termasuk virus baru dan belum ditemukan antibiotik atau obat yang dapat menghentikannya. Karena berlangsungnya pandemi tidak dapat diprediksi, maka proses belajar mengajar dialihkan menjadi pembelajaran online. Meski sistem pembelajaran online sudah diperkenalkan sejak lama dan sudah banyak yang memakai cara ini untuk melangsungkan pembelajaran, namun tetap keadaan yang secara mendadak berlangsung membuat pendidikan tidak siap akan hal ini bahkan di China.

Jenis *corona virus* diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). Gejala Covid-19 yang sering ditemui adalah gangguan pernafasan akut seperti demam, sesan nafas dan batuk kering. Gejala tersebut muncul ketika tubuh sedang bereaksi melawan virus tersebut di dalam tubuh. Saat ini, tenaga kesehatan mempunyai peranan penting dalam memberikan tanggap terhadap wabah Covid-19 dan menjadi tulang punggung pertahanan suatu negara untuk menanggulangi penyebaran penyakit. Selain mengandalkan tenaga kesehatan, ada beberapa cara untuk menekan penyebaran penyakit ini yaitu dengan melakukan kebersihan diri selalu seperti rajin mencuci tangan dengan air mengalir dan menggunakan sabun atau memakai *handsanitizer*, menghindari menyentuh mata, hidung dan mulut, menerapkan etika batuk dan bersin dengan menutup hidung dan

mulut dengan lengan atas bagian dalam atau dengan tisu dan buanglah tisu segera ke tempat sampah, memakai masker medis jika memiliki gejala pernafasan atau masker kain setiap saat untuk individu yang sehat, menjaga jarak minimal 1 meter dari individu lain utamanya individu yang memiliki gangguan pernafasan atau gejala lainnya.

Virus ini terus berkembang dan menyebar seiring berjalannya waktu bahkan hingga saat ini upaya pencegahan sudah dilakukan semaksimal mungkin, tidak ada negara yang lolos dari virus Covid-19 termasuk Indonesia. Covid-19 mulai masuk ke Indonesia pada bulan Februari 2020, namun seluruh aspek yang ada pada tatanan negara baru mulai ditutup pertengahan Maret 2020. Penutupan seluruh aspek merupakan hal yang dilakukan oleh seluruh dunia untuk mencegah penyebaran virus ini dan masih menjadi satu-satunya jalan untuk menekan angka penyebaran virus. Ini dikarenakan, virus ini terdeteksi mudah menular melalui kontak fisik dari manusia yang terinfeksi. Seseorang yang terinfeksi virus ini tidak dapat diidentifikasi dengan jelas karena gejalanya yang tidak dapat disamakan antara satu sama lain. Beberapa hal medis tersebut yang menjadikan pemerintah seluruh dunia bahkan Indonesia mengadakan menerapkan *social distancing* atau pembatasan jarak sosial yang diharapkan dapat mengurangi interaksi masyarakat dalam komunitas agar tidak terjadi penyebaran yang lebih luas (Smith et al., 2020). Pandangan lain memandang bahwa *social distancing* tidak cukup untuk memerangi Covid-19, yang dibutuhkan saat ini justru *social containment* atau pengungkungan sosial dalam skala besar (Long, 2020). *Social containment* diartikan sebagai intervensi pemerintah yang diterapkan [pada seluruh komunitas dalam sebuah negara, kota ampun wilayah yang dirancang untuk membatasi dan mengurani interaksi individu secara pribadi kecuali seluruh hal yang berhubungan dengan memastikan pasokan kebutuhan vital (Shi et al., 2020).

Kontak fisik dan terlalu lama berada di lingkup yang sama terlebih pada ruangan tertutup menjadi upaya terbesar cara penyebaran virus ini. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjadi bimbang dengan adanya fakta tersebut. Mengantisipasi penularan virus tersebut pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan, seperti isolasi, *social and physical distancing* hingga pembatasan sosial berskala besar (PSBB). PSBB sangat berpengaruh pada penekanan jumlah menyebarnya infeksi virus namun sayangnya kebijakan ini membawa lebih banyak dampak negatif dan yang paling ditakutkan adalah dampak ekonomi. Kebijakan ini membuat perekonomian di Indonesia merosot, nilai tuar rupiah menjadi anjlok, harga barang naik secara keseluruhan terlebih untuk alat kesehatan dan barang yang berhubungan dengan upaya pencegahan seperti masker, *handsanitizer* dan sabun cuci tangan antiseptik. Kenaikan harga barang secara keseluruhan disebabkan oleh masyarakat yang panik



dengan penularan virus tersebut dan beberapa masyarakat memilih untuk diam di rumah saja. Karena hal tersebut, masyarakat memilih untuk menyediakan stock barang sebanyak mungkin terutama stock makanan. Permintaan yang tinggi dan keterbatasan produsen untuk memberikan penawaran, menjadikan kelangkaan terjadi dan membuat harga melonjak semakin tajam.

Kebijakan ini tentu tidak hanya berpengaruh pada sektor perekonomian saja namun sektor pendidikan juga mulai terkena dampaknya. Sekolah dan lembaga pendidikan lainnya menjadi tempat pertama yang dituju pemerintah untuk ditutup dan belum ada toleransi apapun untuk kembali ke sekolah bahkan hingga saat ini. Sekolah dan lembaga pendidikan lainnya dinilai menjadi tempat yang paling rawan untuk penyebaran infeksi ini karena anak-anak susah untuk dikontrol dan dikendalikan agar tetap menjaga jarak aman. Selain itu durasi sekolah cukup panjang dan banyak individu harus berada Kawasan dan lingkungan yang sama dalam jangka waktu yang lama. Hal tersebut tentu menjadi kekhawatiran jika lembaga pendidikan menjadi cluster baru untuk penyebaran virus, maka sekolah dan lembaga pendidikan lainnya akan terus melakukan pembelajaran secara *online* hingga waktu yang belum dapat ditentukan.

Pendidikan merupakan kebutuhan manusia yang selalu berkembang sesuai dengan perubahan zaman. Perkembangan yang cukup pesat di bidang teknologi membuat pendidikan harus mampu menyesuaikan dan membuat inovasi agar dapat mengambil manfaat dari segala jenis perkembangannya. Pembelajaran *online* merupakan salah satu contoh dari sebuah inovasi yang memiliki kontribusi cukup besar terhadap perubahan proses pembelajaran. Inovasi tersebut bahkan berguna di masa pandemi sekarang ketika proses pembelajaran tatap muka langsung sedang tidak diperbolehkan. Proses pembelajaran *online* tidak lagi hanya mendengarkan uraian materi yang disampaikan oleh guru tapi siswa juga dapat melakukan aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, menirukan, demonstrasi dan lain-lain. Materi untuk bahan ajar dapat divisualisasikan dalam berbagai format dan bentuk yang lebih dinamis dan lebih interaktif sehingga murid menjadi lebih termotivasi untuk terlibat lebih jauh dalam proses pembelajaran.

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bahwa seluruh kegiatan pembelajaran baik di sekolah atau perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya dilaksanakan melalui rumah masing-masing dan melalui aplikasi yang sudah ada. Aplikasi yang biasa dipakai untuk pembelajaran online ini ada Google Classroom, Edmodo, dan untuk bertatap muka biasanya menggunakan *virtual meet zoom* dan *Google Meet*. Pembelajaran *online* sejatinya sudah mulai dikembangkan dari tahun sebelumnya. Sudah banyak sekolah, perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya yang membuat konsep pembelajaran

jarak jauh (PJJ). Namun, pembelajaran *online* belum begitu diterapkan secara efektif sejak pertama kali dicetuskan. Alasan paling kuat mengapa pembelajaran *online* tidak begitu diterapkan yaitu pembelajaran tatap muka lebih berarti karena tidak hanya dapat menyampaikan materi kepada siswa namun juga mempererat rasa sosial seorang siswa dengan siswa lainnya dan siswa dengan pengajar sebagai manusia yang makhluk sosial.

Pembelajaran *online* memiliki ciri-ciri seperti (1) memiliki konten yang relevan dengan tujuan pembelajaran; (2) menggunakan metode instruksional misalnya penyajian contoh dan Latihan untuk meningkatkan pembelajaran; (3) menggunakan elemen media seperti kata-kata dan gambar untuk menyampaikan materi pembelajaran; (4) memungkinkan pembelajaran langsung berpusat pada pengajar (*synchronous e-learningi*) atau didesain untuk pembelajaran mandiri (*asynchronous e-learningi*); dan (5) membangun pemahaman dan keterampilan yang terkait dengan tujuan pembelajaran baik secara individual atau meningkatkan kinerja pembelajaran kelompok (Waryanto, 2006).

Setiap metode pembelajaran memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Adapun kelemahan dari pembelajaran *online* yaitu keterbatasan pada jaringan internet yang membutuhkan infrastruktur yang cukup memadai, lebih membutuhkan banyak biaya dan banyaknya kendala komunikasi jika hanya melalui jaringan internet. Komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam setiap aspek kehidupan termasuk dalam pendidikan. Komunikasi secara tidak langsung menyebabkan banyak kesalahpahaman dapat terjadi (Waryanto, 2006). Meskipun terdapat cukup banyak kelemahan, namun pembelajaran *online* tetap dirasa memiliki efektifnya sendiri terhadap pembelajaran. Terlebih untuk metode *self-directed learning* dimana pembelajaran ini memang menuntut siswa untuk mengeksplor ilmunya sendiri dan mengarahkan proses belajarnya sendiri tanpa bantuan pengajar (Wicaksono, 2012). Pembelajaran *online* menuntut dua pihak sekaligus secara berat. Menuntut pihak guru untuk menyiapkan bahan ajar dengan matang dan *platform* pembelajaran *online* yang menarik untuk siswa. Menuntut siswa untuk tetap komitmen belajar meski tidak diawasi secara langsung oleh para pengajarnya. Itulah kenapa pembelajaran *online* akan efektif ketika siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran dari materi.

Selain beberapa kelemahan, ada juga kelebihan dari pembelajaran *online* yang dapat meningkatkan kadar interaksi antara siswa dan guru. Kadar interaksi yang lebih tinggi ini disebabkan karena banyak dari siswa yang memang tidak memiliki keberanian lebih atau belum percaya diri untuk mengungkapkan pendapat atau jawabannya secara langsung. Ketika melalui *online*, mereka justru lebih aktif untuk mengeluarkan pendapat atau

jawabannya. Pembelajaran online dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja (*time and place flexibility*), menjangkau peserta didik dalam cakupan yang lebih luas (*potential to reach a global audience*) serta dapat mempermudah penyimpanan materi pembelajaran (*easy updating of content as well as archivable capabilities*) (Waryanto, 2006). Keuntungan lain yang dapat diambil dari pembelajaran *online* adalah pembelajaran yang lebih bersifat mandiri dan interaktif, mampu meningkatkan kemampuan mengingat, memberikan lebih banyak pengalaman belajar seperti dengan teks, audio, video dan animasi yang semuanya digunakan untuk menyampaikan informasi dan juga memberikan kemudahan menyampaikan, memperbarui isi serta mengunduh (Arnesti dan Hamid, 2015).

Pratiwi (2020) menyatakan bahwa kegiatan pembelajaran dengan model daring di Universitas Kristen Satya Wacana sudah efektif dengan memanfaatkan aplikasi *Zoom, Google Classroom, Schoology, dan Edmodo*. Pembelajaran daring ini malah meningkatkan keaktifan mahasiswa dalam melakukan pembelajaran. *Public speaking* atau kemampuan berbicara di depan umum yang dimiliki mahasiswa memang masih rendah. Terbukti dari ketika pembelajaran langsung, saat dosen memberikan kesempatan mahasiswa untuk bertanya atau memberikan pendapat, sangat sedikit yang dapat mengutarakannya. Namun ketika pembelajaran *online*, justru hampir semua mahasiswa mau dan dapat mengutarakan pendapatnya. Kegiatan pembelajaran ini menjadikan pengajar dapat melihat sisi lain dari mahasiswa yang tidak pernah mengutarakan pendapatnya dengan berbicara langsung sekaligus dapat menjadi evaluasi untuk para pengajar ketika pembelajaran langsung untuk lebih mampu memancing mahasiswa berpendapat seaktif ketika perkuliahan *online*.

Sedangkan menurut Purwanto dkk (2020) pembelajaran *online* ternyata dinyatakan tidak efektif dan cenderung mengalami banyak kendala baik untuk siswa, guru maupun orang tua. Setelah pembelajaran *online* dilangsungkan selama pandemi, banyak orang tua mengeluhkan tentang hal ini. Dari pengeluaran yang bertambah karena harus membeli paket internet lebih untuk sekolah anaknya namun tetap harus membayar SPP sekolah anak. Bagi keluarga yang mampu, jelas tidak keberatan atas keputusan dari pembelajaran *online* ini, namun berbeda cerita jika berasal dari kalangan keluarga yang kurang mampu. Pembelajaran seperti ini jelas akan memberatkan. Jika tidak mengikuti maka akan ketinggalan jauh dari teman-temannya. Kebijakan yang diperlakukan kepada pendidikan menjadi persoalan kesenjangan baru.

Penelitian Setiawan dan Yusman (2014) memberikan hasil bahwa melalui pembelajaran *online*, keefektifan pembelajaran menjadi tercapai karena siswa tidak hanya belajar di dalam kelas, namun juga dapat belajar di

luar kelas dimanapun mereka berada. Belajar di luar kelas membuat siswa menjadi paham pembelajaran tidak hanya secara teori namun juga dapat membandingkan dengan kehidupan di sekitar mereka. Pembelajaran sistem *online* berhasil meningkatkan hasil belajar siswa dan efektif untuk membangun pemikiran kritis siswa. Hasil penelitian ini juga didukung oleh Susilo dan Rohman (2019) yang juga menyatakan bahwa pembelajaran berbasis *online* sangat efektif dilakukan dalam era pembelajaran milenial seperti sekarang untuk dapat diterima oleh generasi zaman ini. Pembelajaran seperti ini menjadi efektif karena dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja, tidak terpaku oleh waktu sekolah sehingga dapat meningkatkan minat siswa untuk belajar dan dapat meningkatkan hasil belajar siswa.

Penyelenggaraan pembelajaran atau kegiatan pendidikan dipengaruhi oleh beberapa komponen diantaranya adalah guru, sarana dan prasarana, peserta didik serta lingkungan masyarakat. Beberapa komponen tersebut adalah sebagai penunjang keberhasilan untuk mencapai tujuan instruksional yang telah ditetapkan sebelumnya (Bafadal, 2003:4). Guru adalah komponen utama dibandingkan dengan komponen lainnya. Alasannya adalah karena seluruh komponen selain guru masih dapat dimanfaatkan dan digunakan secara maksimal meski tidak memiliki ide ataupun gagasan. Sedangkan guru hanya dapat dimanfaatkan dan dapat memberikan dukungan maksimal ketika didukung oleh ide, gagasan serta pemikiran dalam bentuk ilmu, sikap dan perilaku unggul bagi pendidikan dalam tugasnya sebagai pendidik (Bafadal, 2003:4).

Guru tidak boleh sembarangan mengajar karena menjadi komponen utama dalam penyelenggaraan pembelajaran maka dari itu dibutuhkan kesiapan guru dalam mengajar. Kesiapan guru yaitu salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi keberhasilan pemanfaatan pembelajaran *online*. Maka dari itu, guru perlu meningkatkan kemampuannya dalam hal penguasaan teknologi informasi agar pendidikan berbasis digital dapat diterapkan dalam kegiatan pembelajaran dengan baik (Iptian, 2019). Maka dapat disimpulkan bahwa kesiapan guru dalam mengajar memiliki pengaruh dan peran yang penting dalam mewujudkan efektivitas proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). Efektivitas sebagai ukuran yang menyatakan sejauh mana sasaran ataupun tujuan baik dari segi kuantitas, kualitas ataupun waktu yang telah tercapai. Menurut Jasin (1996:12), dalam praktiknya efektivitas pembelajaran adalah apa saja yang dilakukan guru untuk membuat peserta didik mau belajar dan dalam hal ini guru tidak perlu mengintimidasi, menggunakan hukuman badan atau bentuk lain yang tidak disukai banyak siswa. Maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas pembelajaran merupakan kesesuaian atau kesamaan antara proses KBM dengan tujuan yang ingin dicapai dengan durasi waktu tertentu.

Iptian (2019) menunjukkan dalam penelitiannya bahwa kesiapan guru merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan pembelajaran *online* maka dari itu guru perlu meningkatkan kemampuannya dalam penguasaan teknologi informasi agar pendidikan berbasis digital dapat diterapkan dalam kegiatan pembelajaran yang baik. Hasil penelitian lain dari Wahyudi dkk (2013) juga mengungkapkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan antara tingkat kesiapan guru dalam mengajar terhadap efektivitas proses belajar mengajar. Dari hasil penelitian sebelumnya memang tidak diragukan lagi bahwa kesiapan guru dalam mengajar menjadi hal penting dalam sebuah kegiatan pembelajaran. Karena guru menjadi pusat pemberi ide dan gagasan untuk dapat memberikan ilmu pengetahuan kepada siswa. Terlebih pada keadaan pandemi seperti ini, guru benar-benar dituntut untuk dapat memberikan pembelajaran yang efektif dan efisien dengan *online* yang dilakukan setiap hari dan belum pernah dilakukan sebelumnya.

Penelitian ini menggunakan teori TAM (*Technology Acceptance Model*) yang dikemukakan oleh Davis F. D. (1989). Dimana persepsi kemudahan guru terhadap teknologi informasi dapat mempengaruhi kesiapan guru untuk mengaplikasikan dalam proses kegiatan belajar mengajar (KBM) sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh kesiapan guru dalam mengajar terhadap efektivitas pembelajaran *online* di masa pandemi Covid-19 dan untuk mengetahui ada tidaknya interaksi pengaruh kesiapan guru dalam mengajar terhadap efektivitas pembelajaran *online* di masa pandemic Covid-19.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi pustaka dengan menggunakan data sekunder sebagai sumber data. Studi pustaka adalah metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto, gambar maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan (Sugiyono, 2005:83). Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber antara lain laporan pembelajaran, buku, artikel dan informasi lainnya yang memiliki hubungan dan relevansi dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Pembelajaran *Online***

Pembelajaran *online* atau daring merupakan salah satu bentuk model pembelajaran yang difasilitasi dan didukung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mencapai tujuan instruksional yang telah ditetapkan sebelumnya. Tepatnya, istilah pembelajaran daring yaitu sebuah

usaha menuju sebuah transformasi atau perubahan proses pembelajaran yang ada di sekolah atau perguruan tinggi ke dalam bentuk digital yang dijumpai dengan teknologi internet (Munir, 2009:169).

Sebelum melakukan pembahasan selanjutnya, ada baiknya dapat melihat terkait definisi dan perbedaan antara pembelajaran secara konvensional dengan pembelajaran *online* atau daring. Pembelajaran secara konvensional adalah proses pembelajaran yang dilakukan dengan menggabungkan satu atau lebih metode pembelajaran dan guru memiliki peran sangat penting dalam pembelajaran model ini. Metode yang biasa digunakan berupa penjelasan secara tatap muka, pemberian tugas serta tanya jawab.

Perbedaan utama antara pembelajaran konvensional dan daring terdapat pada medianya. Pada pembelajaran konvensional, penyedia pembelajaran memiliki kontrol penuh atas lingkungannya dimana mereka akan melakukan segala perubahan kapanpun diinginkan serta kualitas penyampaian materi masih sangat dipengaruhi oleh beberapa hal seperti kemampuan, kualitas dan kepribadian guru. Proses adaptasi dengan lingkungan sekitar serta pembuatan modul atau materi pembelajaran sebagai materi pendukung. Sedangkan dalam pembelajaran daring, penyedia pembelajaran dipisahkan oleh dunia maya atau digital, dimana kemampuan untuk beradaptasi dan melakukan perubahan sudah tidak lagi diperlukan.

Pembelajaran konvensional dan pembelajaran daring memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Untuk lebih jelas, kelebihan dan kelemahan dari kedua pembelajaran tersebut dirangkum dalam tabel 1 berikut.

Berdasarkan tabel 1 di bawah dapat ditarik kesimpulan bahwa manfaat dari pembelajaran daring adalah unggul dari segi waktu, biaya serta akses yang tidak terbatas untuk memperoleh pengetahuan. Hal ini sesuai dengan prinsip pembelajaran dalam era revolusi industri 4.0 dengan mengedepankan OT atau internet sebagai ujung tombak atau senjata utama dalam segala aspek. Pada masa pandemi seperti ini, semua aspek pembelajaran konvensional dipaksakan untuk berubah alur ke dalam pembelajaran *online* atau daring.

Perubahan paradigma pembelajaran konvensional ke daring meski tidak sulit, tapi memerlukan waktu yang cukup lama. Karena hal itu berhubungan erat dengan perubahan paradigma budaya akademik. Survei yang dilakukan oleh Astini (2020) menghasilkan sebanyak 61,5% peserta didik belum pernah menggunakan pembelajaran daring dalam proses pembelajarannya. Dilihat dari banyaknya siswa yang belum pernah mengikuti pembelajaran daring sebelumnya, dapat dikatakan bahwa siswa belum siap untuk melaksanakan pembelajaran daring karena menyangkut budaya akademik yang meliputi nilai, sikap,

pengetahuan dan keterampilan serta kesiapan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan literasi informasi di kalangan siswa.

**Tabel 1.** Kelebihan dan Kelemahan Pembelajaran Konvensional dan Pembelajaran Daring

Pembelajaran Konvensional	Pembelajaran Daring
<b>Kelebihan</b>	
Respon balik yang cepat	Pembelajaran terpusat dan melatih kemandirian
Sudah menjadi sesuatu yang familiar bagi pengajar dan murid	Waktu dan lokasi fleksibel
Memotivasi pelajar	Biaya yang terjangkau untuk peserta
Penanaman jiwa sosialisasi dengan lingkungan sekitar	Akses yang tidak terbatas dalam perkembangan pengetahuan
<b>Kelemahan</b>	
Terlalu bergantung kepada pengajar	Kurang cepatnya umpan balik yang dibutuhkan dalam proses belajar mengajar
Terlalu terbatas oleh waktu dan lokasi	Pengajar perlu waktu lebih lama untuk mempersiapkan diri
Semakin hari biaya pembelajaran semakin mahal	Terkadang membuat beberapa orang merasa tidak nyaman Adanya kemungkinan muncul perilaku frustrasi, kecemasan berlebih dan kebingungan

*Sumber:* Firman dan Rahman, 2020

Perubahan kebijakan yang menyangkut paradigma pembelajaran ini idealnya dapat dijadikan sebagai momentum bagi para siswa untuk bebas dan kritis dalam mencari informasi ilmu pengetahuan secara digital. Namun juga memiliki kesempatan belajar secara leluasa karena tidak terikat oleh kehadiran tatap muka (Bauer, 2005). Siswa dapat mengatur waktunya sendiri untuk belajar dan memenuhi tuntutan tugasnya. Dengan begitu, siswa akan menjadi semakin literat terhadap informasi berkaitan dengan keperluan akademiknya dan akan terus bertambah (Bal, 2018). Tapi kenyataan yang terjadi justru sebaliknya. Adanya perubahan paradigma pembelajaran malah menjadikan siswa mengeluh. Keluhan siswa ini adalah bukti ketidaksiapan siswa secara internal berkaitan dengan nilai, sikap, pengetahuan dan keterampilan memperoleh, mengevaluasi dan mengorganisasikan informasi (Astini, 2020).

## 2. Peluang Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pembelajaran *Online*

Transformasi digital dalam sektor pendidikan di Indonesia bukan sebuah wacana baru yang diperbincangkan, regulasi pendukung dan upaya konkret menerapkan transformasi digital di lingkungan perguruan tinggi dan

semua tingkat sekolah di Indonesia. Jika sebelumnya berbagai wacana, kebijakan pendukung serta sosialisasi tentang era industri 4.0 belum berhasil membuat industry pendidikan dari universitas, institute, sekolah tinggi, politeknik, akademi hingga sekolah dasar mencapai progress yang signifikan pada transformasi digital pendidikan Indonesia. Justru yang memberikan dampak luar biasa adalah wabah Covid-19 yang masuk dan merubah tatanan pendidikan seketika.

Seluruh lembaga pendidikan dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi menghentikan aktivitas belajar mengajar secara tatap muka dan segera beralih dalam pembelajaran *online*. Semua ini diakibatkan oleh wabah Covid-19 yang sejatinya memberi dampak negative kepada hampir seluruh sektor kehidupan manusia. Namun tidak dapat dipungkiri ada beberapa aspek positif yang ditimbulkan wabah Covid-19 ini seperti keadaan alam yang menjadi lebih baik dari sebelumnya karena terbatasnya aktivitas manusia dan pada bidang pendidikan ternyata menjadi pemicu percepatan proses transformasi digital pendidikan Indonesia. Pendidikan 4.0 dapat dilihat sebagai salah satu respon kreatif ketika manusia dapat memanfaatkan teknologi digital, *open sources contents* dan *global classroom* dalam menerapkan pembelajaran sepanjang hayat (*lifelong learning*), *flexible education system* dan *personalized learning* untuk memainkan peran yang lebih baik di tengah-tengah masyarakat. Di sisi lain, *new normal* pembelajaran secara *online* bukan merupakan jawaban dari adanya pertanyaan namun sebuah adaptasi dari kondisi yang semua orang terpaksa dan diwajibkan untuk melakukannya (Firman dan Rahman, 2020).

Ada beberapa platform teknologi informasi yang berpeluang untuk dimanfaatkan dalam mendukung kegiatan pembelajaran daring dan sekaligus berpeluang untuk memaksa guru agar melek teknologi. Beberapa diantaranya adalah:

- a. *E-learning* merupakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengaktifkan siswa untuk belajar kapanpun dan dimapaun (Hartanto, 2016). *E-learning* mempunyai 2 tipe yaitu (1) *Synchronous* yang berarti pada waktu yang sama. Proses pembelajaran terjadi pada saat yang sama antara pendidik dan peserta didik. Hal ini dapat terjadi interaksi langsung antara pendidik dan peserta didik secara *online*. *Synchronous training* adalah gambaran dari kelas nyata, namun bersifat maya (*virtual meeting*) dan semua peserta didik terhubung melalui internet; (2) *Asynchronous* yang artinya tidak pada waktu bersamaan. Peserta didik dapat mengambil waktu pembelajaran berbeda dengan pendidik memberikan materi. *Asynchronous-training* populer dalam *e-learning* karena peserta didik dapat mengakses materi pembelajaran dimanapun dan kapan pun. Peserta didik dapat melaksanakan pembelajaran dan menyelesaikannya setiap saat sesuai



rentang jadwal yang sudah ditentukan. Pembelajaran dapat berbentuk bacaan, animasi, simulasi, permainan edukatif, tes, kuis ataupun pengumpulan tugas.

- b. *Edmodo* adalah salah satu aplikasi yang aman untuk digunakan baik untuk guru atau untuk siswa. *Edmodo* adalah pembelajaran berbasis jejaring sosial yang aman dan gratis dalam memudahkan guru untuk membuat dan mengelola kelas virtual sehingga siswa dapat terhubung dengan teman sekelas dan guru kapan saja dan dimana saja (Balasubramanian, 2014).
- c. *EdLink* adalah aplikasi berbasis android yang dikhususkan untuk dunia pendidikan guna membantu guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Beberapa manfaat *EdLink* untuk guru adalah untuk menghemat waktu, menjaga kelas tetap teratur, meningkatkan komunikasi dengan siswa dan masih banyak lainnya. Bukan hanya membantu dosen namun juga sangat bermanfaat untuk siswa dimana para siswa bisa lebih update tentang informasi kampus dan juga memudahkan dalam proses perkuliahan.
- d. *Moodle* adalah *platform* untuk belajar yang desainnya dikhususkan untuk pendidik, admin dan peserta didik. *Moodle* sebenarnya merupakan singkatan dari *Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment*. *Platform* ini tergolong CMS namun khusus bagi kepentingan edukasi.
- e. *Google Classroom* atau ruang kelas Google merupakan suatu serambi pembelajaran campuran untuk ruang lingkup pendidikan yang dapat memudahkan pengajar dalam membuat, membagikan dan menggolongkan setiap penugasan tanpa kertas. *Google Classroom* digunakan untuk memaksimalkan proses penyampaian materi kepada peserta didik tetapi dilakukan secara *online* sehingga materi bisa tersampaikan secara keseluruhan. *Google Classroom* adalah layanan berbasis internet yang disediakan oleh Google sebagai sebuah sistem *e-learning*. Pelayanan ini didesain untuk membantu pengajar membuat dan membagikan tugas kepada pelajar secara *paperless* (Hakim, 2016).
- f. *Schoology* adalah bentuk sosial *network* berbasis lingkungan sekolah (*school based environment*) yang dikembangkan oleh Nocilas Borg dan Jeff O'Hara tahun 2008, *schoology* ditujukan untuk penggunaan bagi guru, siswa dan orang tua siswa. Tampilan *schoology* hampir sama dengan jejaring sosial *facebook*, situs jejaring sosial *facebook* sudah lumrah dikalangan remaja bahkan anak usia sekolah dasar sudah mengenal apa yang Namanya *facebook*.
- g. *Zoom* merupakan aplikasi *virtual meeting* gratis dengan video dan berbagi layar berkapasitas 100 orang. *Zoom* merupakan aplikasi komunikasi

dengan menggunakan video. Aplikasi tersebut dapat digunakan dalam berbagai perangkat seluler, desktop, hingga telepon dan sistem ruang.

- h. *Whatsapp* adalah salah satu media komunikasi yang populer digunakan saat ini. *Whatsapp* merupakan salah satu aplikasi yang digunakan untuk melakukan percakapan baik menggunakan teks, suara ataupun video. *Whatsapp* untuk tetap terhubung dengan teman keluarga, kapanpun dan dimanapun. Menurut Niken, Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika, *whatsapp* adalah aplikasi yang paling diminati masyarakat dalam berkomunikasi lewat internet yaitu sebanyak 83% dari 171 juta pengguna internet.

Beberapa *platform* di atas tidak seluruhnya digunakan oleh guru selama masa pembelajaran *online*. *Whatsapp* merupakan media paling banyak digunakan oleh guru dan siswa karena sebelum masa pandemic Covid-19 ini, guru dan juga siswa juga sudah intensif berkomunikasi dan berinteraksi terkait pembelajaran melalui *whatsapp group* (Susilo dan Rohman, 2019). Meski begitu, harusnya pembelajaran daring pada masa pandemi ini dapat dimanfaatkan oleh para guru untuk mengembangkan kompetensi digital sehingga mode digital yang dimanfaatkan oleh setiap dosen bisa lebih variative. Hal ini bertujuan untuk menghindari kebosanan siswa dalam belajar dan menyerap informasi terkait materi.

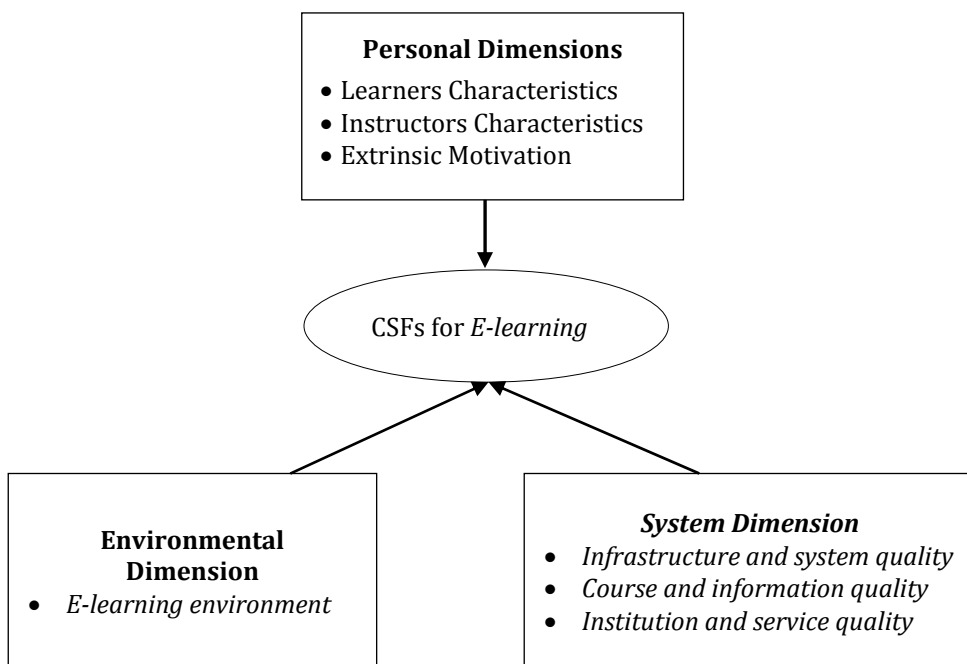
Sistem konvensional yang terjadi selama ini semestinya dipadukan dengan media komunikasi multimedia khususnya sejak ditemukannya media komunikasi multimedia ini. Sifat internet yang dapat dihubungi kapan saja yang berarti siswa dapat memanfaatkan program pendidikan yang disediakan di internet kapan saja sesuai dengan waktu luang mereka. Sehingga ruang dan kendala waktu yang selama ini dihadapi dalam menentukan sumber belajar dapat diatasi. Dengan perkembangan pesat di bidang telekomunikasi, multimedia dan teknologi informasi; mendengarkan ceramah, membuat catatan di atas kertas tentu sudah ketinggalan zaman. Sejalan dengan perkembangan ICT (*Information, Communication and Technology*), muncul berbagai model pembelajaran secara *online*. Selanjutnya muncul istilah sekolah berbasis web atau sekolah berbasis internet yang menggunakan fasilitas internet. Bermula dari kedua istilah tersebut, muncul berbagai istilah baru dalam pembelajaran yang menggunakan internet seperti *online learning*, *web-based learning*, dan *e-learning* (Kuntarto, 2016).

Perkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini menjadi gerbang untuk datangnya revolusi industri 4.0. Menurut (Davis, 2011) industri 4.0 ini sebagai *cyber physical system* yang berarti teknologi bukan lagi menjadi alat melainkan tertanam pada kehidupan masyarakat. *Artificial intelligence*, *nanotechnology*, *biotechnology*, *autonomous vehicles* dan 3D printing merupakan

contoh semakin luasnya perkembangan teknologi saat ini. Kecepatan, cakupan dan dampak merupakan tiga alasan dari Schwab (World Economics Forum, 2016) menjelaskan bahwa transformasi teknologi saat ini bukan perpanjangan dari revolusi industri ketiga tapu kedatangan revolusi industri 4.0. Beberapa aplikasi tersebut bisa menjadi Langkah awal bagi perguruan tinggi saat Menyusun *e-learning* dalam menerapkan *blended learning* guna mewujudkan era pendidikan 4.0 yang akan menjadi *new normal* di era industrial revolusi 4.0 pasca pandemi Covid-19.

### 3. Faktor Penentu Keberhasilan Pembelajaran *Online*

Terdapat 3 hal dasar yang harus diperhatikan ketika organisasi akan menjalankan sistem pembelajaran secara *online* yaitu teknologi dan informasi, karakteristik pengajar dan karakteristik siswa. Tapi untuk negara berkembang terdapat beberapa faktor lain yang masih harus diperhatikan agar pembelajaran daring dapat berjalan secara maksimal. Selain 3 hal tersebut ada beberapa hal yang masih perlu dipertimbangkan lagi yakni lingkungan *e-learning*, kualitas institusi dan layanan, infrastruktur dan kualitas sistem, kualitas kursus dan informasi serta motivasi. Hal tersebut dapat dirangkum dan dijelaskan dengan Gambar 1 di bawah.



Sumber: Darmalaksana dkk (2020)

**Gambar 1.** Faktor yang Mempengaruhi Pembelajaran *Online*

Dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa teknologi informasi semakin penting dalam pendidikan dan menjadikan teknologi menjadi sesuatu yang umum. Lembaga pendidikan dalam negara-negara berkembang menghadapi tantangan unik dibandingkan dengan negara-negara maju dan harus memahami apa yang menggerakkan peserta didik dan fasilitas untuk menuju e-learning. Dari permasalahan tersebut memungkinkan untuk para pemangku kepentingan dapat mengambil tindakan yang tepat untuk memastikan keberhasilan sistem e-learning.

Fokus utama dari penelitian tersebut yaitu untuk mengklasifikasikan dan memprioritaskan CSF (*Critical Success Factor*) untuk implementasi *e-learning* di negara berkembang dan mengidentifikasi praktis implikasi. Studi tersebut menemukan bahwa faktor terpenting yang mempengaruhi keberhasilan *e-learning* di negara berkembang yaitu terkait dengan peningkatan kesadaran teknologi informasi dan sikap terhadap *e-learning*, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan teknologi dasar, meningkatkan konten pembelajaran, kebutuhan akan pelatihan komputer, memotivasi pengguna untuk memanfaatkan sistem *e-learning* dengan baik dan maksimal, dan juga dibutuhkannya dukungan tingkat tinggi dari universitas.

#### 4. Kesiapan Mengajar Guru

Mengajar dapat dikatakan sebagai istilah kunci atau penting yang hampir tidak pernah luput dari pembahasan mengenai pendidikan, karena mempunyai hubungan yang erat antara keduanya. Di dalam kegiatan pendidikan pasti didalamnya terdapat kegiatan mengajar. Selama kegiatan mengajar berlangsung akan terjadi transfer ilmu dan pengetahuan yang dimiliki oleh guru kepada peserta didik. Oleh karena itu, dalam melakukan proses mengajar guru tidak boleh sembarangan terlebih pada saat menyampaikan ilmu dan pengetahuan yang disampaikan. Untuk itu diperlukan kesiapan mengajar guru. Menurut Rooijackers (2003: 5) persiapan yang baik yaitu jaminan hasil dalam pelaksanaan yang baik. Oleh karena itu, seorang guru harus mempersiapkan proses kegiatan belajar mengajar yang akan ia sampaikan kepada peserta didiknya dengan sebaik-baiknya.

Guru yang efektif dalam mengajar perlu melakukan persiapan dalam pengetahuan akan isi pembelajaran, keterampilan dan sikap. Persiapan tersebut memiliki peranan yang penting dalam menciptakan pembelajaran yang efektif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Simatupang dkk, 2020), 60% guru dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah atas sudah siap menghadapi pembelajaran daring. Persiapan yang dilakukan oleh para guru dalam menghadapi pembelajaran daring ini adalah kuota internet, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian (RPPH), mengkomunikasikan kepada orang

tua bahwa pembelajaran dilaksanakan secara daring, alat tulis yang disiapkan di rumah, *handphone* android, lembar kerja anak, serta materi yang akan dibagikan kepada orang tua.

Beberapa sekolah menggunakan *Whatsapp Group* dan beberapa lagi menggunakan aplikasi *zoom*. Namun ada juga sekolah yang melaksanakan pembelajaran selama di rumah melalui menonton televisi siaran TVRI yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Adapun tugas yang diberikan guru selama pembelajaran daring pada masa pandemi Covid-19 yaitu membuat media yang mengandung beberapa aspek perkembangan anak dan lembar kerja anak yang sudah diserahkan kepada orang tua. Pembelajaran yang dilakukan oleh anak didampingi orang tua.

Kesiapan guru merupakan hal yang penting karena guru merupakan seseorang yang memberikan pengaruh keberhasilan anak dalam pembelajaran (Almarzooq, 2020; Alwiyah, 2018). Selain itu, kesiapan guru menghadapi pembelajaran daring juga menentukan keberhasilan belajar anak. Kesiapan tersebut seperti rencana pembelajaran, materi-materi pembelajaran yang akan disampaikan, media pembelajarannya, mengatur jadwal pembelajaran daring dan lainnya (Alwiyah, 2018; Larlen; 2013).

## 5. Efektivitas Kesiapan Mengajar Guru terhadap Pembelajaran *Online*

Menurut Watkins (2002: 3), efektivitas pembelajaran dapat diukur dengan melihat (1) karakteristik guru yang efektif dalam proses pembelajaran yaitu guru yang memiliki kemampuan dalam pengembangan kurikulum dan aplikasi teknologi. Indikator karakteristik guru meliputi pengorganisasian bahan pelajaran, memilih metode pembelajaran yang tepat, bersikap positif terhadap siswa, kreatif dalam aplikasi teknologi pembelajaran; (2) karakteristik siswa yang efektif dalam proses pembelajaran adalah siswa yang fleksibel dan aktif selama proses pembelajaran dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Indikator karakteristik siswa meliputi: *active learning* (aktif dalam pembelajaran), *collaborative learning* (siswa mampu bekerjasama), *learner responsibility* (belajar untuk bertanggungjawab), dan *learning about learning* (belajar dari apa yang telah dipelajari).

Efektivitas kegiatan belajar mengajar dapat tercapai karena dipengaruhi oleh dua pihak, yaitu guru dan peserta didik. Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari Watkins yang menyatakan bahwa efektivitas pembelajaran dapat diukur dari karakteristik guru dan siswa. Dari pihak guru seringkali disebut dengan mengajar, sedangkan dari pihak peserta didik disebut dengan belajar. Efektivitas pembelajaran tidak akan tercapai apabila hanya dari sisi guru saja yang siap, melainkan dari sisi peserta didik pun juga harus siap. Kelancaran proses kegiatan belajar mengajar peserta didik dipengaruhi oleh

dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri siswa, sedangkan faktor eksternal berasal dari lingkungan di sekitar peserta didik. Menurut Sunu (2001: 2) yang dimaksud dengan lingkungan yaitu sekeliling atau sekitar tempat organisasi beroperasi, termasuk udara, air, tanah, sumber daya alam, flora, fauna, manusia, dan hubungan diantaranya.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kesiapan mengajar guru terhadap efektivitas pembelajaran di masa pandemi *covid-19* ini sangat tergantung pada faktor kesiapan mengajar guru, kesiapan peserta didik sendiri dalam mengikuti pembelajaran, dan fasilitas pendukung untuk melaksanakan pembelajaran daring atau *online*.

## PENUTUP

Kesiapan guru dalam mengajar di masa pandemi Covid-19 ini sangat berpengaruh terhadap efektivitas pembelajaran *online*. Mengajar membutuhkan banyak komponen di dalamnya. Komponen utama dalam pembelajaran adalah guru. Guru memiliki ide, gagasan dan pemikiran dalam bentuk ilmu pengetahuan untuk menunjang komponen lain dalam melaksanakan pembelajaran. Pembelajaran konvensional yang secara mendadak beralih ke dalam pembelajaran *online* membuat seluruh komponen dalam pembelajaran tidak siap untuk melakukannya meski pembelajaran daring sudah diperkenalkan sejak lama. Lebih dari 50% siswa mengaku belum pernah merasakan pembelajaran daring yang mengakibatkan *culture shock* bagi siswa ketika menghadapi pembelajaran daring. Pada beberapa tahun terakhir, pembelajaran konvensional memang sudah dinilai tidak lagi efektif seperti dulu karena zaman telah berubah. Zaman sekarang ini media digital sudah berkembang bahkan dalam tatanan pendidikan. Teknologi menuntut pendidikan berkembang ke arahnya, maka guru dan siswa juga dituntut untuk menguasai teknologi informasi secara aktif.

Covid-19 membawa dampak positif dan pesat dalam tatanan pendidikan di era digital. Karena seluruh komponen di dalamnya akhirnya dipaksa untuk menguasai dan menggunakannya. Maka sistem pembelajaran *online* yang telah lama direncanakan, secara mendadak menjadi sebuah kewajiban bagi seluruh lembaga pendidikan. *Blended learning* menjadi salah satu cara untuk menerapkan pembelajaran *online* yaitu ketika pembelajaran konvensional dipadukan dengan pembelajaran berbasis digital. Meski pembelajaran dilakukan secara *online*, kesiapan dalam mengajar juga harus dilakukan sebaik mungkin sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan maksimal dan efektivitas pembelajaran dapat tercapai sehingga siswa tidak mengalami kebosanan dalam pembelajaran.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Almarzooq, Z. I., Lopes, M., & Kochar, A. 2020. Virtual Learning During the COVID-19 Pandemic. *Journal of the American College of Cardiology*, 75(20).
- Alwiyah, D., & Imaniyati, N. 2018. Keterampilan Mengajar Guru dan Kesiapan Belajar Siswa sebagai Determinan Terhadap Hasil Belajar Siswa. *Jurnal MANAJERIAL*, 17(1).
- Arnesti, N., & Hamid, A. 2015. Penggunaan Media Pembelajaran Online – Offline Dan Komunikasi Interpersonal Terhadap Hasil Belajar Bahasa Inggris. *Jurnal Teknologi Informasi & Komunikasi Dalam Pendidikan*, 2(1).
- Astini, Ni Komang Suni. 2020. Tantangan dan Peluang Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pembelajaran *Online* Masa Covid-19. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(2).
- Bafadal, Ibrahim. 2003. Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasar. Jakarta: Bumi Aksara.
- Bal, M. 2018. Reading and Writing Experiences of Middle School Students in the Digital Age: Wattpad Sample. *International Journal of Education and Literacy Studies*, 6(2),
- Balasubramanian, K. &. 2014. Student Preference Towards the Use Of Edmodo As A Learning Platform To Create Responsible Learning Environment. Prosiding, Asia Euro Conference. Selangor: School of Hospitality, Tourism and Culinary Arts, Taylor's
- Bauer, J. 2005. Toward Technology Integration in the Schools: Why It Isn ' t Happening. 13, 519–546.
- Darmalaksana, Wahyudin., Hambali, R. Yuli Ahmad., Masrur, Ali., & Muhlas. 2020. Analisis Pembelajaran *Online* Masa WFH Pandemi Covid-19 sebagai Tantangan Pemimpin Digital Abad 21. *Karya Tulis Ilmiah (KTI) Masa WFH Covid-19*, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung.
- Davis, I. 2011. Instructional Technique. New York: McGraw Hill Book Company.
- E. B. Setiawan dan M. V. Yusman. 2014. Pembangunan E-Learning Sebagai Sarana Pembelajaran Online Di Smp Negeri 8 Bandung. Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Multimedia 2014, Yogyakarta.
- Firman., & Rahman, Sari Rahayu. Pembelajaran *Online* di Tengah Pandemi Covid-19. *Indonesian Journal of educational Science*, 2(2).
- Hakim. 2016. Efektifitas Penggunaan E-Learning Moodle, Google Classroom Dan Edmodo. I-Statement.
- Hartanto, W. 2016. Penggunaan *ELearning* Sebagai Media Pembelajaran. *Jurnal UNEJ*.

- Iptian, R. (2019). Pengaruh Kesiapan Guru Terhadap Pemanfaatan E-Learning. *Jurnal Dinamika Manajemen Pendidikan*, 3(2).
- Jasin. 1996. Pengembangan Disiplin Diri. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.
- Larlen, L. 201). Persiapan Guru bagi Proses Belajar Mengajar. Pena, 3(1).
- Long, N. J. 2020. From social distancing to social containment: reimagining sociality for the coronavirus pandemic. *Medicine Anthropology Theory*.
- Munir. 2009. Pembelajaran Jarak Jauh Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi. Bandung: Alfabeta.
- Pratiwi, Ericha Windhiyana. 2020. Dampak Covid-19 Terhadap Kegiatan Pembelajaran *Online* di Sebuah Perguruan Tinggi Kristen di Indonesia. *Perspektif Ilmu Pendidikan*, 34(1).
- Purwanto, Agus., Pramono, Rudy., Asbari, Masduki., Santoso, Priyono Budi., Wijayanti, Laksmi Mayesti., Hyun, Choi Chi., & Putri, Ratna Setyowati. 2020. Studi Eksploratif Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Proses Pembelajaran *Online* di Sekolah Dasar. *Journal of Education, Psychology and Conseuling*, 2(1).
- Rooijackers. 2003. Mengajar dengan Sukses. Jakarta: Grasindo.
- Shi, H. H., Jiang, N., Cao, Y., Alwalid, O., Gu, J., Fan, Y., & Zheng, C. 2020. Radiological findings from 81 patients with COVID19 pneumonia in Wuhan, China: a descriptive study. *The Lancet Infectious Diseases*.
- Simatupang, Nova Irawati., Sitohang, Sri Rejeki Ignasia., Situmorang, Angelia Patricia., & Simatupang Ismeny Mastalena. 2020. Efektivitas Pelaksanaan Pengajaran *Online* pada Masa Pandemi Covid-19 dengan Metode Survey Sederhana. *Jurnal Dinamika Pendidikan*, 13(2).
- Smith, A. W., & Freedman, D. O. 2020. Isolation, quarantine, social distancing and community containment: pivotal role for old-style public health measures in the novel coronavirus (2019-nCoV) outbreak. *Journal of Travel Medicine*.
- Sugiyono. 2005. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfa Beta.
- Sunu, P. 2001. Melindungi Lingkungan Dengan Menerapkan ISO 1400. Jakarta: PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia.
- Susilo, Purnomo Hadi., & Rohman, M. Ghofar. Efektivitas Sistem Pembelajaran *Online* Sebagai Media Pembelajaran Berbasis Aplikasi Web di Era Milenial. *Seminar Nasional Sistem Informasi 2019*, Malang.
- Wahyudi, R., Santosa, S., & Sumaryati, S. 2013. Pengaruh Kesiapan Guru Mengajar dan Lingkungan Belajar terhadap Efektivitas Pembelajaran di Smk Kristen 1 Surakarta. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Universitas Sebelas Maret*, 2(2).



- Waryanto, N. H. 2006. Online Learning sebagai salah satu Inovasi Pembelajaran. *Jurnal Phitagoras*, 2(1).
- Watkins, Chris. 2002. Effective Learning. Makalah pada National School Improvement Network, London.
- Wicaksono, S. R. 2012. Kajian Pembelajaran Online Berbasis Wiki Di Lingkup Perguruan Tinggi. *Journal of Education and Learning (EduLearn)*, 6(1), 51

---

## **BUKU CERITA BERJENJANG BAGI PEMBACA CILIK MENUJU SUKSESNYA GERAKAN LITERASI SEKOLAH**

**Mega Mulianing Maharani, Siti Zakiyatul Lutfiah, & Amalia Nur Fauziah**

### **PENDAHULUAN**

Literasi merupakan bagian dari dunia pendidikan. Literasi memediasi peserta didik dengan dunia belajarnya, baik dunia belajar di rumah ataupun di sekolah. Menurut Undang-Undang No 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, literasi merupakan kemampuan untuk memahami informasi secara kritis sehingga setiap orang dapat mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas hidupnya. Salah satu jenis literasi adalah literasi membaca. Literasi membaca dalam hal ini merupakan keahlian memahami bacaan dan mengekspresikannya ke dalam bahasa tulis (Meade & Van Duyl, 2013). Peserta didik dikatakan berliterasi baca jika peserta didik mampu memahami, menggunakan, dan merefleksikan hasil membacanya dalam bentuk tulisan. Pada dasarnya literasi membaca terdiri dari empat elemen utama yaitu teknik membaca, membaca dengan pemahaman, meneja dan menulis. Teknik membaca dapat dipelajari dan dilatih. Teknik membaca berkaitan dengan menterjemahkan huruf dan bunyi dilanjutkan dengan membaca simbol dengan cepat tanpa teragap-gagap. Membaca dengan pemahaman berkaitan dengan memahami kosakata, kalimat dan paragraf hingga dapat memaknainya. Meneja dan menulis berkaitan dengan semua faktor bahasa yang secara terperinci bahwa meneja itu membedakan bunyi.

Membaca merupakan kegiatan untuk mempertahankan hidup (Brown, 2014). Membaca diartikan mencapai pemahaman dari simbol-simbol tertulis dari sebuah bahasa lisan (Meade & Van Duyl, 2013). Ketercapaian keberhasilan membaca membutuhkan kerjasama di antara keahlian-keahlian yang berbeda yang ada pada diri pembaca: keahlian memahami teks secara keseluruhan, kognitif pembaca dan juga latar belakang ilmu pembaca. Proses membaca terdiri dari pre-reading activities dan reading process. Pre-reading activities meliputi print awareness, letter knowledge, narrative skill, print motivation, vocabulary and phonological awareness (Marrapodi, 2013). Peserta didik yang sedang mengawali kegiatan membaca perlu dikenalkan segala bentuk prin sehingga dapat terbiasa mengenali huruf. Peserta didik juga perlu tahu cara membuka buku, mengenal halaman buku, mengenal cara memulai dan

mengakhiri membaca, menunjuk gambar dalam buku, menunjuk huruf atau kata dalam buku dan yang paling kompleks adalah mengenal susunan kalimat dan susunan paragraf. Jika peserta didik melewati kegiatan tersebut dengan baik maka buku bukan lagi sesuatu yang baru bagi mereka. Reading process merupakan bagian yang dilalui oleh setiap pembaca. Reading process terdiri dari decoding, sight -word reading dan comprehension (Meade & Van Duyl, 2013). Pada proses membaca, peserta didik melewati proses identifikasi fonim, kata dan arti. Proses tersebut mengantarkan peserta didik pada fase memahami isi bacaan dan mengutaran isi bacaan tersebut dengan menggunakan imajinasinya sendiri dan dikaitkan dengan lingkungan atau kehidupan di sekitarnya.

Literasi baca peserta didik di Indonesia masih tergolong rendah dan harus ditingkatkan. Hal ini dibuktikan dari pencapaian Indonesia pada tahun 2016. Puspendik Kemendikbud dalam program Indonesian National Assessment Program (INAP) atau Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI) menguji keterampilan membaca, matematika, dan sains peserta didik SD kelas IV pada tahun 2016. Khusus dalam membaca, hasilnya adalah 46,83% dalam kategori kurang; 47,11% dalam kategori cukup; dan hanya 6,06% dalam kategori baik. Rendahnya minat baca peserta didik di Indonesia dilatarbelakangi oleh berbagai hal. Di daerah-daerah terpencil, faktor yang menyebabkan minimnya minat baca para peserta didik ialah dikarenakan minimnya jumlah buku bacaan. Hal ini membuat peserta didik tidak mempunyai motivasi yang kuat untuk membaca karena bahan bacaan tidak tersedia. Namun di sisi lain jika kita bandingkan kondisi di kota-kota besar, penyebabnya sangatlah berbeda. Buku yang ada di perpustakaan sekolah sangat melimpah, buku di sekitar mereka pun juga mudah didapatkan, misalnya seperti buku-buku yang dijual di toko buku baik online maupun non online atau buku yang bisa mereka pinjam di perpustakaan daerah setempat. Faktor utama yang menyebabkan rendahnya minat baca adalah tidak adanya budaya membaca yang peserta didik kembangkan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kendala yang dihadapi peserta didik tidak hanya karena ketersediaan buku bacaan namun juga budaya membaca yang belum dibiasakan.

Menghadapi situasi yang demikian, pada bulan Maret 2016 pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud gencar mensosialisasikan Gerakan Literasi Sekolah atau yang lebih dikenal dengan istilah GLS ke semua Dinas Pendidikan Provinsi dan/atau Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten. Hal yang mendasari tercetusnya gerakan tersebut salah satunya karena keberlangsungan pendidikan Indonesia tertuang dalam UUD 1945 pasal 31. Dasar-dasar pengembangan Gerakan Literasi Sekolah tersebut juga berkaitan dengan tugas dan fungsi Kemendikbud pada khususnya agenda prioritas/nawacita nomor 5, 6, 8 dan 9 yang berbunyi:

meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia; meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya; melakukan revolusi karakter bangsa; dan memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Membiasakan anak untuk gemar membaca di masa pesatnya teknologi saat ini tentunya bukan sesuatu yang mudah. Tantangan kebiasaan mengoperasikan game online yang bisa dilakukan kapanpun dan bahkan sudah menjiwa di dalam diri peserta didik menjadi musuh besar untuk mewujudkan anak yang gemar membaca. Tantangan itu bisa dikalahkan jika 3 ranah saling berkolaborasi. Ranah-ranah tersebut merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kebiasaan membaca peserta didik. Faktor-faktor tersebut adalah keluarga, lingkungan, dan institusi pendidikan (perpustakaan) (Celik, 2019). Sebagai pilar yang pertama, keluarga mempunyai andil dalam gerakan tersebut guna: (1) meningkatkan rasa cinta membaca di lingkungan keluarga; (2) meningkatkan kemampuan memahami bacaan dan berpikir kritis; (3) meningkatkan kemampuan menganalisis dan kemampuan verbal dalam mengulas informasi yang telah didapatkan dari bacaan; (4) mempererat ikatan dan hubungan personal dalam keluarga inti; (5) menciptakan budaya literasi di lingkungan keluarga; (6) mengembangkan kearifan lokal, nasional dan global. Demi mewujudkan program, salah satu strategi yang dikembangkan oleh pemerintah yaitu dengan memasyarakatkan lagu dengan tajuk Gernasbaku: Gerakan Nasional Baca Buku. Pesan yang tersirat memuat ajakan kepada orang tua untuk membacakan buku bagi putra-putrinya. Melalui lagu tersebut, pemerintah mengarahkan bahwa gerakan tersebut membutuhkan keterlibatan orang tua. Menurut panduan Gerakan Literasi Sekolah (2018), keluarga yang terdiri dari orang tua atau wali murid merupakan bagian dari warga sekolah. Hal tersebut sejalan dengan falsafah Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan tidak bisa dilepaskan dari kerjasama berbagai komponen masyarakat (keluarga, pendidik profesional, pemerintah, dll.) demi terwujudnya perkembangan anak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peran serta orang tua sangat menunjang keberlangsungan program.

Sebagai pilar yang kedua dan ketiga yaitu lingkungan dan institusi pendidikan (perpustakaan), sekolah sebagai lingkungan akademis diharapkan mampu menyediakan buku-buku nonteks pelajaran secara optimal. Serta kegiatan membaca di sekolah tidak hanya memusatkan pada membaca buku teks pelajaran. Membaca buku nonteks pelajaran justru dapat menumbuhkan kegemaran membaca peserta didik, terlebih jika buku tersebut disajikan dengan gambar-gambar yang berwarna dan menarik sehingga dapat memberikan variasi pada peserta didik. Gambar sebagai representasi cerita memberikan nilai visual yang kuat untuk daya pikir peserta didik. Buku cerita

merupakan buku nonteks pelajaran yang dapat berperan menumbuhkan gemar membaca sebagai wujud mensukseskan Gerakan Literasi Sekolah karena buku cerita dapat menghibur (Bucaramanga, 2010). Buku cerita membantu pembaca didik selaku pembaca untuk mengkonstruksi arti dari teks (McLachlan et al., 2012). Secara tidak langsung proses ini akan meningkatkan kosakata, daya pikir dan imajinasi peserta didik (Siahaan, 2012).

Peserta didik berusia 3-8 tahun yang memulai belajar membaca pada dasarnya melewati fase literasi yang disebut dengan *emergent literacy*. Pada fase ini, peserta didik berada pada masa kesiapan (*readiness*) untuk membaca dan menulis. Peserta didik siap dan sadar untuk terlibat dengan segala bentuk prin. Oleh karenanya melibatkan peserta didik pada usia tersebut ke dalam kegiatan ekstrakurikuler membaca ekstensif merupakan keputusan yang baik karena pada fase ini terdapat 2 komponen literasi yang berkembang pada peserta didik yaitu pengetahuan tentang konsep dan pengetahuan tentang prosedur berkaitan dengan kemampuan membaca dan menulis. Proses *emergent literacy* sangat baik dikembangkan pada kegiatan di luar sekolah dan salah satu kegiatan untuk *emergent literacy* berupa membaca buku cerita (Gunn et al., 2004).

## PEMBAHASAN

Ragam buku cerita perlu dikenalkan pada pembaca cilik. Dengan berbagai ragam buku cerita, peserta didik bisa memilih yang mereka sukai tanpa paksaan. Situasi seperti ini disebut dengan membaca ekstensif atau membaca untuk kesenangan. Membaca untuk kesenangan menurut (Day, 2015) diasumsikan sebagai membaca untuk kenyamanan. Buku bacaan yang disajikan berfungsi untuk dipilih oleh pembaca cilik sesuai dengan ketertarikan mereka. Dalam membaca ekstensif, guru sebagai pendamping dan juga teman membaca yang selalu berupaya menumbuhkan semangat membaca. Seorang guru juga seorang pembaca. Hal ini selaras dengan tujuan dari Gerakan Literasi Sekolah bahwa guru tidak selalu memberikan perintah untuk membaca namun guru ikut membaca. Solidaritas guru untuk membaca bersama sangat dibutuhkan karena guru merupakan sponsor bagi peserta didik. Dapat dikatakan bahwa guru adalah "a reading model" bagi peserta didiknya yang merupakan satu tim kerja.

Cara mensukseskan Gerakan Literasi Sekolah dapat dilakukan dengan mengikuti anjuran pemerintah yaitu memberlakukan 15 menit sebelum pelajaran dimulai dapat menjadi alternatif. Pilihan lainnya adalah dengan menggunakan ruang waktu selama proses pembelajaran, dengan mengaitkan pembelajaran dan membaca buku bacaan atau dengan menjadikan membaca sebagai kegiatan ekstrakurikuler dengan luaran menceritakan kembali isi dari

buku cerita. Kegiatan tersebut dapat diterapkan pada membaca ekstensif. Membaca ekstensif melatih pembaca cilik untuk menjadi *want to read* bukan *have to read*. Membaca ekstensif atau *extensive reading* yang dijadikan sebuah kegiatan ekstrakurikuler dapat diawali dengan membaca kemudian bercerita. Menerapkan kegiatan tersebut pada peserta didik yang masih dini yaitu peserta cilik yang duduk di bangku Sekolah Dasar, perlu menerapkan langkah-langkah tertentu. Ada beberapa langkah yang bisa diterapkan oleh pendamping ketika melakukan membaca ekstensif buku cerita berbahasa Inggris. Pada tahapan awal, pendamping membacakan cerita dengan variasi intonasi. Pendamping juga dapat menjadi teman baca. Dengan menemani membaca atau membaca bersama, pembaca cilik merasa bahwa mereka tidak sendiri. Tahapan kedua, pendamping memberikan waktu yang luasa pada pembaca cilik untuk mengutarakan apa yang sudah mereka dengar. Dengan membiarkan mereka berbicara, berdiskusi, bertanya, maka proses penerimaan informasi di dalam otak mulai aktif berkembang. Tahapan yang ketiga, pendamping mengizinkan pembaca cilik untuk membaca dengan versi mereka sendiri, boleh membaca diam dan atau membaca nyaring. Pada saat yang seperti ini, pembaca cilik merasa sangat dihargai untuk menentukan pilihannya sendiri. Tahapan yang terakhir adalah pembaca cilik menuangkan imajinasi mereka dalam bentuk tulisan atau pun gambar. Pada tahapan ini pendamping berfungsi sebagai mediator untuk mengapresiasi buah karya pembaca cilik. Misalnya, pendamping dapat mengapresiasi karya dengan cara memajang di dinding mading sekolah atau di ruang kelas, atau mengirimkan karya tersebut ke majalah anak. Meskipun apresiasi ini tampak sederhana tetapi hal ini sangat bermakna bagi pembaca cilik Sekolah Dasar. Masa-masa inilah yang mereka tunggu, yaitu masa pengakuan. Masa dimana keberadaan dan hasil karya mereka diakui oleh orang sekitar.

Jenis buku bacaan berbahasa Inggris yang diterapkan dapat berupa buku cerita *graded readers* atau buku cerita berjenjang. Buku ini memiliki jenjang level yang berbeda. Bagi pembaca cilik yang belajar Bahasa Inggris sebagai bahasa asing, maka buku berjenjang ini sangat bermanfaat. Memperkenalkan buku yang berlevel paling rendah sangat membantu pemerolehan bahasa Inggris bagi pembaca. Buku cerita berjenjang dapat berupa buku prin yang dibeli dari toko buku atau menggunakan *soft file* dari tautan buku tertentu yang menyajikan buku bacaan untuk anak Sekolah Dasar. Buku cerita berjenjang menawarkan gambar-gambar yang sangat menarik perhatian pembaca. Buku tersebut disajikan sesuai level pembaca cilik. Sebagai contoh, pada buku *Dolphin Readers* level pemula atau yang disebut dengan *starter level* memiliki ketebalan halaman kurang lebih 15 halaman dengan ditambah halaman kamus bergambar di halaman berikutnya. Setiap halaman hanya terdiri dari satu sampai dengan empat kalimat sederhana yang disertai dengan

gambar yang besar, kurang lebih setengah halaman. Contoh kalimatnya adalah "What is in the bush? What is it?". Halaman buku disajikan dengan nuansa yang berbeda. Misalnya jika halaman pertama berupa kalimat sederhana maka halaman kedua akan berupa latihan sederhana. Buku cerita berikutnya adalah level satu atau disebut dengan level one. Buku ini memiliki ketebalan halaman yang sama dengan level pemula dan diakhiri dengan kamus bergambar di belakang. Masing-masing halaman terdiri dari 3 kalimat. Contoh kalimatnya adalah "It is Monday. Look at David and Lisa. How's the weather?". Isi buku divariasikan antara cerita dan latihan. Sama halnya dengan buku level pemula yang memiliki susunan halaman cerita kemudian dilanjutkan dengan halaman latihan. Buku cerita ini memiliki level yang beragam. Namun pada penulisan ini, penulis membatasi penggunaan buku pada level pemula dan level 1 selama kurang lebih 1 bulan observasi.

Alasan penulis memilih buku cerita berjenjang diantaranya karena penulis sudah membaca, mengamati dan mengevaluasi buku tersebut sebelum digunakan, penulis juga mengujicobakan pada pembaca cilik untuk membaca buku tersebut sebelum penulis mengaplikasikannya pada kegiatan ekstrakurikuler membaca ekstensif. Ketika hasil uji coba buku pembaca cilik menunjukkan hasil bahwa pembaca cilik dapat menikmati membaca, menunjukkan ekspresi suka dengan ceritanya serta dapat menceritakan isi cerita dengan mudah maka penulis memilih buku tersebut untuk diterapkan pada kegiatan ekstrakurikuler membaca ekstensif. Dengan tujuan untuk menumbuhkembangkan Gerakan Literasi Sekolah melalui buku cerita maka pemilihan buku tersebut sangatlah tepat karena buku tersebut berisi kalimat yang sangat sederhana sehingga mudah dimengerti dan dapat mencipatakan kenyamanan pembaca cilik. Buku cerita bergambar sangat diminati oleh beberapa kalangan pembaca termasuk pembaca cilik Indonesia. Pada tahapan emergent literacy, ada empat model literasi kritis yang diperkenalkan. Empat model tersebut dapat ditemukan pada buku cerita berjenjang. Empat model tersebut adalah latihan identifikasi kata, latihan menghubungkan ide teks, latihan menggunakan teks dan latihan berpikir kritis (McLachlan et al., 2012). Hasil analisa isi buku pada Tabel 1.1 berkaitan dengan identifikasi kata sedangkan Tabel 1.2 berkaitan dengan menghubungkan ide teks. Keduanya digambarkan sebagai berikut:

**Tabel 1.1** Model Latihan Identifikasi Kata

Topik	<i>It is windy</i>
Petunjuk	<i>Trace and connect</i>
Latihan	<p>Peserta didik membaca kalimat ilustrasi yang terdiri dari 3 kalimat berkaitan dengan topik. Kalimatnya adalah (1) <i>It is Wednesday.</i> (2) <i>Look at David and Lisa.</i> (3) <i>How's the weather?</i></p> <p>Peserta didik mengubungkan gambar dengan kata yang disediakan dengan melihat gambar ilustrasi berdasarkan 3 kalimat yang disajikan.</p> <p>Peserta didik menarik garis dari kata ke gambar. Kata yang harus disesuaikan dengan gambarnya adalah: (1) <i>gloves</i>, (2) <i>hat</i>, (3) <i>boots</i>, (4) <i>coat</i>.</p>

**Tabel 1.2** Model Latihan Menghubungkan Ide Teks

Topik	<i>It is windy</i>
Petunjuk	<i>Circle yes or no</i>
Latihan	<p>Peserta didik membaca kalimat ilustrasi yang terdiri dari 3 kalimat berkaitan dengan topik. Kalimatnya adalah (1) <i>It is Thursday.</i> (2) <i>Look at David and Lisa.</i> (3) <i>How's the weather?</i></p> <p>Peserta didik melingkari antara <i>yes</i> atau <i>no</i> sesuai dengan kalimat yang disediakan.</p> <p>Peserta didik menjawab dengan melihat gambar yang disediakan. Gambar tersebut berupa gambar David dan Lisa dengan memakai <i>scarf</i>, <i>gloves</i>, <i>blue pants</i>, <i>dress</i>, <i>boots</i>, dan <i>coat</i>.</p>

Latihan identifikasi kata memberikan keleluasaan pembaca cilik untuk berpikir kritis. Latihan ini menghubungkan imajinasi dan ketepatan baik gambar maupun kata. Yang dapat dilakukan oleh pendamping pada latihan ini ialah dengan menyebutkan bagian-bagian gambar tanpa memberikan terjemahan ke dalam Bahasa Indonesia. Sedangkan latihan menghubungkan ide teks sangat berkaitan erat dengan latihan sebelumnya yaitu latihan identifikasi kata. Pada latihan menghubungkan teks, pembaca cilik memasuki tahapan berpikir yang lebih kritis dari sebelumnya. Pada latihan ini pembaca cilik diminta memberikan argumen mereka dengan menjawab *yes* atau *no* pada kalimat-kalimat yang disajikan. Pembaca cilik sudah menemukan dan membaca kata-kata tersebut pada latihan sebelumnya sehingga pada latihan ini pembaca cilik dapat memahami isinya dengan lebih mudah.

Uraian pada tabel berikut ini menjabarkan latihan menggunakan teks. Latihan tersebut berada pada level satu tingkat di atas latihan menghubungkan teks. Pembaca cilik berpikir lebih kritis dari latihan sebelumnya karena latihan ini memberikan pengalaman untuk menyesuaikan fakta yang ada yaitu menentukan kalimat deskripsi untuk David dan Lisa (Tabel 1.3). Sedangkan pada latihan berpikir kritis, pembaca cilik diberikan pengalaman untuk



mengingat-ingat informasi yang ada. Kemudian pembaca cilik dapat membuka halaman buku untuk mencocokkan informasi. Hal ini juga memberikan pengalaman berbahasa Inggris tentang penyebutan angka dengan benar. Sehingga informasi yang diterima saling terintegrasi (Tabel 1.3 dan Tabel 1.4).

**Tabel 1.3** Model Latihan MenggunakanTeks

Topik	<i>It is windy</i>
Petunjuk	<i>Circle</i>
Latihan	<p>Peserta didik membaca kalimat ilustrasi yang terdiri dari 3 kalimat berkaitan dengan topik. Kalimatnya adalah (1) <i>It is Friday.</i> (2) <i>Look at David and Lisa.</i> (3) <i>How's the weather?</i></p> <p>Peserta didik melingkari kata yang disediakan.</p> <p>Peserta didik menjawab dengan melihat gambar yang disediakan. Gambar tersebut berupa gambar David dan Lisa dengan memakai <i>pink gloves, blue pants, red boots, dan red coat.</i></p>

**Tabel 1.4** Model Latihan Berpikir Kritis

Topik	<i>It is windy</i>
Petunjuk	<i>Circle</i>
Latihan	<p>Peserta didik membaca kalimat yang disediakan. Kalimat tersebut adalah (1) <i>It is warm and sunny.</i> (2) <i>It is cold.</i> (3) <i>It is windy.</i> (4) <i>It is very hot.</i> (5) <i>It is cloudy and rainy.</i> (6). <i>It is foggy.</i></p> <p>Peserta didik melengkapi halaman sesuai dengan kalimat yang disediakan.</p> <p>Peserta didik menjawab dengan mencari letak halaman dari setiap kalimat yang disediakan.</p>

Informasi yang dijabarkan pada table 1.1 sampai dengan tabel 1.4 dapat disimpulkan bahwa detil isi buku cerita berjenjang yang digunakan pada kegiatan ekstrakurikuler membaca ekstensif layak untuk dijadikan media yang dapat menarik minat baca, memancing kegemaran membaca dan menghibur pembaca cilik sehingga upaya untuk mensukseskan Gerakan Literasi Sekolah dapat terwujud.

Selama proses kegiatan ekstrakurikuler membaca ekstensif, penulis melakukan observasi perkembangan pre reading activities yang dilalui oleh para pembaca cilik. Penulis memilih obervasi sebagai teknik pengumpulan data dengan menggunakan enam observation sheets atau lembar observasi untuk mengetahui tahap perkembangan pre reading activities para pembaca cilik. Seperti yang sudah disebutkan di awal bahwa pre reading activities yang dilalui oleh emergent readers pada tahapan emergent literacy terdiri dari

*letter knowledge, print awareness, phonological awareness, vocabulary, print motivation, dan narrative skill.*

Hasil analisa dari letter knowledge yaitu bahwa pembaca cilik berada pada proses tidak banyak mengalami kesulitan untuk mengingat dan mengenali bunyi huruf dalam isi cerita. Ketika mereka berada pada situasi yang santai dimana pendamping bertanya tentang bunyi huruf dari beberapa kata yang sudah disiapkan dan diambil dari isi cerita, para pembaca cilik memberikan respon yang berbeda-beda. Hal tersebut dituliskan dalam rincian table di bawah ini.

**Tabel 1.5** Hasil Analisa Pengetahuan Pembaca Cilik tentang *Letter Knowledge*

Kategori	Jumlah	Prosentase
sangat lancar	4	40%
salah satu	2	20%
salah dua	2	20%
salah semua	2	20%
tidak bisa sama sekali	0	0%
Total	10	100%

Dari tabel 1.5 dapat dirangkum bahwa *letter knowledge* sebagai bagian dari *pre-reading activities*, dapat berkembang dengan baik pada diri para pembaca cilik yang tergabung dalam kegiatan ekstrakurikuler membaca ekstensif.

Hasil analisa tentang print awareness selama kegiatan membaca buku cerita berjenjang yaitu bahwa print awareness mengantarkan pembaca cilik pada identifikasi kata. Print awareness berhubungan dengan pengetahuan alfabet dan konsep prin, konsep prin dengan fungsinya. Kesadaran untuk memahami kata dengan bagaimana kata itu bekerja dan memahami petunjuk pada setiap latihan sudah berkembang dengan sangat baik. Hasilnya adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.6** Hasil Analisa Pengetahuan Pembaca Cilik tentang *Print Awareness*

Kategori	Jumlah	Prosentase
sangat memahami	10	100%
memahami tetapi menemukan kesulitan	0	0%
tidak memahami	0	0%
Total	10	100%

Pada *print awareness*, pembaca cilik sudah dapat mengaitkan kata dengan fungsinya. Sebagai contoh yang ada dalam buku cerita berjenjang yang digunakan pada kegiatan ekstrakurikuler membaca ekstensif adalah I can see

clouds. It is cloudy. I can see rain. It is rainy. Dari 4 kalimat tersebut, pembaca cilik dapat menghubungkan pemahaman mereka pada kalimat yang disajikan. Ketika kalimatnya tertulis I can see clouds maka kalimat berikutnya adalah It is cloudy. Jika kalimatnya I can see rain maka kalimat yang berikutnya It is rainy. Tanpa mengenalkan arti kalimat ke dalam bahasa Indonesia, mereka dapat membiasakan arti dari petunjuk latihan yang ada.

*Phonological awareness* adalah kemampuan mendeteksi, mengidentifikasi dan memanipulasi struktur bunyi bahasa. *Phonological awareness* sangat berkaitan erat dengan *letter knowledge*. Pada dasarnya apabila seorang pembaca cilik tidak ada masalah dengan *letter knowledge* maka pembaca cilik juga tidak bermasalah dengan *phonological awareness*. Hasil analisa kemampuan *phonological awareness* pembaca cilik adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.7** Hasil Analisa Pengetahuan Pembaca Cilik tentang *Phonological Awareness*

Kategori <i>word repetition</i>	Jumlah	Prosentase
mengucapkan dengan sangat lancar	0	0%
mengucapkan dengan sedikit terbata-bata	7	70%
mengucapkan dengan sering mengulang setiap kata	3	30%
sulit mengucapkan semua kata	0	0%
Total	10	100%

Pembaca cilik mengalami kesulitan pada *phonological awareness* pada saat *read aloud* atau membaca nyaring cerita. Hasil dari pengamatan menunjukkan bahwa hal itu terjadi karena mereka berada pada tahapan sedang belajar bahasa Inggris dengan menggunakan buku cerita berjenjang pada kegiatan ekstrakurikuler membaca ekstensif. Sistem fonologi bahasa Inggris dan bahasa Indonesia sangat berbeda, sehingga pembaca cilik masih membutuhkan latihan dan pembiasaan untuk meningkatkan kelancaran dan kefasihan fonologi yang ada dalam bahasa Inggris.

Kosakata atau dalam istilah *pre reading activities* disebut sebagai vocabulary merupakan komponen yang paling utama dalam kelancaran berbahasa. Pengetahuan *vocabulary* yang dimiliki oleh pengguna bahasa dapat membantu mengembangkan kemampuan berbicara, mendengar, membaca dan menulis. Pengetahuan *vocabulary* sangat berhubungan dengan kebiasaan membaca. Capaian *vocabulary knowledge* pembaca cilik selama mengikuti kegiatan ekstrakurikuler membaca ekstensif adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.8** Hasil Analisa Pengetahuan Pembaca Cilik tentang *Vocabulary*

Kategori	Jumlah	Prosentase
selalu dapat menggunakan kata sesuai konteksnya	5	50%
kadang-kadang dapat menggunakan kata sesuai konteksnya	5	50%
tidak dapat menggunakan kata sesuai konteksnya	0	0%
Total	10	100%

Semakin lama proses membaca ekstensif berlangsung, semakin lama pembaca cilik terlibat pada kegiatan tersebut maka mereka akan semakin dapat membangun jaringan koneksi antara huruf dengan huruf yang lain hingga membentuk kata. Dalam kurun waktu 1 bulan, pembaca cilik sudah menunjukkan pengetahuan *vocabulary* nya. Hal ini mempercepat proses penerimaan kata hingga pada titik pemahaman karena pembelajaran *vocabulary* bukan mempelajari kata secara terpisah (*words in isolation*) tetapi memperoleh konsep kata. Suasana yang santai, menghibur, dan menyenangkan lah yang mengubah bertambahnya *vocabulary* para pembaca cilik.

Motivasi membaca yang dimiliki para pembaca cilik ketika mengawali kegiatan membaca ekstensif dilatarbelakangi oleh guru kelas yang memaparkan beberapa buku cerita di sela-sela kegiatan belajar mengajar berlangsung. Kemudian guru tersebut menawarkan beberapa buku cerita untuk dibawa pulang. Dari 2 kelas yang diampu, guru hanya menemukan 10 siswa yang sangat antusias meminjam buku cerita. Hingga akhirnya muncullah kegiatan ekstrakurikuler baru yang ditawarkan bagi siswa kelas 3 yaitu membaca ekstensif. Hasil pengamatan penulis tentang motivasi pembaca cilik terhadap buku cerita berjenjang selama 1 bulan adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.9** Hasil Analisa Pengetahuan Pembaca Cilik tentang *Print Motivation*

Kategori	Jumlah	Prosentase
suka dengan gambar dan ceritanya	10	100%
suka dengan gambar tetapi tidak suka dengan ceritanya	0	0%
tidak suka dengan gambar tetapi suka ceritanya	0	0%
tidak suka baik gambar maupun ceritanya	0	100%
Total	10	100%

Motivasi pembaca cilik untuk membaca buku cerita berjenjang didominasi karena gambar yang menarik. Tidak dipungkiri bahwa gambar sangat memikat siapa saja terlebih anak seusia pembaca cilik. Gambar mengubah suasana hati pembaca cilik, yang semula capek menjadi berseri. Selama kegiatan berlangsung, penulis mengamati pembaca cilik menikmati buku ceritanya karena mereka bisa saling menunjukkan gambar yang ada di buku cerita yang mereka pilih. Ketika pembaca cilik menikmati suasana dan

termotivasi maka mereka sedang mengembangkan kemampuan fungsi mentalnya seperti kemampuan mengingat, memusatkan perhatian, berpikir dan berimajinasi.

*Narrative skill* merupakan keahlian pada *pre reading activities* yang berkaitan dengan kemampuan menceritakan kembali dan kemampuan untuk memahami cerita secara lisan. Menceritakan kembali isi buku cerita yang pembaca cilik pilih bukan sesuatu yang mudah menurut hasil pengamatan yang penulis lakukan. Faktor penyebabnya adalah bahasa yang digunakan. Pembaca cilik sedang belajar Bahasa Inggris yang diterapkan pada kegiatan ekstrakurikuler membaca ekstensif dengan menggunakan buku cerita berjenjang. Rangkuman dari *narrative skill* pembaca cilik adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.10** Hasil Analisa *Narrative Skill* Pembaca Cilik

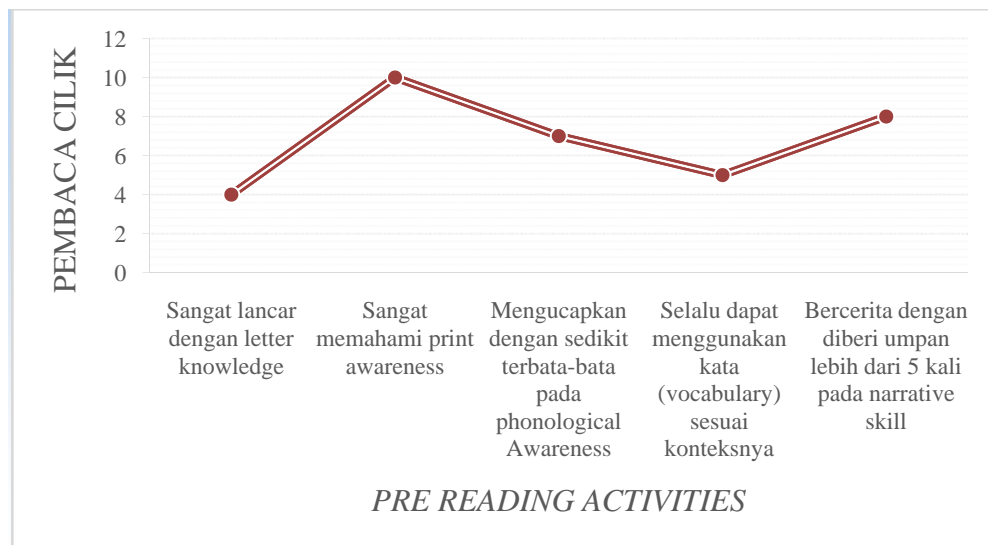
Kategori	Jumlah	Prosentase
bercerita tanpa harus diberi umpan	0	0%
bercerita dengan diberi umpan 5 kali saja	1	10%
bercerita dengan diberi umpan lebih dari 5 kali	8	80%
tidak dapat bercerita sama sekali	1	10%
Total	10	100%

Tidak dipungkiri jika pembaca cilik masih berada pada tingkat belum mampu bercerita tanpa harus diberi umpan. Pembaca cilik masih membutuhkan waktu lama lagi untuk mencapai tingkatan tersebut karena penulis melakukan pengamatan dalam kurun waktu 1 bulan saja. Pembaca cilik masih membutuhkan proses pembiasaan sehingga mereka tidak canggung lagi untuk menceritakan kembali isi buku ceritanya. Hal ini sangat wajar dialami oleh pembaca yang menggunakan bahasa Inggris bukan sebagai bahasa pertama atau kedua.

Selama proses kegiatan ekstrakurikuler berlangsung selama 1 bulan, penulis merangkum urutan *pre reading activities* yang dilalui pembaca cilik ketika menggunakan buku cerita berjenjang pada kegiatan ekstrakurikuler membaca ekstensif seperti yang termuat dalam figur 1.

## PENUTUP

Menjadi gemar membaca tidak dapat diciptakan dengan begitu saja karena pembaca cilik butuh melewati beberapa tahapan selama proses berlangsung. Tahapan *pre reading activities* yang sudah dilalui oleh pembaca cilik mengantarkan pembaca cilik menjadi pembaca yang benar-benar menikmati dunia membaca ekstensif melalui buku cerita berjenjang. Buku yang memiliki model latihan identifikasi kata, model latihan menghubungkan



**Figur 1** Tingkatan *Pre Reading Activities* Selama 1 Bulan

teks, model latihan menggunakan teks serta model latihan berpikir kritis telah mengubah cara pandang pembaca cilik bahwa membaca buku cerita berbahasa Inggris itu sulit dan tidak menarik. Pandangan tersebut sirna ketika mereka dapat menemukan dunia mereka seperti dunia tokoh dalam cerita.

Melalui kegiatan yang bersifat informal yang dikemas dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler membaca ekstensif, pembaca cilik mulai menunjukkan gairah membaca mereka. Motivasi sangat penting bagi pengembangan kegemaran membaca di era yang serba teknologi saat ini. Tidak perlu dihiraukan berapa banyak kata yang diterima, yang paling penting adalah seberapa mahir pembaca cilik menggunakan kata-kata yang ditemukan dalam buku cerita ke dalam konteks. Dengan melibatkan kata-kata tersebut ke dalam konteks, maka secara tidak langsung daya ingat pembaca cilik sangat bekerja. Gambar dalam buku cerita memudahkan pembaca cilik menghubungkan bahasa tulis dengan bahasa lisan dan kemampuan kosakata. Hal ini merupakan bukti bahwa gambar dapat merepresentasikan cerita dan buku cerita berjenjang dapat menjadi salah satu alternatif untuk mengantarkan pembaca cilik mensukseskan Gerakan Literasi Sekolah.

**DAFTAR PUSTAKA**

Brown, C. (2014). Language and Literacy Development in the Early Years: Foundational Skills that Support Emergent Readers. *Language and Literacy Spectrum*, 24, 35-49.

Bucaramanga, D. (2010). Teaching English through Stories: A Meaningful and Fun Way for Children to Learn the Language. *Profile Issues in Teachers' Professional Development*, 12(1), 95-106.

- Celik, B. (2019). A Study on the Factors Affecting Reading and Reading Habits of Preschool Children. *International Journal of English Linguistics*, 10(1), 101. <https://doi.org/10.5539/ijel.v10n1p101>
- Day, R. R. (2015). *Extending extensive reading*. 27(2), 294–301.
- Gunn, B. K., Simmons, D. C., & Kameenui, E. J. (2004). *Emergent Literacy: Synthesis of the Research*. 1–26.
- Marrapodi, J. (2013). What doesn't work for the lowest level literacy learners and why? *Apples – Journal of Applied Language Studies*, 7(1), 7–23.
- McLachlan, C., Nicholson, T., Fielding-Barnsley, R., Mercer, L., & Ohi, S. (2012). Literacy in Early Childhood and Primary Education. *Literacy in Early Childhood and Primary Education*, 15. <https://doi.org/10.1017/cbo9781139519397>
- Meade, A., & Van Duyl, D. (2013). How Young Children Learn to Read. *Daisies Early Education & Care Centre, May*, 1–12. <http://www.daisies.co.nz/daisies-publications-emergent-literacy.pdf>
- Siahaan, S. D. (2012). Using Story Reading Technique to Improve EFL Young Learners' Vocabulary. *JET (Journal of English Teaching)*, 2(3), 207. <https://doi.org/10.33541/jet.v2i3.57>

---

---

## **PENINGKATAN SDM TIM JURNALIS DESA MELALUI PELATIHAN MENULIS DALAM RANGKA POPULERKAN DESA WISATA BERGAS KIDUL, KABUPATEN SEMARANG**

**Sri Utami, Wijang Sakitri, Karsinah,  
Lusiana Puspita Sari, Rizki Annisa, Yayang Dede Sunrisa**

### **PENDAHULUAN**

Profil Desa Bergas Kidul secara administrasi kependudukan terdiri atas 7.130 jiwa yang terbagi dalam 7 RW (Rukun Warga) dan 42 RT (Rukun Tetangga) serta tersebar dalam 6 Dusun, yaitu Dusun Krajan, Dusun Kemloko, Dusun Srumbung, Dusun Sruwen, Dusun Kebunkliwon, dan Dusun Kenangkan. Desa Bergas Kidul secara geografis terletak dalam jalur wisata menuju pusat Wisata Alam Bandungan yang merupakan tujuan wisata yang sangat terkenal di daerah Jawa Tengah. Hal ini menjadikan Desa Bergas Kidul memiliki potensi yang bagus untuk dikembangkan menjadi Desa Wisata.



**Gambar 1.** Sileboh, Wisata Air di Desa Bergas Kidul, Kab. Semarang  
Sumber: Tim Pengabdian



Berbagai potensi dimiliki Desa Bergas Kidul, baik pada bidang kesenian, bidang kuliner, kerajinan, dan kelompok swadaya masyarakat. Pada bidang kesenian, Desa Bergas Kidul memiliki banyak kelompok seni yang masih aktif, diantaranya Kelompok Kesenian Rodat Suko Madyo yang bertempat di Dusun Kemloko, yang memiliki ciri khusus yaitu pada saat gerakan Tari Rodat dikombinasikan dengan gerakan bela diri. Selanjutnya kelompok kesenian Karawitan Langen Mudho Budhoyo yang bertempat di Dusun Sruwen, Kelompok kesenian Reog Sedyo Rukun yang bertempat di Dusun Kemloko. Kesenian Reog ini juga disebut Jathilan yang merupakan tari tradisional Jawa yang menampilkan sejumlah prajurit yang sedang menunggang kuda diiringi musik karawitan.

Selain potensi Seni di atas, Desa Bergas Kidul juga memiliki aneka kuliner khas, diantaranya Tempe, Bolu Kering, dan Olahan Jamur yang merupakan khas dari Dusun Kenangkan. Selain itu kuliner yang merupakan khas dari Dusun Sruwen adalah Balung Kluwuk, Ceriping Talas, dan Intip. Adapun kuliner khas dari Dusun Krajan berupa Widaran, Kuping Gajah, Kembang Goyang, Tumpi, Stik Kue Bawang, Keripik Bayam, Keripik Telo Ungu, Keripik Pisang, Kacang Telor, serta yang terbaru adalah Keripik Pegagan dan Stik Wortel. Sedangkan kuliner khas dari Dusun Krajan yaitu Pangsit Jagung, Keripik Tempe, dan Telur Asin. Khusus untuk Dusun Srumbung memiliki kuliner khas berupa Semprong, Sempe, dan Jenang Ketan.

Selain itu, potensi kerajinan yang berasal dari Desa Bergas Kidul, diantaranya adalah Bambu Unik, Patung Mozaik, dan Kerajinan Kayu yang terdapat di Dusun Krajan. Sedangkan kerajinan dari Dusun Sruwen adalah Kerajinan Rajut dan Kerajinan Sulam yang memproduksi berbagai barang kerajinan seperti tas, dompet, baju, topi, dan sepatu. Dusun lain yang memiliki potensi kerajinan adalah Dusun Srumbung, yaitu pemanfaatan barang bekas menjadi berbagai barang kerajinan seperti tas, dompet, dan cinderamata lainnya. Serta potensi kerajinan lainnya adalah kerajinan pembuatan Kandang Ayam yang berasal dari Dusun Kemloko.

Wisata alam yang dimiliki misalnya Taman Jamu, Pemandian Air Panas, Candi Ngempon, dll. Adanya potensi-potensi tersebut, pada tahun 2017, masyarakat Bergas Kidul membentuk Kelompok Sadar Wisata. Kelompok tersebut kemudian secara resmi diformalkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa Kidul Nomor 411.6/016/II/2017. Selain kelompok Sadar Wisata, beberapa kelompok lain pun dibentuk untuk pengembangan daerah Bergas Kidul yaitu di bawah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), terdapat KSM Bergas Sehat Berseri (BSB), KSM Srumbung Ngudi Waras, dan KSM Bank Sampah.

Dari berbagai potensi wisata yang ada di Desa Bergas Kidul, salah satu kelemahan yang ada adalah tidak adanya informasi lengkap di sosial media misalnya Google, Instagram, maupun Facebook. Walaupun selama ini pemerintah desa sudah memiliki laman Facebook, Instagram serta Youtube, namun pemanfaatannya belum optimal. Dengan terbatasnya informasi yang tersedia terkait Bergas Kidul, maka banyak masyarakat yang tidak mengetahui apa yang bisa dinikmati di desa ini meskipun potensi yang ada cukup baik. Menyebabkan kurangnya media sebagai penunjang promosi pariwisata Bergas Kidul, walau pada realitanya memiliki potensi yang cukup baik. Sehingga wisatawan yang datang pun sangat sedikit dan hanya orang-orang domestik saja.

## **PEMBAHASAN**

Meskipun Desa bergas Kidul memiliki potensi wisata yang cukup bervariasi, dan didukung dengan banyaknya Lembaga Swadaya Masyarakat serta Kelompok Sadar Wisata, namun terlihat bahwa potensi yang ada belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal. Sehingga belum dapat memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar. Sebagian masyarakat mungkin juga belum mengetahui dengan banyaknya potensi yang bisa dikunjungi baik potensi kuliner atau makanan khas, maupun wisata alamnya. Umumnya ketidaktahuan masyarakat juga dikarenakan kurangnya promosi terkait keunikan lokal daerah tersebut. Artinya hal ini berkaitan erat dengan sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan baik dalam hal mempromosikan daerahnya untuk calon wisatawan baik dari dalam negeri maupun luar negeri, maupun cara masyarakat khususnya anggota kelompok sadar wisata dalam memberikan pelayanan kepada para pengunjung.

Dalam mempromosikan wilayah, kaum milenial sekarang lebih banyak menggunakan media sosial baik menggunakan Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris. Untuk itu, tim pengabdian mengadakan kegiatan untuk membantu meningkatkan kemampuan, terkhusus kemampuan berkomunikasi bagi Tim Jurnalis Desa di desa Bergas Kidul, Kabupaten Semarang. Komunikasi sangat diperlukan untuk membantu masyarakat dalam hal ini adalah untuk mempromosikan tempat wisata tersebut. Berdasarkan rapat koordinasi dengan pemerintah desa Kabupaten Bergas Kidul, disepakati bahwa fokus pelatihan komunikasi untuk masyarakat adalah peningkatan kemampuan menulis para peserta, sehingga SDM warga desa Bergas Kidul dapat meningkat. Fokus tim pengabdian kepada masyarakat ini adalah memberikan pelatihan menulis deskriptif dan narasi.

Meskipun Desa bergas Kidul memiliki potensi wisata yang cukup bervariasi, dan didukung dengan banyaknya Lembaga Swadaya Masyarakat

serta Kelompok Sadar Wisata, namun terlihat bahwa potensi yang ada belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal. Sehingga sumber daya yang ada belum dapat memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar. Sebagian masyarakat mungkin juga belum mengetahui dengan banyaknya potensi yang bisa dikunjungi baik potensi kuliner atau makanan khas, maupun wisata alamnya. Umumnya ketidaktahuan masyarakat juga dikarenakan kurangnya promosi terkait keunikan lokal daerah tersebut. Artinya, hal ini berkaitan erat dengan sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan baik dalam hal mempromosikan daerahnya untuk calon wisatawan baik dari dalam negeri maupun luar negeri, maupun cara masyarakat khususnya anggota kelompok jurnalis desa dalam memberikan pelayanan kepada para pengunjung.

Berdasarkan permasalahan yang ada, tim pengabdian melakukan koordinasi lagi dengan penduduk lokal yang terlibat dalam promosi wisata desa Bergas. Tujuan kegiatan pengabdian tersebut adalah:

- a) Memberikan pemahaman terkait pentingnya mengenal daerah sendiri untuk dipromosikan kepada seluruh lapisan masyarakat melalui teks deskriptif dan narasi
- b) Mengetahui cara-cara mempromosikan daerah Bergas Kidul melalui Media Sosial.
- c) Meningkatkan kemampuan berkomunikasi dengan cara meningkatkan kemampuan dan keterampilan menulis Tim Jurnalis desa Bergas Kidul dalam Bahasa Indonesia sehingga dapat menarik wisatawan dalam negeri.

Sehingga fokus tim pengabdian kepada masyarakat ini adalah memberikan pelatihan menulis deskriptif dan narasi untuk tim jurnalis desa. Adapun manfaat kegiatan pengabdian adalah: 1) Meningkatkan keterampilan Tim Jurnalis Desa Bergas Kidul dalam menulis tentang potensi wisata yang ada di desa; 2) Memberikan kesempatan Tim Jurnalis Desa untuk kembali berlatih dan mengetahui kemampuan menulis mereka dalam menulis deskriptif dan narasi; 3) Memberikan *feedback* atau masukan terkait hasil tulisan mereka dalam pelatihan.

Dalam pelaksanaannya, beberapa hal yang dilakukan oleh tim pengabdian adalah sebagai berikut:

- a) Koordinasi Tim Pengabdian dengan Tim Desa Bergas Kidul

Tim Pengabdian kembali melakukan koordinasi dengan pihak Kelurahan Desa Bergas untuk menyesuaikan teknis dan jadwal pelatihan yang akan dilaksanakan. Teknis pelaksanaan yang telah disepakati dengan pihak Pemerintah Desa Bergas Kidul akan difokuskan kepada Tim Jurnalis Desa dimana nantinya akan diberikan:

1. Sosialisasi mengenai pentingnya mengidentifikasi potensi-potensi yang dimiliki desa untuk bisa dipromosikan dan membantu dalam proses identifikasi;
2. Modul berbahasa Indonesia yang berisi template dan instruksi dalam pembuatan redaksi yang tepat untuk bisa digunakan dalam mempromosikan wisata desa agar lebih informatif dan menarik, yang disesuaikan dengan media publikasi yang dimiliki desa;
3. Pelatihan dalam pembuatan redaksi berdasarkan materi modul;
4. Pembelajaran Bahasa Inggris dasar dalam meningkatkan kemampuan berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan dalam redaksi; dan
5. Pelatihan dalam mengenal kosa kata, istilah Bahasa Inggris yang bisa digunakan dalam pembuatan redaksi agar dapat dipromosikan ke kancah Internasional.



**Gambar 2:** Koordinasi dengan Aparat Desa Bergas Kidul  
*Sumber:* Tim Pengabdian

Target pada kegiatan pengabdian ini adalah 10 orang tim jurnalis desa, yang merupakan warga Desa Bergas Kidul. Terdiri dari berbagai macam latar belakang pekerjaan dan variasi umur, baik laki-laki maupun perempuan.

Mereka adalah orang-orang yang telah ditunjuk kantor Desa Bergas Kidul sebagai tim jurnalis yang bertugas sebagai promotor pariwisata yang ada di daerah setempat.

### **Promosi Pariwisata**

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata “promosi” mempunyai arti “perkenalan dalam rangka memajukan usaha, dagang, dan sebagainya”. Sedangkan “wisata” sendiri berarti “bepergian bersama-sama (untuk memperluas pengetahuan, bersenang-senang, dan sebagainya); bertamasya”. Promosi Pariwisata dapat diartikan sebagai salah satu program untuk mengenalkan suatu tempat yang dapat dijadikan tujuan masyarakat dalam bepergian Bersama-sama dalam rangka memperluas pengetahuan, bersenang-senang dan sebagainya. Pengenalan obyek ini bisa berupa obyek, produk, jasa, potensi masyarakat, kebudayaan lokal, dll. Wolah (2016) telah membuktikan bahwa kegiatan promosi memegang peranan penting dalam mendasari para wisatawan untuk memilih tempat atau produk dan bahkan kebudayaan mana yang ingin mereka kunjungi atau pelajari lebih lanjut dalam rangka memperluas wawasan atau pengetahuan mereka.

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dalam dua dekade terakhir mengubah kehidupan manusia, menyebabkan mudahnya akses informasi melalui media digital. Inilah alasan munculnya fenomena pergeseran budaya dari sistem manual ke dunia maya dan visual, berpengaruh pula di sektor pariwisata, terutama wisatawan Indonesia yang milenial (Heliany: 2019). Adanya pergeseran ini, menyebabkan penggunaan media sosial semakin marak digunakan. Media sosial menjadi sumber informasi utama pada setiap pengambilan keputusan untuk berpariwisata, dimana diciptakan serta diunggah oleh pengguna lain yang disebut sebagai User Generated Content (UGC). Informasi yang diunggah ini, akan dilihat dan menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan para wisatawan (Dwityas: 2016). Sehingga, kegiatan promosi yang dilakukan, hendaknya mengikuti perubahan yang terjadi di masyarakat, yaitu melalui media-media sosial, seperti Instagram, Facebook, maupun Youtube.

### **Menulis Teks Deskriptif**

Menulis merupakan salah satu keterampilan berbahasa seseorang yang sangat penting. Menulis merupakan suatu aktivitas “melahirkan pikiran atau perasaan” (KBBI). Menulis juga sebagai “proses kreatif memindahkan gagasan ke dalam lambing-ambang tulisan” (Semi :2003) dan sebagai aktivitas aktif produktif yang menghasilkan Bahasa (Burhan Nurgiantoro: 1988). Menulis merupakan keterampilan yang diperoleh tidak secara otomatis namun

merupakan rangkaian dari tahapan dan proses yang terus-menerus (Solehan: 2008). Sehingga dapat disimpulkan bahwa menulis merupakan kegiatan olah pikir, olah rasa, gagasan (Hasim: 2017) yang dituangkan dalam sebuah tulisan sehingga melahirkan suatu bacaan atau teks.

### **Teks Deskriptif, Narasi dan *Free Writing* (Menulis Bebas)**

Menurut jenisnya, salah satu teks yang sangat penting dipelajari adalah teks deskripsi. Teks deskripsi merupakan bacaan yang menggambarkan suatu obyek secara jelas dan terperinci. Penggambaran suatu obyek dijabarkan dalam pertanyaan ‘Siapa’, ‘Apa’, ‘Kenapa’, ‘bagaimana’ ‘dimana’ dan ‘Kapan’. Dengan menjabarkan hal tersebut, sebuah tulisan dianggap informatif dan menarik. Tulisan tidak meninggalkan pertanyaan besar bagi pembaca sehingga pembaca dapat menikmati tulisan tersebut.

Sedangkan narasi adalah salah satu jenis informasi yang penyampaiannya secara tepat tentang suatu peristiwa berdasarkan data yang sebenarnya yang ditujukan untuk memperluas pengetahuan atau suatu kisah sehingga pembaca seolah-olah melihat kejadian dimaksud. Keraf (2001), ciri-ciri teks narasi adalah menonjolkan unsur perbuatan atau tindakan, dirangkai dalam urutan waktu, berusaha menjawab pertanyaan apa yang terjadi, dan ada konflik.

Kemudian, konsep *Free Writing* atau Menulis Bebas dan banyak sekali dibahas dan bahkan menjadi bahasan utama penulis Hernowo Hasim. Menurut Hernowo, *Free Writing* atau Menulis Bebas merupakan cara untuk “membuang” pikiran melalui tulisan selama 10 menit. Ketika seseorang mempunyai banyak persoalan dalam menulis bahkan sejak akan dimulainya kegiatan menulis, maka *Free Writing* atau Menulis Bebas selama 10 menit-sudah terbukti- dapat menyingkirkan berbagai macam keluhan siapa pun yang ingin belajar menulis atau bahkan bagi penulis. *Free Writing* membantu peserta dalam membuka mental block mereka ketika ingin memulai menulis atau tidak mempunyai ide menulis.

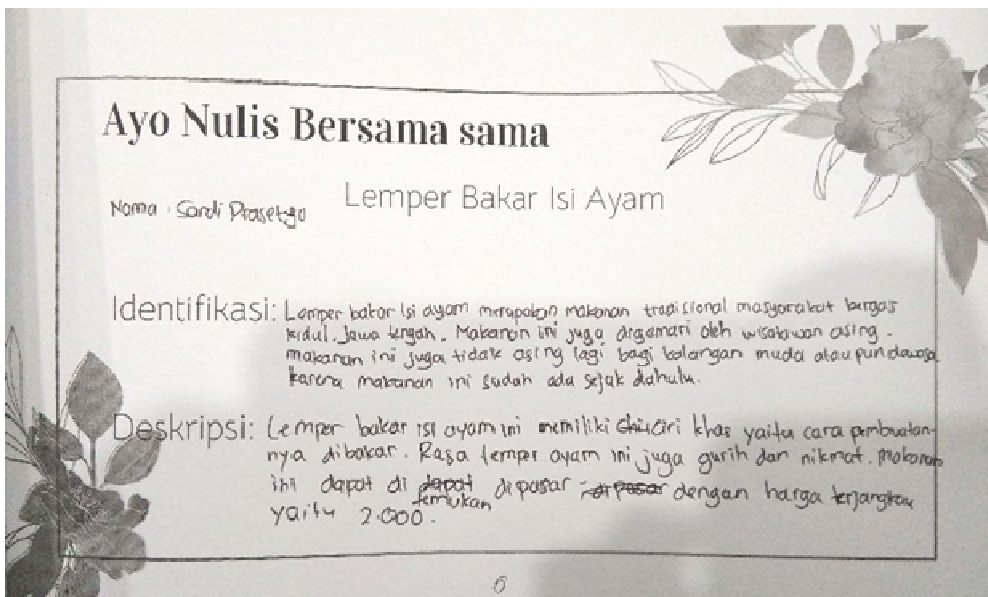
Hernowo percaya bahwa mempraktikkan menulis Setiap hari selama 10 menit mempunyai banyak manfaat. Pertama adalah akan membuka pikiran bagi para calon penulis ataupun penulis. Gerakan tangan ke laptop maupun gadget ternyata sebagai jalan untuk membuka pikiran kita dan akhirnya otot-otot yang menjadi sarana membuka pikiran kita yang tadinya tidak dapat atau susah dituangkan ke dalam tulisan. Kemudian, manfaat kedua adalah Menulis 10 menit Setiap hari membantu calon penulis untuk lebih mudah dalam mengalirkan pikiran. Tangan kita yang aktif dapat mendesak pikiran untuk menuangkan sesuatu dalam bentuk tulisan. Manfaat ketiga, *free writing* merupakan salah satu cara jitu untuk mengasah keterampilan seseorang.

Keterampilan merupakan hal yang tidak dibawa dari lahir namun merupakan sebuah latihan yang terus-menerus.

### Pelaksanaan Pelatihan dan Hasil

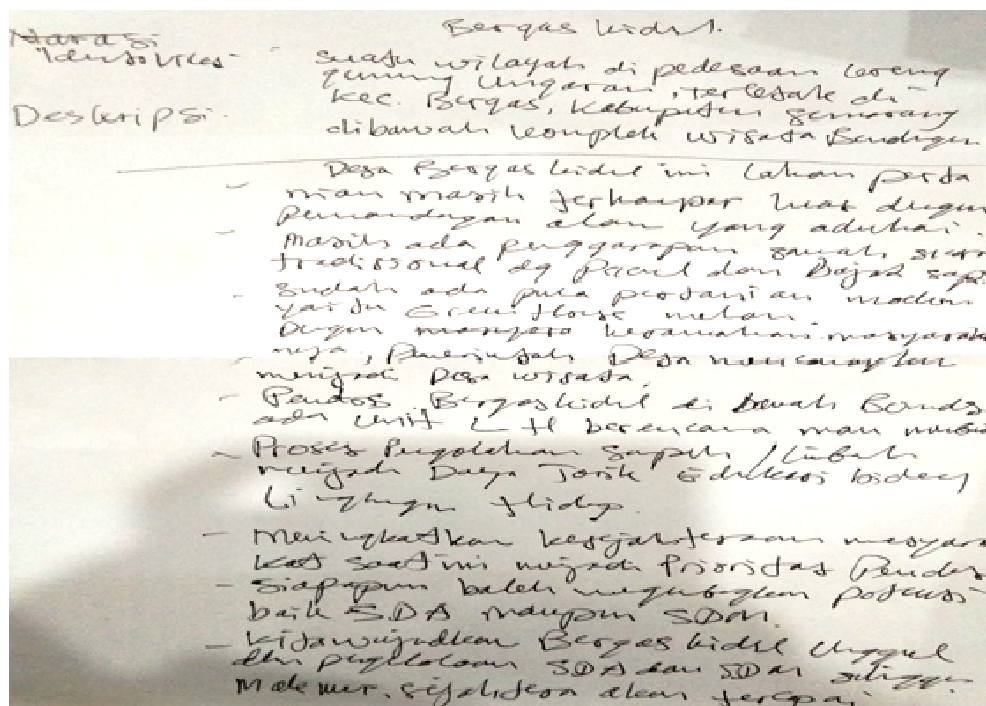
Setelah melakukan koordinasi dengan pihak desa, maka tim melaksanakan rangkaian kegiatan pelatihan.

Dalam materi penulisan deskriptif, dilakukan *brainstorming* untuk bisa mengulik, mengidentifikasi produk, tempat, atraksi khas desa yang menjadi unggulan. Kemudian peserta melakukan praktik langsung dalam mendeskripsikan salah satu produk khas yang bisa dijadikan oleh-oleh, yaitu Lemper Bakar isi Ayam, menurut tata bahasa yang informatif, jelas dan juga eksploratif. Gambar 3 merupakan ilustrasi salah satu tulisan peserta dalam pelatihan menulis deskriptif. Saat penulisan, peserta diberikan obyek yang akan ditulis untuk memudahkan mereka melihat dan menjabarkan yang akan ditulis.



**Gambar 3:** Contoh Latihan awal menulis deskriptif mendeskripsikan obyek makanan khas

Kemudian, peserta menulis deskriptif tentang obyek wisata yang ada di desa Bergas Kidul (Gambar 4). Tulisan pada Gambar 4 merupakan salah satu contoh tulisan deskriptif dari peserta pelatihan tentang Bergas Kidul. Dilihat dari hasil tulisan, peserta terlihat sudah dapat memahami teks deskriptif dan bisa langsung mengunggah tulisan tersebut ke media sosial yang dimiliki desa sebagai sarana promosi untuk mengenalkan kepada masyarakat luas tentang desa Bergas.



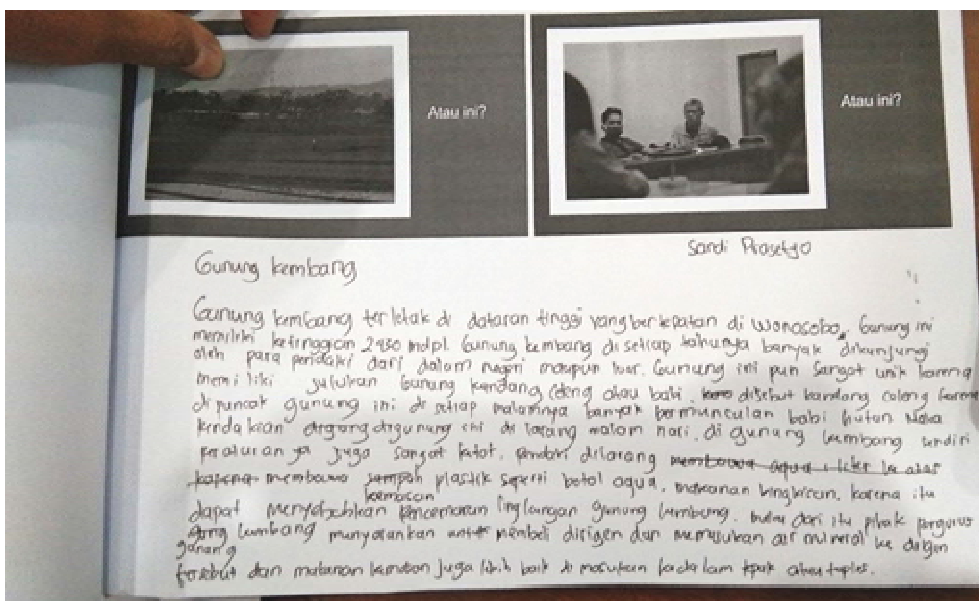
**Gambar 4:** Contoh Hasil Teks Deskriptif dari Peserta Pelatihan tentang Bergas Kidul

Setelah pelatihan menulis deskripsi, peserta kemudian diberikan kesempatan untuk praktik menulis bebas (*free writing*). Dalam materi penulisan bebas (*free writing*), peserta diberikan motivasi serta praktik latihan setiap hari untuk menulis dalam waktu 10 menit. Tulisan dapat disampaikan dengan gaya apapun dan bebas secara tema, guna aktualisasi skill penulisan dimana nantinya dapat dihubungkan dengan tujuan promosi daerah Bergas Kidul.

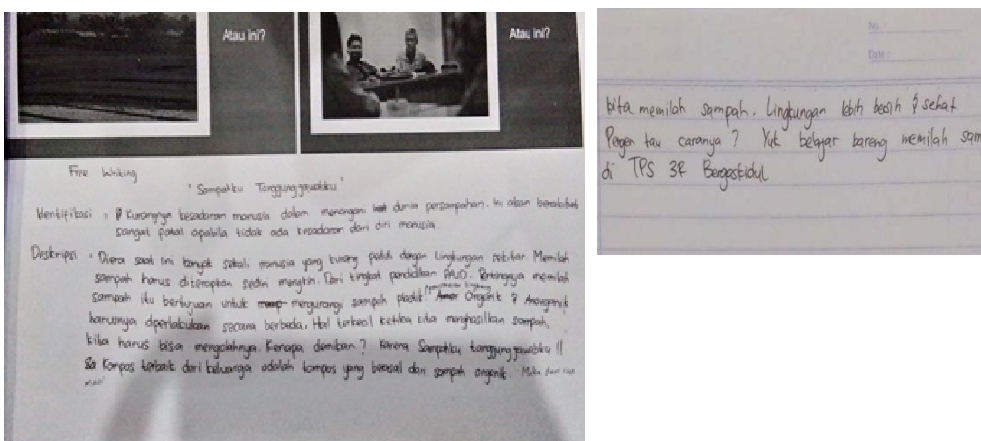
Gambar 5 merupakan contoh hasil tulisan peserta ketika diminta untuk menuliskan apapun yang ingin mereka tuliskan. Salah satu yang ditulis adalah Gunung kembang.

Kemudian, Gambar 6 merupakan hasil tulisan *free writing* peserta yang menceritakan tentang salah satu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat desa Bergas yaitu pengolahan sampah yang disebut TPS 3R Bergas Kidul. Teks ini mengajak masyarakat untuk mengolah sampah dengan baik seperti yang sudah dilakukan oleh masyarakat Desa Bergas Kidul.





Gambar 5: Contoh Hasil Tulisan Free Writing Peserta



Gambar 6: Contoh Hasil Tulisan Free Writing Peserta

Setelah pelaksanaan kegiatan pengabdian, ketua Tim jurnalis desa, Bapak Ngadiyono, berkomitmen untuk tetap membudayakan menulis bagi semua anggota terutama menulis khusus untuk promosi wisata desa sehingga desa wisata Bergas dapat lebih dikenal oleh masyarakat luas. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan manajemen tim yang bagus dan solid untuk tetap konsisten melakukan promosi desa wisata Bergas Kidul baik wisata alam, budaya, makanan, maupun kerajinan.



**Gambar 7:** Foto Bersama Tim dan Peserta

## KESIMPULAN

Desa Bergas Kidul memiliki banyak potensi pariwisata, namun promosi terkait objek-objek wisata tersebut belum optimal. Walaupun terdapat Kelompok Sadar Wisata yang ada di desa, nyatanya belum mampu secara optimal dalam mempromosikan wisata setempat. Seperti terbatasnya informasi mengenai Bergas Kidul dan pariwisata yang ada, walaupun desa sudah memiliki laman media sosial seperti Facebook, Instagram, serta Youtube. Meskipun demikian, banyak unggahan yang tidak disertai tulisan yang informatif.

Berdasarkan pelatihan yang sudah dilaksanakan, maka tim pengabdian dapat mengambil kesimpulan bahwa:

- 1) promosi wisata desa Bergas Kidul masih belum optimal disebabkan karena masih perlu ditingkatkannya SDM tim yang menaungi promosi wisata desa. Salah satu tim promosi ini adalah tim jurnalis desa. Setelah pelaksanaan pengabdian, ditemukan bahwa masih perlunya pelatihan dan pendampingan bagi tim jurnalis agar lebih meningkatkan kemampuan menulisnya
- 2) Manajemen tim jurnalis Desa Bergas perlu mendapatkan dukungan penuh dari desa untuk melaksanakan komitmen mereka dalam mempromosikan desa Wisata Bergas di media sosial yang ada. Salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan koordinasi secara berkala dan terukur sehingga setiap anggota dapat selalu *update* terhadap informasi perkembangan desa.

- 3) Bagi tim pengabdian dari UNNES maupun perguruan tinggi lainnya yang ingin berkontribusi dalam pemabagunan desa Bergas Kidul, maka perlu melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan aparat desa dan kemudian bisa melakukan *need assessment* sebelum terjun ke lapangan. Dalam hal ini, pengabdian yang disarankan adalah manajemen organisasi tim jurnalis yang tidak hanya melibatkan warga tapi juga aparat desa yang berkompeten dan berkomitmen untuk memajukan desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Burhan Nurgiyantoro. 1988. Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum Sekolah. Yogyakarta BPFE.
- Wolah, Ferni Fera Ch. 2016. Peranan Promosi dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Poso. *Acta Diurna*. 5 (2). 23-40.
- Semi, Athar. 2003. Menulis Efektif. Padang: Angkasa Raya.
- Shaeda Isani, « Brian Paltridge, Sue Starfield (eds.), *The Handbook of English for Specific Purposes* », *ASp* [Online], 64 | 2013, Online since 01 November 2013, connection on 19 April 2019. URL: <http://journals.openedition.org/asp/3806>
- Yulianto, Ahmad; Karsinah, Amidi. 2018. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Bank Sampah Di Desa Bergas Kidul Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang. Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat. LP2M. UNNES
- Dwityas, Ninditya Aisyah. 2016. Komunikasi dan Pariwisata: Peran User Generated Content bagi Traveler dalam Media Sosial. *Jurnal Simbolika* Volume 2 Nomor 1 Maret hal. 1-11
- Solehan T.W, dkk. 2008. Pendidikan Bahasa Indonesia di SD. Jakarta: Universitas Terbuka
- Helianny, Ina. 2019. Wonderful Digital Tourism Indonesia dan Peran Revolusi Industri dalam Menghadapi Era Ekonomi Digital 5.0. *Journaldestinesia* Vol. 1 No. 1 September hal. 21-35
- Keraf, Gorys. 2001. Komposisi. Semarang: Bumi Putera.
- Hasim, Hernowo. 2017. Free Writing Mengejar kebahagiaan dengan Menulis. Yogyakarta: Bentang Pustaka.
- Helianny, Ina. 2019. Wonderful Digital Tourism Indonesia dan Peran Revolusi Industri dalam Menghadapi Era Ekonomi Digital 5.0. *Journaldestinesia* Vol. 1 No. 1 September hal. 21-35
- Keraf, Gorys. 2001. Komposisi. Semarang: Bumi Putera.
- Semi, Athar. 2003. Menulis Efektif. Padang: Angkasa Raya.

- Shaeda Isani, « Brian Paltridge, Sue Starfield (eds.), *The Handbook of English for Specific Purposes* », ASp [Online], 64 | 2013, Online since 01 November 2013, connection on 19 April 2019. URL : <http://journals.openedition.org/asp/3806>
- Solehan T.W, dkk. 2008. Pendidikan Bahasa Indonesia di SD. Jakarta: Universitas Terbuka
- Wolah, Ferni Fera Ch. 2016. Peranan Promosi dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Poso. *Acta Diurna*. 5 (2). 23-40.
- Yulianto, Ahmad; Karsinah, Amidi. 2018. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Bank Sampah Di Desa Bergas Kidul Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang. Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat. LP2M. UNNES.

---

## TANTANGAN GURU DAN PENDIDIKAN KEGURUAN DI ERA PERUBAHAN

Pipit Novita

### PENDAHULUAN

*Terpujilah*

*Wahai engkau ibu bapak guru*

*Namamu akan selalu hidup*

*Dalam sanubariku*

*Semua baktimu akan kuukir*

*Di dalam hatiku*

*Sebagai prasasti terima kasihku*

*Tuk pengabdianmu*

*Terpujilah wahai ibu bapak guru*

*Namamu akan selalu hidup dalam sanubariku*

*Semua baktimu akan kuukir di dalam hatiku*

*Sebagai prasasti terima kasihku*

*Tuk pengabdianmu*

*Engkau bagai pelita dalam kegelapan*

*Engkau laksana embun penyejuk dalam kehausan*

*Engkau patriot pahlawan bangsa tanpa tanda jasa*



(Hymne Guru ciptaan Sartono)

Penggalan lagu hymne guru ini mengingatkan bahwa setiap kita bisa seperti sekarang karena jasa guru sehingga mereka dikenang sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Tapi apakah pahlawan tanpa tanda jasa ini dihargai sebagai pahlawan atau ini adalah slogan atau sekedar kata penghibur atas kerja keras mereka? Tentunya dalam kenyataannya kalimat penghargaan tidak cukup untuk membuat guru bertahan di pekerjaan yang penuh tantangan ini.

Guru tidak pernah mempersoalkan tanda jasa, tapi penghargaan yang harus diterima oleh guru, mutlak adanya. Penghargaan yang bukan hanya berasal dari kata-kata tapi tindakan yang mendukung kepentingan guru misalnya seperti penghasilan yang cukup untuk hidup layak, sehingga ada sinkronisasi antara sebutan pahlawan dan bagaimana pahlawan diperlakukan.

Pendidikan keguruan sebagai institusi dimana calon guru belajar tidak kalah pentingnya dengan guru itu sendiri. Kadang esensi pendidikan keguruan dipertanyakan ketika kesempatan untuk menjadi guru dan sertifikasi terbuka untuk siapa saja, termasuk mereka yang bukan berasal dari pendidikan keguruan. Persaingan untuk mendapatkan pekerjaan mengajar juga tidak mudah, karena lulusan pendidikan keguruan bukan hanya bersaing dengan sesama lulusan pendidikan keguruan tapi juga lulusan non pendidikan keguruan. Ada berbagai macam tingkat akreditasi dari pendidikan keguruan, ada yang A, B, C ataupun dalam proses akreditasi. Dan setiap tahunnya pendidikan keguruan dari berbagai tingkat akreditasi ini meluluskan calon guru yang sebagian besar dari mereka akan mengajar anak-anak Indonesia penerus bangsa. Bagaimana kita menjamin kualitas lulusan pendidikan keguruan dari berbagai macam tingkat akreditasi yang berbeda ini sehingga bisa menjadi guru yang berkualitas? Di era perubahan ini guru dan pendidikan keguruan mempunyai banyak tantangan untuk menjadi berkualitas.

## **PEMBAHASAN**

Guru adalah pahlawan yang menjadi ujung tombak di garis depan untuk mendidik anak-anak Indonesia. Indonesia yang kompleks dilihat dari sudut pandang geografis, ekonomi, sosial dan budaya. Ditambah dengan jaman yang selalu berubah yang menuntut guru untuk bisa mengikuti perkembangan jaman. Dan tentunya kita semua bisa melihat bagaimana pandemi Covid 19 memaksa guru untuk berubah. Seketika semua pembelajaran menjadi *online*. Pembelajaran online bukan hanya sekedar opsi pada situasi ini, keadaan memaksa pembelajaran *online* menjadi keharusan. Hal ini mengingatkan kita semua bahwa yang konstan adalah perubahan. Perubahan jaman menjadi salah satu tantangan guru di era perubahan ini diantara tantangan-tantangan lain yang harus guru hadapi diantaranya, teknologi, geografis, ekonomi serta perubahan di dunia pendidikan.

### **Tantangan Guru**

Teknologi adalah salah satu tantangan guru dimana guru harus bersaing untuk merebut perhatian sang anak didik yang terbiasa dengan interaktif games yang ada di handphone atau video pembelajaran di Youtube. Tidak terelakan bahwa saat ini guru bukan hanya satu-satunya sumber untuk belajar.

Dengan teknologi, anak bisa belajar apa saja dimana saja. Walaupun sebagian besar material ada di internet tapi guru tetap diperlukan di era teknologi ini. Google tidak memahami karakter siswa, tidak memperdulikan apakah siswa mempunyai masalah yang mempengaruhi kognitif mereka, tidak juga mengajarkan pada mereka bagaimana bersikap terhadap informasi yang ada. Guru ada dikelas sebagai fasilitator untuk memberikan ilmu dan wawasan diluar materi pembelajaran. Guru ada dikelas bukan hanya berfokus kepada materi atau learning objectives tapi guru perduli pada prosesnya, perduli pada individu-individu yang terlibat didalamnya, perduli pada strategi pembelajaran apa yang terbaik untuk siswanya. Guru memahami karakter siswa, menjawab pertanyaan bahkan diluar lingkup pelajaran, ada komunikasi dua arah yang terjalin disamping *personal and affective approach* yang tidak bisa digantikan oleh Google. Guru memfasilitasi interaksi dan kolaborasi yang terjadi di ruang kelas, seperti diskusi atau kerja kelompok dimana anak-anak berinteraksi dan menggunakan social intelligence mereka. Belajar bukan hanya untuk menguasai materi tetapi ada proses sosial di dalamnya, sehingga anak bisa belajar tentang bersikap, perbedaan pendapat dan kolaborasi. Kebersamaan dan suasana diskusi di ruang kelas adalah hal berharga yang tidak tergantikan oleh *zoom meeting* manapun.

Guru bisa menjadi duta digital literasi dan pemikiran kritis. Sehingga anak-anak bisa menggunakan teknologi tetapi juga bisa mengkritisi teknologi apa yang bermanfaat dan apa yang merugikan. Guru bisa memberikan pelajaran untuk bisa memfilter informasi dengan logika, etika dan pemikiran yang kritis. Memahami bahwa berita harus di cek kebenaran faktanya. Tidak serta merta karena ada di televisi, internet atau Whatsapp group menjadi kebenaran yang mutlak. Sehingga mereka tidak terbiasa untuk *memforward* pesan tanpa mengerti apa yang terjadi, atau berargumentasi dan membuat teori tanpa mengerti apa yang mereka bicarakan atau kenyataan dilapangan. Yang paling parah adalah mudah dihasut dan mudah menghakimi dan akhirnya berujung dengan aksi anarkis. Guru bisa memberikan pemahaman bahwa walaupun mereka bebas berpendapat tetapi ada koridor dan rambu-rambu yang harus dijunjung tinggi seperti etika, hukum dan kebenaran. Guru juga bisa menjadi narasumber dengan memberikan sumber-sumber yang menarik untuk anak-anak mempelajari pelajaran dan bisa ditelusuri di waktu luang mereka. Jadi PR yang diberikan bukan hanya pekerjaan rumah yang ditulis tetapi menggali keingin tahaun mereka untuk mempelajari bahan tersebut. Sehingga siswa mempunyai ketertarikan dan kepemilikan terhadap proses pembelajaran, *a sense of belonging to their own learning*.

Didalam kelas teknologi adalah sarana bukan tujuan. Yang menjadi sasaran adalah bukan permainannya tetapi tetap pada tujuan pembelajarannya. Menonton video dikelas dalam waktu yang lama tanpa tugas yang jelas,

sementara guru sibuk dengan hal lain, sangat merugikan waktu anak. Pada level sekolah menengah dan atas, handphone disekolah bisa dilihat sebagai salah satu alternative sarana pembelajaran ketimbang dianggap sebagai gangguan selama pembelajaran itu terstruktur, terukur dan tujuan pembelajarannya jelas. Kahoot, padlet dan quizlet adalah beberapa hal yang bisa dipakai untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan hidup. Penguasaan teknologi adalah salah satu komponen utama dari pengetahuan yang perlu dimiliki oleh guru (Mishra & Koehler, 2006). Dengan berbagai ragam webinar, Youtube atau berbagai sumber online lainnya guru bisa belajar teknologi baru atau berbagai topik yang mereka minati dari manapun selama mereka punya akses internet. Kita semua menyadari kecanggihan teknologi saat ini. Satu hal yang pasti adalah, anak-anak yang kita didik sekarang ini akan mengalami jaman dengan teknologi yang lebih canggih dari sekarang. Sebagai pendidik yang bertanggung jawab mempersiapkan generasi yang akan datang, sudah seharusnya kita membuat anak terekspos dengan teknologi dengan pembelajaran yang ada. Contoh sederhana nya dengan tugas kelompok mendisain poster atau video pembelajaran. Yang terpenting bukan pada hasil akhirnya, tapi pada proses nya dimana anak-anak berdiskusi, mengembangkan ide kreatif nya dan belajar mandiri tentang teknologi dan media. *Let's cherish the joy of learning!*

Pandemi Covid 19 melakukan percepatan terhadap penguasaan teknologi pendidikan maupun online learning, dimana jarak dan waktu bukan lagi kendala untuk mengikuti kelas. Memang hasilnya tidak akan pernah sama, tapi situasi yang kita lalui bersama menyadarkan kita bahwa kita bisa menguasai teknologi baru. Hal ini merubah cara pandang kita bahwa teknologi baru itu susah dan memberatkan. Faktanya adalah akan selalu ada hal baru, teknologi, metode atau pembelajaran baru. Tidak berarti semua hal baru cocok untuk diterapkan dikelas. Yang perlu ditekankan adalah tujuan pembelajaran itu sendiri, efektifitas dan dampak terhadap pembelajaran siswa. Apapun pembelajaran yang dilakukan baik tatap muka, online ataupun *blended learning* tujuan akhirnya adalah siswa. Apakah siswa akan belajar hal baru? apakah siswa akan lebih tertarik dengan pelajaran? apakah siswa akan lebih menikmati proses pembelajaran? apakah siswa menjadi lebih mudah mengerti dan hasil belajar menjadi lebih baik? Tentunya dalam hal ini guru lebih tahu tentang situasi dan kondisi siswa. *Context matters, there is no such thing as one size fits all.*

Selain itu, karena Indonesia adalah negara kepulauan, yang terdiri dari perkotaan, pedesaan dan daerah terpencil, tentunya ekspektasi tentang penguasaan teknologi di daerah pedesaan dan daerah terpencil merupakan tantangan tersendiri bagi guru disamping tantangan-tantangan lainnya yang mereka hadapi. Kondisi geografis Indonesia adalah anugrah pada satu sisi dan tantangan di sisi lainnya. Disaat anak-anak kita dengan nyaman belajar diruang



kelas, naik kendaraan untuk mencapai sekolah. Ada jutaan anak diluar sana yang berjuang untuk bisa datang kesekolah dan belajar di ruangan yang jauh dari kesan nyaman. Gambar dibawah ini mengingatkan kita bahwa pendidikan yang kita dapat adalah suatu hal yang istimewa.



(Sumber: Asli Indonesia, 2018; Herry, 2012; Jawa Pos, 2015; Wiyanti, 2015)

**Gambar 1:** Tantangan infrastruktur di daerah

Disaat kita berpacu mengikuti teknologi dan perkembangan jaman, di tempat lain masih ada anak-anak yang masih berjuang untuk suatu hal yang mendasar, pergi ke sekolah. Tantangan untuk guru di daerah terpencil bukan hanya geografis seperti lokasi yang sulit untuk menjangkau sekolah atau sarana dan prasarana yang minim disekolah tetapi juga ekonomi. Tantangan ekonomi untuk diri mereka sendiri dan juga tantangan ekonomi dari orang tua murid yang lebih suka anaknya membantu mencari uang daripada melanjutkan sekolah. Indonesia bukan hanya Jakarta, ketika berbicara pendidikan di Indonesia, tentunya itu harus mencakup seluruh pelosok nusantara. Para guru dipedesaan dan daerah terpencil pada saat yang bersamaan sama-sama mendidik anak Indonesia seperti kolega mereka di daerah perkotaan. Tapi bagaimana dengan kehidupan mereka?

Terlepas dari hasil penelitian yang menyatakan bahwa sertifikasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap hasil belajar siswa (de Ree, Muralidharan, Pradhan, & Rogers, 2018; Feng & Sass, 2017; Kusumawardhani, 2017; Triyanto, 2012), sertifikasi adalah harapan kesejahteraan untuk para guru, walau untuk mencapainya tidak mudah. Ada kalanya guru di daerah yang terpilih untuk mengikuti PPG (Program Profesional Guru) memiliki keadaan finansial yang terbatas, sebagian besar guru terpilih dari daerah mungkin mengalami kesulitan untuk bisa bertahan belajar di kota tujuan. Dan merupa-

kan tantangan tersendiri bagi para pengajar program PPG untuk mengajar para guru yang tidak terlalu terekspos dengan penggunaan teknologi dan penguasaan materinya masih kurang. Dan banyak guru-guru di daerah yang mengajar bukan karena kualitas *expertise* di bidangnya tapi karena kebutuhan dan memang itu yang ada. Kualitas guru adalah isu nyata diseluruh pelosok Indonesia yang diharapkan bisa meningkat dengan *professional development*. Tidak mudah bagi guru memikirkan cara untuk meningkatkan *professional development* ketika mereka dibayangi kekhawatiran hidup kekurangan dan tantangan finansial lainnya. Dan disaat yang bersamaan kita mempertanyakan kenapa hasil PISA (*Program for International Student Assessment*) kita selalu rendah (OECD, 2019).



(Sumber: Detiknews, 2019)

**Gambar 2:** Hasil PISA selama dua puluh tahun terakhir

Kualitas pendidikan adalah isu yang sangat erat berkaitan dengan faktor geografis, ekonomi, social, budaya, politik dan juga sistem pendidikan. Mungkin dengan konteks yang sangat berbeda, serta merta dengan mengadopsi system Finlandia atau Singapore, Indonesia akan mendapatkan hasil yang sama? *Learning the best practices from high performers in the world of education is highly recommended but context matters.*

Disamping itu, guru masa kini menghadapi tantangan yang berkaitan dengan banyak hal seperti revolusi industry 5.0, pembelajaran abad 21 dan perubahan kurikulum di Indonesia. Setiap tantangan ini berkaitan dan bisa

diterapkan pada strategi pembelajaran walau punya ekspektasi yang agak berbeda. Di revolusi Industri 5.0 guru diharapkan merangsang *intellectual curiosity* para siswa dan juga menjadi sosok inspiratif. Dengan pembelajaran abad 21, guru diharapkan mampu mengembangkan kompetensi inti yang dibutuhkan siswa saat ini seperti kolaborasi, literasi digital, pemikiran kritis, dan pemecahan masalah. Dengan kurikulum 13, guru diharapkan membuat siswa tidak hanya memahami teori tapi juga pengaplikasiannya. Selain itu, terselip juga harapan guru bisa melakukan pembelajaran yang mendorong siswa untuk mencapai skor PISA yang lebih baik nantinya. Dan semua harapan itu disematkan di guru. Bagaimana para guru di seluruh Indonesia ini memenuhi tuntutan ini semua? Tentunya guru perlu motivasi, banyak belajar dan juga dukungan dari semua pihak. Kompetensi guru menjadi faktor penting untuk bisa mencapai tantangan ini. Kompetensi guru sangat berkaitan dengan lingkungan mengajar dan juga latar belakang pendidikan keguruannya. Di era perubahan ini, pendidikan keguruan juga menghadapi tantangan tersendiri.

### **Tantangan Pendidikan Keguruan**

Rekrutmen calon mahasiswa dan persyaratan masuk dalam pendidikan guru membuat pendidikan keguruan di Indonesia menghadapi lebih banyak tantangan dalam melatih calonnya menjadi guru yang berkualitas. Perguruan tinggi bereputasi tinggi mungkin melakukan proses seleksi karena keterbatasan tempat, namun masih banyak pendidikan keguruan tanpa proses seleksi yang ketat. Artinya, prosedur atau persyaratan masuk untuk masuk pendidikan keguruan tidak sulit. Siapa pun yang memiliki ijazah sekolah menengah atas dengan berbagai tingkat kemampuan dapat mendaftar menjadi guru. Di sisi lain, pendidikan keguruan mungkin berada dalam posisi yang dilematis karena tidak dapat menjamin lulusannya mendapatkan profesi sebagai guru karena posisi mengajar di sekolah tidak hanya diperuntukkan bagi lulusan pendidikan tetapi juga lulusan dari non pendidikan keguruan (Surya, 2016). Rekrutment tanpa ada persyaratan nilai tertentu pada *subject* yang dituju atau *subject knowledge test* terhadap calon mahasiswa pendidikan keguruan akan menjadi tantangan bagi para dosen nantinya. Karena para dosen harus bisa mengakomodir perkuliahan dengan kemampuan mahasiswa yang beragam. Kalau kita longgar pada kualitas inputnya, tentunya kita harus bekerja lebih keras di proses pembelajarannya untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas.

Minat untuk menjadi guru bukan syarat utama untuk bisa masuk pendidikan keguruan di Indonesia. Banyak studi yang mengeksplorasi tentang motivasi mahasiswa menjadi guru di pendidikan keguruan, tapi pada kenyataannya apakah seluruh mahasiswa di pendidikan keguruan ingin menjadi guru? Tidak semua mahasiswa di pendidikan keguruan ingin menjadi guru.

Untuk memenuhi aspirasi calon mahasiswa yang tidak ingin menjadi guru, sebagian pendidikan keguruan menawarkan profile lulusan selain menjadi guru seperti praktisi, entrepreneur atau peneliti. Untuk mengakomodir profile lulusan yang beragam, tentu mata kuliah tidak seratus persen berfokus pada keguruan. Lulusan yang ingin lebih mendalami profesi keguruan bisa mendapatkannya melalui PPG. Beberapa pertanyaan muncul kepermukaan. Bagaimana kualitas lulusan pendidikan keguruan yang tetap mengajar anak-anak Indonesia walau belum ikut PPG? Apabila setiap tahun pendidikan keguruan merekrut calon mahasiswa tanpa seleksi minat dan bakat yang ketat dan proses pembelajaran yang tidak berfokus seratus persen kepada keguruan, sejauh mana pendidikan keguruan mempersiapkan calon guru untuk mengajar? Apakah mungkin kita mengharapkan hasil yang berbeda dengan melakukan prosedur yang sama tiap tahunnya?

Laporan Mc Kinsey berjudul *“How the world’s best performing education systems come out on top”* merekomendasikan untuk mendapatkan dan mendidik orang yang tepat untuk menjadi guru melalui penelusuran minat dan bakat (Barber & Mourshed, 2007). Sebagai contoh, pendidikan guru di Finlandia, salah satu contoh dari sistem pendidikan terbaik, calon guru harus melalui pendidikan magister yang sangat kompetitif. Pendidikan guru di Finlandia memilih calon mahasiswa melalui ujian masuk dua fase yang menekankan pada kualifikasi akademik, kesesuaian kandidat dan motivasi untuk pekerjaan guru, serta orientasi penelitian dan praktik yang kuat (Malinen et al., 2012) Namun hal seperti itu belum diterapkan di Indonesia. Meskipun demikian, perlu dicatat walau kita perlu belajar dari negara lain tapi mengadopsi sistem Finlandia sebagai jawaban atas semua kebutuhan Indonesia dengan sistem pendidikan, konteks ekonomi, sosial, budaya dan geografis yang berbeda adalah ilusi. Pasalnya, penerapan kebijakan perekrutan *top scorers* untuk masuk pendidikan keguruan juga harus diikuti dengan jaminan pekerjaan, pemberian kompensasi yang layak kepada guru seperti gaji tinggi, guru sebagai jabatan bergengsi serta dukungan sistem pendidikan yang kuat.

Beberapa isu yang menjadi tantangan dalam proses pembelajaran di pendidikan keguruan adalah visi misi, kepaduan program, kesempatan untuk praktik dan kualitas dari dosen. Visi yang jelas tentang pengajaran yang baik dan di implementasikan kedalam praktik nyata telah menjadi bagian penting dari program pendidikan guru (Kennedy, 2006; Zeichner & Conklin, 2008). Visi diperlukan untuk merancang apa dan bagaimana mahasiswa pendidikan keguruan belajar. Visi juga menjadi dasar dari rancangan kurikulum, program dan pedagogi pengajaran. Sebagai contoh, pendidikan guru di Singapura dipandu oleh standar yang dikembangkan untuk mendukung kompetensi abad ke-21 dan selaras dengan visi Singapura dalam hal pengajaran dan pembe-

lajaran (Darling-Hammond, 2017). Keberhasilan pendidikan guru di Singapura juga diperkuat dengan sistem yang mendukung seperti biaya kuliah pendidikan keguruan gratis, calon guru digaji untuk persiapan mengajar dan gaji tinggi profesi mengajar. Singapura yang secara konsisten menduduki peringkat teratas dalam hasil PISA kini telah menjadi pemimpin internasional dalam pendidikan. Singapura memberikan pelajaran tentang pentingnya visi untuk dipahami dan diintegrasikan ke dalam kurikulum dan sistem. Staf fakultas dan dosen pendidikan keguruan yang memiliki dan memahami visi misi yang sama akan mudah digerakan untuk mencapai tujuan program. Adakalanya staf fakultas dan dosen perlu diingatkan sejauh mana visi misi dari program pendidikan yang terpampang di dinding sudah tercapai.

Kepaduan program adalah pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang konsisten dan menjadi acuan dalam merancang program dan mata kuliah, baik di kampus atau praktek di lapangan (Klette & Hammerness, 2016). Jadi, ada keselarasan antara belajar konsep dan praktek dari konsep itu sendiri, antara apa yang diajarkan oleh mata kuliah di kelas dan praktikum dilapangan. Sebagai contoh, sejak 1979, pendidikan keguruan di Finlandia telah menerapkan pendidikan guru berbasis penelitian untuk membekali calon guru mereka untuk selalu *up to date* dengan kemajuan dan penelitian dalam mata pelajaran yang mereka ajarkan. Pendidikan diberikan berjenjang di mulai pertama kali dengan penguasaan mata pelajaran yang akan mereka ajar sebanyak 240 kredit diikuti oleh pendidikan pedagogis selama satu tahun untuk mempersiapkan teori dan praktek (Tryggvason, 2009). Program pendidikan keguruan yang terstruktur dengan baik dan terpadu ini dapat menjadi dasar yang kuat bagi penguasaan *subject content knowledge* bagi lulusannya dan kualitas hasil pengajaran sekolah. Untuk itu, diharapkan lulusan pendidikan keguruan Indonesia bukan hanya mengerti teori tapi bisa menjadi model di kelas dan memberikan *real setting context*. Misalnya, lulusan pendidikan bahasa Arab, bukan hanya bisa menerangkan kosa kata di dalam kelas tapi juga memberikan contoh bagaimana berkomunikasi ketika pergi haji dan berbicara dengan *native speakers* dari Arab Saudi. Begitu juga lulusan bahasa Inggris, bukan hanya bisa menerangkan *tenses* di kelas tapi mampu berkomunikasi dengan baik dengan *native speakers* dari Australia, UK atau Amerika melalui *zoom meeting* misalnya. *That's the real world out there that our students might encounter later. In this globalization era, we are all the world citizens and language is not only a subject to learn but a means of communication, a life skill.*

Pendidikan keguruan telah lama dikritik karena adanya kesenjangan antara teori dan praktik. Kesempatan praktik harus menjadi jembatan untuk menghubungkan kesenjangan antara apa yang dipelajari di universitas dan apa yang dibutuhkan sekolah sehingga tidak akan ada pemisahan antara teori dan praktik dalam pendidikan. Namun demikian, penelitian menunjukkan ada dua

kubu yang kontras dan berbeda pandangan tentang cara menjembatani teori dan praktik di pendidikan keguruan. Di satu sisi, peneliti berpendapat bahwa sekolah adalah tempat terbaik untuk praktik, bukan dari contoh pekerjaan siswa atau video pengajaran di kelas (Hammerness, 2013), di sisi lain, peneliti berargumen bahwa mahasiswa dengan ilmunya yang masih terbatas akan mengalami kesulitan atau kebingungan kalau langsung praktik di sekolah (Britzman, 1991; McDonald, 2005). Ketika praktik di lapangan, peran mentor, feedback dan diskusi sangat dibutuhkan dan dipercaya dapat membuat perbedaan. Jadi bukan perkara memilih mana yang lebih penting, teori atau praktek, tapi lebih kepada bagaimana cara menjembatani keduanya dengan efektif. Dengan era teknologi dan kolaborasi saat ini, banyak hal dimungkinkan untuk menjembatani jurang pemisah antara apa yang diberikan pendidikan keguruan dan apa yang dibutuhkan sekolah. Tantangan lulusan pendidikan keguruan yang paling umum adalah administrasi sekolah, manajemen kelas dan metode pengajaran. Salah satu solusinya adalah dengan menghadirkan narasumber guru teladan dikelas, diskusi bersama alumni atau kolom khusus di website kampus yang rutin memberikan tips, informasi atau video seputar pengajaran disekolah.

Tantangan yang paling krusial di pendidikan keguruan adalah kualitas dosen. Dosen yang kompeten di bidangnya, berwawasan luas dan juga mengajak mahasiswa berfikir kritis tentang perkembangan dunia saat ini dan bisa mentransfer semangat keilmuannya kepada mahasiswa sehingga mereka termotivasi untuk menguasai ilmu pengetahuan dan meraih cita-citanya. Dosen pendidik calon guru berada pada posisi yang strategis yang bisa menggerakkan dan menginspirasi mahasiswa menjadi guru yang professional. *Educators educate beyond teaching*. Karena pendidikan keguruan bukan hanya bertujuan untuk mencetak guru yang menguasai materi tetapi guru yang berkarakter dan berakhlak. Ketika kepala sekolah ingin mencari guru untuk mengajar, ada komponen lain yang menjadi bahan pertimbangan untuk menerima seorang calon guru selain *subject content knowledge* seperti *values* dan *creativity*. Guru yang bukan hanya mengajar *by the book* tapi juga bisa menggunakan metode yang menarik dan senantiasa meningkatkan kompetensi profesionalnya. Para dosen menyadari tuntutan ini dan berusaha untuk membekali calon guru dengan ilmu dan keahlian yang bisa meningkatkan kompetensi profesional nya dalam mengajar.

Proses rekrutmen, visi misi, kepaduan program, kesempatan praktik dan kualitas dosen adalah beberapa dari banyak tantangan yang dihadapi oleh pendidikan keguruan saat ini. Untuk menghadapi tantangan di era perubahan ini, pendidikan keguruan harus senantiasa melihat ke dalam, keluar dan juga ke depan. Melihat ke dalam berarti pendidikan keguruan perlu mengevaluasi program untuk mengetahui mana yang berhasil dan mana yang perlu

ditingkatkan. Selain itu feedback dan diskusi bersama dengan setiap pemangku kepentingan diperlukan untuk penjaminan mutu dalam pendidikan keguruan. Melihat ke luar berarti pendidikan keguruan perlu berwawasan luas, mengikuti perkembangan jaman, belajar dari *best practices*, memahami trend dan isu terkini di dalam konteks lokal dan global. Melihat ke depan berarti senantiasa mengantisipasi tuntutan perubahan zaman, dinamika dunia pendidikan dengan berinovasi dan membekali calon guru masa depan bukan hanya dengan *subject content knowledge* nya saja, tapi *skills, creativity, values* dan *mindset* yang tepat untuk bertahan di dalam profesi keguruan yang dinamis dan terus berubah. Menjadi guru yang berkualitas dan menginspirasi.

## PENUTUP

Tantangan di dunia pendidikan di Indonesia baik guru dan pendidikan keguruan sangat kompleks. Dan akan selalu ada tantangan baru yang akan datang. Kita dituntut untuk bersikap terbuka, fleksibel, kritis, adaptif dan eksploratif. Terlepas dari kekurangan yang ada, kita semua (guru, pendidikan keguruan dan pemerintah) sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik. Semua langkah yang kita lakukan untuk Indonesia patut untuk di apresiasi. Tapi jalan menuju ke pendidikan Indonesia yang berkualitas masih panjang. Insya Allah dengan niat baik, kerja keras dan usaha bersama-sama dari semua pihak, kita bisa. *We are not playing a blame game; we are in this together.*

## DAFTAR PUSTAKA

- Asli Indonesia. (2018). *Perjuangan anak Indonesia ke sekolah*.  
<http://www.asliindonesia.net/perjuangan-siswa-indonesia-ke-sekolah/>
- Barber, M., & Mourshed, M. (2007). *How the world's best performing school systems come out on top*.  
[https://www.mckinsey.com/~media/mckinsey/industries/social\\_sector/our\\_insights/how\\_the\\_worlds\\_best\\_performing\\_school\\_systems\\_come\\_out\\_on\\_top/how\\_the\\_world\\_s\\_best-performing\\_school\\_systems\\_come\\_out\\_on\\_top.ashx](https://www.mckinsey.com/~media/mckinsey/industries/social_sector/our_insights/how_the_worlds_best_performing_school_systems_come_out_on_top/how_the_world_s_best-performing_school_systems_come_out_on_top.ashx)
- Britzman, D. (1991). *Practice Makes Practice*. State University of New York Press.
- Darling-Hammond, L. (2017). Teacher education around the world: What can we learn from international practice? *European Journal of Teacher Education*, 40(3), 291–309.  
<https://doi.org/10.1080/02619768.2017.1315399>
- de Ree, J., Muralidharan, K., Pradhan, M., & Rogers, H. (2018). Double for nothing? Experimental evidence on an unconditional teacher salary increase in Indonesia. *The Quarterly Journal of Economics*, 133(2), 993–1039. <https://doi.org/10.1093/qje/qjx040>. Advance

- Detiknews. (2019). *Kualitas pendidikan Indonesia menurun*.  
<https://news.detik.com/infografis/d-4809492/kualitas-pendidikan-indonesia-menurun>
- Feng, L., & Sass, T. R. (2017). Teacher quality and teacher mobility. *Education Finance and Policy*, 12(3), 396–418.
- Hammerness, K. (2013). Examining features of teacher education in Norway. *Scandinavian Journal of Educational Research*, 57(4), 400–419.  
<https://doi.org/10.1080/00313831.2012.656285>
- Herry. (2012). *Perjuangan anak sekolah demi pendidikan*.  
<https://idelinks.blogspot.com/search?q=perjuangan+anak+sekolah>
- Jawa Pos. (2015). *Menerjang maut demi ilmu*.  
<http://www2.jawapos.com/baca/artikel/16684/menerjang-maut-demi-ilmu>
- Kennedy, M. M. (2006). Knowledge and vision in teaching. *Journal of Teacher Education*, 57(3), 205–211.  
<https://doi.org/10.1177/0022487105285639>
- Klette, K., & Hammerness, K. (2016). Conceptual framework for analyzing qualities in teacher education: Looking at features of teacher education from an international perspective. *Acta Didactica Norge*, 10(2), 26–52.  
<https://doi.org/10.5617/adno.2646>
- Kusumawardhani, P. N. (2017). Does teacher certification program lead to better quality teachers? Evidence from Indonesia. *Education Economics*, 25(6), 590–618.
- Malinen, O. P., Väisänen, P., & Savolainen, H. (2012). Teacher education in Finland: A review of a national effort for preparing teachers for the future. *Curriculum Journal*, 23(4), 567–584.  
<https://doi.org/10.1080/09585176.2012.731011>
- McDonald, M. A. (2005). The integration of social justice in teacher education: Dimensions of prospective teachers' opportunities to learn. *Journal of Teacher Education*, 56(5), 418–435.  
<https://doi.org/10.1177/0022487105279569>
- Mishra, P., & Koehler, M. J. (2006). Technological pedagogical content knowledge: A framework for teacher knowledge. *Teachers College Record*, 108(6), 1017–1054.  
<https://www.tcrecord.org/content.asp?contentid=12516>
- OECD. (2019). *PISA 2018 Results (Volume 1): What student know and can do*.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.1787/5f07c754-en>
- Surya, P. (2016). Student teacher recruitment in Indonesia : an Initial step to promote teacher professionalism and teaching professionalization. *Advances in Economic, Business and Management Research*, 14, 457–462.



- Triyanto. (2012). Improving teacher profesionalism through certification program : an Indonesia case study. *International Journal of Educational and Pedagogical Sciences*, 6(7), 864–868.
- Tryggvason, M. T. (2009). Why is Finnish teacher education successful? Some goals Finnish teacher educators have for their teaching. *European Journal of Teacher Education*, 32(4), 369–382.  
<https://doi.org/10.1080/02619760903242491>
- Wiyanti, S. (2015). *Mirisnya pendidikan di daerah pelosok Indonesia*. Merdeka.  
<https://www.merdeka.com/peristiwa/mirisnya-pendidikan-di-daerah-pelosok-indonesia.html>
- Zeichner, K., & Conklin, H. . (2008). Teacher education programs as sites for teacher preparation. In M. Cochran-Smith, S. Feiman-Nemser, D. McIntyre, & K. Demers (Eds.), *Handbook of Research on Teacher Education:Enduring questions in changing contexts* (pp. 269–289). Routledge.

## **MENJADI BANGSA YANG TERDIDIK**

**Avi Budi Setiawan**

### **PENDAHULUAN**

Indonesia adalah rumah raksasa bagi 270 juta manusia. Sebagai bangsa yang tengah disorot dunia karena akselerasi perekonomiannya, Indonesia menjelma sebagai kekuatan baru. Besarnya potensi ini juga membuat dunia melirik Indonesia sebagai pasar, terlebih kita saat ini tengah masuk di era globalisasi yang mendekatkan semua Negara satu sama lain.

Tapi pembangunan bangsa ini masih saja meninggalkan masalah. Kita ketahui bersama bahwa modal manusia dewasa ini menjadi salah satu instrumen terpenting dalam pembangunan suatu bangsa. Sayangnya, Indonesia masih berkuat pada permasalahan mutu modal manusia yang masih lemah.

Manusia sejatinya adalah pendorong pembangunan. Mereka mengambil peran tidak hanya sebagai faktor produksi. Tapi jauh lebih luas, merekalah subyek pembangunan. Peran inilah yang menjadikan peningkatan kualitas sumberdaya manusia kini menjadi aspek yang terpenting.

Kita membutuhkan pendidikan yang baik jika ingin maju. Kualitas pendidikan harus ditingkatkan sembari mendorong partisipasi pendidikan masyarakat yang lebih baik. Bisa dilihat, segala permasalahan pembangunan ekonomi kesemuanya memerlukan pelibatan sumberdaya manusia dalam upaya pemecahan masalah.

Oleh karena itu, mencerdaskan seluruh tumpah darah Indonesia adalah cita-cita terbesar yang harus diwujudkan. Suatu Negara akan bisa menjadi maju dan terdepan karena memiliki sumberdaya manusia yang mumpuni dan berkualitas. Karena mereka akan mampu membawa inovasi.

Barker (2017) menyebutkan bahwa salah satu kendala pendidikan adalah peserta didik tidak menjadi insan yang kreatif. Pendidikan ini rasanya menjadi salah satu elemen kunci dalam upaya untuk meningkatkan taraf hidup sebuah bangsa. Namun justru disanalah masalahnya.

Bangsa ini tengah dihadapkan pada beragam permasalahan penting. Bagaimana kita kini berkuat dengan upaya penyediaan pangan untuk kebutuhan rakyat. Bukan hal yang mudah memenuhi kebutuhan pangan dalam waktu singkat. Sedangkan di saat yang sama kita berhadapan dengan problem

penurunan kualitas lingkungan hidup yang menyebabkan keseimbangan produksi pangan terganggu.

Tak hanya itu, pemenuhan kebutuhan energi nasional juga masih menjadi kendala besar. Kita begitu bergantung pada impor minyak untuk memenuhi kebutuhan energi. Produksi domestik tak mampu lagi memenuhi permintaan dalam negeri yang besar. Padahal, masih banyak sumber energi alternatif terbarukan tersedia di negeri ini. Kesemua itu belum dimanfaatkan secara optimal karena segala keterbatasan yang kita miliki. Tak jauh beda dengan kita, dunia kini tengah mengalami ancaman krisis energi.

## **PEMBAHASAN**

Beragam permasalahan tadi sejatinya erat kaitannya dengan upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagai Negara besar yang tumbuh melesat di tengah kelesuan dunia. Indonesia ternyata berkembang menjadi salah satu konsumen utama pangan dan energi dunia. kebutuhan yang besar akan pangan dan energi merupakan konsekuensi alamiah dan bisa jadi adalah refleksi dari bertambahnya daya beli masyarakat sebagai implikasi naiknya tingkat pendapatan karena akselerasi ekonomi.

Tak berhenti sampai di sini saja. Era globalisasi menyebabkan Indonesia sebagai pasar besar bagi serbuan produk-produk asing. Bagaimana dampak liberalisasi perdagangan dan dinamisasi ekonomi dunia membawa beragam dampak bagi perekonomian Indonesia secara umum.

Di satu sisi industrialisasi melesat, menggantikan sektor agraris yang tradisional. Masyarakat juga lebih modern karena mengikuti arus modernisasi dunia. Diamond (2013) mengemukakan bahwa perbedaan sumberdaya memang turut ber andil pada karakteristik manusia yang berdiam di dalamnya. Tapi, akselerasi volume perekonomian tadi belum diikuti dengan peningkatan kualitas pembangunan. Jurang ketimpangan semakin lebar, daya saing industri dalam negeri menghadapi pasar bebas dunia masih dipertanyakan dan potensi yang ada di Indonesia belum dimanfaatkan sepenuhnya untuk kesejahteraan yang lebih merata. Masyarakat juga mulai tertular virus materialistik, hedonis, dan penyakit-penyakit lain sebagai dampak dari globalisasi.

Kita tengah mengalami euforia kemajuan zaman. Tapi kita justru lupa, bahwa bangsa ini sejatinya dalam ancaman dijajah secara ideologis, jika tak ingin dikatakan telah terjajah. Lihat saja bagaimana kita begitu bangga dengan deretan angka makro ekonomi yang menunjukkan tanda keberhasilan pembangunan. Namun sebenarnya ada sesuatu yang lebih penting dari sekedar angka statistik indikator makro ekonomi, yakni kualitas pembangunan.

Maka dari itu, pembangunan sumberdaya manusia menjadi penting. Indonesia diprediksikan akan menjadi macan ekonomi dunia tahun 2030 nanti. Apa yang membuat para pakar-pakar ekonomi dunia ini begitu yakin? Karena mereka menyadari potensi yang dimiliki negeri ini. Tapi apakah potensi cukup hanya disadari?

Berangkat dari sinilah letak pentingnya upaya untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Manusia yang mengetahui makna hidup dan esensi tugasnya. Frankl (2017). Karena manusia ini akan mampu menjadi pendorong invensi dan inovasi. Segala potensi yang ada tak akan berarti jika tak ada yang mengolah. Mau sampai kapan negeri ini akan menyerahkan kekayaannya untuk dikelola orang asing? Mau sampai kapan anak-anak negeri ini justru memperkaya diri sendiri ketika dipercaya memimpin bangsa?

Bangsa yang besar adalah bangsa yang menempatkan pendidikan pada strata tertinggi. Penyelenggaraan pendidikan yang baik tak tercermin dari besarnya anggaran yang dialokasikan, tapi pada kualitas yang diberikan, dan kemerataannya. Untuk apa menerapkan pendidikan ala barat jika justru itu merugikan, membuat kita menjadi apatis dan kehilangan kearifan lokal.

Segala permasalahan yang dialami Indonesia tadi sebenarnya dapat dijawab dengan inovasi. Isu kerawanan pangan, energi, kerusakan lingkungan dan problematika ekonomi dapat diatasi dengan serangkaian kebijakan dan inovasi. Bagaimana membuat kue pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

## **PENUTUP**

Dengan pendidikan yang baik, kita akan lebih kritis melihat potensi dan permasalahan yang dihadapi berbekal pengetahuan yang luas. Dan nantinya akan dapat merumuskan jalan keluarnya. Bangsa ini juga tidak akan latah mengikuti arus globalisasi yang buta. Karena telah dibekali dasar pendidikan yang kuat yakni mental dan karakter. Manson (2017)

Selanjutnya, budaya tulis dalam pendidikan yang layaknya perlu untuk terus dikembangkan. Mengutip pernyataan dari presiden SBY bahwa bangsa yang maju adalah bangsa yang berbudaya tulis, bukan budaya tutur.

Kita bisa melihat peradaban-peradaban maju di dunia berkembang karena budaya tulisnya. Diamond (2013). Peradaban mereka masih terkenang hingga saat ini selain karena peninggalan fisik juga karena catatan-catatan sejarah yang tertulis. Tak dapat dibayangkan bagaimana kita mempelajari filsafat-filsafat tokoh besar dunia mulai dari Plato hingga Einstein jika mereka tidak meninggalkan tulisan untuk di baca.

Pendidikan akan membuka gerbang kemajuan ilmu dan pengetahuan. Dengan pendidikan kita akan menjadi lebih kritis. Sumbangan saran untuk pembangunan bangsa juga akan lebih berkualitas karena diawali dengan pemahaman akan pengetahuan dan kedalaman berfikir. Pendidikan akan membuka inovasi yang membawa dampak pada kemajuan peradaban suatu bangsa. Sehingga, mencerdaskan kehidupan bangsa adalah cita-cita bangsa yang harus terus diperjuangkan.

### **Daftar Pustaka**

- Barker, Eric. 2016 Mendaki Tangga yang Salah. Gramedia. Jakarta
- Diamond, Jared. 2013. Guns Germs and Steel. Gramedia. Jakarta
- Frankl, Viktor. 2017. Man's search for meaning. Beacon press. Boston USA
- Manson, Mark. 2016. The Subtle Art of Giving a F\*ck. Gramedia. Jakarta.

---

## **EDUKASI KONSERVASI PEDULI SUNGAI SEBAGAI SALAH SATU ALTERNATIF PENGELOLAAN DAS**

**Dewi Liesnoor Setyowati, Sucihatiningsih DWP, Eva Banowati, Suroso**

### **PENDAHULUAN**

Kerusakan daerah aliran sungai (DAS) di banyak tempat di Indonesia saat ini perlu segera ditangani, mengingat daya dukung dan daya tampung lingkungan semakin terlampaui dengan bertambahnya jumlah penduduk, urbanisasi, berkurangnya areal hutan dan kawasan resapan air, semakin meluasnya lahan kritis dan pengembangan wilayah yang pada akhirnya menyebabkan peningkatan bencana banjir, longsor dan kekeringan (Nugroho, 2015). Data Kementerian Kehutanan menunjukkan adanya peningkatan kerusakan DAS dari yang semula 22 DAS pada tahun 1984 menjadi berturut-turut sebesar 39 dan 62 DAS pada tahun 1992 dan 1998. Sedangkan kondisi terakhir, berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor SK.328/Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009, menetapkan 108 DAS kritis dengan prioritas penanganan yang dituangkan dalam RPJM 2010 – 2014. Salah satu DAS kritis yang prioritas untuk segera ditangani adalah DAS Garang. Kerusakan DAS disebabkan antara lain tingkat kesejahteraan masyarakat yang rendah, belum optimalnya peran para pihak dalam mengelola DAS, dan partisipasi masyarakat yang rendah.

Menurut Nugroho (2015), kunci keberhasilan dalam pengelolaan sungai adalah partisipasi masyarakat, dimana masyarakat dilibatkan dan merasakan manfaat langsung dengan adanya kegiatan pengelolaan sungai. Diakui bahwa partisipasi publik dan peran para pihak semakin dibutuhkan dalam pengambilan keputusan pengelolaan sumberdaya (Reed et al, 2009). Pengelolaan DAS pada prakteknya seringkali mengalami konflik kepentingan dengan pemanfaatan lahan dan sumberdaya yang lebih berorientasi pada kepentingan sektoral dan perbedaan persepsi para pihak (Alviya et al., 2012; Blackstock et al., 2012). Tarlock (2003) menyebut ketiadaan koordinasi dan kerja sama antar pemerintahan, konflik antar sektor/kegiatan merupakan permasalahan tidak efektifnya dalam pengelolaan sungai. Oleh karena itu, dalam pengelolaan sungai koordinasi dan peran yang dilakukan oleh setiap sektor atau para pihak menjadi penting.

Kota Semarang, banyak dilalui oleh beberapa sungai besar utamanya sungai Garang dan Babon. Kedua sungai ini berhulu di Gunung Ungaran yang jaraknya sangat pendek +40 km dengan kelerengan yang sangat curam. Daerah

hulu banyak mengalami perubahan penggunaan lahan yang sangat cepat, dimana banyak lahan pertanian dan tegalan yang berubah fungsi menjadi pemukiman dan pabrik, bahkan di Kota Semarang banyak dijumpai kantong air ditutup untuk pemukiman dengan mengambil tanah galian dari bukit yang mestinya berfungsi sebagai daerah resapan air. Gambaran konversi fungsi lahan bagian hulu, menunjukkan adanya penyempitan luas hutan dari 23,28% pada tahun 1995 menjadi 18,38% pada tahun 2010, sedangkan luas permukiman meningkat dari 1,69% pada 1995 menjadi 7,41% pada tahun 2010. Luas hutan yang seharusnya bisa ditingkatkan menjadi 30% sesuai dengan ketentuan UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ternyata dari tahun ke tahun luas hutannya semakin menyempit. Kondisi tersebut berdampak buruk terhadap kelestarian DAS karena daya dukungnya berkurang. Air hujan yang seharusnya dapat meresap dan disimpan dalam tanah, mengalir menjadi aliran permukaan sehingga terjadi ancaman banjir pada musim penghujan dan kekeringan pada musim kemarau. Dibagian hilir terutama wilayah pantai dari Kendal sampai Demak terdapat tanaman bakau yang telah rusak, terdesak oleh bangunan dan insfraktur lainnya.

Pemilihan strategi peningkatan keterpaduan dalam pengelolaan sungai dilakukan dengan menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP), yaitu memilih kriteria dan alternatif strategi yang sesuai dengan kondisi sumberdaya yang ada. Prioritas alternatif pertama adalah penyusunan rencana pengelolaan sungai berbasis kawasan strategis fungsi lingkungan hidup dengan melibatkan para pihak. Rencana tata ruang Provinsi Jateng telah menetapkan DAS Garang sebagai kawasan strategis dengan fungsi lingkungan hidup, perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan perencanaan yang lebih detail dengan mengakomodasi kepentingan hulu-hilir. Banyaknya instansi/lembaga yang terlibat merupakan asset karena program dan pendanaan yang ada dapat mendukung terwujudnya pengelolaan yang integratif. Penyelarasan DAS dengan wilayah administratif juga penting dilakukan agar pemahaman akan DAS tiap daerah sebagai pemangku kepentingan lebih jelas sehingga dapat mendukung kejelasan pembagian peran para pihak. Dengan strategi tersebut diharapkan pengelolaan DAS Garang menjadi semakin terpadu dan permasalahan dapat terselesaikan dengan partisipasi semua pihak terkait.

## **PENGELOLAAN DAS GARANG**

Dalam rangka pengelolaan DAS secara terpadu dengan memperhatikan berbagai permasalahan, kondisi dan keterbatasan karakteristik DAS serta prinsip pengelolaan DAS sangat diperlukan optimalisasi fungsi dan peran seluruh stakeholders secara terpadu dan terintegrasi antar sektor dengan berbagai kepentingan dan secara holistik yang berdasarkan multi disiplin ilmu.

Guna pengelolaan DAS Garang secara terpadu maka diperlukan peningkatan peran multipihak secara partisipatif, berbagi tanggungjawab (sharing responsibility) dalam pemberdayaan masyarakat (community empowerment), andil biaya (cost sharing) dan lain sebagainya. Pengelolaan DAS Terpadu mencakup proses perumusan tujuan bersama pengelolaan sumberdaya alam dalam DAS, sinkronisasi program sektoral dalam mencapai tujuan bersama, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian hasil program sektoral terhadap tujuan bersama pengelolaan DAS dengan mempertimbangkan aspek biofisik, klimatik, sosial, politik, ekonomi dan kelembagaan yang bekerja dalam DAS tersebut. Pengelolaan tersebut direncanakan, dilaksanakan dan dikendalikan berdasarkan kesepakatan bersama melalui suatu mekanisme partisipasi dan adaptasi terhadap lingkungan biofisik dan sosial ekonomi setempat. Dengan demikian, keterpaduan dalam pengelolaan DAS adalah upaya mensinkronkan program-program sektoral dan kerangka kerja kelembagaan yang berbeda dengan cakupan lintas wilayah administrasi pemerintahan dalam satu DAS. Dengan mekanisme pengelolaan sumberdaya antar sektor, antar wilayah administrasi pemerintahan dan antar kelembagaan sebagai satu kesatuan ini, maka selain tujuan masing-masing sektor, diharapkan tujuan bersama pengelolaan DAS juga dapat tercapai.

Kondisi ideal di atas masih menghadapi berbagai masalah dan kendala sehingga belum dapat diimplementasikan seperti yang diinginkan. Dengan demikian terdapat kesenjangan antara kondisi pengelolaan DAS yang diharapkan dengan kondisi pengelolaan DAS saat ini seperti disajikan secara singkat dalam Tabel 1.

**Tabel 1.** Matrik Perbandingan Antara Kondisi Pengelolaan DAS Saat Ini Dengan Yang Diharapkan

No	Kegiatan/Aspek Manajemen	Kondisi Pengelolaan DAS	
		Saat Ini	Yang Diharapkan
1	<b>Perencanaan</b>	a. Bersifat parsial (belum terintegrasi) b. Belum memiliki tujuan bersama (bersifat sektoral) c. Proses penyusunannya kurang partisipatif d. Tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat e. Tidak efektif dan efisien (kurang diacu oleh berbagai pihak)	a. Perencanaan dilakukan secara terpadu b. Memiliki tujuan bersama yang telah disepakati c. Proses penyusunan rencana dilaksanakan secara partisipatif d. Mempunyai kekuatan hukum e. Efektif dan efisien (menjadi salah satu acuan dalam perencanaan sektoral/bidang lain)



No	Kegiatan/Aspek Manajemen	Kondisi Pengelolaan DAS	
		Saat Ini	Yang Diharapkan
2	<b>Kelembagaan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Masing-masing sektor bekerja sendiri-sendiri berdasarkan kepentingannya</li> <li>b. Belum ada pembagian tugas, fungsi dan mekanisme kerja yang jelas dalam pengelolaan DAS</li> <li>c. Beberapa forum DAS di daerah telah terbentuk tapi belum bisa bekerja secara efektif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ada lembaga koordinatif para pihak terkait pengelolaan DAS seperti Forum DAS</li> <li>b. Kapasitas lembaga-lembaga yang telah ada meningkat dengan memperjelas tugas, fungsi dan mekanisme kerja lembaga/ organisasi tersebut</li> <li>c. Lembaga koordinatif berperan secara efektif untuk mensinergikan kebijakan, kegiatan dan pendanaan</li> </ul>
3	<b>Pelaksanaan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kegiatan di lapangan cenderung egosektoral belum terpadu</li> <li>b. Kebijakan Pemda cenderung mengeksploitasi sumberdaya alam DAS untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)</li> <li>c. Konservasi dan rehabilitasi DAS mengandalkan pemerintah terutama sektor kehutanan</li> <li>d. Pemanfaatan jasa lingkungan DAS belum dihargai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kegiatan pengelolaan DAS dilaksanakan secara terpadu (sudah ada koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi diantara pihak-pihak/ sektor terkait).</li> <li>b. Komitmen Pemda dalam mengelola dan melestarikan DAS tinggi</li> <li>c. Konservasi dan rehabilitasi DAS melibatkan para pihak (Pemerintah Pusat, Pemda, swasta dan masyarakat).</li> <li>d. Pembayaran jasa lingkungan DAS dilakukan secara bertahap dan dimanfaatkan untuk mendanai konservasi dan rehabilitasi DAS.</li> </ul>

No	Kegiatan/Aspek Manajemen	Kondisi Pengelolaan DAS	
		Saat Ini	Yang Diharapkan
4	<b>Pengendalian</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Monitoring dan evaluasi terbatas oleh institusi tertentu, belum ada koordinasi dan <i>sharing</i> informasi</li> <li>b. Pengawasan dan penertiban belum banyak melibatkan masyarakat dan belum dilaksanakan secara konsisten</li> <li>c. Penertiban terhadap pelanggaran peraturan kurang</li> <li>d. Kondisi DAS tidak menjadi indikator kinerja institusi yang terkait dengan pengelolaan DAS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ada koordinasi para pihak dalam melakukan monitoring dan evaluasi serta ada <i>sharing</i> informasi</li> <li>b. Pengawasan melibatkan masyarakat, ada jejaring kerja yang baik, hasil monitoring dan evaluasi dijadikan umpan balik untuk perbaikan pengelolaan DAS</li> <li>c. Penegakan hukum bisa berjalan dengan baik</li> <li>d. Kesehatan DAS menjadi indikator kinerja institusi yang terkait pengelolaan DAS</li> </ul>
5	<b>Sistem Informasi Manajemen DAS (SIM DAS)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. SIM DAS belum terbangun dengan baik</li> <li>b. <i>Software, hardware</i> dan sumberdaya manusia belum memadai</li> <li>c. Banyak instansi hanya mengumpulkan data sesuai kepentingannya dan belum ada jejaring kerja</li> <li>d. Publikasi data dan informasi tentang DAS secara utuh masih terbatas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. SIM DAS sudah terbangun dengan baik dengan data dan informasi yang lengkap</li> <li>b. SIM DAS ditunjang <i>software, hardware</i> dan sumberdaya manusia yang memadai</li> <li>c. Jejaring kerja informasi antar instansi/para pihak sudah terbangun, data dan informasi terintegrasi dan mudah diakses</li> <li>d. Publikasi data dan informasi untuk setiap DAS terutama DAS prioritas tersedia secara lengkap</li> </ul>
6	<b>Partisipasi Para Pihak/Masyarakat</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Keterlibatan para pihak termasuk masyarakat masih belum optimal</li> <li>b. Pembagian peran, hak dan kewajiban para pihak belum jelas</li> <li>c. Pengelolaan DAS dianggap sebagai <i>cost centre</i> sehingga tidak menjadi prioritas Pemerintah Daerah,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Partisipasi para pihak termasuk masyarakat pada berbagai tahapan penyelenggaraan pengelolaan DAS sudah terwujud dengan pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas</li> <li>b. Terbangun kemitraan antara beberapa pihak yang memiliki kepentingan terhadap sumberdaya DAS</li> </ul>

No	Kegiatan/Aspek Manajemen	Kondisi Pengelolaan DAS	
		Saat Ini	Yang Diharapkan
		swasta dan masyarakat	c. Pengelolaan DAS menjadi perhatian/prioritas bagi semua pihak yang terkait karena menyangkut kepentingan ekonomi dan lingkungan semua pihak.
7	<b>Insentif-Disinsentif</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Insentif bagi masyarakat di hulu DAS atau pihak lain yang melaksanakan pengelolaan DAS masih kurang</li> <li>b. Disinsentif bagi pencemar belum dilaksanakan</li> <li>c. Insentif dan disinsentif untuk instansi pemerintah berdasarkan kinerja keberhasilan pengelolaan DAS belum dilaksanakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemberian insentif dalam bentuk bantuan, kemudahan, dan/atau fasilitas lain yang atraktif bagi pihak yang melaksanakan program pengelolaan DAS terutama di hulu DAS dan kawasan lindung</li> <li>b. Pemberian disinsentif/sanksi bagi pencemar/perusak DAS (pihak penyebab degradasi hutan, tanah dan air)</li> <li>c. Penerapan insentif dan disinsentif bagi instansi pemerintah berdasarkan kinerja pengelolaan DAS</li> </ul>
8	<b>Pembiayaan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembiayaan pengelolaan DAS masih sangat mengandalkan dana pemerintah</li> <li>b. <i>Cost sharing</i> belum dilaksanakan dengan optimal</li> <li>c. Belum ada peraturan tentang sistem pembiayaan pengelolaan DAS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penerapan <i>cost sharing</i> antara Pemerintah Pusat, Pemda, swasta dan masyarakat termasuk peluang memanfaatkan dana internasional</li> <li>b. Penerapan <i>beneficiaries and polluters pay principles</i></li> <li>c. Tersedianya peraturan mengenai pembiayaan pengelolaan DAS</li> </ul>

Dalam upaya pengelolaan DAS Garang secara optimal upaya yang harus dilaksanakan adalah memanfaatkan sumberdaya alam secara berkelanjutan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pelaksanaan pengelolaan tanaman dan konservasi lahan yang sesuai dan memadai dengan cara meningkatkan sumberdaya manusianya melalui pelatihan secara langsung di lapangan dengan bantuan pemerintah atau perguruan tinggi setempat, penggunaan lahan sesuai arahan fungsi kawasan dan RTRW serta pengawasan dan penegakan hukum secara tegas dan transparan terhadap setiap kebijakan yang

dikeluarkan melalui sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pelaksanaannya.

## **BENTUK EDUKASI KONSERVASI PEDULI SUNGAI DI DAS GARANG**

Bentuk edukasi konservasi untuk pengelolaan sungai berbasis masyarakat pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Garang diantaranya:

### **1. Pengelolaan dan pelestarian air di lingkungan tempat tinggal**

Air hujan yang jatuh ke bumi, khususnya di pekarangan penduduk dapat diusahakan agar tidak segera masuk ke sungai, tetapi tertahan di dalam tanah di lingkungan pekarangan penduduk. Air hujan tersebut dapat tertahan di lingkungan pekarangan melalui peresapan secara alami (infiltrasi), dialirkan ke dalam tandon-tandon sederhana (berupa “jogangan” dan sejenisnya), dan dimasukkan ke dalam sumur resapan.

Air hujan yang tidak meresap ke dalam tanah, awalnya akan mengisi lekuk-lekuk permukaan tanah. Bila lekuk-lekuk yang ada sudah tidak mampu menampung air hujan, maka ia akan mengalir di permukaan tanah menuju ke tempat yang lebih rendah. Untuk menahan agar aliran air ini tidak segera masuk ke sungai bisa dilakukan dengan memasukkan aliran air tersebut ke kolam retensi sederhana (jogangan, atau bentuk lainnya). Penduduk yang telah melakukan kegiatan ini hanya sebanyak 5%, sebagian lainnya (23%), kadang-kadang melakukan kadang-kadang tidak, dan justru sebagian besar (72%) berusaha secepat mungkin membuang aliran air tersebut ke sungai terdekat. Cara lain untuk menahan air hujan agar tidak segera masuk ke sungai adalah memasukkan aliran air hujan tersebut ke dalam sumur resapan, pembuatan kolam retensi, dan memperbanyak tanaman keras di lingkungan permukiman. Penduduk yang memiliki sumur resapan hanya sebanyak (8%), yang berusaha membuat kolam retensi sebanyak 13%, dan berusaha memperbanyak tanaman keras di lingkungan permukiman sebanyak 27%. Kenyataan ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk belum berusaha secara maksimal untuk mengkonservasi air di lingkungannya.

### **2. Pengelolaan sampah**

Perilaku masyarakat dalam menggunakan dan melestarikan air di lingkungannya juga tercermin pada pengelolaan sampah. Sampah yang dibuang sembarangan, atau sengaja dibuang ke saluran air (sungai) dapat mengganggu aliran air dan menyebabkan pendangkalan alur sungai. Penduduk yang membuang sampah ke tempat sampah berjumlah 57%, membuang sampah ke pekarangan 28%, dan membuang sampah ke sungai sebanyak

15%. Sampah yang dibuang ke pekarangan berpotensi masuk ke sungai mengikuti aliran air. Dengan demikian hampir separoh penduduk masih melakukan pembuangan sampah yang tidak sesuai dengan kaidah *water culture*.

### 3. Pengelolaan mata air dan air tanah

DAS Garang hulu merupakan daerah perbukitan, lereng vulkan, dan kerucut vulkan. Oleh karena itu di daerah tersebut banyak dijumpai mata air. Sebagian besar (97%) penduduk menyatakan bahwa di lingkungan tempat tinggal mereka terdapat mata air. Air yang berasal dari mata air tersebut digunakan untuk air bersih (64%), mengairi sawah (18%) dan dibiarkan mengalir ke sungai (18%). Kenyataan lain menunjukkan bahwa di daerah ini juga terjadi penyedotan air dari mata air untuk keperluan komersial. Namun sebagian besar penduduk (85%) mengungkapkan bahwa mata air di daerah mereka hanya digunakan untuk pemenuhan kebutuhan air bersih dan mengairi sawah. Berdasarkan data ini menunjukkan bahwa mata air memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan penduduk. Oleh karenanya wajar apabila mata air di lingkungan tempat tinggal mereka dilestarikan. Cara yang dilakukan penduduk untuk melestarikan mata air tersebut adalah dengan penghijauan (33%) dan penanaman tanaman keras di sekitar mata air (27%). Sebagian penduduk lainnya (40%) tidak berbuat apa-apa atau membiarkan mata air itu apa adanya. Berdasarkan pengamatan mereka mata air yang ada di lingkungan tempat tinggal debitnya tetap atau tidak berubah (57%) dan sebagian lainnya mengatakan debit mata air sekarang makin mengecil (30%). Dari 30% penduduk yang menyatakan debit mata air makin mengecil tersebut, sebagian besar (54%) terjadi sejak tahun 1990-an dan sebagian lainnya (39%) terjadi sejak tahun 2000-an. Kejadian ini dapat dipahami seiring terjadinya perubahan tataguna lahan, terutama perubahan lahan hutan menjadi permukiman dan lahan pertanian, serta lahan pertanian menjadi lahan permukiman.

### 4. Pengelolaan sungai kecil

Untuk menahan air hujan agar tidak segera mengalir ke laut, perlu usaha yang berupa mempertinggi retensi sungai terhadap banjir, maksudnya bagaimana banjir bisa disebar sepanjang sungai, dan menahan banjir di sepanjang wilayah sungai, sempadan sungai, dan badan sungai, dan pada sungai-sungai kecil di daerah hulu suatu daerah aliran sungai (DAS). Banjir kecil-kecil sepanjang alur sungai, dibutuhkan oleh ekologi sungai untuk dapat bertahan hidup. Cara retensi sepanjang alur sungai dapat dilakukan dengan mengembangkan daerah-daerah sepanjang alur sungai untuk tempat parkir air sebelum mengalir ke hilir. Atau dengan kata lain, sungai

kecil di daerah hulu DAS dapat difungsikan sebagai polder alamiah penampung sementara aliran air atau banjir. Namun demikian penduduk yang melakukan usaha ini dapat dikatakan belum ada. Sebagian besar penduduk (70%) menyatakan sungai-sungai kecil yang ada di lingkungan tempat tinggal dibiarkan begitu saja secara alami, dan sebagian lainnya melakukan dengan menata tebing sungai (20%) dan pelurusan alur sungai (11%).

## 5. Pengembangan model agro-konservasi

Pengembangan model agro konservasi secara terpadu di DAS Garang pada prinsipnya lebih menekankan pada upaya peningkatan pendapatan masyarakat khususnya petani di kawasan tersebut. Upaya konservasi diarahkan pada penanaman tanaman produktif yang dapat menambah penghasilan keluarga. Kesadaran dan peran masyarakat sangat diperlukan dalam menangani erosi lahan dan tindakan konservasi oleh masyarakat pada DAS Garang hulu menuju pada bentuk agrokonservasi. Menurut Bruner (2001) peranan penting dari masyarakat lokal sebagai perusak lingkungan sekaligus berperan sebagai pengendali lingkungan. Program kegiatan yang dapat diterapkan untuk pengelolaan lingkungan adalah dengan melakukan pendidikan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dalam memelihara lingkungan. Selain itu program konservasi yang menguntungkan dengan memberikan pembagian keuntungan, juga praktek kegiatan konservasi masyarakat yang lebih radikal.

Ekspansi ekonomi, pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan pengembangan membutuhkan pola konsumsi yang lebih besar. Pada gilirannya, permintaan konsumen terus meningkat meliputi kebutuhan air bersih, energi, lahan pertanian, hasil hutan, dan produksi ikan. Produksi secara global memungkinkan pemanenan alam pada tingkat yang lebih cepat, disinilah peran konservasi lahan menjadi sangat penting (Agrawal and Redford, 2009).

## STRATEGI PENGUATAN MASYARAKAT SEKITAR SUNGAI

Program dan kegiatan pengelolaan DAS Garang terpadu ditetapkan dalam upaya mendukung terselenggaranya pengelolaan DAS sesuai dengan kebijakan yang ditempuh dalam pengelolaan DAS, antara lain:

### a. Program dan kegiatan pengendalian tata air DAS

Program dan kegiatan pengendalian tata air DAS meliputi upaya pengendalian daya rusak air, land use planning dan pelestarian sumber daya air.

- b. Program dan kegiatan pengembangan kondisi lahan yang produktif sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan DAS secara berkelanjutan.

Program dan kegiatan ini meliputi upaya pemulihan/rehabilitas hutan dan lahan, land use planning, pengelolaan penggunaan lahan produktif dan pengelolaan lahan dan vegetasi diseluruh kawasan.

- c. Program dan kegiatan pengembangan kelembagaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan pengelolaan DAS Garang terpadu memiliki tujuan untuk mewujudkan kondisi tata air DAS yang optimal, terwujudnya kondisi lahan yang produktif sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan DAS secara berkelanjutan, dan pengembangan kelembagaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kondisi tata air yang optimal meliputi: *land use planning*, mewujudkan penataan wilayah DAS Garang yang terintegrasi antar wilayah, antar sektor dan antar pemangku kepentingan, pelestarian/konservasi pada kawasan pemukiman dan fasilitas umum, pengendalian daya rusak air (pengendalian erosi dan sedimentasi, pengendalian daya rusak air, pengembangan sumberdaya air, peningkatan *water yield*, pendayagunaan sumberdaya air, dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam upaya mencegah perusakan dan pencemaran lingkungan hidup baik didarat, perairan maupun udara sehingga masyarakat memperoleh kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Untuk mewujudkan kondisi tata air yang optimal, strategi yang digunakan pada land use planning adalah Restorasi/reklamasi/konservasi pada seluruh kawasan dengan mengacu pada kesesuaian lahan, IPL dan KPL sesuai dengan standar dan kriteria yang ditetapkan, kebijakan yang diambil adalah penataan kembali penggunaan lahan yang ada berdasarkan kesesuaian lahan dan atau RTRW, dan program yang disusun adalah restorasi/reklamasi/konservasi pada hutan lindung, hutan produksi dan kawasan budidaya.

Strategi yang digunakan dalam mewujudkan penataan wilayah DAS Garang yang terintegrasi antar wilayah, antar sektor dan antar pemangku kepentingan adalah mengembangkan kerjasama antar wilayah, sektor dan pemangku kepentingan Kab/Kota dalam pengelolaan DAS Garang, mengoptimalkan peranan rencana tata ruang DAS sebagai basis perijinan, dan mengoptimalkan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat dalam pengelolaan tata ruang DAS Garang. Kebijakan yang diambil adalah mengoptimalkan peran dan fungsi BAPPEDA Prov Jateng dan Kab/Kota serta BPDAS Pemali Jratun dalam perencanaan wilayah DAS Garang, mengoptimalkan fungsi Dinas/pemangku kepentingan di Prov. Jawa Tengah dan Kab/Kota dalam peman-

faatan dan pengendalian wilayah DAS, dan menertibkan ijin yang tidak sesuai tata ruang DAS Garang. Program yang disusun adalah pengembangan rencana tata ruang wilayah DAS Garang, legislasi penataan tata ruang wilayah DAS Garang, pengembangan sistem perijinan berbasis tata ruang di wilayah DAS Garang, pengawasan dan penertiban ijin pengelolaan wilayah DAS Garang, dan advokasi dan penyuluhan pengelolaan DAS Garang.

Strategi yang digunakan pada pelestarian/konservasi pada kawasan pemukiman dan fasilitas umum adalah melibatkan masyarakat secara luas dalam penghijauan lingkungan dengan harapan terciptanya ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai resapan air dan pelestarian lingkungan dan penanaman vegetasi sebagai pelindung, pengembalian ekosistem wilayah dan penyerapan polutan CO<sub>2</sub>. Kebijakan yang diambil adalah pengendalian lingkungan di wilayah pemukiman dan fasilitas umum dan pengupayakan keseimbangan lingkungan perkotaan. Program yang disusun adalah penghijauan lingkungan dan pembangunan hutan kota.

Strategi yang digunakan pada pengendalian daya rusak air adalah pengendalian erosi dan sedimentasi pada bidang olah di wilayah *up land* yang diarahkan mengendalikan *surface run off* dengan penerapan pemantapan drainase wilayah, pengendalian morfoerosi pada tebing sungai dalam bentuk reboisasi/penghijauan dengan jenis vegetasi yang mempunyai perakaran kuat dalam mendukung stabilitas tebing sungai, pengendalian erosi dan sedimentasi pada alur sungai dengan membangun konstruksi sedimen trap secara sederhana yang diharapkan mampu dikembangkan oleh masyarakat, melakukan pengendalian daya rusak air secara menyeluruh yang mencakup pencegahan, penanggulangan dan pemulihan kualitas lingkungan akibat daya rusak air, membuat peta rawan bencana banjir, tanah longsor dan kekeringan, mengembangkan sistem pendeteksi banjir dan informasi dini, meningkatkan kembali land cover yang sesuai pada daerah radius 200 m dari sumber air dan pada catchment area sumber mata air, mengendalikan surface runoff dengan menampung air hujan dari rumah-rumah penduduk kedalam sumur resapan, mengendalikan *surface runoff* dengan meresapkan air hujan kedalam biopori, penyimpanan/penampungan air hujan guna mencukupi kebutuhan air pada budidaya lahan kering, menampung air dan meresapkan kedalam tanah serta mengurangi aliran permukaan dan menampung sedimentasi pada kawasan budidaya, melakukan konservasi melalui perlindungan dan pelestarian sumber mata air, pengawetan air serta pengelolaan kualitas air dan pencemaran air dengan mengacu pada pola pengelolaan sumberdaya air yang ditetapkan, melaksanakan kegiatan prokasih secara intensif dan berkelanjutan, mendayagunakan sumber daya air melalui kegiatan penatagunaan penyediaan penggunaan, pengembangan dan pengusaha sumberdaya air, memelihara fungsi



sarana dan prasarana pengairan sesuai dengan tujuan dan umur yang direncanakan, meningkatkan pengolahan limbah dan teknologi industri yang ramah lingkungan di sempadan kali, dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui pelatihan pengolahan limbah cair domestik dan sampah berbasis masyarakat. Kebijakan yang diambil adalah menerapkan teknologi konservasi tanah yang sesuai dengan kondisi biogeofisik wilayah sasaran, pengendalian tebing sungai yang rawan terhadap morfoerosi, pengendalian erosi dan sedimentasi serta morfoerosi pada alur-alur sungai sehingga stabilitas alur sungai terkendali, melakukan pengendalian banjir yang terintegrasi pada sungai utama dan anak sungai dimana pada sungai utama dengan kala ulang 50 tahun, pada anak sungai dengan kala ulang 10 tahun, penetapan daerah lindung bagi kawasan daerah tangkapan air, pengendalian dan pengawasan sempadan sungai, danau, waduk, dan mata air, penciptaan sistem peramalan banjir dan informasi dini berbasis masyarakat dengan prioritas daerah rawan banjir, rehabilitasi sumber mata air yang kritis, pengendalian aliran permukaan dan peningkatan resapan air ke dalam tanah, pengendalian aliran permukaan dan peningkatan resapan air ke dalam tanah, membangun model penampungan air hujan berupa embung secara sederhana pada lahan kering, pengendalian daya rusak air pada bidang oleh melalui rorak saluran buntu, peningkatan demand management (efisiensi penggunaan air) dan *supply management* (peningkatan *normal water level*), melibatkan generasi muda, sekolah, pondok pesantren, organisasi non pemerintah dan perguruan tinggi, penyediaan air baku untuk keperluan irigasi, rumah tangga perkotaan dan industri serta penggelontoran kota dilakukan secara konsisten, penciptaan sistem pengelolaan air yang konsisten secara finansial dan kelembagaan, penerapan imbal jasa lingkungan antara daerah hulu-hilir, dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan LH. Program yang disusun adalah rehabilitasi/konservasi tanah, perlindungan tebing sungai pada kawasan hulu, pengendalian erosi dan sedimentasi, melakukan normalisasi anak-anak sungai, meningkatkan (*upgrade*) kemampuan fasilitas pengendalian banjir dan peringatan dini, membuat penetapan daerah lindung bagi kawasan daerah tangkapan air yang kritis, melakukan pengendalian dan pengawasan sempadan sungai, danau, waduk dan mata air bersama semua instansi terkait dan masyarakat, mengembangkan prototip peralatan peramalan banjir dan informasi dini dengan menggunakan teknologi dalam negeri, pembuatan peta resiko banjir di daerah rawan banjir di DAS Garang yang dapat menunjukkan tinggi genangan, tempat berlindung dan rute evakuasi, pelestarian sumber mata air, pengendalian sumberdaya air, pengendalian sumberdaya air, pengendalian sumberdaya air, pengendalian sumber daya air, studi peninggian bendungan, melakukan kegiatan prokasi, penyediaan air sesuai baku mutunya, menjaga umur waduk sesuai perencanaan, merumuskan formula perhi-

tungan biaya jasa pengelolaan sumberdaya air, membahas tarif biaya jasa pengelolaan sumberdaya air untuk pemanfaat komersial, program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, dan program perlindungan dan konservasi sumberdaya alam.

Untuk mewujudkan kondisi lahan yang produktif sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan das secara berkelanjutan, strategi yang digunakan pada rehabilitasi lahan kritis pada kawasan hutan adalah reboisasi pada hutan lindung dan hutan produksi melibatkan/pemberdayaan masyarakat dengan model yang menerapkan model-model sosial forestry, kebijakan yang diambil adalah reboisasi penuh dan pengkayaan tanaman dengan memperhatikan peningkatan pendapatan masyarakat disekitar hutan, dan program yang disusun adalah rehabilitasi hutan dan lahan.

Strategi yang digunakan pada rehabilitasi lahan kritis diluar kawasan hutan adalah menerapkan *model-model agroforestry* yang berorientasi produksi dan konservasi serta peningkatan pendapatan masyarakat dan menerapkan model-model hutan rakyat pola kebun campuran/*alley cropping* yang berorientasi produksi dan konservasi serta peningkatan pendapatan masyarakat. Kebijakan yang diambil adalah rehabilitasi fungsi kawasan lindung yang diarahkan sebagai pengatur tata air selain berfungsi produksi dan rehabilitasi lahan pada kawasan budidaya yg diarahkan guna pengendalian aliran permukaan dan peningkatan fungsi produksi. Program yang disusun adalah rehabilitasi hutan dan lahan.

Strategi yang digunakan dalam meningkatkan dan mempertahankan kawasan konservasi sebagai kawasan lindung adalah kawasan perlindungan sekitar dan dibawahnya, mencegah erosi, longsor, banjir, mengatur tata air, mempertahankan debit air dan memelihara kesuburan tanah. Kebijakan yang diambil adalah memelihara, mengamankan serta mempertahankan kawasan perlindungan setempat (KPS) dan keberadaan hutan alam. Program yang disusun adalah mengamankan dan tidak boleh ada penebangan serta melakukan penanaman dg RHL/pengkayaan dengan tanaman yang cepat tumbuh dan berfungsi sebagai konservasi serta MPTS.

Strategi yang digunakan dalam merehabilitasi sumberdaya alam yang telah rusak dan mempercepat pemulihan cadangan sumberdaya alam, sehingga selain berfungsi sebagai penyangga sistem kehidupan, juga memiliki potensi dimanfaatkan secara berkelanjutan adalah Upaya rehabilitasi dan konservasi daerah DAS Garang Hulu. Kebijakan yang diambil adalah memperbaiki hulu DAS. Program yang disusun adalah Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumberdaya alam.

Strategi yang digunakan dalam meningkatkan perlindungan hutan di lokasi rawan gangguan adalah meningkatkan patroli, pengawasan dan upaya penegakan hukum. Kebijakan yang diambil adalah pemberantasan pencurian kayu di hutan negara.

Strategi yang digunakan dalam meningkatkan pengendalian kebakaran hutan di lokasi rawan kebakaran adalah meningkatkan penguatan kelembagaan, SDM dan masyarakat serta sarpras dalkarhut. Kebijakan yang diambil adalah pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Program yang disusun adalah perlindungan dan konservasi sumberdaya alam.

Strategi yang digunakan dalam sertifikasi pengelolaan hutan lestari (PHL) *forest stewardship council* (FSC) adalah sertifikasi internasional (ekolabel). Kebijakan yang diambil adalah membangun komitmen mewujudkan pengelolaan hutan lestari di Perum Perhutani. Program yang disusun adalah melaksanakan 10 prinsip dan 54 kriteria pengelolaan hutan lestari standart *Forest Stewardship Council* (FSC) sebagai wujud tanggungjawab sosial.

Strategi yang digunakan dalam penyusunan buku rencana pengaturan kelestarian hutan (RPKH) adalah mengoptimalkan pemanfaatan hutan dengan memperhatikan, menjaga, serta mempertahankan kelestarian hutan, lingkungan dan sosial. Kebijakan yang diambil adalah pengaturan dalam pengelolaan hutan untuk menjaga dan mempertahankan kelestarian hutan, lingkungan dan sosial. Program yang disusun adalah pengaturan kegiatan tanaman, pengaturan kegiatan pemeliharaan, pengaturan kegiatan teresan, pengaturan kegiatan penebangan/sadapan, dan menjaga keamanan hutan.

Strategi yang digunakan dalam RUPHR : Green bisnis dan environment care dengan menerapkan prinsip pengelolaan hutan rakyat lestari untuk mencapai kelestarian hasil/manfaat adalah pembentukan unit pengelolaan hutan rakyat lestari melalui sosialisasi program, inventarisasi pohon dan penataan kawasan (lahan), pembentukan inti dan plasma hutan rakyat, perhitungan produksi tahunan dan penyusunan rencana pengelolaan atau rencana perusahaan. Kebijakan yang diambil adalah kerjasama kemitraan dan investasi dengan kelompok tani hutan rakyat/stakeholder lainnya pada lahan di luar kawasan hutan dengan bagi hasil. Program yang disusun adalah melakukan aktivitas pada hutan rakyat untuk menentukan unit-unit perusahaan (dikelola oleh kelompok tani hutan rakyat) dan menjadi unit pengelolaan hutan rakyat, menjalin sinergisitas dengan segenap stakeholders (Pemda, LSM, organisasi profesi, pengembangan kelembagaan (*capacity building*) kelompok tani hutan rakyat dalam rangka kemandirian masyarakat, pembentukan kelompok-kelompok tani hutan rakyat, unit perusahaan dan unit pengelolaan hutan rakyat, pembentukan inti dan plasma pengembangan hutan rakyat,

pemberian insentif usaha (dana talangan, paket usaha produktif), bimbingan teknis dan alih teknologi budidaya pengelolaan hutan, pembangunan sistem informasi database hutan rakyat, pengembangan industri pengolahan kayu rakyat, dan sertifikasi.

Strategi yang digunakan dalam mengelola sumberdaya perikanan dan kelautan di kawasan DAS Garang berwawasan lingkungan adalah mengembangkan usaha tangkap yang berkelanjutan, mengembangkan usaha budidaya perikanan yang berwawasan lingkungan, dan mengelola lingkungan dan sumberdaya perikanan, pesisir dan laut secara lestari. Kebijakan yang diambil adalah mengembangkan sarana prasarana dan teknologi penangkapan yang ramah lingkungan, mengembangkan sarana prasarana dan teknologi budidaya perikanan yang ramah lingkungan, dan membina masyarakat perikanan dalam pengelolaan lingkungan dan sumberdaya perikanan, pesisir dan laut secara lestari. Program yang disusun adalah pengendalian dan pengawasan usaha perikanan tangkap, pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha perikanan budidaya, pembinaan dan pengawasan lingkungan dan sumberdaya perikanan, pesisir dan laut, dan pengembangan konservasi dan rehabilitasi lingkungan di wilayah pesisir dan DAS Garang.

Strategi yang digunakan dalam rehabilitasi dan pengembangan ekosistem mangrove adalah merehabilitasi kawasan mangrove yang terjadi degradasi. Kebijakan yang diambil adalah merehabilitasi dan pengembangan kawasan mangrove sesuai dengan ekosistemnya. Program yang disusun adalah rehabilitasi hutan dan lahan ekosistem mangrove.

Untuk mewujudkan pengembangan kelembagaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, strategi yang digunakan dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan kapasitas SDM dan kelembagaan masyarakat. Kebijakan yang diambil adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, penciptaan dukungan berkesinambungan untuk suatu sistem yang legal maupun aparaturnya mampu menangani masalah SDA dan lingkungan secara bertahap, mendorong kerjasama dalam penegakan peraturan yang sudah ada melalui usaha persuasif maupun kooperatif, mendorong peran serta masyarakat dengan dukungan koordinasi yang baik dari aparat dan instansi terkait dalam usaha pelestarian air, sosialisasi kepada masyarakat bantaran sungai dan pemangku kepentingan yang lain, sistem insentif dan disinsentif diterapkan secara bertahap untuk mendorong efisiensi penggunaan air dan pengendalian pencemaran air, penciptaan suasana kondusif untuk pengembangan kerja sama dan jalinan koordinasi dalam pengelolaan sumberdaya air, dan pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat sekitar hutan, sungai, waduk, mata air. Program yang disusun adalah perlindungan dan konservasi sumberdaya alam, mendo-

rong masyarakat untuk selalu memberikan dukungan dalam penanganan masalah sumberdaya air dan lingkungan hidup, penegakan hukum, mengikutsertakan masyarakat dalam pemeliharaan sungai, mensosialisasikan upaya pemeliharaan kualitas air, menerapkan kebijakan tarif penggunaan air, konsistensi dalam sinkronisasi pelaksanaan UU, PP dll dengan Perda, SK Gubernur, dan memberikan bantuan modal kerja bagi masyarakat di sekitar hutan, sungai, waduk, dan mata air.

Strategi yang digunakan dalam Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) adalah meningkatkan peran dan tanggungjawab perusahaan dan masyarakat terhadap keberlanjutan fungsi hutan, menselaraskan kegiatan pengelolaan sumberdaya hutan dengan pembangunan wilayah, dan meningkatkan pendapatan perusahaan, masyarakat, dan pihak lain yg berkepentingan. Kebijakan yang diambil adalah tercipta keseimbangan pengelolaan hutan dan indek pembangunan masyarakat sekitar hutan. Program yang disusun adalah mengikutsertakan masyarakat desa hutan dengan pemanfaatan lahan hutan, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa hutan dalam pemanfaatan ketahanan pangan, air dan energi lainnya.

Strategi yang digunakan dalam peningkatan pengetahuan dan ketrampilan petani adalah Sekolah lapang. Kebijakan yang diambil adalah pengembangan agribisnis. Program yang disusun adalah peningkatan SDM Petani dan advokasi dan penyuluhan pengelolaan DAS Garang.

Kegiatan pengelolaan DAS Garang terpadu terbagi dalam 3 (tiga) kegiatan yaitu kegiatan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Masing-masing kegiatan memiliki tujuan dan fungsi yang melibatkan pemangku kepentingan dan masyarakat. Pihak yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan DAS Garang terpadu diantaranya Dinas Kehutanan Prov/Kab/Kota BPDAS Pemali Jratun, BBWS Pemali Juana, Dinas Kehutanan Prov/Kab/ Kota, LH Kab/ Kota, Dinas PSDA Prov Jateng, Balai PSDA Seluna, Dinas PU Pengairan Kab/ Kota, masyarakat, Pemda Prov/Kab/Kota, Bappeda Prov./Kab/Kota, BBWS Pemali Juana, LSM, universitas, industri, PU Cipta Karya dan Tata Ruang, Kodim, Polres, Kejari, Pengadilan Negeri, Dishut, Muspika setempat, LMDH, Kelompok tani hutan, LSM dan organisasi profesi lainnya.

## **PENUTUP**

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan DAS Garang belum dilaksanakan sesuai yang diamanatkan program aksi pengelolaan lingkungan DAS Garang. Belum adanya koordinasi antara penanggung jawab program aksi, sehingga banyak program

yang belum terlaksana yang memberikan konsekuensi kualitas air belum sesuai dengan kelas air yang ditetapkan bahkan belum mencapai kelas air sasaran.

2. Bentuk edukasi konservasi untuk pengelolaan sungai yang berbasis masyarakat diantaranya pengelolaan dan pelestarian air di lingkungan tempat tinggal, pengelolaan sampah, pengelolaan mata air dan air tanah, pengelolaan sungai kecil, dan pengembangan model agro-konservasi.
3. Strategi penguatan masyarakat di DAS Garang dilakukan dengan program dan kegiatan pengelolaan DAS Garang terpadu yang ditempuh melalui program dan kegiatan pengendalian tata air DAS, pengembangan kondisi lahan yang produktif sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan DAS secara berkelanjutan, dan pengembangan kelembagaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mencapai pengelolaan DAS Garang terpadu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka ada beberapa hal yang dapat dilakukan diantaranya:

1. Meningkatkan sosialisasi mengenai Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 156 tahun 2010 tentang Peruntukan Air dan Pengelolaan Kualitas Air Sungai Garang di Provinsi Jawa Tengah kepada seluruh pihak terkait (pemerintah, masyarakat dan swasta) sehingga bersama-sama dapat melaksanakan program aksi yang telah ditetapkan untuk mencapai kualitas air sesuai peruntukannya.
2. Meningkatkan koordinasi antar instansi penanggung jawab dalam pelaksanaan program aksi pengelolaan lingkungan dengan mengajak peran serta masyarakat dan pihak terkait serta mempertahankan kegiatan yang telah dilaksanakan pada komunitas yang terbentuk untuk peduli akan DAS Garang.
3. Melakukan penyuluhan maupun kegiatan yang melibatkan masyarakat untuk mengelola sungai dengan mengembangkan kearifan lokal yang ada.
4. Dorongan pemerintah baik dalam bidang pertanian maupun non pertanian melalui kegiatan penyuluhan, pelatihan, maupun sosialisasi diperlukan untuk mewujudkan strategi penghidupan berkelanjutan di sekitar DAS Garang.

## REFERENSI

Asdak, C. 2010. Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Awang, S. A. 2008. *Pemberdayaan Masyarakat dan Kebijakan Deliberative*. Laboratorium Ekologi Sosial dan Politik Sumberdaya Hutan (ESPSDH), Yogyakarta: Pascasarjana Program Studi Ilmu Kehutanan UGM.
- Dewi Indrawati -- Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan DAS Mikro: Konsep dan Implementasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013. Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Bagungan Kelompok Tani, Jakarta: Departemen Pertanian.
- DFID. 2005. Sustainable Livelihoods Guidance Sheets. London: Department for International Development (UK). <http://www.livelihoodscentre.org> pada tanggal 12 Mei 2018.
- Direktorat Jenderal SDA. 2007. *Studi Penanganan Sedimentasi Waduk Serbaguna Wonogiri*. Laporan Akhir Seme-ntara Volume II Laporan Utama JICA. Departemen Pekerjaan Umum.
- Frimansyah, H. 2012. "Tingkat Keberdayaan Masyarakat dalam Program Pemberdayaan Masyarakat di Kota Banjarmasin dan Kabupaten Tanah Laut." *Jurnal Agribisnis Perdesaan*, 2(1):53-67.
- Hadi, A. 2007. Prinsip Pengelolaan Pengambilan Sampel Lingkungan, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Indrawati, D.R., Adi, R. N., Subaktini, D., dan Kusumedi, P. 2009. *Analisis Tipologi Sosial dan Pengaruhnya terhadap Kinerja Daerah Aliran Sungai (DAS)*. Laporan Hasil Penelitian Balai Penelitian Kehutanan Solo. Badan Litbang Kehutanan.
- Karsidi, R. 2002. *Pemberdayaan Masyarakat Petani Dan Nelayan Kecil*. Semiloka Pemberdayaan Masyarakat Di Jawa Tengah Dalam Rangka Pelaksanaan Otoda, Badan Pemberdayaan Masya-rakat Jateng, Semarang 4-6 Juni 2002. Diakses pada tanggal 12 Maret 2015. <[http://eprints.uns.ac.id/783/1/195707071981031006ravik\\_1.pdf](http://eprints.uns.ac.id/783/1/195707071981031006ravik_1.pdf)>.
- Kartasapoetra, A.G. 2001. Teknologi Penyuluhan Pertanian, Jakarta: Bumi Aksara
- Kartasmita. G. 1997. *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan yang Berakar pada Masyarakat*. Sarasehan DPD Golkar Tk. I Jawa Timur. Diakses pada tanggal 12 Agustus 2011. <<http://www.ginandjar.com/public/09Pemberdayaan Masyarakat.pdf>>.
- Mardikanto, T. 2009. Sistem Penyuluhan Pertanian Surakarta, Solo: Sebelas Maret University Press
- Marlena, Bekti. 2012. "Kajian Pengelolaan DAS Garang Untuk Memenuhi Kualitas Air Sesuai Dengan Peruntukannya". *Tesis*. Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.

- Martopo, A., Hardiman, G., & Suharyanto, S. 2013. Strategi Penghidupan Berkelanjutan (Sustainable Livelihood) di Kawasan Dieng (Kasus di Desa Buntu Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo). *Ekosains*, 5(2).
- Mungmachon, M.R., 2012. Knowledge and local wisdom: community treasure. *International Journal of Humanities and Social Science*, 2(13), pp.174-181.
- Nawir, A.A., Murniati dan L. Rumboko. 2008. *Rehabilitasi Hutan di Indonesia. Akan Kemanakah Arahnya Setelah Lebih dari Tiga Dasawarsa*. CIFOR. Diakses pada tanggal 14 Desember 2013. <[http://www.cifor.cgiar.org/publications/pdf\\_les/books/B.Nawir 0801 Ina.pdf](http://www.cifor.cgiar.org/publications/pdf_les/books/B.Nawir%200801%20Ina.pdf)>.
- Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.29/Menhut-II/2013. Pedoman Pendampingan Kegiatan Pembangunan Kehutanan, Jakarta: Departemen Kehutanan.
- Pramono, I.B., Purwanto, dan Indrawati, D. R. 2009. Pola Agroforestry Pada Lahan Miring (PALM) Untuk Mendukung Ketahanan Pangan dan Kelestarian Lingkungan. Laporan Hasil Penelitian DIKTI. Balai Penelitian Kehutanan Surakarta.
- Pudjianto, K. 2009. Partisipasi Masyarakat Dalam Rehabilitasi Hutan, Lahan dan Konservasi Sumberdaya Air di Sub DAS Keduang, Daerah Hulu DAS Bengawan Solo. *Tesis*. Pascasarjana IPB. Rahayu, E.S. 2007. "Analisis Sosial Ekonomi Masyarakat Terhadap Kelestarian Waduk Wonogiri." *KONPERNAS PERHEPI 2007*, (07): 34-48.
- Subejo dan Supriyanto. 2004. Metodologi Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat. *Short Paper disampaikan pada Kuliah Intensif Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan*. Study On Rural Empowerment (SOREM). Dewan Mahasiswa Fakultas Pertanian UGM tanggal 16 Mei 2004, Yogyakarta: Faperta UGM.
- Suhandini, Purwadi. 2008. Perilaku Masyarakat Terhadap Penggunaan dan Pelestarian Air di Lingkungannya (Studi Kasus di Daerah Aliran Sungai Garang, Semarang). *Forum Ilmu Sosial*, 35(1): 38-47.
- Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.132/Menhut-II/2004. *Pedoman Umum Penyuluhan Kehutanan*. Departemen Kehutanan. Jakarta.
- Sutrisno, J., Sanim, B., Saefuddin, A., dan Sitorus, S.P.P. 2011. Arah Kebijakan Pengendalian Erosi Dan Sedimentasi Di Sub Daerah Aliran Sungai Keduang Kabupaten Wonogiri. *Sains Tanah - Jurnal Ilmiah Ilmu Tanah dan Agroklimatologi*, 8(2): 105-118.
- Undang-undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
- Widyaningsih, I. W. 2008. "Pengaruh Perubahan Tata Guna Lahan Di Sub Das Keduang Ditinjau Dari Aspek Hidrologi". *Tesis*. Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.



---

## URGENSI *SUSTAINABILITY REPORTING* DI UNIVERSITAS

Maylia Pramono Sari dan Surya Raharja

### PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi di seluruh dunia saat ini, selaras dengan The Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang dicetuskan pada pertemuan PBB di New York (September 2015). Sustainable Development atau Pembangunan Berkelanjutan merupakan pembangunan yang mencakup kebutuhan masyarakat tanpa menyepelkan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. SDGs bermula dari kesadaran bahwa bumi dan sumber daya alam ada saat ini bukan milik generasi sekarang saja, namun perlu dilestarikan untuk pemenuhan kebutuhan generasi mendatang (Hřebíček et al., 2015). SDGs berisi 17 tujuan dan 169 target yang disepakati oleh para pemimpin dunia termasuk Indonesia, untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. Pembangunan berkelanjutan diharapkan dapat mengatasi keteringgalan pembangunan di seluruh dunia, baik di negara maju (ketimpangan serta konsumsi dan produksi yang berlebihan) dan negara-negara berkembang (pendidikan, kesehatan, kemiskinan, ketersediaan air minum, perkotaan, sanitasi dan perlindungan ekosistem laut dan hutan).

SDGs ini berdampak pula pada bidang akuntansi, khususnya terkait pelaporan keuangan. Menurut rerangka konseptual SAK 2015 (Revisi 2016), tujuan pelaporan keuangan yaitu menyediakan informasi keuangan entitas yang bermanfaat bagi para stakeholder dalam membuat keputusan. Dalam era globalisasi saat ini telah menuntut perubahan fungsi pelaporan keuangan sehingga mencakup stakeholder yang lebih luas, tidak tefokus hanya kepada investor dan kreditor saja. Pelaporan Keuangan mengalami evolusi secara berurutan meliputi Financial Reporting (FR), Management Reporting (MR), Green Reporting (GR), Sustainability Reporting (SR) dan Integrated Reporting (IR). Kelemahan Financial Reporting (FR) yaitu hanya menyajikan informasi terkait indikator keuangan sedangkan informasi lain yaitu sosial, lingkungan, tatakelola, risiko dan prospek, keberlanjutan bisnis, dll diabaikan. Hal inilah yang melatarbelakangi dibutuhkannya Laporan keberlanjutan atau Sustainability Report (SR) yaitu laporan terkait dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial dari kegiatan sehari-hari suatu entitas (Global Reporting Initiative,

2019). Sustainability Reporting (SR) merupakan model pelaporan informasi kepada para stakeholder yang mengintegrasikan financial reporting, social reporting, environment reporting dan corporate governance reporting terintegrasi dalam satu pelaporan (Lako, 2018).

Sustainability Report telah banyak diimplementasikan oleh berbagai korporasi di dunia, khususnya di Indonesia. Terbukti dengan banyaknya penelitian terkait Sustainability Reporting yang dilakukan diberbagai negara yaitu (Faisal et al., 2012) dengan sampel perusahaan dunia; (Baviera-Puig et al., 2015) di Spanyol; (Hřebíček et al., 2015) in Ceko; (Ceulemans et al., 2015) menggunakan data GRI Database 2013-2014; (Bellantuono et al., 2016) di Italia; (Dagilienė & Mykolaitienė, 2015) di Lithuania; (Krivačić, 2017) di Croatia; (Gutierrez & Sepulveda, 2018) di Canada; (Steinhofel et al., 2019) di German; (Kumar & Prakash, 2019) di India. Sedangkan penelitian di Indonesia, dilakukan oleh (Saadah, 2017); (Setiani, 2018); (Ferry Budiman; Supatmi, 2008); (Kusumawardani, Anisa et al., 2017); (Kurniawan et al., 2018); (Kustinah et al., 2017); (Tarigan, 2017) dan (Sari, Raharja, et al., 2020). Mayoritas korporasi global menggunakan model pelaporan yang digagas dan dikembangkan oleh Global Reporting Inisiatives (GRI) sejak tahun 2001 hingga saat ini (GRI G4). Di Indonesia, dengan tidak adanya regulasi pemerintah, maka Sustainability Reporting bersifat sukarela atau tergantung pada inisiatif perusahaan. Di lain pihak pelaporan ini memiliki implikasi yang sangat luas terhadap biaya (costs) dan potensi risiko (risks) yang besar bagi perusahaan. Sehingga dibutuhkan kesadaran akan manfaat ekonomi dan nonekonomi dalam jangka pendek dan jangka panjang serta komitmen yang kuat dalam menerapkan model pelaporan tersebut secara berkelanjutan.

Penelitian (Dienes et al., 2016) menunjukkan hasil bahwa perhatian organisasi terhadap laporan berkelanjutan meningkat karena dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan manajemen, praktik akuntansi, dan praktik pelaporan di perusahaan maupun di sektor publik. Perguruan tinggi (universitas) merupakan pusat akademis dari suatu negara yang relevan dengan aspek lingkungan dan sosial. Sebagai sebuah entitas, perguruan tinggi pada dasarnya memiliki kepentingan yang sama dengan entitas bisnis karena perguruan tinggipun berusaha agar tetap survive dikenal oleh masyarakat serta menjadi pilihan dalam menempuh pendidikan (Rofelawaty, 2014). (Ryan et al., 2010) menyatakan bahwa lembaga perguruan tinggi di seluruh dunia bersiap melakukan praktik sustainable secara efisien agar menghasilkan pembelajaran yang berguna dan memberikan kontribusi yang bersifat lokal dan regional sebagai tujuan dari dilakukannya sustainable. Pelaporan berkelanjutan digunakan sebagai alat untuk menilai seberapa efektif kontribusi perguruan tinggi kepada keberlanjutan. Peran perguruan tinggi atas keberlanjutan dapat dilihat dari upaya yang telah dilakukan dunia pendidikan

terhadap pembangunan dan riset berkelanjutan, penghijauan kampus dan pengaruh sosial. Beberapa penelitian terkait pelaporan berkelanjutan di perguruan tinggi telah dilakukan di berbagai negara yaitu di (Ryan et al., 2010) di Asia Pacific; (Sordo et al., 2016) di Italy; (Fonseca et al., 2011) di Canada; (Beringer et al., 2008) di Atlantic Canada; (Ceulemans et al., 2015) menggunakan GRI Database 2013-2014; (Vagnoni & Cavicchi, 2015) di Italy; (Chatelain-Ponroy & Morin-Delerm, 2016) di France; (Dagilienė & Mykolaitienė, 2016) di Lithuania; (Gutierrez & Sepulveda, 2018) di Canada.

Di Indonesia belum banyak dilakukan penelitian terkait pelaporan berkelanjutan pada perguruan tinggi karena implementasi Sustainability Reporting belum direspon dengan baik oleh Perguruan Tinggi di Indonesia. Beberapa penelitian di Indonesia dilakukan oleh (Yasbie & Barokah, 2018); (Rofelawaty, 2014) dan (Mutia, 2017). Pada tahun 2018 terdapat 66 Perguruan Tinggi di Indonesia yang telah terdaftar di UI Greenmetric World University Rank. Hal ini berarti hanya 66 dari kurang lebih 5000 perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia yang menunjukkan sustainability performance. Hal ini diperparah lagi, dari 66 perguruan tinggi tersebut, tidak satupun yang mempublikasikan sustainability performance ke dalam sustainability reporting. (Sari, Hajawiyah, et al., 2020) melakukan penelitian terkait Sustainability Reporting di Universitas yang terdaftar di 2018 UI Green Metric Word Rank, didapatkan hasil bahwa tidak ada perbedaan antara universitas swasta dan negeri, tingkat kepatuhan GRI index masih rendah dan beberapa indikator tidak sesuai dengan karakteristik spesifik universitas. Temuan ini tidak sejalan dengan pernyataan Teori Pemangku Kepentingan (Stakeholder Theory) bahwa entitas dengan kinerja yang sangat baik lebih mungkin untuk mendapatkan legitimasi dari stakeholder karena memenuhi kebutuhan informasi yang diperlukan.

(Sari, Raharja, et al., 2020) melakukan perbandingan antara Sustainability Performance Universitas Negeri Semarang dan Universitas Diponegoro. Didapatkan hasil bahwa belum adanya keseragaman bentuk atas laporan berkelanjutan atas Unnes dan Undip, dimana Unnes menggunakan Laporan Kinerja Universitas dan Undip menggunakan Laporan Renstra Undip. Hal ini disebabkan belum adanya regulasi terkait Sustainability Reporting bagi Perguruan Tinggi. Kedua perguruan tinggi ini juga merupakan perguruan tinggi di bawah kementerian pendidikan tinggi sehingga meskipun pengungkapan yang berbeda namun format laporan keduanya relatif sama. Berdasarkan analisis laporan, Universitas Negeri Semarang (Unnes) memiliki tingkat kesiapan yang lebih baik atas implementasi Pelaporan Berkelanjutan (Sustainability Reporting) dibanding Universitas Diponegoro. Terdapat perbedaan yang signifikan terkait dengan Sustainability Reporting antara Universitas Diponegoro dan Universitas Negeri Semarang. Hal ini memberikan dukungan terhadap Stakeholder Theory bahwa Universitas Negeri Semarang

yang berorientasi pada basis konservasi telah melakukan pengungkapan lebih banyak terkait sosial dan lingkungan dibandingkan Universitas Diponegoro yang berbasis riset.

## **PEMBAHASAN**

Penulis akan menyoroti dua hal terkait dengan urgensi Sustainability Reporting di Universitas. Yang pertama terkait belum adanya regulasi pemerintah Indonesia tentang Sustainability Reporting, sedangkan yang kedua tentang perlunya identifikasi dan perumusan indikator yang sesuai dengan karakteristik spesifik perguruan tinggi.

### **Manfaat Sustainability Reporting Di Universitas**

Belum adanya regulasi pemerintah Indonesia terkait dengan Sustainability Reporting maka pelaporan berkelanjutan hingga saat ini masih bersifat sukarela atau tergantung pada inisiatif masing masing entitas. Di lain pihak pelaporan ini memiliki implikasi yang sangat luas terhadap biaya (costs) dan potensi risiko (risks) yang besar bagi entitas. Sehingga dibutuhkan kesadaran akan manfaat ekonomi dan nonekonomi dalam jangka pendek dan jangka panjang serta komitmen yang kuat dalam menerapkan model pelaporan tersebut secara berkelanjutan. Secara teoritis, penerapan SR diyakini akan membawa manfaat sebagai berikut:

- a. Meningkatkan apresiasi stakeholder terhadap akuntabilitas dan transparansi informasi entitas yang berimplikasi secara positif terhadap kepuasan mereka.
- b. Memberikan lisensi kemudahan kepada entitas dalam keputusan pendanaan dan investasi serta operasi bisnis.
- c. Meningkatkan kinerja bisnis, kinerja keuangan dan nilai entitas dalam jangka panjang.
- d. Meningkatkan citra, reputasi dan goodwill entitas
- e. Meningkatkan inovasi dan continuous improvements, posisi persaingan strategis, dan sistem tatakelola entitas yang baik dan efektif.
- f. Menurunkan risiko bisnis, risiko finansial dan risiko pasar entitas sebagai dampak positif dari apresiasi para pelaku pasar atau stakeholder

### **Indikator Sustainability Reporting Di Universitas**

#### **a. GRI G4 (GRI, 2013)**

GRI (Global Reporting Initiative) memiliki kerangka laporan keberlanjutan yang paling sering digunakan oleh peneliti di seluruh dunia dan berkomit-

men terus-menerus melakukan perbaikan. Fokus pengungkapan GRI (Tabel 1):

1. Indikator Kinerja Ekonomi (*economic performance indicator*)
2. Indikator Kinerja Lingkungan (*environment performance indicator*)
3. Indikator Kinerja Sosial (*social performance indicator*) terdiri dari:
  - a. Tenaga Kerja (*Labour practices and decent work*)
  - b. Hak Asasi Manusia (*Human rights performance*)
  - c. Sosial (*Society*)
  - d. Tanggung jawab Produk (*Product responsibility performance*)

**Tabel 1.** Indikator *Sustainability Reporting* di Korporasi (GRI G4)

<b>Standar Pengungkapan Umum</b>				
1. Strategi dan analisis				
2. Profil Organisasi				
3. Aspek Material dan Batasan batasan				
4. Keterlibatan pemegang Pancang				
5. Profil Laporan				
6. Tata Kelola				
7. Etika dan Integritas				
<b>Standar Pengungkapan Khusus</b>				
<b>Ekonomi</b>	<b>Lingkungan</b>	<b>Praktik Ketena- gakerjaan dan Kenyamanan Bekerja</b>	<b>Hak Asasi Manusia</b>	<b>Masyarakat</b>
1. Kinerja Ekonomi	1. Material	1. Kepegawaian	1. Investasi	1. Masyarakat Lokal
2. Keberadaan Pasar	2. Energi	2. Hubungan Manajemen/ Tenaga Kerja	2. Nondiskriminasi	2. Anti korupsi
3. Dampak Ekonomi tidak langsung	4. Air	3. Kesehatan dan Keselamatan Kerja	3. Kebebasan berserikat	3. Kebijakan Publik
5. Praktik Pengadaan	6. Keanekaragaman Hayati	4. Pelatihan dan pendidikan	4. Tenaga kerja di bawah umur	4. Perilaku Anti Persaingan
	7. Emisi	5. Keberagaman dan Kesetaraan Peluang	5. Tenaga kerja paksa	5. Kepatuhan
	8. Enfluen dan Limbah	6. Kesetaraan Remunerasi antar Gender	6. Praktik Pengamanan	6. Assetment atas Dampak terhadap

			Masyarakat Pemasok
9. Produk dan Jasa	7. Assesment atas praktik ketenagakerjaan pemasok	7. Hak Adat	7. Mekanisme Pengaduan atas Dampak terhadap masyarakat
10. Kepatuhan	8. Mekanisme Pengaduan atas Masalah Ketenagakerjaan	8. Assessment	8. Tanggungjawab Produk
11. Transportasi		9. Assesment atas praktik Hak Asasi Manusia Pemasok	9. Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan
12. Lain lain		10. Mekanisme Pengaduan atas Masalah Hak asasi Manusia	10. Pelabelan Produk dan Jasa
13. Assesment atas lingkungan pemasok			11. Komunikasi Pemasaran
14. Mekanisme Pengaduan atas Masalah Lingkungan <sup>2</sup>			12. Kepatuhan

**Standar Pengungkapan Umum 7 items**  
**Standar Pengungkapan Khusus 46 items**  
**Total 53 Items**

Source: (GRI, 2013)

**b. Campus Sustainability (Fonseca et al., 2011)**

(Fonseca et al., 2011) melakukan penelitian tentang keadaan pelaporan keberlanjutan di sektor pendidikan tinggi Kanada, sambil memahami siapa yang melaporkan kinerja keberlanjutan, bagaimana informasi dilaporkan, dan apa yang sedang dilaporkan. Kerangka kerja dengan sepuluh kategori dan 56 indikator berdasarkan pedoman Global Reporting Initiative (GRI) dan alat penilaian keberlanjutan kampus dikembangkan untuk menganalisis isi sampel lintas bagian dari laporan keberlanjutan yang diterbitkan oleh 25 universitas terbesar di Kanada. Setiap penulis menganalisis dua hingga tiga laporan. Bukti diperiksa keakuratannya oleh penulis yang berbeda dan akhirnya dibahas dalam kelompok fokus. Analisis ini menunjukkan bahwa pelaporan keberlanjutan adalah praktik yang tidak biasa dan beragam di universitas Kanada. Terutama di bawah koordinasi kantor keberlanjutan atau mahasiswa, tujuh universitas menerbitkan laporan keberlanjutan pada periode yang dianalisis (2006–2008). Sementara semua

laporan berbagi kerangka indikator yang tidak terintegrasi, berbagai pendekatan digunakan dalam pemilihan indikator. Laporan umumnya memiliki ruang lingkup terbatas yang menekankan eko-efisiensi. Nilai potensial dokumen saat ini sebagai alat untuk menginformasikan keputusan berorientasi keberlanjutan terbatas. Sebagian besar studi deskriptif tentang pelaporan keberlanjutan telah membahas perusahaan multinasional besar. Makalah ini adalah salah satu yang pertama untuk mengatasi praktik incipient institusi pendidikan tinggi.(Fonseca et al., 2011).

**c. Kerangka Kerja Campus Sustainability (Alshuwaikhat, 2008)**

Kerangka kerja yang diusulkan oleh Alshuwaikhat dan Abubakar, untuk mencapai kampus keberlanjutan dengan mengadopsi tiga pilar, yaitu: sistem manajemen lingkungan universitas (Environmental Management System/EMS); transportasi umum dan tanggung jawab sosial; dan pengajaran dan penelitian keberlanjutan secara terpadu. Environmental Management System (EMS) adalah serangkaian prosedur, praktik, proses dan sumber daya untuk mengembangkan, mengimplementasikan, mencapai, mengkaji, dan memelihara kebijakan pencapaian lingkungan yang berkelanjutan. Ini terdiri dari dua strategi yaitu pengelolaan dan peningkatan lingkungan, serta kampus.

1. Dapat dilakukan dengan mempromosikan: meminimalkan dampak negatif dari operasi kampus, pencegahan, efisiensi energi, konservasi sumber daya, perbaikan lingkungan, pengurangan limbah, daur ulang, dll.
2. Strategi kedua dapat dilakukan melalui bangunan hijau, transportasi hijau, dan pelestarian kampus.

Partisipasi publik dan tanggung jawab sosial berurusan dengan partisipasi pemangku kepentingan universitas dalam mencapai Keberlanjutan. Ini terdiri dari tiga strategi, yaitu partisipasi, pengabdian kepada masyarakat, dan keadilan sosial. Umum dapat dilakukan melalui komunitas kampus, alumni, dan kemitraan. Layanan masyarakat melalui kesadaran dan kesadaran, serta proyek masyarakat, sementara keadilan melalui pemerataan dan kepedulian terhadap orang-orang cacat.

Pilar terakhir, pengajaran dan penelitian keberlanjutan, adalah terkait dengan konferensi, seminar, dan lokakarya yang dipimpin oleh dalam menumbuhkan keberlanjutan. Universitas juga memiliki menyediakan kursus dan kurikulum yang terkait dengan keberlanjutan, kesehatan dan keselamatan, dan pemukiman layak huni. Penelitian dan pengembangan yang terkait dengan energi terbarukan, perlindungan lingkungan, dan

perubahan iklim juga dapat mendukung upaya universitas untuk mencapai keberlanjutan (Alshuwaikhat, 2008)

**d. Universitas Indonesia (UI) GreenMetric**

UI GreenMetric World University Rank adalah peringkat universitas dunia untuk mengetahui upaya keberlanjutan kampus terkait program dan kebijakan berkelanjutan, meliputi konsep lingkungan, ekonomi dan persamaan. Terdapat 95 universitas dari 35 negara ambil bagian dalam GreenMetric 2010 yaitu dari Amerika (18), Eropa (35), Asia (40) dan Australia (2). Sedangkan pada tahun 2017 meningkat menjadi 619 universitas dari 76 negara di seluruh dunia. UI GreenMetric Rank merupakan satu-satunya pemeringkatan universitas dunia dalam hal berkelanjutan. Tujuan pemeringkatan ini adalah:

- a. Berkontribusi pada bidang pendidikan dan penghijauan kampus secara berkelanjutan
- b. Mempromosikan universitas sebagai agen perubahan sosial
- c. Alat penilaian diri tentang keberlanjutan kampus
- d. Menginformasikan program program berkelanjutan di kampus pada pemerintah, serta masyarakat nasional dan internasional

Manfaat dari pemeringkatan ini adalah internasionalisasi dan pengakuan supaya keberlanjutan pada percaturan global, meningkatkan kesadaran tentang permasalahan keberlanjutan, perubahan dan aksi sosial dan jejaring. Anggota dapat berbagi pengalaman terbaiknya etrkait program berkelanjutan dan membangun jejaring dengan mitra di elvel nasional maupun internasional. (Greenmetric UI, n.d.).

**Tabel 2.** Indikator Sustainability Reporting Di Universitas

GRI G4 & Fonseca et al (2011)	Kerangka Kerja Campus Sustainability (Alshuwaikhat & Abubakar)	Universitas Indonesia Greenmetric
Penelitian	University EMS:	Penataan dan Infrastruktur (SI)
Kebijakan penelitian terkait keberlanjutan	Minimize negative impacts of operations	Perbandingan ruang terbuka dan total area kampus <b>(SI.1)</b>
Sentra/laboratorium penelitian terkait keberlanjutan	Pollution prevention	Persentase area kampus berupa hutan <b>(SI.2)</b>
Program penelitian terkait keberlanjutan	Energy efficiency	Presentase area taman Kampus (termasuk rumput, kebun, dan lain-lain) <b>(SI.3)</b>
Insentif pada penelitian berkelanjutan	Resource conservation	Persentase area permukaan yang dapat menyerap air (tanah atau con-block) <b>(SI.4)</b>



<b>GRI G4 &amp; Fonseca et al (2011)</b>	<b>Kerangka Kerja Campus Sustainability (Alshuwaikat &amp; Abubakar)</b>	<b>Universitas Indonesia Greenmetric</b>
<b>Penelitian</b>	<b>University EMS:</b>	<b>Penataan dan Infrastruktur (SI)</b>
Pendanaan dan bantuan untuk penelitian berkelanjutan	Environmental improvement	Total ruang terbuka dibagi dengan populasi kampus. <b>(SI.5)</b>
Produksi akademik terkait keberlanjutan	Waste reduction	Persentase RKAT Kampus dalam setahun untuk mewujudkan kampus ramah lingkungan <b>(SI.6)</b>
Proyek akademik terkait keberlanjutan	Recycling	<b>Energi dan Perubahan Iklim (EC)</b>
<b>Kurikulum Dan Pengajaran</b>	Green building	Penggunaan peralatan hemat energi (bola lampu daya kecil, LED) <b>(EC.1)</b>
Kebijakan kurikulum yang terkait keberlanjutan	Green transportation	Implementasi Smart Building <b>(EC.2)</b>
Perkuliahan terkait keberlanjutan	Campus preservation	Jumlah sumber energi terbarukan <b>(EC.3)</b>
Mahasiswa yang mengambil perkuliahan terkait keberlanjutan	<b>Public Participation and Social Responsibility</b>	Total penggunaan listrik dibagi populasi kampus <b>(EC.4)</b>
Penilaian literasi keberlanjutan	Campus community	Rasio produksi energi terbarukan dengan total penggunaan energi per tahun <b>(EC.5)</b>
Program pendidikan terkait keberlanjutan	Alumni	Green Building <b>(EC.6)</b>
Insentif non kurikuler terkait keberlanjutan	Partnership	Program pengurangan emisi gas rumah kaca <b>(EC.7)</b>
Beasiswa untuk pendidikan terkait keberlanjutan	Public lectures & awareness	Total jejak karbon dibagi populasi kampus <b>(EC.8)</b>
<b>Bangunan ramah lingkungan dan pengadaan</b>	Community projects	<b>Limbah (WS)</b>
Bangunan Ramah lingkungan dan renovasi	Other services	Program daur ulang sampah <b>(WS.1)</b>
Ruang Terbuka Hijau	Equity	Program Kampus mengurangi penggunaan kertas dan plastik <b>(WS.2)</b>
Kantin	Care for handicap	Pengolahan limbah organik (limbah sayuran dan tumbuhan) <b>(WS.3)</b>
Daur ulang kertas	<b>Sustainability teaching and research</b>	Pengolahan limbah anorganik (kertas, plastik, logam, dll.) <b>(WS.4)</b>
Peranti ramah lingkungan	Conferences, Seminars, Workshop	Penanganan limbah beracun <b>(WS.5)</b>

GRI G4 & Fonseca et al (2011)	Kerangka Kerja Campus Sustainability (Alshuwaikat & Abubakar)	Universitas Indonesia Greenmetric
Penelitian	University EMS:	Penataan dan Infrastruktur (SI)
Furniture ramah lingkungan	Sustainability Health and safety Livable settlements  Renewable energy  Environment protection	Pembuangan limbah cair <b>(WS.6)</b> <b>Water (WR)</b> Implementasi program konservasi air <b>(WR1)</b> Implementasi program pemanfaatan daur ulang air <b>(WR 2)</b> Penggunaan peralatan hemat air (keran sensor otomatis, autoflush toilet dll) <b>(WR3)</b> Rasio penggunaan air berbasis pipa (PAM) dengan total penggunaan air <b>(WR4)</b> <b>Transportation (TR)</b> Ratio jumlah kendaraan dibagi populasi kampus <b>(TR1)</b> Tipe operasional shuttle Kampus <b>(TR 2)</b> Kebijakan mengenai kendaraan bebas emisi <b>(TR 3)</b> Ratio kendaraan bebas emisi dibagi populasi kampus <b>(TR 4)</b> Ratio parkir area terhadap total area kampus <b>(TR 5)</b> Presentase pengurangan area parkir untuk kendaraan pribadi dalam 3 tahun terakhir <b>(TR 6)</b> Inisiatif pembatasan jumlah kendaraan bermotor pribadi yang masuk Kampus <b>(TR 7)</b> Dukungan terhadap pejalan kaki <b>(TR 8)</b> <b>Education and Research (ED)</b> Ratio mata kuliah berkaitan keberlanjutan lingkungan dibanding seluruh mata kuliah <b>(ED 1)</b> Ratio dana riset tema keberlanjutan lingkungan dibanding seluruh dana riset <b>(ED 2)</b> Jumlah publikasi ilmiah tema keberlanjutan lingkungan per tahun <b>(ED 3)</b> Jumlah kegiatan kampus berkaitan keberlanjutan lingkungan per tahun <b>(ED 4)</b> Jumlah organisasi kemahasiswaan berkaitan keberlanjutan lingkungan

GRI G4 & Fonseca et al (2011)	Kerangka Kerja Campus Sustainability (Alshuwaikat & Abubakar)	Universitas Indonesia Greenmetric
Penelitian	University EMS:	Penataan dan Infrastruktur (SI)
		(ED 5)
		Ketersediaan laman keberlanjutan lingkungan
		(ED 6)
		Ketersediaan laporan keberlanjutan lingkungan
		(ED 7)
20 Indikator	24 Indikator	39 Indikator

Dengan membandingkan ketiga indikator Sustainability Reporting bagi Perguruan Tinggi (Universitas) diharapkan diperoleh pengukuran yang komprehensif dan relevan. Dari perbandingan tersebut didapatkan kesimpulan bahwa indikator terkait Sustainability di Perguruan Tinggi meliputi:

- a. Penelitian
- b. Kurikulum dan Pengajaran
- c. Partisipasi Punlik dan Tanggungjawab Sosial
- d. Penataan dan Infrastruktur
- e. Energi
- f. Limbah
- g. Air
- h. Transportasi

## PENUTUP

Perubahan tuntutan stakeholder dari Financial Reporting (FR) ke Sustainability Reporting (SR) merupakan evolusi dari pelaporan keuangan perusahaan termasuk Perguruan Tinggi tidak dapat terelakkan pada saat ini. Praktik pelaporan eksternal yang ada di Perguruan Tinggi saat ini terbatas pada laporan keuangan dan laporan akademik, di mana belum mengakomodasi aspek lingkungan. Di dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan, maka model pelaporan yang dianggap memadai adalah sustainability reporting yang mengandung dimensi ekonomi, lingkungan, dan social. Dengan informasi yang lengkap, relevan, reliable dan berkelanjutan maka diharapkan stakeholder dapat mengambil keputusan ekonomi dan non ekonomi lebih tepat dan akurat. Penulis dapat mengkonstruksi sebuah model pelaporan yang relevan bagi perguruan tinggi sebagai perwujudan akuntabilitas terhadap seluruh stakeholder berupa delapan (8) indikator yaitu Penelitian, Kurikulum dan

Pengajaran, Partisipasi Publik dan Tanggung Jawab Sosial, Penataan dan Infrastruktur, Energi, Limbah, Air dan Transportasi. Sustain

## REFERENCE

- Alshuwaikhat, H. (2008). Higher education for sustainable development An integrated approach to achieving campus sustainability: Assessment of the current campus environmental management practices. *Proceedings of the 4th International Barcelona Conference on Higher Education*, 7(7).
- Baviera-Puig, A., Gómez-Navarro, T., García-Melón, M., & García-Martínez, G. (2015). Assessing the communication quality of CSR reports. A case study on four spanish food companies. *Sustainability (Switzerland)*, 7(8), 11010–11031. <https://doi.org/10.3390/su70811010>
- Bellantuono, N., Pontrandolfo, P., & Scozzi, B. (2016). Capturing the stakeholders' view in sustainability reporting: A novel approach. *Sustainability (Switzerland)*, 8(4). <https://doi.org/10.3390/su8040379>
- Beringer, A., Wright, T., & Malone, L. (2008). Sustainability in higher education in Atlantic Canada. *International Journal of Sustainability in Higher Education*, 9(1), 48–67. <https://doi.org/10.1108/14676370810842184>
- Ceulemans, K., Lozano, R., & Alonso-Almeida, M. del M. (2015). Sustainability reporting in higher education: Interconnecting the reporting process and organisational change management for sustainability. *Sustainability (Switzerland)*, 7(7), 8881–8903. <https://doi.org/10.3390/su7078881>
- Chatelain-Ponroy, S., & Morin-Delerm, S. (2016). Adoption of sustainable development reporting by universities: An analysis of French first-time reporters. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 29(5), 887–918.
- Dagilienė, L., & Mykolaitienė, V. (2015). Disclosure of Social Responsibility in Annual Performance Reports of Universities. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 213, 586–592. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.454>
- Dagilienė, L., & Mykolaitienė, V. (2016). Sustainability reporting in the higher education sector—Case study of Lithuania. *ZögU Zeitschrift Für Öffentliche Und Gemeinwirtschaftliche Unternehmen*, 39(1–2), 163–174.
- Dienes, D., Sassen, R., & Fischer, J. (2016). What are the drivers of sustainability reporting? A systematic review. *Sustainability Accounting, Management and Policy Journal*, 7(2), 154–189. <https://doi.org/10.1108/SAMPJ-08-2014-0050>
- Faisal, F., Towe, G., & Rusmin, R. (2012). Legitimising Corporate Sustainability Reporting Throughout the World. *Australasian Accounting*, 6(2), 19–34.
- Ferry Budiman; Supatmi. (2008). PENGARUH PENGUMUMAN INDONESIA SUSTAINABILITY REPORTING AWARD (ISRA) TERHADAP ABNORMAL

*RETURN DAN VOLUME PERDAGANGAN SAHAM (Studi Kasus Pada Perusahaan Pemenang ISRA Periode 2005-2008)*. 1-19.

- Fonseca, A., Macdonald, A., Dandy, E., & Valenti, P. (2011). The state of sustainability reporting at Canadian universities. *International Journal of Sustainability in Higher Education*, 12(1), 22-40.
- Greenmetric UI. (n.d.). *UI Greenmetric Guideline 2018*. 1-40.
- GRI. (2013). Pedoman Pelaporan Keberlanjutan G4. *Global Reporting Initiative*. [www.globalreporting.org](http://www.globalreporting.org)
- Gutierrez, D. G., & Sepulveda, J. A. M. (2018). Sustainability Indicators for Universities: Revision for a Colombian Case. *Global Journal of Research In Engineering*.
- Hřebíček, J., Faldík, O., Kasem, E., & Trenz, O. (2015). Determinants of sustainability reporting in food and agriculture sectors. *Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis*, 63(2), 539-552. <https://doi.org/10.11118/actaun201563020539>
- Krivačić, D. (2017). Sustainability Reporting Quality: the Analysis of Companies in Croatia. *Journal of Accounting and Management*, VII(1), 1-14.
- Kumar, K., & Prakash, A. (2019). Examination of sustainability reporting practices in Indian banking sector. *Asian Journal of Sustainability and Social Responsibility*, 4(1). <https://doi.org/10.1186/s41180-018-0022-2>
- Kurniawan, T., Sofyani, H., & Rahmawati, E. (2018). Pengungkapan Sustainability Report dan Nilai Perusahaan: Studi Empiris di Indonesia dan Singapura. *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 16(1), 1-20. <https://doi.org/10.30595/kompartemen.v16i1.2100>
- Kustinah, S., Ilmiah, Y. L.-P. F. (Festival R., & 2019, undefined. (2017). Sustainable Accounting Environmental Sebuah Tinjauan Fenomenologi. *Stiestembi.Ac.Id*, 111-120. <http://stiestembi.ac.id/file/FA-2019-D06> (Siti Kustinah & Yuni Dwi Lestari).pdf
- Kusumawardani, Anisa, I., Setiawati, L., & Ginting, Y. L. (2017). Urgensi Akuntan Sosial dan Lingkungan: Perspektif Institusional. *Proceedings*, 939-948.
- Lako, A. (2018). Sustainability Reporting , Apa Manfaatnya ? *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, December*.
- Mutia, G. R. (2017). *Analisis Kesiapan Laporan Berkelanjutan (Sustainability Reporting) pada Perguruan Tinggi di Indonesia*.
- Rofelawaty, B. (2014). Analisis Praktik Pelaporan Berkelanjutan ( Sustainability Reporting ) pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Analisis Praktik Pelaporan Berkelanjutan (Sustainability Reporting)*, 12, 1-10.

- Ryan, A., Tilbury, D., Blaze Corcoran, P., Abe, O., & Nomura, K. (2010). Sustainability in higher education in the Asia-Pacific: developments, challenges, and prospects. *International Journal of Sustainability in Higher Education*, 11(2), 106–119.
- Saadah, bella lailatus. (2017). *Analisis pengungkapan tanggung jawab sosial perbankan diukur dengan pedoman gri g4 (studi empiris sektor perbankan di bei tahun 2013-2015)*. 4.
- Sari, M. P., Hajawiyah, A., Raharja, S., & Pamungkas, I. D. (2020). The report of university sustainability in Indonesia. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 11(8), 110–124.
- Sari, M. P., Raharja, S., Yulianto, A., Ardiansari, A., Pamungkas, I. D., & Achmad, T. (2020). Compliance analysis of asia sustainability reporting awards (Asra) 2018 companies. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 9(3), 3891–3896.
- Setiani, E. P. (2018). *Analisis Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Sustainability Report pada Perusahaan High Profile dan Low Profile*.
- Sordo, C. Del, Farneti, F., Guthrie, J., Pazzi, S., & Siboni, B. (2016). Social reports in Italian universities: disclosures and preparers' perspective. *Meditari Accountancy Research*, 24(1), 91–110.
- Steinhofel, E., Galeitzke, M., Kohl, H., & Orth, R. (2019). Sustainability reporting in German manufacturing SMEs. *Procedia Manufacturing*, 33, 610–617. <https://doi.org/10.1016/j.promfg.2019.04.076>
- Tarigan, Y. L. dan J. (2017). Pengaruh Sustainability Reporting Terhadap Kinerja Keuangan dari Sisi Market Value Ratios dan Asset Management Ratios. *Sorot*, 11(1), 29. <https://doi.org/10.31258/sorot.11.1.3867>
- Vagnoni, E., & Cavicchi, C. (2015). An exploratory study of sustainable development at Italian universities. *International Journal of Sustainability in Higher Education*, 16(2), 217–236.
- Yasbie, B., & Barokah, Z. (2018). Sustainability Reporting By Universities In Indonesia Abstract. *The Indonesian Journal of Accounting Research*, 21(03), 363–394. <https://doi.org/10.33312/ijar.400>

---

## REVITALISASI KELEMBAGAAN PETANI SEBAGAI WAHANA ALIH TEKNOLOGI DAN INCUBATOR BISNIS PENDUKUNG AGRO TECHNO-PARK

Etty Soesilowati, Nana Kariada, Avi Budi Setyawan

### PENDAHULUAN

Lemahnya sistem kelembagaan di tingkat petani, keterbatasan Sumber Daya Manusia, kurangnya infrastruktur pendukung, belum adanya teknologi pengolahan hasil panen, dan belum ada UMKM pendukung yang bergerak di bidang pengolahan menyebabkan akselerasi Agro Tekno-Park (ATP) dan pendapatan petani tidak kunjung meningkat. Tujuan dibangunnya ATP adalah sebagai pusat alih teknologi pertanian, sarana edu-agrowisata dan incubator bisnis. Untuk mencapai tujuan tersebut harus dilakukan berbagai kegiatan yang bersifat aplikatif dan berkesinambungan dengan model *business partnership* melibatkan *multistakeholder* meliputi unsur Pemerintah, Akademisi, Pengusaha, maupun Masyarakat, dalam hal ini adalah petani itu sendiri.

Di bawah kepemimpinan Joko Widodo, pemerintah Indonesia melalui Bappenas mengagendakan untuk membangun *Science Park* (Taman Sains) di 34 provinsi dan *Techno Park* (Taman Teknologi) di 100 kabupaten/kota dalam waktu 5 tahun yang dituangkan dalam program *quick win* sebagai upaya peningkatan kapasitas inovasi dan teknologi dalam rangka hilirisasi/komersialisasi hasil-hasil riset domestik (Syakir, 2015). Masih dalam sumber yang sama, dikemukakan bahwa Taman Sains dan dan Taman Teknologi (TSTP) oleh Kementerian Pertanian, dirinci menjadi tiga kelas yaitu: Taman Sains dan Teknologi Pertanian Nasional (TSTPN) atau National *Agro Science Techno Park*, *Agro Science Park (ASP)* atau Taman Sains Pertanian (TSP), dan *Agro Techno Park (ATP)* atau Taman Teknologi Pertanian (TTP).

Pemerintah Kota Semarang yang berpenduduk 1.729.428 jiwa, dimana 45.815 orang tercatat bermata pencaharian sebagai petani telah menempatkan sector pertanian menjadi prioritas pembangunannya. Meskipun tidak terlalu besar tetapi sector pertanian menyumbang PDRB sebesar 0,83% (BPS Kota Semarang, 2018).

Kota Semarang sebenarnya memiliki potensi besar untuk mengembangkan *technopark* karena memiliki 49 Perguruan Tinggi dan 81 SMK yang bisa

menjadi sumber daya utama inovator dan Teknologi. Terdapat 119 komunitas yang tergabung dalam Semarang Digital Kreatif (SDK). Potensi sumber daya cukup besar diantaranya pengolahan ikan sebanyak 15.650.890 kg, produksi tanaman pangan 51.366 ton, produksi tanaman sayuran 3.249,76 ton, dan produksi tanaman buah 36.427 ton. (BPS, 2015-2016). Namun belum mampu memenuhi kebutuhan pangannya secara mandiri dan masih mengandalkan distribusi dari daerah di sekitarnya (terutama tanaman pangan dan sayuran). Untuk memperkuat Ekonomi Kerakyatan Berbasis Keunggulan Lokal dan Membangun Iklim Usaha yang Kondusif serta mengatasi isu ketahanan pangan perlu fasilitasi aktivitas inkubasi.

Dalam beberapa tahun terakhir Dinas Pertanian berusaha memanfaatkan lahan-lahan eks bengkok menjadi Kawasan kebun buah. Kawasan kebun buah tersebut tersebar di berbagai wilayah di Kota Semarang, meliputi di Kecamatan Gunungpati, Kecamatan Ngaliyan, Kecamatan Tembalang, Kecamatan Pedurungan, dan Kecamatan Mijen. Khusus untuk Kawasan kebun buah di Kelurahan Purwosari Kecamatan Mijen, Dinas Pertanian sedang merintis Taman Teknologi Pertanian atau "*Agro Techno Park*" (ATP) yang tertuang dalam RPJMD Kota Semarang tahun 2016-2021 (Misi No. 4) dengan tujuan memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang inovatif, kreatif dan kondusif.

Inisiasi ATP sudah dimulai sejak tahun 2014. Keberadaan ATP Purwosari selaras dengan program Nawa Cita Pemerintah ke-6, yang menargetkan pembangunan 100 Techno Park dan Science Park di setiap Provinsi. ATP adalah wahana penerapan inovasi teknologi langsung di Kawasan lahan pertanian, yang ditujukan agar petani dan masyarakat mengenal penerapan teknologi modern. ATP memiliki fungsi untuk pengembangan inovasi pertanian dan sebagai pusat pelatihan, diseminasi teknologi dan pusat incubator bisnis.

Sarana & prasarana fisik ATP Purwosari meliputi: area parkir, lavatory, pedestrian, *green house* hidroponik, *green house* buah dan sayuran, joglo pertemuan, kantor pengelola dan jembatan penghubung Kawasan. Berikut ini adalah gambaran sarana dan prasarana penunjang di ATP Purwosari.





Gambar 1. Gambaran Sarana dan Prasarana Penunjang ATP Purwosari

Potensi *Agro Techno-Park* Purwosari sebagai pusat alih teknologi, incubator bisnis serta salah satu destinasi wisata baru belum memberi dampak yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah maupun masyarakat sekitar. Permasalahan umum yang dihadapi antara lain ialah: lemahnya sistem kelembagaan di tingkat pengelola maupun petani, keterbatasan sumber daya manusia pengelola ATP, kurangnya infrastruktur pendukung, belum terintegrasinya program beserta instrument kebijakan yang mendukungnya

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka Revitalisasi Kelembagaan Petani Sebagai Wahana Alih Teknologi dan Inkubator Bisnis Pendukung ATP

Purwosari melalui sinergitas program perlu dilakukan. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu dilakukan kegiatan yang bersifat aplikatif dan berkesinambungan dengan model *Quadruple Helix*. Model *Quadruple Helix* melibatkan *multistakeholder* meliputi unsur Pemerintah Kota Semarang, Akademisi, Masyarakat, dan private sector. Tujuan jangka pendek adalah: (1) Optimalisasi fungsi ATP sebagai pusat alih teknologi pertanian melalui Sekolah Lapang (SL) serta sarana agrowisata, (2) Meningkatkan sarana & prasarana pendukung ATP beserta profesionalisme pengelolanya, (3) Menciptakan wirausaha baru berbasis kearifan local melalui inkubasi bisnis, dan (4) Membangun *business partnership* hulu hilir industry pertanian dan ekonomi kreatif. Sedangkan tujuan jangka panjangnya adalah: (1) Menciptakan pusat-pusat pertumbuhan didaerah perdesaan, (2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani, (3) Menciptakan *income generating* bagi pemerintah daerah

Program meliputi: penyusunan rencana strategis pengelolaan dan pengembangan dengan mengidentifikasi & menganalisis sumberdaya (manusia, komoditas, finansial, dan system kelembagaan) yang tersedia, optimalisasi fungsi ATP melalui Sekolah Lapang, Agrowisata, Pelatihan dan Inkubasi bisnis, serta membangun *Business Partnership* hulu hilir Agroindustri. Sasaran program adalah Pengelola *Agro Techno-Park*, Gapoktan, Kelompok Wanita Tani (KWT), Dinas Pertanian sebagai pemilik lahan sekaligus pembuat kebijakan dan juga Pengusaha bidang Agroindustri, serta DPRD kota Semarang sebagai legislator

## PEMBAHASAN

*Techno park* pertama kali dirintis oleh Amerika Serikat pada awal 1950-an, yang diawali dengan mendirikan *research park* di Universitas Stanford, California. Sebuah universitas swasta yang memiliki kesulitan finansial untuk menarik minat dosen dan menggaji karyawan, tetapi memiliki lahan kampus yang kosong dan luas namun tidak diperkenankan oleh pemiliknya untuk menjualnya. Melalui inisiasi Frederick Terman dimanfaatkan dengan mendirikan *research park*, dan menyewakan lahan kepada perusahaan berteknologi tinggi yang menyediakan modal ventura bagi perusahaan-perusahaan pemula. Meskipun pembangunan infrastruktur dan pembebasan tanah membutuhkan waktu tiga puluh tahun namun hasilnya, *research park* mendorong tumbuhnya Silicon Valley yang terkenal ini, menciptakan perusahaan-perusahaan terkenal seperti Hewlett Packard (HP), Adobe Systems, Apple Computer, Google, Intel, Yahoo, dan eBay.

Mengikuti jejak *techno park* Amerika pada tahun 1969, *techno park* di Eropa mulai muncul yang ditandai dengan berdirinya Sophia Antipolis. *Techno park* tersebut berfokus pada sektor komputasi, elektronik, farmakologi dan

bioteknologi. Beberapa institusi perguruan tinggi juga berada di taman tersebut.

Pembangunan *techno park* di Asia, ditandai dengan berdirinya Tsukuba Science City di Jepang di tahun 1970, menarik lebih dari 300 institusi publik dan swasta, universitas, dan perusahaan, menarik sekitar 220.200 peneliti. Fasilitas penelitian dan pendidikan yang dibangun mencakup berbagai macam, yakni elektronik, bioteknologi, mekatronik, bahan baru, rekayasa informasi, pengembangan ruang angkasa, ilmu lingkungan, sumber daya alam dan energy, ilmu bumi, teknik sipil dan konstruksi, pertanian, serta banyak bidang lainnya. Jalur ekspres Tsukuba yang dibuka pada tahun 2005, telah meningkatkan transportasi ke berbagai konferensi di Kota Sains Tsukuba. Saat ini terdapat berbagai tempat wisata unik di Kota Sains Tsukuba. *Tsukuba Science City* di Jepang memiliki 5 wilayah yang merupakan lokasi dari pusat institusi penelitian dan 40 institusi pendidikan, 33 organisasi pemerintah dan swasta. Technology Park Malaysia merupakan kawasan untuk mempercepat proses transformasi peningkatan ilmu pengetahuan dan perekonomian.

Pada awal tahun 1990-an, terlihat geliat pembangunan *techno park* di Rusia. Pada saat ini, lebih dari 60 *techno park* yang beroperasi di 35 daerah di Rusia. Rusia telah memiliki kawasan serupa Silicon Valley yang disebut dengan Skolkovo di Distrik Mozhaysky Moskow. *Technopark* Skolkovo memiliki jaringan mitra internasional yang mapan dan merupakan anggota penuh Asosiasi Internasional Taman Sains dan Bidang Inovasi, Asosiasi Taman Sains Asia dan Jaringan Pusat Inovasi dan Bisnis Eropa. Sejarah perkembangan *techno park* di dunia pada era 1990-an, juga ditandai oleh pendirian *IT Techno Park* di Trivandrum India, pada tahun 1995, yang pada saat ini telah berkembang menjadi *IT Park* terbesar di India dan ketiga terbesar di Asia, serta merupakan rumah bagi raksasa perusahaan multinasional seperti Infosys, TCS, IBS Software Services, Ernst & Young, dan lain-lain yang berhasil mempekerjakan sekitar 30.000 orang di hampir 170 perusahaan. Masih pada model pembangunan *techno park* berbasis teknologi, pada akhir tahun 1999, *techno park* Chai Chee menjadi pusat teknologi khusus yang dikembangkan sektor telekomunikasi, elektronik dan teknologi informasi di Singapura, yang dibangun pada lingkungan kampus yang sangat kondusif bagi kreativitas dan inovasi (BAPPENAS. 2015).

Di Indonesia *Solo Techno Park*, *Sragen Techno Park*, *Bandung Techno Park*, *Jababeka Research Center* di Kota Mandiri Jababeka Jawa Barat, *Agro Techno Park* diberbagai provinsi, Cibinong Science Center milik LIPI di Cibinong, Universitas Indonesia *Science Park* di Depok Jawa Barat. (Asep Arifin, 2016).

Kementrian Pertanian merinci Taman Sains dan dan Taman Teknologi (TSTP) menjadi tiga kelas yaitu:

1. Taman Sains dan Teknologi Pertanian Nasional (TSTPN) atau *National Agro Science Techno Park*, adalah pusat pengembangan sains dan teknologi pertanian serta pusat penumbuhan wirausaha baru di bidang teknologi maju dan Pusat layanan teknologi pertanian ke masyarakat. Fungsinya adalah sebagai:

- (a) Pusat pengembangan sains dan teknologi maju,
- (b) Pusat penumbuhan wirausaha baru di bidang teknologi maju, dan
- (c) Pusat layanan teknologi maju ke dunia usaha dan industri.

2. *Agro Science Park (ASP)* atau Taman Sains Pertanian (TSP)

Taman Sains Pertanian (TSP) atau *Agro Sains Park (ASP)* yang berada ditingkat Provinsi dan dikembangkan di lokasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) penelitian atau Kebun Percobaan (KP). TSP diarahkan sebagai:

- (a) Tempat pengembangan invensi bidang pertanian untuk menjadi inovasi yang dilengkapi dengan unit percontohan berskala pengembangan, berwawasan agribisnis hulu-hilir, bersifat holistik dan komprehensif dalam pengembangannya,
- (b) Tempat kegiatan pengkajian perbaikan teknologi dan perekayasaan kelembagaan pendukung usaha agribisnis,
- (c) Tempat penciptaan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh peneliti dari lembaga litbang pemerintah, dosen perguruan tinggi, dan pakar teknologi, yang siap diterapkan untuk kegiatan serta pengembangan usaha sehingga menjadi penyedia pengetahuan teknologi terkini kepada masyarakat
- (d) Penyedia solusi teknologi yang tidak terselesaikan di TTP,
- (e) Sebagai pusat pengembangan aplikasi teknologi pertanian tingkat lanjut bagi pengembangan perekonomian lokal.

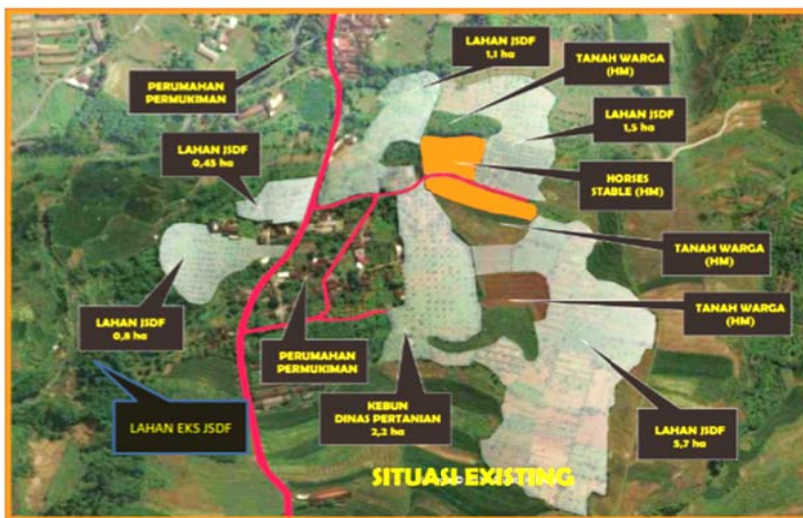
(f) *Agro Techno Park (ATP)* atau Taman Teknologi Pertanian (TTP) adalah suatu kawasan yang berfungsi untuk menerapkan berbagai jenis teknologi di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, peternakan, perikanan, dan pengolahan hasil (pasca panen) yang telah dikaji oleh berbagai LPNK, swasta, PTN/PTS untuk diterapkan dalam skala ekonomi, serta tempat pelatihan dan pusat transfer teknologi ke masyarakat luas. 3. Taman Teknologi Pertanian (TTP) atau *Agro techno park (ATP)* berada di tingkat kabupaten/kota dan dikembangkan di lahan pmda dengan pengembangan pada lahan masyarakat. TTP adalah:

- (a) Tempat untuk penerapan teknologi pertanian hulu-hilir berwawasan agribisnis yang bersifat spesifik lokasi,

- (b) Tempat untuk percontohan dan penerapan inovasi yang telah dikembangkan di TSP, dan
- (c) Tempat pelatihan, pemagangan, inkubasi kemitraan usaha, diseminasi teknologi, dan pusat advokasi bisnis ke masyarakat luas. TSP dan TTP bermanfaat untuk memberikan ruang aplikasi, percontohan teknologi pertanian terpadu kepada para ilmuwan serta memberikan pelatihan dan alih teknologi hasil litbang Kementerian/LPNK Ristek, swasta dan perguruan tinggi kepada masyarakat pertanian terpadu kepada masyarakat pada bidang: teknologi budi daya tanaman dan perbenihan (Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan), teknologi pasca panen dan pengolahan hasil, teknologi peternakan unggas dan ruminansia, serta teknologi budidaya perikanan.

Pada tahun 2015, Kementan melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) membangun 1 TSTPN, 5 TSP, dan 16 TTP. Pada tahun 2016, dikembangkan tambahan 4 TSP dan 10 TTP (Syakir, 2016). Boy MP (2007) mencoba mengembangkan Model Potensi Ekonomi Industri Masyarakat Berbasis *Agro Technopark* (ATP) di Koleberes Kecamatan Cikadu Kabupaten Cianjur beserta improvisasinya menjadi ATP Center terpadu Koleberes dengan menghubungkan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan dalam sebuah siklus bio-cylo farming. Model tersebut selanjutnya di simulasikan dengan menggunakan software Vensim PLE 32 Versi 4.2a 2000. Hasil pengembangan menunjukkan antara model ATP center Koleberes dan Improvisasi model ATP memperlihatkan perbedaan yang signifikan terhadap pendapatan masyarakat pada sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Lebih jauh, hasil penelitian Handrianus dkk (2019) menunjukkan bahwa manajemen strategi kebijakan publik sektor pariwisata di desa Pujon Kudul cukup signifikan peningkatan PAD daerah.

Pemerintah Kota Semarang telah memiliki beberapa lokasi pengembangan pertanian, peternakan dan perikanan, seperti balai benih, kebun, dan kawasan agrowisata, yang saah satunya adalah Agro Purwosari, Kelurahan Purwosari Kec. Mijen. Potensi yang ada meliputi: Lahan dalam satu hamparan 17,89ha (Kebun Dinas 5,5 ha , Eks JSDF Klp tani Mbangun Karso 6,92ha, Eks JSDF Klp tani Loh Jinawi 5,47 ha), Lahan lainnya milik Pemerintah Kota (sawah, tegalan dan eks JSDF), Lahan pertanian milik masyarakat, dan SDM petani



**Gambar 2.** Situasi Lahan Pertanian Dalam Penguasaan Pemerintah Kota Semarang

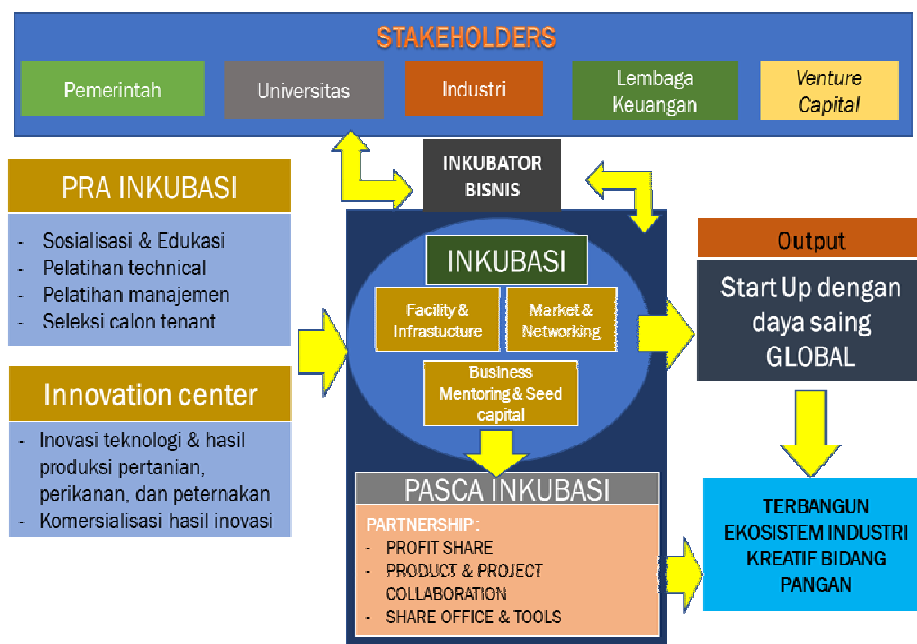
Kawasan Kebun Buah Purwosari memiliki luas 17,89 ha yang dikelola bersama-sama dengan anggota kelompok tani KT Mbangun Karso (anggota 50 orang), KT Loh Jinawi (66 orang), dan KT Subur Makmur (30 orang). Jenis tanaman buah-buahan yang dibudidayakan oleh petani berasal dari jenis lokal dan jenis unggul, meliputi kelengkeng itoh, durian Monti, Sirsak Madu, Jambu Kristal, Marqisa, Anggur dan Pepaya California.



**Gambar 3.** Potensi Tanaman Hortikultura Agro Purwosari

Para anggota kelompok tani yang berhak mengelola adalah petani yang tergolong dalam kategori miskin. Tercatat di Kelurahan Purwosari terdapat 375 jiwa dalam kategori miskin, dan 8 jiwa dalam kategori sangat miskin (Simgakin Kota Semarang, 2015). Beberapa produk petani yang sudah ada di pasar selain buah, sayur juga beras organic/unorganik, pupuk organic, sirup marqisa dan makanan kecil lainnya.

Sasaran dari revitalisasi fungsi Agro Tekno-Park adalah Pemerintah, Akademisi, Industri, Lembaga Keuangan, serta masyarakat, khususnya petani. Hal ini selaras dengan Carayannis dan Campbell (2009) yang menyatakan pentingnya kebijakan dan praktik pemerintah, universitas dan industri serta masyarakat sipil saling berinteraksi secara cerdas, efektif dan efisien dalam konsep *Quadruple Helix*. Adapun skema kerjasama antar stakeholder tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 4.** Skema Kerjasama Antar Stakeholders

Universitas, pemain utama Litbang adalah kelompok peneliti akademisi dan pusat penelitian interdisipliner; Industri, mereka adalah divisi litbang perusahaan serta pengguna melalui sharing pendanaan; Pemerintahan sebagai pemilik wilayah dan pemegang otoritas kebijakan; Lembaga keuangan sebagai sumber pendanaan alternative bagi pengembangan usaha; serta masyarakat sendiri sebagai penerima manfaat

Revitalisasi kelembagaan petani sebagai wahana alih teknologi dan incubator bisnis pendukung Agro Tekno-Park telah didiskusikan di tingkat Bapeda dengan melalui pendanaan multiyear. Revitalisasi fungsi ATP sebagai pusat alih teknologi, incubator bisnis sekaligus agrowisata akan memberikan implikasi tidak saja dari aspek social tetapi juga ekonomi. Pada aspek ekonomi:

- (a) Terciptanya pusat pertumbuhan baru di wilayah pinggiran sehingga mengurangi angka pengangguran (+/-5%) dan menurunnya mobilitas tenaga kerja ke kota.yang berimplikasi terhadap pengurangan kepadatan jalan dan penggunaan bahan bakar
- (b) Termanfaatkannya sumberdaya manusia, sumberdaya sosial dan sumberdaya alam wilayah Purwosari yang berdampak terhadap peningkatan pengetahuan, penguatan institusi local, serta terciptanya diversifikasi produk berbasisi potensi lokal
- (c) Terjadinya alih teknologi sehingga meningkatkan kualitas, kuantitas dan kontinuitas produk pertanian (naik +/-100%) melalui rekayasa teknologi tepat guna
- (d) Memperkuat ketahanan pangan dan diversifikasi produk pangan sehingga mengurangi ketergantungan pasokan dari luar (+/-50%)
- (e) Meningkatnya nilai jual dan daya saing produk yang berimbas pada meningkatnya pendapatan masyarakat, terlebih petani (+/-100%)
- (f) Tumbuhnya wirausaha- wirausaha baru (tenant) baik dibidang produk barang (olahan, seni/budaya, souvenir, dll) maupun produk jasa (+/-30 tenan/tahun)
- (g) Meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Semarang (+/- 100%).

Untuk mencapai target tersebut dibutuhkan ruang meliputi: Ruang Inkubasi (kapasitas  $\pm 20$  orang), Ruang Seminar (kapasitas  $\pm 50-150$  orang), Ruang Rapat Kecil Tenant 5-10 ruang dengan ukuran masing-masing 2x3 m, Laboraturium Komputer 2 ruang masing-masing 25 komputer, Ruang Magang, Laboraturium Pertanian, Ruang Uji Coba Pertanian, Laboraturium Peternakan, Ruang Display.*Showroom*, *Co-working Space*, *Co-production Space*, Ruang Pemasaran Hasil Produksi Pertanian, Perikanan, dan Peternakan, Ruang Manajemen, Ruang Komunal (untuk bersantai dan berkumpul), Kafetaria/*Lounge* Penginapan. Sedangkan fasilitas yang diperlukan, meliputi: Ruang Informasi, Gudang/Tempat penyimpanan alat, Toilet/KM/WC, Mushola, Parkir, Ruang Janitor Ruang Genset, Ruang Chiller dengan desain sebagai berikut:





**Gambar 5.** Rencana Desain Sarana dan Prasarana Agro Tekno-Park Purwosari Semarang

Program ini dilaksanakan selama 3 tahun, dimana dalam setiap tahun akan dievaluasi dan dapat dijadikan bahan dalam menyusun program tahun berikutnya. Beberapa program yang sudah terlaksana di bidang pertanian meliputi:

1. Sekolah Lapang (SL) Agribisnis Hortikultura, dengan kegiatan: (a) Pembibitan tanaman; (b) Teknik budidaya, Pemupukan dan pengelolaan hama; (c) Pengadaan alat produksi pertanian dan pupuk; dan (d) Manajemen pasca panen
2. Membangun *business partnership* hulu hilir produksi pertanian dengan kegiatan: (a) FGD Temu Usaha Pertanian; (b) Promosi produk pertanian melalui pameran atau festival buah; (c) Alih teknologi fasilitasi pengemasan produk pertanian

3. Inkubasi bisnis dengan kegiatan: (a) Perekrutan tenant; (b) Fasilitasi uji kelayakan business; (c) Pelatihan pembuatan business plan; (d) Pendampingan usaha; dan (e) Menciptakan merek dagang (HKI)

Program di bidang pariwisata meliputi:

1. Sekolah Lapang (SL) Edu Agrowisata dengan kegiatan: (a) Pemetaan potensi wisata; (b) Penyusunan paket-paket wisata; (c) Pelatihan Guiding; dan (d) Penyusunan SOP Edu Agrowisata.
2. Membangun *business partnership* Edu Agrowisata dengan kegiatan: (a) Membangun system informasi Edu Agrowisata; (b) Fasilitasi leaflet dan booklet Agro Purwosari; (c) Pengadaan sarana prasarana penunjang Edu Agrowisata; (d) Promosi melalui pameran atau penyelenggaraan even festival

Sedangkan program dibidang ekonomi kegiatannya meliputi:

1. Pelatihan dan penciptaan kewirausahaan baru industry olahan makanan berbahan baku potensi local dengan kegiatan: (a) Pembentukan kelompok KUB industry olahan makanan; (b) Pelatihan diversifikasi olahan makanan; (c) Fasilitasi ijin IUMK untuk wirausaha baru; (d) Fasilitasi standarisasi produk UKM melalui ijin PIRT; (e) Fasilitasi kemasan produk; dan (f) Fasilitasi TTG untuk KUB olahan makanan; (g) Fasilitasai pendaftaran merek dagang (HKI); (h) Pelatihan kelembagaan dan manajemen usaha
2. Membangun *business partnership* hulu hilir industry kecil olahan makanan dan ekonomi kreatif dengan kegiatan meliputi: (a) Fasilitasi promosi produk melalui pameran; (b) Pembuatan leaflet dan Banner usaha untuk promosi
3. Inkubasi Bisnis dengan kegiatan: (a) Perekrutan tenant; (b) Fasilitasi uji kelayakan business; (c) Pelatihan pembuatan business plan; dan (d) Pendampingan usaha

Program Revitalisasi kelembagaan petani pendukung fungsi Agro Tekno-Park melalui kemitraan merupakan kegiatan yang bersifat spesifik dan holistik. Spesifik dimaksudkan bahwa subyek program adalah masyarakat tani, serta penggiat pariwisata. Holistik dimaksudkan bahwa kajian dalam kegiatan ini tidak saja menyangkut aspek teknis produksi, pengolahan pasca panen tetapi juga ekonomi sosial. Subyek dan inventor interaktif dalam waktu dan konteks tertentu. Kegiatan pemberdayaan menggunakan pendekatan *community based learning* dan *Quadruple Helix*.

*Community based learning* dan *Quadruple Helix* merupakan pengembangan dari konsep Triple Helix dimana inovasi menjadi ujung tombak penciptaan daya saing dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. *Community*

*based Learning* didalamnya ada unsur perubahan dan pembaharuan, paling tidak ada dua pihak yang berperan. Yang *pertama* adalah pihak luar masyarakat yang berfungsi mendorong terjadinya pembaharuan. Dalam pengertian ini salah satunya adalah pihak pemerintah dan swasta. Yang *kedua* adalah masyarakat atau komunitas itu sendiri. Proses pemberdayaan bukan suatu yang terjadi hari ini dan berhenti keesokan harinya, melainkan merupakan proses yang berkelanjutan. Keberlanjutan yang dimaksud meliputi berbagai dimensi, baik keberlanjutan sumberdaya alam, ekonomi maupun sosial.

*Community based Learning* lebih mengacu pada kebutuhan masyarakat dan komunitas. Pendekatan yang bertumpu pada komunitas sebetulnya merupakan derivasi dari konsep pembangunan yang berpusat pada sumberdaya manusia. Beberapa ciri pokok yang ada padanya: (1) prakarsa dan proses pengambilan keputusan tahap demi tahap harus diletakan pada masyarakat itu sendiri; (2) fokus utamanya adalah meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengelola dan memobilisasi sumber-sumber yang terdapat di komunitas; (3) memperhatikan variasi lokal; (4) menekankan pada proses belajar dimana terdapat kolaborasi antara birokrasi dan komunitas; (5) terciptanya jaringan kerja antara pelaku pembangunan itu sendiri (Korten, 1988)

Sedangkan konsep *Helix* didasarkan dalam gagasan bahwa inovasi merupakan hasil interaktif yang melibatkan berbagai jenis aktor. Masing-masing aktor berkontribusi sesuai fungsi kelembagaannya dimasyarakat. Universitas (U), Industri (I), Pemerintah (P) termasuk dalam *Triple Helix*. Masyarakat Sipil (MS) dan Masyarakat berbasis Media dan Budaya (MMB) masuk dalam *Quadruple Helix*. Kontribusi terhadap inovasi dipertimbangkan dalam hal berbagi pengetahuan dan transfer pengetahuan. Model *Helix* ini menetapkan dan memformalkan peran yang tepat untuk setiap bidang dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melalui inovasi. Masyarakat yang semakin interaktif membuat peran pengetahuan diberbagai bidang harus disertakan dalam proses pembuatan inovasi (Soesilowati, 2019). Lebih jauh Soesilowati, E (2017) juga mengatakan bahwa program pemberdayaan petani Kec. Gunungpati Kota Semarang melalui pendekatan *Quadruple Helix* dengan melibatkan akademisi, pemerintah, pebisnis, serta masyarakat dapat menaikkan indeks pembangunan manusia. Inovasi berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi dan daya saing. Gagasan dan teori tentang aktor yang memimpin proses inovasi berubah seiring dengan waktu. Menurut ekonomi Austria, perkembangan ekonomi harus dilihat sebagai proses perubahan kualitatif yang didorong oleh inovasi yaitu kombinasi dari sumber daya yang ada (Fagerberg, 2003).

Pada saat ini pandangan tentang pertanian tampaknya dilihat dari dua kutub yang berbeda. Saragih (2001) melihat sektor pertanian sebagai suatu kegiatan bisnis (agribisnis), dan Mubyarto (1983) memandang kegiatan sektor

pertanian sebagai *way of life* dari masyarakat. Hal ini bermakna bahwa meskipun kegiatan di sektor pertanian harus dipandang sebagai kegiatan bisnis, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kegiatan di sektor pertanian pada dasarnya masih merupakan bagian dari budaya dari kehidupan masyarakat setempat. Secara umum, wisata pertanian yang dapat dikembangkan menjadi berbagai jenis agrowisata adalah:

Kebun Raya. Daya tarik yang dapat ditawarkan kepada wisatawan mencakup kekayaan flora, keindahan pemandangan dan kesegaran udara yang memberikan rasa nyaman;

1. Perkebunan. Daya tarik yang ditawarkan adalah historis perkebunan, pemandangan, cara-cara tradisional dalam pola tanam, pemeliharaan pengelolaan dan prosesnya;
2. Tanaman Pangan dan Hortikultura. Ruang lingkup wisata meliputi teknik budidaya dan pengolahan padi, palawija serta hortikultura yakni bunga, buah, sayuran, dan jamu-jamuan;
3. Perikanan. Ruang lingkup kegiatan wisata perikanan dapat berupa kegiatan budidaya sampai proses pascapanen perikanan serta kegiatan lain, misalnya memancing;
4. Peternakan. Daya tarik peternakan sebagai sumberdaya wisata antara lain budidaya hingga pengolahan ternak;
5. Hutan. Hutan sebagai objek wisata dapat berupa hutan produksi atau hutan konservasi yang dapat dikemas menjadi objek agrowisata;
6. Bogawisata. Wisata untuk menikmati hidangan dari produksi-produksi pertanian seperti berbagai jenis sate, lawar bali, sermotan dan lain-lain. Alat-alat untuk menyajikan makanan tersebut terbuat dari hasil kerajinan dengan bahan pokok dari produksi pertanian seperti tempurung kelapa, lidi dari daun kelapa, bambu dari bahan yang lainnya ( Fandeli, 1995).

Revitalisasi kelembagaan petani pendukung fungsi ATP Agro Purwosari dilakukan oleh Dinas Pertanian Kota Semarang, Akademisi UNNES, UPGRIS serta Yayasan Obor Tani dengan dukungan pendanaan dari APBD dan Kementerian Ristekdikti. Kegiatan meliputi teknik pembibitan, budidaya, pemupukan tanaman durian, kelengkeng, jambu biji, marqisa, dan melon. Pelatihan pembibitan dan budidaya tanaman difasilitasi Yayasan Obor Tani beserta Dosen ahli biologi langsung dilahan milik Dinas Pertanian. ATP telah memiliki tanaman lengkeng 205 pohon, durian 201 pohon, jambu kristal 290 pohon. sirsat madu 40 pohon, dan jambu air 138 pohon.

Untuk mengolah hasil ATP dibentuklah KUB "Sekar Tani" yang beranggotakan Kelompok Wanita Tani dan dilengkapi dengan AD/ART . Kata

“Sekar” mengandung arti sebagai bunga yang akan mekar dan berbau wangi sehingga KUB “Sekar Tani” diharapkan dapat menjadi pijakan awal dari pergerakan wanita tani dalam memajukan perekonomian khususnya di kalangan bisnis olahan dan dapat diandalkan sebagai unit ekonomi pendukung dalam pengolahan sumber daya alam. KUB “Sekar Tani” memiliki misi: (a) menggali dan memanfaatkan kearifan local; (b) meningkatkan keterampilan Kelompok Wanita Tani dalam pengelolaan hasil produksi pertanian; (c) menumbuhkan kemandirian Kelompok Wanita Tani; (d) mempererat hubungan sosial ekonomi dalam masyarakat dan pihak lainnya.

Hasil produk selain buah-buahan segar juga olahan buah, meliputi: sirup buah, selai, manisan, sari buah, tepung buah, keripik, kue kering, dan bakso. Sebagai fasilitator kegiatan adalah dosen jurusan tata boga dengan pendampingan mahasiswa KKN. Pengolahan buah menjadi bentuk yang tahan lama berguna untuk memperpanjang umur simpannya dan meningkatkan nilai ekonomi buah-buahan bernilai jual rendah serta memberikan tambahan pendapatan bagi keluarga petani. Hasil penelitian menunjukkan pengolahan jambu biji merah menjadi pure menghasilkan nilai tambah terbesar yaitu Rp. 27.476 per kilogram dan nilai tambah terkecil berasal dari pengolahan buah mangga menjadi pure yaitu Rp 9.089 per kilogram. Adapun nilai profitabilitas tertinggi berasal dari produksi jus jambu biji merah yaitu 34.97 % sedangkan nilai profitabilitas terendah yaitu sebesar 12.80 % terdapat pada produksi jus sirsak (Desi, 2018)

Sebagai wilayah yang dikenal dengan potensi sumber daya alam yang indah dan masih alami, Kelurahan Purwosari juga dikenal sebagai salah satu destinasi wisata karena terdapat objek wisata *Nirwana Stable*. Untuk memberikan penguatan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Kelurahan Purwosari dan mengintegrasikan program diberikan pelatihan dan pendampingan terkait eduwisata dengan materi: penyadartahuan, *story telling*, panduan *guiding*, bagaimana mewujudkan eduagrowisata yang dapat memenuhi kriteria Sapta Pesona wisata Indonesia.

Untuk meningkatkan pemasaran produk mitra diselenggarakannya kegiatan Pameran Semarang Agro Expo yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian Kota Semarang beserta mitra binaan beserta pembangunan pasar tani. Lokasi pasar tani berada di atas lahan eks bengkok yang dikuasai Pemkot dalam hal ini Dinas Pertanian Kota Semarang. Kelompok masyarakat, dalam hal ini KUB Sekar Tani dan Kelompok Tani Sumber Rejeki akan menjadi kelompok pengelola yang merawat dan mengurus kegiatan Pasar Tani. Adapun tujuan pembangunan pasar tani adalah:

1. Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui fasilitasi pemasaran produk olahan pasca panen hasil pertanian anggota kelompok tani dan KUB

ekonomi produktif di Kelurahan Purwosari guna mendukung fungsi ATP Purwosari sebagai tempat Edu-agrowisata

2. Berkontribusi mengembangkan sumber alternatif perolehan PAD melalui kegiatan eduagrowisata



**Gambar 6.** Desain pasar tani Agro Purwosari

KUB sebagai pendukung keberadaan ATP akan memperluas usaha yang berkaitan dengan kegiatan anggota maupun non anggota meliputi: Jasa Catering, Souvenir, Pemandu Wisata, Kesenian, Jasa Penyewaan Perlengkapan Pesta, Penjualan Bibit Holtikultura, Penjualan Saprotan (sarana produksi pertanian), serta Paket Tour dan Eduwisata.

## **PENUTUP**

Keberhasilan Agro Tekno-Park pada tataran operasional, tergantung pada rancang bangun inovasi pertanian yang meliputi aspek teknis dan kelembagaan. Dari sisi teknis, tidak persoalan karena tersedia 400 teknologi inovatif produk Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dan juga Perguruan Tinggi. Namun demikian, kesiapan invensi teknologi saja belum cukup. Untuk mendorong invensi menjadi inovasi perlu dukungan kelembagaan sebagai bagian dari sistem sosial. Didalam kelembagaan tersebut melekat nilai-nilai, norma, aturan perundangan dan organisasi yang mengatur tujuan dan komitmen dari pemangku kepentingan.

Kelembagaan berada di level makro (lingkup Kementan dan jajarannya), meso (pemerintah daerah) dan level mikro (kelompok tani). Peraturan dan kebijakan formal bahkan gagasan di level makro yang secara dinamis mengatur tindakan aktor dalam operasionalisasi ATP disinergikan dengan kebijakan dan relasi-relasi informal pada tataran meso di daerah, serta kelompok tani di level mikro. Mekanisme sosial yang mengintegrasikan aspek formal dan informal akan mendukung pencapaian tujuan ATP. Di level mikro: reformasi, reorientasi dan revitalisasi kelembagaan petani menjadi suatu

keniscayaan untuk suksesnya ATP. Reformasi kelembagaan petani, ditujukan untuk meningkatkan citra kelompok tani agar lebih mandiri, tidak tergantung pada pihak lain. Reorientasi diperlukan agar kegiatan kelompok terfokus pada topik persoalan, dan revitalisasi kelembagaan ditujukan untuk penguatan kapasitas dan kapabilitas kelompok tani dalam bermitra dengan pemangku kepentingan. Kelembagaan dalam hal ini, jangan hanya menjadi sarana kepanjangan pemerintah dalam menjalankan program, tetapi harus diberdayakan sebagai subyek. Kelembagaan petani harus dilibatkan sejak perencanaan, implementasi dan monitoring kegiatan. Tidak kalah pentingnya adalah penguatan kelembagaan penyuluhan pertanian untuk mendorong motivasi petani menerapkan inovasi teknologi pertanian.

Dukungan pemerintah daerah, menjadi penentu keberhasilan ATP. Pengerahan masyarakat dan pendistribusian berbagai sumberdaya pertanian, merupakan ranah Pemda. Dukungan lainnya adalah legislasi kegiatan berupa Perda untuk mengikat semua pemangku kepentingan menjamin keberlanjutan program. Peran Pemda lainnya yang penting adalah: (1) fasilitasi penjaminan modal untuk mengatasi kemampuan ekonomi petani yang umumnya relatif lemah; (2) adanya jaminan ketersediaan sarana produksi dalam jumlah yang cukup dan tepat waktunya pada saat dibutuhkan, (iii) dukungan pemasaran dan jaminan harga jual produk petani yang atraktif sehingga merangsang petani meningkatkan produktivitas usahatani, dan (3) perbaikan infrastruktur, utamanya jaringan irigasi dan jalan usahatani. Disamping itu, dukungan Pemda menciptakan kemitraan yang harmonis antar pemangku kepentingan juga diperlukan untuk mempercepat adopsi teknologi, dan mendorong terjalannya komunikasi intensif dengan sumber informasi teknologi dan jaringan pasar output, sehingga dapat meminimalkan risiko kegagalan.

Lalu, apa yang perlu dilakukan untuk pemerintah untuk mendukung keberhasilan ATP? Pertama, perlu melakukan pengawalan dan pendampingan teknologi yang lebih intensif agar pelaku utama dapat menerapkan teknologi sesuai rekomendasi. Ke dua, menyediakan fasilitas yang atraktif bagi pendamping agar dapat bekerja optimal. Ke tiga, melakukan monitoring dan evaluasi berjenjang dan periodik sehingga jika ada sesuatu yang kurang dapat segera terdeteksi untuk diperbaiki. Dengan rancang bangun inovasi yang efektif, dan dukungan Pemda yang kondusif, serta diikuti pengawalan teknologi oleh peneliti/pendampingan oleh akademisi, penyuluh yang lebih intensif, pembangunan ATP akan mendorong terjadinya penderasan inovasi teknologi pertanian. Pada gilirannya akan memacu produksi pertanian dan memberikan kontribusi pencapaian swasembada pangan.

Dari berbagai program kegiatan yang dilakukan secara terintegrasi dan berkesinambungan telah memunculkan 3 kelompok wirausahawan baru yang

saling mendukung, meliputi bisnis buah-buahan, kuliner, dan jasa wisata yang berimbas pada meningkatkan pendapatan. Program kemitraan wilayah dalam pembentukan Argo Tekno Park menjadi efektif karena meningkatkan produktivitas buah-buahan lokal lebih dari 100% serta melibatkan multistakeholder. Walaupun diakui adanya berbagai sektor dalam kehidupan masyarakat diwadahi oleh ruang tersebut, tetapi tidak dilihat secara parsial atau sektoral. Setiap sektor adalah bagian dari kesatuan wilayah yang saling berinteraksi dengan sektor lain dan mengakibatkan interdependensi. Interdependensi menyebabkan hubungan yang sinergis dan mendorong perkembangan wilayah sebagai satu kesatuan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asep, A. 2016. Model Pengembangan Reinventing Local government dan Egoovernment Melalui Konsep Local Economic Development dan Science and Technology Park. *Jurnal Administrasi Publik Volume 7 Nomor 1*. Juni
- BAPPENAS. 2015. *Pedoman Perencanaan Science Park dan Techno Park Tahun 2015-2019*. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang. 2015. Rekapitulasi Gakin Kota Semarang Tahun 2015. Diakses melalui: [http://simgakin.semarangkota.go.id/2016/website/web/rekap\\_gakin/124](http://simgakin.semarangkota.go.id/2016/website/web/rekap_gakin/124)
- BPS. 2018. Kota Semarang Dalam Angka.
- Boy Macklin Pareira Prawiranegara. 2007 . *Kajian Model Potensi Ekonomi Industri Masyarakat Berbasis Agro Technopark (ATP)*. Fakultas Tehnologi Pertanian. UNPAD.
- Carayannis E. G. and Campbell D. F. J. 2009, Mode 3 and 'Quadruple Helix': toward a 21st century fractal innovation ecosystem, *International Journal of Technology Management*, 46 (3), 201-234
- Desi, A. 2018. Analisis Nilai Tambah Dan Profitabilitas Olahan Buah UD Meyda Sejahtera Cimanggis. *Skripsi*. Agribisnis IPB.
- Fagerberg J. 2003, Schumpeter and the revival of evolutionary economics: an appraisal of the literature, *Journal of Evolutionary Economics*, 2003, Volume 13, Number 2, Page 125
- Fandeli. C. 1995. *Dasar-Dasar Manajemen Kepariwisata Alam*. Liberty Offset, Yogyakarta
- Handrianus L, Cahyo S. 2019. Manajemen Strategi Kebijakan public Sektor Pariwisata di Pujon Kidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang Jawa Timur pada Era Industri 4.0. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Volume 7, Nomor 1* .
- Korten, D.C. 1988. *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta



- Mubyarto. 1983. *Politik Pertanian dan Pembangunan Pedesaan*. Jakarta Sinar Harapan.
- Saragih, B. 2001. *Kumpulan pemikiran agribisnis, paradigma baru pembangunan ekonomi berbasis pertanian, edisi milenium* (ed: R.Pambudy, dkk), PT Loji Grafika Sarana, Bogor
- Soesilowati, E. Nana,K. 2017. Model for Empowering Farmers at Dry Land Through Quadruple Helix Approach. *Journal of Arts & Humanities*. Vol. 6 No. 4 April
- Soesilowati, E. Nana,K. 2019. Community Empowerment Model through Regional Partnership Program and Agro Techno Park Initiative. *Journal of Arts & Humanities*. Vo. 08. Issue 07
- Syakir. 2015. *Grand Design Taman Teknologi Pertanian Cigombong - Kab. Bogor*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

## KONTRIBUTOR PENYUMBANG ARTIKEL BUKU BUNGA RAMPAI

### ARTIKEL 1



**Nuramalia Hasanah, SE, M.Ak**

Adalah Staf Pengajar di Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Penulis aktif menulis artikel dalam berbagai jurnal nasional maupun internasional. Selain itu ikut aktif dalam penelitian-penelitian yang berkaitan dengan permasalahan UMKM terutama di bidang keuangan. Penulis menyelesaikan gelar Sarjana pada Jurusan Akuntansi di Universitas Mercu Buana dan gelar Master diraih di Magister Akuntansi Universitas Indonesia. Untuk korespondensi penulis bisa dihubungi melalui email [nuramalia@unj.ac.id](mailto:nuramalia@unj.ac.id) atau [amal17lia@gmail.com](mailto:amal17lia@gmail.com).



**Ganang Ayom Sugiharto**

Adalah Mahasiswa di Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Penulis aktif membaca artikel dalam jurnal nasional. Untuk korespondensi penulis bisa dihubungi melalui email: [ganangayom87@gmail.com](mailto:ganangayom87@gmail.com).



**Alwan Ayyasi**

Adalah Mahasiswa di Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Penulis aktif membaca artikel dalam jurnal nasional. Untuk korespondensi penulis bisa dihubungi melalui email: [alwanayyasi@gmail.com](mailto:alwanayyasi@gmail.com).

**ARTIKEL 2****Dr. Ir. Efriyani Sumastuti, MP**

Lahir di Yogyakarta, pada 3 April 1965. Menyelesaikan Doktor Ilmu Ekonomi di Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNDIP Semarang, 2008. Saat ini menjadi Staf pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Semarang. Dia juga aktif sebagai pengurus di organisasi profesi ISEI (Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia). Selain itu juga aktif menulis di jurnal nasional maupun internasional.

**ARTIKEL 3****Nadia Damayanti.**

S1 Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Aktif sebagai dalam berbagai kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan menulis pada publikasi ilmiah nasional maupun internasional.

**Dr. Shanty Oktavilia, S.E., M.Si.**

Pendidikan S1, S2, S3 diselesaikan di FEB Undip. Dosen dan peneliti pada Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Aktif dalam berbagai kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan menulis pada publikasi ilmiah nasional maupun internasional. Selain itu terlibat dalam pengelolaan beberapa jurnal ilmiah nasional maupun reviewer jurnal pada beberapa Jurnal ilmiah bidang ekonomi di Indonesia.

**Dr. Amin Pujiati, S.E., M.Si.**

Staf pengajar di jurusan Ekonomi Pembangunan dan saat ini menjabat sebagai wakil dekan bidang umum dan keuangan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Menyelesaikan Pendidikan S1 dari Universitas Diponegoro, S2 dari Universitas Gajah Mada, dan gelar Doktor diraih dari Universitas Sebelas Maret. Aktif dalam berbagai kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan menulis pada publikasi ilmiah nasional maupun internasional. Selain itu terlibat dalam pengelolaan beberapa jurnal ilmiah nasional maupun reviewer jurnal pada beberapa Jurnal ilmiah bidang ekonomi di Indonesia

**ARTIKEL 4****M. Ali Mauludin, S.Pt., M.Si**

Lahir di Cimahi pada tahun 1981 dan sekarang aktif sebagai Staf Pengajar di Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran, sementara ini menjabat sebagai Kepala Laboratorium Sosiologi dan Penyuluhan Peternakan. Gelar sarjana diselesaikan di Unpad sedangkan masternya diperoleh di IPB dengan fokus kajian sosiologi pedesaan sedangkan program Doktor baru dimulai pada tahun 2019 di Universitas Padjadjaran. Beberapa artikel sudah di publish di jurnal nasional maupun internasional.

**ARTIKEL 5****Dr. Ir. Marina Sulistyati, MS.**

Lahir di Bandung 16 Agustus 1961. Menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas di Bandung. Pendidikan S1 di Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran lulus tahun 1985. Tahun 1989 melanjutkan Pendidikan Pasca Sarjana Bidang Gizi Masyarakat dan Sumberdaya Keluarga Program Pasca Sarjana IPB lulus tahun 1992. Tahun 2005 melanjutkan Pendidikan Doktor Pada Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian Universitas Padjadjaran lulus tahun 2010.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan diantaranya:

- Faktor Penentu Keberlanjutan Usaha Ternak Sapi Pasundan Melalui Koperasi. (Ketua). Penelitian Swadana Fakultas. (*Kasus Di KPBS Pangalengan*).
- Model Pengembangan Capacity Building Peternak Sapi Pasundan Dalam Aspek Peningkatan Nilai Tambah Produk Olahan Susu. (Anggota).
- Peran Pola Bantuan Ternak Domba Dalam Rangka Meningkatkan Fungsi Kelembagaan.
- Dampak Proses Pemberdayaan Terhadap Keberdayaan Peternak Domba.
- Knowledge and perception of pelung keeper's toward chicken contests in West Java, Indonesia.
- Hubungan Antara Faktor Internal dan Eksternal dengan Motivasi Peternak dalam Mengikuti Kontes Ayam Pelung.

**Ir. Hermawan, MS.**

Lahir di Bandung 16 Mei 1959. Menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas di Bandung. Pendidikan S1 di Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran lulus tahun 1984. Tahun 1988 Melanjutkan Pendidikan Pasca Sarjana Bidang Ilmu Ternak pada Program Pasca Sarjana IPB lulus tahun 1991. Sekarang sedang menempuh jenjang studi S3 di Fakultas Peternakan

Universitas Padjadjaran Sumedang

Beberapa penelitian yang telah dilakukan diantaranya:

- Produktivitas usaha ternak sapi perah skala kecil di KPBS Pangalengan Bandung
- Perkembangan usaha peternakan sapi perah sebelum dan sesudah program milk collection point diaktifkan kasus di TPK Loscimaung KPBS Pangalengan
- Evaluasi kepemilikan ternak sapi perah dan produktivitas sapi perah yang dikelola anggota Koperasi Peternak Bandung Selatan
- Evaluasi kondisi kandang dan peralatan pemerahan pada peternakan sapi perah rakyat di Jawa Barat
- Analisis karakteristik peternak sapi perah dalam penerapan good dairy farming practice
- Evaluation of Good Dairy Farming Practice Method on Dairy Farming in Subang District West Java Indonesia.

**Anita Fitriani, S.Pt., M.Sc.**

Lahir di Bandung, 24 Agustus 1980. Menyelesaikan Pendidikan di SD Babakan Tarogong V, SMPN 33, SMAN 18 di Bandung. Pendidikan Sarjana ditempuh di Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran di Sumedang, Master di Wageningen University di Belanda, dan sedang menempuh jenjang studi S3 di Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran di Sumedang.

Beberapa penelitian terakhir yang telah dipublikasikan adalah:

- (2017) The Optimation of Farmers Families' Revenue the Integration of Pasundan Cattle and Paddy Farming in West Java;
- (2018) Risk Preference od Farmer Beef Cattle Smallholder in West Java;

- (2019) Strategi Pengembangan Usaha Pemeliharaan Ayam Pelung di Kabupaten Cianjur;
- (2020) Kesukaan, Sikap, Kepuasan, dan Kesetiaan Peternak dalam Mengusahakan Sapi Pasundan di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat.

## ARTIKEL 6



### **Grace Natalia Marpaung, S.E., M.Si.**

Adalah seorang staf pengajar di Universitas Negeri Semarang (UNNES). Ia juga rajin menulis di Media Massa, Jurnal Penelitian. Alumni S2 dari Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro ini selalu bersahaja, bersikap rendah hati, dan bersahabat dengan siapapun. Jika ada pembaca yang mau mengenal lebih lagi dapat berkenalan: [gracenataliam@gmail.com](mailto:gracenataliam@gmail.com)



### **Arief Budiman**

Lahir di Pemalang, 12 Agustus 1998. saat ini ia sedang menyelesaikan pendidikan tinggi di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang (UNNES) dengan mengambil Program Studi Ekonomi Pembangunan S1. Ia aktif di organisasi kampus baik internal maupun eksternal sampai sekarang, dengan salah satu pencapaiannya menjadi ketua himpunan mahasiswa jurusan ekonomi pembangunan periode 2019/2020. Jika ingin lebih mengenal bisa langsung menyapanya di: [ariefbudiman012@students.unnes.ac.id](mailto:ariefbudiman012@students.unnes.ac.id)

## ARTIKEL 7



### **Dian Ayunita Nugraheni Nurmala Dewi, S.Pi., M.Si.**

Adalah Staf Pengajar pada Laboratorium Sosial Ekonomi Perikanan, Departemen Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Diponegoro. Bidang penelitian yang ditekuni adalah Ekonomi Perikanan. Aktif menulis artikel ilmiah yang diterbitkan pada jurnal nasional dan internasional. Berbagai pelatihan pengembangan pembelajaran telah diikuti. Seperti Pelatihan *Teaching Skill and Methodology: Content and Language Integrated Learning* (CLIL) kerjasama LP2MP dan IALF (Indonesia Australia Language Foundation) Bali dengan sertifikat *Teacher Training* dari University of Cambridge-UK (2011). Selain itu juga menulis buku sebagai pengembangan materi bahan ajar. Buku yang telah

diterbitkan adalah Statistika Dasar untuk Bidang Perikanan dan Kelautan yang terbit tahun 2019. Penulis juga aktif dalam kegiatan pertemuan ilmiah di tingkat nasional dan internasional baik sebagai pembicara maupun reviewer. Saat ini sedang menempuh studi doktoral di Program Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Ilmu Ekonomi dan Bisnis, Universitas Diponegoro dengan beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Pembaca dapat menghubungi penulis pada alamat surel: [dianayunita\\_nnd@live.undip.ac.id](mailto:dianayunita_nnd@live.undip.ac.id).

## ARTIKEL 8



### **Yerimias Manuhutu, SE., M.Sc.**

Adalah staf pengajar tetap di Universitas Pattimura yang gemar membaca. Menyelesaikan gelar Magister of Science di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan sekarang sementara menempuh program Doktor Ilmu Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang. Aktif menulis artikel dalam jurnal di berbagai perguruan tinggi nasional.

Penelitian lapangan dalam pengembangan ilmu dan kebijakan yang dilakukan secara mandiri maupun kerjasama institusi, utamanya dalam bidang ilmu ekonomi dan kebijakan publik.

## ARTIKEL 9



### **Dr. Lilis Siti Badriah, S.E., M.Si**

Adalah Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, sejak tahun 1998. Ia Lahir di Ciamis, 13 April 1972. Ia menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (IESP), dan menyelesaikan pendidikan Magister dan Doktor di Fakultas Ekonomi

dan Bisnis Universitas Padjadjaran Bandung, Program Studi Ilmu Ekonomi. Dengan latar belakang pendidikan bidang ilmu ekonomi, ia aktif melakukan berbagai penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta aktif menulis berbagai artikel ilmiah pada jurnal nasional dan jurnal internasional sesuai dengan bidang ilmunya tersebut. Alamat email yang dapat dihubungi: [lilissitibadriah@gmail.com](mailto:lilissitibadriah@gmail.com).

**Dra. Dijan Rahajuni, M.Si**

Merupakan salah seorang tenaga pendidik di Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Program studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsoed, sejak tahun 1988. Lahir di Purwokerto pada tanggal 11 Januari 1962. Pendidik S1 dan S2 diraih pada almahaternya sendiri, pendidikan SD ditamatkannya di SD Jatilawang IV, SMP di SMP Negeri 2 dan SMA di SMA Negeri 2 Purwokerto.

Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukannya terkonsentrasi pada masalah kemiskinan, kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat. Berbagai kajian penelitian dan pengabdian kepada masyarakatnya juga telah diseminarkan pada berbagai seminar internasional dan nasional, demikian juga artikel penelitian dan pengabdianannya telah diterbitkan pada berbagai jurnal nasional dan internasional. Selain sebagai tenaga pendidik juga aktif pada berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan. Alamat email yang bisa dihubungi: [dijan.rahajuni11@gmail.com](mailto:dijan.rahajuni11@gmail.com)

**ARTIKEL 10****Hanjar Giri Anggraini, S.Pd., M.Si.**

Perempuan bernama lengkap Hanjar Giri Anggraini, S.Pd., M.Si. ini lahir di Purworejo pada 29 November 1976. Menyelesaikan studi S1 tahun 2000 di Universitas Negeri Semarang (UNNES) pada fakultas ilmu sosial jurusan pendidikan ekonomi dan studi S2 tahun 2015 di Universitas Diponegoro (UNDIP) pada fakultas magister ilmu ekonomi dan studi pembangunan dengan konsentrasi

ekonomi publik dan keuangan daerah.

Mengawali karir sebagai guru honorer di SMK Yos Sudarso Rembang sejak tahun 2001 dan di SMA Negeri 2 Batang sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang sebagai ASN/PNS. Mengikuti berbagai organisasi profesi diantaranya sebagai Ketua MGMP Ekonomi tingkat Kabupaten Batang, anggota PGRI Kabupaten Batang, dan pengurus AGEI (MGMP Ekonomi) Tingkat Provinsi Jawa Tengah. Aktif pada kegiatan sosial kemasyarakatan sebagai ketua PKK RT dan sebagai ketua KPRI Kusuma. Karya tulis ilmiah yang penulis buat diantaranya pernah dimuat di Jurnal Pendidikan Ekonomi Dinamika Pendidikan UNNES (2014) dan Prosiding Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (2017). Prestasi yang pernah penulis ikuti adalah sebagai instruktur guru pemandu (2007-2009), guru berprestasi 3 kabupaten (2015), instruktur nasional guru pembelajar (2016), penulis dan perevisi soal nasional bidang ekonomi (2017-



2020), serta finalis (peringkat 5) olimpiade guru tingkat nasional 2017. Alamat surel [ragil\\_3tree@yahoo.co.id](mailto:ragil_3tree@yahoo.co.id), [hanjaranggraini@gmail.com](mailto:hanjaranggraini@gmail.com), dan nomor wa 082136578110.

## ARTIKEL 11



### **Dr. Agus Arifin, S.E., M.Sc.**

Lahir di Ambarawa, 1 Desember 1980, putra pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Siswadi dan Ibu Siti Asiyah. Sejak tahun 2005 penulis menjadi staf pengajar di Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (IESP) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto. Pendidikan S1 ditempuh di Jurusan IESP Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Soedirman dengan gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) (2000-2004). Gelar Master of Science in Economics (M.Sc.) diperoleh di Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (2006-2008). Selanjutnya, gelar Doktornya diraih di Program Doktor Ilmu Ekonomi (PDIE) Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro (2014-2019).

Penulis aktif melakukan penelitian, yaitu (1) DIKTI (PUPT, Hibah Bersaing, Penelitian Fundamental, Penelitian Produk Terapan, Riset Peningkatan Kompetensi, Penelitian Disertasi Doktor); (2) Bank Indonesia (Bantuan Penelitian (Banlit) Disertasi, Survey Pemantauan Harga, Riset Struktur Pasar dan Pola Distribusi Komoditas Penyumbang Inflasi, Riset Pemetaan Kemiskinan, dll.); (3) Pemda (Survey Pelayanan Publik, Kajian Potensi & Peluang Investasi, dll.).

Karya ilmiah yang dihasilkan berupa artikel ilmiah yang dimuat di jurnal internasional bereputasi (IJEP, 11(4), 2017, SCOPUS Q3), jurnal terakreditasi DIKTI Sinta 2 (EDAJ, JEJAK), Sinta 3 (Media Ekonomi dan Keuangan), Sinta 4 (EKO-REGIONAL); juga sebagai pemakalah pada *international conferences* (GCBSS (2015), IRSA (2015), ICEEBA (2016), IIMF (2017), ICIGR (2017), ICEBEES (2019), ICBAE (2018, 2020)), ICSCA (2020), serta pemakalah pada seminar nasional (SCA, LPPM UNSOED).

## ARTIKEL 12

**Dr. E. Caroline**

**Caroline** atau dipanggil **Linda** Lulus Sarjana Ekonomi dari IESP Undip 1999, lulus Magister dari MIESP Undip 2004, dan lulus Doktor Ilmu Ekonomi Undip 2018. Beberapa buku *best seller* yang dihasilkan antara lain : Buku Kajian dan Kebijakan Migrasi tenaga Kerja Propinsi Jawa Tengah terbit tahun 2019, Buku Aplikasi Data Spasial *Spillover* Tenaga Kerja dengan Software GeoDa 14.1. terbit April 2020, dan Buku dengan judul Aplikasi Ekonometrika Spasial dengan Software Stata “Kajian Tenaga Kerja Propinsi Jawa Tengah” terbit Juni 2020. Aktif dalam beberapa organisasi antara lain: Himpenindo, IPADI, ISEI Cab. Semarang, Forum Dosen Indonesia (FDI) Jateng, Perkumpulan Ahli Geospasial Indonesia (PAGI). Beberapa artikel telah dipublikasi dalam jurnal terakreditasi nasional dan jurnal internasional dengan fokus penelitian tentang Tenaga Kerja. Mendapatkan hibah bersaing 2012, dan Hibah PKPT 2018. Kontak wa 082133666925; surel : caroline,jateng@gmail.com

**Dr. Etty Puji Lestari, SE, M, Si.**

**Etty** nama panggilanannya, lulus Sarjana Ekonomi dari Universitas Islam Indonesia tahun 1997, lulus Magister dari MIESP Universitas Gadjah Mada tahun 2002 dan, lulus Doktor Ilmu Ekonomi Undip Tahun 2011. Pengalaman tahun 2010 s.d. 2011 Sandwich Program di Universitas Degli Siena, Italia. Sekarang bekerja sebagai Staff pengajar di Universitas Terbuka (UT) Jakarta. Sekarang menjabat Kaprodi Ekonomi Pembangunan Universitas Terbuka (UT). Aktif dalam pertemuan ilmiah, konferensi internasional, dan aktif publikasi artikel jurnal internasional. Prestasi yang diraih adalah Dosen Terbaik II Universitas Terbuka (UT) tahun 2012, dan Kaprodi berprestasi III Universitas Terbuka (UT) tahun 2015.

**Dr. Ceacilia Srimindarti, SE, M, Si**

**Sisil** nama panggilanannya, lulus Sarjana Ekonomi dari Universitas Sanata Dharma Yogyakarta tahun 1991, lulus Magister dari Akuntansi Universitas Gadjah Mada tahun 2002 dan, lulus Doktor Akuntansi Undip Tahun 2010. Aktif dalam penelitian internal Unisbank dan hibah DRPM. Aktif dalam pengabdian bagi Masyarakat, aktif publikasi jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional. Publikasi artikel antara lain: Does religiosity and morality undermine student percep-

tions of money ethics on tax evasion? Publikasi pada jurnal Revista Espacios, Vol 41, No 13, April 2020 (Q3). Alamat surel: [ceaciliasrimindarti@gmail.com](mailto:ceaciliasrimindarti@gmail.com)

### ARTIKEL 13



#### **Dr. Hastarini Dwi Atmanti, SE, MSi**

Penulis menyelesaikan studi Sarjana Ekonomi tahun 1998 dari Universitas Diponegoro dan Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan pada tahun 2002 juga dari Universitas Diponegoro. Sedangkan studi Doktoralnya diselesaikan pada tahun 2018 dari Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Airlangga. Penulis sebagai staf pengajar di FEB Universitas Diponegoro sejak 2002 sampai dengan sekarang. Saat ini penulis sebagai anggota tim TPMF FEB UNDIP.



#### **Evi Yulia Purwanti, SE, MSi**

Penulis menyelesaikan program S1 dan S2 nya dari Universitas Diponegoro dan saat ini penulis sedang menyelesaikan studi S3 nya dari Universitas Diponegoro. Sejak 1997, penulis sebagai staf pengajar di FEB Universitas Diponegoro. Penulis saat ini menjabat sebagai Ketua Program Studi S1 Ilmu Ekonomi FEB UNDIP.

### ARTIKEL 14



#### **Dyah Maya Nihayah, S.E., M.Si.**

Salah satu staf pengajar di Jurusan Ekonomi Pembangunan, Universitas Negeri Semarang. Kelahiran Klaten, 2 Mei ini memiliki menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta tahun 2001 dan berhasil menyelesaikan studi lanjut jenjang S2 Ilmu Ekonomi di universitas yang sama pada tahun 2005. Banyak melakukan penelitian di bidang Ekonomi Pembangunan, Ekonomi Perkotaan, Ekonomi Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Transportasi. Artikel-artikel karya pemikirannya telah banyak dimuat di jurnal-jurnal baik di tingkat nasional maupun internasional.

**Siti Aisyah Tri Rahayu,**

Adalah staf pengajar tetap pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret, Surakarta. Lahir di Cilacap, 27 September 1968. Ia mendapatkan gelas Sarjana Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada (1994). Selanjutnya Penulis meraih gelar Magister Sains (M.Si.) dibidang Ekonomi Publik (2001) dan gelar Doktor dalam bidang Moneter (2012) pada Program Magister Sains dan Doktor Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Penulis aktif melakukan penelitian khususnya dalam Bidang Ilmu Ekonomi Moneter, Keuangan dan Bank. Disamping itu, penulis mempublikasikan hasil karya ilmiahnya dalam berbagai jurnal ilmiah berreputasi. Saat ini Ia mengajar pada Program Sarjana dan Program Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan dan program Doktor Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret Surakarta.

**ARTIKEL 15****Fafurida, S.E., M.Sc.**

Merupakan salah satu staf pengajar di Jurusan Ekonomi Pembangunan, Universitas Negeri Semarang. Lulus Pendidikan S1 Jurusan Ekonomi Pembangunan di UPN "Veteran" Yogyakarta pada tahun 2005 dan berhasil menyelesaikan studi S2 Ilmu Ekonomi di UGM pada tahun 2008. Ia aktif melakukan kegiatan tridharma untuk memenuhi kinerjanya sebagai dosen. Fokus penelitiannya di bidang ekonomi regional, perencanaan pembangunan dan ekonomi pariwisata. Banyak artikel karyanya telah dimuat pada jurnal-jurnal baik di tingkat nasional maupun internasional.

**ARTIKEL 16****Nurul Aisyah, S.Pd.I., M.Pd.**

Adalah dosen tetap di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Beberapa tulisannya telah terbit di Jurnal terindeks Sinta dan Proceeding International terindeks Web of Science. Ia alumni dari S1 UMY Pendidikan Agama Islam, S2 UNY Manajemen Pendidikan. Usianya pun tergolong muda, lahir di desa kecil di Klaten 1991 lalu, Ia adalah sosok yang periang dan santun. Aktifitasnya selain

mengajar ia juga menjadi anggota UPM (unit penjaminan mutu) Fakultas Agama Islam UMY. Email: [nurulaisyah@umy.ac.id](mailto:nurulaisyah@umy.ac.id).



**Marsudi, M.Ag.**

Dosen Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Beberapa kali melakukan pengabdian masyarakat, baik yang didanai oleh LP3M UMY maupun dari Kemenag RI. Bersama penulis lain juga menerbitkan artikel pada jurnal Internasional yang terindeks Scopus maupun jurnal yang terindeks Sinta. Alumni S1 Sastra Arab UGM dan S2 UIN Sunan Kalijaga ini sedang menyelesaikan studi S3 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



**Deantari Dwikan Putri, S.T.**

Dean adalah mahasiswa Teknik Informatika UMY yang telah lulus satu tahun lalu, 2019. Tugas akhir yang telah ia susun sungguh menarik yaitu tentang pengembangan aplikasi driver online transportasi terjadwal untuk operator platform. Ia sosok mahasiswa berprestasi dan sangat lihai dalam pengembangan aplikasi-aplikasi kekinian.

**ARTIKEL 17**



**Afriyadi**

Lahir di Sintang 3 Mei 1971. Menyelesaikan pendidikan dasar hingga menengah di Sintang. Menamatkan pendidikan S1 di Universitas Pakuan Bogor, Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota. Kemudian melanjutkan studi ke jenjang pendidikan S2 pada Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik di Universitas Indonesia. Saat ini aktif sebagai Staf Pengajar di STIE Pembangunan Tanjungpinang dan Universitas Maririm Raja Ali Haji (UMRAH).

**ARTIKEL 18****Dr. Chairul Muriman Setyabudi, S.E., S.H., M.P**

Lahir di Madiun pada tanggal 13 Januari 1966, dari kecil sampai menamatkan pendidikan tingkat SMA diselesaikan pada SMA Negeri I di Kota Pasuruan, Jawa Timur. Melanjutkan pendidikan S1 pada Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang, bekerja sebagai Dosen pada Universitas Putra Bangsa Surabaya, memperoleh kesempatan pendidikan ke jenjang S2 yang diselesaikan pada Pascasarjana Universitas Brawijaya, dengan Program studi Ekonomi Sumber Daya, sambil menyelesaikan studinya kontributor juga menyelesaikan pendidikan S1 pada Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas WR Soepratman Surabaya. Dengan beasiswa BPPS kontributor melanjutkan studi jenjang S3 yang ditempuh pada Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya dengan kekhususan Ilmu Manajemen. Sambil menyelesaikan pendidikan S3, dijalani pula pendidikan S1 dan lulus Sarjana Hukum pada Universitas Putra Bangsa Surabaya. Pendidikan PKPA (advokat) diperoleh pada tahun 2019, yang diselenggarakan oleh 87 Law Firm, bersama Universitas Sahid Jakarta dan KAI. Kontributor juga menyelesaikan kursus dan lulus menjadi Asesor BAN PT.

Saat ini kontributor adalah Dosen Tetap Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Jakarta, pangkat akaedimik yang dimiliki adalah Lektor Kepala, dengan fokus pada bidang Ilmu Manajemen SDM, Perilaku Organisasi, dan Kepemimpinan. Sampai saat ini juga masih menjadi pengajar pada S2 Kajian Ilmu Kepolisian, Sekolah Kajian Global dan Stratejik Universitas Indonesia. Berbagai hasil penelitian sudah dipublikasikan pada jurnal internasional dan nasional, serta aktif menjadi presenter pada seminar internasional yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi Luar Negeri dan Perguruan Tinggi yang ada di Dalam Negeri. Konsen penelitian yang dilaksanakan saat ini adalah pada SDM Polri yang terdapat pada level Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat ( Bhabinkamtibmas), serta Pemolisian Demokratis. Selain kegiatan mengajar dan meneliti, kontributor sering menjadi nara sumber diberbagai kesempatan, seperti pada diseminasi dan workshop tentang Pendidikan Antikorupsi dan Pendidikan Lalu Lintas. Kegiatan sosial yang sampai saat ini dijalankan adalah Anggota PB IPSI, Ketua IV bidang Disiplin, Hukum, dan Sumber Daya PP Tapak Suci, Ketua Masjid Daarul Ilmi STIK-PTIK Jakarta, dan Pembina Yayasan Qolbun Salim Surabaya.

**ARTIKEL 19****Dr. Hedy Vanni Alam, S.Pd., M.Si.**

Lahir di Gorontalo, 30 April 1976 adalah Staf Pengajar di Universitas Negeri Gorontalo. Riwayat Pendidikan: S1 STKIP Gorontalo Tahun 1998, S2 di Universitas Negeri Makassar, dan Menempuh pendidikan S3 Lulus tahun 2014 di Universitas Negeri Jakarta pada bidang Ilmu Manajemen (MSDM). Aktif menulis artikel dalam jurnal nasional maupun internasional serta menulis Buku. Melakukan penelitian-penelitian lapangan dalam bidang manajemen (MSDM). Saat ini aktif di organisasi profesi ADI, P- ADRI, PGRI. Berniat ikhlas, bekerja cerdas menjadi moto pribadi penulis.

**ARTIKEL 20****Prof. Dr. P. Eko Prasetyo, S.E., M.Si.**

Email UNNES : [pekoprasetyo@mail.unnes.ac.id](mailto:pekoprasetyo@mail.unnes.ac.id).

Latar Belakang Pendidikan: S1: IESP Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kerjasama (STIKER) Tahun: 1988 s/d 1993

S2: IESP Pascasarjana UGM Tahun: 1996 s/d 1998

S3: IESP Pascasarjana UNPAD Tahun: 2004 s/d 2007

Bidang pengajaran: 1. Ekonomi Makro, 2. Ekonomi Mikro, 3. Ekonomi Industri.

Minat Penelitian: 1. Industri dan Kebijakan, 2. Pertumbuhan Ekonomi, 3. Daya Saing, 4. Pembangunan Ekonomi.

**ARTIKEL 21****Nurjannah Rahayu Kistanti, S.E., M.Si**

Merupakan salah satu staf pengajar di Jurusan Ekonomi Pembangunan, Universitas Negeri Semarang. Pendidikan terakhir S2 yang ditempuh di Program Studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Diponegoro. Ia aktif melakukan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. Fokus penelitiannya di bidang ekonomi moneter, ekonomi makro dan ekonomi pembangunan. Telah banyak publikasi artikel yang diterbitkan di jurnal baik nasional maupun internasional.

**Andryan Setyadharma, S.E., M.Si., Ph.D**

Merupakan salah satu staf pengajar di Jurusan Ekonomi Pembangunan, Universitas Negeri Semarang. Pendidikan terakhir S3 yang ditempuh di Program Studi Ilmu Ekonomi *Massey University, New Zealand*. Ia aktif melakukan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. Fokus penelitiannya di bidang ekonomi kependidikan dan model ekonometrika. Telah banyak publikasi artikel yang diterbitkan di jurnal baik nasional maupun internasional.

**ARTIKEL 22****Lola Kurnia Pitaloka, S.Pd., M.Pd.**

**(Scopus Id: 57212243020)**. Perempuan kelahiran Kudus pada 17 Desember 1994 ini menempuh pendidikan sarjana dan magisternya di Universitas Negeri Semarang dengan program keilmuan Pendidikan Ekonomi. Penulis saat ini tercatat sebagai dosen aktif di Jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Beliau juga merupakan penulis di jurnal internasional bereputasi dan memiliki faktor dampak dengan terindeks scopus pada Q3 dan Q4, selain itu beliau juga aktif menulis di jurnal nasional terakreditasi. Fokus riset penulis adalah pembelajaran kewirausahaan, ekonomi kreatif dan UMKM. Sejak tahun 2016, penulis sudah aktif mengkaji tentang permasalahan pendidikan ekonomi dan kewirausahaan bersama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kudus. Untuk menghubungi atau berdiskusi dengan beliau dapat mengirimkan di email: [lolakp@mail.unnes.ac.id](mailto:lolakp@mail.unnes.ac.id)

**Inaya Sari Melati, S.Pd., M.Pd**

**(Scopus ID: 57201075897)** adalah salah satu dosen muda di Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Beliau merupakan lulusan terbaik program S1 di jurusan yang sama pada tahun 2010. Gelar Magister Pendidikan diperoleh dari Universitas Negeri Semarang pada tahun 2013. Saat ini selain mengajar, beliau aktif menulis artikel ilmiah untuk diterbitkan di berbagai jurnal internasional dan nasional bereputasi. Bidang keahliannya adalah pendidikan kewirausahaan, ekonomi mikro dan *action research*. Selain kegiatan tri dharma perguruan tinggi, beliau aktif berkontribusi di berbagai bidang manajerial kampus. Beliau berperan aktif dalam pengem-



bangun kelas internasional sejak tahun 2017 dan pernah menjabat sebagai koordinator kelas internasional jurusan Pendidikan Ekonomi periode tahun 2018-2019. Saat ini beliau merupakan staf akademik Pusat Pemberdayaan Masyarakat di Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UNNES. Korespondensi dan diskusi lebih lanjut dengan beliau dapat dilakukan melalui email dengan alamat: [inaya.sari@mail.unnes.ac.id](mailto:inaya.sari@mail.unnes.ac.id).



### **Fikri Ardianto**

Laki-laki kelahiran Banyumas pada 27 Desember 1997 ini sedang menempuh pendidikan sarjana di Universitas Negeri Semarang dengan program studi Pendidikan Koperasi. Beliau juga mempunyai pengalaman organisasi seperti : OSIS SMA N 1 Patikraja, Komunitas Musik SMA N 1 Patikraja dan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi UNNES. Untuk menghubungi atau berdiskusi dengan beliau dapat mengirimkan di email : [fikriardianto27@gmail.com](mailto:fikriardianto27@gmail.com)

## **ARTIKEL 23**



### **Mega Mulianing Maharani, S.Pd., M.Pd**

Adalah seorang pengajar di Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Ia menyelesaikan studi jenjang S1 Pendidikan Bahasa Inggris dan S2 Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Negeri Semarang. Atas ijin Allah SWT, cita-cita mulia yang ia sematkan semasa kecil untuk menjadi seorang pengajar, kini ia jalani. Meggandrungi dunia pendidikan menjadikan ia senantiasa belajar menggali ilmu baru dan menyalurkannya kepada anak didiknya. Menjadi sosok yang senantiasa berbagi untuk sesama demi kemajuan bersama merupakan pegangan hidupnya.



### **Siti Zakiyatul Lutfiah**

Adalah mahasiswa semester 5 Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Ia lahir 18 Juli 1999 dan tinggal di Desa Kerangkulon Wonosalam Demak. Ia merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Ia sedang mengembangkan kemampuan menulis esai, artikel ataupun jurnal. Menjadi seorang penulis terkenal

merupakan impiannya. Untuk mewujudkan impian itu, ia selalu ingin mencoba menuangkan idenya ke dalam tulisan dan mengikuti kompetisi.



### **Amalia Nur Fauziah**

Ia adalah seorang mahasiswi Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Ia lahir 19 Februari 1999. Mahasiswi yang berasal dari Mrangge, Demak ini sedang tertarik menjajahi dunia tulis-menulis. Ia mengawalinya sejak semester 3 ketika belajar Mata Kuliah *Essay Writing*. Ia memiliki obsesi yang tinggi untuk bisa melaju ke kompetisi Nasional ataupun Internasional. Ia selalu tak gentar mengikuti berbagai pelatihan menulis untuk mewujudkan keinginannya itu.

## **ARTIKEL 24**



### **Sri Utami, S.S., M.A., M.Pd.**

Saat ini Sri Utami bekerja sebagai dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang (UNNES). Alumnus S1 Sastra Inggris di UNNES. S2 Pendidikan Bahasa Inggris di UNNES dan Studi Pembangunan (Development Studies) di International Institute of Social Studies, Erasmus University, Belanda. Bidang Ilmu yang diminati Pendidikan Bhs Inggris, *English for Specific Purposes (ESP)*, *Social Studies* dan Studi Pembangunan. Untuk berkirim email bisa melalui [sriutami@mail.unnes.ac.id](mailto:sriutami@mail.unnes.ac.id).



### **Wijang Sakitri, S.Pd., M.Pd**

Wijang Sakitri, S.Pd., M.Pd adalah dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang (UNNES). Gelar sarjana pada Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris UNNES diperolehnya di tahun 2005 dan pada tahun 2010, gelar Magister Pendidikan juga diperolehnya di UNNES. Saat ini, untuk memperkaya keilmuannya, studi pada program Pasca Sarjana UNNES jurusan Pendidikan Ekonomi sedang ditempuhnya. Ketertarikannya adalah pada riset tentang *English for Specific Purposes (ESP)*, *Teaching English as a Foreign Language (TEFL)*, dan pendidikan ekonomi.



**Karsinah, S.E., M. Si.**

Email UNNES : [iinkarsinah@mail.unnes.ac.id](mailto:iinkarsinah@mail.unnes.ac.id)

Latar Belakang Pendidikan : S1: Univ. Jenderal Soedirman

Tahun: 1990 s/d 1995. S2: UGM Tahun: 2004 s/d 2007

Bidang pengajaran: Ekonomi Syariah, Matematika Ekonomi, Ekonomi Moneter. Minat Penelitian: Bidang Moneter/Perbankan, Bidang Syariah, Bidang UMKM

### **Rizki Annisa**

Saat ini Rizki Annisa merupakan mahasiswi yang sedang menempuh semester akhir program sarjana Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi di Universitas Negeri Semarang (Unnes). Untuk berkirim email bisa melalui [rizkiannisa999@gmail.com](mailto:rizkiannisa999@gmail.com)



**Lusiana Puspita Sari**

Sebagai mahasiswa di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang (UNNES) dengan mengambil konsentrasi Ekonomi Moneter di Prodi Ekonomi Pembangunan. Aktif dalam kegiatan organisasi dan sosial masyarakat. Memiliki pengalaman dalam asistensi dosen, penelitian serta laboratorium selama berkuliah. Untuk berkirim email bisa melalui [lusianaps@students.unnes.ac.id](mailto:lusianaps@students.unnes.ac.id).

### **ARTIKEL 25**



**Pipit Novita, S.Pd, M.Pd.**

Adalah staf pengajar di Universitas Muhammadiyah Jakarta yang sedang melanjutkan pendidikan S3 di University of Bristol, Inggris. Mempunyai pengalaman mengajar dari tingkat TK sampai universitas. Memiliki minat pada penelitian yang berhubungan tentang kualitas pendidikan, guru dan pendidikan keguruan. Aktif mengikuti dan presentasi di konferensi pendidikan tingkat nasional dan internasional. Mempunyai harapan untuk bisa menjadi manusia yang berguna bagi sesama dan berkontribusi terhadap pembangunan di Indonesia.

**ARTIKEL 26****Avi Budi Setiawan, SE., M.Si, CIQaR**

Avi Budi Setiawan, Lahir di Grobogan 29 Agustus 1987. Sejak kecil memang telah bercita-cita menjadi seorang peneliti. Tak heran jika di kamar rumahnya semasa kecil dibuat layaknya laboratorium. Pendidikan S1 diselesaikan di Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Unnes tahun 2009. Pendidikan S2 Ditempuh di Universitas Diponegoro dan lulus tahun 2012 pada Program Magister

Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan. Sejak tahun 2014 telah mengabdikan sebagai dosen tetap PNS di Jurusan Ekonomi Pembangunan FE Unnes, almamater tempatnya menyelesaikan S1.

Penulis telah menyelesaikan dua buku dengan judul Pengantar Ekonomi Pertanian: Sebuah Pendekatan Empiris. Adapun buku keduanya adalah Karikatur Nusantara (Sisi Lain Pembangunan Indonesia), Penulis aktif menulis artikel di beberapa surat kabar dan melakukan publikasi ilmiah di berbagai forum nasional dan internasional. Beberapa hasil penelitiannya telah dipublikasikan dalam Jurnal ilmiah nasional dan prosiding internasional. Bidang minatnya adalah ekonomi pertanian dan *green economy*.

**ARTIKEL 27****Prof. Dr. Dewi Liesnoor Setyowati, M.Si.**

Prof. Dr. Dewi Liesnoor Setyowati, M.Si. beliau lahir di Yogyakarta, 11 Agustus 1962, dosen jurusan Geografi FIS Universitas Negeri Semarang, NIDN: 0011086208, Google scholar ID : 2CZ6afEAAAAJ&hl=en, Sinta ID : 5983697, Scopus ID : 57194268597. Beliau memiliki pengalaman stukturan dan organisasi antara lain 1. Ketua Program Studi Geografi, 2. Sekretaris Jurusan Geografi, 3. Ketua

Badan Pengembangan Konservasi, 4. Ketua Gugus Penjaminan Mutu FIS Tahun, 5. Ketua program Studi S2 Pendidikan IPS Pascasarjana UNNES, 6. Koordinator Program Studi S2/S3 PIPS Pascasarjana UNNES, 7. Koordinator Program Studi S3 Pendidikan IPS, 8. Asesor BANPT, 9. Evaluator Program Studi Baru Dir Kelembagaan Dikti, 10. Forum DAS Jawa Tengah, 11. Pengurus Ikatan Geograf Indonesia, 12. Anggota Asosiasi Kartograf Indonesia, 13. Anggota APRIPSI (Asosiasi Prodi Pendidikan IPS Indonesia). **Pakar:** Konservasi Lingkungan untuk Antisipasi Bencana.

Prof. Dr. Dewi Liesnoor Setyowati, M.Si. memperoleh gelar Sarjana (S1) Geografi, Universitas Gadjah Mada (Lulus 1986), Magister(S2) Geografi, Universitas Gadjah Mada (Lulus 1996), Doktor (S3) Geografi, Universitas Gadjah Mada (Lulus 2009). Disertasi beliau yang berjudul “Hubungan Hujan dan Limpasan pada Berbagai Dinamika Spasial Penggunaan Lahan Di DAS Kreo Jawa Tengah” menjelaskan perubahan penggunaan lahan di DAS Kreo diikuti dengan peningkatan aliran permukaan sehingga terjadi peningkatan debit maksimum aliran sungai. Hal ini terlihat dari data debit maksimum Kali Kreo, terjadi peningkatan nilai debit maksimum, terutama pada tahun 1993, 2001, 2003, dan 2006.



**Prof. Dr. Sucihatiningsih Dian Wisika Prajanti, M. Si.**

Beliau lahir di Magelang, 09 Desember 1968, dosen jurusan Ekonomi Pembangunan FE Universitas Negeri Semarang, NIDN: 0009126806, Google scholar ID: pJvOZncAAAAJ, Sinta ID: 257591, Scopus ID: 56590011200. Beliau memiliki pengalaman stukturan antara lain sebagai 1. Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan (Tahun 2010), 2. Ketua Jurusan EKonomi Pembangunan (Tahun 2014), 3. Ketua Pengembang Bisnis (2017), 4. Kepala Pusat Inovasi dan Komersialisasi (2019), 5. Anggota Senat Universitas. Beliau juga mempunyai tambahan diantaranya 1. Sekretaris Majelis Profesor, 2. Ketua Komisi Pengembangan Ilmu, 3. Team Akselerasi Universitas, 4. Team PAK Guru Besar UNNES, 5. Asesor BAN PT, 6. Asesor Sertifikasi Dosen, 7. Asesor Sertifikasi Guru, 8. Ketua Bidang Riset Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Semarang, 9. Reviewer Penelitian Nasional, 10. Reviewer Penelitian RISPRO LPDP, 11. Reviewer Jurnal Bereputasi Emerald (Scopus), 12. Reviewer Jurnal Nasional Sinta 2 (Jurnal Ekonomi Pembangunan (JEP), Economic Journal of Emerging Markets (EJEM), Jurnal Ekonomi dan Kebijakan (JEJAK), Jurnal Komunitas, Jurnal Economia, Economics Development Analysis Journal (EDAJ), 13. Chief Editor Journal of Economic Education. Beliau saat ini menjadi anggota organisasi Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia dan Forum Dewan Guru Besar Indonesia (FDGBI)

Prof. Dr. Sucihatiningsih Dian Wisika Prajanti, M. Si. memperoleh gelar Sarjana S1 Pendidikan Ekonomi IKIP Yogyakarta (Lulus 1992), Magister S2 Kependudukan Universitas Gadjah Mada (Lulus 1996), Doktor S3 Ekonomi Pembangunan Universitas Diponegoro (Lulus 2010), Peserta Program Sandwich di Universiti Putra Malaysia (tahun 2009).

**ARTIKEL 28****Maylia Pramono Sari, SE, M.Si, Akt, CA, ACPA**

Lahir di Ngawi, 03 Mei 1980. Lulus Sarjana Ekonomi (SE) dari STIE YKPN Yogyakarta Tahun 2002; Magister of Sains (M.Si) Universitas Gadjah Mada Tahun 2004 dan Program Profesi Akuntansi (PPA) Universitas Diponegoro Tahun 2010. Bekerja sebagai Dosen di Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang sejak tahun 2005 hingga sekarang. Pernah mengikuti Pendidikan Profesi berupa Diklat Auditor Internal pada Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA) Tahun 2010; Associated Certified of Public Accountant (ACPA) pada Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) Tahun 2018 dan Sertifikasi Pemeriksa pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Tahun 2019.

**Surya Raharja, SE, M.Si, Ak, CA, PhD**

Lahir di Yogyakarta, 25 Mei 1976. Lulus Sarjana Ekonomi (SE) dari Universitas Diponegoro Tahun 2001; Magister of Sains (M.Si) Universitas Gadjah Mada Tahun 2004 dan Program Doktor (S3) University of Southampton (UoS) Tahun 2018. Bekerja sebagai Dosen di Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro sejak tahun 2006 hingga sekarang. Pernah mengikuti Certified of Public Accountant (CPA) pada Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) Tahun 2.

**ARTIKEL 29****Prof. Dr. Etty Soesilowati, M.Si**

Staf pengajar di Universitas Negeri Semarang sejak 1989 hingga kini. Terlahir di Malang, 18 April 1963. Pendidikan Dasar hingga menengah diselesaikan di Malang. Pendidikan S1 & S3 di selesaikan di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, sedangkan Pendidikan S2 nya diselesaikan di IPB. Aktif melakukan berbagai Riset serta Pengabdian dengan sumber pendanaan Kementerian Pendidikan Tinggi/BRIN, Kementerian Pariwisata, Pemerintah Daerah/Propinsi, POLDA maupun bekerjasama dengan swasta seperti PT. Pertamina, Petronas Ltd, dan UNICEF. Aktif menulis di berbagai jurnal internasional/nasional maupun buku, dan dipercaya menjadi Reviewer Penelitian Nasional

sejak 2008 hingga kini. Pernah bergabung pada organisasi non pemerintah LSPD dan YSS sebagai *Community Developmen Specialist (CDS)* sejak 1998 hingga 2003. Alamat email: [ettysoesilowati@yahoo.com](mailto:ettysoesilowati@yahoo.com)



**Nana Kariada Tri Martuti**

Lahir di Semarang, 16 Maret 1966. Pendidikan SD hingga Sarjana di jalani di Kota Semarang. Sarjana Perikanan diperoleh dari UNDIP Tahun 1989, Magister Ilmu Lingkungan dari UGM Tahun 2001 dan Doktor dari DIL UNDIP Tahun 2016. Menjadi dosen pada Jurusan Biologi FMIPA UNNES tahun 1993, dengan mata kuliah pokok Pendidikan Konservasi, Toksikologi Lingkungan, dan

Biologi Perairan.

Telah melakukan berbagai penelitian DRPM Kemenristekdikti seperti Fundamental, Hibah Bersaing, dan PTUPT. Melakukan kegiatan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat di Kota Semarang bekerjasama dengan Pemkot Kota Semarang, ACCCRN, Mercy Corp, serta berbagai BUMN dan swasta. Terlibat dalam City Tim dan kegiatan Kelompok Kerja Mangrove Kota Semarang. Menjadi narasumber dan pemakalah pada kegiatan seminar lingkungan dan pemberdayaan masyarakat.